



RPJMD

Kota Payakumbuh

TAHUN 2025 - 2029





WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
5. Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh
Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALI KOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Payakumbuh.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 bertujuan sebagai pedoman dalam:

- a. menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan Daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama lima tahun agar mekanisme perencanaan dan pembangunan Daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah;
- b. penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
- c. penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD Tahun 2025-2045.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 6

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 memuat mengenai:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum Daerah;
 - c. visi, misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 Agustus 2025
WALI KOTA PAYAKUMBUH,



ZULMAETA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah Kota Payakumbuh adalah upaya bersama yang terencana secara sistematis untuk peningkatan kualitas kehidupan dan merealisasikan seluruh potensi secara berkesinambungan. Hakikat pembangunan Daerah adalah mewujudkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat (2), menyatakan dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa

“Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD”. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan daerah melalui Bappeda untuk menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

Kemudian dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Payakumbuh menjadi tonggak penting dalam upaya sinkronisasi pembangunan daerah, provinsi, dan nasional, membuktikan komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan secara terkoordinasi. Selain itu dokumen RPJMD ini juga merupakan bagian integral dari upaya pemenuhan target kinerja pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, yang mencerminkan komitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan secara bersinergi.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam pasal 70 ayat (2) menyatakan Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah

tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik. maka Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 perlu ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029



RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

BAB PENDAHULUAN

I

1. LATAR BELAKANG	I-1
2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-3
3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA	I-9
4. MAKSUD DAN TUJUAN	I-13
A. Maksud Penyusunan RPJMD	I-13
B. Tujuan Penyusunan RPJMD	I-13
5. SISTEMATIKA PENULISAN	I-14

BAB GAMBARAN UMUM DAERAH

II

1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
1). Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-1
2). Potensi Sumber Daya Alam	II-3
A). Potensi Karst Sumber Air Baku dan Wisata	II-3
3). Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-5
A). Kapasitas Air Baku	II-5
4). Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-8
A). Ketahanan Pangan	II-8
B). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	II-9
C). Ketersediaan Pangan Utama	II-10
D). Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	II-11
E). Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman	II-12
F). Proyeksi Kebutuhan Air Bersih	II-12
G). Penggunaan Energi	II-14
H). Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik	II-16
5). Lingkungan Hidup Berkualitas	II-16
A). Kualitas Lingkungan Hidup	II-16
B). Kawasan Lindung Kota Payakumbuh	II-19
C). Pengawasan Izin Lingkungan	II-19
D). Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	II-20
E). Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	II-21
F). Persentase Pengelolaan Sampah	II-21
G). Operasionalisasi TPA/TPS-3R/TPS	II-21
H). Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	II-23

Pengolahan Sampah	
I). Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	II-23
J). Limbah B3	II-24
6). Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-24
A). Perubahan Iklim	II-26
B). Persentase Penurunan Emisi GRK	II-26
(1). Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	II-26
(2). Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	II-27
C). Kebencanaan	II-27
D). Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup	II-28
7). Demografi	II-39
A). Jumlah Penduduk, Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Tidak Produktif, Penduduk Usia Lanjut dan Angka Ketergantungan	II-39
B). Rasio Penduduk	II-40
C). Kepadatan Penduduk	II-41
D). Struktur dan Karakteristik Penduduk	II-42
(1). Struktur Penduduk Berdasarkan Usia	II-42
(2). Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	II-44
(3). Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-44
E). Proyeksi Demografi	II-45
B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-47
1). Kesejahteraan Ekonomi	II-47
A). PDRB Perkapita	II-47
B). Pertumbuhan Ekonomi	II-48
C). Indeks gini	II-52
D). Tingkat Kemiskinan	II-53
E). Pengangguran Terbuka	II-54
F). Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	II-55
G). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II-56
H). Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	II-56
I). Proporsi Kontribusi PDRB Kota Payakumbuh	II-57
J). Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	II-58
K). Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	II-59
L). Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan	II-59

M). Total Kredit/PDRB	II-60
N). Rasio PDRB Jasa Keuangan	II-60
O). Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-61
P). Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Per-Bulan	II-62
Q). Produktifitas Total Daerah	II-63
2). Kesehatan Untuk Semua	II-63
A). Usia Harapan Hidup	II-63
B). Angka Kematian Ibu	II-64
C). Prevalensi Stunting	II-64
D). Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	II-65
E). Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkolosis	II-66
F). Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	II-66
G). Indeks Pembangunan Keluarga	II-67
3). Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-67
A). Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional	II-68
B). Rata-Rata Lama Sekolah	II-68
C). Harapan Lama Sekolah	II-69
D). Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	II-69
E). Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	II-70
F). Indeks Pendidikan	II-71
G). Perpustakaan	II-71
H). Indeks Masyarakat Digital Indonesia	II-72
4). Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-73
A). Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	II-73
B). Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	II-73
5). Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-74
A). Indeks Kerukunan Umat Beragama	II-74
B). Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-74
6). Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	II-75
A). Indeks Perlindungan Anak	II-75
B). Indeks Pembangunan Keluarga	II-76
C). Indeks Ketimpangan Gender	II-76
D). Indeks Pembangunan Gender	II-77
E). Indeks Pembangunan Pemuda	II-77
C. ASPEK DAYA SANG DAERAH	II-77

1). Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-77
A). Angka Ketergantungan	II-77
2). Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	II-79
A). Rasio PDRB Industri Pengolahan	II-79
B). Rasio PDRB Akomodasi Makan Dan Minum	II-79
C). Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	II-80
D). Rasio Kewirausahaan	II-80
E). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-80
F). Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	II-81
G). Indeks Inovasi Daerah	II-81
3). Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	II-82
A). Indeks Ekonomi Hijau	II-82
B). Rasio PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan	II-82
4). Transformasi Digital	II-83
A). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	II-83
5). Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-84
A). Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok	II-84
B). Pembentukan Modal Tetap Bruto	II-84
C). Ekspor Barang dan Jasa	II-85
6). Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-86
A). Indeks Infrastruktur Kota	II-86
B). Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	II-86
7). Stabilitas Ekonomi Makro	II-87
A). Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	II-87
B). Tingkat Inflasi	II-87
C). Stabilisasi Harga Beras, Cabe dan Bawang	II-88
D). Nilai Transaksi Saham Per-Kapita Per-Rupiah	II-89
D. ASPEK PELAYANAN UMUM	II-90
1). Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegras dan Adaptif	II-90
A). Indeks Reformasi Hukum	II-90
B). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II-91
C). Indeks Pelayanan Publik	II-92
D). Survey Penilaian Integritas (SPI)	II-92
2). Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	II-93
A). Persentase Penegakan Perda	II-94
B). Indeks Ketentraman dan Ketertiban	II-95
C). Angka Kriminalitas	II-95

D).	Cakupan Linmas	II-96
E).	Persentase Penurunan Pelanggaran Tantribum	II-96
3).	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-96
A).	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan	II-96
4).	Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah	II-97
E.	EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR	II-109
1).	Indikator Makro	II-110
2).	Indikator Kinerja Utama	II-111
3).	Indikator Kinerja Daerah	II-114
F.	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	II-124
G.	KERJA SAMA DAERAH	II-127
H.	RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH APBN DAN/ATAU PROVINSI DI KABUPATEN/KOTA	II-130
I.	BUMD YANG MENDUKUNG KINERJA PELAYANAN PEMDA	II-131
J.	CAPAIAN PROYEKSI SDG'S/TPB (TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)	II-137
2	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	II-157
A.	REALISASI KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020-2024	II-157
1).	Kinerja Pelaksanaan APBD	II-157
A).	Pendapatan Daerah	II-158
(1).	Pendapatan Asli Daerah	II-161
(2).	Pendapatan Transfer	II-162
(3).	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	II-164
B).	Belanja Daerah	I-164
C).	Pembiayaan Daerah	II-166
2).	Neraca Daerah	II-167
B.	PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026-2030	II-171
1).	Proyeksi Pendapatan Daerah	II-171
2).	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	II-175
A).	Pendapatan Asli Daerah	II-175
B).	Pendapatan Transfer	II-177
C).	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	II-177
3).	Proyeksi Belanja Daerah	II-180
4).	Arah Kebijakan Belanja Daerah	II-183
5).	Proyeksi Pembiayaan Daerah	II-187
6).	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	II-188
7).	Proyeksi Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan <i>Earmark</i>	II-189
8).	Arah Kebijakan Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat	II-190

serta Prioritas Utama dan *Earmark*

9).	Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah	II-193
3	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	II-194
A.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-194
1).	Permasalahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-194
2).	Permasalahan Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah	II-196
3).	Permasalahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum	II-196
A).	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-196
(1).	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	II-196
(2).	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	II-197
(3).	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-197
(4).	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	II-198
(5).	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-198
(6).	Urusan Pemerintah Bidang Sosial	II-198
B).	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-199
(1).	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	II-199
(2).	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-199
(3).	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	II-200
(4).	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	II-200
(5).	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	II-200
(6).	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-200
(7).	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-201
(8).	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-201
(9).	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	II-201
(10).	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	II-202
(11).	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-202
(12).	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	II-202
(13).	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan	II-202

	dan Olahraga	
	(14). Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	II-202
	(15). Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	II-203
	(16). Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	II-203
	(17). Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	II-203
	(18). Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	II-203
C).	Urusan Pemerintahan Pilihan	II-204
	(1). Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	II-204
	(2). Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	II-204
	(3). Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	II-204
	(4). Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	II-205
	(5). Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	II-205
D).	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-205
	(1). Unsur Sekretariat Daerah	II-205
	(2). Unsur Sekretariat DPRD	II-205
E).	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah	II-206
	(1). Unsur Perencanaan	II-206
	(2). Unsur Keuangan	II-206
	(3). Unsur Kepegawaian	II-206
	(4). Unsur Pendidikan dan Pelatihan	II-206
	(5). Unsur Penelitian dan Pengembangan	II-207
F).	Unsur Pengawasan	II-207
G).	Unsur Kewilayahan	II-207
H).	Unsur Pemerintahan Umum	II-207
4).	Permasalahan Terkait Kajian Lingkungan	II-207
B.	ISU STRATEGIS DAERAH	II-209
	1). Identifikasi Isu Strategis	II-209
	2). Rumusan Isu Strategis	II-238
BAB VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		
III		
1	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	III-1
A.	Visi dan Misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045	III-2
	1). Visi dan Sasaran Visi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045	III-2
	2). Misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045	III-2
	3). Arah Dan Sasaran Pembangunan RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045	III-3
B.	VISI DAN MISI RPJMN TAHUN 2025-2029	III-6
	1). Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029	III-6
	2). Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029	III-7

C.	VISI DAN MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029	III-8
1).	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-8
2).	Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-8
D.	VISI DAN MISI RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029	III-11
1).	Visi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029	III-11
2).	Misi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029	III-15
3).	Keselaran Visi Dan Misi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 Dengan Visi dan Misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045	III-18
4).	Keselaran Visi dan Misi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan Visi, Misi RPJMN Tahun 2025-2029, dan Visi, Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029	III-20
5).	Tujuan dan Sasaran	III-22
2	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-32
A.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	III-32
1).	Strategi	III-32
2).	Arah Kebijakan	III-35
B.	PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	III-51
C.	ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP FOKUS PRIORITAS RPJMN TAHUN 2025-2029	III-88
1).	Penurunan Kemiskinan	III-88
2).	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	III-89
3).	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	III-91
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
1	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	IV-1
A.	DAFTAR PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DALAM MENCAPAI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
B.	INDIKATOR PROGRAM, TARGET DAN PAGU INDIKATIF PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026-2030	IV-2
C.	KESELARASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	IV-65
1).	Keselaran Program Prioritas RPJMN Dengan Program Perangkat Daerah	IV-65
2	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-74
A.	TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029 MELALUI	IV-74

INDIKATOR MAKRO

B. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR SASARAN VISI	IV-75
C. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	IV-75
D. TARGET PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (IKD)	IV-77
E. TARGET PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	IV-89

BAB PENUTUP V

1. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD	V-1
2. MANAJEMEN RESIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	V-2
3. TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH	V-3

LAMPIRAN

- | |
|--|
| LAMPIRAN 1 : META DATA INDIKATOR KINERJA |
| LAMPIRAN 2 : MANAJEMEN RESIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| LAMPIRAN 3 : POHON KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

DAFTAR TABEL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh	II-2
Tabel 2.2	Kapasitas Sungai di Kota Payakumbuh	II-5
Tabel 2.3	Kapasitas Embung di Kota Payakumbuh	II-5
Tabel 2.4	Luas Cekungan Air Tanah di Kota Payakumbuh	II-7
Tabel 2.5	Data Ketersediaan Pangan dan Perbandingan Skor PPH Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat	II-10
Tabel 2.6	Data Keamanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-11
Tabel 2.7	Standar Kebutuhan Air Berdasarkan Kategori Wilayah	II-13
Tabel 2.8	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030	II-13
Tabel 2.9	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik Kota Payakumbuh Skala Non Domestik Tahun 2025-2030	II-14
Tabel 2.10	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030	II-14
Tabel 2.11	Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030	II-16
Tabel 2.12	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2024	II-17
Tabel 2.13	Jumlah Kawasan Lindung Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-19
Tabel 2.14	Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan di Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024	II-19
Tabel 2.15	Rumah Tinggal Bersanitasi Layak Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024	II-20
Tabel 2.16	Rumah Tinggal Akses Sanitasi Aman Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024	II-21
Tabel 2.17	Volume dan Produksi Sampah Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-21
Tabel 2.18	Jumlah TPS 3R Per-kecamatan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-22
Tabel 2.19	Rasio Daya Tampung TPS Per satuan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-22
Tabel 2.20	Emisi Gas Rumah Kaca Kota Payakumbuh (Satuan Gg CO ₂) Tahun 2020-2024	II-26
Tabel 2.21	Jenis dan Tingkat Risiko Bencana di Kota Payakumbuh	II-28
Tabel 2.22	Potensi Resiko Multi Bahaya di Kota Payakumbuh	II-29
Tabel 2.23	Indeks Risiko Bencana	II-29
Tabel 2.24	Matriks Analisis Penentuan Prioritas Penanganan Risiko Bencana	II-31
Tabel 2.25	Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024	II-41
Tabel 2.26	Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Tahun	II-42

	2020-2024	
Tabel 2.27	Perhitungan Rasio Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2020– 2024	II-43
Tabel 2.28	Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2020-2024	II-44
Tabel 2.29	Tingkat Partisipasi Pendidikan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-45
Tabel 2.30	Parameter Proyeksi Penduduk 2025-2030	II-45
Tabel 2.31	Proyeksi Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030	II-45
Tabel 2.32	Proyeksi Penduduk Kota Payakumbuh Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2030	II-46
Tabel 2.33	Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030	II-46
Tabel 2.34	Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-48
Tabel 2.35	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-50
Tabel 2.36	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK (2010) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-51
Tabel 2.37	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-55
Tabel 2.38	Total Kredit per PDRB Kota Payakumbuh tahun 2020-2024	II-60
Tabel 2.39	Rasio PDRB Jasa Keuangan Kota Payakumbuh tahun 2020-2024	II-61
Tabel 2.40	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan di Kota Payakumbuh tahun 2020 s.d 2024	II-62
Tabel 2.41	Produktifitas Total Daerah di Kota Payakumbuh tahun 2020 s.d 2024	II-63
Tabel 2.42	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-66
Tabel 2.43	Klasifikasi Tingkat Pendidikan	II-70
Tabel 2.44	Perkembangan Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023	II-72
Tabel 2.45	Apresiasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2023	II-75
Tabel 2.46	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-76
Tabel 2.47	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-77
Tabel 2.48	Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2020-2024	II-79
Tabel 2.49	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2020-2024	II-79
Tabel 2.50	Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-80
Tabel 2.51	Indeks Inovasi Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-82
Tabel 2.52	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun	II-82

	2020-2024	
Tabel 2.53	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-84
Tabel 2.54	Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-86
Tabel 2.55	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-87
Tabel 2.56	Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-88
Tabel 2.57	Transaksi Saham per Kapita per (Juta Rupiah)	II-89
Tabel 2.58	Indeks Reformasi Hukum Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024	II-91
Tabel 2.59	Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-92
Tabel 2.60	Tingkat Pelanggaran Perda Pekat Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-94
Tabel 2.61	Tindak Kriminal Pelanggaran Perda di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-95
Tabel 2.62	Angka Kriminalitas di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-95
Tabel 2.63	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-96
Tabel 2.64	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-96
Tabel 2.65	Indikator Kinerja Kunci	II-98
Tabel 2.66	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-109
Tabel 2.67	Indikator Makro Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-111
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-112
Tabel 2.69	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2.70	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020-2024	II-124
Tabel 2.71	Bentuk Kerjasama Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Lain Tahun 2021-2024	II-128
Tabel 2.72	Daftar Kerjasama dengan Pihak Ketiga Kota Payakumbuh tahun 2021 s.d 2025	II-128
Tabel 2.73	Usulan Pembangunan Infrastruktur	II-131
Tabel 2.74	Sumber Air Baku PAMTIGO Kota Payakumbuh	II-131
Tabel 2.75	Data Perpipaan yang Terpasang di Kota Payakumbuh	II-133
Tabel 2.76	Data Jumlah Pelanggan, Cakupan pelanggan dan Tingkat Kehilangan Air Pamtigo Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-134
Tabel 2.77	Data Keuangan Pamtigo Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-134
Tabel 2.78	Penilaian Kinerja Menurut Permendagri No. 47 Tahun 1999	II-134
Tabel 2.79	Penilaian Kinerja Menurut Dinas PUPR Kota Payakumbuh	II-135

Tabel 2.80	Perbandingan Realisasi dengan Target dan Rencana Bisnis Tahun 2020-2025	II-136
Tabel 2.81	Capaian Tahun 2024 dan Proyeksi SDG'S/TPB Kota Payakumbuh Tahun 2025	II-137
Tabel 2.82	Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-157
Tabel 2.83	Realisasi APBD Tahun 2020-2024	II-160
Tabel 2.84	Tingkat Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019-2024	II-161
Tabel 2.85	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-161
Tabel 2.86	Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024	II-162
Tabel 2.87	Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024	II-162
Tabel 2.88	Perkembangan Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2020-2024	II-163
Tabel 2.89	Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2024	II-164
Tabel 2.90	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024	II-165
Tabel 2.91	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024	II-166
Tabel 2.92	Perkembangan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024	II-167
Tabel 2.93	Neraca Daerah Tahun 2020-2024	II-170
Tabel 2.94	Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030	II-173
Tabel 2.95	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026-2030	II-182
Tabel 2.96	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2030	II-187
Tabel 2.97	Belanja <i>Mandatory</i> Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025	II-190
Tabel 2.98	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh	II-193
Tabel 2.99	Isu Strategis Daerah	II-210
Tabel 2.100	Isu Pembangunan Global, Nasional dan Daerah	II-238
Tabel 3.1	Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap I	III-2
Tabel 3.2	Misi RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap I	III-2
Tabel 3.3	Arah dan Sasaran Pokok Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap I	III-3
Tabel 3.4	Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-8
Tabel 3.5	Sasaran Visi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029	III-14
Tabel 3.6	Keterkaitan Visi dengan Misi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029	III-17
Tabel 3.7	Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD	III-25
Tabel 3.8	Strategi Pentahapan Pembangunan RPJMD	III-32
Tabel 3.9	Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029	III-33
Tabel 3.10	Strategi, Arah Kebijakan dan Pentahapan RPJMD Tahun	III-36

	2025-2029	
Tabel 3.11	Rumusan Program Prioritas RPJMD	III-52
Tabel 3.12	Program Prioritas Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif sesuai Tujuan dan Sasaran	III-67
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030	IV-3
Tabel 4.2	Keselarasan Program Prioritas RPJMN dengan Program kerja RPJMD	IV-66
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Makro Tahun 2024-2030	IV-74
Tabel 4.4	Indikator Sasaran Visi tahun 2024-2030	IV-75
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2030	IV-76
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024-2030	IV-78
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024-2030	IV-89

DAFTAR GAMBAR

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

Gambar 1.1	Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-10
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Payakumbuh	II-1
Gambar 2.2	Titik Lokasi Survei Kawasan Karst Provinsi Sumatera Barat	II-3
Gambar 2.3	Kompleks Gua Ngalau Indah	II-4
Gambar 2.4	Singkapan Batu Gamping Kaki Bukit Simarajo	II-4
Gambar 2.5	Peta Cekungan Air Tanah Kota Payakumbuh	II-7
Gambar 2.6	Peta Potensi Air Tanah di Kota Payakumbuh	II-8
Gambar 2.7	TPA Regional Payakumbuh	II-22
Gambar 2.8	Peta Potensi Kerentanan terhadap Perubahan Iklim	II-27
Gambar 2.9	Peta Wilayah Rawan Bencana Kota Payakumbuh	II-28
Gambar 2.10	Peta Resiko Bencana Multi Bahaya	II-30
Gambar 2.11	Peta Resiko Bencana Banjir	II-32
Gambar 2.12	Peta Resiko Bencana Banjir Bandang	II-33
Gambar 2.13	Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrem	II-34
Gambar 2.14	Peta Resiko Bencana Gempa Bumi	II-35
Gambar 2.15	Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	II-36
Gambar 2.16	Peta Risiko Bencana Kekeringan	II-37
Gambar 2.17	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor	II-38
Gambar 2.18	Peta Jaringan Pamtigo	II-133
Gambar 3.1	Visi dan Misi RPJMN tahun 2025-2029	III-7
Gambar 3.2	Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029	III-7
Gambar 3.3	Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-8

DAFTAR DIAGRAM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

Diagram 2.1	Perkembangan Kapasitas Air Baku Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-6
Diagram 2.2	Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-9
Diagram 2.3	Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kota Payakumbuh 2020-2024	II-9
Diagram 2.4	Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-11
Diagram 2.5	Perkembangan Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Aman Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-12
Diagram 2.6	Perkembangan Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-15
Diagram 2.7	Perkembangan Produksi Listrik dan Kapasitas Listrik Terjual di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-15
Diagram 2.8	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-17
Diagram 2.9	Perkembangan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Tahun 2020-2024	II-18
Diagram 2.10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2020-2024	II-23
Diagram 2.11	Usaha dan atau Kegiatan Di Kota Payakumbuh yang Telah Memiliki Rincian Teknis	II-24
Diagram 2.12	Jumlah dan Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2019-2030	II-39
Diagram 2.13	Perkembangan dan Proyeksi Penduduk Produktif, Penduduk Tidak Produktif, Penduduk Usia Lanjut dan Angka Ketergantungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2019-2030	II-40
Diagram 2.14	Perkembangan Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>) Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2010-2024	II-40
Diagram 2.15	Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2010-2024	II-41
Diagram 2.16	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-43
Diagram 2.17	Jumlah Kelompok Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024	II-44
Diagram 2.18	Perkembangan PDRB Per-kapita ADHB dan ADHK Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II-48
Diagram 2.19	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh dibandingkan dengan Kota Bukittinggi, Solok, Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-49
Diagram 2.20	Perbandingan Indeks Gini Kota Payakumbuh dengan Kota Bukittinggi, Kota Solok, Padang Panjang, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-52
Diagram 2.21	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Payakumbuh,	II-53

	Kota Bukittinggi, Solok, Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024	
Diagram 2.22	Perbandingan Garis Kemiskinan Kota Payakumbuh, Bukittinggi, Solok dan Padang Panjang Tahun 2020-2024	II-54
Diagram 2.23	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-55
Diagram 2.24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-56
Diagram 2.25	Tingkat Produktifitas Angkatan Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 (juta/ kapita)	II-57
Diagram 2.26	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-57
Diagram 2.27	Perkembangan RT yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-58
Diagram 2.28	Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga Dibandingkan dengan PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-59
Diagram 2.29	Perkembangan Nilai Transaksi Saham Tahunan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-60
Diagram 2.30	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-62
Diagram 2.31	Usia Harapan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-64
Diagram 2.32	Angka Kematian Ibu Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-64
Diagram 2.33	Prevalensi Stunting Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-65
Diagram 2.34	Kasus Tuberkulosis di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-65
Diagram 2.35	Angka Penyembuhan Kasus Tuberkulosis di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-66
Diagram 2.36	Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Payakumbuh Tahun 2021-2023	II-67
Diagram 2.37	Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-68
Diagram 2.38	Harapan Lama Sekolah di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-69
Diagram 2.39	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas dengan Kualifikasi Pendidikan Tinggi di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-70
Diagram 2.40	Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-71
Diagram 2.41	Angka Ketergantungan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-78
Diagram 2.42	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-85
Diagram 2.43	Persentase Ekspor Barang dan Jasa Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-85
Diagram 2.44	Perbandingan Angka Inflasi	II-88

Diagram 2.45	Perkembangan Stabilitas Harga Tiga Bahan Pokok Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-89
Diagram 2.46	Capaian SPBE Kota Payakumbuh Tahun 2018-2024	II-92
Diagram 2.47	Capaian SPI Kota Payakumbuh Tahun 2021-2024	II-93
Diagram 2.48	Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	II-158
Diagram 3.1	Keterkaitan Visi RPJPD dengan Visi RPJMD	III-18
Diagram 3.2	Keterkaitan Misi RPJPD dengan Misi RPJMD	III-19
Diagram 3.3	Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan RPJMD Kota Payakumbuh	III-21
Diagram 3.4	Keterkaitan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan RPJMD Kota Payakumbuh	III-22

DAFTAR ISTILAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

ABS SBK	Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah
ADHB	Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	Atas Dasar Harga Konstan
AKI	Angka Kematian Ibu
AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APE	Anugerah Parahita Ekapraya
APIP	Aparat Pengawas Internal Pemerintah
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
ARG	Anggaran Renponsif Gender
ASFR	<i>Age Specific Fertility Rate</i>
ASI	Air Susu Ibu
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKPSDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BKD	Badan Keuangan Daerah
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BT	Bujur Timur
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CAT	Cekungan Air Tanah
CWIS	<i>Citywide Inclusive Sanitation</i>
DLH	Dinas Lingkungan Hidup
DM	Diabetes Melitus
Dinkes	Dinas Kesehatan
Dinsos	Dinas Sosial
Disdik	Dinas Pendidikan
DisdukCapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dishub	Dinas Perhubungan
Diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika
Diskop UKM	Dinas Koperasi, dan UKM
Disnakerperin	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Disparpora	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Distan	Dinas Pertanian
Distapang	Dinas Ketahanan Pangan
DP3AP2KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

DPKP	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
GRK	Gas Rumah Kaca
HIV	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HLS	Harapan Lama Sekolah
IDSD	Indeks Daya Saing Daerah
IKD	Indikator Kinerja Daerah
IKG	Indeks Ketimpangan Gender
IKK	Indikator Kinerja Kunci
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
IKP	Indeks Ketahanan Pangan
IKU	Indikator Kinerja Utama
IoT	<i>Internet of Things</i>
IPKA	Indeks Perlindungan Khusus Anak
IPKD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
IPKI	Izin Perluasan Kawasan Industri
IPUI	Izin Perluasan Usaha Industri
IUI	Izin Usaha Industri
IUKI	Izin Usaha Kawasan Industri
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IPS	Indeks Pembangunan Statistik
IRB	Indeks Reformasi Birokrasi
IUP	Indikator Utama Pembangunan
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
JUT	Jalan Usaha Tani
KEK	Kekurangan Energi Kronis
KesbangPol	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kepmendagri	Keputusan Menteri Dalam Negeri
KIA	Kesehatan Ibu dan Anak
KKBPK	Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
KLA	Kota Layak Anak
KRP	Kebijakan, Rencana dan/atau Program
KSP	Koperasi Simpan Pinjam
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUA	Kebijakan Umum APBD
Limbah B3	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
LP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LPM	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPPD	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
LS	Lintang Selatan
mCPR	<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i>
mdpl	meter di atas permukaan laut

Mendagri	Menteri Dalam Negeri
MMS	<i>Multiple Micronutrient Supplementation</i>
MPASI	Makanan Pendamping Air Susu Ibu
MTN	Manajemen Talenta Nasional
MUKP	Median Usia Kawin Pertama
NKV	Nomor Kontrol Veteriner
ODGJ	Orang Dengan Gangguan Jiwa
OSS-RBA	<i>Online Single Submission Risk Base Approach</i>
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PATBM	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBG	Persetujuan Bangunan Gedung
PD	Perangkat Daerah
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perumda	Perusahaan Umum Daerah
PKK	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PKN	Pusat Kegiatan Nasional
PKW	Pusat Kegiatan Wilayah
PPA	Prioritas dan Plafon Anggaran
PPKS	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PPLH	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
PSKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
PSU	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
PUSPAGA	Pusat Pembelajaran Keluarga
PUULH	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RAD PG	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
RAD PUG	Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender
RDTR	Rencana Detail Tata Ruang
RIPIN	Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
RIPJPID	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah
RJIT	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
RPIK	Rencana Pembangunan Industri Kota
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RT	Rukun Tetangga
RTH	Ruang Terbuka Hijau
RTLH	Rumah Tinggal Layak Huni
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RW	Rukun Warga
SatPol PP & PK	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
SDA	Sumber Daya Alam
SDG	Sumber Daya Genetik

SDM	Sumber Daya Manusia
Setdako	Sekretariat Daerah Kota
Setwan	Sekretariat Dewan
SIINas	Sistem Informasi Industri Nasional
SILPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
SPBE	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
SPI	Survey Penilaian Integritas
SPIP	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Tbc	Tuberkulosis
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
TTD	Tablet Tambah Darah
UKM	Usaha Kecil Menengah
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
USP	Unit Simpan Pinjam
UTTP	Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan
WMK	Wirausaha Merdeka
WTP	<i>Water Treatment Plan</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah disusun dalam suatu dokumen dengan jangka waktu berkala yaitu: (a) jangka waktu 20 tahun yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (b) jangka waktu 5 tahun yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan (c) jangka waktu tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh pada tanggal 20 Februari 2025 menandakan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan, dimana dokumen ini berisikan penjabaran dari visi, dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh dengan mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan aktual di Kota Payakumbuh, namun juga harus tetap selaras dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan melalui penentuan prioritas, sasaran, dan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

Oleh karenanya dapat dirangkum faktor yang melatar belakangi penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 antara lain:

a. Pergantian Kepala Daerah;

Pelantikan **Dr. dr. Zulmaeta, SP. OG., KFM** sebagai Wali Kota dan **Elzadaswarman, SKM., MPPM** sebagai Wakil Wali Kota pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 65 huruf c kepala daerah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD, dan pasal 142 point 4 Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

b. Penyelarasan terhadap Kebijakan Nasional;

Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 yang juga telah menyusun RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari visi dan misi serta janji-janji politik beliau saat kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dokumen ini harus dipedomani dan selaras dalam penyusunan RPJMD yang bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.

Selain pendekatan tersebut, dalam perencanaan pembangunan juga diterapkan pendekatan imperatif, di mana target capaian pembangunan sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi dan mengimplementasikan target tersebut secara konsisten dalam RPJMD.

c. Penyesuaian Rencana Pembangunan Daerah terhadap Perkembangan Situasi Sosial, Ekonomi, dan Teknologi;

Saat ini, situasi global yang dinamis baik sosial, ekonomi dan teknologi sangat mempengaruhi situasi regional, nasional bahkan situasi di Kota Payakumbuh sehingga perlunya penyesuaian cara pandang dalam menyikapi situasi yang dinamis ini. Langkah ini perlu dilakukan dalam perencanaan untuk menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh dalam 5 tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

d. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Layanan Publik;

Semakin besarnya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan melayani, menyebabkan birokrasi harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan informasi dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat. Salah satu tujuan utama RPJMD adalah meningkatkan kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan layanan sosial. Penyusunan RPJMD diharapkan dapat menjawab berbagai masalah yang ada, seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan sosial yang masih terjadi di berbagai daerah. RPJMD memuat sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas dengan indikator kinerja yang terukur sehingga dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam masa lima tahun ke depan.

e. Partisipasi Masyarakat;

Dalam pembangunan daerah, masyarakat bukan hanya sebatas obyek pembangunan akan tetapi juga sebagai subyek pembangunan yang berperan besar dalam mewujudkan kemajuan di suatu daerah. Proses penyusunan RPJMD diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan

dan harapan masyarakat. Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RPJMD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RPJMD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat Kota Payakumbuh, mengarah pada percepatan pembangunan daerah dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Selain itu DPRD selaku perwakilan masyarakat yang juga menjadi mitra Pemerintah Daerah secara politis melakukan pembahasan RPJMD ini dengan pemerintah Kota Payakumbuh.

f. Kondisi Keuangan Daerah;

Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka kebutuhan anggaran untuk melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai pelayan publik secara prima semakin meningkat. Untuk itu perlu disusun strategi pembiayaan pembangunan yang dapat seoptimal mungkin mengakses sumber-sumber pembiayaan selain dari dana transfer dari Pemerintah Pusat. Ketersediaan anggaran menjadi faktor penting dalam merencanakan pembangunan daerah. RPJMD harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang mungkin mengalami perubahan, baik dari sisi pendapatan daerah, dana alokasi pusat, maupun sumber pendanaan lainnya.

Secara keseluruhan, RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perwujudan komitmen lima tahun dari pemerintah Kota Payakumbuh untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari 4 tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang termuat dalam dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 20025-2045.

2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan untuk penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Jangka

Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri kesehatan Nomor 34 tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
39. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
40. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
42. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45) ;
43. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
44. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 20025-2045 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 68);

Disamping semua dasar hukum yang disebutkan di atas, tindak lanjut dari kebijakan pilkada serentak dan penyamaan periodesasi dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh 2010-2030, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan lainnya.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berdasarkan kondisi geografis, demografis dan potensi daerah dengan mempedomani Tema Kewilayahan Pembangunan Sumatera Barat di dalam RPJMN yaitu **“Mandala pengembangan agrikultur bernilai tinggi, ekonomi hijau, dan pariwisata kelas dunia, yang bersendi kearifan budaya lokal”** maka Kota Payakumbuh juga menjadi bagian dalam kunci kebijakan kewilayahan Sumatera Barat Jangka Panjang yaitu kawasan strategis agrikultur, kawasan perkotaan sebagai *growth pole* dan pusat pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah serta Kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.

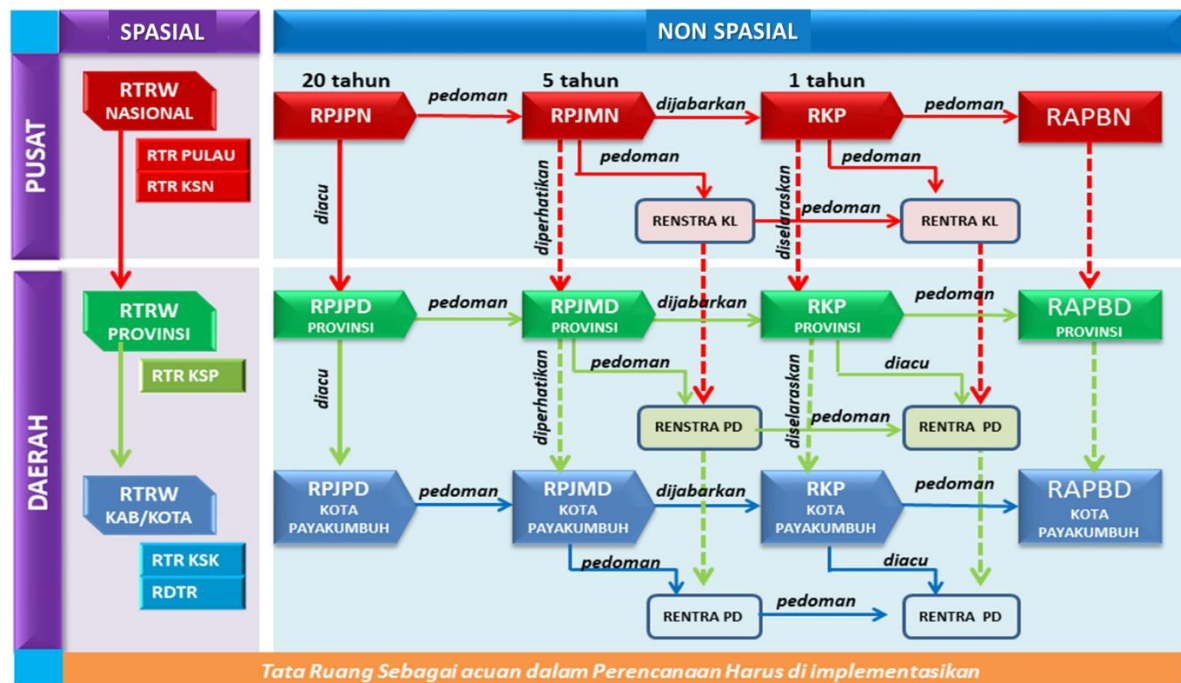
Dalam kaitan hubungan fungsional dengan dokumen perencanaan lain, selain memperhatikan RTRW Kota Payakumbuh, penyusunan dokumen ini juga memperhatikan dokumen RPJMD dan RTRW Kabupaten tetangga. Keterkaitan hubungan fungsional ini terutama pada program-program pembangunan sistem jaringan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan sinergitas perencanaan untuk pencapaian prioritas pembangunan kewilayahan maka diharapkan pembangunan terutama pada kawasan perbatasan dan sekitarnya akan dapat diintegrasikan.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholders. Dokumen perencanaan strategis sektoral ataupun spasial berupa Rencana Induk, Peta Jalan, Rencana Aksi pada Perangkat daerah baik jangka panjang ataupun jangka menengah menjadi bagian penting dan terkandung di dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen itu antara lain RPKD, RIPJPID, RAD PG, RAD PUG, RTRW, RDTR, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, Rencana Induk Kemajuan Kepemudaan, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum dan lain-lain.

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 nantinya akan menjadi acuan dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (RENJA) serta

prioritas dan plafon anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD ini setiap tahun dapat dicapai secara bertahap, sehingga proses pembangunan dapat terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya terlihat pada Gambar I-1

Gambar I. 1 Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender Pemerintah daerah beserta seluruh jajaran *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) juga menyusun kebijakan, program dan kegiatan responsif gender yang dituangkan di dalam RPJMD ini, selanjutnya digabungkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, sebagai bentuk responsif terhadap isu sentral permasalahan kesenjangan gender.

RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

a. RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan pencapaian Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Pembangunan Daerah dengan Visi Misi RPJMN Tahun 2025—2029 yang termuat dalam Asta Cita dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Payakumbuh.

b. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Sebagai salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat, Penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh berpedoman kepada RPJMD Provinsi

Sumatera Barat 2025-2029. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan hierarkis dan harus sinkron dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

c. RPJPD Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD yang diatur Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 juga mengacu sepenuhnya pada Visi, Sasaran Visi, Misi, Arah Pembangunan serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045.

d. RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030, melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh.

e. RKPD

Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi penyusunan sasaran dan prioritas Pembangunan RKPD mengacu sepenuhnya pada sasaran RPJMD.

f. Renstra PD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi PD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD pelaksana pembangunan.

g. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD adalah analisis menyeluruh yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029. KLHS menjadi panduan dan memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029. KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD, memastikan bahwa kebijakan

pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

h. Rancangan Teknokratik RPJMD

Rancangan Teknokratik RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun pemerintah daerah sebelum pemilihan kepala daerah. Dokumen ini disusun dengan pendekatan teknokratik. Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki hubungan yang erat. Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai bahan masukan utama dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen ini memberikan informasi yang komprehensif mengenai kondisi daerah, potensi, serta permasalahan yang ada, yang kemudian menjadi dasar bagi kepala daerah dalam merumuskan visi, misi, dan program pembangunan daerah. Dengan demikian, RPJMD yang telah disusun diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan potensi daerah, serta selaras dengan kondisi objektif yang telah diidentifikasi dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.

i. Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID)

RIPJPID adalah dokumen strategis yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengembangkan iptek di daerah. Dokumen ini mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memajukan Iptek dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

j. Evaluasi Capaian Pembangunan 5 Tahun terakhir

Evaluasi capaian pembangunan 5 tahun terakhir memberikan gambaran tentang realisasi kinerja indikator sasaran pokok yang mencapai maupun tidak mencapai target yang direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau terlampauinya target kinerja, kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut dalam RPJMD/RPJPD periode berikutnya dan implikasi yang timbul terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD yang dipedomani dalam RPJMD/RPJPD periode berikutnya.

k. Dokumen Perencanaan Pembangunan dan sektoral lainnya

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen kunci dalam perencanaan pembangunan daerah yang memiliki keterkaitan erat dan dasar penyusunan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti Dokumen RPKD, RAD PG, RAD PUG, RTRW, RDTR, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, Rencana Induk Pemajuan Kepemudaan, RPB, KRB dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum.

l. Hubungan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Rencana Sektoral Kabupaten 50 Kota

Secara administrasi Kota Payakumbuh berbatasan langsung hanya dengan Kabupaten 50 Kota, sesuai dengan Permendagri No 22 Tahun 2020 tentang Kerjasama daerah, mengamanatkan bahwa kerjasama daerah yang berbatasan merupakan kerjasama wajib oleh karena itu implementasi bentuk kerjasama tersebut disemua sektor harus menjadi bagian dalam dokumen RPJMD kedua daerah yang berbatasan.

4. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD PENYUSUNAN RPJMD

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan:

- 1) Sebagai arah pembangunan jangka menengah Kota Payakumbuh pada tahun 2025-2029 ;
- 2) Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kota Payakumbuh selama tahun 2025-2029;
- 3) Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
- 4) Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan prioritas pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

B. TUJUAN PENYUSUNAN RPJMD

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan untuk:

- 1) Menjadi landasan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
- 3) Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
- 4) Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;

- 5) Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
- 6) Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan;
- 7) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
- 8) Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
- 9) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mematuhi pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Prosedur penyusunan mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan posisi dan peran Kota Payakumbuh serta gambaran umum penyusunan RPJMD yang terdiri dari:

- a. Latar Belakang;
- b. Dasar Hukum Penyusunan;
- c. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya;
- d. Maksud dan Tujuan;
- e. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

- a. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
- b. Gambaran Keuangan Daerah
Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2025-2030.
- c. Permasalahan dan Isu Strategis

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.

b. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, rumusan arah kebijakan dibuat pertahun sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tiap tahunnya.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

a. Program Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan dan kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama.

b. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

BAB V PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dan juga berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

LAMPIRAN

- a. Lampiran I RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.
Bagian ini menyampaikan Metadata Indikator Pembangunan Daerah yang memuat informasi terstruktur yang menjelaskan secara rinci mengenai setiap indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program.
- b. Lampiran II RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.
Bagian ini menyampaikan Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat substansi sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
- c. Lampiran III RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.
Bagian ini menyampaikan Penjenjangan Kinerja dalam bentuk Pohon Kinerja

BAB II

GAMBARAN UMUM

DAERAH

1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

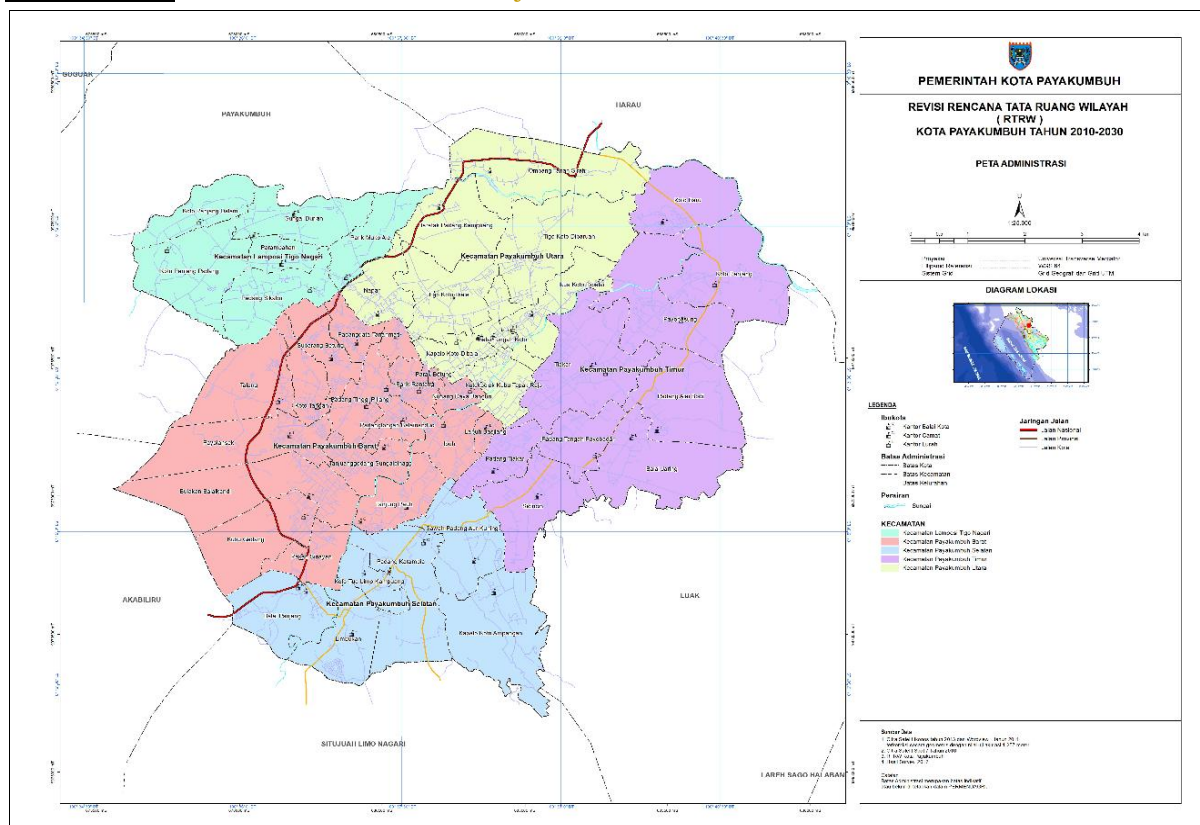
A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

1). POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

Secara geografis, Kota Payakumbuh terletak pada 00°10' sampai dengan 00°17' LS dan 100°35' sampai dengan 100°45' BT pada ketinggian ±514 meter dari permukaan laut. Kota Payakumbuh merupakan kota kecil dengan luas wilayah 80,43 km² atau 0,19% dari luas Provinsi Sumatera Barat dan berjarak ±120 km dari Kota Padang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah Kota Payakumbuh ditetapkan 74,552 km², namun dalam keputusan tersebut tidak ditetapkan luasan setiap kecamatan, sehingga dalam dokumen ini dan dokumen resmi lainnya seperti Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2025 masih menggunakan luas wilayah 80,43 km².

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Payakumbuh



Sumber: Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010-2030

Secara administratif, Kota Payakumbuh terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan luas wilayah masing-masing kecamatan seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh

NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	LUAS (KM ²)	% TERHADAP LUAS WILAYAH	JUMLAH		
					KELURAHAN	RW	RT
1	Payakumbuh Barat	Tanjung Pauh	19,07	23,71	17	58	168
2	Payakumbuh Utara	Tigo Koto Diate	14,53	18,07	9	35	122
3	Payakumbuh Timur	Tiakar	22,73	28,26	9	33	91
4	Payakumbuh Selatan	Sawah Padang Aua Kuniang	14,68	18,25	6	16	50
5	Lamposi Tigo Nagori	Sungai Durian	9,42	11,71	6	14	51
Total			80,43	100,00	47	156	482

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2025

Kota Payakumbuh merupakan bagian dari Luhak Nan Bungsu yang dikelilingi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara administratif berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah di kabupaten tersebut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh (Kabupaten Lima Puluh Kota)
- Sebelah Selatan : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuh (Kabupaten Lima Puluh Kota)
- Sebelah Barat : Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru (Kabupaten Lima Puluh Kota)
- Sebelah Timur : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau (Kabupaten Lima Puluh Kota)

Letak geografis akan berpengaruh terhadap peran strategis Kota Payakumbuh dari sisi lokal, regional dan nasional, potensi sumber daya alam, gambaran kualitas lingkungan yang termasuk daya tampung dan daya dukung lingkungan dan juga kebencanaan. Posisi Kota Payakumbuh sebagaimana telah disebutkan di atas sangat strategis, di samping dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang subur, juga dilalui oleh jalur lalu lintas utama dari Kota Padang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat menuju Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Riau. Dengan Demikian Kota Payakumbuh menjadi jalur mobilitas utama bagi penduduk diantara kedua daerah provinsi tersebut

Pada skala lokal, Kota Payakumbuh berperan sebagai pusat transaksi aktifitas perekonomian wilayah sekitarnya (Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam) serta sekaligus sebagai simpul perdagangan dan jasa. Sedangkan pada skala regional dan nasional, Kota Payakumbuh sudah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang secara spasial memiliki fungsi dan peranan yang cukup strategis dalam sistem perwilayahan dan pelayanan sistem perkotaan di Provinsi Sumatera Barat, diantaranya:

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN) –

Kota Padang dan Pekanbaru sebagai Kota PKN di Sumatera melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat;

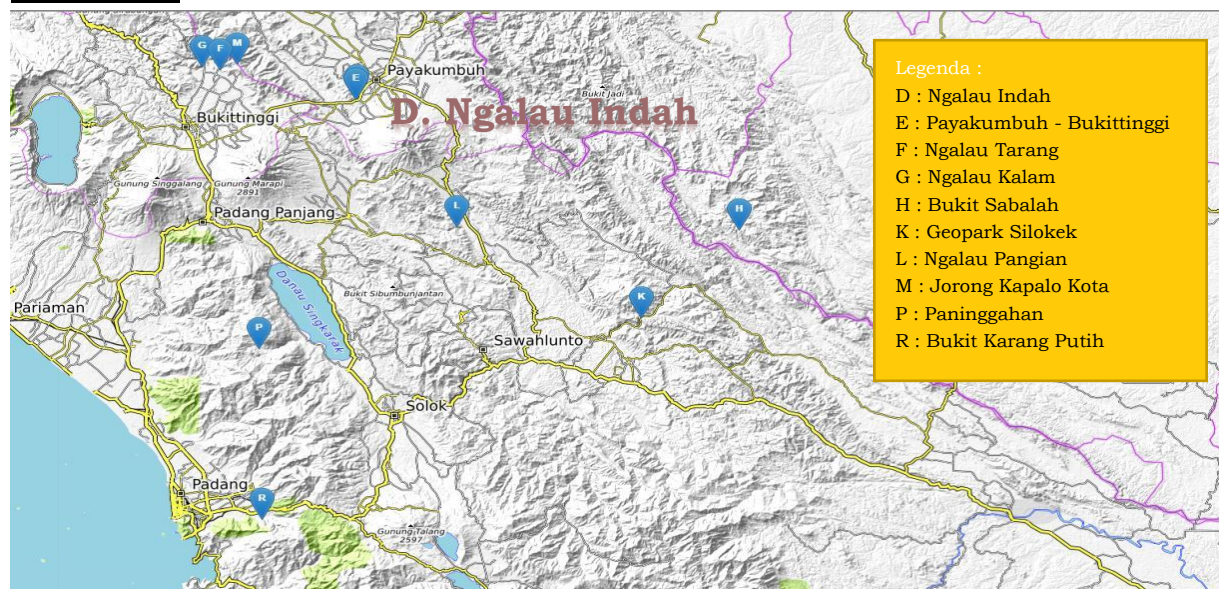
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagian wilayah Kabupaten Agam dan sebagian wilayah Kabupaten Tanah Datar;
- c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
- d. Dari segi penyediaan infrastruktur kawasan, kawasan perkotaan Payakumbuh memiliki nilai ekonomis di bidang transportasi darat. Hal ini disebabkan karena posisi Kota Payakumbuh yang berada pada simpul transportasi regional nasional di Pulau Sumatera (prioritas penanganan pembangunan jalan pengumpan yang menghubungkan Lintas Barat dan Lintas Tengah Timur dengan prioritas fungsi yang menghubungkan Kota Padang-Bukittinggi-Pekanbaru dan pengembangan jaringan jalan bebas hambatan Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi-Padang

2). POTENSI SUMBER DAYA ALAM

A). POTENSI KARST SUMBER AIR BAKU DAN WISATA

Formasi C1 (Batuan karbonat) merupakan batu gamping yang menyusun punggung tajam dari perbukitan sisi timur laut Bukittinggi, Memiliki warna putih hingga keabuan dan berongga. Batu Gamping di Sumatera Barat memiliki ciri berupa sebaran yang membentuk pola blok (unit) yang menyebar dengan luasan yang relatif kecil pada setiap bloknnya.

Gambar 2.2 Titik Lokasi Survei Kawasan Karst Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekosistem Karst Pulau Sumatera (Provinsi Sumatera Barat), 2019

Adapun lokasi yang tersusun atas formasi ini diantaranya yaitu Kompleks Ngalau Indah dan singkapan di Jalan Lintas Payakumbuh-Bukittinggi. Distribusi secara spasial blok batu gamping di Provinsi Sumatera Barat disajikan pada peta Gambar 2.2.

(1). KOMPLEKS NGALAU INDAH

Kompleks Ngalau Indah berada di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Adapun posisi absolut dari kompleks batu gamping berdasarkan dokumen Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekosistem Karst Pulau Sumatera yang terbit pada tahun 2019 adalah x: 678552 dan y: 9971923, dimana batu gamping bertransformasi menjadi satuan bentuk lahan karst yang memiliki morfologi berupa perbukitan kerucut karst, seperti pada kompleks Ngalau Indah yang terdapat gua horizontal kering dan tidak ditemui adanya sungai bawah tanah pada kompleks perbukitan dengan ketinggian 600 mdpl.

Gambar 2.3 Kompleks Gua Ngalau Indah

Kiri: Pelataran Gua Ngalau Indah; **Kanan:** bentukan eksoterm dalam Gua Ngalau Indah



Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh, 2025

(2). JALAN LINTAS PAYAKUMBUH - BUKITTINGGI

Kompleks batu gamping yang berada di sekitar Jalan lintas Payakumbuh-Bukittinggi terdapat pada koordinat x: 678480, dan y: 9971252. Singkapan terlihat pada salah satu tepi jalan yang menghubungkan antara Payakumbuh dengan Bukittinggi. Singkapan tersebut merupakan bagian dari kaki Bukit Simarajo yang memiliki morfologi berupa kerucut karst pada ketinggian 600 mdpl. Lebih lanjut, pada sekitar singkapan tersebut juga ditemukan mata air yang mengalir dari batu gamping yang tersingkap.

Gambar 2.4 Singkapan Batu Gamping Kaki Bukit Simarajo

Kiri: Singkapan di tepi Jalan Payakumbuh-Bukittinggi; **Kanan:** Mata air yang mengalir dari singkapan batu gamping



Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh, 2025

3). **DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP**

A). **KAPASITAS AIR BAKU**

Sumber air baku Kota Payakumbuh cukup melimpah, baik dari sumber mata air, air tanah, air permukaan dan air hujan, namun belum termanfaatkan secara optimal. Sumber air baku yang berada di Kota Payakumbuh dimanfaatkan untuk pengairan/irigasi, peternakan, industri dan air minum rumah tangga, yang sebagian besar berasal dari sumber mata air di luar wilayah Kota Payakumbuh, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh Perumda Tirta Sago. Untuk wilayah Kota Payakumbuh, sumber air permukaan Sungai Batang Agam telah dimanfaatkan oleh Perumda Tirta Sago semenjak adanya *Water Treatment Plan* (WTP) di Kelurahan Tanjung Pauh, walaupun pemanfaatannya belum maksimal, khususnya dalam mencukupi kebutuhan debit air yang bersumber dari air baku yang sudah ada selama ini.

Secara keseluruhan ada 7 (tujuh) sungai yang sangat potensial untuk diolah dan dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, pertanian, industri, peternakan dan sebagainya.

Tabel 2.2 Kapasitas Sungai di Kota Payakumbuh

NO	NAMA SUNGAI	PANJANG (KM)	LEBAR PERMUKAAN (M)	DEBIT (M ³ /DTK)	LOKASI
1	Batang Agam	15,60	25	4,52	Balai Panjang, Limbukan, Tanjung Pauh, Ibh, Nunang Daya Bangun, Koto Kociek Kubu Tapak Rajo, Tiakar, Ikua Koto Dibalai, Payobasung, Koto Panjang
2	Batang Lampasi	11,60	20	3,53	Koto Panjang, Sungai Durian, Taratak Padang Kampuang, Ompang Tanah Sirah
3	Batang Sikali	10,00	6	0,51	Sawah Padang Aur Kuning, Padang Karambia, Padang Tiakar, Padang Tongah Payobadar, Tiakar, Payobasung
4	Sungai Baih	5,00	6	-	Padang Alai Bodi, Balai Jaring, Payobasung
5	Sungai Talang	5,00	5	-	Sicincin, Tiakar
6	Batang Pulau	11,40	5	-	Taratak Padang Kampuang, Tigo Koto Dibaruah
7	Sungai Tembok Jua	6,30	4	-	Taratak Padang Kampuang, Tigo Koto Dibaruah

Sumber: KLHS RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, 2025

Sungai Batang Agam merupakan salah satu sungai yang mengalir di wilayah Kota Payakumbuh. Selain itu, Kota Payakumbuh memiliki 2 (dua) embung di Kota Payakumbuh dengan total luas diperkirakan mencapai 5,5 ha.

Tabel 2.3 Kapasitas Embung di Kota Payakumbuh

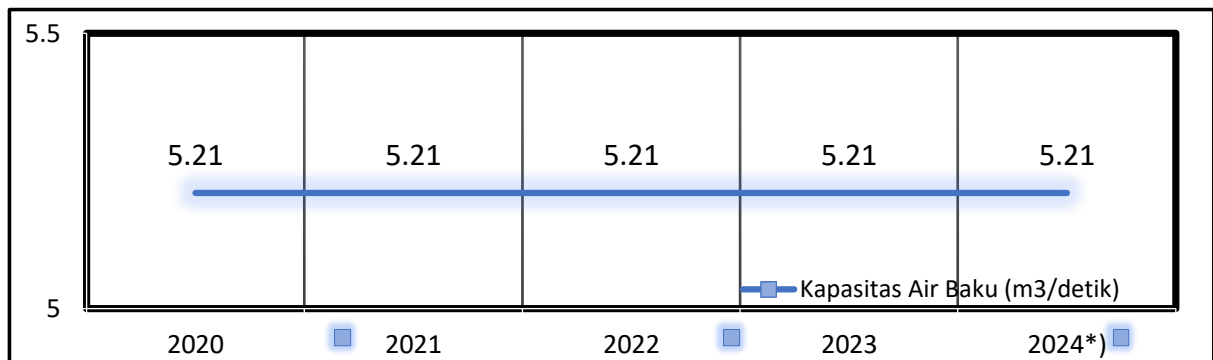
NO	NAMA EMBUNG	LUAS (HA)	VOLUME (M ³)	DEBIT (LITER/DTK)	LOKASI
1	Embung Bulakan	3	35,007	500	Limbukan, Kec. Payakumbuh Selatan

NO	NAMA EMBUNG	LUAS (HA)	VOLUME (M ³)	DEBIT (LITER/DTK)	LOKASI
2	Embung Lurah Rawang	1	-	7	Kapalo Koto, Kec. Payakumbuh Selatan

Sumber: KLHS RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, 2025

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air baku yang ada di Kota Payakumbuh dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Berbagai upaya pembiayaan sudah dilakukan, termasuk pembiayaan dari pemerintah pusat dan pinjaman daerah, namun belum terealisasi sesuai yang diharapkan. Perkembangan kapasitas air baku Kota Payakumbuh dari tahun 2020-2024 terlihat pada diagram 2.1 dimana kapasitas air baku Kota Payakumbuh sejak tahun 2020 tetap sebesar 5,21 m³/detik yang berarti kapasitas air baku yang dapat dimanfaatkan sudah pada tingkatan maksimal.

Diagram 2.1 Perkembangan Kapasitas Air Baku Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PUPR Kota Payakumbuh, 2024

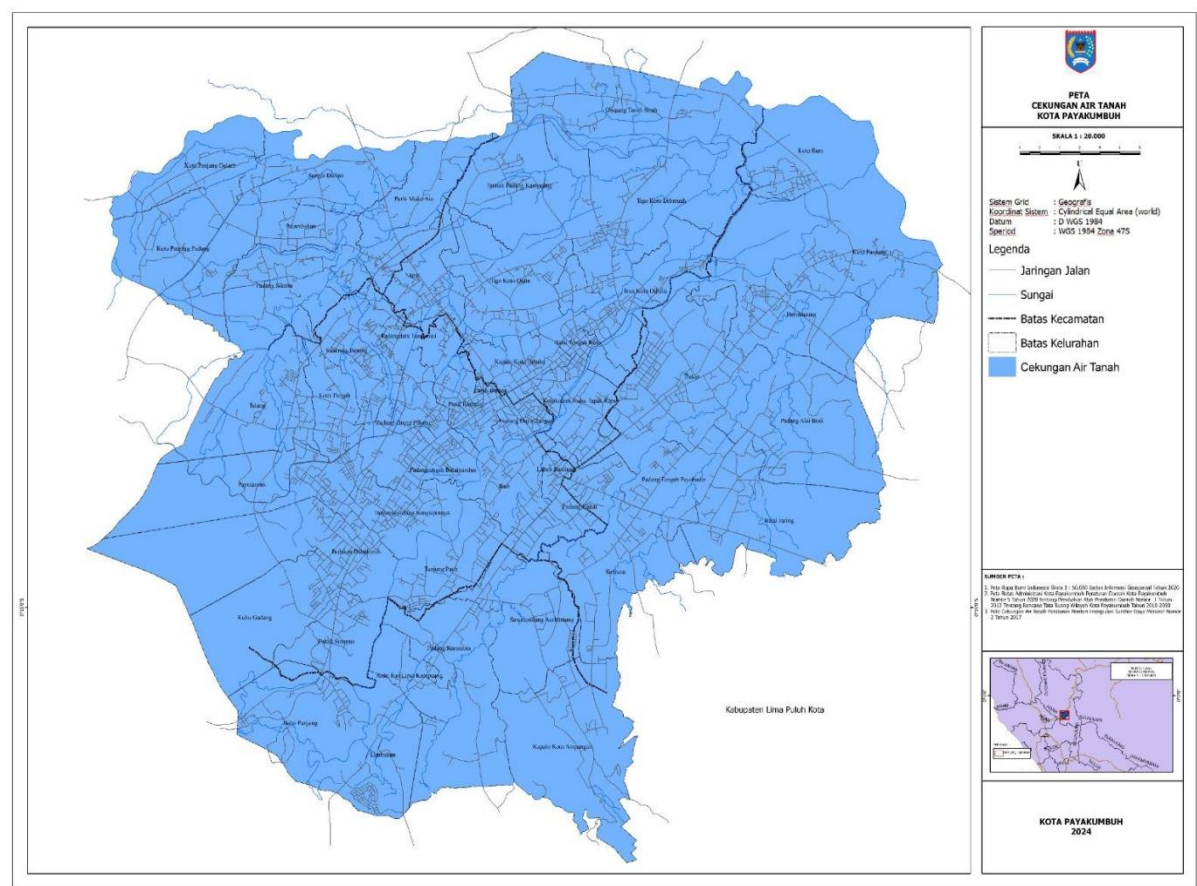
Selain pemanfaatan embung untuk meningkatkan sumber air baku, Kota Payakumbuh juga memiliki sumber air yang berasal dari cekungan air tanah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi area geografis di mana air tanah tertimbun di bawah permukaan tanah dalam lapisan batuan atau material akumulasi lainnya. Air tanah terakumulasi dalam cekungan ini karena proses alami seperti infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan kemudian meresap ke lapisan bawahnya yang memiliki kepadatan yang lebih tinggi. Dalam cekungan air tanah, air disimpan dalam formasi geologis seperti akuifer, yang merupakan lapisan batuan atau material yang dapat menampung dan menyimpan air secara signifikan. Air dalam cekungan ini bisa diakses melalui sumur-sumur bor atau sumur gali yang mencapai lapisan air tanah tersebut.

Cekungan air tanah bisa berukuran kecil seperti cekungan lokal di bawah permukaan tanah yang melayani sumber air untuk sumur-sumur

rumah tangga, atau bisa juga sangat besar seperti cekungan air tanah regional yang memberikan pasokan air untuk daerah yang lebih luas, bahkan mencakup wilayah antar negara. Pemanfaatan dan eksploitasi air tanah berlebihan tanpa kendali justru berpotensi merusak lingkungan, seperti terjadinya penurunan muka air tanah.

Gambar 2.5 Peta Cekungan Air Tanah Kota Payakumbuh



Sumber: Diolah dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia, terdapat sekitar 10 CAT di Provinsi Sumatera Barat, salah satunya di Kota Payakumbuh. Luas CAT ini diperkirakan mencapai 77.83 km²

Tabel 2.4 Luas Cekungan Air Tanah Di Kota Payakumbuh

NO	KECAMATAN	LUAS CEKUNGAN AIR TANAH	PERSENTASE LUASAN
1	Payakumbuh Barat	2.030,66 Ha	26,09%
2	Payakumbuh Utara	1.560,33 Ha	20,05%
3	Payakumbuh Timur	2.056,12 Ha	26,42%
4	Payakumbuh Selatan	1.212,57 Ha	15,58%
5	Lamposi Tigo Nagori	923,08 Ha	11,86%
Total		7.782,76 Ha	100,00%

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2025

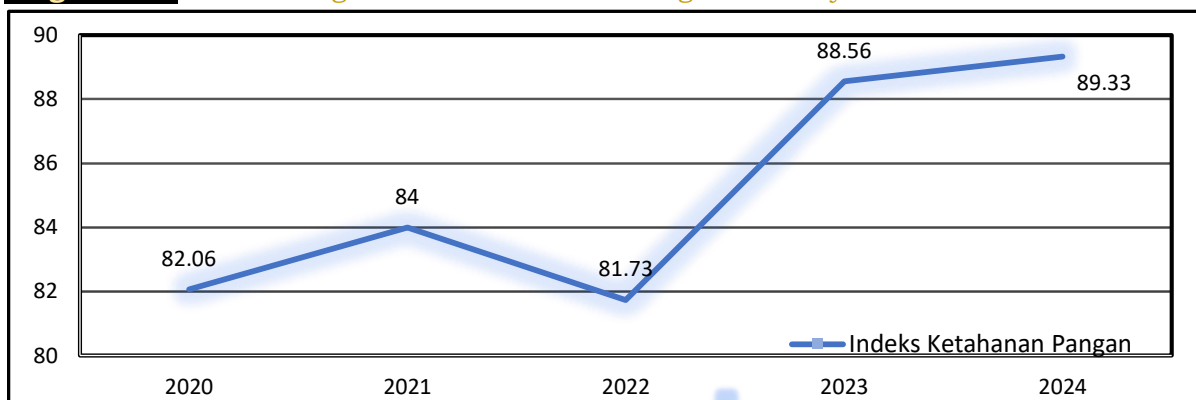
[illegible]

4). BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai kepada perseorangan, ini dicerminkan dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mengukur ketersediaan pangan suatu daerah, maka digunakan alat ukur Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 - 2029

Diagram 2.2 Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



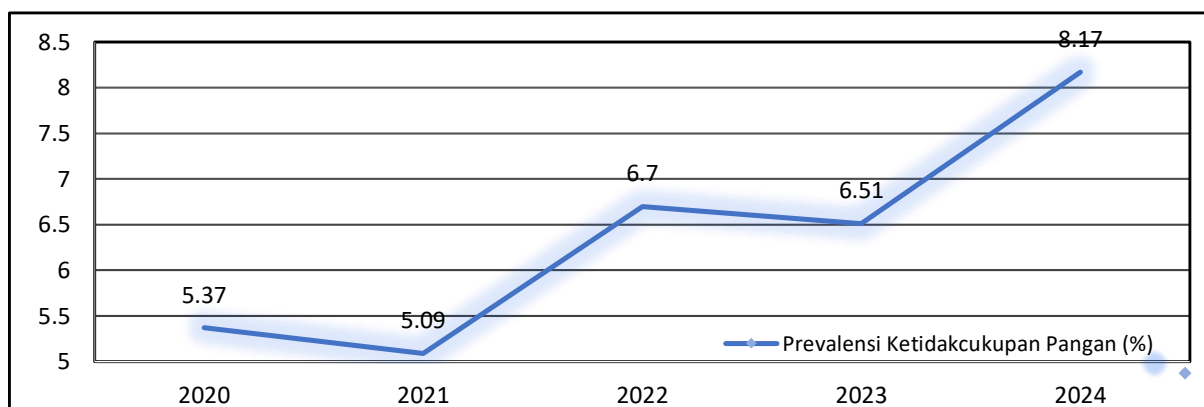
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Nilai IKP Kota Payakumbuh cenderung naik dari tahun ke tahun, walaupun mengalami sedikit penurunan di tahun 2022 yang disebabkan adanya operasi pasar yang cukup besar untuk memenuhi dan menjaga kestabilan harga pangan setelah terjadinya wabah Covid-19. Namun secara umum kondisi tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan Kota Payakumbuh. Kepedulian Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap aspek ketahanan pangan terlihat ketika terjadinya pemulihan ekonomi tahun 2023, nilai IKP naik cukup signifikan mencapai 88,56 dan 89,33 pada tahun 2024.

B). PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT)

Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan yang kandungan nutrisinya tidak ideal. Perkembangan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Payakumbuh dalam 5 (lima) tahun terakhir digambarkan sebagai berikut.

Diagram 2.3 Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari gambar di atas terlihat bahwa trend prevalensi ketidakcukupan pangan di Kota Payakumbuh secara umum masih rendah yang disebabkan masih rendahnya kecukupan pangan dan gizi masyarakat miskin yang ada di Kota Payakumbuh. Di samping itu, juga adanya kegagalan panen akibat perubahan iklim dan terganggunya rantai pasok bahan pangan.

C). KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA

Kondisi ketersediaan pangan, dalam hal ini beras merupakan hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang serta menjadi pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Pada Tahun 2024 Skor PPH Konsumsi 87,7 dimana masih di bawah Skor PPH Konsumsi Provinsi Sumatera Barat. Melihat kondisi skor PPH Konsumsi Kota Payakumbuh tahun 2024 dibutuhkan upaya-upaya dan langkah-langkah yang tepat dan nyata untuk merubah pola pikir masyarakat agar ikut dan mampu melaksanakan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan mau menerapkan pola konsumsi pangan B2SA. Selain skor PPH konsumsi juga terdapat Skor PPH Ketersediaan yaitu informasi yang menggambarkan tentang pencapaian keberagaman pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kurun waktu setahun. PPH ketersediaan diukur berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) di mana NBM dihasilkan dari Data Produksi Daerah, Barang Masuk (Impor) dan Barang Keluar (Ekspor) serta penggunaan lainnya. Sehingga dapat digambarkan jumlah penyediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk Kota Payakumbuh, dan juga menggambarkan jumlah kalori yang dapat dikonsumsi masyarakat. Skor PPH Ketersediaan di Kota Payakumbuh berada pada posisi 89,17 pada tahun 2024, dimana tingkat ketersediaan untuk 3 kelompok bahan pangan masih rendah yaitu kacang-kacangan, buah biji berminyak dan sayuran dan buah.

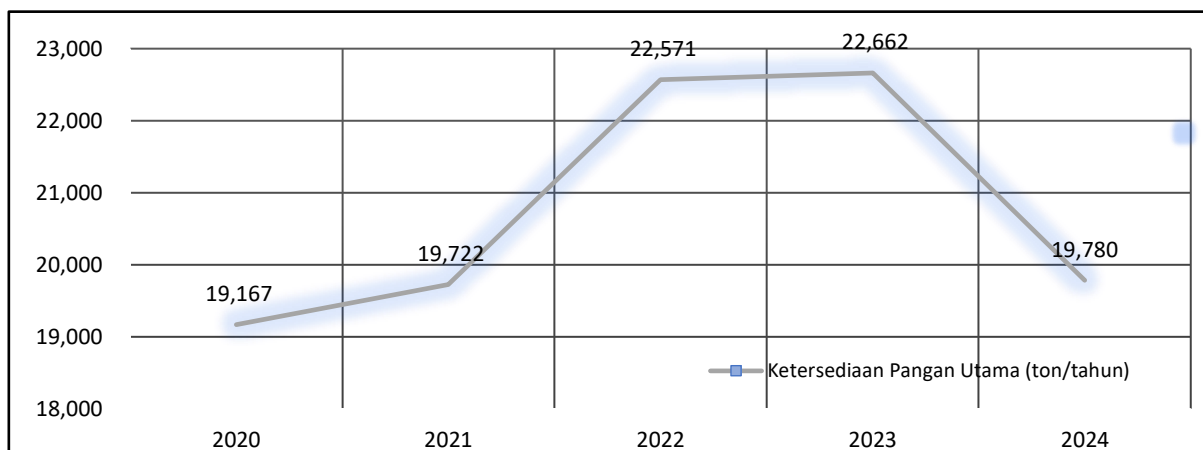
Tabel 2.5 Data Ketersediaan Pangan dan Perbandingan Skor PPH Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat Tahun 2020-2024

NO.	TAHUN	KETERSEDIAAN PANGAN (KG/KAP/TH)	SKOR PPH KONSUMSI PROVINSI SUMATERA BARAT	SKOR PPH KONSUMSI KOTA PAYAKUMBUH	SKOR PPH KETERSEDIAAN KOTA PAYAKUMBUH
1	2020	403,62	86,6	83,7	88,05
2	2021	606,01	86,6	84,20	88,77
3	2022	504,53	89,8	85,09	89,02
4	2023	511,72	90,5	87,3	89,11
5	2024	469,29	89	87,7	89,17

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2025

Ketersediaan pangan utama merupakan rata-rata ketersediaan pangan utama bagi penduduk Kota Payakumbuh dalam periode satu tahun. Ketersediaan pangan utama ini diperhitungkan dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Kota Payakumbuh seandainya terjadi krisis pangan, sehingga produksi pangan terhenti. Angka ketersediaan pangan utama Kota Payakumbuh tahun 2020-2024 dapat dilihat pada diagram 2.4 berikut.

Diagram 2.4 Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2025

D). PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KEAMANAN PANGAN

Pemerintah disamping berusaha untuk menyediakan pangan bagi masyarakat, juga harus memastikan keamanan pangan bagi masyarakat, karena hal ini berkorelasi pada kesehatan masyarakat yang nantinya menjadi salah satu faktor penentu kualitas SDM Kota Payakumbuh. Pemerintah Kota Payakumbuh terus berupaya untuk menjadikan skor keamanan pangan tersebut pada level tingkat keamanan tinggi (86 – 100%).

Tabel 2.6 Data Keamanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH SAMPEL AMAN	JUMLAH SAMPEL TIDAK AMAN	SAMPEL AMAN (%)
1	2020	20	18	2	90
2	2021	40	35	5	87,5
3	2022	10	9	1	90
4	2023	30	30	0	100
5	2024	50	39	11	78

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2024

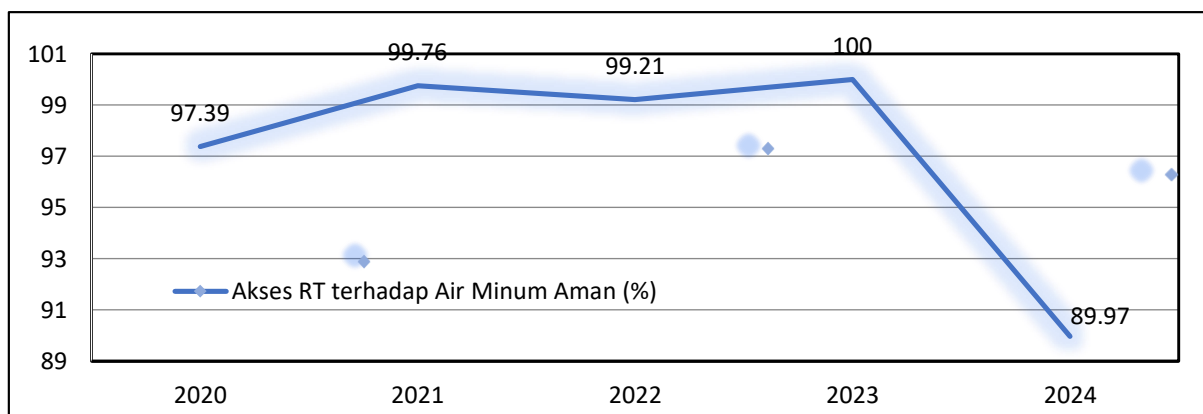
Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat yang terbebas dari bahan-bahan berbahaya, seperti residu pestisida dan formalin, maka perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar di Kota Payakumbuh. Salah satu pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Payakumbuh adalah dengan pengambilan sampel pangan yang beredar di Kota Payakumbuh. Pada tahun 2024 pengawasan dan pengambilan sampel bahan pangan dilakukan dengan pengambilan 50 sampel, dimana ditemukan 11 sampel yang dinyatakan tidak aman atau sebesar 22% dari total sampel. Melihat hasil sampel yang

diperoleh, kondisi keamanan pangan Kota Payakumbuh pada tahun 2024 dikategorikan Sedang.

E). AKSES RUMAH TANGGA TERHADAP SUMBER AIR MINUM AMAN

Penyediaan air minum aman yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Sago melalui penyediaan layanan air minum perpipaan. Tahun 2024 layanan sudah mencapai 89,77% yang dapat dilihat perkembangannya dari tahun 2020-2024 pada diagram 2.5 berikut.

Diagram 2.5 Perkembangan Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PUPR Kota Payakumbuh, 2025

Jika dilihat diagram di atas, terlihat adanya fluktuasi dari akses air minum aman Kota Payakumbuh, dimana terjadi penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2024. Hal ini disebabkan perkembangan perumahan yang cukup pesat dan tidak disertai kapasitas sumber air baku yang bisa dimanfaatkan sehingga perumahan baru belum dapat terpenuhi sepenuhnya akses layanan air minum oleh Perumda Tirta Sago.

F). PROYEKSI KEBUTUHAN AIR BERSIH

Air merupakan kebutuhan dasar untuk hidup, oleh karenanya pasokan air minum yang memadai, bersih, dan aman harus dapat diakses oleh penggunanya. Akses terhadap air minum yang aman dikategorikan sebagai hak asasi manusia yang mendasar sehingga tidak hanya pada MDGs, target ini dilanjutkan kembali pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke 6 di mana dinarasikan bahwa “Air Menopang Kehidupan, tetapi Air Minum Bersih yang aman menentukan peradaban”. Pemerintah Republik Indonesia mengkategorikan penyediaan air bersih sebagai standar pelayanan minimum pemerintahan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tantangan dari penyediaan air minum adalah terkait kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Untuk kualitas kita berbicara tentang air minum aman, ketika berbicara tentang kuantitas kita berbicara akan jumlah yang memenuhi kebutuhan penggunanya, sedangkan untuk kontinuitas kita berbicara penyebaran dan akses dari sumber ke pengguna. Pasokan air menjadi dasar meningkatkan kualitas dan kontinuitas layanan air minum,

karena itu perlu dihitung berapa kebutuhan air minum di Kota Payakumbuh untuk jangka menengah maupun jangka panjangnya.

Kebutuhan air berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, dijelaskan bahwa standar kebutuhan pokok air ialah sebesar 60 l/org/hr. Kebutuhan air tersebut dibedakan atas kategori wilayah, dimana berdasarkan survei yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya kebutuhan akan air bersih tersebut dibagi ke dalam beberapa kategori.

Tabel 2.7 Standar Kebutuhan Air Berdasarkan Kategori Wilayah

NO	KATEGORI WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK (ORANG)	KEBUTUHAN AIR BERSIH (LITER ORANG/HARI)
1	Pedesaan	3000 – 20.000	60 – 90
2	Kota Kecil	20.000 – 100.000	90 - 110
3	Kota Sedang	100.000 – 500.000	100 - 125
4	Kota Besar	500.000 – 1.000.000	125 - 150
5	Kota Metropolitan	> 1.000.000	150 - 200

Sumber: SNI 7831- 2012

Dilain pihak, Badan Standar Nasional Indonesia (BSNI) juga membedakan kebutuhan air berdasarkan pada dua kategori: pedesaan dan perkotaan, dimana untuk pedesaan adalah 60 liter/hari, dan perkotaan sebesar 120 liter/hari. Maka untuk Perhitungan Prediksi Kebutuhan Air Domestik untuk Kota Payakumbuh yang dikategorikan Kota Sedang, maka kita asumsikan kebutuhan air setiap orang per-hari adalah 125 liter/hari, yang dalam skala rumah tangga, rata-rata penggunaan air digunakan untuk membersihkan rumah, mandi, mencuci pakaian, minum, memasak, keperluan ibadah, dan sebagainya, yang bersumber dari air permukaan seperti sungai, danau dan air tanah. Perhitungan jumlah air diformulasikan sebagai akumulasi dari kebutuhan pemakaian harian per-liter dari sejumlah pengguna atau penduduk di Kota Payakumbuh.

Tabel 2.8 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030

NO	TAHUN PROYEKSI	JUMLAH PENDUDUK	KEBUTUHAN AIR (LITER/HARI)
1	Kondisi Tahun 2024	146.731	17.371.375 Liter
2	Tahun 2025	148,597	18.574.625 Liter
3	Tahun 2026	150.450	18.806.250 Liter
4	Tahun 2027	152.270	19.033.750 Liter
5	Tahun 2028	154.050	19.256.250 Liter
6	Tahun 2029	155.830	19.478.750 Liter
7	Tahun 2030	157.573	19.696.250 Liter

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Disisi lain, Kebutuhan air skala Non Domestik merupakan layanan air bersih yang dikategorikan atas empat tipe:

1. Umum (tempat peribadatan, rekreasi, sekolah, terminal, rumah sakit, dan lain-lain)

2. Institusional (kantor pemerintah dan swasta, kompleks militer, dan lain-lain)
3. Komersial (bioskop, hotel, restoran, pertokoan, dan lain-lain)
4. Industrial (peternakan, pabrik, pelabuhan, dan lain-lain)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, maka perkiraan kebutuhan air non-domestik diasumsikan adalah 15% dari kebutuhan domestik, Maka berdasarkan hal tersebut, untuk kebutuhan Non Domestik Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Domestik Kota Payakumbuh Skala Non Domestik Tahun 2025-2030

NO	TAHUN	KEBUTUHAN AIR NON DOMESTIK (LITER/HARI)
1	Kondisi Tahun 2024	2.605.706 Liter
2	Tahun 2025	2.786.194 Liter
3	Tahun 2026	2.820.937 Liter
4	Tahun 2027	2.855.062 Liter
5	Tahun 2028	2.888.437 Liter
6	Tahun 2029	2.921.812 Liter
7	Tahun 2030	2.954.437 Liter

Sumber: Hasil Analisa Bappeda, 2025

Dari uraian di atas, maka proyeksi kebutuhan air minum Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030

URAIAN	KONDISI TAHUN 2024	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (jiwa)	146.731	148.597	150.450	152.270	154.050	155.830	157.573
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari)	20.602.9695	21.360.819	21.627.187	21.888.812	22.144.687	22.400.562	22.650.687

Sumber: Hasil Analisa Bappeda, 2025

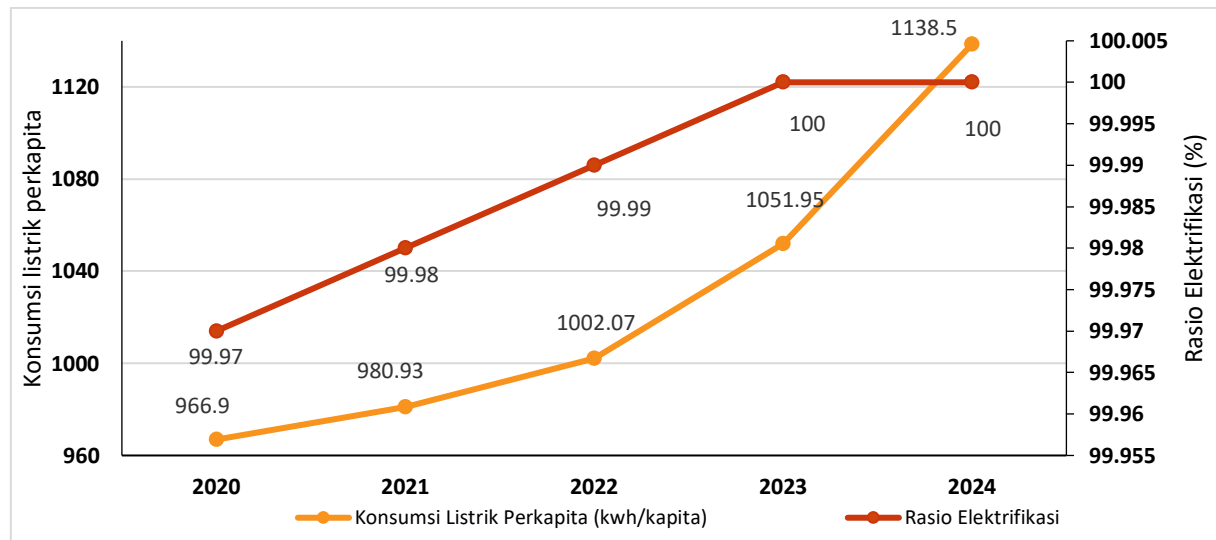
Dari hasil perhitungan terlihat kebutuhan air minum Kota Payakumbuh meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, Hal ini tentunya harus menjadi perhatian dalam penentuan kebijakan dan prioritas pembangunan, utamanya terkait sumber air bersih yang semakin sedikit ketersediaannya.

G). PENGGUNAAN ENERGI

Indikator yang digunakan untuk menghitung penggunaan energi yaitu rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita. Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Sedangkan

pemakaian listrik perkapita merupakan total jumlah energi listrik yang digunakan di suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk dalam periode satu tahun. Hal ini menunjukkan rata-rata konsumsi listrik tiap penduduk. Rasio Elektrifikasi di Kota Payakumbuh sejak tahun 2023 sudah mencapai 100%. Sedangkan tingkat konsumsi listrik perkapita cenderung naik dalam 5 (lima) tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 tercatat 966,9 kwh/ kapita dan naik terus sampai 1.138,5 kwh/ kapita pada tahun 2024

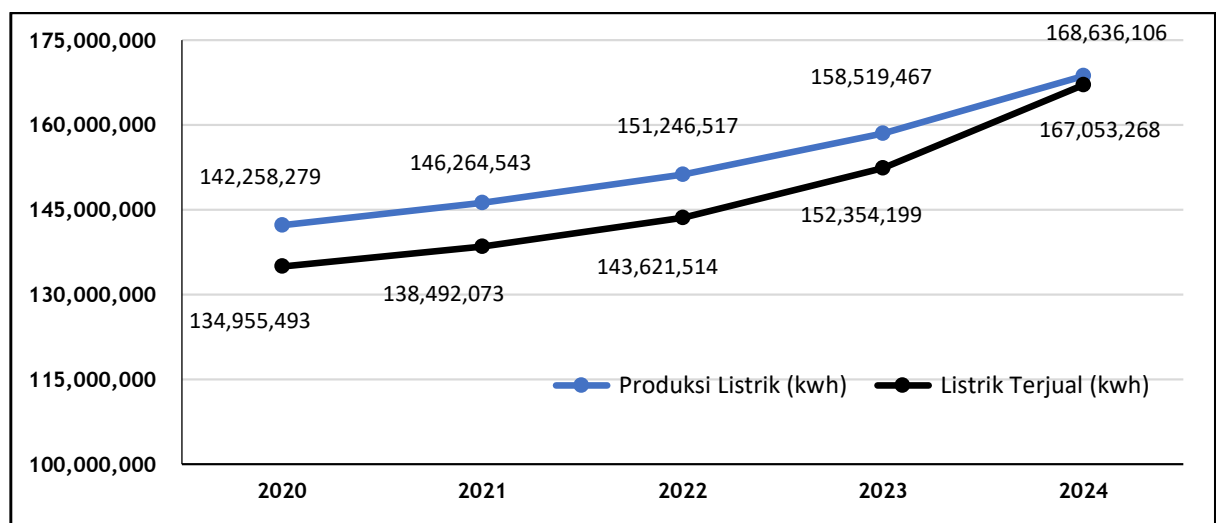
Diagram 2.6 Perkembangan Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2025, data diolah Bappeda

Seiring waktu dengan pertumbuhan penduduk dan perumahan juga akan meningkatkan kebutuhan listrik di Kota Payakumbuh. Diagram 2.7 memperlihatkan hubungan antara jumlah produksi listrik dengan listrik terjual pada tahun 2020-2024, dimana produksi listrik lebih besar dari listrik yang terjual, sehingga dengan kondisi ini dapat dipastikan kebutuhan listrik ke depan masih dapat dipenuhi oleh PLN Cabang Payakumbuh sesuai dengan perkembangan kota.

Diagram 2.7 Perkembangan Produksi Listrik dan Kapasitas Listrik Terjual di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2025

H). PROYEKSI KEBUTUHAN ENERGI/LISTRIK

Energi listrik merupakan sumber energi utama yang banyak dimanfaatkan dan dibutuhkan manusia. Dari waktu ke waktu kebutuhan energi listrik senantiasa bertambah. Peningkatan kebutuhan energi listrik tidak saja dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk, tetapi juga dipengaruhi faktor aktifitas ekonomi penduduk yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi aktivitas ekonomi maka akan semakin besar kebutuhan akan energi listriknya. Proyeksi kebutuhan listrik Kota Payakumbuh lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030

URAIAN	KONDISI TAHUN 2024	PROYEKSI					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (jiwa)	146.731	148.597	150.450	152.270	154.050	155.830	157.573
Jumlah Rumah	33.967	37.149	37.592	38.045	38.493	38.941	39.393
Kebutuhan Listrik (KWh)	50.437,36	51.786,05	52.412,128	53.037,756	53.663,384	54.289,012	54.914,19

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

5). LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

A). KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pembangunan berwawasan lingkungan dan digunakan sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup, IKLH merupakan perpaduan konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep Environment Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, (2) Kualitas Udara dan (3) Kualitas Lahan.

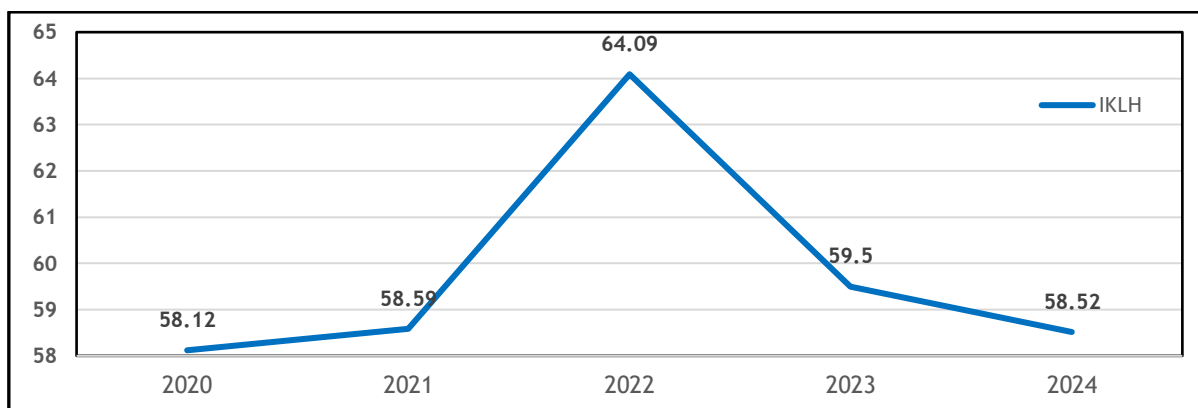
Perhitungan Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung dengan menggunakan rumusan di bawah ini :

$$\text{IKLH Kota} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

cara perolehan data :

1. Data IKA diperoleh dari hasil uji kualitas pada badan air yaitu di Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Sikali, Batang Pulau, Sungai Talang, Sungai Baih dan Sungai Tembok Jua;
2. Data IKU diperoleh dari hasil pengujian kualitas udara dibeberapa lokasi dengan metode passive sampler;
3. Data IKL diperoleh dari citra satelit yakni tentang luas wilayah Kota Payakumbuh yang tertutup vegetasi.

Diagram 2.8 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: KLHS RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Kualitas lingkungan hidup Kota Payakumbuh dilihat dari perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dikatakan fluktuatif. IKLH terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 58,12, kemudian tertinggi tahun 2022 dengan nilai 64,09 yang kemudian terjadi penurunan menjadi 58,52 pada tahun 2024, yang hampir mendekati kondisi tahun 2020. Walaupun fluktuatif, kondisi IKLH Kota Payakumbuh berkategori “sedang” ($50 \leq \text{IKLH} \leq 70$).

(1). INDEKS KUALITAS AIR (IKA)

Perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2024 Kota Payakumbuh dilakukan dengan melakukan menghitung Indeks Kualitas vegetasi air pada 32 sampel uji kualitas air di 7 (tujuh) sungai yang melintas di Kota Payakumbuh yaitu Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Sikali, Batang Pulau, Sungai Talang, Sungai Baih dan Sungai Tembok Jua. Berdasarkan hasil uji kualitas Air yang telah dilakukan di Kota Payakumbuh didapatkan hasil kualitas air di Kota Payakumbuh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni yakni 45,261 yang dikategorikan “Kurang” Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak, baik di hulu maupun di hilir sungai, karena Kota Payakumbuh merupakan daerah perlintasan sungai.

Tabel 2.12 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2024

MUTU AIR	JUMLAH PEMANTAUAN MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN MUTU AIR	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
Memenuhi	-	-	70	-
Ringan	32	100%	50	45,261
Sedang	-	-	30	-
Berat	-	-	10	-
Total	32	100%		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

(2). INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)

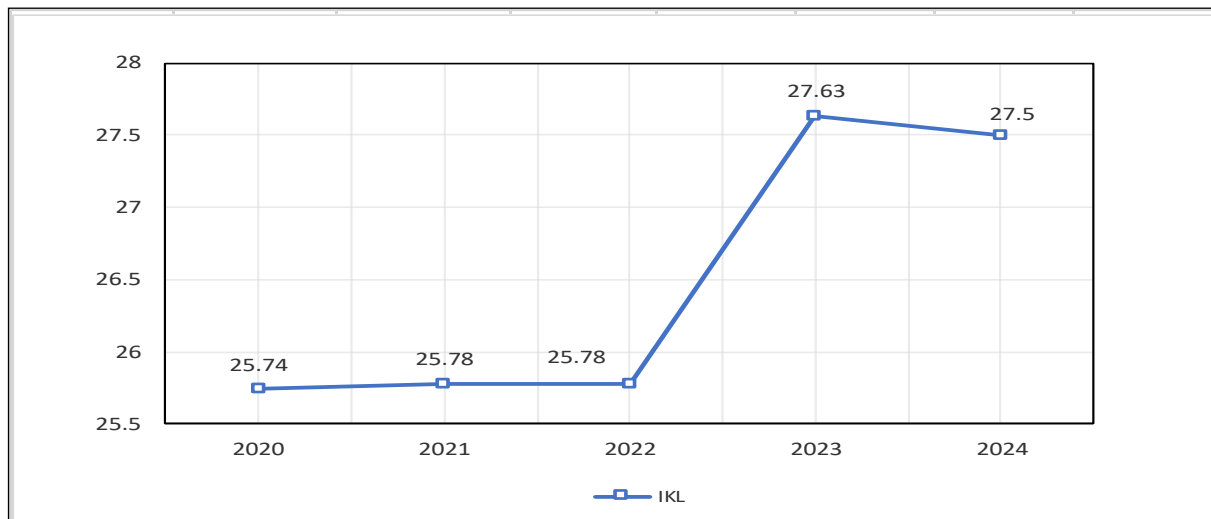
Perhitungan Indeks Kualitas Udara diambil dari hasil pengujian kualitas udara di beberapa lokasi dengan metode passive sampler. Nilai IKU

ini merupakan data kualitas udara ambien yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, di mana Indeks Kualitas Udara Kota Payakumbuh pada tahun 2024 berada di angka 87,59 “Baik”. Nilai IKU ini menempatkan Kota Payakumbuh pada urutan 7 (tujuh) di tingkat Kota dan di peringkat ke 17 (tujuh belas) untuk Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat. Walaupun Indeks Kualitas Udara Kota Payakumbuh cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya tapi masih dalam kategori dapat dikendalikan, dan perlu menjadi perhatian kedepannya dalam mengendalikan polusi udara di Kota Payakumbuh.

(3). INDEKS KUALITAS LAHAN

Kualitas lahan suatu daerah diukur dengan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Selama tahun 2020-2024, nilai IKL Kota Payakumbuh berfluktuasi, namun tidak terlalu signifikan. Tahun 2020 nilai IKL sebesar 25,74 dan meningkat menjadi 27,63 di tahun 2023, dan kembali mengalami penurunan menjadi 27,50. Penurunan ini dikarenakan adanya permintaan masyarakat untuk pemangkasan pohon pelindung. Nilai IKL Kota Payakumbuh dapat dikategorikan “kurang” ($25 \leq \text{IKL} \leq 50$). Oleh karenanya, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks kualitas lahan adalah dengan mempertahankan tutupan lahan dan kesuburan melalui intensifikasi pertanian dan pelaksanaan gerakan penanaman pohon serta peningkatan Ruang Terbuka (RTH) setiap tahunnya untuk mengimbangi perkembangan permukiman.

Diagram 2.9 Perkembangan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Tahun 2020-2024



Sumber: KLHS RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, 2025

Dengan Indeks Kualitas Air (IKA) bernilai **45,26** Indeks Kualitas Udara (IKU) bernilai **87,59** dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) adalah **27,50** maka perhitungan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\
 \text{IKLH} &= (0,376 \times 45,26) + (0,405 \times 87,59) + (0,219 \times 27,50) \\
 \text{IKLH} &= 17,02 + 35,47 + 6,03
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, maka **nilai IKLH** Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah **58,52**.

B). KAWASAN LINDUNG KOTA PAYAKUMBUH

Luas kawasan lindung di Kota Payakumbuh pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya, Dari 1.196,156 Ha menjadi 1.197,49 Ha. Data tersebut bersumber dari Perda Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030. Kawasan lindung di Kota Payakumbuh terdiri dari Hutan, Sungai, RTH, Pemakaman, RTH Taman Rekreasi, TPA

Tabel 2.13 Jumlah Kawasan Lindung Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kawasan Lindung	Ha	1.196,156	1.196,156	1.196,156	1.196,156	1.197,49
2.	Mata Air	buah	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

C). PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN

Penegakan hukum lingkungan dapat dilihat dari jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Cakupan ini dilihat dari jumlah usaha da-tau kegiatan wajib AMDAL yang telah diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh usaha da-tau kegiatan wajib AMDAL. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 4 menyatakan bahwa setiap rencana usaha da-tau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL. Pada Pasal 65 Ayat (1) ditegaskan bahwa SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha diintegrasikan kedalam Nomor Induk Berusaha. Sedangkan, pada Pasal 65 Ayat (2) ditegaskan bahwa SPPL bagi kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti aturan tersebut, terhitung sejak tanggal 3 Juli 2021 kewenangan penerbitan SPPL bagi pelaku usaha telah diserahterimakan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh kepada DPM-PTSP Kota Payakumbuh. Sedangkan, untuk penerbitan SPPL bagi Instansi Pemerintah masih menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh. Adapun uraian terkait jumlah usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup dan kasus penegakan hukum yang ditangani di Kota Payakumbuh dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.14 Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan di Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan	Dokumen	207	108	283	2.362	2169
2.	Kasus Penegakan Hukum Lingkungan	Kasus	10	8	3	17	-

NO	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Kasus Penegakan Hukum Lingkungan Diselesaikan	Kasus	10	8	3	3	-
4.	Surat Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan	Surat Rekomendasi	185	92	281	2.353	2163
5.	Usaha Pengendalian Lingkungan/ Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)	Surat Rekomendasi	18	16	2	9	6

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

Kasus penegakan hukum lingkungan dilaksanakan apabila ada pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup, sehingga setiap tahun jumlahnya berbeda. Setiap kasus pengaduan yang masuk dapat diselesaikan oleh Tim Verifikasi Pengaduan yang beranggotakan perwakilan dari beberapa Perangkat Daerah teknis terkait. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pada Pasal 22 disebutkan bahwa setiap usaha da-tau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

Pada Pasal 34 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap usaha da-tau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL. Di mana, pada Pasal 34 Ayat (2) ditegaskan bahwa Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu, pada Pasal 35 Ayat (1) disebutkan bahwa usaha da-tau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.

D). PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI

Jumlah rumah tinggal bersanitasi selalu meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan sanitasi perkotaan yang merupakan sebagai salah satu prioritas penanggulangan wilayah kumuh di Kota Payakumbuh. Rumah tinggal berakses sanitasi layak dirumuskan sebagai rumah tangga/KK yang memperoleh akses sanitasi dasar: tangki septik, baik individu maupun komunal.

Tabel 2.15 Rumah Tinggal Bersanitasi layak Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1.	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	28.783	28.998	30.746
2.	Jumlah Rumah Tinggal	33.046	33.046	34.967
3.	Persentase	87,1	87,75	87,93

Sumber: website BPS Provinsi Sumatera Barat 2025

E). RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN

Akses sanitasi aman merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sanitasi. Sebelumnya istilah akses sanitasi layak digunakan sebagai dasar kinerja, maka sejak tahun 2022 indikator yang dipakai adalah akses sanitasi aman. Berdasarkan data di BPS, sanitasi aman pada tahun 2022 sebesar 15.38%, dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024.

Tabel 2.16 Rumah Tinggal Akses Sanitasi Aman Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024

NO	URAIAN	2022	2023	2024
1.	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Aman	5.082	5.403	7.997
2.	Jumlah Rumah Tinggal	33.046	33.046	34.967
3.	Persentase	15,38	16,35	19,48

Sumber: Hasil Susenas 2024

F). PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH

Jumlah sampah Kota Payakumbuh di Tahun 2024 adalah 34.821, 66 ton, namun yang terkelola sebesar 33.557,87 ton atau 96,37%, melalui penanganan di TPA sebesar 27.971,23 ton (80,32%) dan pengurangan sampah melalui pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali, serta pendaur ulangan melalui mekanisme bank sampah, TPST/TPS3R, sektor Informal (lapak/pengepul/pemulung) sebesar 5.586,67 ton (16,04%). Untuk memaksimalkan pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Payakumbuh membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai sarana pemrosesan akhir sampah, apalagi semenjak akhir tahun 2023 TPA Regional Payakumbuh tidak beroperasi lagi.

Tabel 2.17 Volume dan Produksi Sampah Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

N o	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Timbunan sampah (Ton/Tahun)	35679,04	36063,06	36608,81	34041,5	34.821,66
2	Jumlah Pengurangan Sampah (Ton/Tahun)	5791,7	6032,27	5772,06	5426,52	5.586,67
3	Jumlah Penanganan Sampah/terangkut ke TPA (Ton/Tahun)	28.037	29884,16	30678,24	27188,85	27.971,23
4	Jumlah sampah terkelola (Ton/Tahun)	33.828,70	35.916,43	36.450,30	32.615,37	33.557,90
	Persentase Sampah Terkelola	94,81%	99,59%	99,57%	95,81%	96,37%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

G). OPERASIONALISASI TPA/TPS-3R/TPS

Dalam mengelola sampah di Kota Payakumbuh dioperasikan TPS-3R yang berjumlah 7 unit dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berlokasi di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (UPT TPA Sampah Regional) yang dilakukan dengan *System Sanitary Landfill*, di mana sebelumnya dilakukan melalui *System Open Dumping* untuk melayani pengolahan sampah 4 Kab/Kota yaitu Kota Payakumbuh, Kabupaten 50

Kota, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Namun dengan kejadian longsor pada akhir tahun 2023 dan *over capacity*, TPA Regional Payakumbuh ditutup.

Tabel 2.18 Jumlah TPS 3R per-kecamatan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

NO	KECAMATAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Payakumbuh Timur	-	1	1	1	1
2.	Payakumbuh Barat	1	2	2	3	3
3.	Payakumbuh Utara	-	1	1	1	1
4.	Payakumbuh Selatan	1	2	2	2	2
5.	Lampasi Tigo Nagori	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	6	6	7	7

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

Hal ini menyebabkan permasalahan persampahan di Kota Payakumbuh berlanjut, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Payakumbuh mengambil langkah-langkah penanganan darurat sampah seperti kerjasama dengan Pemerintah Kota Padang sehingga sampah Kota Payakumbuh dapat dikelola di TPA Air Dingin Padang, dan memperbanyak pembangunan TPST sebagai tempat pengelolaan sampah terpadu.

Gambar 2.7 TPA Regional Payakumbuh



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2023

Disamping itu, Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan persampahan ini telah memiliki 35 TPS dengan daya tampung 130,37 ton. Jika dirasiokan sebesar 0,87 atau memiliki daya tampung TPS sebesar 0,87 ton per 1000 orang.

Tabel 2.19 Rasio Daya Tampung TPS per Satuan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah tempat pembuangan sampah TPS (unit)	144	142	104	135	135
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	218,58	125,00	117,98	130,37	130,37
3.	Jumlah penduduk	139.576	141.184	143.283	145.726	148.154
4.	Rasio	1,57	1,52	0,82	0,90	0,87

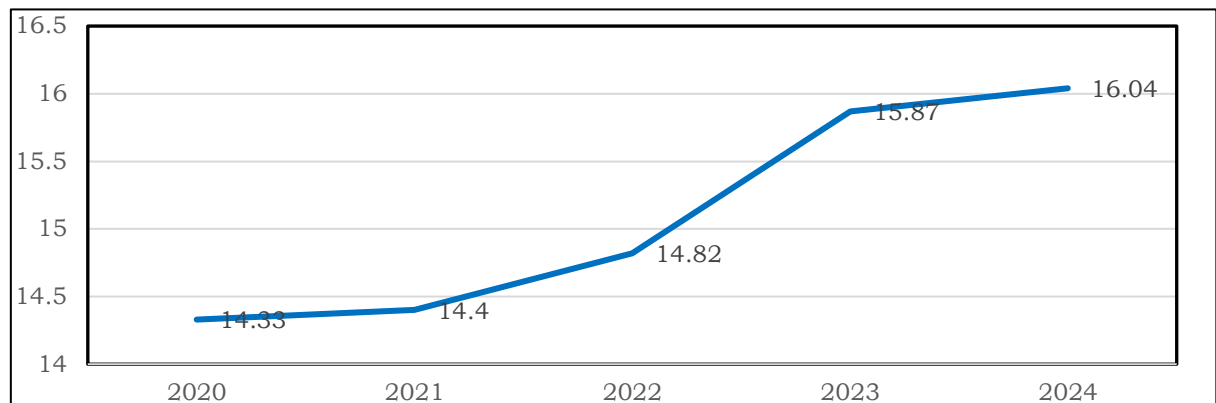
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

H). TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH

Persampahan merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap daerah, khususnya kota-kota dengan penduduk yang padat dan lahan yang terbatas. Salah satu solusi pengelolaan sampah adalah pengolahan sampah di setiap fasilitas, khususnya pengolahan di tingkat masyarakat pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Bank Sampah dan lain-lain dengan menggunakan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan.

Pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi solusi utama bagi daerah perkotaan seperti Kota Payakumbuh, khususnya semenjak tidak bisa dimanfaatkannya lagi TPA Regional di Kelurahan Kapalo Koto. Pemerintah sudah berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat dalam penanganan sampah pada tingkat rumah tangga, tapi belum optimal, karena perlu waktu yang panjang untuk merubah perilaku masyarakat dalam mengolah sampah. Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah Kota Payakumbuh digambarkan sebagai berikut.

Diagram 2.10 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2025

Dari data di atas, timbulan sampah yang terolah masih rendah, mencapai 15,87% pada tahun 2023 dan tahun 2024 meningkat menjadi 16,04%.

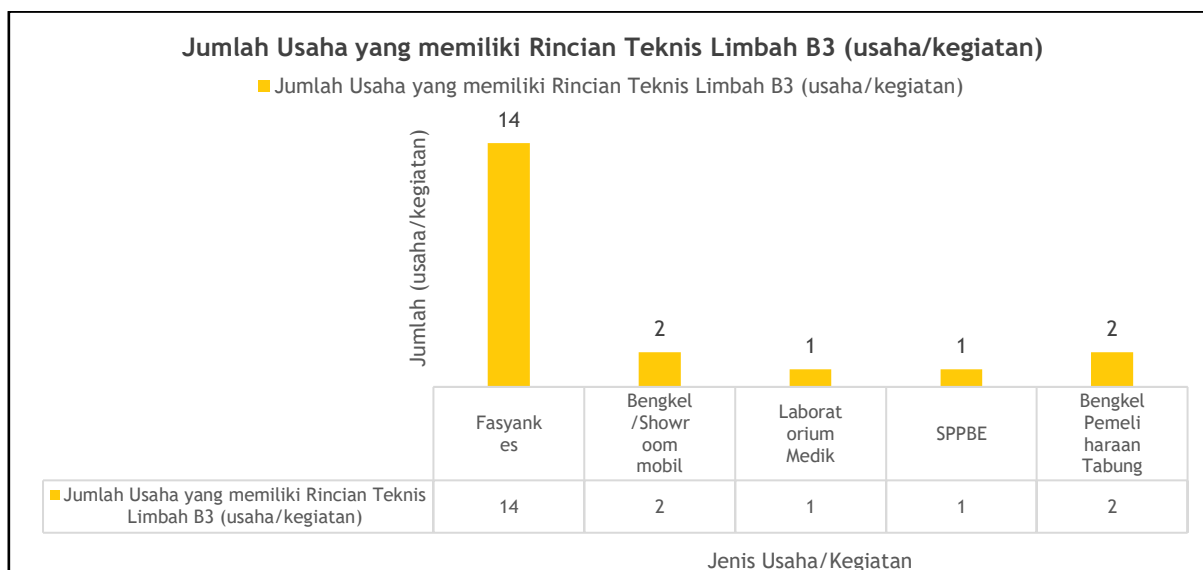
I). PROPORSI RT DENGAN LAYANAN PENUH PENGUMPULAN SAMPAH

Layanan pengumpulan sampah di Kota Payakumbuh sudah mencapai 100 persen, karena dengan wilayah perkotaan yang tidak terlalu luas dan kebijakan pemerintah dalam pengumpulan sampah oleh kelurahan dengan adanya fasilitas becak motor di setiap kelurahan. Setiap hari becak motor secara rutin menjemput sampah ke rumah-rumah masyarakat, kemudian mengumpulkan pada transfer depo sebelum diangkut ke TPA. Dengan tidak optimalnya TPA saat ini, maka pola pengelolaan sampah lebih diutamakan pada tingkat masyarakat melalui pengomposan dan pemilahan. Sebagaimana dikemukakan di atas, pola pengelolaan sampah harus beralih menggunakan teknologi modern, sehingga tidak lagi menimbulkan residu atau sisa sampah yang perlu dibuang.

J). LIMBAH B3

Pada tahun 2023 tidak ada izin mengelola limbah B3 yang diterbitkan bagi perusahaan di kota payakumbuh. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebelum memulai kegiatannya penanggung jawab usaha da-tau kegiatan harus menyusun dokumen lingkungan (amdal/ ukl-upl) terlebih dahulu. Dimana selain dipersyaratkan untuk memiliki persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pemrakarsa juga diwajibkan untuk menyusun rincian teknis limbah B3. Adapun beberapa usaha da-tau kegiatan di kota payakumbuh yang telah memiliki rincian teknis pada tahun 2023 dapat dilihat pada berikut.

Diagram 2.11 Usaha dan atau Kegiatan Di Kota Payakumbuh Yang Telah Memiliki Rincian Teknis



Sumber: DIKPLHD Kota Payakumbuh, 2023

6). RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Resiliensi dalam konteks bencana dan perubahan iklim adalah kemampuan individu, komunitas, institusi, dan sistem untuk mengantisipasi, merespons, menyesuaikan diri, dan pulih dengan cepat dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana maupun perubahan iklim, baik yang bersifat tiba-tiba (seperti banjir atau gempa bumi) maupun bertahap (seperti kekeringan atau kenaikan permukaan laut).

Resiliensi bukan sekadar kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi bencana, melainkan mencakup serangkaian langkah menyeluruh yang dimulai dari antisipasi, yakni kemampuan untuk mengidentifikasi potensi risiko serta merancang strategi pencegahan yang tepat. Selanjutnya, kesiapsiagaan menjadi kunci, yaitu melalui penyusunan rencana dan pelatihan yang matang agar masyarakat siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Ketika bencana benar-benar terjadi, respons cepat dan efektif diperlukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Setelah fase darurat, proses pemulihan dijalankan dengan membangun kembali sistem sosial dan lingkungan yang terdampak agar dapat kembali

berfungsi secara normal. Di tengah dinamika perubahan iklim yang terus berlangsung, resiliensi juga menuntut kemampuan adaptasi, yaitu penyesuaian cara hidup, kebijakan, dan sistem sosial secara berkelanjutan guna menghadapi tantangan jangka panjang.

Perubahan iklim telah memicu peningkatan kejadian bencana alam, baik dari segi frekuensi maupun intensitas. Curah hujan yang semakin tidak menentu dan ekstrem kerap menimbulkan banjir, terutama di wilayah yang memiliki sistem drainase yang tidak memadai. Di sisi lain, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan kekeringan parah, yang berdampak langsung pada sektor pertanian dan pasokan air bersih. Kondisi suhu yang terus meningkat juga memperbesar risiko terjadinya kebakaran hutan. Selain itu, naiknya permukaan air laut menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir yang rentan tergenang. Tak hanya itu, perubahan pola iklim turut mengacaukan musim tanam, sehingga mempengaruhi produktivitas pertanian dan mengganggu ketahanan pangan masyarakat.

Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, terutama akibat letaknya yang berada di jalur patahan Sumatera dan zona subduksi, sehingga rawan gempa bumi. Selain itu, topografi pegunungan membuat wilayah ini rentan terhadap banjir dan longsor, khususnya saat musim hujan. Aktivitas vulkanik dari gunung api aktif seperti Gunung Marapi dan Gunung Talang juga menjadi potensi bencana tersendiri. Di sisi lain, perubahan iklim menyebabkan pergeseran musim tanam, yang berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan pendekatan mitigasi dan adaptasi melalui berbagai langkah, antara lain:

1. Mengintegrasikan isu resiliensi dalam dokumen perencanaan jangka panjang RPJPD 2025–2045.
2. Mengaktifkan BPBD provinsi dalam penyuluhan, pelatihan, dan pemetaan risiko bencana.
3. Mendorong pembentukan dan penguatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA).
4. Melakukan revitalisasi daerah aliran sungai (DAS), penanaman pohon, serta pengelolaan tata ruang berbasis risiko bencana.

Payakumbuh berada di daerah pegunungan dan dikelilingi gunung berapi, menjadikannya rawan banjir lokal, longsor, dan angin kencang, terutama saat cuaca ekstrem. Kerentanan ini diperparah oleh kondisi drainase dan aliran sungai yang krusial bagi pengendalian bencana. Pemerintah Kota telah melakukan berbagai langkah seperti:

1. Pemetaan wilayah rawan bencana dan edukasi masyarakat, khususnya di wilayah rentan seperti Lamposi dan Payakumbuh Timur.
2. Siaga 24 jam melalui piket dan patroli, serta penerapan sistem respons cepat.
3. Kerja sama dengan sekolah dan warga untuk menumbuhkan budaya siaga bencana.

4. Perbaikan infrastruktur drainase guna mengurangi risiko banjir.
5. Penerapan pertanian adaptif untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim.

A). PERUBAHAN IKLIM

Beragam aktivitas manusia menyebabkan peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi. Sumber penghasil gas rumah kaca seperti penggunaan energi listrik, aktivitas kendaraan bermotor, penggunaan pestisida pada pertanian, kotoran hewan, limbah sisa makanan dan sumber lainnya. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa Kota Payakumbuh mempunyai kerentanan yang tinggi terhadap cuaca ekstrim.

Berdasarkan data dari signsmart.menlhk.go.id, emisi gas rumah kaca pada Kota Payakumbuh dari sektor energi, IPPU, pertanian, kehutanan dan limbah, seperti terlihat pada di bawah ini. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa emisi gas rumah kaca di Kota Payakumbuh secara umum berasal dari kegiatan pertanian.

Tabel 2.20 Emisi Gas Rumah Kaca Kota Payakumbuh (satuan Gg CO₂) Tahun 2020-2024

NO.	ITEM	2020	2021	2022	2023	2024
1	Energi	94,67	121,69	143,23	133,69	0,00
2	IPPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pertanian	51,03	19,61	19,61	51,42	50,00
4	Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Limbah	8,55	12,06	12,48	12,63	12,78
	T O T A L	154,25	155,09	175,32	197,56	62,78

Sumber: signsmart.menlhk.go.id, 2024

Berdasarkan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) KLHK, 44 kelurahan mempunyai kerentanan perubahan iklim kategori sedang dan 3 lainnya ber-kategori tinggi, seperti terlihat pada gambar diatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

B). PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK

(1) PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK (KUMULATIF)

Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar penurunan emisi GRK yang telah dicapai secara total selama periode waktu tertentu, dibandingkan dengan skenario *business-as-usual* (BAU) — yaitu skenario di mana tidak ada intervensi kebijakan mitigasi iklim. Indikator ini sangat krusial karena mencerminkan sejauh mana komitmen iklim—baik nasional maupun daerah—telah benar-benar dijalankan dalam dokumen seperti NDC atau RAD-GRK. Selain itu, angka penurunan emisi yang tercatat menunjukkan kontribusi konkret Indonesia terhadap tujuan Perjanjian Paris untuk membatasi pemanasan global di kisaran 1,5–2 °C. Terakhir, data ini menjadi dasar penting dalam menilai dan menyempurnakan kebijakan rendah karbon serta langkah-langkah pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Saat

(2) PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK (TAHUNAN)

Gambar 2.8 Peta Potensi Kerentanan terhadap Perubahan Iklim



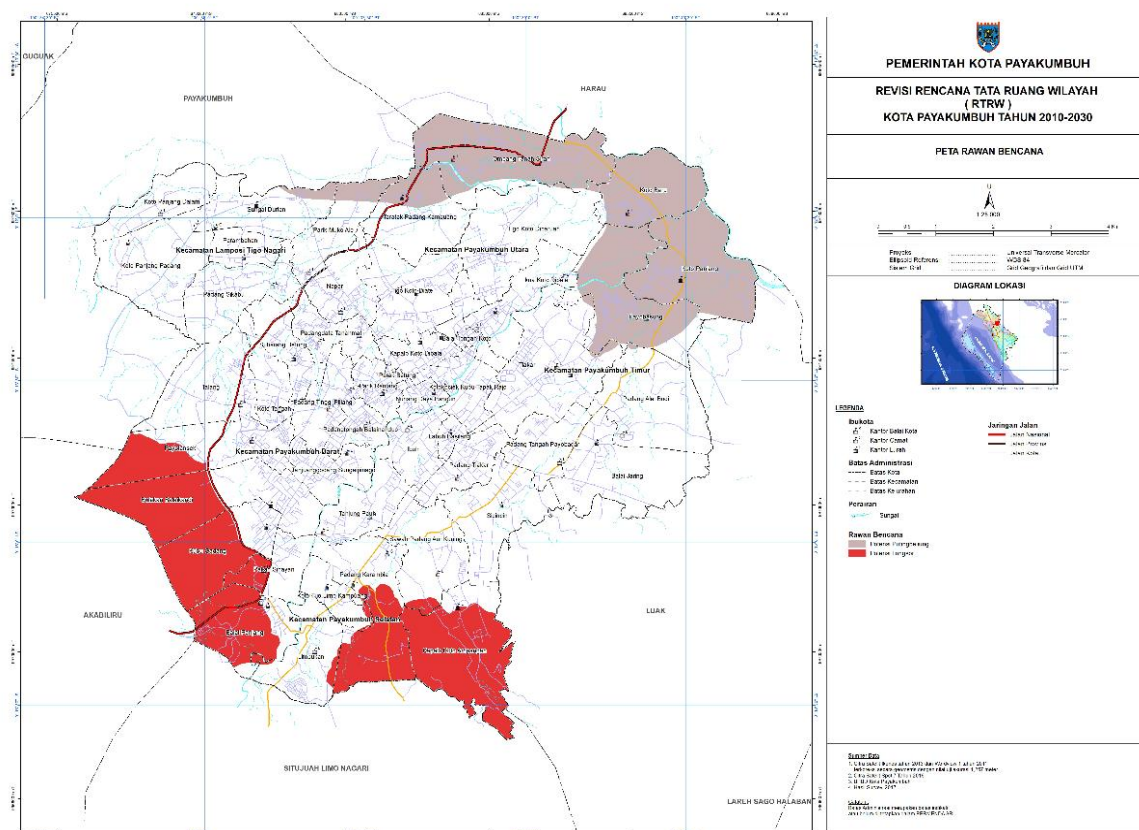
Berdasarkan pemetaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kota Payakumbuh salah satu daerah teratas di Indonesia yang rawan terhadap berbagai ancaman dan potensi bencana, seperti banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan/lahan, kekeringan dan tanah longsor, yang kemudian dilakukan Kajian Resiko Bencana (KRB) Kota Payakumbuh tahun 2022, jenis dan tingkat resiko kebencanaan di wilayah Kota Payakumbuh yang masih berlaku sampai saat ini.

Tabel 2.21 Jenis dan Tingkat Resiko Bencana di Kota Payakumbuh

NO	JENIS BENCANA	KELAS BAHAYA	KELAS KERENTANAN	KELAS KAPASITAS	KELAS RESIKO
1	Banjir	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
2	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
3	Gempa Bumi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
4	Kebakaran Hutan/ Lahan	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang
5	Kekeringan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
6	Tanah Longsor	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kota Payakumbuh, 2022

Dari kajian resiko bencana yang meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga resiko, maka terlihat bahwa tingkat resiko tertinggi adalah bencana cuaca ekstrem dan gempa bumi, dan terendah adanya tanah longsor. Walaupun demikian mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana serta menyusun rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengeliminir kerugian yang besar kepada masyarakat.

Gambar 2.9 Peta Wilayah Rawan Bencana Kota Payakumbuh

Sumber: Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010-2030

D). PERKIRAAN MENGENAI DAMPAK DAN RESIKO LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan dokumen KRB Kota Payakumbuh, resiko multi bahaya dilakukan untuk mengetahui potensi akumulasi resiko 7 bencana pada tiap-

tiap kecamatan di Kota Payakumbuh. Kajian tersebut Rekapitulasi resiko multi bahaya Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.22 Potensi Resiko Multi Bahaya di Kota Payakumbuh

No	KECAMATAN	RISIKO				
		LUAS				KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	TOTAL	
1	Lamposi Tigo Nagari	246,73	128,74	566,53	942,00	TINGGI
2	Payakumbuh Barat	597,59	1.006,94	301,47	1.906,00	TINGGI
3	Payakumbuh Selatan	582,63	885,31	0,72	1.468,66	SEDANG
4	Payakumbuh Timur	755,19	1.421,63	96,60	2.273,42	TINGGI
5	Payakumbuh Utara	461,02	420,01	571,89	1.452,92	TINGGI
KOTA PAYAKUMBUH		2.643,16	3.862,63	1.537,21	8.043,00	TINGGI

Sumber: KRB BPBD, 2023

Sebagaimana terlihat pada tabel 2.22, Kota Payakumbuh memiliki total luas resiko multi bahaya sebesar 8.043 Ha, di mana 2.643 Ha diantaranya berada pada kelas resiko Rendah, 3.862,63 Ha berada pada kelas resiko Sedang, dan 1.537,21 Ha berada pada kelas resiko Tinggi.

Tabel 2.23 Indeks Resiko Bencana

NO	KABUPATEN/ KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	KELAS RISIKO 2022
1	Pasaman Barat	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	TINGGI
2	Kepulauan Mentawai	197,20	197,20	197,20	197,20	197,20	197,20	197,20	197,20	TINGGI
3	Agam	209,20	209,20	209,20	209,20	209,20	209,20	193,52	193,52	TINGGI
4	Kota Padang	209,20	209,20	191,60	191,60	169,92	169,92	181,70	179,03	TINGGI
5	Pasaman	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	176,80	176,80	TINGGI
6	Kota Pariaman	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20	157,28	TINGGI
7	Padang Pariaman	196,80	196,80	184,11	184,11	180,72	167,21	156,73	156,73	TINGGI
8	Pesisir Selatan	189,60	189,60	189,60	189,60	189,60	189,60	169,42	152,96	TINGGI
9	Dharmasraya	143,20	143,20	143,20	143,20	143,20	143,20	137,69	137,69	SEDANG
10	Solok	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	SEDANG
11	Solok Selatan	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	SEDANG
12	Kota Bukittinggi	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	128,01	SEDANG
13	Tanah Datar	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	SEDANG
14	Lima Puluh Kota	119,20	119,20	119,20	119,20	119,20	119,20	119,20	119,20	SEDANG
15	Kota Solok	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	125,20	115,82	SEDANG
16	Kota Padang Panjang	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20	SEDANG
17	Sijunjung	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	SEDANG
18	Kota Payakumbuh	104,80	104,80	104,80	104,80	104,80	104,80	104,80	104,80	SEDANG
19	Kota Sawahlunto	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20	101,08	SEDANG

Sumber: Inarisk, 2023 (website BNPB, yang dirilis melalui laman <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>)

Berdasarkan analisis indeks resiko bencana (IRB) yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2023, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatra Barat, IRB Kota Payakumbuh tergolong pada kelas sedang dengan nilai IRB 104,80, yaitu

Gambar 2.10 Peta Resiko Bencana Multi Bahaya



RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 - 2029

yaitu: banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Adapun matriks analisis penentuan prioritas penanganan resiko bencana dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.24 Matriks Analisis Penentuan Prioritas Penanganan Resiko Bencana

PRIORITAS PENANGANAN RISIKO BENCANA		KELAS RISIKO BENCANA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA	MENURUN		KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN; KEKERINGAN	GEMPA BUMI
	TETAP			BANJIR BANDANG
	MENINGKAT	TANAH LONGSOR	BANJIR	CUACA EKSTRIM

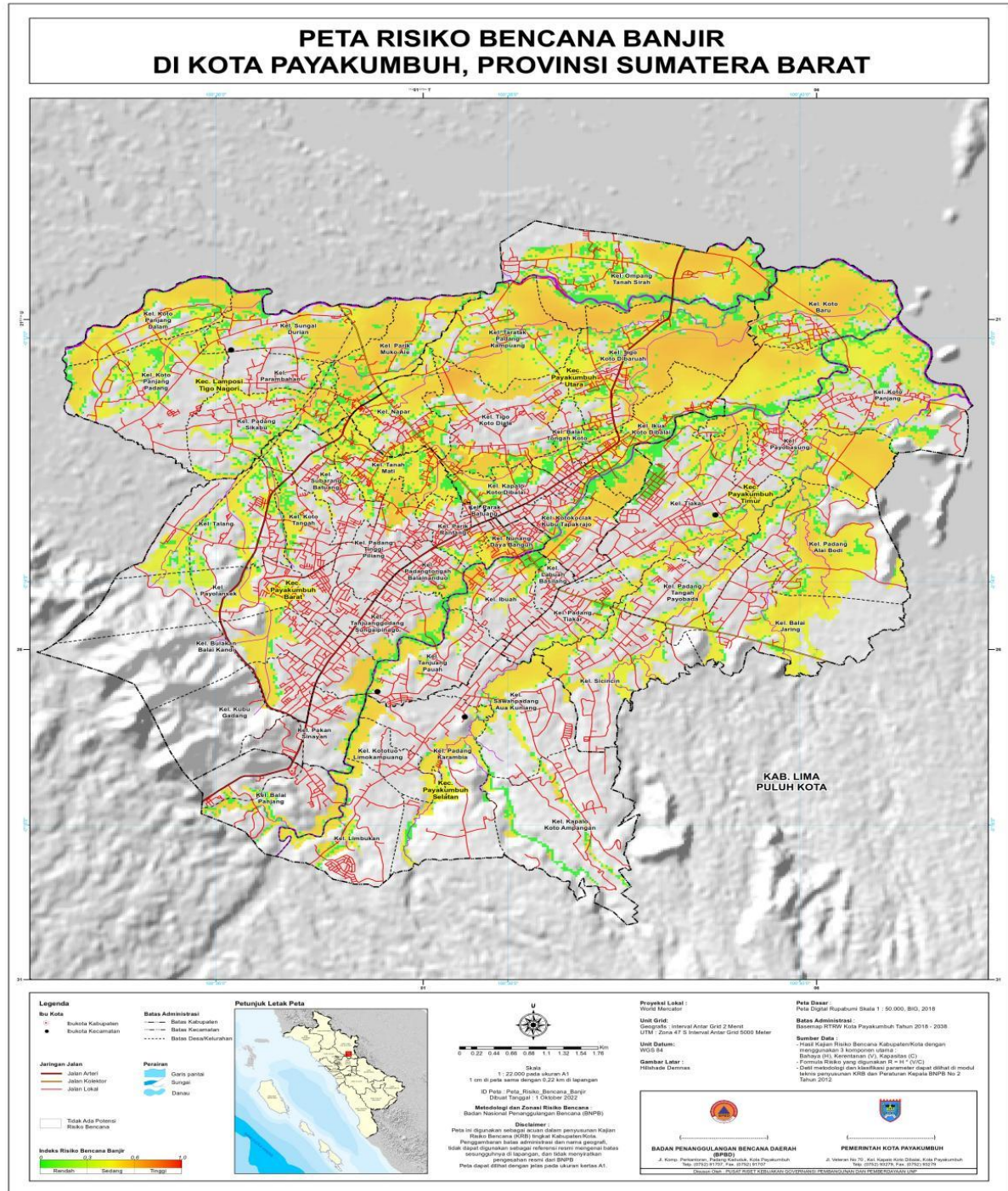
Sumber: KRB BPBD, 2023

Sementara itu, Hasil analisis Kajian Resiko Bencana di Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Tingkat resiko bencana banjir, menunjukkan kelas Sedang pada 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh, seperti terlihat pada matriks analisis penentuan prioritas penanganan resiko bencana, Bencana banjir termasuk prioritas 1.
2. Tingkat resiko bencana banjir bandang, menunjukkan kelas Tinggi pada Kecamatan Payakumbuh Timur, kelas Rendah pada 2 (dua) kecamatan, dan kelas Rendah pada Kecamatan Payakumbuh Utara, Bencana banjir bandang termasuk prioritas 1.
3. Tingkat resiko bencana cuaca ekstrim, menunjukkan kelas Tinggi pada 3 (tiga) kecamatan dan menunjukkan kelas Sedang pada 2 (dua) kecamatan di Kota Payakumbuh. Bencana cuaca ekstrem termasuk prioritas 1.
4. Tingkat resiko bencana gempa bumi, menunjukkan kelas Tinggi pada 3 (tiga) kecamatan dan menunjukkan kelas Sedang pada 2 (dua) kecamatan di Kota Payakumbuh.
5. Tingkat resiko bencana kebakaran hutan dan lahan, menunjukkan kelas Sedang pada 2 (dua) kecamatan dan menunjukkan kelas Rendah pada 3 (tiga) kecamatan di Kota Payakumbuh.
6. Tingkat resiko bencana kekeringan, menunjukkan kelas Sedang pada 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh.
7. Tingkat resiko bencana tanah longsor, menunjukkan kelas Rendah pada 3 (tiga) kecamatan, sementara 2 (dua) kecamatan lainnya tidak

beresiko terhadap bencana tanah longsor di Kota Payakumbuh, lihat gambar di bawah ini:

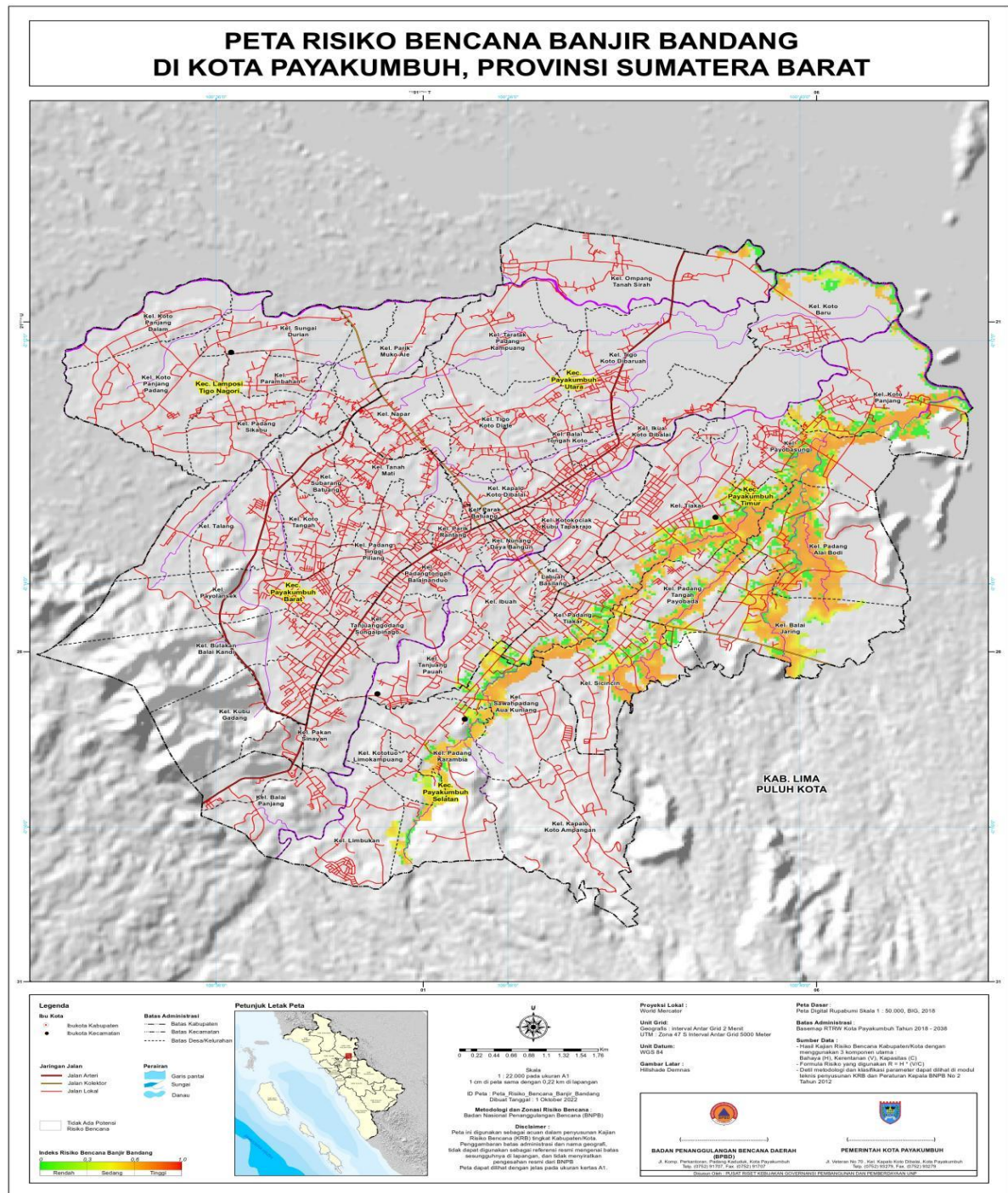
Gambar 2.11 Peta Resiko Bencana Banjir



Sumber: KRB BPBD, 2023

Tingkat resiko bencana banjir, berada menunjukkan kelas Sedang pada 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh, dengan luas resiko 3.283,40 Ha. Bencana banjir termasuk prioritas 1.

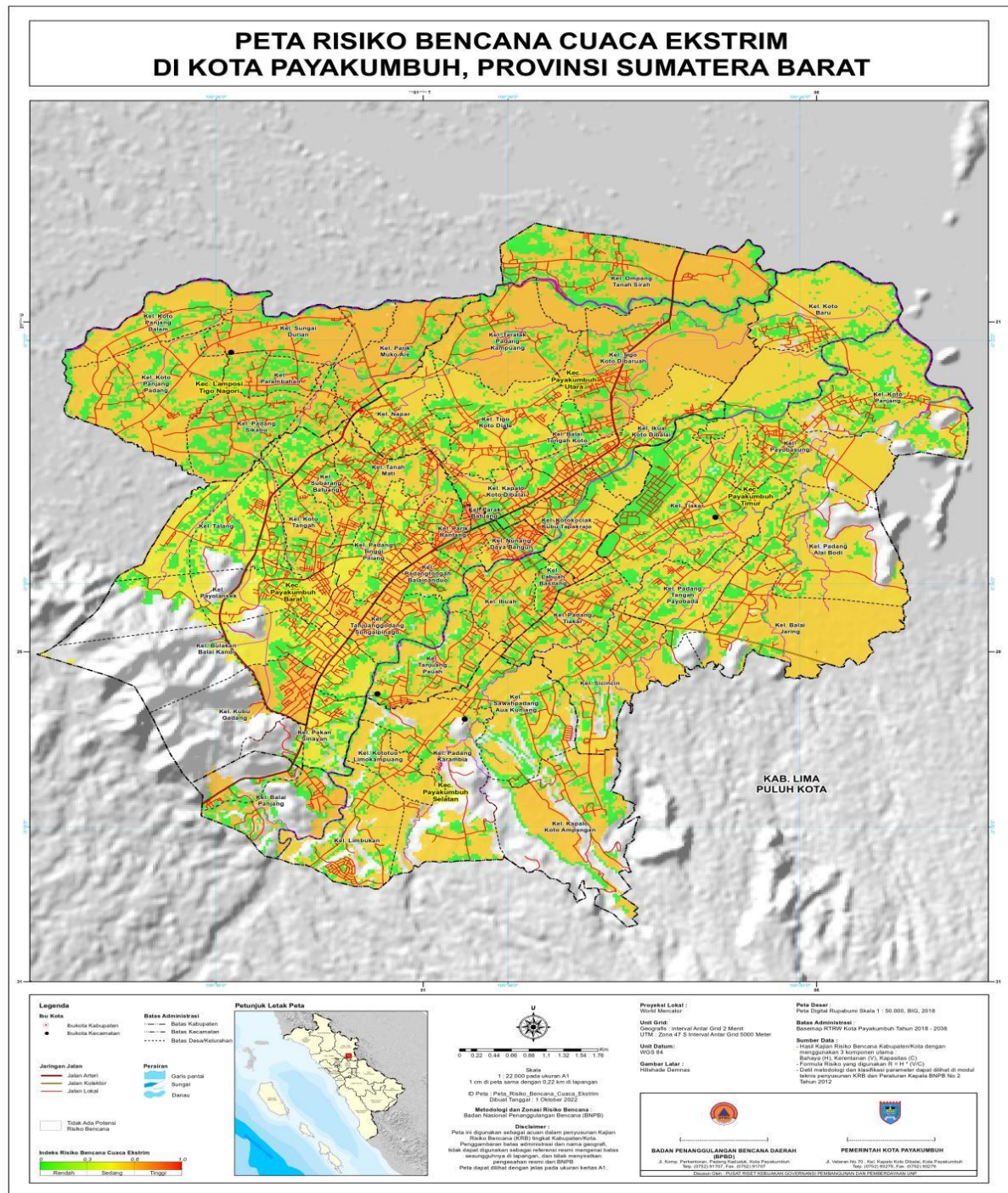
Gambar 2.12 Peta Resiko Bencana Banjir Bandang



Sumber: KRB BPBD, 2023

Tingkat resiko bencana banjir bandang, menunjukkan kelas Tinggi pada Kecamatan Payakumbuh Timur, kelas Rendah pada 2 (dua) kecamatan, dan kelas Rendah pada Kecamatan Payakumbuh Utara, dengan luas resiko 743,90 Ha di mana Bencana banjir bandang termasuk prioritas 1.

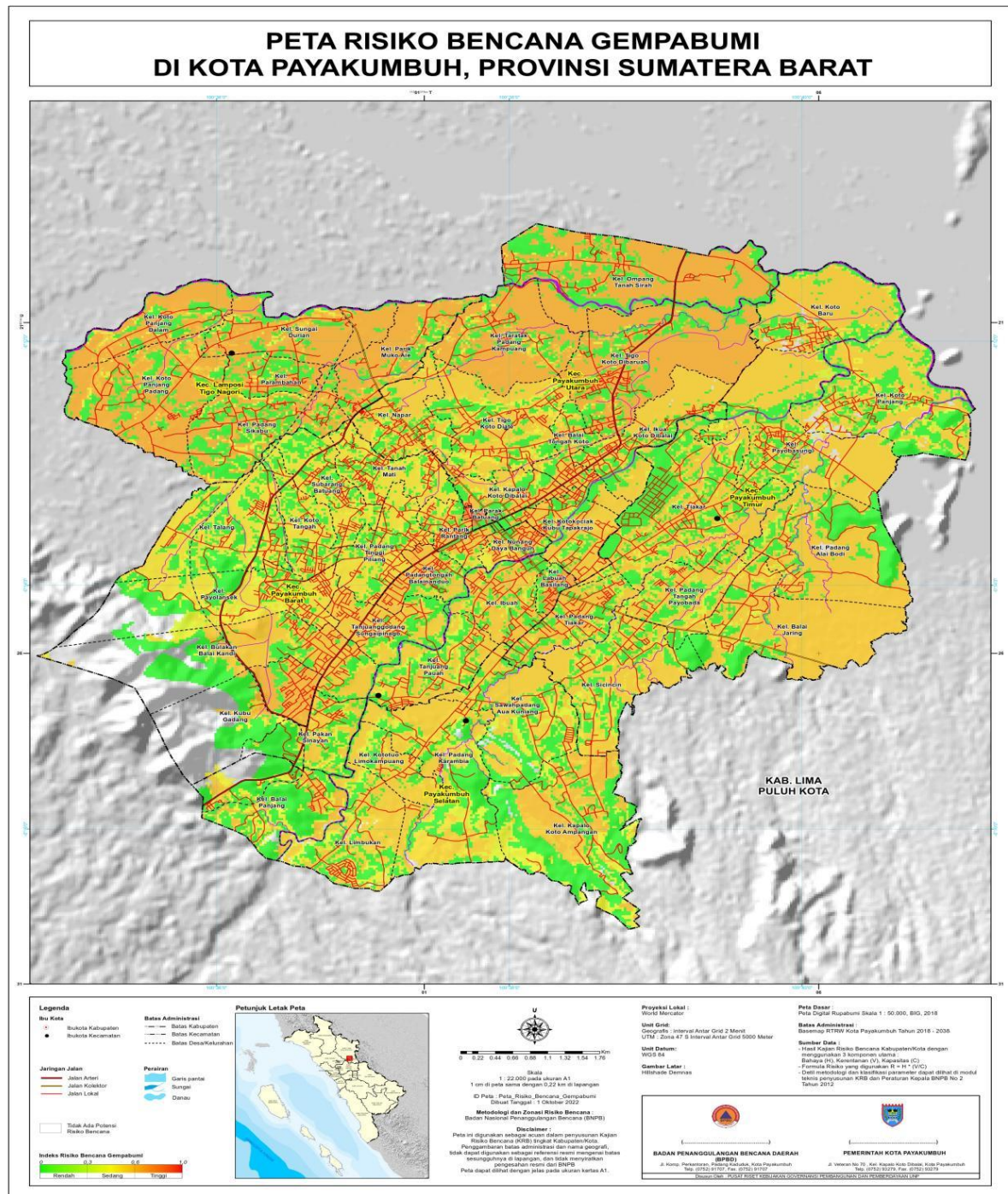
Gambar 2.13 Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrem



Sumber: KRB BPBD, 2023

Tingkat resiko bencana cuaca ekstrim, menunjukkan kelas Tinggi pada 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan lamposi Tigo Nagori, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Utara dan menunjukkan kelas Sedang pada 2 (dua) kecamatan di Kota Payakumbuh yakni Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Payakumbuh Timur, dengan total luasan resiko adalah 5.931,52 Ha. Bencana cuaca ekstrem termasuk prioritas 1.

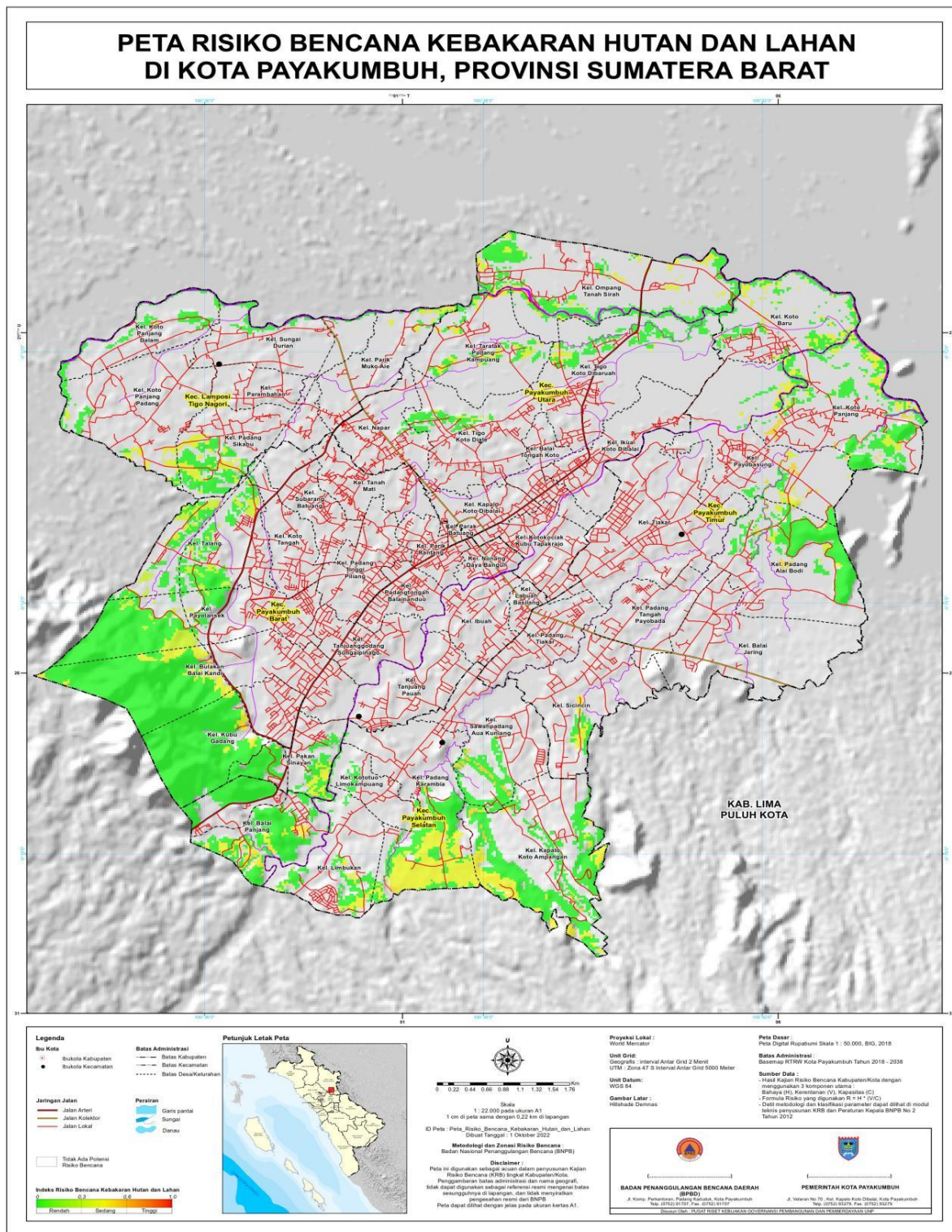
Gambar 2.14 Peta Resiko Bencana Gempa Bumi



Sumber: KRB BPBD, 2023

Tingkat resiko bencana gempa bumi, menunjukkan kelas Tinggi pada 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Utara dan menunjukkan kelas Sedang pada 2 (dua) kecamatan di Kota Payakumbuh yakni Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Payakumbuh Timur dengan luasan resiko adalah 6.904,25 Ha

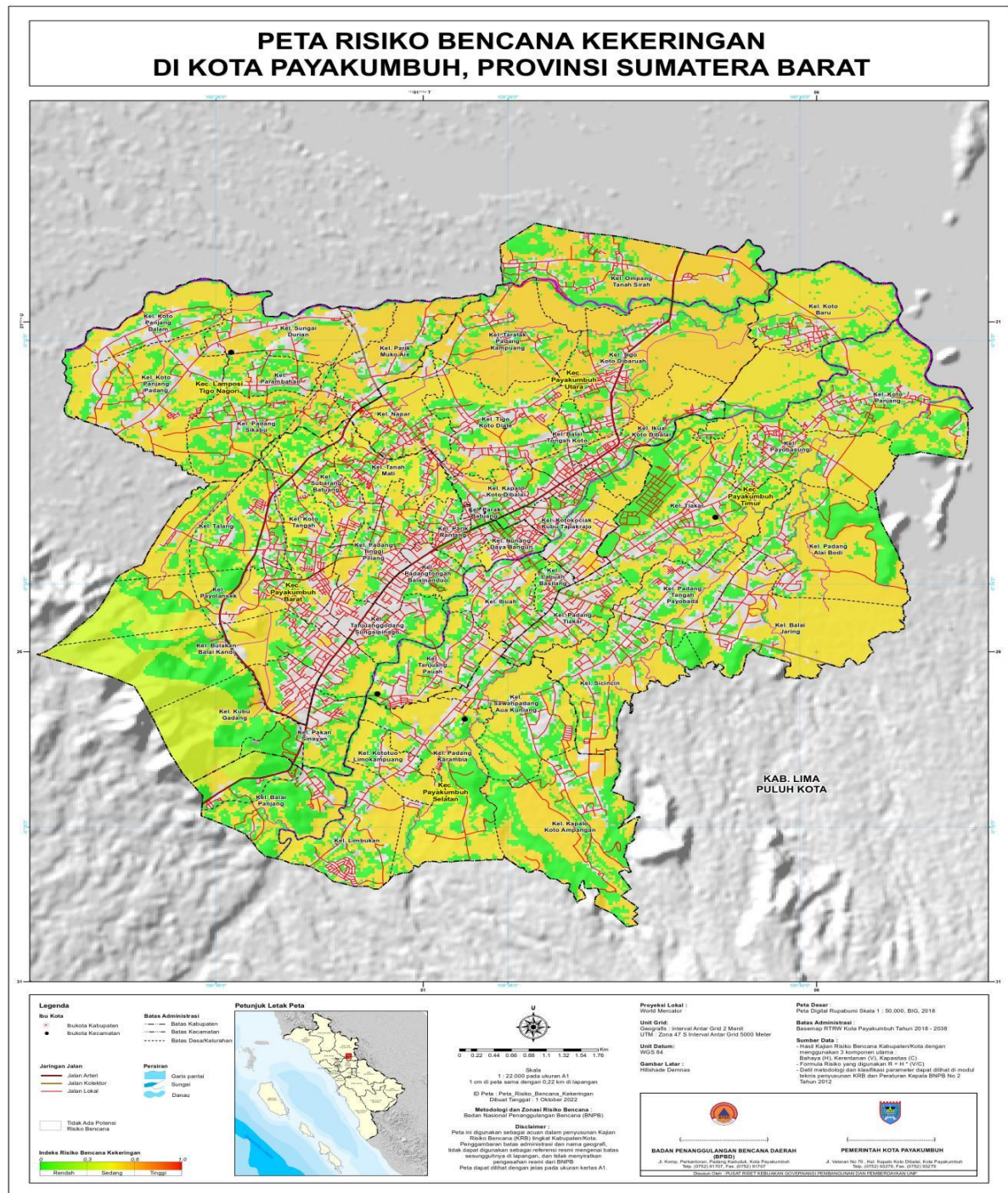
Gambar 2.15 Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan



Sumber: KRB BPBD, 2023

Tingkat resiko bencana kebakaran hutan dan lahan, menunjukkan kelas Sedang pada 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan dan menunjukkan kelas Rendah pada 3 (tiga) kecamatan di Kota Payakumbuh yakni Kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara dengan total luasan resiko adalah 1.428,02 Ha.

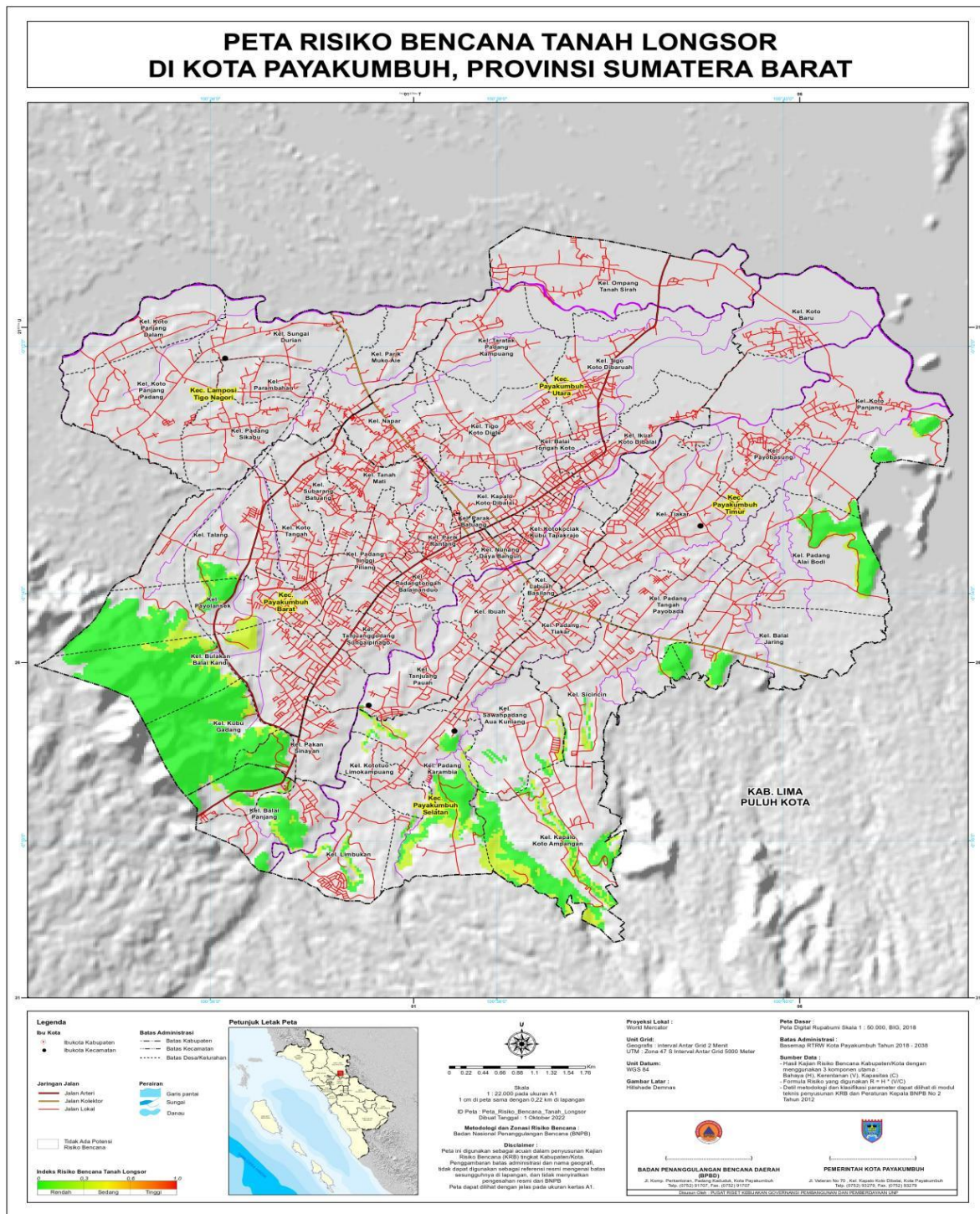
Gambar 2.16 Peta Resiko Bencana Kekeringan



Sumber: KRB BPBD, 2023

Tingkat resiko bencana kekeringan, menunjukkan kelas Sedang pada 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh dengan total luasan resiko adalah 5.408,87 Ha.

Gambar 2.17 Peta Resiko Bencana Tanah Longsor



Sumber: KRB BPBD, 2023

Tingkat resiko bencana tanah longsor, menunjukkan kelas Rendah pada 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Selatan dengan Total luas resiko adalah 761,64H, sementara 2 (dua) kecamatan lainnya tidak beresiko terhadap bencana tanah longsor di Kota Payakumbuh.

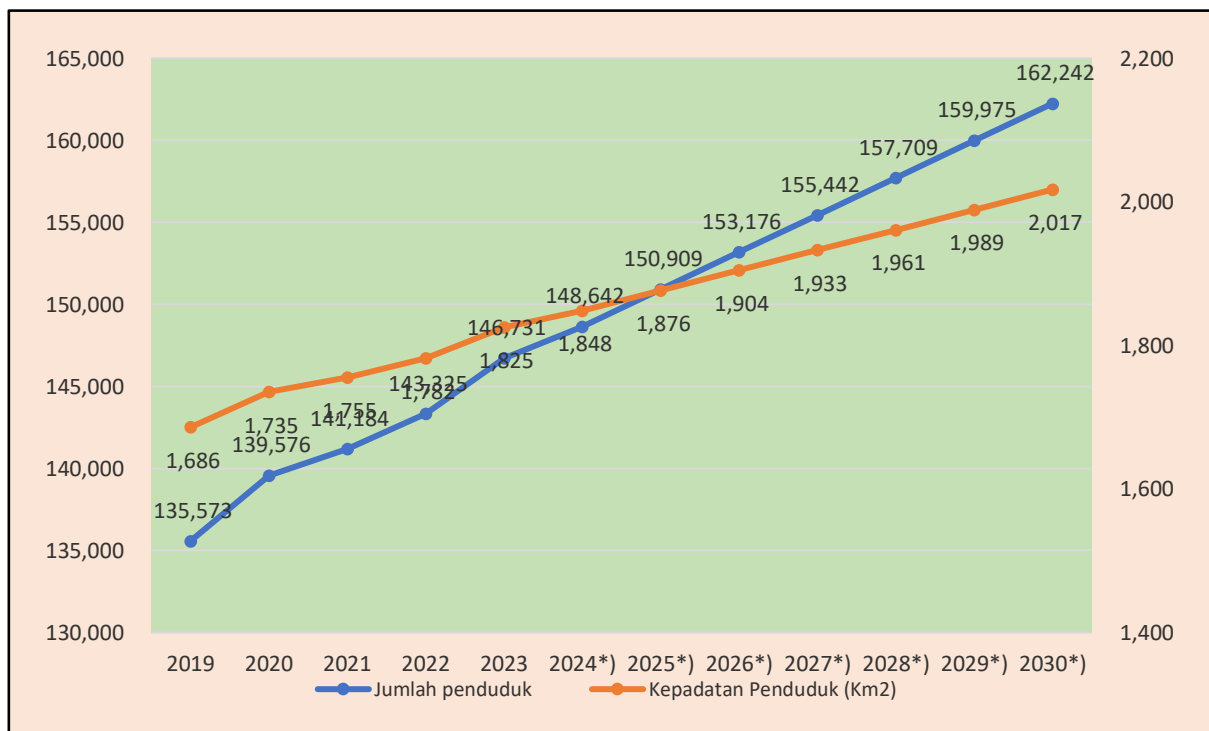
7). DEMOGRAFI

Aspek demografi menggambarkan dinamika kependudukan pada suatu wilayah yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, rasio penduduk dan kepadatan penduduk.

A). JUMLAH PENDUDUK, PENDUDUK USIA PRODUKTIF, PENDUDUK USIA TIDAK PRODUKTIF, PENDUDUK USIA LANJUT DAN ANGKA KETERGANTUNGAN

Kepadatan Penduduk adalah ukuran jumlah penduduk yang tinggal dalam satu kilometer persegi wilayah. Semakin besar angka kepadatan penduduk maka semakin padat penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Kepadatan penduduk Payakumbuh tahun 2019 adalah 1.686 orang per kilometer persegi dan diprediksi sampai tahun 2030 menjadi 2.017 orang per kilometer persegi. Sedangkan jumlah penduduk Payakumbuh diprediksi mencapai 162,242 jiwa pada tahun 2030.

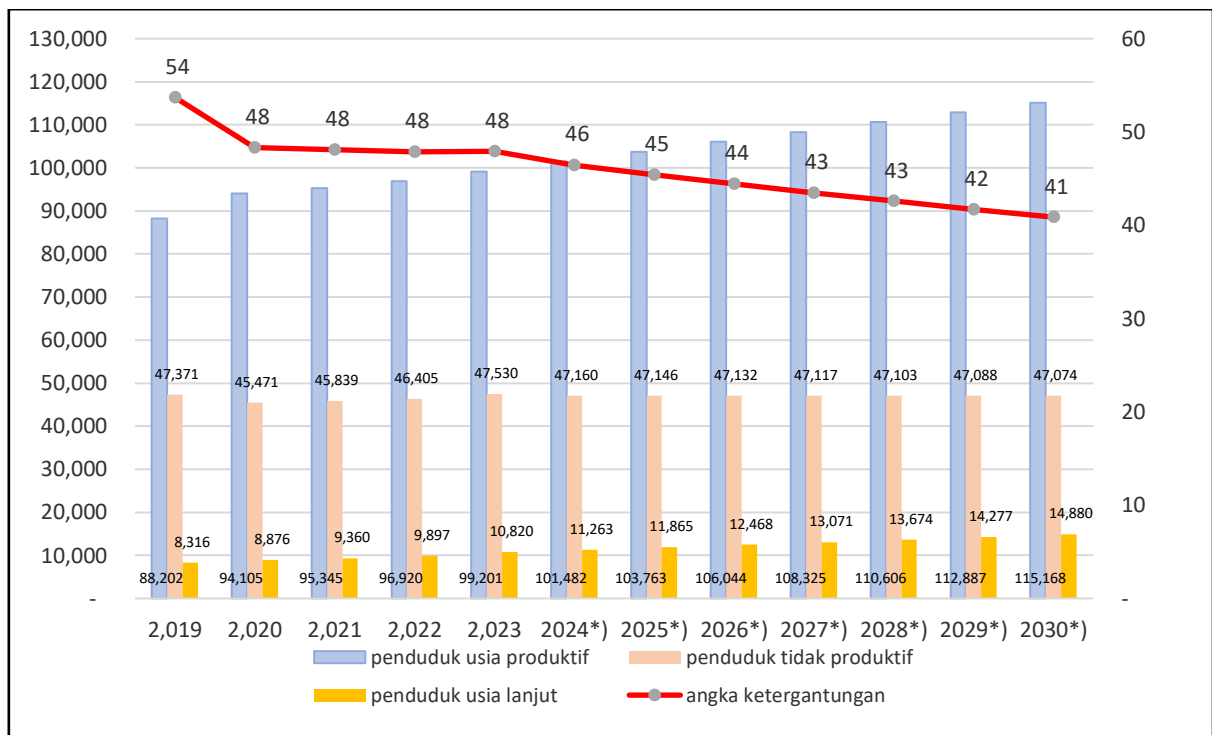
Diagram 2.12 Jumlah dan Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2019-2030



Sumber: Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2020-2025. Hasil Analisa Bappeda

Pada diagram 2.12 dapat dilihat perkembangan dan proyeksi angka ketergantungan penduduk Kota Payakumbuh sampai tahun 2030, serta pengelompokan penduduk berdasarkan usia produktif, penduduk tidak produktif dan lansia. Secara umum angka ketergantungan penduduk Payakumbuh cenderung turun dari tahun ketahun dan jumlah penduduk usia lanjut cenderung naik setiap tahunnya. Ini menjadi catatan pemerintah kota kedepannya.

Diagram 2.13 Perkembangan dan Proyeksi Penduduk Produktif, Penduduk Tidak Produktif, Penduduk Usia Lanjut dan Angka Ketergantungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2019-2030

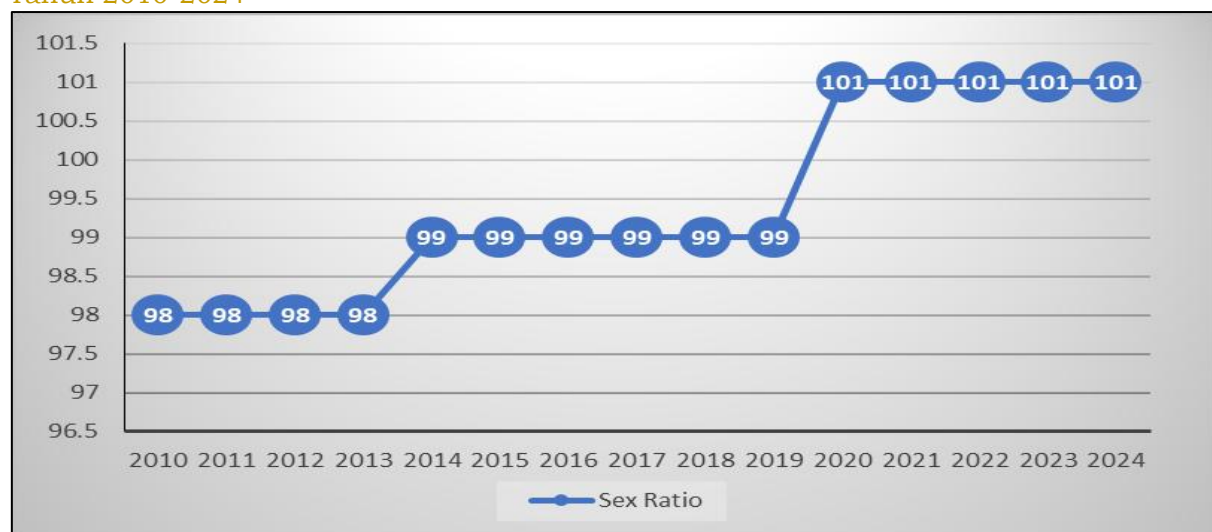


Sumber: Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2020-2025 *) Angka Proyeksi

B). RASIO PENDUDUK

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu. Dalam 14 tahun terakhir, *sex ratio* penduduk Kota Payakumbuh mengalami perubahan, di mana sejak tahun 2010-2019 didominasi oleh perempuan, namun sejak tahun 2020-2024 justru jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dengan rasio 101, artinya terdapat 101 jiwa laki-laki untuk setiap 100 jiwa perempuan.

Diagram 2.14 Perkembangan Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2010-2024



Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2025

C). KEPADATAN PENDUDUK

Kondisi kependudukan Kota Payakumbuh setiap tahun mengalami peningkatan, di mana tercatat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,31% pada tahun 2024. Penduduk ini bermukim tersebar pada 5 (lima) kecamatan, sehingga kepadatan penduduk pada setiap kecamatan berbeda-beda.

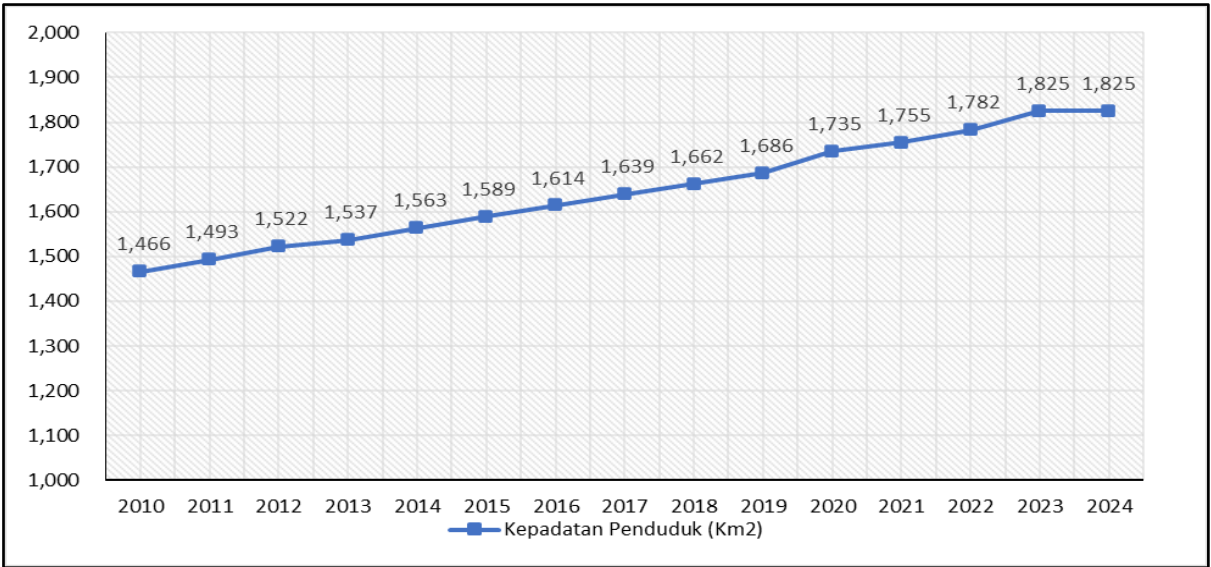
Tabel 2.25 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	LUAS (KM ²)	2020		2021		2022		2023		2024	
			Jumlah (Jiwa)	Density (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (Jiwa/Km ²)
1.	Payakumbuh Barat	19,064	54.532	2.861	55.133	2.893	55.938	2.934	56.490	2.964	57.200	3.001
2.	Payakumbuh Timur	22,730	29.325	1.290	29.669	1.305	32.762	1.441	30.450	1.339	12.931	1.357
3.	Payakumbuh Utara	14,528	32.242	2,219	32.443	2.233	30.125	2.074	32.930	2.266	30.850	2.284
4.	Payakumbuh Selatan	14,683	11.990	817	12.205	831	12.469	849	12.680	864	33.190	881
5.	Lamposi Tigo Nagori	9,425	11.487	1.218	11.734	1.244	12.031	1.276	12.280	1.303	12.560	1.333
	Total	80,43	139.576	1.735	141.184	1.755	143.325	1.782	144.830	1.801	146.731	1.825

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2021–2025, 2025

Kepadatan tertinggi tahun 2024 ada pada Kecamatan Payakumbuh Barat dengan angka 3.001 jiwa/km² diikuti oleh Kecamatan Payakumbuh Utara dengan kepadatan sebesar 2.284 jiwa/km². Kondisi ini disebabkan oleh kedua kecamatan ini merupakan pusat perdagangan barang dan jasa atau daerah pusat bisnis serta pusat pemerintahan di Kota Payakumbuh. Selain dari faktor tersebut pilihan/preferensi masyarakat terhadap lokasi pemukiman juga dipengaruhi oleh topografi wilayah seperti luas daerah Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Selatan tidak terlalu berbeda, tetapi karena Kecamatan Payakumbuh Selatan lebih didominasi perbukitan, sehingga kecamatan Payakumbuh Utara lebih dipilih sebagai kawasan pemukiman dibandingkan Payakumbuh Selatan.

Diagram 2.15 Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2010-2024



Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2024

Secara keseluruhan, kepadatan penduduk Kota Payakumbuh terus mengalami kenaikan, pada tahun 2024 sudah mencapai 1.825 jiwa/km², meningkat hampir 25% dibandingkan tahun 2010 yang hanya 1.466 jiwa/km². Rata-rata setiap tahun terjadi peningkatan kepadatan penduduk sebesar 26 jiwa/km². Ini tentunya menjadi tantangan pembangunan daerah jangka panjang dalam pengaturan pemanfaatan ruang wilayah.

D). STRUKTUR DAN KARAKTERISTIK PENDUDUK

(1). STRUKTUR PENDUDUK BERDASARKAN USIA

Klasifikasi penduduk berdasarkan usia berguna untuk memperlihatkan karakteristik penduduk suatu daerah, dan juga untuk menunjukkan tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) antara penduduk produktif dengan penduduk non produktif.

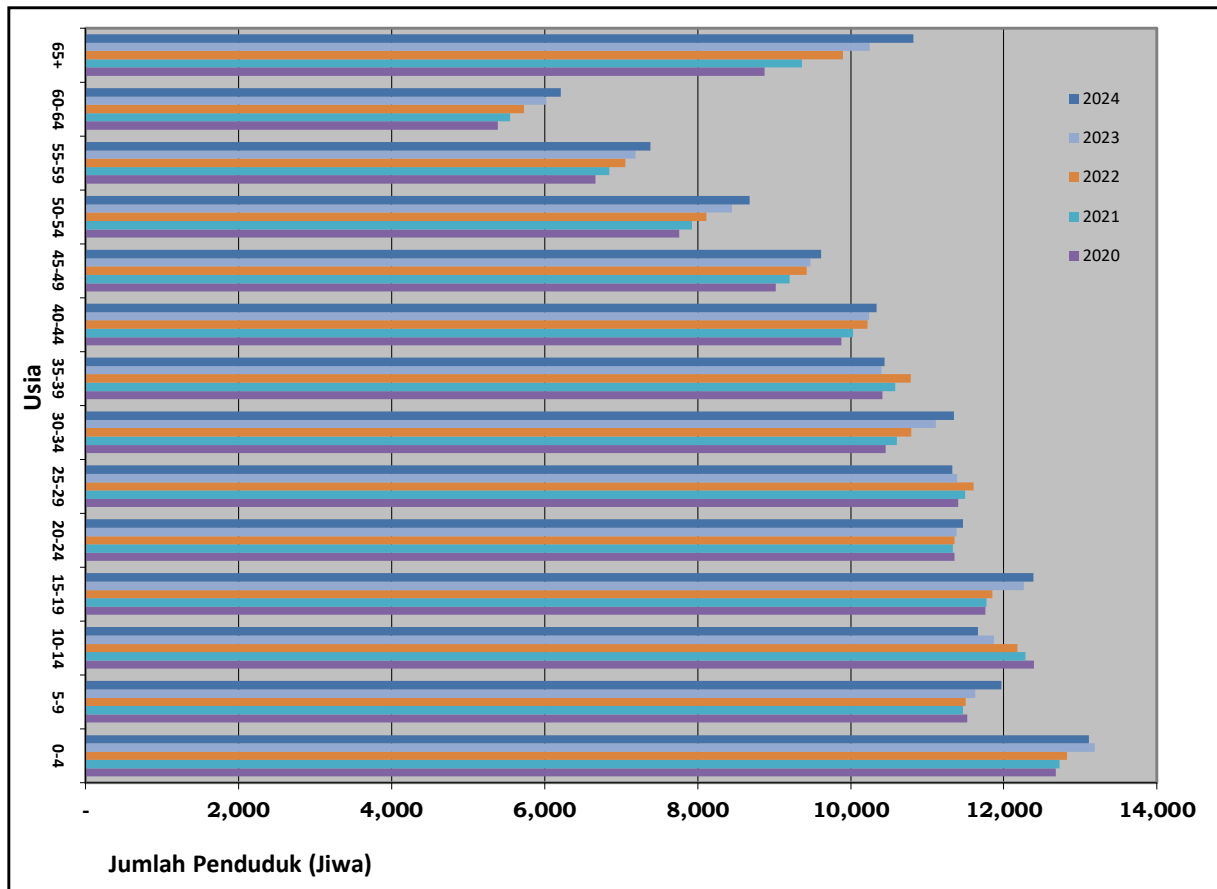
Tabel 2.26 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2020-2024

NO	KELOMPOK USIA	2020	2021	2022	2023	2024
1.	0-4	12.682	12.728	12.825	13.190	13.110
2.	5 -9	11.521	11.467	11.503	11.630	11.970
3.	10 -14	12.392	12.284	12.180	11.870	11.660
4.	15-19	11.761	11.777	11.848	12.260	12.391
5.	20-24	11.357	11.338	11.358	11.380	11.470
6.	25-29	11.406	11.493	11.604	11.390	11.330
7.	30-34	10.459	10.606	10.788	11.110	11.350
8.	35-39	10.417	10.582	10.786	10.400	10.440
9.	40-44	9.879	10.032	10.218	10.240	10.340
10.	45-49	9.019	9.202	9.424	9.470	9.610
11.	50-54	7.758	7.923	8.114	8.450	8.680
12.	55-59	6.664	6.843	7.052	7.190	7.380
13.	60-64	5.385	5.549	5.728	6.020	6.210
14.	65+	8.876	9.360	9.897	10.250	10.820
Jumlah		139.576	141.184	143.325	144.830	146.731

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2021–2025, 2025

Data jumlah penduduk tersebut jika ditampilkan dalam bentuk histogram, gambaran struktur penduduk Kota Payakumbuh dapat dilihat pada diagram berikut yang berkaitan erat dengan analisis tingkat ketergantungan pada struktur penduduk Kota Payakumbuh.

Diagram 2.16 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2021–2025, 2025

Tabel dan diagram jumlah penduduk perkelompok usia di atas memperlihatkan kondisi kependudukan di Kota Payakumbuh bercirikan ekspansif, di mana tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian, yang berarti kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah sudah cukup baik dari tahun ke tahun. Selain itu jumlah penduduk produktif (15 -64 tahun) lebih banyak dari jumlah penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), di mana perbandingan ini akan menghasilkan rasio beban tanggungan penduduk yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

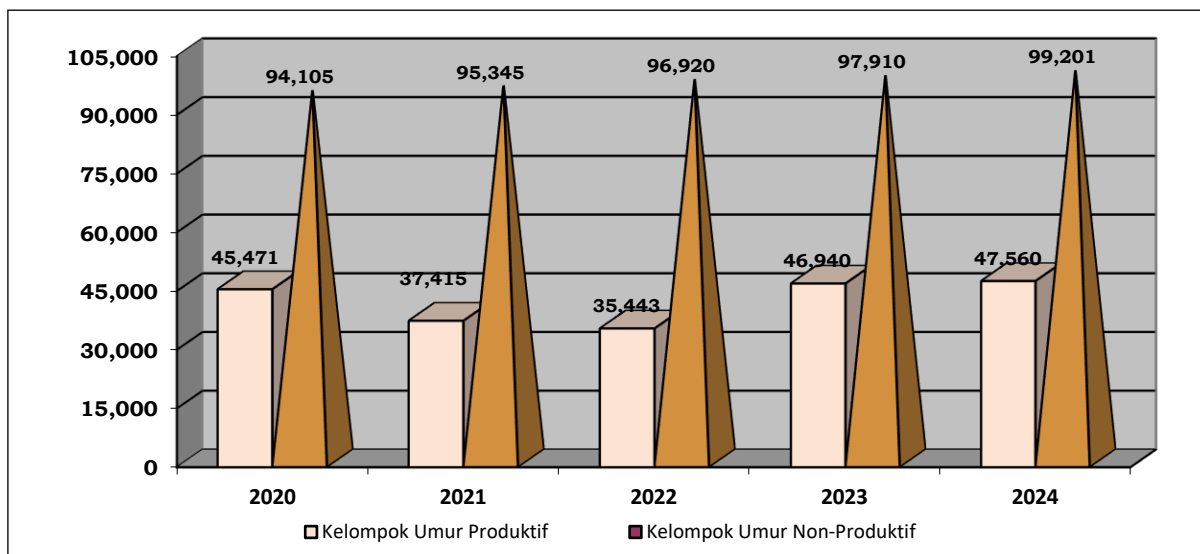
Tabel 2.27 Perhitungan Rasio Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2020– 2024

NO	KELOMPOK UMUR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelompok Umur Non-Produktif	45.471	45.839	46.405	36.690	47.560
2	Kelompok Umur Produktif	94.105	95.345	96.920	97910	99.201
3	Rasio Beban Tanggungan (:100)	48	48	48	48	48

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2021-2025, Data diolah oleh Bappeda

Pengolahan data diatas menunjukkan dari tahun 2020 sampai 2024 rasio tanggungan antara usia non produktif dengan usia produktif berada pada posisi 48 : 100, dimana setiap 100 jiwa usia produktif akan menanggung 48 jiwa non produktif.

Diagram 2.17 Jumlah Kelompok Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024



Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2021-2025. Data diolah oleh Bappeda

(2). STRUKTUR PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN

Jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Payakumbuh pada tahun 2024 adalah 77.876 jiwa, di mana 74.085 jiwa merupakan penduduk yang sudah bekerja atau 95,13% dari angkatan kerja. Berdasarkan tabel berikut ini, sektor jasa masih merupakan sektor favorit yang terlihat dari meningkatnya serapan tenaga kerja pada sektor ini, dalam hal ini sektor jasa yang merupakan basis di Kota Payakumbuh. Untuk tahun 2024 sektor perdagangan menyerap 62,62% dari jumlah angkatan kerja pada tahun tersebut, yang melebihi setengah dari angkatan kerja aktif. Untuk sektor lainnya juga terdapat peningkatan dalam serapan tenaga kerja, termasuk sektor pertanian yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena mulai giat kegiatan masyarakat tani palawija/sayur-sayuran di sekitar Kecamatan Payakumbuh Utara.

Tabel 2.28 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2020-2024

NO	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	6.259	7.100	9.008	10.902	9.281
2.	Industri Pengolahan	13.891	14.419	14.459	14.445	15.372
3.	Jasa	44.994	47.979	46.660	48.790	49.432
Jumlah yang Bekerja		65.144	69.498	70.127	74.137	74.085
Jumlah Pengangguran/ Mencari Kerja		4.664	4.805	3.812	3.770	3.791
Total		69.808	74.303	73.939	77.907	77.876

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2021–2025, 2025

(3). STRUKTUR PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat partisipasi pendidikan di Kota Payakumbuh pada tabel 2.29 terlihat bahwa secara umum meningkat setiap jenjang pendidikan setiap tahun, ini terjadi karena peningkatan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan. Data ini juga berguna bagi sebagai dasar bagi

pemerintah untuk menghitung jumlah guru, sekolah dan sarana pendidikan lainnya yang berguna untuk meningkatkan SDM yang berdaya saing.

Tabel 2.29 Tingkat Partisipasi Pendidikan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

NO	PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tidak/Belum Pernah Sekolah	23.287	23.436	23.584	24.018	24.621
2.	Tidak/ Belum Tamat SD	16.157	15.873	15.875	16.127	16.228
3.	SD	18.800	17.607	17.293	17.033	17.564
4.	SMP	20.258	20.065	19.804	20.033	20.205
5.	SMA	44.713	46.653	47.350	48.968	49.052
6.	Diploma I/II	706	668	668	678	631
7.	Akademisi/Diploma III/ Sarjana Muda	3.759	3.863	3.877	3.990	4.035
8.	Diploma IV/ S1	11.709	12.272	12.479	12.956	13.426
9.	S2 dan S3	812	847	883	924	968
Total		140.201	141.284	141.813	144.727	146.731

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2021–2025, 2025

E). PROYEKSI DEMOGRAFI

Untuk proyeksi kependudukan digunakan proyeksi terhadap *Total Fertility Rate* (TFR) dan *Infant Mortality Rate* (IMR), untuk proyeksi penduduk tahun 2025-2030 selanjutnya dapat dilihat pada beberapa tabel 2.30 berikut.

Tabel 2.30 Parameter Proyeksi Penduduk 2025-2030

PARAMETER	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FERTILITAS							
<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,40	2,30	2,34	2,30	2,28	2,25	2,23
MORTALITAS							
<i>Infant Mortality Rate (IMR)</i>	13,98	10,84	12,11	11,45	10,27	9,86	9,36

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Diolah oleh Bappeda 2024

Parameter hasil proyeksi penduduk Kota Payakumbuh tahun 2025-2030 dari *Total Fertility Rate* (TFR)/Fertilitas trennya cenderung mengalami penurunan. Dimana data realisasi tahun 2024 sebesar 2,40 menjadi 2,23 pada proyeksti TFR tahun 2030. Sedangkan *Infant Mortality Rate* (IMR)/Mortalitas juga cenderung turun dari 13,98 pada kondisi tahun 2024 turun menjadi 9,36 pada proyeksi tahun 2030.

Tabel 2.31 Proyeksi Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030

JENIS KELAMIN	PENDUDUK TAHUN 2024 (ORANG)	PROYEKSI PENDUDUK (ORANG)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-Laki	73.761	74.658	75.550	76.420	77.260	78.100	78.909
Perempuan	72.970	73.939	74.900	75.860	76.800	77.730	78.664
Jumlah penduduk	146.731	148.597	150.450	152.270	154.060	155.830	157.573
Sex ratio	101,08	100,97	100,87	100,74	100,60	100,48	100,31

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi, penduduk Kota Payakumbuh tahun 2030 diperkirakan berjumlah 157.573 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 78.909 jiwa dan Perempuan 78.664 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk sebesar adalah sebesar 1,04% per tahun. Dari tabel 2.31 dapat dihitung rasio jenis kelamin (*sex ratio*) tahun 2030 sebesar 100,31. Sex ratio menunjukkan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan, dengan kata lain pada tahun 2030 populasi laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 2.32 Proyeksi Penduduk Kota Payakumbuh Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2030

KELOMPOK UMUR	PENDUDUK TAHUN 2024 (ORANG)	PROYEKSI PENDUDUK (ORANG)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	13.115	12.723	12.700	12.670	12.650	12.640	12.640
5-9	11.971	12.606	12.850	13.050	13.140	13.070	12.680
10-14	11.662	11.511	11.450	11.490	11.660	11.990	12.630
15-19	12.397	12.421	12.330	12.150	11.930	11.730	11.580
20-24	11.472	11.583	11.740	11.930	12.120	12.240	12.270
25-29	11.334	11.271	11.260	11.280	11.330	11.420	11.530
30-34	11.350	11.518	11.600	11.590	11.540	11.470	11.410
35-39	10.442	10.536	10.710	10.960	11.220	11.460	11.640
40-44	10.343	10.411	10.440	10.440	10.440	10.470	10.570
45-49	9.612	9.744	9.880	10.020	10.140	10.240	10.310
50-54	8.687	8.876	9.050	9.220	9.360	9.500	9.640
55-59	7.385	7.592	7.820	8.060	8.300	8.530	8.730
60-64	6.213	6.399	6.580	6.760	6.930	7.130	7.340
65-69	4.731	4.953	5.170	5.370	5.570	5.750	5.930
70-74	3.082	3.282	3.480	3.690	3.900	4.100	4.300
75+	3.015	3.171	3.370	3.590	3.840	4.100	4.390
Jumlah	146.731	148.597	150.450	152.270	154.060	155.830	157.570

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi pada tabel 2.32 jumlah penduduk usia produktif mengalami penambahan pada Tahun 2025-2030, dengan adanya peningkatan pada jumlah penduduk usia lansia (65 tahun ke atas), sedangkan untuk usia anak-anak cenderung tetap, bahkan menurun.

Tabel 2.33 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2025-2030

KELOMPOK UMUR	PENDUDUK TAHUN 2024 (Org)	PROYEKSI PENDUDUK (ORANG)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-14	36.708	36.840	36.840	37.000	37.210	37.450	37.953
15-64	99.205	100.351	100.351	101.410	102.410	103.310	105.002
>65	10.818	11.406	11.406	12.020	12.650	13.310	14.618
Rasio Ketergantungan	47,91	48,04	48,08	48,34	48,69	49,13	50,07

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Tabel 2.33 di atas menunjukkan komposisi dari kelompok umur penduduk Kota Payakumbuh mengalami pergeseran. Kelompok usia tua (60

tahun ke atas) meningkat seiring dengan bertambahnya tahun. Di dalam ilmu demografi, jika proporsi penduduk usia tua di atas 10% dari total penduduk, mengindikasikan kondisi kependudukan suatu daerah memasuki fase struktur penduduk usia tua.

Dependency ratio atau angka ketergantungan di bawah 50 menunjukkan kondisi beban ketergantungan oleh penduduk usia produktif relatif kecil. Sehingga ini adalah saatnya daerah yang memiliki kondisi ini dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik. Hingga tahun 2030 *window of opportunity* sedang terbuka di Kota Payakumbuh. Untuk melihat gambaran penduduk selalu divisualkan dengan piramida penduduk. Dengan mengamati bentuk penduduk serta perubahan bentuk piramida penduduk dari waktu ke waktu banyak informasi kependudukan dari suatu wilayah. Informasi ini dapat memudahkan suatu negara dalam membentuk kebijakan demografi tertentu seperti mendorong jumlah kelahiran atau justru mengurangi jumlah kelahiran dengan metode keluarga berencana dan kontrasepsi. Hingga tahun 2030, *window of opportunity* sedang berlangsung karena adanya bonus demografi, di mana jumlah penduduk produktif di posisi yang optimal. Sehingga untuk pemanfaatan bonus demografi ini perlu rancangan untuk penyerapan tenaga kerja yang menggerakkan faktor faktor ekonomi. Bisa dilihat dari sektor lapangan usaha yang memberi nilai tambah secara cepat atau sektor lapangan usaha yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak.

B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1). KESEJAHTERAAN EKONOMI

Salah satu tujuan pokok pembangunan nasional adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Tujuan pembangunan ini diwujudkan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai bentuk desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan perencanaan pembangunan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat pada tahun sebelumnya difokuskan pada aspek kesejahteraan ekonomi dan aspek kesejahteraan sosial budaya. Masing-masing aspek tersebut terdiri atas indikator-indikator yang relevan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A) PDRB PERKAPITA

Product Domestic Regional Bruto (PDRB) per-kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB perkapita merupakan perbandingan angka PDRB dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Pada tabel 2.34 menjelaskan bahwa fluktuasi yang terjadi pada PDRB juga akan mempengaruhi angka PDRB perkapita, di mana mulai tahun 2021 kembali terjadi kenaikan PDRB perkapita di Kota Payakumbuh. Hal ini terjadi setelah normalnya aktivitas masyarakat baik sosial maupun ekonomi pasca pandemi Covid-19. Sepanjang

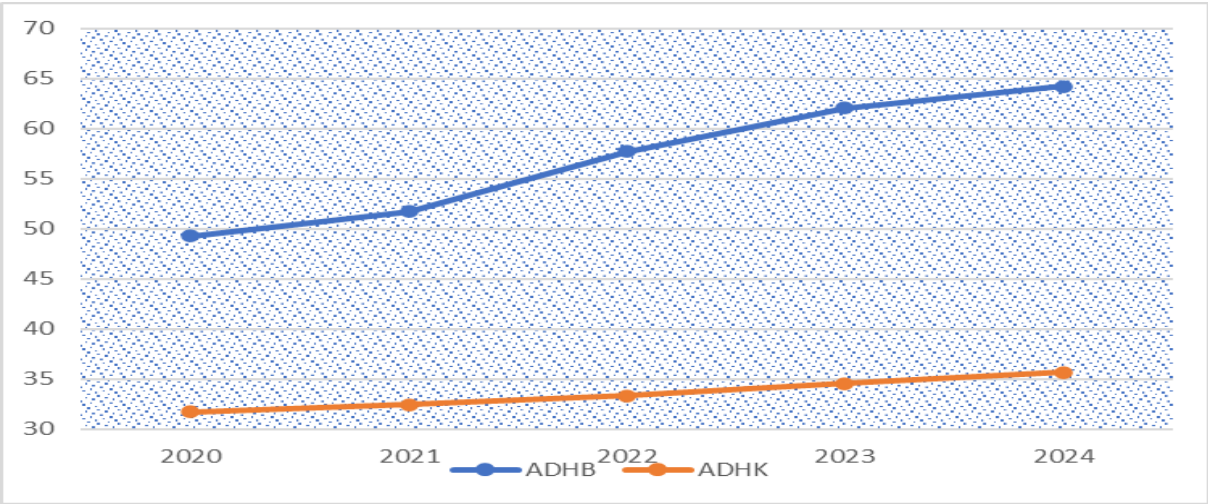
tahun 2020-2024, terjadi peningkatan PDRB perkapita, namun kenaikan jika ditinjau dari atas dasar harga konstan, kenaikan tidak terlalu signifikan.

Tabel 2.34 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	PDRB (JUTA RUPIAH)		JUMLAH PENDUDUK	PDRB PER KAPITA (JUTA RUPIAH)	
		ADHB	ADHK		ADHB	ADHK
1	2020	6.823,64	4.414,29	139.576	49,28	31,75
2	2021	7.302,50	4.572,19	141.184	51,73	32,44
3	2022	8.250,30	4.778,35	143.330	57,73	33,34
4	2023	8.982,35	5.002,7	144.830	62,02	34,54
5	2024	9421	5229,45	146.731	64,21	35,64

Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2024

Diagram 2.18 Perkembangan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

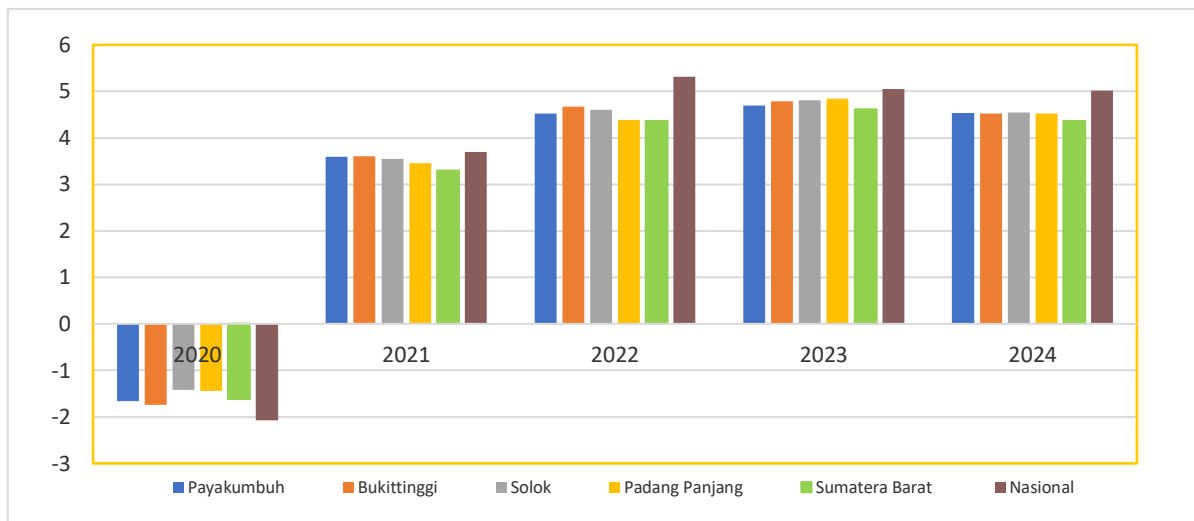
B). PERTUMBUHAN EKONOMI

Salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi daerah adalah Pertumbuhan Ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

PDRB mengukur seluruh transaksi ekonomi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (*residen*) dari daerah tersebut atau masyarakat dari daerah lain (*non-residen*). Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tertentu pada tahun dasar di mana

penghitungannya menggunakan tahun dasar 2010. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh selama kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi sebagaimana gambar di bawah ini.

Diagram 2.19 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh dibandingkan dengan Kota Bukittinggi, Solok, Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Pada Tahun 2020, terjadi kontraksi pertumbuhan pada angka -1,66%, namun tahun 2021-2022 mulai terjadi pertumbuhan kembali, seiring pulihnya perekonomian pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, maka terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh berjalan hampir sama. Tahun 2023 perekonomian sudah tumbuh pada angka 4,70%, sedikit di atas angka Sumatera Barat yang hanya sebesar 4,62%, dan berada pada posisi ketiga dibandingkan dengan Kota Bukittinggi dan Kota Solok pada dua tahun terakhir (2022-2023).

Pada tahun 2024 Kota Payakumbuh sedikit unggul dibandingkan Kota Bukittinggi, namun masih di bawah Kota Solok dan Kota Padang dengan angka pertumbuhan 4,53%. Kota Bukittinggi masih unggul dengan potensi kota wisata dan pusat perdagangannya, sementara itu Kota Solok juga dengan potensi di sektor perdagangannya, sehingga ini adalah tantangan untuk Kota Payakumbuh bagaimana dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor yang menjadi unggulan daerah. Berikut ditampilkan perkembangan PDRB menurut kelompok lapangan usaha dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK 2010) selama kurun waktu 2020-2024 menurut lapangan usaha.

Tabel 2.35 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

N O	LAPANGAN USAHA	2020		2021		2022		2023		2024	
		(Rp Milyar)	%	(Rp Milyar)	%	(Rp Milyar)	%	(Rp Milyar)	%	(Rp Milyar)	%
1	Pertanian, Kehutanan, danPerikanan	439,60	6,44	444,03	6,08	486,08	5,89	512,80	5,71	524,23	5.56
2	Pertambangan & Penggalian	35,41	0,52	37,37	0,51	41,21	0,50	45	0,50	45,73	0.49
3	Industri Pengolahan	331,87	4,86	367,28	5,03	405,99	4,92	433,64	4,83	454,12	4.82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,15	0,06	4,29	0,06	4,49	0,05	4,77	0,05	4,96	0.05
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,33	0,24	17,01	0,23	18,91	0,23	20,24	0,23	21,26	0.23
6	Konstruksi	933,35	13,67	993,95	13,61	1.113,07	13,49	1.230,47	13,70	1.285,03	13.64
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.675,70	24,54	1.755,85	24,04	2.072,19	25,12	2.254,39	25,10	2.357,52	25.02
8	Transportasi dan Pergudangan	799,91	11,72	866,76	11,87	977,91	11,85	1.092,09	12,16	1.113,27	11.82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	206,62	3,03	230,03	3,15	276,1	3,35	304,03	3,38	328,69	3.49
10	Informasi dan Komunikasi	563,20	8,25	614,02	8,41	691,8	8,39	761,57	8,48	801,03	8.5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	402,98	5,90	449,56	6,16	499,6	6,06	525,94	5,86	565,64	6
12	Real Estate	198,16	2,90	208,53	2,86	231,05	2,80	259,11	2,88	276,09	2.93
13	Jasa Perusahaan	16,23	0,24	16,61	0,23	18,35	0,22	20,75	0,23	21,76	0.23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	517,03	7,57	567,21	7,77	594,22	7,20	628,95	7,00	682	7.24
15	Jasa Pendidikan	337,22	4,94	358,5	4,91	402,17	4,87	421,18	4,69	438,16	4.65
16	Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial	111,39	1,63	119,62	1,64	130,27	1,58	145,91	1,62	156,02	1.66
17	Jasa Lainnya	237,95	3,49	252,51	3,46	286,91	3,48	321,55	3,58	345,48	3.67
TOTAL		6.827,09	100,00	7.303,2	100,00	8.250,30	100,00	8.982.35	100,00	9.421	100,00

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2025, 2025

Tabel 2.36 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK (2010) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

NO	LAPANGAN USAHA	2020		2021		2022		2023		2024	
		(Rp Milyar)	%	(Rp Milyar)	%	(Rp Milyar)	%	(Rp Milyar)	%	(Rp Milyar)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	274,26	6,21	278,09	6,10	285,08	5,99	287,63	5,75	287,53	5.50
2	Pertambangan & penggalian	21,91	0,50	22,8	0,50	23,85	0,50	24,54	0,49	25,0	0.48
3	Industri Pengolahan	235,58	5,34	241,85	5,29	247,00	5,17	253,72	5,07	261,30	5.00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,59	0,06	2,66	0,06	2,74	0,06	2,84	0,06	2,97	0.06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,88	0,31	14,34	0,31	15,23	0,32	15,70	0,31	15,97	0.31
6	Konstruksi	559,59	12,67	567,57	12,41	586,67	12,27	620,94	12,41	643,87	12.31
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.053,03	23,85	1.090,71	23,85	1.151,25	24,09	1.204,94	24,09	1.259,10	24.08
8	Transportasi dan Pergudangan	553,47	12,54	581,89	12,72	600,62	12,57	634,18	12,68	660,24	12.63
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	109,93	2,49	117,94	2,58	135,76	2,84	145,21	2,90	154,99	2.96
10	Informasi dan Komunikasi	480,57	10,89	507,32	11,09	541,81	11,34	580,16	11,60	607,98	11.63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	257,47	5,83	273,36	5,98	284,33	5,95	293,48	5,87	314,19	6.01
12	Real Estate	123,08	2,79	125,20	2,74	131,62	2,75	139,44	2,79	147,26	2.82
13	Jasa Perusahaan	11,37	0,26	11,49	0,25	12,26	0,26	13,06	0,26	13,68	0.26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	300,96	6,82	302,92	6,62	299,71	6,27	305,35	6,10	330,72	6.32
15	Jasa Pendidikan	198,10	4,49	205,30	4,49	216,18	4,52	219,77	4,39	226,59	4.33
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,92	1,74	81,22	1,78	84,80	1,77	90,60	1,81	95,48	1.83
17	Jasa Lainnya	141,59	3,21	147,52	3,23	159,45	3,34	171,13	3,42	182,57	3.49
Total		4.414,29	100	4.572,19	100	4.778,35	100	5.002,70	100	5.229,45	100,00

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2025, 2025

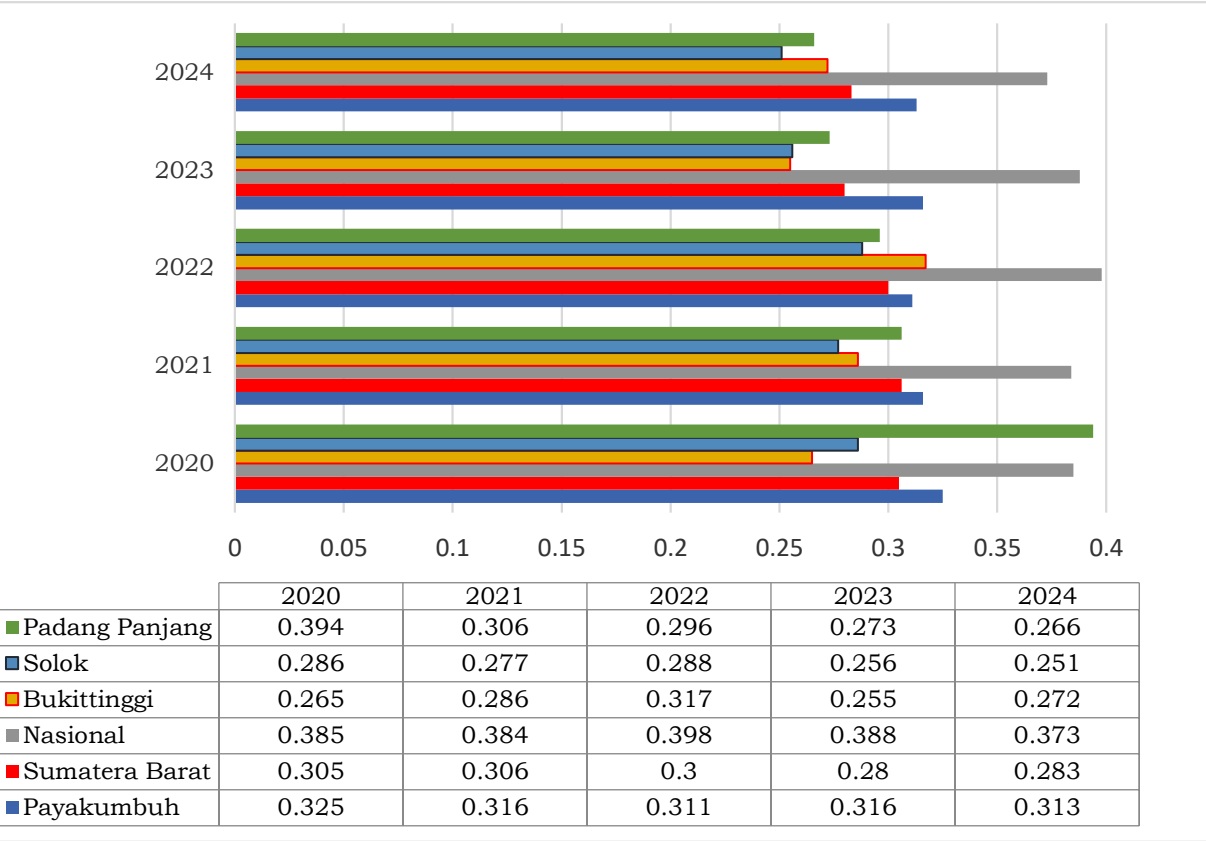
Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor masih menjadi sektor yang paling banyak berkontribusi terhadap produktivitas Kota Payakumbuh, kemudian disusul sektor transportasi dan pergudangan dan sektor kontruksi, walaupun pergerakannya fluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi belum bisa dijadikan acuan yang menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat. Untuk melihat dampak pertumbuhan ekonomi ini terhadap kesejahteraan, maka perlu dikonversi dengan tingkat inflasi dan dilihat tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.

C). INDEKS GINI

Indeks Gini adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Indeks Gini dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 1. Jika Indeks Gini sama dengan 0, berarti distribusi pendapatan sudah merata dengan sempurna (dengan kata lain tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan). Jika Indeks Gini sama dengan 1, berarti distribusi pendapatan tidak merata secara sempurna. Untuk lebih jelasnya, standar penilaian Indeks Gini dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1. $GR < 0,3$: ketimpangan rendah
- 2. $0,3 \leq GR \leq 0,5$: ketimpangan sedang
- 3. $GR > 0,5$: ketimpangan tinggi

Diagram 2.20 Perbandingan Indeks Gini Kota Payakumbuh dengan Kota Bukittinggi, Kota Solok, Padang Panjang, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



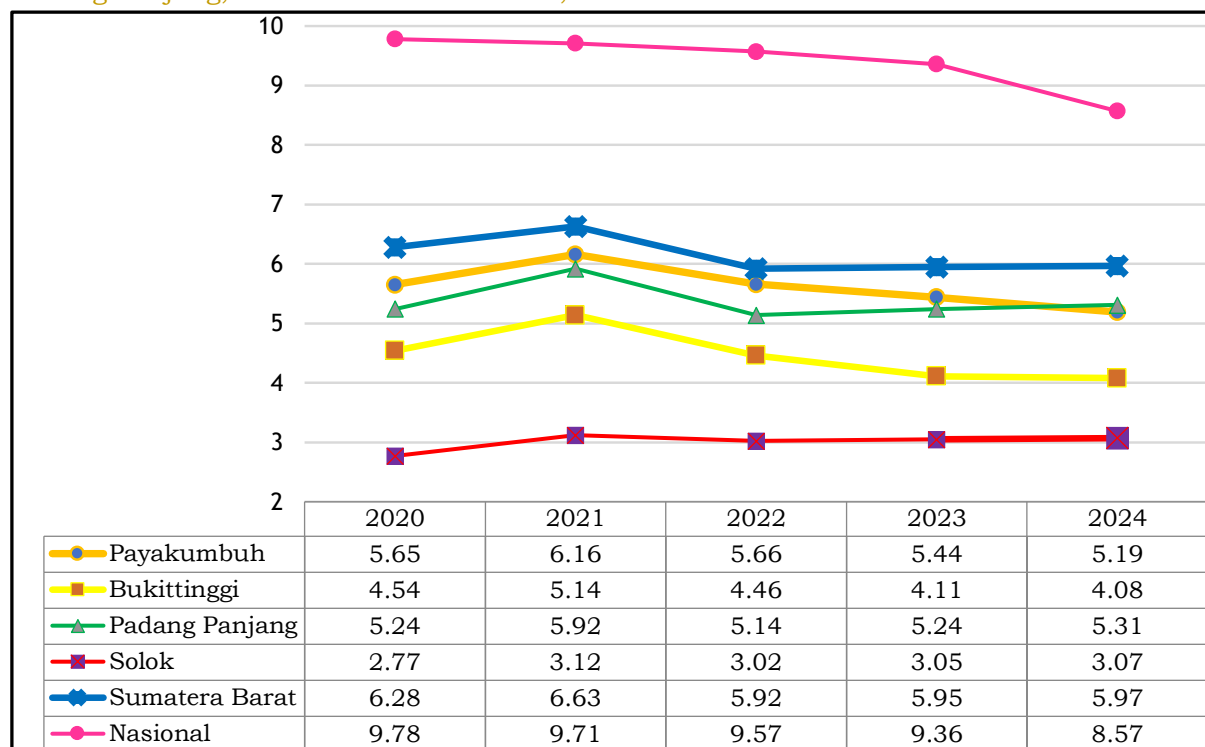
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025 (data diolah Bappeda)

Diagram 2.20 menjelaskan Indeks Gini Kota Payakumbuh berada di atas Provinsi Sumatera Barat. Kota Payakumbuh termasuk tingkat ketimpangan sedang. Secara keseluruhan, walaupun tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Payakumbuh berada pada ketimpangan sedang, namun ketimpangan itu berada di atas ketimpangan Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi peningkatan ketimpangan, yang diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi ternyata tidak cukup berdampak terhadap penurunan tingkat ketimpangan, yang artinya kesenjangan pendapatan antara masyarakat yang terkelompok pada beberapa sektor lapangan usaha cukup signifikan. Data dari BPS juga menunjukkan jika Indeks Gini Kota Payakumbuh tertinggi se-Sumatera Barat. Hal ini menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh.

D) TINGKAT KEMISKINAN

Kemiskinan dan pengangguran telah menjadi masalah sosial diberbagai daerah. Pemerintah Kota Payakumbuh berusaha untuk terus melakukan penanggulangan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir dan sudah memberikan hasil yang cukup baik, di mana setiap tahun terjadi penurunan tingkat kemiskinan.

Diagram 2.21 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Solok, Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024



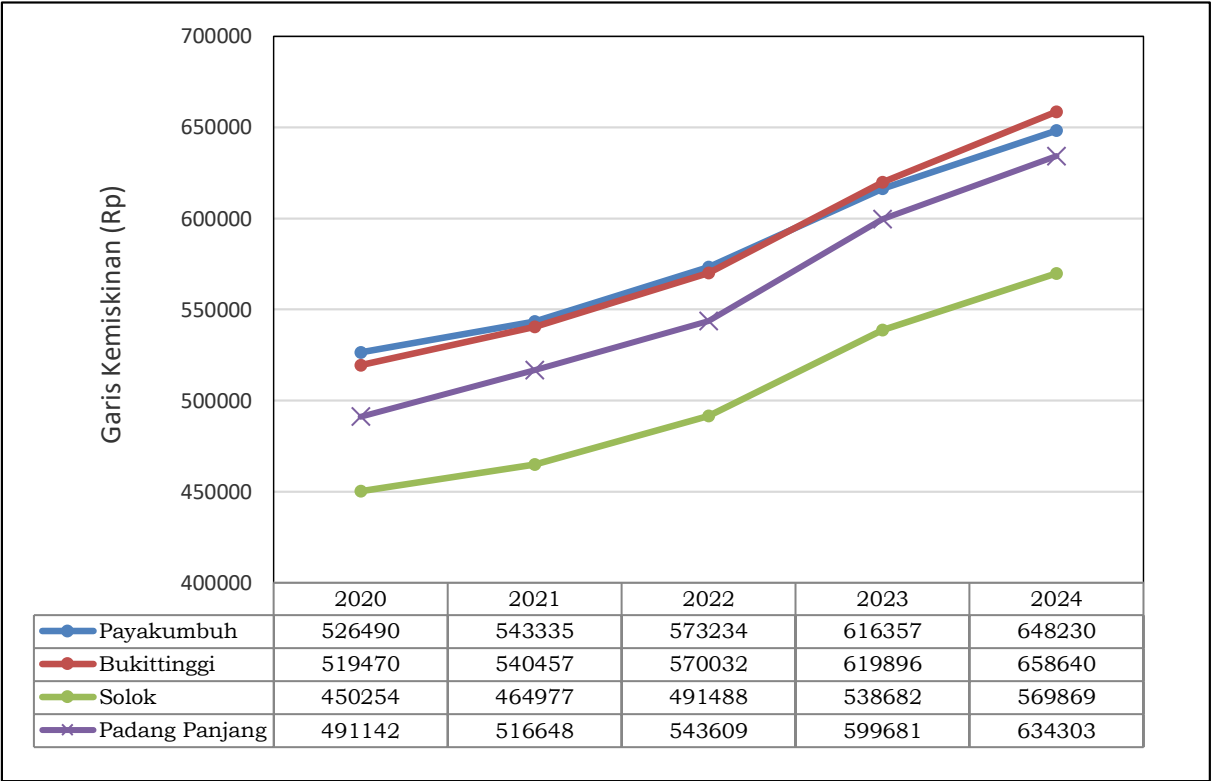
Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2024

Diagram 2.21 menunjukkan fluktuasi tingkat kemiskinan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, dimana pada tahun 2021 tingkat kemiskinan Kota, Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan, hanya pada tingkat Nasional yang mengalami

penurunan. Jika dibandingkan dengan Kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh tertinggi pada tahun 2020-2023 dan barulah tahun 2024, tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh lebih baik dari Kota Padang Panjang walaupun masih lebih tinggi dari kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mengetahui tingkat kemiskinan suatu daerah, garis kemiskinan digunakan sebagai indikator, dimana garis kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Kota Payakumbuh mempunyai garis kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan kota lainnya di Sumatera Barat pada tahun 2020-2023, dan untuk tahun 2024 beralih ke Kota Bukittinggi.

Diagram 2.22 Perbandingan Garis Kemiskinan Kota Payakumbuh, Bukittinggi, Solok, dan Padang Panjang Tahun 2020-2024

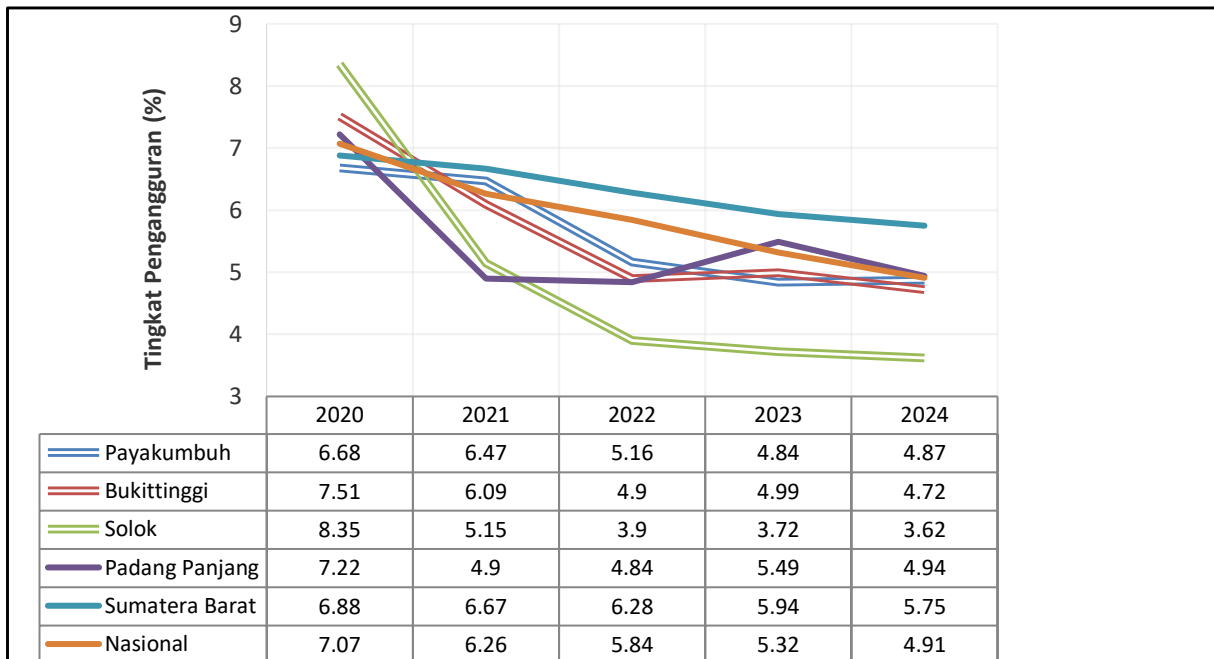


Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2024

E) PENGANGGURAN TERBUKA

Semenjak tahun 2020, terjadi kenaikan tingkat pengangguran, baik di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, maupun Nasional. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19. Seiring dengan pulihnya perekonomian, tingkat pengangguran terus menurun pada tahun 2021-2023. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh mencapai 4,84%, namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan 0,03% sehingga menjadi 4,87%.

Diagram 2.23 Pengangguran Terbuka Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumbar, 2025

Diagram 2.23 diatas terlihat bahwa Tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, namun cukup tinggi jika dibandingkan dengan Kota lain di Provinsi Sumatera Barat, dimana tingkat pengangguran lebih banyak didominasi oleh perempuan dikarenakan penawaran/lapangan kerja yang tersedia kebanyakan untuk laki-laki, selain itu juga kebanyakan perempuan dikategorikan ke kelompok bukan angkatan kerja, karena status ibu rumah tangga.

F). TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Produktifitas tenaga kerja adalah jumlah PDRB ADHK dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja Kota Payakumbuh berfluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020, produktivitas tenaga kerja mencapai Rp 67,76 juta. Kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar RP.68,14 juta, namun mengalami penurunan Kembali dari tahun 2023 sampai tahun 2024 yang menyentuh Rp.67,15 juta yang jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 pada masa COVID-19, produktivitas tenaga kerja tahun 2023 dan tahun 2024 berada di bawah produktivitas tahun 2020 dengan nilai terendah pada tahun 2024.

Tabel 2.37 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK (Rp)	4.414.294,06	4.572.191,51	4.778.348,64	5.002.696,14	5.229.450

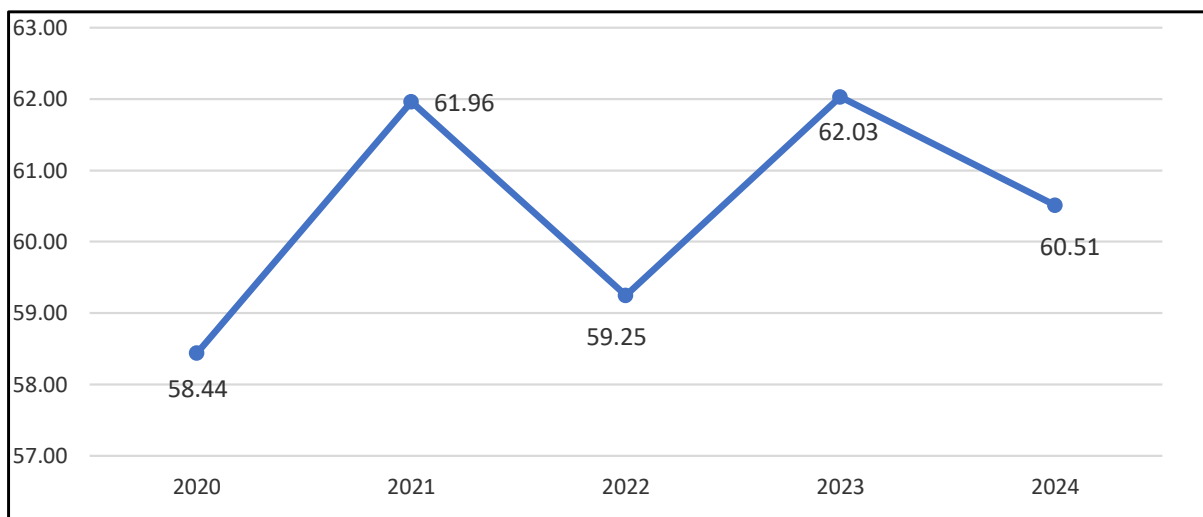
URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Orang Bekerja (jiwa)	65.144	69.498	70.127	74.137	77.876
Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Rp. juta rupiah)	67,76	65,79	68,14	67,48	67,15

Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2024 (data diolah oleh Bappeda)

G). TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Fluktuasi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan terlihat pada diagram 2.24 dengan TPAK pada tahun 2024 sebesar 60,51%. Kondisi saat ini mayoritas kesempatan kerja lebih banyak ditujukan untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan yang berstatus ibu rumah tangga atau yang bekerja di sektor informal mayoritas pada perdagangan online.

Diagram 2.24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



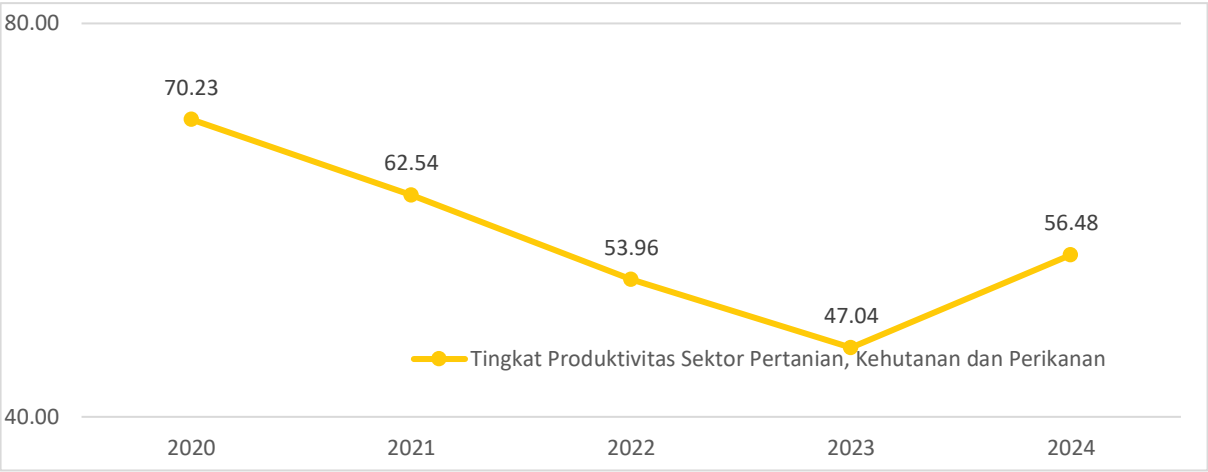
Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2020-2025, 2025

H) TINGKAT PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA PADA LAPANGAN USAHA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah perbandingan antara jumlah PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Rasio produktivitas

tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terlihat menurun dari tahun 2020, hal ini kemungkinan disebabkan rendahnya minat para generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.

Diagram 2.25 Tingkat Produktifitas Angkatan Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024 (Juta/Kapita)

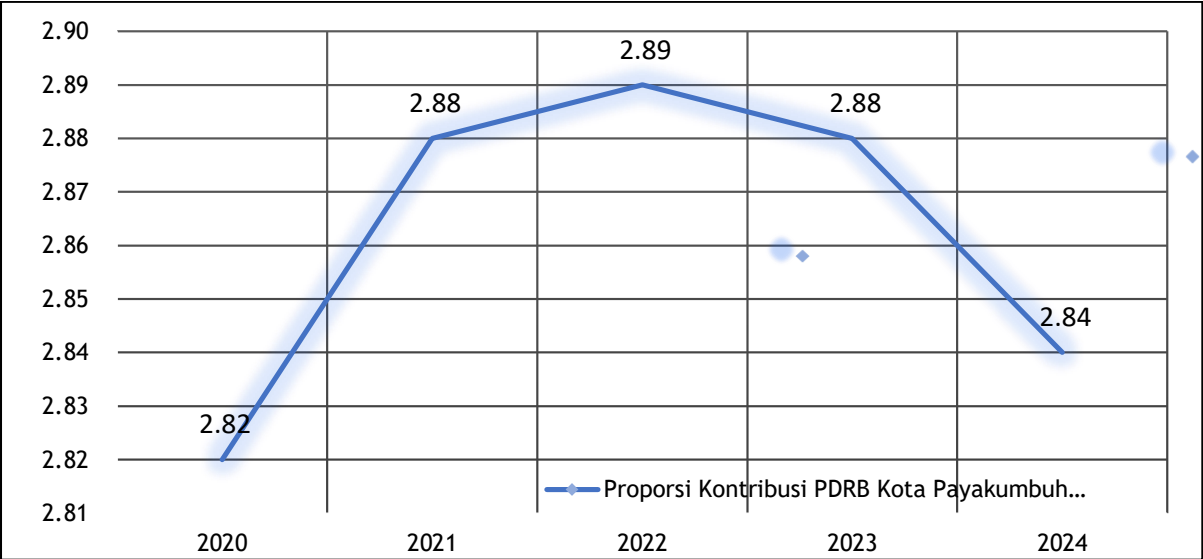


Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2020-2024 (data diolah oleh Bappeda)

I). PROPORSI KONTRIBUSI PDRB KOTA PAYAKUMBUH

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara.

Diagram 2.26 Proporsi Kontribusi PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2024

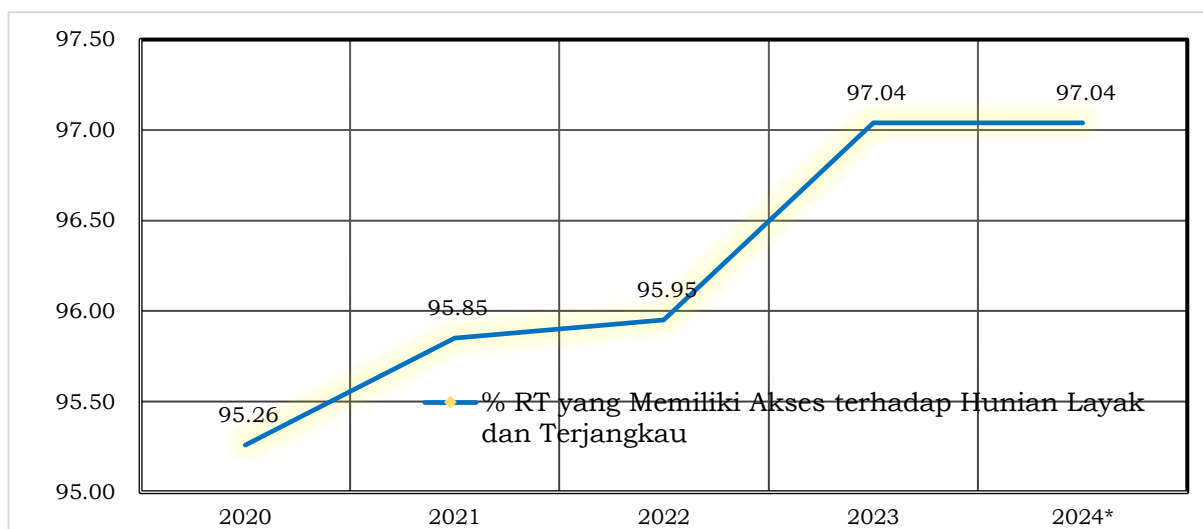
Proporsi kontribusi PDRB Kota Payakumbuh terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat relatif kecil, hanya berkisar 2%-3% dari tahun 2020-2024, dimana setelah tahun 2022 terjadi penurunan kontribusi PDRB Kota Payakumbuh terhadap Provinsi Sumatera Barat. Oleh karenanya dapat dikatakan peningkatan sektor-sektor PDRB Kota Payakumbuh tidak berdampak besar terhadap peningkatan sektor-sektor PDRB Sumatera Barat.

J) **PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN LAYAK DAN TERJANGKAU**

Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana disebutkan bahwa rumah yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
2. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu.

Diagram 2.27 Perkembangan RT Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PKP Kota Payakumbuh, 2024

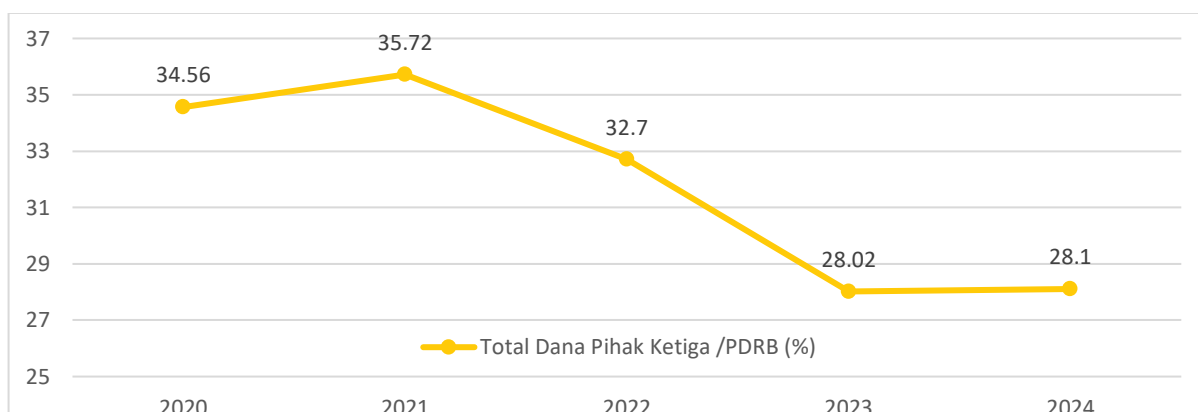
Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2020 sebesar 95,26% dan terus naik sampai dengan pada tahun 2024 sebesar 97,04%. Kondisi terjadi didukung dengan komitmen dan kerja keras Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyediaan rumah layak huni, baik melalui pendanaan APBD Kota Payakumbuh maupun APBN.

K) TOTAL DANA PIHAK KETIGA/PDRB

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di suatu daerah. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.

Rentang tahun 2020-2024 terjadi fluktuasi total dana pihak ketiga terhadap PDRB dengan kecenderungan menurun, dimana pada tahun 2020 tercatat total dana pihak ketiga terhadap PDRB Kota Payakumbuh sebesar 34,56%, dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 35,72%. Namun tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan, sehingga pada tahun 2024 menyentuh 28,1% total dana pihak ketiga terhadap PDRB yang lebih rendah dibandingkan tahun 2020.

Diagram 2.28 Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga Dibandingkan dengan PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

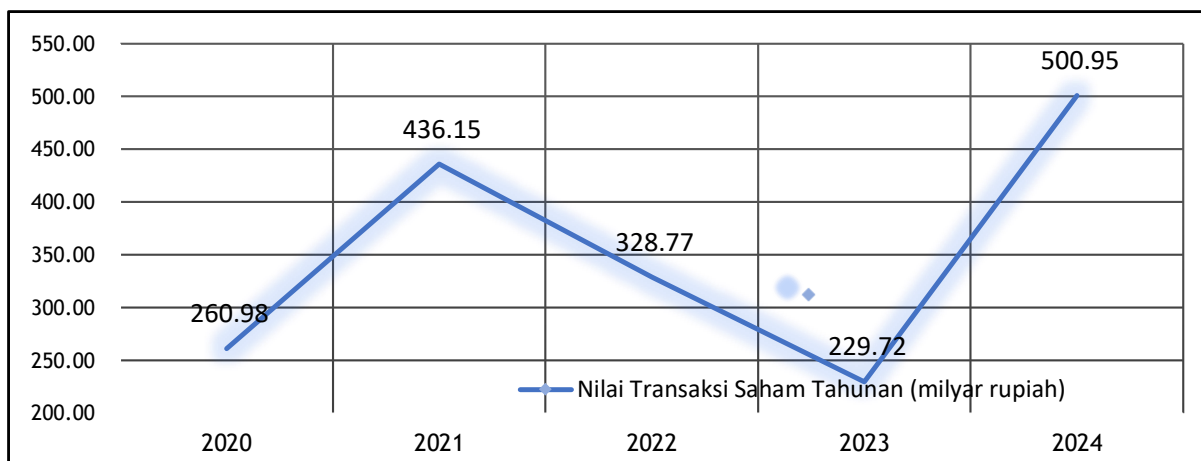


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Sumbar, 2025 (Data diolah oleh Bappeda)

L) NILAI TRANSAKSI SAHAM BERUPA NILAI RATA-RATA TAHUNAN

Nilai transaksi saham adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (kota/kabupaten). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham. Nilai transaksi saham tahunan Kota Payakumbuh selama periode tahun 2020-2024 terlihat adanya fluktuasi, hal ini karena adanya gairah pasar modal dengan adanya stimulus pasar uang oleh pemerintah pasca wabah COVID-19. Secara umum, sesuai pantauan OJK Sumbar, nilai transaksi saham di Kota Payakumbuh cukup berkembang yang tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp.500,95 Milyar atau meningkat hampir 2 kali lipat dari nilai tahun 2020 sebesar Rp.260.98 Milyar.

Diagram 2.29 Perkembangan Nilai Transaksi Saham Tahunan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Sumbar, 2025

M) TOTAL KREDIT/PDRB

Total kredit per-daerah adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup daerah tersebut. Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.

Total kredit/PDRB Kota Payakumbuh cukup tinggi, di mana tahun 2020-2022 berada di atas 50%, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024, dengan nilai pada tahun 2024 sebesar 48,20%. Walaupun ada penurunan pada tahun 2023-2024, peran perbankan dalam perekonomian Kota Payakumbuh cukup signifikan tanpa melihat jenis kredit yang diberikan, apakah kredit yang bersifat produktif atau konsumtif.

Tabel 2.38 Total Kredit per PDRB Kota Payakumbuh tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Total Kredit (milyar rupiah)	3.702,62	3.989,32	4.138,64	4.373,52	4.541,28
PDRB (milyar rupiah)	6.827,09	7.302,50	8.250,3	8.982,35	9.421
Total Kredit/PDRB (%)	54,23	54,63	50,16	48,69	48,20

Sumber: OJK Sumbar, BPS Kota Payakumbuh, 2025 (Data diolah oleh Bappeda)

N). RASIO PDRB JASA KEUANGAN

Rasio PDRB jasa Keuangan adalah perbandingan antara PDRB jasa Keuangan dibandingkan dengan PDRB berdasarkan harga berlaku (ADHB). Rasio jasa keuangan terhadap PDRB adalah seberapa besar kontribusi sektor jasa keuangan terhadap total produktivitas daerah Kota Payakumbuh. Nilainya cenderung fluktuatif tergantung dengan kondisi perekonomian

secara umum, dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dan kembali naik pada tahun 2023 dan 2024 dengan nilai sebesar 6,00% pada tahun 2024.

Tabel 2.39 Rasio PDRB Jasa Keuangan Kota Payakumbuh tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jasa Keuangan dan Asuransi (milyar)	402,98	449,56	449,59	525,94	565,64
PDRB (milyar)	6.827,09	7.302,50	8.250,30	8.982,35	9.421
% PDRB Jasa Keuangan	5,90	6,16	5,45	5,86	6,00

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2025, 2025 (Data diolah oleh Bappeda)

O). INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas manusia. Secara umum keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia dapat ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk melalui 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu :

- a) Umur panjang dan hidup sehat;
- b) Pengetahuan;
- c) Standar hidup layak.

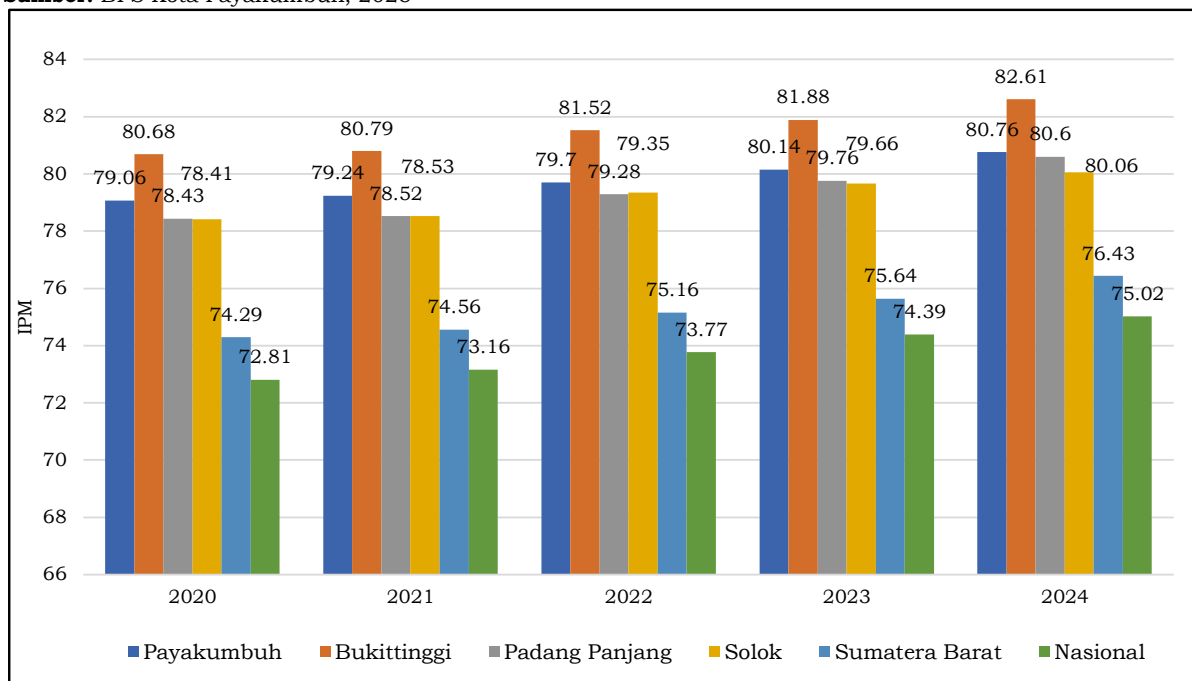
IPM dapat digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah dan juga sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Capaian IPM ini dikelompokkan pada 4 (empat) kategori yaitu:

- a. $IPM < 60$: IPM Rendah;
- b. $60 \leq IPM < 70$: IPM Sedang;
- c. $70 \leq IPM < 80$: IPM Tinggi;
- d. $IPM \geq 80$: IPM Sangat Tinggi

Upaya percepatan peningkatan IPM difokuskan kepada peningkatan pelayanan dasar baik pendidikan maupun kesehatan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai yang bertujuan untuk mendorong perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru. IPM Kota Payakumbuh tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari angka 79,06 pada tahun 2020 menjadi 80,76 pada tahun 2024. Hal tersebut mengindikasikan bahwa capaian pembangunan manusia di Kota Payakumbuh sangat tinggi, namun masih di bawah IPM Kota Bukittinggi, dan di atas IPM Kota Solok dan Padang Panjang. Perkembangan capaian IPM periode 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada diagram 2.30.

Diagram 2.30 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2025



P). PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA PER-BULAN

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan adalah ukuran rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan oleh setiap individu dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setiap bulannya. Pengeluaran ini mencerminkan tingkat kesejahteraan dan pola konsumsi masyarakat, dan biasanya dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk non makanan. Tujuan adalah untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, menetapkan garis kemiskinan, merancang kebijakan sosial dan ekonomi, serta melihat kesenjangan konsumsi antar wilayah. Untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan dapat dilihat pada tabel 2.40

Tabel 2.40 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan di Kota Payakumbuh tahun 2020 s.d 2024

URAIAN	SATUAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. Ribu	1.964,89	1.990,31	1.576,52	15.790,30	16.350,03

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan di Kota Payakumbuh dari tahun 2020 semakin lama semakin besar yang mengidentifikan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Q). PRODUKTIVITAS TOTAL DAERAH

Produktivitas Total Daerah adalah ukuran efisiensi dan efektivitas suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya (tenaga kerja, modal, lahan, teknologi, dll.) untuk menghasilkan output ekonomi. Ini merupakan indikator penting untuk melihat kinerja ekonomi suatu wilayah secara menyeluruh. Produktivitas Total Daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola input seperti tenaga kerja, modal, SDA, dan teknologi untuk menghasilkan output berupa PDRB dan nilai tambah, yang diukur melalui indikator seperti PDRB per tenaga kerja dan pertumbuhan PDRB terhadap input, dengan manfaat menilai daya saing, menyusun kebijakan, membandingkan wilayah, serta mengidentifikasi sektor prioritas, dan dipengaruhi oleh kualitas SDM, infrastruktur, kebijakan, serta iklim investasi.

Tabel 2.41 Produktivitas Total Daerah di Kota Payakumbuh tahun 2020 s.d 2024

URAIAN	SATUAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas Total Daerah	Rp. Milyar	95,84	98,12	199,9	115,3	120,97

Dari tabel diatas terlihat bahwa produktivitas total daerah di Kota Payakumbuh semakin tinggi yang mengidentifikasikan bahwa Kota Payakumbuh makin efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumber daya (tenaga kerja, modal, SDA, teknologi) untuk menghasilkan output ekonomi.

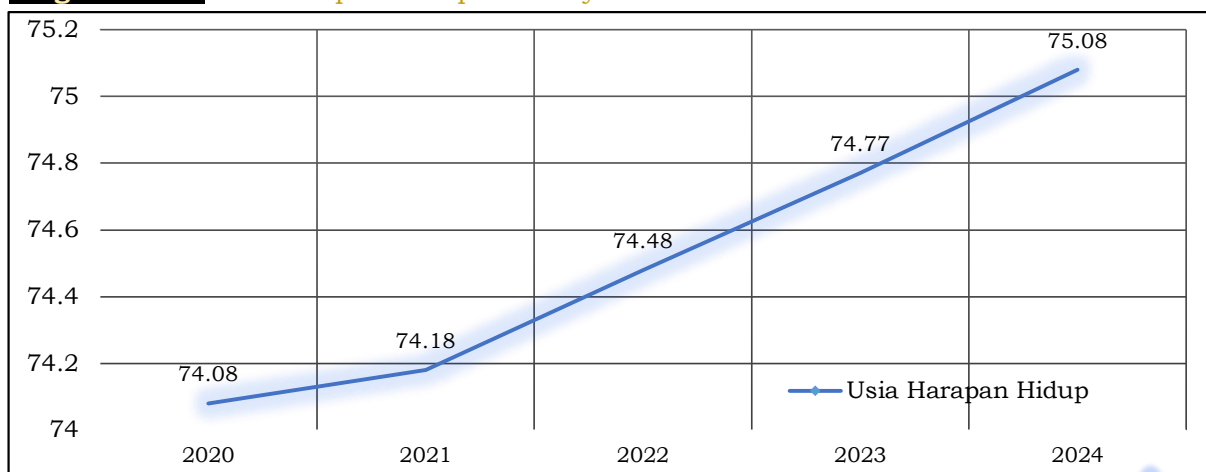
2). KESEHATAN UNTUK SEMUA

Kesehatan untuk semua diartikan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat yang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tahapan awal dalam memperhatikan kesehatan masyarakat yaitu dengan memperhatikan gizi masyarakat, karena memengaruhi kesehatan fisik dan mental masyarakat. Selain itu pengetahuan masyarakat terkait pengetahuan di bidang kesehatan juga perlu ditingkatkan karena dengan memberdayakan masyarakat, pemerintah telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membuat pilihan yang tepat dan cermat dalam meningkatkan derajat kesehatan mereka.

A). USIA HARAPAN HIDUP

Kondisi Usia Harapan Hidup (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada diagram 2.31 terlihat dari tahun 2020-2024 terjadi peningkatan UHH masyarakat Kota Payakumbuh dari 74,08 menjadi 75,08 tahun pada tahun 2024 yang dapat diartikan adanya perbaikan status kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat di Kota Payakumbuh.

Diagram 2.31 Usia Harapan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

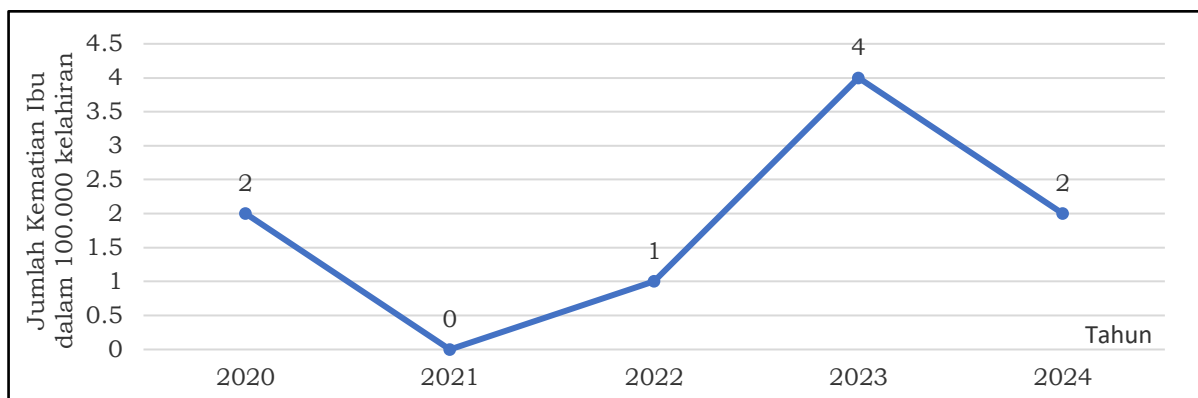


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, 2025

B). ANGKA KEMATIAN IBU

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal disebabkan kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI Kota Payakumbuh berada pada posisi terbaik pada tahun 2021 dengan 0 kematian ibu. Namun pada tahun 2022, tercatat 1 orang dan naik pada tahun 2023 menjadi 4 orang, yang merupakan AKI tertinggi dalam 5 tahun terakhir, dan pada tahun 2024 menurun menjadi 2 orang AKI.

Diagram 2.32 Angka kematian Ibu Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



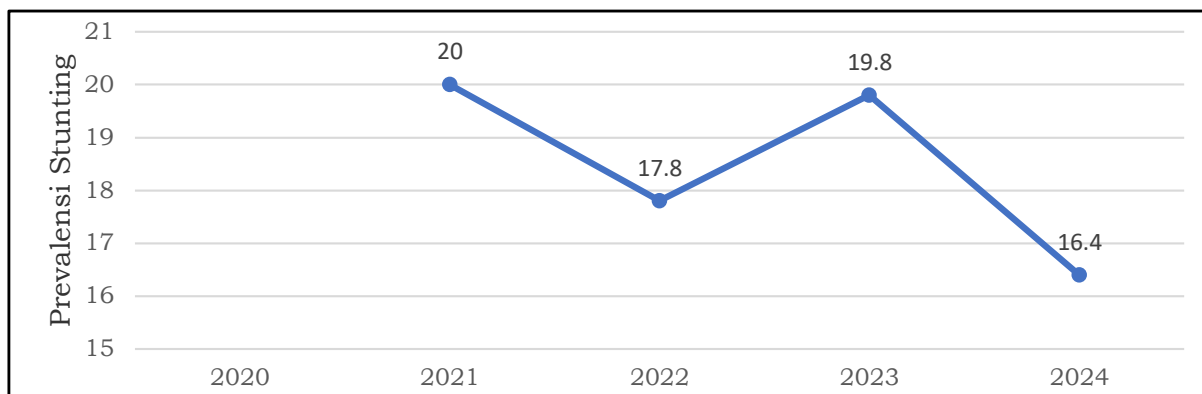
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

C). PREVALENSI STUNTING

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak

balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005.

Diagram 2.33 Prevalensi Stunting Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



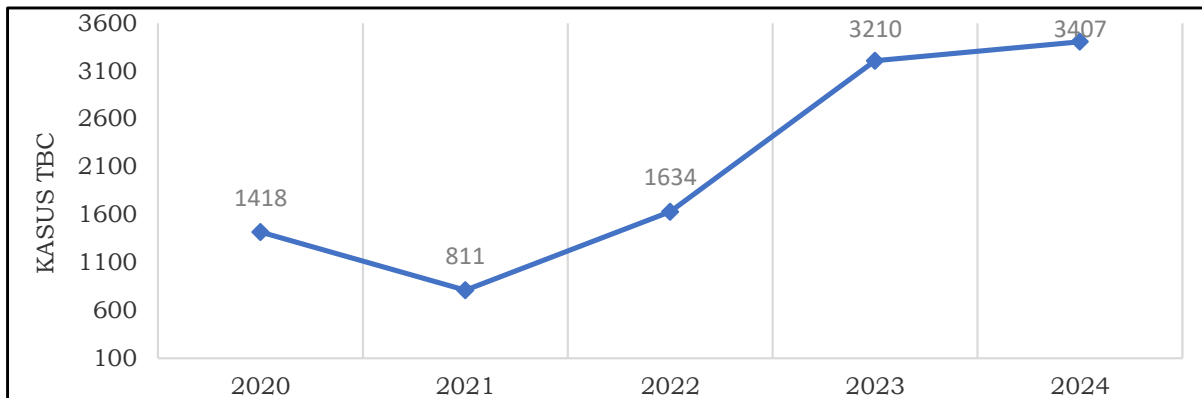
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

Prevalensi Stunting mulai terdata berdasarkan hasil SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) pada tahun 2021 dengan angka 20,00, dan menurun pada tahun 2022 menjadi 17,8, namun mengalami kenaikan menjadi 19,8 dan kembali menurun pada tahun 2024 dengan angka 16,4. Sementara itu, di tingkat pemerintah kota, juga dilaksanakan pendataan stunting oleh setiap puskesmas dengan aplikasi E-PPGBM. E-PPGBM merupakan sistem elektronik pencatatan dan pelaporan Gizi berbasis masyarakat yang memuat data hasil pengukuran dan pelaporan gizi yang diinput setiap bulan oleh Pengelola Gizi di tiap-tiap Puskesmas.

D). CAKUPAN PENEMUAN DAN PENGOBATAN KASUS TUBERKULOSIS

Kasus tuberkulosis dipengaruhi oleh faktor kurangnya cakupan penemuan, komitmen pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan, masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Tuberkulosis, kurangnya kolaborasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan belum maksimalnya pelaksanaan Investigasi Kontak (IK) dilaksanakan di Kabupaten/ Kota.

Diagram 2.34 Kasus Tuberkulosis di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



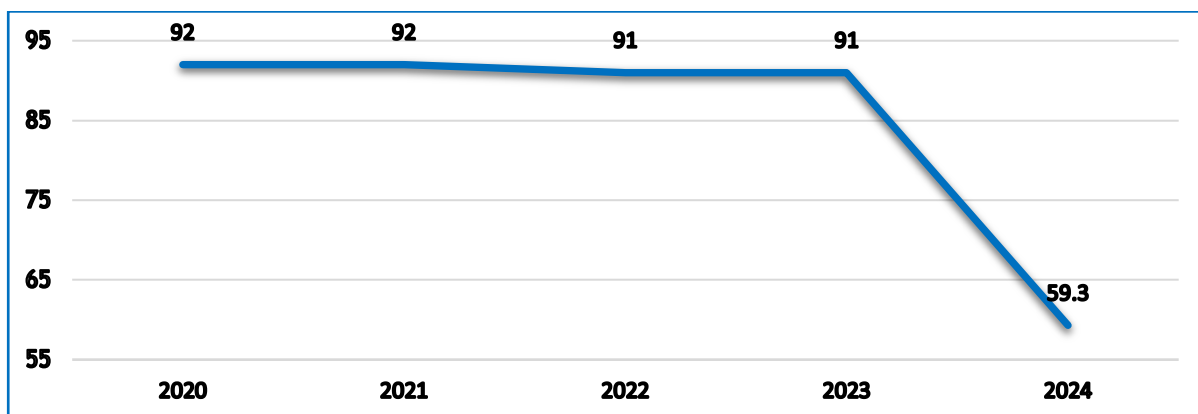
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

E) ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS

Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap merupakan angka keberhasilan dalam pengobatan tuberkulosis. Untuk mencapai angka keberhasilan tersebut dibutuhkan layanan TB yang memadai, baik layanan pemerintah maupun swasta, Alat Penegakan Diagnosis TB sudah tersedia di Rumah Sakit Pemerintah, dan beberapa Puskesmas. Disamping itu, dengan beberapa daerah tersedia RS Khusus Paru berkontribusi besar untuk penemuan kasus TB dan pengobatannya. Dukungan anggaran dari Negara Donor (GF), Komunitas peduli TB dan Koalisi Organisasi Peduli TB (KOPI) di beberapa daerah serta keterlibatan LAPAS dalam penemuan kasus TB, dan dukungan lainnya sangat berpengaruh dalam upaya penanganan kasus TB.

Jika dilihat pada diagram 2.35 angka penyembuhan tuberkulosis di Kota Payakumbuh cukup baik, dengan kecenderungan menurun. Dengan titik terendah selama 5 (lima) tahun terakhir pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 59,3%. Hal ini dikarenakan masih ada penderita yang tidak taat pengobatan sebagaimana prosedur pengobatan TB yang ditetapkan.

Diagram 2.35 Angka Penyembuhan Kasus Tuberkulosis di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

F). CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Penerapan *Universal Health Coverage* di kabupaten/kota terkendala pada terbatasnya pembiayaan yang cukup dan berkelanjutan. Keterbatasan sumber daya keuangan menjadi hambatan utama dalam mencapai UHC. Hal ini mempengaruhi terhadap jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

Tabel 2.42 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	139.576	141.184	143.330	144.830	146.731
Jumlah Kepesertaan JKN	124.128	129.584	137.077	142.249	145.255

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jaminan Kesehatan (%)	88,93	91,8	95,64	99,05	98,99

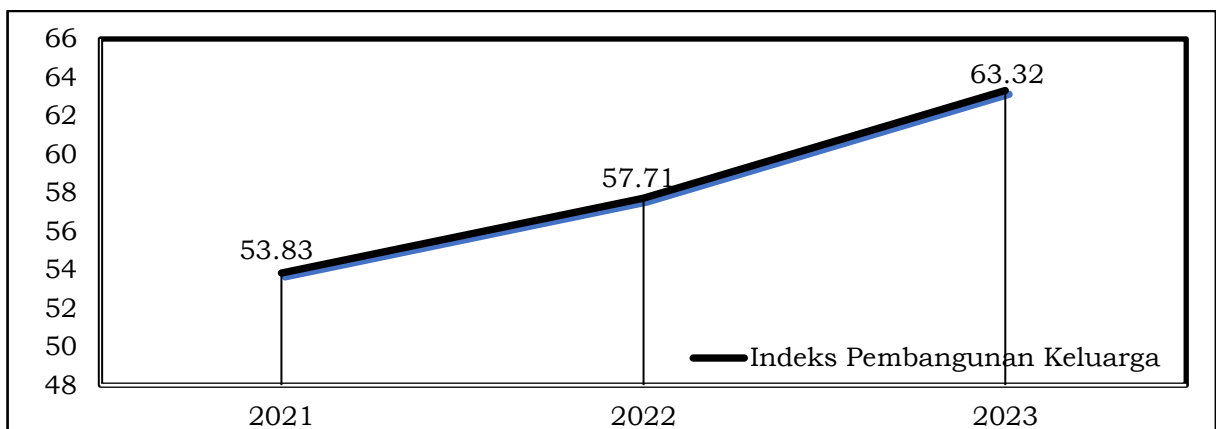
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

Dari tabel 2.42 menunjukkan jaminan kesehatan di Kota Payakumbuh dari tahun 2020 sampai 2024 dapat dikatakan sudah terpenuhi. Di mana tahun 2024, jaminan kesehatan sudah mencapai 98,99%.

G) INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) digunakan untuk menemukan permasalahan keluarga hingga ke dasar, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara tepat dan juga bisa mengukur kemajuan pembangunan keluarga. IPK merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. IPK Kota Payakumbuh yang dimulai pengukurannya sejak tahun 2021 digambarkan pada diagram 2.35 IPK Kota Payakumbuh dalam 3 (tiga) tahun terakhir cenderung naik, dari 53,83 pada tahun 2021 menjadi 63,32 pada tahun 2023. Skala nilai tersebut dikategorikan cukup baik (berkembang). Nilai ini perlu ditingkatkan, sehingga IPK ini masuk dalam kategori baik (tangguh) direntang nilai 70-100.

Diagram 2.36 Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Payakumbuh Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas P3A P2KB Kota Payakumbuh, 2024

3). PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

Pendidikan berkualitas merupakan landasan penting dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, tantangan besar masih harus diatasi agar tujuan ini dapat tercapai sepenuhnya. Artikel ini akan membahas tentang upaya pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Pendidikan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses pendidikan berkualitas masih belum

merata di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat kesenjangan antara kota dan desa, serta antara pulau-pulau di Indonesia. Faktor geografis, infrastruktur, dan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas menjadi hambatan utama dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anak di berbagai daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

A). **PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI MINIMUM PADA ASESMEN TINGKAT NASIONAL**

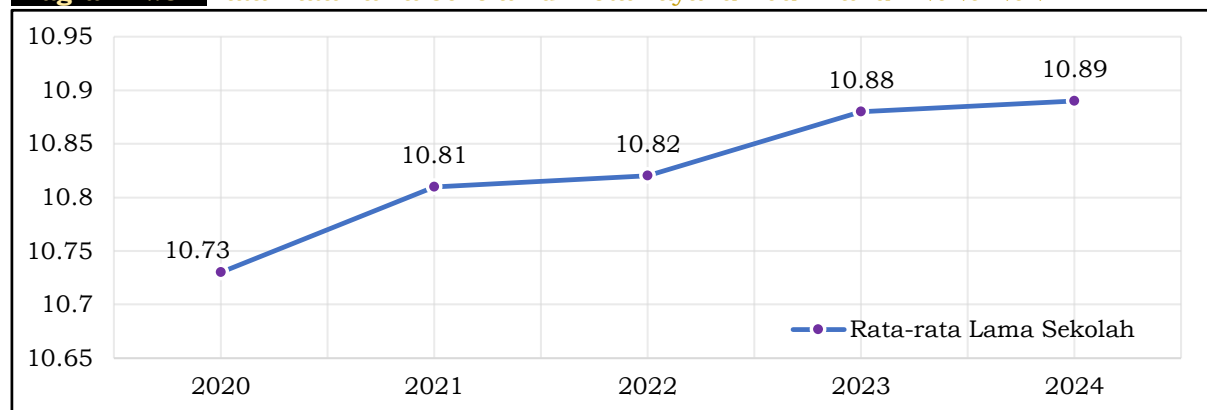
Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1). Perlu intervensi khusus 2). Dasar 3). Cakap 4). Mahir.

Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. Hasil asesmen nasional terhadap satuan pendidikan Kota Payakumbuh yang mencapai standar kompetensi minimum pada tahun 2022 adalah 64,19% dan tahun 2023 mencapai 76,22%.

B). **RATA-RATA LAMA SEKOLAH**

Rata-rata lama sekolah merupakan waktu rata-rata (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah.

Diagram 2.37 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, 2024

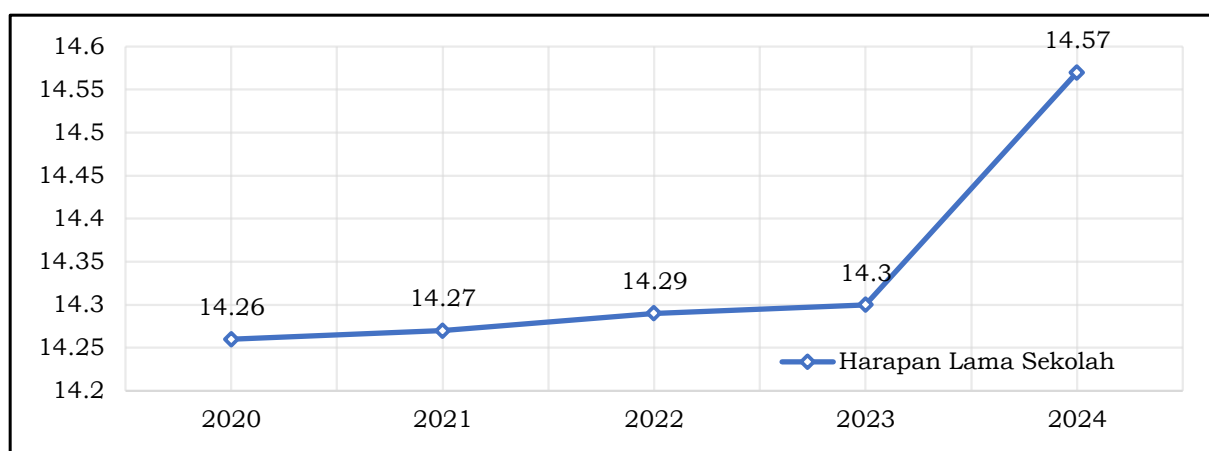
Diagram 2.37 memperlihatkan rata-rata lama sekolah di Kota Payakumbuh rentang 10 – 11 tahun atau pada kelas 1-2 SMA dimana terakhir tercatat pada tahun 2024 selama 10,89 tahun.

C). HARAPAN LAMA SEKOLAH

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan waktu lamanya sekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak usia sekolah pada masa mendatang. Untuk meningkatkan harapan lama sekolah di Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh berupaya membuat kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, disamping pemberian pendanaan /beasiswa yang cukup bagi peserta didik sehingga bisa mengakses pendidikan yang lebih baik, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, serta dukungan peningkatan kualitas tenaga pendidik/guru melalui pelatihan dan pendidikan lanjutannya, serta pengembangan kemitraan pemerintah masyarakat dan lembaga pendidikan dalam pengembangan pendidikan di Kota Payakumbuh.

Diagram 2.38 memperlihatkan HLS Kota Payakumbuh, cenderung meningkat dari tahun 2020-2024, namun peningkatannya relatif kecil, rata-rata hanya 0,01 tahun. Tahun 2024, mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0,27 tahun dari tahun 2023 pada 14,57 tahun atau dengan kata lain level pendidikan D-III.

Diagram 2.38 Harapan Lama Sekolah di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

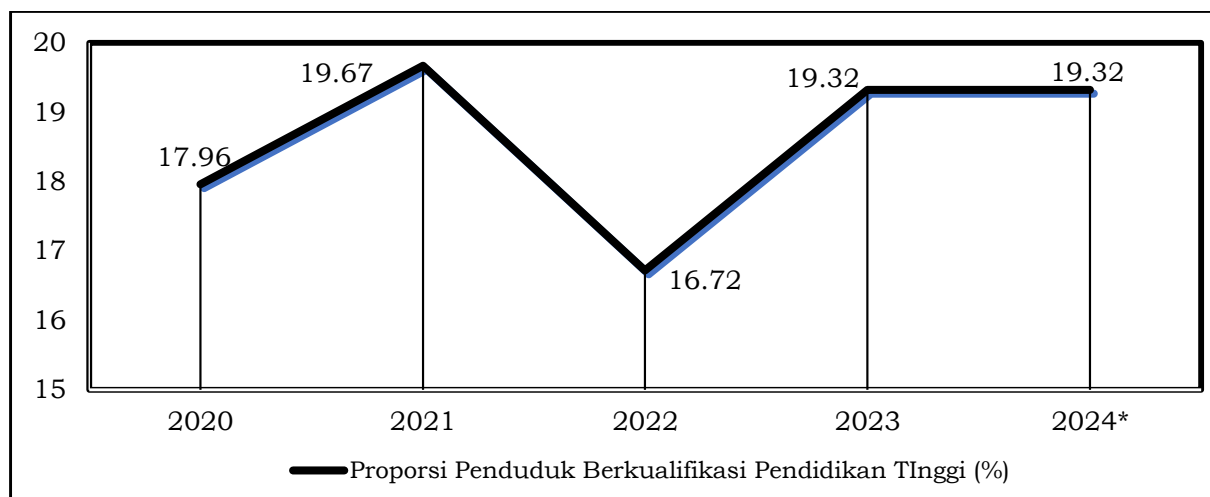


Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2024

D). PROPORSI PENDUDUK BERUSIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BERKUALIFIKASI PENDIDIKAN TINGGI

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi digunakan untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Rata-rata penduduk Kota Payakumbuh berkualifikasi pendidikan tinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar 19,32% Jumlah ini tergolong masih rendah, disebabkan ketatnya persaingan masuk perguruan tinggi negeri dan mahal biaya pendidikan.

Diagram 2.39 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas dengan Kualifikasi Pendidikan Tinggi di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2024 *) Angka Sementara

E). PERSENTASE PEKERJA LULUSAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI BEKERJA DI BIDANG KEAHLIAN MENENGAH TINGGI

Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Bidang keahlian menengah (*semi-skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan keahlian tinggi. Bidang keahlian tinggi (*skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya, sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan keahlian tinggi.

Tabel 2.43 Klasifikasi Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN RENDAH	TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH	TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI
➤ Tidak/ belum tamat SD ➤ SD/MI/SDLB/Paket A ➤ SMP/MTs/SMPB/Paket B	➤ SMA/MA/SMLB/Paket C ➤ SMK ➤ MAK	➤ Diploma I/II/III ➤ Diploma IV ➤ S1 ➤ S2 ➤ S2 Terapan ➤ S3

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2025

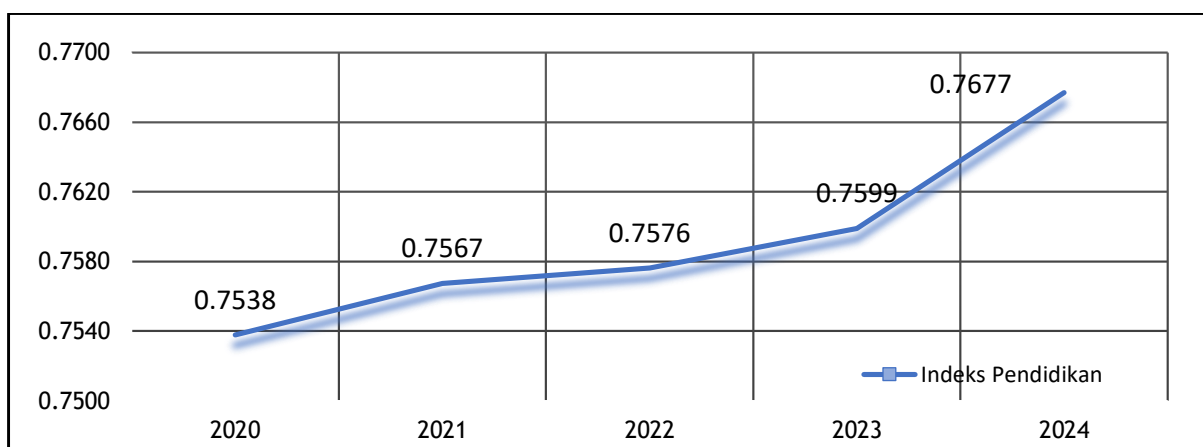
Indikator diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi. Untuk Kota Payakumbuh, data yang tersedia hanya pada tahun 2024, di

mana jumlah angkatan kerja yang mengenyam pendidikan menengah tinggi sebanyak 29.392 orang tamatan SMA/ sederajat, dan 18.558 orang tamatan perguruan tinggi/diploma, sekitar 64,72% dari total angkatan kerja yang bekerja.

F). INDEKS PENDIDIKAN

Indeks pendidikan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia yang mencerminkan hasil pembangunan bidang pendidikan dan mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin di dalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu daerah. Indeks Pendidikan diukur dari HLS dan RLS yang terlihat adanya peningkatan yang konstan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada diagram 2.40 terlihat indeks Pendidikan Kota Payakumbuh pada tahun 2020 sebesar 0,7538 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2024 sebesar 0,7677.

Diagram 2.40 Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2021-2025, 2025 (data diolah oleh Bappeda)

G). PERPUSTAKAAN

Seiring dengan perkembangan multimedia yang memberikan kemudahan akses terhadap data, berita dan informasi. Menjadikan hal ini sebagai tantangan bagi perpustakaan daerah kedepannya. Perpustakaan harus menjadi sarana aktif/interaktif dan menjadi tempat dihasilkannya berbagai hal baru. Untuk mewujudkan kondisi perpustakaan sesuai dengan fungsi dan peranannya, maka perpustakaan harus diubah sistem operasionalnya dari perpustakaan manual/tradisional menjadi perpustakaan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi.

Payakumbuh mengambil prinsip “**Literasi Menuju Kesejahteraan**”, prinsip ini mengupayakan peningkatan budaya baca di tengah masyarakat. Dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan setiap perpustakaan secara bertahap dapat mengejar ketertinggalan dari perpustakaan yang lebih maju dan lebih modern serta dapat mengoptimalkan fungsi perpustakaan bagi masyarakat. Selain hal tersebut diperlukan suatu

manajemen pengelolaan yang sesuai dengan standar dalam mengelola perpustakaan. Tahun 2023, jumlah judul koleksi buku yang ada di perpustakaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah buku dari 17.339 menjadi 19.246. Sedangkan untuk jumlah kunjungan perpustakaan menurun dari tahun 2022 menjadi 8.549 kunjungan di tahun 2023. Populasi yang harus dilayani adalah penduduk Kota Payakumbuh usia antara 5 s/d 69 tahun, dengan tidak menutup pelayanan untuk masyarakat dari luar kota. Jumlah perpustakaan yang berada di bawah kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh terdiri dari 1 (satu) unit Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh dan beberapa unit TBM (Taman Bacaan Masyarakat)/ Perpustakaan Kelurahan, sebagaimana digambarkan pada tabel 2.44 berikut.

Tabel 2.44 Perkembangan Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023

NO	URAIAN	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	6.914	6.914	7.204	8.519	9.520
	Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	15.501	15.501	16.801	17.339	19.246
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	44,60	44,60	44,80	49,13	49,46
2	Kunjungan perpustakaan	Orang	15.102	6.673	3.642	10.208	8.549
	Orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	118.704	123.907	125.149	125.349	144.727
	Pengunjung perpustakaan	%	12,72	5,39	2,91	8,14	5,91
3	Jumlah perpustakaan	Unit	38	42	42	40	40

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, 2024

H). INDEKS MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan sebuah *toolkit* yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi literasi dan keterampilan digital masyarakat suatu daerah. Diharapkan dengan adanya *tool* ini dapat berperan penting dalam mendorong akselerasi transformasi digital masyarakat. Terdapat 4 (empat) pilar dalam menentukan indeks ini, yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan. Pengukuran pilar-pilar tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat digital daerah secara lebih komprehensif, objektif, dan standardisasi.

Pengukuran IMDI untuk daerah baru dilakukan pada tahun 2022. IMDI Kota Payakumbuh pada tahun 2022 adalah 46,64 dan tahun 2023 turun menjadi 44,39 penurunan ini disebabkan belum optimalnya upaya peningkatan pilar pemberdayaan digital oleh pemerintah daerah dan masih rendahnya pemanfaatan digitalisasi bagi usaha-usaha pada UMKM yang ada di daerah. Pemerintah Kota Payakumbuh harus melakukan stimulus

ekonomi melalui pemberdayaan UMKM secara digital, sehingga menjadi momentum bagi UMKM untuk menguatkan dan menyelaraskan tumbuh kembangnya infrastruktur, meningkatnya SDM digital dengan langkah pemberdayaan digital tersebut.

4). PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

Perlindungan Sosial yang Adaptif (*Adaptive Social Protection/ ASP*) adalah pendekatan perlindungan sosial yang dirancang untuk merespons risiko dan kerentanan yang terus berubah, terutama akibat krisis, bencana alam, perubahan iklim, dan guncangan ekonomi. Konsep ini menggabungkan elemen dari perlindungan sosial, penanggulangan bencana, dan adaptasi perubahan iklim, sehingga lebih fleksibel dan responsif terhadap berbagai kondisi darurat.

A). CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Cakupan Jaminan Sosial Tenaga Kerja didapat dari jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan dibagi jumlah penduduk bekerja dikali 100%, dimana peserta merupakan pekerja penerima upah (PPU), jasa konstruksi dan pekerja bukan penerima upah. Sedangkan penduduk yang bekerja merupakan penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun. Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap resiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. Untuk tahun 2024, data dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terdaftar dan memiliki program jaminan kecelakaan kerja sebanyak 14.785 jiwa, dan jumlah penduduk bekerja sebanyak 74.085 jiwa. Tercatat sekitar 19,96% cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kota Payakumbuh, angka yang masih sangat rendah dan perlu upaya dan kebijakan untuk meningkatkan cakupan ini.

B). PERSENTASE DISABILITAS BEKERJA DI SEKTOR FORMAL

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada

status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal. Dimana persentase disabilitas bekerja di sektor formal didapat dari jumlah pekerja penyandang disabilitas sektor formal dibagi jumlah angkatan kerja penyandang disabilitas dibagi 100%.

5). BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

Beragama maslahat dan berkebudayaan maju adalah cara hidup yang menyatukan spiritualitas dan kemajuan, memadukan iman dan kemanusiaan, serta mendorong keharmonisan dan pembangunan sosial. Ini adalah pendekatan visioner, toleran, dan berkelanjutan yang sangat relevan untuk membangun masa depan bangsa yang beradab dan sejahtera.

A). INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah ukuran kuantitatif yang disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengukur tingkat kerukunan antar umat beragama di berbagai wilayah di Indonesia. IKUB menunjukkan seberapa harmonis kehidupan antar pemeluk agama, berdasarkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan toleransi antar kelompok agama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah alat penting untuk mengukur, memahami, dan membina kehidupan lintas agama yang damai dan produktif. IKUB mencerminkan sejauh mana masyarakat Indonesia hidup dalam toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat beragama. Indeks ini biasanya diukur melalui survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bekerja sama dengan lembaga survei atau lembaga penelitian. Hasil survei ini kemudian dinilai dengan skala 0–100, di mana **0–50** = Rendah, **51–75** = Sedang, dan **76–100** = Tinggi. Untuk indeks kerukunan umat beragama di kota Payakumbuh belum tersedia.

B). INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah sebuah indikator komposit yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia untuk mengukur sejauh mana pembangunan kebudayaan dilakukan secara terstruktur dan berdampak di berbagai wilayah Indonesia. Indeks ini bertujuan untuk menjadikan kebudayaan sebagai landasan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Untuk data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kota Payakumbuh hanya tersedia pada tahun 2024 mencapai skor 72,09 yang dikategorikan baik. IPK ini disusun berdasarkan pendekatan lokal khas Minangkabau, yaitu ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah), yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dan agama dalam pembangunan kebudayaan di Kota Payakumbuh.

6). KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual anggotanya secara seimbang dan berkesinambungan, serta memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara dalam semua aspek kehidupan di rumah, tempat kerja, pendidikan, politik, dan masyarakat. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang menerima, menghargai, dan melibatkan semua kelompok tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas, minoritas agama, suku, etnis, gender, usia, status sosial, dan kelompok rentan lainnya.

A). INDEKS PERLINDUNGAN ANAK

Indeks Perlindungan Anak adalah alat ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi di suatu wilayah, baik secara nasional maupun daerah. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kondisi perlindungan anak agar dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah, lembaga, maupun masyarakat. Pada Tahun 2020, Kota Payakumbuh menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), sebagai pengakuan atas komitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan. Pada tahun 2021, APE meningkat menjadi Madya untuk peningkatan dalam implementasi strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Pada tahun 2023, Kota Payakumbuh berhasil meraih penghargaan APE kategori Nindya dari KPPPA, menandakan peningkatan signifikan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 2.45 Apresiasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2023

NO	TAHUN	INDEKS INOVASI
1	2020	Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama
2	2021	Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Madya

NO	TAHUN	INDEKS INOVASI
3	2022	Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Madya
4	2023	Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya

Sumber: DP3AP2KB, 2025

B). INDEKS PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga) adalah suatu ukuran komprehensif yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menilai kualitas keluarga di Indonesia. Indeks ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional berbasis keluarga, karena keluarga dianggap sebagai unit terkecil dan paling fundamental dalam masyarakat. Nilai iBangga berkisar dari 0 hingga 100, dimana < 60: Keluarga dalam kategori kurang berkualitas, 60 – 79,99: Cukup berkualitas dan 80 – 100: Sangat berkualitas.

Pada tahun 2024, Kota Payakumbuh meraih nilai iBangga tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan skor 1465,5. Atas pencapaian tersebut, Kota Payakumbuh mewakili Provinsi Sumatera Barat dalam penilaian iBangga Award tingkat nasional dan berhasil masuk dalam lima besar nasional. Pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun 2024 di Semarang, Pj Wali Kota Payakumbuh menerima penghargaan iBangga dari Kepala BKKBN, sebagai pengakuan atas konsistensi peningkatan indeks pembangunan keluarga di kota tersebut. Kota Payakumbuh telah menunjukkan komitmen dan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas keluarga melalui berbagai program dan intervensi yang berfokus pada ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga.

C). INDEKS KETIMPANGAN GENDER

Indeks Ketimpangan Gender (Gender Inequality Index atau GII) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia. Indeks ini dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan pertama kali diperkenalkan dalam Human Development Report tahun 2010. Skornya berkisar antara 0 hingga 1 dimana 0 berarti tidak ada ketimpangan gender dan 1 berarti ketimpangan total antara laki-laki dan perempuan. Untuk data indeks ketimpangan gender kota payakumbuh belum tersedia.

Tabel 2.46 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	IKG
1	2020	0,279
2	2021	0,325
3	2022	0,295
4	2023	0,153
5	2024	0,175

Sumber: BPS, 2025

D). INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender (GDI) adalah sebuah ukuran yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai pelengkap dari Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/HDI*). GDI bertujuan untuk mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu negara atau wilayah. Data Indeks ketimpangan Gender Kota Payakumbuh hanya tersedia untuk tahun 2024 yaitu 0,175 yang dapat diartikan bahwa tingkat ketimpangan gender yang sangat rendah, hal ini menjadikan Kota Payakumbuh sebagai salah satu kota dengan kesetaraan gender terbaik di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.47 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	IPG
1	2020	98,46
2	2021	98,60
3	2022	98,61
4	2023	98,58
5	2024	98,93

Sumber: BPS, 2025

E). INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA

Indeks Pembangunan Pemuda (Youth Development Index/ YDI) adalah suatu alat pengukuran yang digunakan untuk menilai dan memantau kualitas hidup serta kemajuan pembangunan yang dialami oleh kaum muda (pemuda) di suatu negara atau wilayah, Indeks ini bertujuan untuk melihat secara komprehensif bagaimana kondisi pemuda dalam berbagai aspek penting yang mendukung perkembangan mereka menjadi individu yang produktif dan berkontribusi pada masyarakat. Untuk Indeks Pembangunan Pemuda Kota Payakumbuh belum tersedia.

C. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1). DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

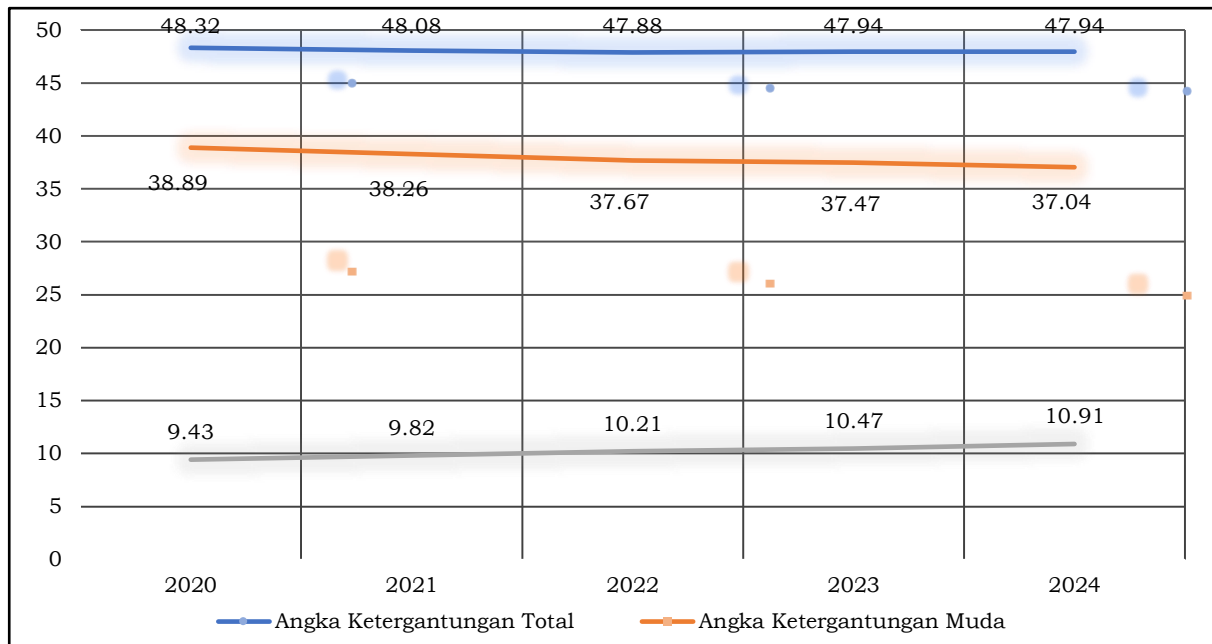
Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam menunjang daya saing suatu daerah, baik sebagai faktor produksi maupun pasar yang potensial terhadap hasil produksi yang dihasilkan. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu indikasi keberhasilan pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Ada beberapa indikator yang dipergunakan untuk melihat daya saing sumber daya manusia, seperti Angka Ketergantungan.

A) ANGKA KETERGANTUNGAN

Angka ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap

penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Angka ketergantungan rata-rata Kota Payakumbuh dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun sebesar 0,38%. Walaupun adanya kecenderungan penurunan, tingkat ketergantungan tersebut masih tergolong cukup tinggi.

Diagram 2.41 Angka Ketergantungan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: Payakumbuh Dalam Angka, 2020-2024, 2024

Diagram 2.41 menunjukkan angka ketergantungan tahun 2024 sebesar 47,94, artinya setiap 100 orang penduduk usia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 47,94 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 37,04 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 10,91. Dari beberapa indikator yang menjadi acuan untuk menggambarkan daya saing Kota Payakumbuh dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, maka hampir seluruhnya menunjukkan trend positif dalam menunjang daya saing.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat bersumber dari keahlian. Peningkatan keahlian dapat dilakukan melalui pelatihan dan kursus keterampilan sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Disamping itu, kesempatan kerja juga menjadi kebutuhan, yang diharapkan dengan kebijakan yang tepat dapat menciptakan *entrepreneur* yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

2). IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), inovasi dan produktivitas ekonomi mencerminkan hubungan erat antara kemajuan IPTEK, kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru (inovasi), dan peningkatan output ekonomi di mana IPTEK mencakup segala bentuk pengetahuan ilmiah dan teknologi yang digunakan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kehidupan manusia di mana kemajuan IPTEK memungkinkan efisiensi dalam proses produksi, otomatisasi, dan peningkatan kualitas produk serta jasa. Inovasi adalah proses menciptakan atau memperbaharui produk, jasa, atau proses agar lebih efektif, efisien, dan bernilai. Sedangkan Produktivitas ekonomi mengukur efisiensi produksi, yaitu seberapa besar output yang dihasilkan dari input tertentu (tenaga kerja, modal, bahan baku). Peningkatan IPTEK dan inovasi sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas, misalnya dengan penggunaan mesin otomatis dalam industri. IPTEK dan Inovasi yang menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan juga memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

A) RASIO PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN

Rasio PDRB industri pengolahan menunjukkan perbandingan antara nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan sektor industri pengolahan dengan PDRB secara keseluruhan. Tabel 2.48 memperlihatkan Rasio Industri pengolahan terhadap PDRB tidak terlalu besar dan ada kecenderungan menurun dengan data awal pada tahun 2020 memiliki rasio 0,049 dan pada akhir 2024 menjadi 0,048.

Tabel 2.48 Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Lapangan Usaha Industri Pengolahan	331,87	367,28	405,99	433,64	454,12
2.	PDRB	6.827,09	7.302,50	8.250,30	8.982,35	9.421,00
Rasio		0,049	0,050	0,049	0,048	0,048

Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2025

B) RASIO PDRB AKOMODASI, MAKAN DAN MINUM

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum menunjukkan perbandingan antara nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan sektor akomodasi, makan dan minum dengan PDRB secara keseluruhan. Tabel 2.49 memperlihatkan rasio akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB tidak terlalu besar dan ada kecenderungan meningkat dengan data awal pada tahun 2020 memiliki rasio 0,031 dan pada akhir 2024 menjadi 0,035.

Tabel 2.49 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyediaan Usaha Industri Pengolahan	206,62	230,03	276,10	304,03	328,69

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
2.	PDRB	6.087,09	7.302,50	8.250,30	8.982,35	9.421,00
Rasio		0,031	0,315	0,033	0,033	0,035

sumber : BPS Kota Payakumbuh, 2025

C) PROPORSI PDRB EKONOMI KREATIF

Proporsi PDB ekonomi kreatif adalah persentase kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah. Ekonomi Kreatif dapat merangsang pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat. Hal ini karena ekonomi kreatif cenderung membutuhkan bahan baku dari masyarakat, sehingga terjadi simbiosis yang saling menguntungkan antara masyarakat dan pelaku usaha. Untuk Kota Payakumbuh, proporsi PDRB ekonomi kreatif belum dilakukan perhitungan.

D) RASIO KEWIRAUSAHAAN

Rasio kewirausahaan adalah perbandingan jumlah wirausaha dengan jumlah angkatan kerja di suatu wilayah. Untuk negara-negara yang mulai menjadi negara maju, rata-rata memiliki angka 4% Rasio Kewirausahaan untuk Kota Payakumbuh, belum melakukan perhitungan.

E) TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja digunakan untuk mengetahui persentase penduduk yang bekerja ataupun sedang mencari kerja. Rentang tahun 2020-2023 adanya peningkatan angkatan kerja yang bekerja, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 74.085 orang. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penurunan peluang kerja, pemutusan hubungan kerja dan adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang tidak dapat diserap dalam pasar kerja karena keterbatasan kesempatan kerja

Sedangkan untuk angkatan kerja yang menganggur terlihat adanya peningkatan di tahun 2023 tercatat sebanyak 3.770 orang dan menjadi 3.791 di tahun 2024. Disisi lain, penurunan angkatan kerja di tahun 2023 adalah sebanyak 77.907 orang, dan menjadi 77.876 orang pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan jumlah yang bekerja, dan peningkatan angka pengangguran ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah pencari kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia yang disebabkan ketidaksesuaian keterampilan dan penurunan permintaan dan perlambatan dalam sektor-sektor ekonomi.

Tabel 2.50 Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	69.808	74.303	73.939	77.907	77.876
Bekerja	65.144	69.498	70.127	74.137	74.085
Penganggur	6,68	6,47	3,78	4,84	4,87

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Bukan Angkatan Kerja	31.830	29.279	31,593	30,515	32.544
Sekolah	9.734	10.607	9.093	9.796	9.015
Mengurus Rumah Tangga	16.937	14.159	18.160	16.037	17.935
Lainnya	5.159	4.513	4.340	4.682	5.594
Penduduk Usia Kerja	101.638	103.582	105,532	108,422	110.420
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,68	71,73	70,49	71.86	70,53
Tingkat Penganggur (%)	6,68	6,47	3,78	4,84	4,87*

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2024

F) PROPORSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA FORMAL

Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) adalah persentase pekerjaan baru yang tercipta di sektor formal dari total pekerjaan baru dalam suatu periode, yang mencerminkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan, investasi, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) berguna untuk mengukur kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi proporsinya, semakin besar peluang pekerja memperoleh upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan hukum. Indikator ini juga penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ketenagakerjaan, investasi, dan pelatihan tenaga kerja yang diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, proporsi ini mencerminkan daya saing daerah, karena menunjukkan seberapa besar sektor formal berkembang dan menyerap tenaga kerja. Dalam perencanaan pembangunan SDM, data ini membantu menyusun kebijakan pendidikan dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar formal. Lebih jauh, peningkatan proporsi kerja formal turut memperkuat inklusi sosial dan perlindungan bagi pekerja, mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Sebagai contoh, jika suatu daerah hanya memiliki 35% proporsi kerja formal, maka pemerintah setempat dapat merancang kebijakan seperti formalisasi UMKM, pengembangan industri padat karya, dan pelatihan kerja berbasis pasar. Untuk Kota Payakumbuh data belum tersedia. Untuk Kota Payakumbuh data belum tersedia.

G). INDEKS INOVASI DAERAH

Indeks Inovasi Daerah adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat inovasi di suatu daerah atau wilayah tertentu. Indeks ini mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu mendorong dan mendukung kegiatan inovatif dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, teknologi, dan administrasi publik. Penilaian indeks ini dapat mencakup berbagai indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kapasitas daerah dalam merangsang dan mendukung inovasi. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri di bawah Kementerian Dalam Negeri diberi mandat untuk melakukan Penilaian Inovasi Daerah sebagai bagian dari Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini dimaksudkan untuk

merangsang kreativitas pemerintah daerah dan mendorong praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui fungsi pembinaannya, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri terus mendorong pemerintah daerah untuk menghasilkan ide-ide baru dan inisiatif-inisiatif yang inovatif.

Indeks inovasi untuk tahun 2020 belum dikategorikan antara Kab/Kota sedangkan untuk Tahun 2021 sampai dengan 2024 sudah dilakukan perhitungan setingkat Kabupaten/Kota. Indeks Inovasi Daerah Kota Payakumbuh tahun 2021-2023 mengalami penurunan, dari 51,99 pada tahun 2021 menjadi 44,47 dan 41,47 tahun 2022 dan 2023. Namun tahun 2024 naik menjadi 54,62.

Tabel 2.51 Indeks Inovasi Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	INDEKS INOVASI	KATEGORI
1	2020	248	Kurang Inovatif
2	2021	51,99	Inovatif
3	2022	44,47	Inovatif
4	2023	41,47	Inovatif
5	2024	54,62	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

3). PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU

A) INDEKS EKONOMI HIJAU

Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index/GEI*) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon, yang diluncurkan oleh Bappenas pada Agustus 2022. GEI mencakup 15 indikator yang berfokus pada tiga pilar: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Untuk kawasan kota, indeks ekonomi hijau belum dikonversi dengan indeks lainnya dan di Kota Payakumbuh belum dilakukan perhitungan kondisi sekarang.

B) RASIO PDRB SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) adalah persentase kontribusi sektor tersebut terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dalam periode tertentu. Untuk Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.52 Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dari tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	6,21	6,10	5,99	5,75	5,50

Dari tabel diatas terlihat bahwa Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan. Ini berarti bahwa kontribusi sektor primer terhadap ekonomi daerah semakin kecil, yang dapat menandakan terjadinya transformasi dan diversifikasi ekonomi ke sektor lain yang lebih produktif.

4. TRANSFORMASI DIGITAL

Transformasi digital adalah proses mengintegrasikan teknologi digital dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan proses bisnis lainnya yang menunjang kegiatan pemerintahan. Transformasi digital melibatkan penggunaan teknologi digital seperti komputasi awan, data besar, kecerdasan buatan, dan Internet untuk Segala (IoT) untuk mengubah proses bisnis, model operasional, dan pengalaman pelanggan. Ini adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan adaptasi terhadap perubahan lanskap digital yang terus berkembang.

Transformasi digital melibatkan penggunaan teknologi digital seperti komputasi awan, data besar, kecerdasan buatan, dan Internet untuk Segala (IoT) untuk mengubah proses bisnis, model operasional, dan pengalaman pelanggan. Ini adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan adaptasi terhadap perubahan lanskap digital yang terus berkembang. Adapun tujuan Transformasi Digital ini adalah:

1. Meningkatkan Efisiensi, otomatisasi proses, pengelolaan data yang lebih baik, dan penggunaan teknologi untuk mengurangi biaya operasional.
2. Meningkatkan Pengalaman Objek Layanan, menyediakan layanan yang lebih personal, cepat, dan mudah diakses melalui berbagai saluran digital.
3. Menciptakan Inovasi, mengembangkan produk dan layanan baru yang didukung oleh teknologi digital.
4. Mendapatkan Keunggulan Kompetitif, memungkinkan perusahaan untuk bersaing lebih efektif di pasar yang semakin digital.

A). INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah ukuran standar untuk mengukur tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. IP-TIK bertujuan untuk mengukur dan membandingkan tingkat pembangunan TIK antar wilayah dan antar waktu. Komponen indeks ini terdiri dari beberapa sub-indeks yaitu: akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Indeks ini dapat digunakan sebagai alat untuk pemantauan dan evaluasi kebijakan terkait TIK, identifikasi kesenjangan digital, serta perencanaan pengembangan TIK di masa depan. Untuk saat ini, di Kota Payakumbuh belum dilakukan pengukuran indeks ini, sehingga untuk data lima tahun terakhir belum tersedia.

5. INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

Integrasi ekonomi domestik dan global dapat mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dalam mendukung partisipasi dalam rantai pasok global.

A). PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok merupakan indikator yang menunjukkan seberapa terjamin dan konsisten pasokan barang kebutuhan dasar masyarakat, seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur, baik dari sisi jumlah maupun ketersediaannya di pasaran dalam periode tertentu. Indikator ini berguna untuk menilai ketahanan pangan dan kecukupan pasokan, dengan melihat apakah stok barang pokok mampu memenuhi permintaan masyarakat dan mengidentifikasi potensi kelangkaan. Stabilitas ketersediaan barang pokok juga berperan penting dalam pengendalian inflasi daerah, karena pasokan yang memadai dapat mencegah lonjakan harga. Selain itu, data ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan distribusi, intervensi pasar, serta subsidi barang pokok.

Indikator ini juga digunakan untuk memantau dampak musim atau krisis, seperti bencana alam atau gejolak ekonomi, guna memastikan ketersediaan barang tetap terjaga. Sebagai contoh, jika persentase stabilitas dan ketersediaan beras mencapai 95%, maka dapat disimpulkan bahwa pasokan beras dalam kondisi aman, tersedia secara konsisten di pasar, dan tidak mengalami gangguan harga maupun distribusi. Untuk Kota Payakumbuh data belum tersedia.

B) PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal seperti membeli aset tetap, seperti bangunan baik tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, jalan dan bandara, mesin, dan peralatan yang digunakan untuk produksi (tidak merupakan barang konsumsi) dengan umur pemakaian lebih dari satu tahun. Selain itu PMTB juga mencakup penambahan nilai aset yang tidak diproduksi dan pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup. PMTB merupakan salah satu indikator ekonomi penting untuk mengukur tingkat investasi dan juga dipakai dalam metode penghitungan PDRB.

Tabel 2.53 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

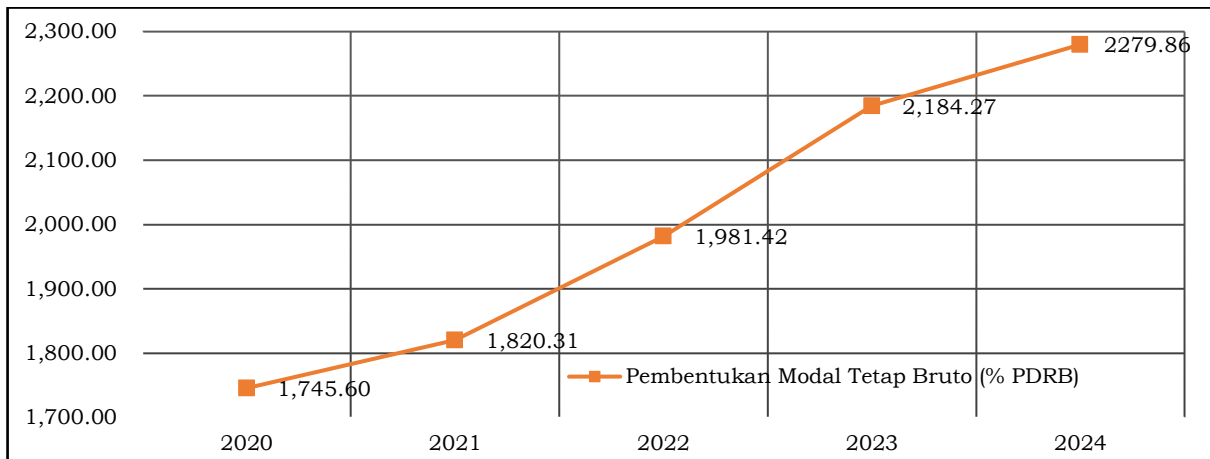
NO	TAHUN	PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (MILYAR RUPIAH)
1	2020	1.745,61
2	2021	1.830,31
3	2022	1.981,42
4	2023	2.184,27

NO	TAHUN	PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (MILYAR RUPIAH)
5	2024	2.279,86

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2025, 2025

Dilihat dari tabel 2.53 rentang tahun 2020-2024 terlihat adanya peningkatan PMTB di Kota Payakumbuh yang awalnya pada tahun 2020 senilai Rp1.745,61 Milyar naik sampai tahun 2024 menjadi Rp2.279,86 Milyar yang dapat diartikan investasi meningkat yang menyebabkan peningkatan tingkat produksi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh.

Diagram 2.42 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

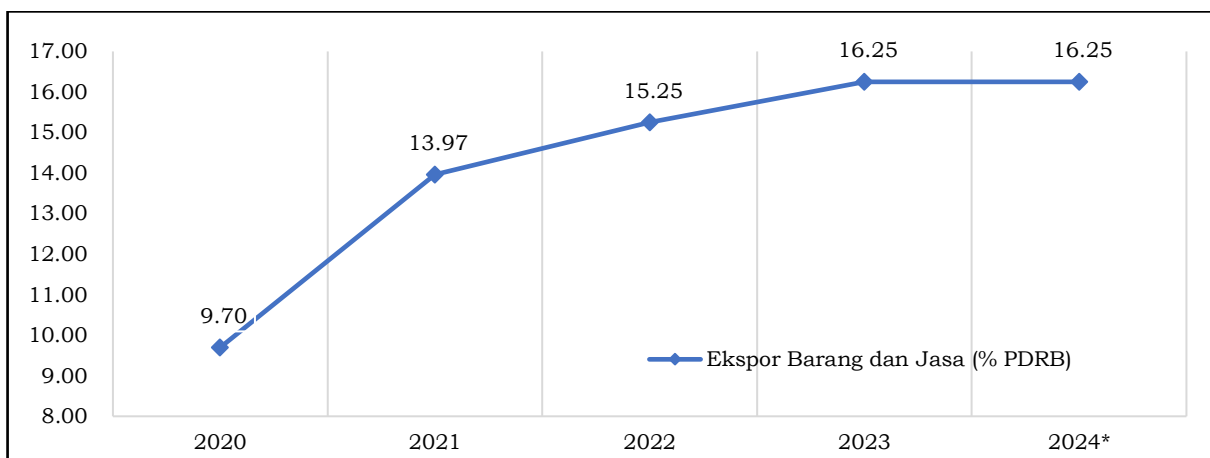


Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2025

C) EKSPOR BARANG DAN JASA

Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap PDRB suatu wilayah. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestik ke pasar regional dan internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan suatu wilayah juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan.

Diagram 2.43 Persentase Ekspor Barang dan Jasa Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2024

Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri daerah untuk dapat bersaing di pasar regional dan global. Diagram 2.42 menunjukkan nilai ekspor barang dan jasa Kota Payakumbuh dalam bentuk %PDRB dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2020-2024, dengan nilai 9,70% pada tahun 2020 dan terus naik menjadi 16,25% pada tahun 2024.

6) PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

A) INDEKS INFRASTRUKTUR KOTA

Indeks infrastruktur merupakan penilaian terhadap infrastruktur suatu daerah yang mencakup berbagai aspek seperti jalan dan transportasi publik, akses air bersih dan sanitasi, Listrik dan energi, infrastruktur pendidikan dan kesehatan dan telekomunikasi dan komunikasi. Indeks infrastruktur memiliki skala antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti rendah/buruk, sedangkan 1 berarti sangat baik atau sempurna. MedREP (Media Riset Ekonomi Pembangunan) melakukan estimasi indeks infrastruktur Kota Payakumbuh untuk tahun 2024 dan diperoleh indeks infrastruktur sebesar 0,1618 yang dapat diartikan tingkat ketersediaan dan kualitas infrastruktur rendah atau masih kurang memadai.

B) RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Sebagai hak dasar sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen secara global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat dan Sustainable Development Goals (SDG's).

Tabel 2.54 Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Rumah Layak Huni	28.891	28.933	30.693	30.814	34.025
2.	Jumlah Penduduk	140.201	141.184	143.325	144.830	146.730
3.	Rasio	0,20	0,20	0,21	0,21	0,20

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2024

Tabel 2.54 menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah layak huni di Kota Payakumbuh sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Payakumbuh dalam memberikan hunian yang layak melalui program bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH). Program ini merupakan bantuan bersifat rangsangan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah layak huni. Bantuan ini bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) dan kolaborasi pendanaan lainnya. Namun secara rasio pada tahun 2024 adanya penurunan 0,01 dari tahun 2023 yang disebabkan adanya penambahan jumlah penduduk di Kota Payakumbuh.

7) STABILITAS EKONOMI MAKRO

A) RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah yang tidak hanya berkontribusi bagi pembangunan daerah (kemandirian fiskal) namun juga menggambarkan geliat ekonomi di daerah.

Tabel 2.55 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah (juta)	17.067,52	20.359,63	22.033,33	23.089,81	23.691,08
PDRB (juta)	6.134.703	6.824.430,16	6,823,641,86	8.982.350	9.421,00
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	0,28	0,30	0,32	0,26	0,39

Sumber: BPS Kota Payakumbuh, 2024

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB berfluktuasi di mana pada tahun 2020 rasionya 0,28 dan naik terus sampai tahun 2022 menjadi 0,32 dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 0,26 sebelum kembali naik tahun 2024 naik lagi menjadi 0,39.

B) TINGKAT INFLASI

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu wilayah dalam rentang waktu yang berkelanjutan (kontinue) yang disebabkan ketidakseimbangan arus uang dan barang sesuai dengan mekanisme pasar. Inflasi disebabkan konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau ketidaklancaran distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penghitungan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada 2 (dua) kota yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Inflasi Kota Payakumbuh mengikuti/ mengacu pada inflasi Kota Bukittinggi.

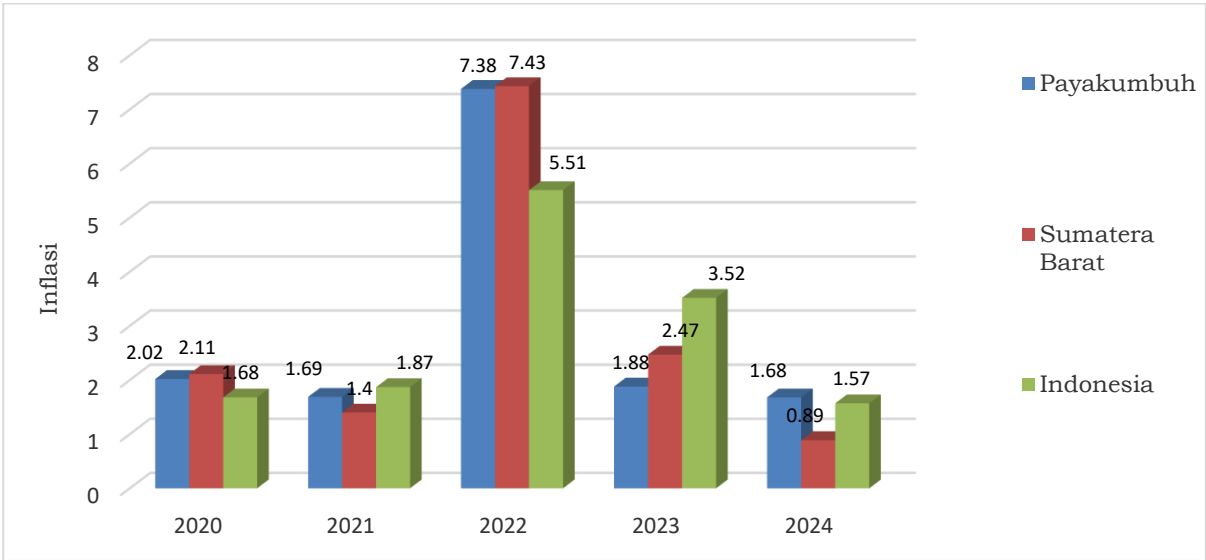
Tabel 2.56 Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

TAHUN	PAYAKUMBUH	SUMBAR	INDONESIA
2020	2,02	2,11	1,68
2021	1,69	1,40	1,87
2022	7,38	7,43	5,51
2023	1,88	2,47	3,52
2024	1,68	0,89	1,57
Rata-rata	3,01	2,86	2,83

Sumber: BPS, 2024

Pada tabel 2.56 di atas terlihat bahwa rata-rata inflasi Kota Payakumbuh selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan inflasi tertinggi 5 (lima) tahun terakhir sebesar 7,38 pada tahun 2022 dan semakin membaik pada tahun 2024 pada posisi 1,68 namun secara rata-rata tahun terakhir terbilang cukup tinggi yaitu 3,01 yang lebih tinggi dari nilai rata-rata inflasi Provinsi Sumatera dan Nasional.

Diagram 2.44 Perbandingan Angka Inflasi



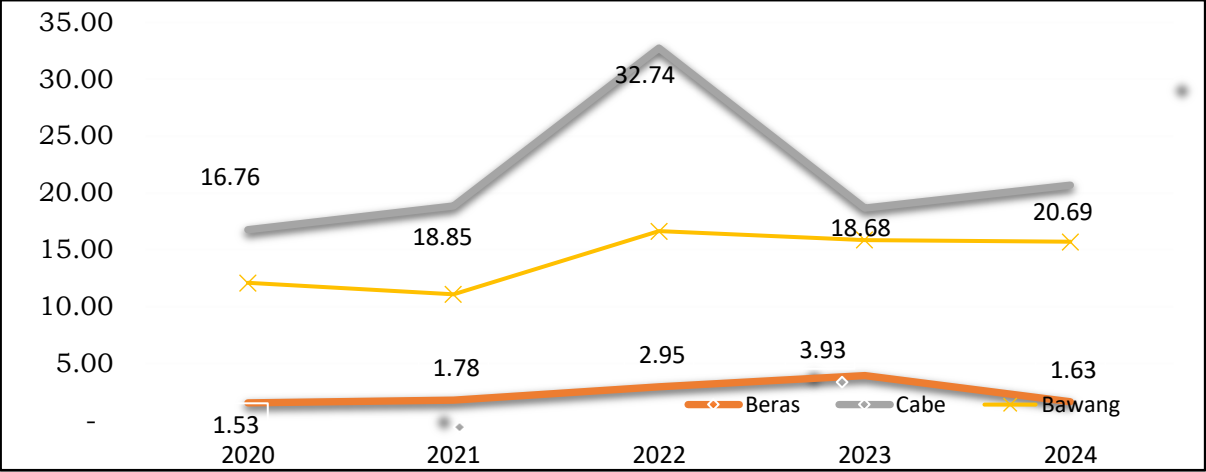
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

C) STABILISASI HARGA BERAS, CABE DAN BAWANG

Stabilitas harga merupakan upaya pemerintah dalam menjaga harga barang kebutuhan pokok agar tetap dalam kondisi normal, sehingga tidak membebani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang senantiasa dijaga stabilitas harganya adalah beras, cabe dan bawang. Pada Diagram 2.45 terlihat 3 (tiga) bahan pokok Kota Payakumbuh pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi terutama untuk beras dan cabe yang fluktuasinya cukup besar. Namun untuk stabilitas harga beras cenderung lebih baik, karena ketersediaan bahan pokok beras selalu tersedia oleh Bulog, sehingga setiap lonjakan harga dapat diantisipasi melalui operasi pasar dan pengaturan tata niaga. Namun untuk harga cabe dan bawang

memiliki fluktuasi harga yang sesuai dengan harga pasar, pemerintah hanya dapat mengatur tata niaga cabe dan bawang agar harganya tidak terlalu membebani masyarakat.

Diagram 2.45 Perkembangan Stabilisasi Harga Tiga Bahan Pokok Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2024

D) NILAI TRANSAKSI SAHAM PER-KAPITA PER-RUPIAH

Nilai Transaksi Saham Per Kapita adalah indikator yang menunjukkan rata-rata nilai transaksi saham yang dilakukan oleh penduduk di suatu daerah dalam periode tertentu, yang dihitung dengan membagi total nilai transaksi saham dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.57 Transaksi saham perkapita per (Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai saham tahunan (juta rupiah)	260.980	436.150	328.770	229.720	500.950
2	Jumlah penduduk	139.576	141.184	143.325	144.830	146.731
3	Nilai transaksi saham per kapita	1,869	3,089	2,294	1,586	3,414

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai transaksi saham per kapita selama tahun 2020 sampai tahun 2024 bervariasi yang berarti bahwa Tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas pasar modal tidak stabil dan mengalami perubahan dari tahun ke tahun, yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi nasional dan global, tingkat literasi keuangan, kebijakan pemerintah, pandemi COVID-19, serta perubahan perilaku investasi masyarakat.

D. ASPEK PELAYANAN UMUM

1) REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

Kondisi tata kelola pemerintahan yang baik merujuk pada bagaimana sektor publik dikelola secara bertanggung jawab, dengan prinsip-prinsip yang mendukung kepercayaan publik serta hasil pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini terkait dengan beberapa element antara lain:

1. Efisien dan Efektif, Efisien berarti sumber daya (anggaran, waktu, tenaga) digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal, dan Efektif berarti kebijakan dan program pemerintah benar-benar mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2. Akuntabel, Akuntabilitas juga mencakup adanya sistem evaluasi kinerja dan mekanisme sanksi atas pelanggaran, dalam hal ini Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan semua tindakan, kebijakan, dan penggunaan anggaran kepada publik maupun lembaga pengawas.
3. Pertukaran Informasi yang Terbuka dan Transparan, Informasi pemerintahan harus mudah diakses oleh publik, termasuk data keuangan, proses pengambilan keputusan, serta hasil kinerja instansi pemerintah. Transparansi ini penting untuk mencegah praktik korupsi dan memperkuat partisipasi masyarakat.
4. Kepatuhan terhadap Kerangka Hukum, Seluruh proses dan keputusan pemerintahan harus berada dalam koridor hukum yang berlaku, tidak sewenang-wenang. Ini mencakup supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif memberikan gambaran terkait dengan kondisi daya dukung aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam memantapkan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan memastikan penggunaan data tentang kondisi pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan, adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

A) INDEKS REFORMASI HUKUM

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan pada pelaksanaan reformasi birokrasi pada level meso yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu: memperkuat koordinasi Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi; mendorong regulasi atau

deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidi, mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan, meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat dan daerah. Indeks Reformasi Hukum Kota Payakumbuh telah mulai dilakukan pengukurannya pada tahun 2022 oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Tabel 2.58 Indeks Reformasi Hukum Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024

NO	TAHUN	INDEKS REFORMASI HUKUM	KATEGORI NILAI
1	2022	71,85	Baik
2	2023	67,48	Cukup Baik
3	2024	87,00	Baik

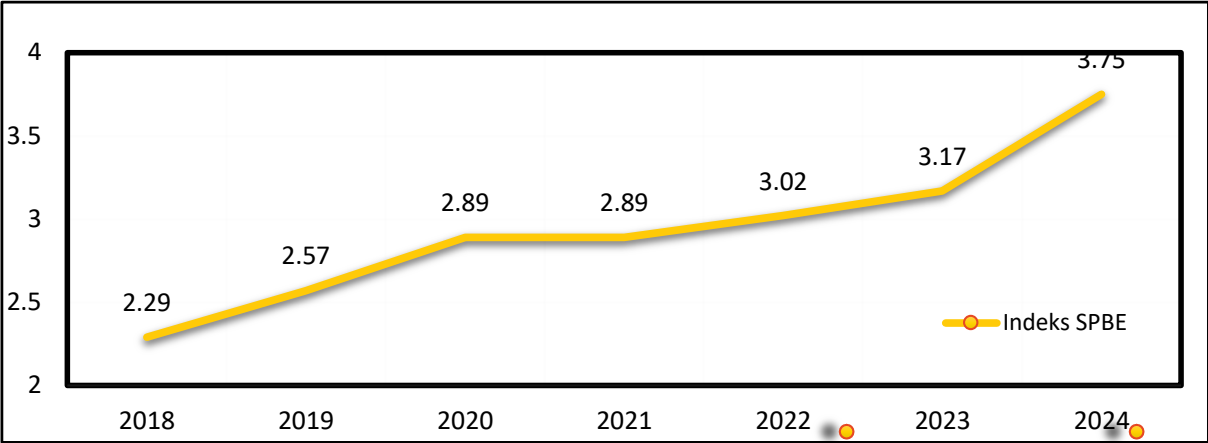
Sumber: Bagian Hukum Setdako Payakumbuh, 2025

B) INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyatakan SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

SPBE bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintahan. Lebih dari itu, SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan. Di domain Kegiatan Pemerintahan ruang lingkup SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Bisnis, Anggaran dan Belanja SPBE serta Data dan Informasi Elektronik. Di Domain Teknologi dan Informasi, SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Sementara di Domain Layanan, SPBE meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan. Perkembangan capaian SPBE Kota Payakumbuh dari tahun 2018-2024 fluktuatif, namun trendnya menunjukkan peningkatan, walaupun pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dari 2,89 menjadi 2,42. Setelah itu kembali naik dan tahun 2024 sudah mencapai 3,75 atau masuk dalam kategori “baik”.

Diagram 2.46 Capaian SPBE Kota Payakumbuh Tahun 2018-2024



Sumber: Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, 2024

C) INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.59 Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	NILAI IPP	PREDIKAT	KATEGORI
1	2020	4,24	A-	Sangat Baik
2	2021	4,39	A-	Sangat Baik
3	2022	4,56	A	Pelayanan Prima
4	2023	4,41	A-	Sangat Baik
5	2024	4,50	A-	Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi Setdako Payakumbuh, 2024

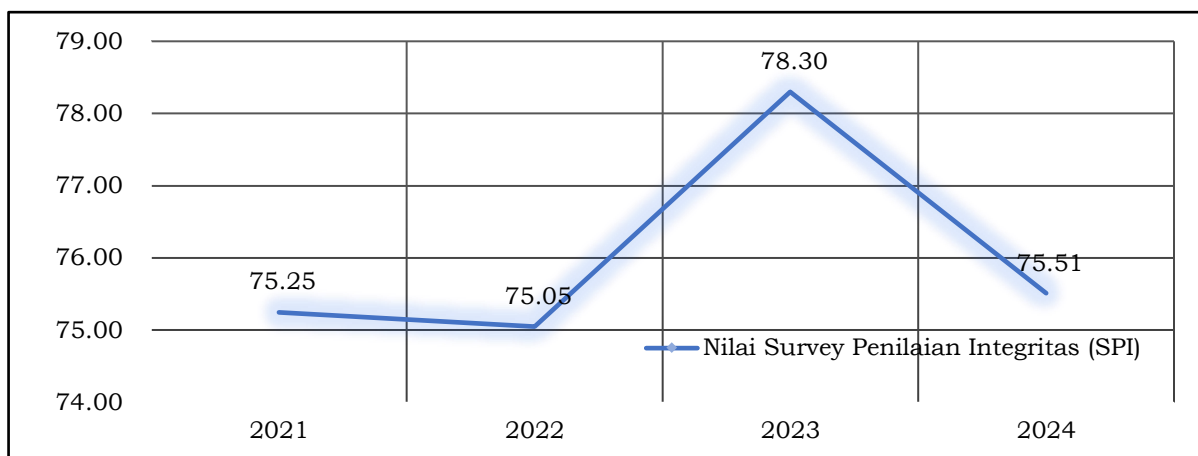
D) SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD). SPI mengukur penilaian persepsi dan pengalaman sebagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yang terbagi menjadi dua penilaian, yaitu penilaian internal dengan responden adalah pegawai pada instansi tersebut dan penilaian eksternal dengan responden adalah pengguna layanan/mitra kerja sama.

Penghitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menjumlahkan perkalian bobot dengan masing-masing penilaian pada tiga dimensi utama, kemudian hasilnya dikurangi dengan perkalian bobot dengan faktor koreksi. Nilai Indeks Integritas berkisar dari skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati 100 menunjukkan suatu lembaga semakin berintegritas. Komponen-komponen penilaiannya sebagai berikut:

- a. Indeks Penilaian Internal terdiri dari perdagangan pengaruh, pengelolaan PBJ, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan;
- b. Indeks Penilaian Eksternal terdiri dari upaya pencegahan korupsi, transparansi dan keadilan layanan, integritas pegawai
- c. *Focus Group Discussion* (FGD) dan *In Depth Interview* (IDI), Faktor Koreksi terdiri dari operasi tangkap tangan, investigasi, pengkondisian, informasi APH.

Diagram 2.47 Capaian SPI Kota Payakumbuh Tahun 2021-2024



Sumber: Inspektorat Kota Payakumbuh, 2024

Capaian SPI Kota Payakumbuh dapat dilihat pada diagram 2.47, dimana Survey Penilaian Integritas (SPI) Kota Payakumbuh baru dilakukan pada tahun 2021-2024. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai SPI Kota Payakumbuh adalah 75,25 dan 75,05 atau masih dalam kategori “waspada”, sedangkan pada tahun 2023 nilainya naik cukup signifikan mencapai 78,30 atau berada pada level bawah kategori “hijau”. Sedangkan pada tahun 2024 kembali turun menjadi 75,51. Tentunya ini perlu ditingkatkan dengan menggalakkan perilaku anti korupsi.

2) HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

Menjelaskan tentang kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan

indikator-indikator seperti Persentase Penegakan Perda, Persentase Capaian Aksi HAM, Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Rasa Aman, Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia (HAM). Hal ini mencerminkan sistem hukum yang tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga memberikan keadilan sosial bagi Masyarakat. Keamanan nasional yang tangguh bertujuan menciptakan stabilitas politik dan ketertiban sosial yang mendukung pembangunan. Keamanan ini melibatkan ketahanan dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk ancaman terorisme, radikalisme, dan kriminalitas. Demokrasi substansial berarti demokrasi yang tidak hanya formal tetapi juga mencerminkan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan dan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial. Demokrasi ini memastikan bahwa rakyat memiliki kendali atas pemerintahan dan kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan publik. Ketiga aspek ini merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, adil dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat.

A) PERSENTASE PENEGAKAN PERDA

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos Kamling adalah salah satu penyelenggaraan keamanan masyarakat dengan pola peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Tingkat pelanggaran terhadap Perda di Kota Payakumbuh masih tinggi dan bervariasi tiap tahun dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.60 Tingkat Pelanggaran Perda Pekat Kota Payakumbuh dari Tahun 2020-2024

NO	KATEGORI KASUS	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelanggaran Perda Pekat	Kasus	44	107	95	95	78
2.	Selain Pelanggaran Perda Pekat	Kasus	898	11.081	375	375	50
	Jumlah Pelanggaran	Kasus	942	11.188	470	470	128
	Jumlah Pelanggaran yang di Proses/ tertangani	Kasus	942	11.188	470	470	128
	Persentase Perda yang tertangani	%	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2024

Anomali data terlihat pada tahun 2021, dimana terjadi kenaikan yang sangat tinggi, dikarenakan pada tahun dimaksud banyak terjadi pelanggaran Perda No 6 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease*.

Tabel 2.61 Tindak Kriminal Pelanggaran Perda di Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tindak Pelanggaran Perda	kasus	942	11.188	470	470	128
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	139.576	141.184	143.325	146.731	146.731
	Rasio Pelanggaran Perda per 10.000 Penduduk	%	67,49	792,48	33,14	33,14	8,72

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2024

B) INDEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat di suatu wilayah. Indeks ini sering digunakan oleh pemerintah, khususnya aparat penegak hukum seperti kepolisian sebagai salah satu indikator untuk mengevaluasi keberhasilan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

C) ANGKA KRIMINALITAS

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan iklim investasi suatu wilayah melalui pengurangan kuantitas dan kualitas kriminalitas. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu, artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti pencurian, pembunuhan, kejahatan seksual, kasus narkoba dan sebagainya. Tabel 2.62 menggambarkan fluktuasi kasus kriminal yang ada di Kota Payakumbuh dimana tahun 2024 terjadinya penurunan kasus kriminal sebesar 34 kasus menjadi 449 kasus dari 483 kasus.

Tabel 2.62 Angka Kriminalitas di Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024

NO	JENIS KRIMINAL	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kasus Narkoba	177	45	49	49	49
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	5	1	-	-	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	2	46	42	42	50
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	42	8	60	60	75
5.	Jumlah kasus Pencurian	62	117	136	136	64
6.	Jumlah kasus Penipuan	6	28	5	5	4
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	2	2	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	296	456	483	483	449
9.	Jumlah Penduduk	139.576	141.184	143.325	144.830	146.731
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	2,12	3,23	3,37	3,33	3,06

Sumber: Polres Kota Payakumbuh, 2024

D) CAKUPAN LINMAS

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk mencerminkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menjamin, memelihara, menjalankan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Semakin tinggi rasio jumlah Polisi Pamong Praja, semakin besar ketersediaannya dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penegakan peraturan daerah.

Tabel 2.63 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Petugas Pol PP dan Damkar	204	208	255	204	208
	Jumlah Petugas Satpol PP dan Damkar PNS	51	48	46	30	43
	Jumlah Petugas Satpol PP dan Damkar Non PNS	153	160	163	128	122
	Jumlah Petugas Damkar PNS	-	-	11	13	17
	Jumlah Petugas Damkar Non PNS	-	-	35	33	26
2	Jumlah Penduduk	139.576	141.184	143.325	144.830	146,730
3	Rasio (1:10.000)	14	14	14	14	14

Sumber: Satpol PP Kota Payakumbuh, 2024

Pada tabel 2.64 cakupan Petugas Linmas/10.000 penduduk di Kota Payakumbuh masih rendah, berkisar rata-rata 44 orang dalam 10.000 penduduk dalam 5 (lima) tahun terakhir dan kecenderungannya menurun seiring dengan pertambahan penduduk.

Tabel 2.64 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Kota Payakumbuh tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Linmas (orang)	554	554	596	596	589
2.	Jumlah Penduduk (orang)	8.043	8.043	8.043	8.043	8,043
3	Rasio (1:10.000)	6,89	6,89	7,4	7,4	7,3

Sumber: Satpol PP Kota Payakumbuh, 2025

E) PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN TRANTIBUM

Untuk persentase penurunan pelanggaran trantibum dengan target 25% yang ditetapkan pada tahun 2024, realisasinya melebihi target yang ditetapkan sebesar 28,50% yang didukung oleh Kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

3) KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

A) PERSENTASE KERJASAMA WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Kerjasama wajib merupakan kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan yang memiliki eksternalitas lintas daerah, dan

penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Untuk persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan oleh Kota Payakumbuh adalah 100 persen, di mana kerjasama yang dilakukan dengan Kabupaten Limapuluh Kota berbentuk MoU dan sudah ditindaklanjuti dengan berbagai kerjasama sesuai kepentingan dan kebutuhan masing-masing daerah.

4) KINERJA SETIAP URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam dokumen perencanaan strategis tingkat menengah Tahun 2025-2029 ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) di mana capaian kinerja indikator ini dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.65 Indikator Kinerja Kunci

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Target					Realisasi					Capaian (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	ASPEK PELAYANAN UMUM																	
	Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar																	
	Urusan Pendidikan																	
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%				65	67									0,00		DisDik
	Urusan Kesehatan																	
2	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	%				0,24	0,24				2,41	2,33				104,17	100,00	Dinkes
3	Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	%				100	100				100	100				100,00	100,00	Dinkes
4	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%				92	94				100	100				91,76	106,38	Dinkes
5	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%				90	93				100	100				92,21	107,53	Dinkes
6	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%				93	93				100	100				92,17	107,53	Dinkes
7	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%				82	84				82,82	100				110,79	90,65	Dinkes
8	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%				88	90				89,67	100				109,35	112,08	Dinkes
9	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%				93	94				93,53	92,78				101,51	108,60	Dinkes
10	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	65	70	100	58,22	100	102,01	100	100,00	58,22	100,00	153,85	126,03	Dinkes

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Target					Realisasi					Capaian (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
11	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%				85	87				100	100				100,88	114,94	Dinkes
12	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%				100	100				100	100				111,71	100,00	Dinkes
13	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%				100	100				100	100				107,21	100,00	Dinkes
14	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%				30	50				100	100				344,27	172,00	Dinkes
15	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%				78	79				100	100				128,97	108,86	Dinkes
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
16	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan Irigasi	%				90,48	91,03				89,94	85,54				99,40	90,62	Dpupr
17	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%				100	100				100	89,97				99,81	100,00	Dpupr
18	Persentase jumlah rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%				96,56	96,89				99,13	99,18				102,66	102,36	DPKP
19	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%				100	100				0/NA	100				89,69	100,00	Dpupr
20	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%				84,88	85,76				85,19	85,82				100,15	100,07	Dpupr

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Target					Realisasi					Capaian (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
21	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%				0,26	0,32				46,24	86,60				177,84	200,00	Dpupr
22	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%				85,00	86,00				0	100				117,65	116,28	Dpupr
	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
23	Persentase Kawasan Pemukiman Kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	1,34	0,82	0,3	0,24	0,18	0,77	0,46	0	0	0	142,54	143,90	200,00	200,00	200,00	DPKP
24	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%				3,76	3,4				12,22	2,69				272,61	224,12	DPKP
25	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum)	%				126	126				1596/29,40	36,28				124,60	124,60	DPKP
	Urusan Ketentraman. Ketertiban Umum. dan Perlindungan Masyarakat																	
26	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%				100	100				100	100				100	100	SatPol PP&PK
27	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%				50	75				100	100				100,00	133,33	KaSatPol PP&PK
28	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang				1710	1710				320/200	100/210				100	100	BPBD
29	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang				525	525				300/100	100/210				100	100	BPBD
30	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	orang				200	200				0	100/463				112,5	100	BPBD

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Target					Realisasi					Capaian (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	penyelamatan dan evakuasi korban bencana																	
31	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%				100	100				100	100				100	100	KaSatPol PP&PK
32	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit				15	15				100/15	5,6				100	165	KaSatPol PP&PK
	Urusan Sosial																	
33	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%				100	100				100	100				100,00	100,00	Dinsos
34	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota	%				100	100				100	100				100,00	100,00	Dinsos
	Layanan Urusan Wajib Terkait Non Pelayanan Dasar																	
	Urusan Ketenagakerjaan																	
35	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	%				100	100				100	100					-	Disnakerperin
36	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%				47,29	47,90				47,29	47,90				124,74	160,25	Disnakerperin
37	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%				6350,7	6.350.7										-	Disnakerperin
38	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB.LKS Bipartit. Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%				3,23	3,23				75	41,27				100,00	2321,98	Disnakerperin

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Target					Realisasi					Capaian (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
39	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%				46,24	46,24				51,21	51,58				110,75	39,73	Disnakerperin
	Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak																	
40	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	-	-	-	3,82	3,92	-	-	-	4	12,22	-	-	-	104,71	311,73	DP3AP2 KB
41	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00	DP3AP2 KB
42	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%	0,06	0,055	0,04	0,25	0,249	0,041	0,026	0,247	0,248	1,92	131,67	152,73	-417,50	100,80	-571,08	DP3AP2 KB
	Urusan Pertanahan																	
43	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%				100	100				100	100				100,00	99,28	Dpupr
44	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%				100	100				0/NA	100				255,73	100,00	Dpupr
45	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%				100	100				99,94	100				99,40	100,00	Dpupr
46	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%				2	2				83,33/5	0				-	400,00	Dpupr
	Urusan Lingkungan Hidup																	
47	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten/Kota	Nilai				58,26	58,26				59,5	58,52				102,13	100,45	DLH
48	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%				95,5	95,75				97,11	94,63				101,57	101,31	DLH

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Target					Realisasi					Capaian (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
49	Ketaatan penanggung jawab usaha da-tau kegiatan terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%				72	73				26,42	25,93				100,00	101,37	DLH
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
50	Kepemilikan KTP Elektronik	%	98,96	90	91	99,8	99,4	99,54	99,14	99,08	99,47	99,44	100,59	110,16	108,88	99,67	100,15	Dis Dukcap il
51	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%				42,5	45				50,41	62,84				118,61	139,80	Dis Dukcap il
52	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	94,52	91	92	98	99	96,41	97,15	98,41	98,99	99,08	102,00	106,76	106,97	101,05	100,12	Dis Dukcap il
53	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	nota kesepa haman				16	17				30/100	100/80				187,50	176,47	Dis Dukcap il
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
54	TFR (Angka Kelahiran Tortal)	%				2,69	2,67				2,4	0,24				-	-	DP3AP2 KB
55	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%				40,60	41,60				60,03	63,63				129,13	135,34	DP3AP2 KB
56	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%				14,50	14				16,61	13,56				123,85	115,00	DP3AP2 KB
	Perhubungan																	
57	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	%				65	67				80	0,88				123,08	119,40	Dishub

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Target					Realisasi					Capaian (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
58	Kinerja Lalu Lintas Kaupaten/ Kota	%				84	86				0,8	0,86				78,57	76,74	Dishub
	Urusan Komunikasi dan Informatika																	
59	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%				40	50				93,43	93,43				232,50	200,00	Dis Kominfo
60	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik. Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%				100	100				100	100				97,00	100,00	Dis Kominfo
	Urusan Penanaman Modal																	
61	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	%				0,09	0,98				135,88	33,38				1500,00	3405,10	DPMPT SP
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga																	
62	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	organisasi				150	150				9,2	17,07				100	100	Disparpora
63	Peningkatan prestasi olahraga (nasional. internasional)	medali				2	2				109	67				5450	3450	Disparpora
64	Tingkat partisipasi pemuda dalam dalam kegiatan ekonomi mandiri	%				4,32	4,32				2,00	13,73				12,5	12,5	Disparpora
	Urusan Statistik																	
65	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%				100	100				100	100				100	100	Dis Kominfo
66	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%				100	100				100	100				100	100	Dis Kominfo
	Urusan Kebudayaan																	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Target					Realisasi					Capaian (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
67	Terlestarikan Cagar Budaya	%				3,75	4				100	100				100	100	Disparpora
	Urusan Perpustakaan																	
68	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai				60	65				64,17	66,18				106,95	101,82	DPK
	Urusan Kearsipan																	
69	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	%				71,36	75,48				63,32	70,04				100,90	100,69	DPK
70	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%				90	91,66				100	100				101,11	100,37	DPK
	Layanan Urusan Pilihan																	
	Urusan Kelautan dan Perikanan																	
71	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari Seluruh Kabupaten/Kota	ton				560	560				101,98					103,99	103,01	Distan
	Urusan Pertanian																	
76	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Produktivitas padi)	ton/Ha				5,18	5,18				616,15	5,85				118,92	108,30	Distan
77	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%				1	1				0	- 62,5				0,00	6000,00	Distan
	Urusan Perdagangan																	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Target					Realisasi					Capaian (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
78	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%				17,47	45				100	51,72				572,41	222,22	Diskoda g UKM
79	Persentase kinerja realisasi pupuk	%				46	46				62,49	55,32				135,85	120,37	Diskoda g UKM
80	Persentase alat-alat ukur. takar. timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%				69,15	74,12				47,69	50,48				68,97	68,11	Diskoda g UKM
	Urusan Perindustrian																	
81	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	%				1,5	2				22,7	1,87				1513,33	0,00	Dis Nakerpe rin
82	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (UI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%				10	10				44,05	0				440,50	100,00	Dis Nakerpe rin
83	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%				5	5				0					0	0	Dis Nakerpe rin
84	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	%				ada	ada				100	125				100	100	Dis Nakerpe rin
	Fungsi Pendukung																	
	Kesekretariatan Daerah																	
85	Indek kualitas kebijakan	indeks				72	73				-	50,49				-	-	Setdako
86	Indek pelayanan publik	indeks				4,24	4,26				4,41	4,50				104,72	98,67	Setdako
87	Indek pemerintahan daerah	indeks				6,2	6,25				-	-				-	-	Setdako

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Target					Realisasi					Capaian (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
88	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif	%				70	70				99,92	89,24				104,63	0,00	Setdako
	Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																	
	Fungsi Penunjang																	
	Keuangan																	
89	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%				30	30				17,99	28,23				158,65	158,65	BKD
90	Rasio PAD (thdp PAD non migas)	%				12	12				16,62	18,41				140,25	140,25	BKD
91	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%				80	80				84,01	85,87				119,90	119,90	BKD
92	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%				-9	-9				9,28	7,36				116,00	116,00	BKD
93	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%				600	600				5,95	6,51				198,84	198,84	BKD
94	Manajemen Aset	ada/ tidak				ada	ada				4	4				100,00	100,00	BKD
95	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%				10	10				11,07	11,45*				110,70	110,70	BKD
	Kepegawaian																	
96	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasarl (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%				327,25	332				79,67	81,02				24,35	24,40	BKPSD M
97	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%				19,67	19,88				25,53	29,29				129,79	147,33	BKPSD M
98	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%				43,21	44,6				34,81	27,39				80,56	61,41	BKPSD M

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Target					Realisasi					Capaian (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Inspektorat																	
99	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	level				2+	3				3	3				100	100	Inspekt orat
100	Maruritas Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah (SPIP)	indeks				3	3				2,982	3				100	100	Inspekt orat
	Kewilayahan																	
101	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yg aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecama tan
	Kesatuan Bangsa dan Politi																	
102	Persentase penanganan konflik sosial yg terjadi di tengah masyarakat	%	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100	95	100	100	100	100	Kes Bangpol
103	Persentase parpol dan ormas yang aktif	%	90,64	90,64	90,64	90,64	90,64	86,27	90,2	90,9	90,72	91,78	95	100	100	100	101,26	Kes Bangpol

Sumber: Data Perangkat Daerah dan LPPD, 2025

E. EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan Provinsi, Nasional serta Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Dalam mengevaluasi indikator kinerja, digunakan interpretasi interval nilai realisasi kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga memudahkan dalam memahami capaian kinerja yang merupakan perbandingan realisasi dengan target yang ditetapkan, sebagaimana dijabarkan pada tabel 2.66 berikut ini:

Tabel 2.66 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$x \leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Kemendagri, 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja,
2. Hasil Sedang, Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal,
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah, Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan,

Mempedomani dokumen RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022, indikator yang menjadi ukuran capaian target kinerja

pembangunan daerah dirinci ke indikator makro, indikator kinerja utama, dan indikator kinerja daerah. Berikut capaian indikator kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir.

1) INDIKATOR MAKRO

Untuk indikator makro pembangunan, terdapat 7 (tujuh) indikator, di mana 2 (dua) indikator pencapaian di tahun 2024 di bawah target yang ditetapkan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini. Untuk pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh lima tahun terakhir mengalami kenaikan pasca pandemi, namun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2024. Sementara itu, realisasi indikator Indeks Gini selama lima tahun pada kategori sedang (moderat), perlu upaya untuk menurunkan Indeks Gini dengan meningkatkan pendapatan masyarakat serta menurunkan tingkat kemiskinan. Begitu juga dengan tingkat pengangguran mengalami kenaikan di tahun 2024 yaitu 4,87%, di mana sebelumnya pada tahun 2023 pada angka 4,84%, namun telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Tabel 2.67 Indikator Makro Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	79,33	80,13	80,93	79,96	80,41	78,9	79,08	79,53	80,14	80,76	99,46	98,69	98,27	100,23	100,44
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,54	5,41	5,27	5,52	5,41	5,65	6,16	5,66	5,44	5,19	98,01	86,14	92,60	101,45	104,07
3	Tingkat Pengangguran	%	5,9	5,83	5,8	6,05	5,81	6,68	6,47	5,16	4,84	4,87	86,78	89,02	111,03	120,00	116,18
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	1,18	4,18	5,00	4,36	4,71	-1,66	3,58	5,41	4,7	4,53	- 140,68	85,65	108,20	107,80	96,18
5	PDRB (ADHB) Perkapita	(Rp, Juta/org)	50,25	51,63	53,47	56,16	59,41	49,28	51,73	57,73	62,02	64,21	98,07	100,19	107,97	110,43	108,08
6	PDRB (ADHK) Perkapita	(Rp, Juta/org)	33,05	33,96	35,16	33,53	34,6	31,75	32,44	33,44	34,54	35,64	96,07	95,52	95,11	103,01	103,01
7	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	Nilai	0,276	0,273	0,271	0,277	0,276	0,325	0,316	0,311	0,316	0,313	82,25	84,25	85,24	85,92	86,59

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Indeks Gini menggambarkan ketimpangan pendapatan dimana Kota Payakumbuh berada pada level moderat, namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat, Indeks Gini Kota Payakumbuh merupakan rasio tertinggi, hal ini mengindikasikan tingkat pemerataan pertumbuhan ekonomi di setiap level masyarakat di Kota Payakumbuh masih rendah seperti halnya pada sektor ekonomi Kota Payakumbuh lebih didominasi oleh sektor perdagangan yang dikuasai oleh kalangan bermodal (kapitalis).

2) INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian kinerja indikator kinerja utama (IKU) menjadi parameter keberhasilan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dijabarkan pada tabel 2.68 berikut:

Tabel 2.68 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

No	TUJUAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Tujuan I: Terwujudnya Pengembangan Manusia Yang Berkualitas																		
1	Harapan lama sekolah	Tahun	14,58	14,67	14,77	14,29	14,3	14,26	14,27	14,29	14,3	14,57	97,81	97,27	96,75	100,07	101,89	DisDik
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,79	10,85	10,9	11,14	11,26	10,73	10,81	10,82	10,88	10,89	99,44	99,63	99,27	97,67	96,71	DisDik
3	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,9	74,3	74,5	74,18	74,32	74,08	74,18	74,48	74,77	75,08	99,78	99,38	99,52	100,80	101,02	DisDik
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	61,86	62,35	62,37	72,01	72,51	67,81	71,58	71,21	71,21	71,21	114,79	114,80	113,94	98,89	98,21	DP3AP2KB
5	Prevalensi Stunting	Indeks	-	20	18	16	14	-	20	17,8	19,8	16,4	-	100,00	101,11	76,25	82,86	Dinkes
Tujuan II: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas																		
6	Tingkat kemiskinan	%	5,54	5,41	5,27	5,52	5,41	5,65	6,16	5,66	5,44	5,19	98,01	86,14	92,60	101,45	104,07	BPS
7	Tingkat pengangguran	%	5,9	5,83	5,8	6,05	5,81	6,68	6,47	5,16	4,84	4,87	86,78	89,02	111,03	120,00	116,18	BPS
8	Pertumbuhan PDRB sektor industri	%	-	-	-	2,85	2,93	-3,21	2,66	2,13	2,72	2,99	-	-	-	95,44	102,05	BPS/ Nakerperin
9	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	-	-	-	4,03	4,28	-1	3,58	5,55	4,66	4,49	-	-	-	115,63	104,91	BPS/ Kop dan UKM
10	Nilai Realisasi Investasi	Miliar Rupiah	74,4	200,9	203,8	220	225	178,4	417,24	199,70	493,81	658,63	239,78	207,69	97,99	224,46	292,72	BPS/ DPMPTSP
Tujuan III: Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel																		
11	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Nilai	A	A	A	BB(78)	A (80)	BB	BB	BB	BB(75,25)	76,01	91,24	91,83	93,20	96,47	95,01	Bag Organisasi
12	Indeks SPBE	Indeks	2,7	2,8	3	2,5	2,7	2,89	2,42	3,02	3,17	3,75	107,04	86,43	100,67	126,80	138,89	Kominfo
13	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	-	-	-	88,41	88,5	-	-	-	89,65	88,37	-	-	-	101,40	99,85	Bag Organisasi
14	Indek Pengelolaan Keuangan Daerah	Scor	-	-	-	75	76	-	-	-	77,43	71,76	-	-	-	103,24	94,42	Bappeda / BKD
Tujuan IV: Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan																		
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	57,5	57,75	58	58	58,26	58,3	58,58	64,09	59,5	58,51	101,39	101,44	110,50	102,59	100,43	DLH

No	TUJUAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
16	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	79,5	79,8	80,1	80,23	80,36	79,58	79,97	80,06	80,24	80,36	100,10	100,21	99,95	100,01	100,00	DPUPR
17	Perentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan	%	69,84	71,39	71,98	73,09	74,2	69,84	70,87	71,61	71,98	71,98	100,00	99,27	99,49	98,48	97,01	DPUPR
18	Persentase Panjang Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap	%	75,9	75,56	77,31	84,88	85,76	75,9	83,12	84,06	85,01	85,82	100,00	110,01	108,73	100,15	100,07	DPUPR
Tujuan V: Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Berkarakter dan Berbudaya																		
19	Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya	%	100	100	100	100	100	100	81,82	100	100	100	100,00	81,82	100,00	100,00	100,00	DisParpورا
20	Persentase Sekolah dengan Pendidikan Karakter Berkategori Baik	%	47,62	47,62	51,6	70,25	52	75,49	75,49	90	56,44	56,44	158,53	158,53	174,42	80,34	108,54	DisDik

Sumber: data diolah oleh Bappeda

Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah periode transisi RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 terdapat 20 indikator, di mana sebagian indikator juga dipakai pada dokumen RPJMD Perubahan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, sehingga ada beberapa indikator yang tidak tersedia data target dan capaian pada tahun 2020 – 2022. Sampai tahun 2024, capaian indikator kinerja utama yang masih di bawah target adalah: rata-rata lama sekolah, indeks pemberdayaan gender, prevalensi Stunting, Nilai Evaluasi AKIP Kota, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan. Untuk rata-rata lama sekolah ditetapkan target 11,26 pada tahun 2024, dan dapat dicapai 10,89 tahun, dengan kata lain masih pada tingkat yang diharapkan yaitu rata-rata lama sekolah mendekati 11 tahun atau setara kelas 11 Sekolah Menengah Atas/ sederajat.

Untuk IPKD, pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi dimana IPKD berada pada 71,76 dimana pada tahun 2023 sebesar 77,43. Selain itu capaian ini juga masih lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, hal ini

terjadi dikarenakan kebijakan pusat yang berdampak kepada dokumen penganggaran, sehingga terdapat perbedaan antara perencanaan dengan penganggaran.

3) INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah, Aspek Kesejahteraan Masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial yang meliputi indikator kesejahteraan, pemerataan Ekonomi, dan kesejahteraan Sosial, Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meliputi indikator kinerja dalam penyelenggaraan Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, Tabel 2.69 di bawah ditampilkan capaian kinerja indikator kinerja daerah (IKD), yang diuraikan dalam dokumen RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026.

Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Payakumbuh Tahun 2020- 2024

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																	
1	Laju Inflasi	%	3,91	3,38	2,85	1,7	1,94	2,12	1,69	0,94	1,88	1,68	145,78	150,00	167,02	90,43	113,40	BPS
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,79	10,85	10,9	11,14	11,26	10,73	10,81	10,82	10,88	10,89	99,44	99,63	99,27	97,67	96,71	Disdik
3	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,58	14,67	14,29	14,29	14,3	14,26	14,27	14,29	14,3	14,5	97,81	97,27	100,00	100,07	101,40	Disdik
4	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,9	74,3	74,5	74,18	74,32	73,74	73,84	74,14	74,77	75,08	99,78	99,38	99,52	100,80	101,02	BPS
	ASPEK PELAYANAN UMUM																	
	LAYANAN URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR																	
	URUSAN PENDIDIKAN																	
	Angka Partisipasi Kasar																	
5	APK PAUD	%	75,9	76,1	76,3	65	67	76,28	44,63	77,53	94,09	61,09	100,50	58,65	101,61	144,75	91,18	Disdik
6	APK SD/MI/Paket A	%	127,5	130,1	132,75	112	114	99,67	110,14	109,04	110,6	107,82	78,17	84,66	82,14	98,75	94,58	Disdik

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
7	APK SMP/MTs/Paket B	%	160,08	161,15	162,1	94	97	78,98	92,03	98,79	89,5	97,12	49,34	57,11	60,94	95,21	100,12	Disdik
Angka Partisipasi Murni																		
8	APM SD/MI/ Paket A	%	110,5	112,05	113,8	100	100	110,52	99,97	98,18	98,8	97,52	100,02	89,22	86,27	98,80	97,52	Disdik
9	APM SMP/MTs/ Paket B	%	121,3	122,1	124,15	80	82	93,74	78,93	78,97	80,01	80,55	77,28	64,64	63,61	100,01	98,23	Disdik
10	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	%	47,62	47,62	51,06	51,06	52	75,49	75,49	90	56,44	57,86	158,53	158,53	176,26	110,54	111,27	Disdik
11	Persentase satuan pendidikan (SD/SMP) yang terakreditasi A	%	77	80	82	73,26	74,26	75	74	76	76	76	97,40	92,50	92,68	103,74	102,34	Disdik
URUSAN KESEHATAN																		
12	Indek Keluarga Sehat	%	-	-	-	0,4	0,5	-	-	-	0,34	0,35	-	-	-	85,00	70,00	Dinkes
13	Prevalensi stunting pada balita	%	-	20	18	16	14	-	20	17,8	19,8	16,3	-	100,00	101,11	76,25	83,57	Dinkes
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
14	Persentase rumah yg terlayani air minum perpipaan	%	-	-	-	100	100	-	-	-	89,26	91	-	-	-	89,26	91,00	DPUPR
15	Persentase Pelayanan Air Minum	%	99,02	99,67	100	100	100	96,84	99,76	99,21	99,81	100	97,80	100,09	99,21	99,81	100,00	DPUPR
16	Persentase irigasi dengan berkinerja baik	%	-	-	-	92,04	93,31	-	-	-	94,08	94,5	-	-	-	102,22	101,28	DPUPR
17	Persentase irigasi dengan kondisi baik	%	87,62	86,4	89,49	90	91	82,08	84,4	89,5	89,69	93,31	93,68	97,69	100,01	99,66	102,54	DPUPR
18	Persentase Penataan sungai	%	23,52	24,81	26,37	27,91	29,45	23,52	24,83	26,74	27,95	28,21	100,00	100,08	101,40	100,14	95,79	DPUPR
19	Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap	%	75,9	75,56	77,31	84,88	85,76	75,9	83,12	84,08	85,01	85,82	100,00	110,01	108,76	100,15	100,07	DPUPR
20	Persentase jalan kota yang memiliki drainase	%	-	-	-	65	66,44	-	-	-	66,97	68,97	-	-	-	103,03	103,81	DPUPR

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
21	Persentase Sistem drainase Skala Kota	%	60,39	62,91	64,4	67,26	70,12	59,7	61,54	63,64	67,28	68,97	98,86	97,82	98,82	100,03	98,36	DPUPR
22	Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	%	34,07	35,05	36,18	37,3	38,27	34,07	35,33	36,02	34,02	38,27	100,00	100,80	99,56	91,21	100,00	DPUPR
23	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	%	69,84	71,39	71,98	73,09	74,2	69,84	70,87	71,61	71,98	71,98	100,00	99,27	99,49	98,48	97,01	DPUPR
24	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	-	-	-	80,23	80,36	-	-	-	80,24	80,36	-	-	-	100,01	100,00	DPUPR
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
25	Persentase Rumah Layak Huni	%	94,87	95,92	96,98	96,95	97,27	95,26	95,85	95,95	97,04	97,3	100,41	99,93	98,94	100,09	100,03	DPKP
26	Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman	%	-	-	-	22,55	23,98	-	-	-	21,73	22,87	-	-	-	96,36	95,37	DPKP
27	Persentase penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Daerah	%	3,92	5,88	7,84	19,75	22,93	14,7	20,59	26,47	21,02	24,2	375,00	350,17	337,63	106,43	105,54	DPKP
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
28	Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum	%	-	-	-	25	25	-	-	-	-	28,5	-	-	-	-	114,00	SatPol PP&PK
29	Persentase penyelesaian gangguan Trantibum	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	SatPol PP&PK
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT: PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
30	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yg siap menghadapi bencana	%	74,47	74,47	100	100	100	18,36	14,89	100	100	100	24,6542	19,9946	100	100	100	BPBD

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
31	Persentase kejadian bencana yg bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
32	Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana	%	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	BPBD
33	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	BPBD
34	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	BPBD
35	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	BPBD
URUSAN SOSIAL																		
36	Tingkat Kemiskinan	%	5,54	5,41	5,27	5,52	5,41	5,65	6,16	5,66	5,44	5,19	98,01	86,14	92,60	101,45	104,07	DinSos
37	Persentase PPKS yang terlayani	%	-	-	-	80	85	-	-	-	94	100	-	-	-	117,50	117,65	DinSos
LAYANAN URUSAN WAJIB TERKAIT NON PELAYANAN DASAR																		
URUSAN KETENAGAKERJAAN																		
38	Tingkat Pengangguran	%	5,9	5,83	5,8	6,05	5,81	6,68	6,47	5,16	4,84	4,87	86,78	89,02	111,03	120,00	116,18	Dis Nakerperin
39	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	-	-	-	93,75	93,75	-	-	-	95,16	95,13	-	-	-	101,50	101,47	Dis Nakerperin
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
40	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Nilai	98,55	98,56	98,57	98,5	98,52	98,51	98,51	98,57	98,61	98,93	99,96	99,95	100,00	100,11	100,42	DP3AP2KB
41	Tingkat Kategori Capaian Anugerah	kategori	Utama	Utama	Utama	utama	utama	-	Utama	utama	Nindya	Nindya	-	100	100	80	80	DP3AP2KB

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Parahita Ekapraya (APE)																	
42	Tingkat Kategori Capaian Kota Layak Anak (KLA)	kategori	-	Madya	-	madya	madya	-	Madya	-	Madya	Madya	-	100	-	100	100	DP3AP2KB
URUSAN PANGAN																		
43	Ketersediaan pangan utama	ton	-	-	-	19735	19745	-	-	-	27544	19780	-	-	-	139,57	100,18	Distapang
44	Skor PPH Konsumsi	skor	83	84	85	85,1	85,2	83,07	84,2	85,09	87,3	87,7	100,08	100,24	100,11	102,59	102,93	Distapang
45	Tingkat Keamanan Pangan	indeks	tinggi	tinggi	Tinggi	tinggi	sedang	tinggi	Tinggi	tinggi	Tinggi	tinggi	100	100	100	100	100	Distapang
46	Stabilisasi harga																	
	a, Beras	%	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	1,53	1,78	2,95	3,93	1,63	100	100	100	100	100	Distapang
	b, Cabe	%	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	16,76	18,85	32,74	18,68	20,69	100	100	100	100	100	Distapang
	c, Bawang	%	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	12,08	11,08	16,64	15,87	13,4	100	100	100	100	100	Distapang
47	Indek Ketahanan Pangan	indeks	-	-	-	84	84,1	-	-	-	88,56	89,33	-	-	-	105,43	106,22	Distapang
48	Persentase cadangan pangan pemerintah	%	-	-	-	63	64	-	-	-	69,94	145,66	-	-	-	111,02	227,59	Distapang
URUSAN PERTANAHAN																		
49	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	%	15,56	16,4	17,46	18,52	20,63	15,56	16,83	19,47	37,66	39,83	100,00	102,62	111,51	203,35	193,07	DPUPR
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP																		
50	Persentase RTH Publik	%	16,5	16,75	17	14,88	14,89	14,87	14,87	14,32	14,88	14,87	90,12	88,78	84,24	100,00	99,87	DLH
51	Indeks Kualitas Air	Nilai	75	75	75	41	41	66	41	55,14	44,21	45,26	88,00	54,67	73,52	107,83	110,39	DLH
52	Indeks Kualitas udara	Nilai	80	80	80	92	92	92,94	92,66	93,11	90,92	87,59	116,18	115,83	116,39	98,83	95,21	DLH
53	Indeks Kualitas lahan	Nilai	-	-	-	25,5	25,55	-	-	-	27,63	27,5	-	-	-	108,35	107,63	DLH
54	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	-	-	-	95,5	95,75	-	-	-	97	96,4	-	-	-	101,57	100,68	DLH
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
55	Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	nilai	-	-	-	93,1	93,2	-	-	-	96,25	96,31	-	-	-	103,38	103,34	Disduk Capil
56	Persentase penduduk yg memiliki dokumen kependudukan	%	90,77	91	86,25	98,5	98,55	100	98,13	100	99,52	99,5	110,17	107,84	115,94	101,04	100,96	Disduk Capil
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
57	Cakupan Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	%	83	85	87	85	85	83	-	85	85	85	100,00	-	97,70	100,00	100,00	DP3AP2KB
URUSAN PERHUBUNGAN																		
58	Nilai survey IKM Pelayanan transportasi	angka	100	100	100	85	87	88,36	88,58	88,72	88,33	90,66	88,36	88,58	88,72	103,92	104,21	DisHub
59	Persentase Penurunan titik rawan kecelakaan	%	-	-	-	82	84	-	-	-	78,46	77,49	-	-	-	104,51	108,40	DisHub
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
60	Indeks SPBE	nilai	2,7	2,8	3	2,5	2,7	2,89	2,42	3,02	3,17	3,75	107,04	86,43	100,67	126,80	138,89	Diskominfo
61	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarkan informasi melalui media	%	-	-	-	75	80	-	-	-	100	81	-	-	-	133,33	101,25	Diskominfo
62	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00	Diskominfo
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
63	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	-	-	-	25	25,69	-	-	-	72,31	36,36	-	-	-	289,24	141,53	Diskop UKM
64	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	-	-	-	14,53	14,96	-	-	-	23	62,74	-	-	-	158,29	419,39	Diskop UKM

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	URUSAN PENANAMAN MODAL																	
65	Nilai Realisasi Investasi	(Milyar Rupiah)	74,4	200,9	203,8	220	225	178,4	417,24	199,7	493,81	658,63	239,78	207,69	97,99	224,46	292,72	DPMPTSP
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
66	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional	Orang	15	18	20	2	2	-	-	-	61	51	-	-	-	3050	2550	Disparpora
	URUSAN STATISTIK																	
67	Persentase kepuasan pengguna data statistik	%	85	90	90	80	85	87,52	87,5	87,72	91	85	102,96	97,22	97,47	113,75	100	Diskominfo
	URUSAN PERSANDIAN																	
68	Persentase penanganan cyber attack	%	80	85	90	85	85	80	100	100	1965	85	100,00	117,65	111,11	2311,76	100,00	Diskominfo
69	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	-	-	-	85	85	-	-	-	100	85	-	-	-	117,65	100,00	Diskominfo
	URUSAN KEBUDAYAAN																	
70	Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	Disparpora
71	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	100	100	Disparpora
	URUSAN PERPUSTAKAAN																	
72	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	-	-	-	28,3	28,6	-	-	-	77,43	72,15	-	-	-	273,60	252,27	DPK
	URUSAN KEARSIPAN																	
73	Indek Pengawasan Kearsipan	nilai	-	-	-	33	34	-	-	-	73,05	73,81	-	-	-	221,36	217,09	DPK
	LAYANAN URUSAN PILIHAN																	
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
74	Produksi Ikan Konsumsi	ton	540	550	650	560	560	540,27	551,87	566,51	571,09	565,4	100,05	100,34	87,16	101,98	100,96	DisTan

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					OPD	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	URUSAN PARIWISATA																		
75	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%				1	1				3,85	79,91				385,00	7991,00	Disparpora	
76	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten / kota	%				11	11				99,79	4,14				553,55	37,64	Disparpora	
77	Tingkat Hunian Akomodasi	%				18	20									341,76	57,75	Disparpora	
78	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%				0,45	0,5				0,46	0,56				100,00	2,00	Disparpora	
	URUSAN PERTANIAN																		
79	Produksi padi	ton	40,517	41,000	41,200	41,200	41,225	43,038	43,905	42,927	46,027	41,609,46	106,22	107,09	104,19	111,72	100,93	DisTan	
80	Populasi sapi	ekor	5,962	5,992	6,025	5,400	5,427	5,965	5,995	4,182	2,919	2,951	100,05	100,05	69,41	54,06	54,38	DisTan	
	URUSAN PERDAGANGAN																		
81	Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	%	24,07	24,12	24,17	25,13	25,23	24,53	24,12	24,01	25,13	25,1	101,91	100,00	99,34	100,00	99,48	Diskop UKM	
	URUSAN PERINDUSTRIAN																		
82	Persentase peningkatan nilai produksi	%	2	2,5	3	3	3,25	-13,8	15,3	15,3	5,63	3,3	-690,00	612,00	510,00	187,67	101,54	Diskop UKM	
	FUNGSI PENDUKUNG																		
	SEKRETARIAT DAERAH																		
83	Nilai LPPD	nilai	-	3,1500	3,1600	3,1700	3,1800	-	2,66	3,3922	3,078	-	-	84,44	107,35	97,12	-	Setdako	
84	Nilai IKM	nilai	80,75	81,35	81,85	88,41	88,5	86,48	87,3	87,66	89,65	88,37	107,10	107,31	107,10	101,26	99,85	Setdako	
85	Indeks Reformasi Hukum	indeks	-	-	-	72	73	-	-	-	67,48	87	-	-	-	93,72	119,18	Setdako	

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
86	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	indeks	-	-	-	75	76	-	-	-	83,26	91,58	-	-	-	111,01	120,50	Setdako
SEKRETARIAT DPRD																		
87	Nilai IKM	nilai	-	-	-	84	84	-	-	-	84,85	84,85	-	-	-	101,01	101,01	Setwan
88	Persentase Ranperda yang ditetapkan	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00	Setwan
FUNGSI PENUNJANG																		
PERENCANAAN																		
89	Indek Kualitas Perencanaan	%	-	-	-	90	90,5	-	-	-	90	90,5	-	-	-	100	100	Bappeda
KEUANGAN																		
90	IPKD	scor	-	-	-	75	75	-	-	-	77,4326	71,75	-	-	-	103,24	95,67	BKD
91	Opini laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKD
KEPEGAWAIAN																		
92	Indeks Profesionalitas ASN	%	-	-	-	60,79	60,82	-	-	-	65,29	78,22	-	-	-	107,40	128,61	BKPSDM
93	Indek Merit Sistem	%	-	-	-	0,82	0,84	-	-	-	0,62	0,63	-	-	-	75,61	75,00	BKPSDM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
94	Kategori tingkat Inovasi Daerah	Kategori	-	-	-	inovatif	inovatif	-	-	-	inovatif	inovatif	-	-	-	100,00	100	Bappeda
PENGAWASAN																		
INSPEKTORAT																		
95	Nilai Indeks RB pada area pengawasan	indeks	3,5	3,65	3,7	65	66	3,85	5,18	-	-	-	110,00	141,92	-	-	-	Inspektora t
96	Persentase Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	Inspektora t
97	Nilai AKIP Kota Komponen Evaluasi internal	nilai	-	-	-	7,11	7,12	7,09	7,14	17,85	18,08	18,18	-	-	-	254	255	Inspektora t
KEWILAYAHAN																		

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					OPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
98	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yg aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
99	Persentase penanganan konflik sosial yg terjadi di tengah masyarakat	%	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100	95	100	100	100	100	Kesbangpo 1
100	Persentase parpol dan ormas yang aktif	%	90,64	90,64	90,64	90,64	90,64	86,27	90,2	90,9	90,72	91,78	95	100	100	100	101,26	Kesbangpo 1
ASPEK DAYA SAING DAERAH																		
101	Produktivitas Total Daerah	Rp, Milyar	95,84	101,23	106,93	96,84	97,2	95,84	98,12	199,9	115,3	120,97	100,00	96,93	186,94	119,06	124,45	BPS
102	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp, Ribu	2.060,03	2.165,69	2.271,42	1.768,06	1.908,02	1.964,89	1.990,31	1.576,52	15.790,30	16.350,03	95,38	91,90	69,41	893,09	856,91	BPS
103	Rasio Ketergantungan	%	54,42	54,43	54,44	45,64	44,46	48	48	48	47,94	47,94	111,80	111,81	111,83	94,96	92,17	BPS

Sumber: data diolah Bappeda dari berbagai sumber

Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berpedoman pada dokumen RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, sehingga ada beberapa indikator yang tidak tersedia datanya tahun 2020-2022, sedangkan khusus Nilai Indeks RB pada area pengawasan, sejak tahun 2022 ada lagi.

F. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Ini merupakan hak seluruh individu dan pemerintah wajib menjamin pemenuhannya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan hal tersebut, bahkan menjadikan SPM sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas anggaran daerah. Peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan penerapan SPM sudah diundangkan. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM; Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM; sampai dengan peraturan terkait standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM dari seluruh Kementerian Pengampu SPM, seperti Permenkes Nomor 4 Tahun 2019; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018; Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018; Permensos Nomor 9 Tahun 2018; Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 dan Nomor 121 Tahun 2018.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Di dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, SPM telah dijadikan acuan dan disinkronkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. SPM merupakan salah satu kebijakan yang turut dievaluasi, karena ini merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam perencanaan di tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan terhadap capaian tahun 2020-2024.

Tabel 2.70 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020 sd 2024

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI				
				2020	2021	2022	2023	2024
A	PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Orang	2.620	3.836	3.836	4.974	4.325
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD, SMP, MTs)	Orang	24.591	23.738	23.738	15.735	15.735
3	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah warganegara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesenjangan	Orang	183	462	462	183	183

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUA N	REALISASI				
				2020	2021	2022	2023	2024
B	Kesehatan							
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	92,78	87,57	87,57	100	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	90,12	83,17	83,17	100	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	%	90,12	89,12	89,12	100	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	78,26	78,44	78,44	100	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	82,00	83,62	83,62	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	65,47	91,39	91,39	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	%	82,35	58,22	58,22	100	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	80,15	80,65	80,65	100	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	89,34	105,89	105,89	100	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	-	98,31	98,31	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	38,79	67,69	67,69	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV (<i>Human Immunodeficiency virus</i>) mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	74,35	76,62	76,62	100	100
C	Pekerjaan Umum							
1	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	95,98	97,52	97,52	98,91	100
2	Penyediaan kebutuhan pokok	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan	%	96,84	91,78	91,78	100	100

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI				
				2020	2021	2022	2023	2024
	air minum sehari-hari	pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi						
D	PERUMAHAN							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	orang	-	-	-	-	-
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	orang	-	8	-	-	-
E	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan informasi rawan bencana	%	15,09	33,23	49,26	100	100
3	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	0,09	74,47	100	100	100
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
F	Sosial							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	37,39	100,27	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	92,30	123,08	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	131,84	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	133,33	100	100	100

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI				
				2020	2021	2022	2023	2024
	pengemis di luar panti							
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	39,47	100	100	100	100

Sumber: Laporan SPM Tahun 2020 - 2024

Capaian pelayanan SPM Kota Payakumbuh sejak tahun 2020 cukup baik, selalu menunjukkan kecenderungan meningkat, bahkan sebagian besar sudah mencapai angka maksimal 100%. Namun masih terdapat indikator yang belum mencapai 100%, seperti layanan pengolahan air limbah domestik yang baru mencapai angka 98,91%, artinya masih ada layanan air limbah domestik berupa septik tank yang belum layak sebesar 1,09%. Ini sudah menjadi target pemerintah daerah dalam menuntaskan layanan air limbah yang layak. Sedangkan pada sisi lain, Pemerintah Kota Payakumbuh tidak hanya berupaya untuk sekedar berstatus layak saja, namun yang utama adalah status “aman” dan saat ini kondisinya baru sekitar 15% saja. Pemerintah daerah dalam pencapaian SPM tetap perlu mempertahankan kondisi capaian yang sudah ada, sehingga pengalokasian program/kegiatan serta pendanaan tetap harus diprioritaskan, karena ini berkaitan pelayanan dasar kepada masyarakat.

G. KERJA SAMA DAERAH

Kerja sama daerah adalah bentuk kerja sama Pemerintah Kota Payakumbuh dengan daerah lain atau pihak lain sebagai upaya untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan daerah. Di tatanan pemerintah kota, koordinasi kerja sama daerah dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan. Tujuan kerja sama daerah ini antara lain:

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, melalui kerja sama, daerah dapat mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Efisiensi Pelayanan Publik, kerja sama antar daerah atau dengan pihak lain dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif.
3. Penyelarasan Pembangunan, kerja sama dapat membantu menyelaraskan pembangunan antar daerah, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
4. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah, kerja sama dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai bentuk kerja sama ekonomi dan perdagangan.

Bentuk-bentuk kerja sama Daerah:

1. Kerja sama antar daerah, terjadi antara dua daerah atau lebih untuk mengelola urusan pemerintahan yang memiliki dampak lintas daerah atau untuk menyediakan layanan publik yang lebih efisien jika dilakukan bersama. Berikut kerja sama Pemerintah Kota Payakumbuh dengan pemerintah daerah lain:

Tabel 2.71 Bentuk Kerjasama Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Lain Tahun 2021-2024

TAHUN	DAERAH KERJA SAMA	BENTUK KERJA SAMA
2021	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Sumatera Barat	Kerja Sama Antar Daerah
	Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Kerja Sama Antar Daerah
2023	Provinsi Sumatera Barat Dengan Pemerintah Kota Solok	Kerja Sama Antar Daerah
2024	Pemerintah Kota Sawahlunto	Kerja Sama Antar Daerah
	Pemerintah Kabupaten Muko-Muko	Kerja Sama Antar Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kelautan Dan Perikanan
		Kerja Sama Antar Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pangan
	Pemerintah Kota Bengkulu	Pengembangan Potensi Daerah Dan Peningkatan Pelayanan Publik

Sumber: Bagian Pemerintahan Setdako, 2025

2. Kerja sama dengan pihak ketiga, melibatkan daerah dengan pihak ketiga, seperti individu, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan. Berikut daftar kerja sama Pemerintah Kota dengan pihak ketiga tahun 2021-2025.

Tabel 2.72 Daftar Kerjasama dengan Pihak ketiga Kota Payakumbuh Tahun 2021 s.d 2025

TAHUN	PIHAK KETIGA	BENTUK KERJA SAMA
2021	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Payakumbuh	Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
	Koperasi Sentra Rendang Payo	Kerja sama Produksi Rendang di Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh
	PT Bank Nagari	Pengembangan Digitalisasi Ekonomi Daerah
2022	Koperasi Sentra Rendang Payo	Kerja sama Produksi Rendang di Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh

TAHUN	PIHAK KETIGA	BENTUK KERJA SAMA
	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Payakumbuh	Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Sosial
	Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Payakumbuh
	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat	Sinergi Pemanfaatan Bersama Data Dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Public Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Kota Payakumbuh
	Badan Informasi Geospasial	Penyelenggaraan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Geospasial Di Kota Payakumbuh
	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penyediaan Dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan Dalam Mendukung Program Smart City Kota Payakumbuh
	PT. Semen Padang	Kerja sama Dalam Pembangunan Daerah
	Universitas Bung Hatta	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
	Universitas Negeri Padang	Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
	Universitas Andalas	Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
	Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh	Kerja Sama Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pemerintahan Serta Pengembangan Sumber Daya
	STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh	Kerja Sama Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pemerintahan Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Program Kegiatan Pemerintahan
2023	Badan Informasi Geospasial	Penyelenggaraan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Geospasial Di Kota Payakumbuh
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Kerja sama Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Di Daera, Pembinaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Serta Penyelenggraan Kekayaan Intelektual
	Kejaksaan Negeri Payakumbuh	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
2024	Institut Teknologi Dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi	Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Universitas Andalas	Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

TAHUN	PIHAK KETIGA	BENTUK KERJA SAMA
	PT Ruang Raya Indonesia (Ruang Guru)	Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Teknologi Di Kota Payakumbuh
2025	Badan Layanan Umum Daerah UPTD BKom Dan Pelatihan Terintegrasi Atau Peningkatan Kompetensi	Peningkatan Kompetensi SDM BLUD
	APEKSI	Kerja sama antar daerah

Sumber: Bagian Pemerintahan Setdako, 2025

3. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, kerjasama ini memperluas cakupan kerjasama daerah. Untuk saat ini, Pemerintah Kota Payakumbuh belum pernah melakukan kerjasama dengan pemerintah luar negeri.

H. RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH APBN DAN/ ATAU PROVINSI DI KABUPATEN/ KOTA

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh, Pemerintah daerah mengupayakan untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Pemerintah Kota Payakumbuh terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas infrastruktur di Kota Payakumbuh guna mendukung pertumbuhan ekonomi, memperluas akses pelayanan dasar, dan mewujudkan pembangunan yang merata. Melalui dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Payakumbuh telah dilaksanakan, diantaranya:

1. Pembangunan infrastruktur normalisasi batang agam yang telah dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Kementerian Pekerjaan Umum dari tahun 2016 hingga tahun 2025 dengan total biaya mencapai lebih dari Rp.270 milyar,
2. Peningkatan jalan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) pada tahun 2023 dengan total nilai sebesar Rp.13,88 milyar,
3. Rehabilitasi prasarana air baku batang agam yang dilaksanakan oleh BWS Sumatera V Kementerian PU dengan nilai kontrak Rp.3,8 milyar,
4. Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan baik jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat maupun jalan provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi,
5. Pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi.

Keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh untuk kedepannya Pemerintah Kota Payakumbuh tetap mengupayakan keberlanjutan kerjasama dengan Pemerintah Pusat ataupun pemerintah provinsi dengan harapan kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dapat tersedia dengan optimal. Usulan

pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh untuk tahun 2025 – 2029 diantaranya:

Tabel 2.73 Usulan Pembangunan Infrastruktur

NO	USULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	LOKASI	RENCANA TAHUN PELAKSANAAN	SUMBER PENDANAAN
1	Penanganan kawasan rawan banjir/ genangan berupa pembangunan Drainase pada jalan Nasional/ Provinsi	Jl. Diponegoro, Jl Ahmad dahlan, Jl Soekarno Hatta, Jl Sudirman (Jalan Nasional) Jl. Singa harau, Jl. Khatib sulaiman, Jl. Panglima polim, Jl. Gajah Mada, Jl. M. Yamin (Jalan provinsi)	2025 - 2029	APBN/ APBD Provinsi
2	Penataan sungai berupa normalisasi dan pembangunan perkuatan tebing sungai	Sungai Batang Agam, Sungai Batang Pulau, Sungai Batang Sikali, Sungai Batang Lampasi	2025 - 2029	APBN/ APBD Provinsi
3	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	DI Batang agam, DI Sei Dareh, DI Batang Talawi, DI Batang Tabik, DI Batang lampasi	2025 - 2029	APBD Provinsi
4	Peningkatan kondisi jalan mantap	Jl. Diponegoro, Jl Ahmad dahlan, Jl Soekarno Hatta, Jl Sudirman (Jalan Nasional) Jl. Singa harau, Jl. Khatib sulaiman, Jl. Panglima polim, Jl. Gajah Mada, Jl. M. Yamin (Jalan provinsi)	2025 - 2029	APBN/ APBD Provinsi

Sumber: DpuPR, 2025

I. BUMD YANG MENDUKUNG KINERJA PELAYANAN PEMDA

BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda, satu-satunya adalah Sumber Air PAMTIGO. Saat ini PAMTIGO mengandalkan 5 sumber air baku dengan total kapasitas produksi sebesar **320 liter/detik**, sementara kebutuhan riil mencapai **470 liter/detik**. Artinya, terdapat **defisit debit sekitar 150 liter/detik**. Kelima sumber air baku ini dibangun dari tahun 1975 (awal pembangunan PDAM) dan terakhir tahun 2018. WTP Batang Agam ditargetkan untuk ditingkatkan kapasitasnya hingga **100 liter/dt** dengan operasi penuh 24 jam, berikut rincian kelima sumber air baku:

Tabel 2.74 Sumber Air Baku PAMTIGO Kota Payakumbuh

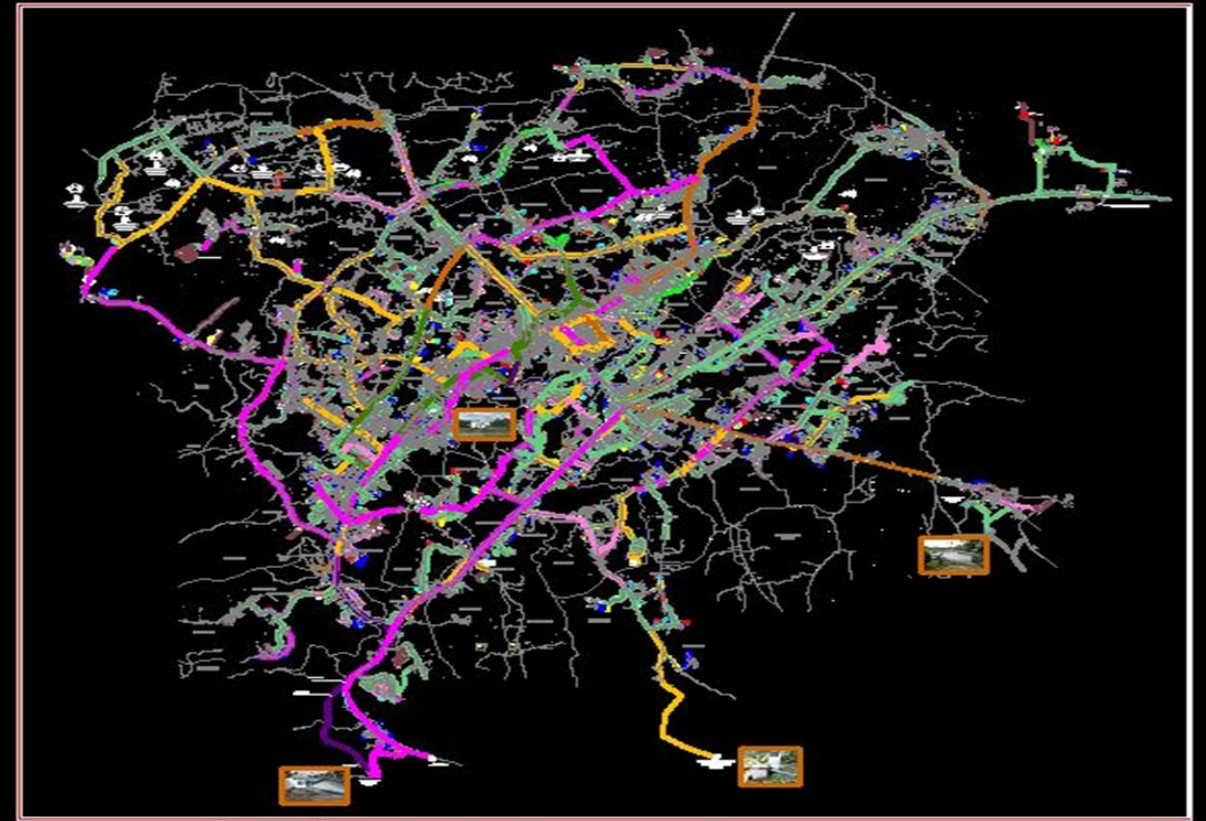
NO	SUMBER AIR	KAPASITAS PRODUKSI	LOKASI	TAHUN DIBANGUN	SISTEM
1	Batang Tabik	961/dt	Kab. Lima Puluh Kota	1974	Gravitasi
2	Sungai Dareh Situjuah	2021/dt	Kab. Lima Puluh Kota	1996	Gravitasi

NO	SUMBER AIR	KAPASITAS PRODUKSI	LOKASI	TAHUN DIBANGUN	SISTEM
3	Sikamaruncing	101/dt	Kab. Lima Puluh Kota	2000	Grativitasi
4	Balai Panjang	51/dt	Kab. Lima Puluh Kota	2017	Grativitasi
5	WTP Batang Agam	171/dt	Kota Payakumbuh	2018	Perpompaan

Sumber: Bagian Perekonomian Setdako, 2025

1. Permasalahan teknis dan Non Teknis Sumber Air Masing-masing sumber air memiliki tantangan:
 - a) Batang Tabik menghadapi dinamika sosial-politik setiap masa perpanjangan perjanjian sewa (5 tahunan).
 - b) Ketiadaan SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air): Dari lima sumber, hanya WTP Batang Agam yang telah memiliki izin resmi. Empat lainnya masih dalam proses yang telah berlangsung lebih dari dua tahun dan terhambat oleh perbedaan interpretasi antar instansi atas Permen PUPR No. 3 Tahun 2023 dan Permen PUPR No. 1 Tahun 2024.
 - c) Ketergantungan terhadap pihak ketiga: Beberapa sumber masih berada di lahan milik pribadi, sehingga rawan tekanan non-teknis seperti intervensi dalam pengangkatan tenaga kerja atau penyesuaian kontribusi lahan.
2. Jaringan Perpipaan. Secara umum seluruh wilayah di kota Payakumbuh sudah terjangkau oleh perpipaan, dimana layanan saat ini masih interkoneksi. Data perpipaan yang terpasang saat ini sebagai berikut:

Gambar 2.18 Peta Jaringan Pamtigo



Sumber: Bagian Perekonomian Setdako, 2025

Tantangan yang dihadapi saat ini adalah belum ada pemisahan jaringan pipa antar sumber dan belum terbentuknya zona pelayanan, sehingga menyebabkan rendahnya tekanan air di beberapa wilayah pelayanan. Di samping itu tingginya angka kehilangan air dimana pada tahun 2024 sebesar 37,80%.

Tabel 2.75 Data perpipaian yang terpasang di Kota Payakumbuh

NO	NAMA SUMBER	TOTAL PANJANG (Meter)	SISTEM PENGALIRAN AIR
1	Batang Tabik	112.879	Gravitasi
2	Sungai Dareh I	112.879	Gravitasi
3	Sungai Dareh II	112.879	Gravitasi
4	Sungai Dareh III	1.395	Kombinasi
5	Sungai Dareh IV	3.030	Kombinasi
6	Sikamuruncing	6.252	Gravitasi
7	WTP Batang Agam	2.704	Pompa
8	Balai Panjang	112.879	Kombinasi

Sumber: Bagian Perekonomian Setdako, 2025

3. Pertumbuhan Pelanggan, Cakupan Pelayanan serta Tingkat kehilangan Air. Secara umum pertumbuhan pelanggan cakupan pelayan, serta tingkat kehilangan air selama 5 tahun dapat dilihat dalam tabel 2.76

Tabel 2.76 Data jumlah pelanggan, cakupan pelanggan dan tingkat kehilangan air Pamtigo Kota Payakumbuh tahun 2020-2024

TAHUN	JUMLAH PELANGGAN	CAKUPAN PELAYANAN	TINGKAT KEHILANGAN AIR
2020	31.883 SR	93,23%	30,49%
2021	32.620 SR	94,36%	33,11%
2022	33.993 SR	95,30%	35,75%
2023	34.499 SR	75,98%	36,91%
2024	33.847 SR	74,69%	37,80%

Sumber: Bagian Perekonomian Setdako, 2025

4. Keuangan. Perolehan laba dari tahun 2020 sampai dengan 2024 berfluktuasi dimana perolehan laba bersih terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp.3.003.874.738,- dan untuk tahun 2023 dan 2024 sudah dapat ditingkatkan sehingga posisi laba bersih tahun 2024 menjadi Rp.4.529.268.286,-. Sedangkan neraca perusahaan, aset perusahaan tahun 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp.86.180.451.985,- menjadi Rp.98.106.099.427,- pada tahun 2024.

Tabel 2.77 Data Keuangan Pamtigo Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laba/Rugi					
Pendapatan Usaha	35.694.007.532	35.848.847.480	36.077.139.288	37.250.008.475	38.024.760.944
Beban Usaha	29.732.621.965	30.992.642.207	31.754.047.927	31.558.438.121	32.378.595.771
Laba Usaha	5.961.385.567	4.856.205.273	4.32.091.361	5.691.570.354	5.646.165.173
Laba bersih	4.682.768.830	3.500.613.160	3.003.874.738	4.421.440.240	4.529.268.286
Neraca					
a. Total Aktiva	86.180.451.985	87.983.150.485	88.663.674.368	93.601.652.680	98.106.099.427
b. Total Liabilitas	4.455.238.845	3.424.117.874	4.345.607.848	4.652.205.513	7.849.360.547
c. Total Equitas	81.725.213.140	84.559.032.611	84.318.066.520	88.949.447.167	90.256.738.880
Investasi	4.286.243.314	3.437.527.422	2.772.273.131	3.837.706.371	3.664.363.025

Sumber: Bagian Perekonomian Setdako, 2025

5. Kinerja Pamtigo dinilai berdasarkan Permendagri Nomor 47 tahun 1999 dan Penilaian berdasarkan Kementerian PUPR.

Tabel 2.78 Penilaian Kinerja Menurut Permendagri No. 47 Tahun 1999

NO	NILAI KINERJA		ASPEK	NILAI KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	KLASIFIKASI KINERJA							
	NILAI KINERJA	KINERJA						
	>75	Baik Sekali	Keuangan	30,00	30,00	29,25	30,75	30,75
	>60-75	Baik	Operasional	24,68	22,98	23,83	22,13	22,13
	>45-60	Cukup	Administrasi	12,08	11,67	12,50	12,50	12,50
	>30-45	Kurang						
2	PENILAIAN KINERJA							

NO	NILAI KINERJA			ASPEK	NILAI KINERJA					
					2020	2021	2022	2023	2024	
	ASPEK	JUMLAH		NILAI MAX						
		BOBOT	INDIKATOR							
	Keuangan	45	10	60						
	Operasional	40	10	47						
	Administrasi	15	10	36	Nilai Kinerja	66,76	64,65	65,58	65,38	65,38
		100	30	143	Kinerja	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

Sumber: Bagian Perekonomian Setdako, 2025

Tabel 2.79 Penilaian Kinerja Menurut Dinas PUPR Kota Payakumbuh

NO	NILAI KINERJA			ASPEK	NILAI KINERJA					
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	KLASIFIKASI KINERJA									
	NILAI SKORING		NILAI KINERJA	Keuangan	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	
	>2,8		Sehat	Pelayanan	0,80	0,80	0,80	0,69	0,70	
	>2,2 – 2,8		Kurang Sehat	Operasional	1,02	1,09	1,02	0,94	1,02	
	<2,2		Sakit	SDM	0,51	0,63	0,51	0,63	0,63	
2	PENILAIAN KINERJA									
	ASPEK	JUMLAH		SKORING						
		BOBOT	NILAI MAX							
	Keuangan	0,25	5	1,25						
	Pelayanan	0,25	5	1,25						
	Operasional	0,35	5	1,75						
	SDM	0,15	5	0,75	Nilai Kinerja	3,30	3,50	3,31	3,24	3,32
		1,00	20,00	5,00	Kinerja	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT	SEHAT

Sumber: Bagian Perekonomian Setdako, 2025

Secara umum Penilaian kinerja Pamtigo menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 1999 memperoleh nilai BAIK dari tahun 2020 sampai dengan 2024, sedangkan untuk penilaian menurut Kementerian PUPR adalah SEHAT.

- Perbandingan Realisasi dengan target Rencana Bisnis Tahun 2020-2025

Tabel 2.80 Perbandingan Realisasi dengan Target dan Rencana Bisnis Tahun 2020-2025

KODE	INDIKATOR	2020	2021		2022		2023		2024 (UNAUDIT)		2025
		BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
A1	Cakupan Pelayanan Teknis (0%)	99,53	100	96,47	100	94,90	100	75,98	100	74,69	100
A2	Pertumbuhan Pelanggan	10,38	5,1	-5,13	1,5	3,16	1,5	2,71	1,5	-1,89	1,5
A3	Tingkat Penyelesaian Pengaduan	96,91	97,53	98,75	98,14	96,66	98,76	98,33	99,38	98,03	100
A4	Efisiensi Penagihan	99,96	99,97	98,87	99,98	95,43	99,98	96,23	99,99	99,13	100
A5	Kualitas Air Pelanggan	7,5	26	0	44,5	0	63	41,9	81,5	41,9	100
A6	Konsumsi Air Domestik (m3/bulan)	16,4	19,12	16,1	21,84	15,64	24,56	15,63	27,28	15,49	30
A7	Pemakaian rata-rata Pelanggan Perbulan (/ /org/hari)	109,31	127,45	126,97	145,58	122,98	163,72	156,1	181,86	156,1	200
B1	Efisiensi Produksi	89,41	93,6	80,07	77,35	80,29	87,72	88,16	96,39	89,58	93,99
B3	Air Tak berekening – ATR	24,67	30,41	33,11	27,81	35,75	25,21	36,91	22,6	37,8	20
B4	Jam Operasional Layanan	24	24	21,72	24	21	24	20,5	24	21,1	24
B5	Tekanan Air pada Sambungan Pelanggan (0,7 Atm)	16,64	35,71	27,16	51,78	25,3	67,86	25,16	83,93	23,39	100
C1	Rasio Jumlah Pegawai per 100 Pelanggan	2,463	2,57	3,08	2,678	2,59	2,785	2,7	2,893	2,73	3
C2	Ratio Diklat Pegawai	15,07	28,05	88,35	41,04	38,54	54,03	96,81	67,01	96,81	80
C3	Beban diklat terhadap beban pegawai	3,29	4,63	3,03	5,97	2,8	7,32	3,02	8,66	3,02	10
C4	Nilai kinerja karyawan	-	B	B	B	B	B	B	A	B	A
C5	Nilai Kinerja Perusahaan	BAIK	B	B	B	B	B	B	A	B	A
C6	Tingkat kepuasan Penanganan pengaduan pelanggan	95	96	-	96	-	97	-	97	-	98
C7	Indeks kepuasan pelanggan	75,92	77	-	80	77,46	83		88	87	89

KODE	INDIKATOR	2020	2021		2022		2023		2024 (UNAUDIT)		2025
		BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
C8	Ratio laba	4,61	,83	4,14	2,06	3,56	3,07	6,09	3,81	5,76	4,5
C9	Ratio operasi	0,92	0,92	0,9	0,93	0,91	0,88	0,88	0,85	0,89	0,82

Sumber: Bagian Perekonomian Setdako, 2025

J. CAPAIAN DAN PROYEKSI SDG`S/ TPB (TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)

Tabel 2.81 Capaian Tahun 2024 dan Proyeksi SDGS/TPB Kota Payakumbuh Tahun 2025

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	1.2.1*. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	↓ 7-8%	5,44%	5,94%	6,03%	6,12%	6,22%	6,31%	6,4%	Dinas Sosial	Sosial
2	1.3.1.(a). Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	↑ 95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Sosial
3	1.3.1.(b). Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	↑ 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	%	84%	86%	88%	89%	91%	93%	Dinas Nakerperin	Sosial
4	1.3.1.(c). Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	↑ 17,12%	74%	101%	103%	104%	104%	104%	104%	Dinas Sosial	Sosial
5	1.3.1.(d). Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	↓ 2,8 juta	4.140 orang	5.012 Org	5.295 Org	5.572 Org	5.842 Org	6.105 Org	6.358 Org	Dinas Sosial	Sosial
6	1.4.1.(a). Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	↑ 70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Sosial
7	1.4.1.(b). Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	↑ 63%.	80%	81%	82%	83%	84%	85%	86%	Dinas Kesehatan	Sosial

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
8	1.4.1.(c). Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	↑ 65%	45,89%	68%	74%	80%	84%	88%	92%	Dinas P3AP2KB	Sosial
9	1.4.1.(d). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	↑ 100%	100,00%	99,24 %	99,25 %	99,26 %	99,27 %	99,28 %	99,28 %	Dinas PUPR	Sosial
10	1.4.1.(e). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	↑ 100%	100%	96%	96%	97%	97%	97%	98%	DPKP	Sosial
11	1.4.1.(f). Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	↑ 18,6 juta	18,67%	27,27 %	29,15 %	30,95 %	32,68 %	34,32 %	35,88 %	DPKP	Sosial
12	1.4.1.(g). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	↑ 94,78%	92,22%	73,57 %	67,65 %	61,85 %	56,21 %	50,75 %	45,5%	Dinas Pendidikan	Sosial
13	1.4.1.(h). Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	↑ 82,2%	110,08%	95,85 %	90,51 %	85,23 %	80,02 %	74,9%	69,88 %	Dinas Pendidikan	Sosial
14	1.4.1.(j). Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	↑ 77,4%.	99%	103%	105%	107%	108%	110%	111%	Dinas Pendidikan	Sosial
15	1.4.1.(k). Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	↑ 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	Sosial
16	1.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BPBD	Sosial
17	1.5.1.(a). Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	↑ 39 daerah	5 Kec	5 Kec	5 Kec	5 Kec	5 Kec	5 Kec	5 Kec	BPBD	Sosial
18	1.5.1.(b). Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	↑ 151 ribu	20 Org	***	***	***	***	***	***	Dinas Sosial	Sosial
19	1.5.1.(c). Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	↑ 81,5 ribu	20 Org	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Sosial	Sosial

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
20	1.5.1.(d). Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	↑ 450	-	5 Kec.	5 Kec.	5 Kec.	5 Kec.	5 Kec.	5 Kec.	Dinas Pendidikan	Sosial
21	1.5.2.(a). Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	19,68 juta rupiah	258 Jt. Rp	281 Jt. Rp	301 Jt. Rp	316 Jt. Rp	329 Jt. Rp	339 Jt. Rp	BPBD	Sosial
22	1.5.3*. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	BPBD	Sosial
23	1.a.1*. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	14,7%	25%	27%	28%	29%	29%	29%	Dinas Sosial	Sosial
24	1.a.2*. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	53%	53%	54%	56%	58%	59%	61%	Dinas Sosial	Sosial
25	2.1.1*. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	3%	3,5%	3,4%	3,3%	3,2%	3,1%	3,0%	Distapang	Sosial
26	2.1.1.(a). Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	↓ 17%	2,35%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	Dinas Kesehatan	Sosial
27	2.1.2*. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	-	***	***	***	***	***	***	Distapang	Sosial
28	2.1.2.(a). Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	↓ 8,5 %	6,51%	***	***	***	***	***	***	Distapang	Sosial
29	2.2.1*. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	2%	0,14%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	Dinas Kesehatan	Sosial
30	2.2.1.(a). Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	↓ 28%	1,4%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	Dinas Kesehatan	Sosial

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
31	2.2.2*. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	4%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	Dinas Kesehatan	Sosial
32	2.2.2.(a). Prevalensi anemia pada ibu hamil.	↓ 28%	3,5%	5%	6%	6%	6%	7%	7%	Dinas Kesehatan	Sosial
33	2.2.2.(b). Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	↑ 50%	86%	82%	81%	80%	78%	77%	76%	Dinas Kesehatan	Sosial
34	2.2.2.(c). Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	↑ skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	93,3	86,39	83	79,64	76,31	73	69,72	Dinas Ketahanan Pangan	Sosial
35	2.3.1*. Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	0,026 Milyar. Rp/ Org. Thn	0,010 1 Milyar . Rp/ Org. Thn	0,006 2 Milyar . Rp/ Org. Thn	0,003 3 Milyar . Rp/ Org. Thn	0,001 5 Milyar . Rp/ Org. Thn	0,000 5 Milyar . Rp/ Org. Thn	0,000 1 Milyar . Rp/ Org. Thn	Dinas Pertanian	Sosial
36	3.1.1*. Angka Kematian Ibu (AKI).	↓ 306	1,69	0,29	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	Dinas Kesehatan	Sosial
37	3.1.2*. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	↑ 95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Sosial
38	3.1.2.(a). Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	↑ 85 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Sosial
39	3.2.1*. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	1,7	1,19	1,19	1,2	1,2	1,2	1,2	Dinas Kesehatan	Sosial
40	3.2.2*. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	2,95	5,95	6,38	6,79	7,17	7,54	7,89	Dinas Kesehatan	Sosial
41	3.2.2.(a). Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	↓ 24	5,5	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	Dinas Kesehatan	Sosial

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
42	3.2.2.(b). Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	↑ 95%	100%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	Dinas Kesehatan	Sosial
43	3.3.1.(a). Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	↓ <0,5%	0,04%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	Dinas Kesehatan	Sosial
44	3.3.2.(a). Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	↓ 245	208	408	430	443	451	455	457	Dinas Kesehatan	Sosial
45	3.3.3*. Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	0,03	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	Dinas Kesehatan	Sosial
46	3.3.3.(a). Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	↑ 300	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	Dinas Kesehatan	Sosial
47	3.3.4.(a). Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	Dinas Kesehatan	Sosial
48	3.3.5*. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	Nihil kasus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Dinas Kesehatan	Sosial
49	3.3.5.(a). Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	↑ 34 provinsi	Nihil kasus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Dinas Kesehatan	Sosial
50	3.3.5.(b). Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis	↑ 35.	Nihil kasus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Dinas Kesehatan	Sosial
51	3.4.1.(a). Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	↓ 5,4%	29,65%	28,50 %	28,12 %	27,74 %	27,35 %	26,97 %	26,59 %	Dinas Kesehatan	Sosial
52	3.4.1.(b). Prevalensi tekanan darah tinggi.	↓ 24,3%	19%	33%	33%	33%	34%	34%	34%	Dinas Kesehatan	Sosial
53	3.4.1.(c). Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	15%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	Dinas Kesehatan	Sosial
54	3.4.2*. Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	NA	Nihil kasus	Nihil kasus	Nihil kasus	Nihil kasus	Nihil kasus	Nihil kasus	Dinas Kesehatan	Sosial

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
55	3.4.2.(a). Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	↑ 280	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	Dinas Kesehatan	Sosial
56	3.5.1.(e). Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	↓ angka 0,02%	0,05%	0,09%	0,09%	0,10%	0,10%	0,11%	0,12%	Dinas Kesehatan	Sosial
57	3.5.2*. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	-	***	***	***	***	***	***	Dinas Kesehatan	Sosial
58	3.7.1*. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	↑ 66%	46%	68%	74%	80%	84%	88%	92%	Dinas P3AP2KB	Sosial
59	3.7.1.(a). Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	↑ 65%	46%	68%	74%	80%	84%	88%	92%	Dinas P3AP2KB	Sosial
60	3.7.1.(b). Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	↑ 23,5%	5,11%	7,16%	7,78%	8,34%	8,85%	9,31%	9,72%	Dinas P3AP2KB	Sosial
61	3.7.2*. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	↓ 38	-	***	***	***	***	***	***	Dinas Kesehatan	Sosial
62	3.7.2.(a). Total Fertility Rate (TFR).	↓ 2,28	-	***	***	***	***	***	***	Dinas Kesehatan	Sosial
63	3.8.1.(a). Unmet need pelayanan kesehatan.	↓ 9,91%	0% (Seluruh pelayanan terpenuhi)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dinas Kesehatan	Sosial
64	3.8.2*. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	98,29%	115%	120%	126%	132%	137%	143%	Dinas Kesehatan	Sosial
65	3.8.2.(a). Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	↑ minimal 95%	98%	113%	119%	125%	130%	136%	141%	Dinas Kesehatan	Sosial

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUNG JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
66	3.9.3.(a). Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	0,00 (tidak ada korban keracunan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan	Sosial
67	3.a.1*. Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	29,65%	28,50 %	28,12 %	27,74 %	27,35 %	26,97 %	26,59 %	Dinas Kesehatan	Sosial
68	3.b.1.(a). Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Sosial
69	3.c.1*. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	0,96%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	Dinas Kesehatan	Sosial
70	4.1.1*. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	Literasi : SD = 82,5 SMP = 81,82 Numerasi : SD = 64,14 SMP = 60,84	109%	111%	112%	114%	115%	116%	Dinas Pendidikan	Sosial
71	4.1.1.(a). Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	↑ 84,2%	88,37%	121%	135%	148%	158%	167%	175%	Dinas Pendidikan	Sosial
72	4.1.1.(b). Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	↑ 81%	81%	111%	124%	135%	145%	153%	160%	Dinas Pendidikan	Sosial
73	4.1.1.(d). Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	↑ 114,09%	102,23%	90,25 %	85%	79,82 %	74,71 %	69,70 %	64,79 %	Dinas Pendidikan	Sosial
74	4.1.1.(e). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	↑ 106,94%	135,05%	110,5 8%	101,1 6%	91,97 %	83,04 %	74,44 %	66,21 %	Dinas Pendidikan	Sosial
75	4.1.1.(g). Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	↑ 8,8 tahun	10,88	10,97	11,02	11,07	11,12	11,17	11,22	Dinas Pendidikan	Sosial
76	4.2.2.(a). Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	↑ 77,2%	44,17%	***	***	***	***	***	***	Dinas Pendidikan	Sosial
77	4.4.1*. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	61,74%	27,73 %	18,79 %	11,63 %	6,40%	3,01%	1,12%	DisKominfo	Sosial

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
78	4.5.1*. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	119,55%	133,7 9%	135,5 4%	137,2 8%	139,0 2%	140,7 6%	142,5 0%	Dinas Pendidikan	Sosial
79	4.6.1.(a). Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	↑ 96,1%	99,72%	99,83 %	99,89 %	99,94 %	99,99 %	100,0 4%	100,0 9%	Dinas Pendidikan	Sosial
80	4.6.1.(b). Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	100%	99,83 %	99,89 %	99,94 %	99,99 %	100,0 4%	100,0 9%	Dinas Pendidikan	Sosial
81	4.a.1*. Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Meningkat	85,71%	95,86 %	99,44 %	102,9 9%	106,5 1%	110,0 0%	113,4 4%	Dinas Pendidikan	Sosial
82	4.c.1*. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	48%	48%	50%	52%	54%	56%	58%	Dinas Pendidikan	Sosial
83	5.1.1*. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	2 Kebijakan	2	2	2	2	2	2	Dinas P3AP2KB	Sosial
84	5.2.1*. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	0,00 Nihil kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas P3AP2KB	Sosial
85	5.2.1.(a). Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	↓ kurang dari 20,48%	Nihil kasus	0,016 %	0,011 %	0,007 %	0,005 %	0,002 %	0,001 %	Dinas P3AP2KB	Sosial
86	5.2.2*. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami	Menurun	Nihil kasus	0,004 %	0,004 %	0,005 %	0,005 %	0,005 %	0,005 %	Dinas P3AP2KB	Sosial

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.										
87	5.2.2.(a). Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	↑ 70%	Nihil kasus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas P3AP2KB	Sosial
88	5.3.1*. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	-	***	***	***	***	***	***	Dinas P3AP2KB	Sosial
89	5.3.1.(a). Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	↑ 21 tahun	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	Dinas P3AP2KB	Sosial
90	5.3.1.(b). Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	↓ 38 tahun	-	***	***	***	***	***	***	Dinas P3AP2KB	Sosial
91	5.5.1*. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	8 anggota	10 anggota	10 anggota	12 anggota	10 anggota	10 anggota	10 anggota	Dinas P3AP2KB	Sosial
92	5.5.2*. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	14%	15%	14%	14%	13%	13%	12%	BKPSDM	Sosial
93	5.6.1*. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PPKBP3A	Sosial
94	5.6.1.(a). Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	↓ 9,9%	-	***	***	***	***	***	***	Dinas P3AP2KB	Sosial
95	5.6.1.(b). Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	↑ 85%	5,11%	7,16%	7,78%	8,34%	8,85%	9,31%	9,72%	Dinas P3AP2KB	Sosial
96	5.b.1*. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	90,71%	96,38 %	97,37 %	98,37 %	99,37 %	100,36 %	101,36 %	Diskominfo	Sosial

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
97	6.1.1.(a). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	↑ 100%	100,00%	99,24 %	99,25 %	99,26 %	99,27 %	99,28 %	99,28 %	Dinas PUPR	Lingkunga n
98	6.1.1.(b). Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	↑ 118,6 m3/detik	2.742 l/dtk	2.742 l/dtk	2.742 l/dtk	2.742 l/dtk	2.742 l/dtk	2.742 l/dtk	2.742 l/dtk	Dinas PUPR	Lingkunga n
99	6.1.1.(c). Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	↑ 100%	89,26%	104%	105%	106%	108%	109%	111%	Dinas PUPR	Lingkunga n
100	6.2.1.(a). Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	91%	92%	92%	91%	91%	91%	91%	Dinas Kesehatan	Lingkunga n
101	6.2.1.(b). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	↑ 100%	100%	97%	97%	97%	98%	98%	99%	Dinas Perkim	Lingkunga n
102	6.2.1.(c). Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	↑ 45.000 (skala nasional)	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	Dinas Perkim	Lingkunga n
103	6.2.1.(d). Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	47 Kel.	Dinas Perkim	Lingkunga n
104	6.2.1.(e). Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	↑ 438 kabupaten/kota.	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim	Lingkunga n
105	6.2.1.(f). Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim	Lingkunga n
106	6.3.1.(a). Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	↑ 409 kabupaten/kota	1 IPLT	1 IPLT	1 IPLT	1 IPLT	1 IPLT	1 IPLT	1 IPLT	Dinas Perkim	Lingkunga n
107	6.3.1.(b). Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	3%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	Dinas Perkim	Lingkunga n

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
108	6.3.2.(b). Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	44,21	61,22	63,24	65,24	67,22	69,19	71,15	DLH	Lingkunga n
109	6.4.1.(b). Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Lingkunga n
110	6.5.1.(a). Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	1 RPDAST	1 RPDA ST	1 RPDA ST	1 RPDA ST	1 RPDA ST	1 RPDA ST	1 RPDA ST	Dinas PUPR	Lingkunga n
111	6.5.1.(c). Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	2 Komunitas	2	2	2	2	2	2	Dinas PUPR	Lingkunga n
112	6.5.1.(f). Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	1 Komunitas	1	1	1	1	1	1	DLH	Lingkunga n
113	6.5.1.(g). Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Lingkunga n
114	8.1.1*. Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	4,45%	7,68%	8,10%	8,34%	8,48%	8,56%	8,60%	Bappeda	Ekonomi
115	8.1.1.(a). PDB per kapita.	↑ lebih dari Rp 50 juta	62,01 Juta Rupiah	71,45 Juta Rupia h	75,91 Juta Rupia h	80,24 Juta Rupia h	84,43 Juta Rupia h	88,46 Juta Rupia h	92,33 Juta Rupia h	Bappeda	Ekonomi
116	8.2.1*. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	0,66%	0,14	0,05	0,01	-	-	-	Dinas Nakerperin	Ekonomi
117	8.3.1*. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	59%	***	***	***	***	***	***	Dinas Nakerperin	Ekonomi
118	8.3.1.(a). Persentase tenaga kerja formal.	51%	40,83%	***	***	***	***	***	***	Dinas Nakerperin	Ekonomi
119	8.3.1.(b). Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	15%	***	***	***	***	***	***	Dinas Nakerperin	Ekonomi

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
120	8.3.1.(c). Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	-	37,65	41,04	43,77	45,91	47,56	48,83	Dinas Koperasi dan UKM	Ekonomi
121	8.5.1*. Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	70.000	73.38 0	77.69 8	81.91 2	86.00 7	89.97 0	93.79 0	Dinas Nakerperin	Ekonomi
122	8.5.2*. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	4,84%	3,40%	2,86%	2,35%	1,89%	1,48%	1,12%	Dinas Nakerperin	Ekonomi
123	8.5.2.(a). Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	12,75%	4,14%	3,75%	3,37%	2,99%	2,64%	2,31%	Dinas Nakerperin	Ekonomi
124	8.6.1*. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Menurun	28%	27%	28%	30%	32%	34%	35%	Dinas Pendidikan	Ekonomi
125	8.9.1*. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	↑ 8%	-	-	-	-	-	-	-	Disparpora	Ekonomi
126	8.9.1.(a). Jumlah wisatawan mancanegara.	↑ 20 juta (skala nasional)	22 Org.	30 Org.	32 Org.	34 Org.	38 Org.	40 Org.	45 Org.	Disparpora	Ekonomi
127	8.9.1.(b). Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	38.907 Org.	42.79 5 Org.	44.08 3 Org.	45.36 4 Org.	46.63 8 Org.	47.90 4 Org.	49.15 9 Org.	Disparpora	Ekonomi
128	8.9.1.(c). Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	-	-	-	-	-	-	-	Disparpora	Ekonomi
129	8.9.2*. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	0,6%	0,58%	0,59%	0,59%	0,60%	0,61%	0,61%	Dinas Nakerperin	Ekonomi
130	8.10.1*. Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	17 ATM	17 ATM	17 ATM	17 ATM	17 ATM	17 ATM	17 ATM	Dinas Nakerperin	Ekonomi
131	8.10.1.(a). Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)	1 km	1 km	1 km	1 km	1 km	1 km	1 km	Dinas Nakerperin	Ekonomi
132	8.10.1.(b). Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	187,08 Milyar Rupiah	241,9 8 Milyar Rupiah	259,2 6 Milyar Rupiah	275,8 1 Milyar Rupiah	291,5 7Mily ar Rupiah	306,4 6 Milyar Rupiah	320,4 7 Milyar Rupiah	Dinas Koperasi dan UKM	Ekonomi

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
133	9.2.1*. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	8,98%	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	Bappeda	Ekonomi
134	9.2.1.(a). Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	-0,07%	***	***	***	***	***	***	Dinas Nakerperin	Ekonomi
135	9.2.2*. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	10%	8,86%	8,73%	8,60%	8,47%	8,35%	8,22%	Dinas Nakerperin	Ekonomi
136	9.3.1*. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	25%	15%	17%	18%	19%	20%	21%	Dinas Nakerperin	Ekonomi
137	9.3.2*. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Nakerperin	Ekonomi
138	9.5.1*. Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	160.000.000	210.740.210	210.762.358	210.764.138	210.764.281	210.764.293	210.764.294	Bappeda	Ekonomi
139	9.c.1*. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	74,51%	72,94%	72,42%	71,89%	71,37%	70,85%	70,33%	Diskominfo	Ekonomi
140	9.c.1.(a). Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	91%	96%	97%	98%	99%	100%	101%	Diskominfo	Ekonomi
141	9.c.1.(b). Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	77,40%	98%	105%	112%	119%	125%	131%	Diskominfo	Ekonomi
142	10.1.1*. Koefisien Gini.	↓ 0,36	0,316	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	Bappeda	Ekonomi
143	10.1.1.(a). Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	↓ 7-8%	5,44%	6%	6%	6%	7%	7%	7%	Bappeda	Ekonomi
144	10.2.1*. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun	1095 orang (L=595, P=500)	1.597 orang	1.740 orang	1.868 orang	1.981 orang	2.079 orang	2.164 orang	Dinas Sosial	Ekonomi
145	10.3.1.(a). Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87	72,15	68,05	66,68	65,32	63,96	62,60	61,25	Kesbangpol	Ekonomi

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
146	10.3.1.(d). Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	0,00 (Tidak ada kebijakan diskriminatif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bagian Hukum	Ekonomi
147	10.4.1.(b). Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	↑ TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	79%	84%	86%	88%	89%	91%	93%	Dinas Nakerperin	Ekonomi
148	11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	81,33%	77%	76%	75%	74%	73%	72%	Dinas Perkim	Lingkungan
149	11.2.1.(a). Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	↑ 32%	< 50	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	Lingkungan
150	11.3.2.(a). Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkat	74 Institusi	77 Institusi	79 Institusi	80 Institusi	81 Institusi	82 Institusi	83 Institusi	Bappeda	Lingkungan
151	11.3.2.(b). Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	Dinas PUPR	Lingkungan
152	11.4.1.(a). Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	ada	42 Objek	42 Objek	42 Objek	42 Objek	42 Objek	42 Objek	42 Objek	Disparpora	Lingkungan
153	11.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0,00 (tidak ada korban)	0,00						BPBD	Lingkungan
154	11.5.1.(a). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	↓ 30%	104.80	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	BPBD	Lingkungan
155	11.5.1.(b). Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Meningkat	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Lingkungan
156	11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Lingkungan

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
157	11.5.2.(a). Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	19,68 juta rupiah	258 juta rupiah	281 juta rupiah	301 juta rupiah	316 juta rupiah	329 juta rupiah	339 juta rupiah	BPBD	Lingkunga n
158	11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	↑ 80%	95,88%	108,4 9%	111,4 5%	114,3 9%	117,3 3%	120,2 4%	123,1 4%	DLH	Lingkunga n
159	11.7.1.(a). Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ada	5 Kecamatan	5 Kec.	5 Kec.	5 Kec.	5 Kec.	5 Kec.	5 Kec.	DPKP	Lingkunga n
160	11.b.1*. Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Meningkat/ada	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	BPBD	Lingkunga n
161	11.b.2*. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	BPBD	Lingkunga n
162	12.4.2.(a). Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	↑150 juta ton (skala nasional)	45,31 Ton	75,85 Ton	77,90 Ton	78,78 Ton	79,15 Ton	79,31 Ton	79,38 Ton	DLH	Lingkunga n
163	12.5.1.(a). Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	5.400,73 ton/tahun	5.983,80 ton/tahun	6.167,90 ton/tahun	6.351,05 ton/tahun	6.533,07 ton/tahun	6.713,78 ton/tahun	6.893,03 ton/tahun	DLH	Lingkunga n
164	12.6.1.(a). Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	0,00 (tidak ada perusahaan besar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DLH	Lingkunga n
165	12.7.1.(a). Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Lingkunga n
166	12.8.1.(a). Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim	Lingkunga n

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
167	13.1.1*. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	1 Dok. KRB	BPBD	Lingkunga n
168	13.1.2*. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0,00 (tidak ada korban)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BPBD	Lingkunga n
169	15.1.1.(a) . Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	8,50%	10%	10%	11%	11%	11%	12%	DLH	Lingkunga n
170	15.3.1.(a) . Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Lingkunga n
171	15.6.1* . Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	ada	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Lingkunga n
172	15.9.1.(a). Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Lingkunga n
173	16.1.1.(a). Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	1	1	1	1	1	1	1	Kesbangpol	Hukum & tata kelola
174	16.1.2.(a). Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	0,00 (tidak ada korban)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kesbangpol	Hukum & tata kelola
175	16.1.3.(a). Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	62 Org	71 Org	42 Org	21 Org	9 Org	3 Org	1 Org	Kesbangpol	Hukum & tata kelola
176	16.1.4*. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	-	-	-	-	-	-	-	Kesbangpol	Hukum & tata kelola
177	16.2.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik da-tau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	-	12,49	10,49	8,62	6,91	5,39	4,08	Dinas P3AP2KB	Hukum & tata kelola
178	16.2.1.(b). Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	-	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	Dinas P3AP2KB	Hukum & tata kelola

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
179	16.2.3.(a). Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	-	Nihil Kasus	Nihil Kasus	Nihil Kasus	Nihil Kasus	Nihil Kasus	Nihil Kasus	Dinas P3AP2KB	Hukum & tata kelola
180	16.5.1.(a). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	-	4,07	4,11	4,16	4,21	4,25	4,3	Inspektorat	Hukum & tata kelola
181	16.6.1*. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	91%	54%	56%	58%	60%	62%	64%	BKD	Hukum & tata kelola
182	16.6.1.(a). Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	↑ Kementerian/ Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD	Hukum & tata kelola
183	16.6.1.(b). Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	↑ Kementerian/ Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	BB (75,25)	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Bagian Organisasi	Hukum & tata kelola
184	16.6.1.(c). Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	↑ 80%	30,62%	53,96 %	58,07 %	60,92 %	62,85 %	64,14 %	64,99 %	Bagian PBJ Setdako	Hukum & tata kelola
185	16.6.1.(d). Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	↑Kementerian/ Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	BB (77,27)	B	B	B	B	B	B	Bagian Organisasi	Hukum & tata kelola
186	16.6.2.(a). Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	↑ Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	sangat Baik (4,41) (A)	A	A	A	A	A	A	Bagian Organisasi	Hukum & tata kelola

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
187	16.7.1.(a). Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	8	9,78%	10,35 %	10,92 %	11,46 %	11,99 %	12,50 %	Dinas P3AP2KB	Hukum & tata kelola
188	16.7.1.(b). Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	14%	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	Dinas P3AP2KB	Hukum & tata kelola
189	16.9.1*. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdukcapil	Hukum & tata kelola
190	16.9.1.(a). Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	↑ 77,4%	96,9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdukcapil	Hukum & tata kelola
191	16.9.1.(b). Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	↑ 85%	99%	1,03	1,05	1,07	1,08	1,1	1,11	Disdukcapil	Hukum & tata kelola
192	16.10.2.(c). Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	Hukum & tata kelola
193	16.b.1.(a). Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	-	**	**	**	**	**	**	Bagian Hukum	Hukum & tata kelola
194	17.1.1*. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	13,1%	0,173 13578 1	0,182 3612	0,191 41492 3	0,200 26946 5	0,208 90125	0,217 29048 7	BKD	Ekonomi
195	17.1.1.(a). Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	3%	0,035 98226 1	0,038 87451 2	0,041 58653 8	0,044 10458 1	0,046 42238	0,048 53976 9	BKD	Ekonomi
196	17.1.2*. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	-	0,035 98226 1	0,038 87451 2	0,041 58653 8	0,044 10458 1	0,046 42238	0,048 53976 9	BKD	Ekonomi

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
197	17.6.2.(b). Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	↑ Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	8.671 (PELANGGAN INDIHOME)	***	***	***	***	***	***	Diskominfo	Ekonomi
198	17.6.2.(c). Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	↑ Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	89,34%	114,7 5%	122,7 8%	130,4 9%	137,8 5%	144,8 3%	151,4 2%	Diskominfo	Ekonomi
199	17.8.1*. Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	77,4%	98,22 %	105,4 %	112,2 6%	118,7 6%	124,8 9%	130,6 2%	Diskominfo	Ekonomi
200	17.17.1.(a). Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	Ekonomi
201	17.17.1.(b). Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	-	-	-	-	-	-	-	BagianPBJ Setdako	Ekonomi
202	17.18.1.(a). Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	88,6%	101,2 1%	105,0 6%	108,8 8%	112,6 7%	116,4 1%	120,1 %	BPS	Ekonomi
203	17.18.1.(b). Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	tidak tersedia hasil survei BPS	89,24 %	89,81 %	90,39 %	90,97 %	91,55 %	92,13 %	BPS	Ekonomi
204	17.18.1.(c). Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	8	11	11	11	11	11	11	BPS	Ekonomi
205	17.18.1.(d). Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.	Meningkat	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	Ekonomi

NO	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	BASELINE 2024	PROYEKSI						OPD PENANGGUN G JAWAB	PILAR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
206	17.19.2.(b). Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Disdukcapil	Ekonomi
207	17.19.2.(c). Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	24.642 Org	26.37 3 Org	28.74 8 Org	30.86 2 Org	32.71 8 Org	34.32 7 Org	35.70 6 Org	BPS	Ekonomi
208	17.19.2.(d). Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	96,67%	99,86 %	102,9 2%	105,9 7%	108,9 9%	112%	114,9 8%	BPS	Ekonomi

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Catatan:

↑: Meningkat menjadi

↓: Menurun menjadi

** : Tidak ada kebijakan diskriminatif

***: Tidak dapat diproyeksikan

2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

A. REALISASI KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020-2024

1). KINERJA PELAKSANAAN APBD

Kinerja keuangan daerah berkaitan erat dengan dua aspek utama yaitu aspek kinerja pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta aspek kondisi neraca daerah. Dalam pembangunan suatu daerah, penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya daerah yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pengelolaan anggaran secara baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD antara lain penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dengan penganggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam melihat kinerja keuangan daerah pada periode sebelumnya, dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan oleh derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal merupakan perbandingan antara kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah, dan digunakan untuk melihat persentase kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah sehingga dapat diketahui kemampuan daerah dalam kemandirian keuangan. Perkembangan derajat desentralisasi fiskal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82 Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

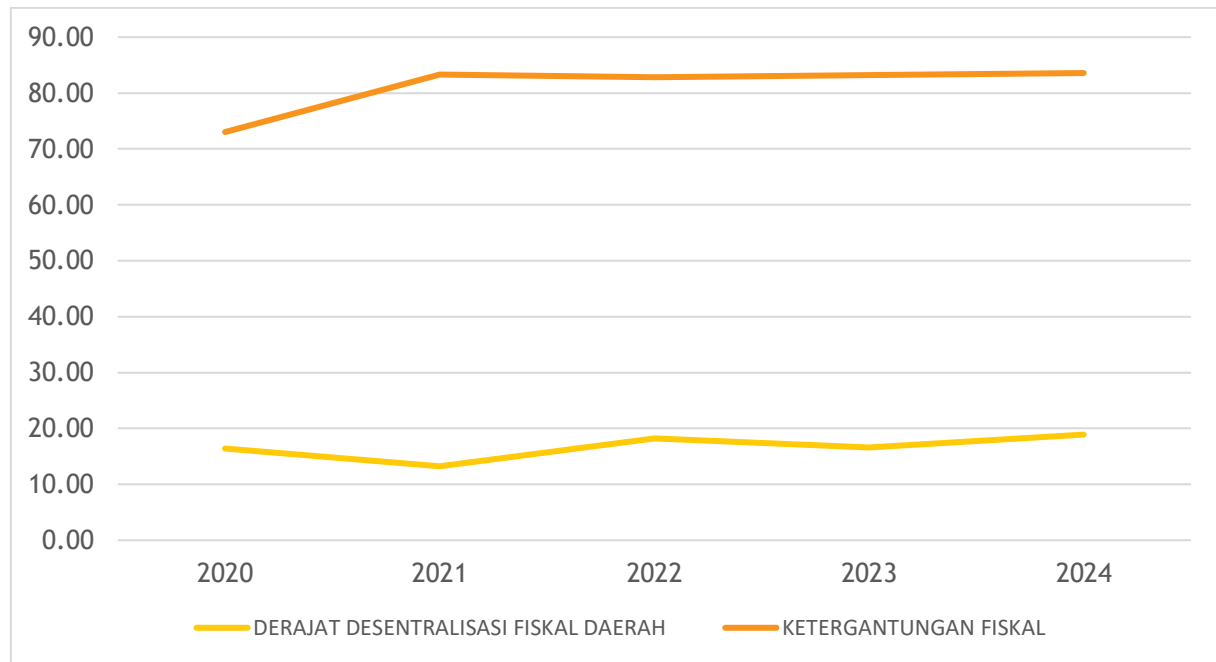
TAHUN	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH	DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH	TRANSFER PUSAT	KETERGANTUNGAN FISKAL
1	2	3	$4 = 3/2 \times 100$	5	$6 = 5/2 \times 100$
2020	717.701.105.678	115.996.425.752	16,16	583.260.279.926	81,27
2021	677.296.933.413	90.291.310.165	13,33	568.343.603.248	83,91
2022	704.772.804.629	126.962.402.643	18,01	576.910.401.986	81,86
2023	741.409.901.903	123.216.492.558	16,62	616.393.409.345	83,14
2024	753.320.524.913	138.649.853.624	18,41	613.134.671.289	81,39

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2025

Berdasarkan data di atas dapat terlihat capaian derajat desentralisasi fiskal yang mengalami perkembangan yang masih belum baik karena Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2020-2024 yang mencapai 18%. Derajat desentralisasi fiskal ini tidak diimbangi dengan penurunan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (dana perimbangan). Dalam lima tahun terakhir, kemampuan fiskal daerah belum mampu menunjukkan capaian derajat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi dari proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Payakumbuh belum mampu mengurangi ketergantungan fiskal terhadap

pemerintah pusat dalam pembangunan daerah. Dilihat dari kapasitas fiskal daerah, pada tahun 2019 Kota Payakumbuh memiliki nilai indeks kapasitas fiskal daerah yang termasuk dalam kategori sangat rendah. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2020).

Diagram 2.48 Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2025

A). PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan

komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk pendapatan transfer, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Untuk mencapai target APBD, Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah, antara lain mengintensifkan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan meningkatkan hasil kekayaan daerah serta sumber-sumber penghasilan lainnya yang tidak memberatkan masyarakat dan mengganggu jalannya proses produksi di wilayah Kota Payakumbuh.

Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target dan nomenklatur pendapatan asli daerah berdasarkan kondisi perekonomian daerah dan aturan yang berlaku.
2. Penyesuaian pendapatan transfer berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dari kerangka APBD yang tersaji pada tabel 2.83 tergambar bahwa sumber pendapatan daerah Kota Payakumbuh terbesar masih bersumber dari pendapatan transfer pusat maupun transfer daerah. Artinya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih tinggi. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Kota Payakumbuh merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Tabel 2.83 Realisasi APBD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN					
	a. Pendapatan asli daerah	115.996.425.752,00	90.291.310.165,00	126.962.402.643,00	123.216.492.558,01	138.649.853.624,00
	b. Pendapatan transfer	583.260.279.926,00	568.343.603.248,00	576.910.401.986,00	616.393.409.345,00	613.134.671.289,00
	c. Lain- lain pendapatan daerah yang sah	18.444.400.000,00	18.660.770.000,00	900.000.000,00	1.800.000.000,00	1.536.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	717.701.105.678,00	677.295.683.413,00	704.772.804.629,00	741.409.901.903,01	753.320.524.913,00
2	BELANJA					
	a. Belanja operasi	561.638.767.318,00	567.600.948.466,00	577.363.467.901,00	649.290.098.516,00	668.220.386.847,00
	b. Belanja modal	119.993.262.139,00	110.125.661.671,00	118.552.496.274,00	83.816.101.803,00	73.985.819.648,00
	c. Belanja tidak terduga	20.627.001.075,00	-	-	208.190.400,00	518.850.784,00
	d. Belanja transfer	651.312.613,00	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	702.910.343.145,00	677.726.610.137,00	695.915.964.175,00	733.314.390.719,00	742.725.057.279,00
	SURPLUS/DEFISIT	14.790.762.533,00	(430.926.724,00)	8.856.840.454,00	8.095.511.184,01	10.595.467.634,00
3	PEMBIAYAAN	59.945.152.495,00	74.735.915.027,00	68.166.238.303,00	77.023.078.757,00	77.618.589.941,00
	a. Penerimaan pembiayaan	59.945.152.495,00	74.735.915.027,00	74.306.238.303,00	77.023.078.757,00	85.118.589.941,00
	b. Pengeluaran pembiayaan	-	-	6.140.000.000,00	-	7.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	59.945.152.495,00	74.735.915.027,00	68.166.238.303,00	77.023.078.757,00	77.618.589.941,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	74.735.915.028	74.304.988.303,00	77.023.078.757,00	85.118.589.941,00	88.214.057.575,00

Dalam 5 tahun ke belakang terlihat pendapatan daerah mengalami fluktuatif baik pada komponen PAD maupun pendapatan transfer. Khusus untuk PAD, pasca covid-19 memperlihatkan geliat ekonomi yang semakin membaik dengan meningkat secara signifikan setiap tahunnya. PAD menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi persentasenya terhadap total pendapatan daerah maka daerah tersebut akan semakin mandiri dalam membiayai pembangunan. Secara umum pendapatan daerah masih di dominasi dari pendapatan transfer yang mencapai rata-rata 80% namun tidak dipungkiri walau dengan potensi PAD yang tidak besar namun apabila dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan untuk Kota Payakumbuh kedepannya.

Tabel 2.84 Tingkat Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019-2024

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%	TINGKAT PERTUMBUHAN
1	2019	818.001.019.824	796.837.014.305	97,41	-
2	2020	708.900.288.188	717.701.105.678	101,24	-9,93
3	2021	682.401.082.138	677.296.933.413	99,25	-5,63
4	2022	696.617.590.928	704.772.804.629	101,17	4,06
5	2023	740.546.410.861	741.409.901.903	100,12	5,20
6	2024	733.573.159.828	751.416.445.263	102,43	1,34
RATA- RATA		730.006.591.961	731.572.367.532	100,27	

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Data Diolah Tahun 2025

Pendapatan daerah Kota Payakumbuh menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun memiliki kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan selama lima tahun terakhir sebesar 100,27%. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 102,43% dan terendah pada tahun 2019 dengan tingkat persentase realisasi sebesar 97,41%

(1). PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dilihat dari perkembangan penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Payakumbuh dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 108,72%. Dari kontribusi penerimaan PAD terhadap total pendapatan daerah juga cenderung menunjukkan peningkatan dari 16,16% pada tahun 2020 menjadi 18,40% pada tahun 2024. Hal ini juga menunjukkan adanya penurunan ketergantungan Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap Pendapatan Transfer.

Tabel 2.85 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	SELISIH
1	2	3	4 = 3/2*100	5 = 3 - 2
2020	98.325.518.029	115.996.425.752	117,97	17.670.907.723
2021	93.427.968.867	90.291.310.165	96,64	(3.136.658.702)
2022	108.913.694.154	126.962.402.643	116,57	18.048.708.489

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	SELISIH
2023	116.297.319.145	123.216.492.558	105,95	6.919.173.413
2024	130.174.080.614	138.649.853.624	106,51	8.475.773.010
RATA-RATA			108,72	

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2025

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh adalah pajak. Pajak merupakan komponen yang memberikan sumbangan atau kontribusi dan sekaligus memberi gambaran akan pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh. Pada tahun 2024, pajak daerah memiliki kontribusi rata sebesar 14,71% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh turun bila dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 17,09%. Tentunya ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah agar pajak daerah dapat dioptimalkan di tahun-tahun yang akan datang.

Tabel 2.86 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024

TAHUN	TOTAL REALISASI PAD	PAJAK	RETRIBUSI	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	LAIN-LAIN PAD YANG SAH
2020	115.996.425.752	17.067.518.363	4.364.204.571	7.049.367.383	87.515.335.435
2021	90.291.310.165	20.359.631.895	5.448.725.559	7.693.095.695	56.789.857.016
2022	126.962.402.643	22.033.326.343	5.833.854.340	9.493.460.178	89.601.761.782
2023	123.216.492.558	23.089.810.971	6.247.762.192	11.226.634.662	82.652.284.733
2024	138.649.853.624	23.691.080.250	93.272.708.497	12.381.453.735	9.304.611.142

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2025

(2). PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Komponen transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan (dana transfer umum dan dana transfer khusus), dana insentif fiskal, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sedangkan transfer antar pemerintah daerah meliputi pendapatan bagi hasil daerah dan bantuan keuangan. Perkembangan realisasi pendapatan transfer Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel 2.87

Tabel 2.87 Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	SELISIH
1	2	3	4 = 3/2*100	5 = 3 - 2
2020	527.550.498.349	517.671.060.783	98,13	(9.879.437.566)
2021	570.136.213.271	568.343.603.248	99,69	(1.792.610.023)
2022	586.803.896.774	576.910.401.986	98,31	(9.893.494.788)
2023	622.449.091.716	616.393.409.345	99,03	(6.055.682.371)
2024	601.863.079.214	613.134.671.289	101,87	11.271.592.075
RATA-RATA			99,41	

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2025

Dalam kurun waktu 2020-2024 realisasi pendapatan transfer Kota Payakumbuh yang melebihi target (anggaran) hanya di tahun 2024, dengan persentase sebesar 101,87 %. Sementara itu di tahun 2021-2022 terjadi penurunan realisasi pendapatan transfer dengan persentase terendah 98,13% di tahun 2020. Sub komponen yang memiliki proporsi atau kontribusi terbesar dalam pendapatan transfer Kota Payakumbuh adalah dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran dana perimbangan yang diterima daerah ditentukan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya dengan memperhitungkan potensi objek pendapatan yang belum tergali.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Transfer Khusus yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik. Dana Alokasi Umum merupakan pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar dalam Dana Perimbangan. Dilihat dari perkembangan masing-masing komponen, penerimaan Dana Bagi Hasil Kota Payakumbuh menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun. Realisasi Dana Bagi Hasil Kota Payakumbuh kurun waktu 2020-2024 secara rata-rata mencapai 121,17 % dan tahun 2023 merupakan realisasi terbesar mencapai 140,27%.

Tabel 2.88 Perkembangan Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	SELISIH
1	2	3	4 = 3/2*100	5 = 3 - 2
2020	12.977.414.936	10.688.396.768	82,36	(2.289.018.168)
2021	11.405.453.009	15.781.773.652	138,37	4.376.320.643
2022	13.005.930.000	16.024.100.564	123,21	3.018.170.564
2023	8.587.247.000	12.045.037.426	140,27	3.457.790.426
2024	9.285.130.000	11.296.067.000	121,66	2.010.937.000
RATA-RATA			121,17	

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2025

Komponen Dana Transfer Umum selain Dana Bagi Hasil adalah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Alokasi Umum pada tahun 2020-2024 selalu 100% terhadap rencana anggaran di APBD (Anggaran Perubahan). Komponen Dana Perimbangan selanjutnya adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Transfer Khusus atau Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Payakumbuh secara rata-rata adalah sebesar 90,61%.

(3). LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Selain Pendapatan asli daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah baik Pusat maupun Antar-Daerah, komponen lain dalam pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat serta Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. dalam kurun 5 tahun terakhir penerimaan lain-lain pendapatan daerah ini mengalami penurunan baik akibat perubahan nomenklatur kebijakan maupun besaran yang mengalami penurunan. Secara rata-rata realisasi item pendapatan ini mencapai 100,06% seperti terlihat pada tabel 2.89 berikut ini.

Tabel 2.89 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	SELISIH
1	2	3	4 = 3/2*100	5 = 3 - 2
2020	83.024.271.810	84.033.619.143	101,22	1.009.347.333
2021	18.836.900.000	18.662.020.000	99,07	(174.880.000)
2022	900.000.000	900.000.000	100,00	0
2023	1.800.000.000	1.800.000.000	100,00	0
2024	1.536.000.000	1.536.000.000	100,00	0
RATA-RATA			100,06	

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2025

B). BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan pada struktur belanja yang terletak pada klasifikasi belanja daerah. Klasifikasi belanja daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.

Berbanding lurus dengan kondisi realisasi belanja daerah, dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, belanja daerah juga meningkat seiring dengan perkembangan kenaikan pendapatan daerah. belanja operasi masih menjadi belanja terbesar terdiri dari belanja pegawai, barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sementara untuk belanja modal cenderung mengalami penurunan realisasi anggaran. Tentunya kebijakan daerah yang efektif dalam meningkatkan persentase belanja modal terutama untuk pemenuhan minimal 40% belanja infrastruktur publik di tahun 2027. Termasuk juga pemenuhan belanja yang bersifat mandatory yang sampai tahun 2025 ini masih belum bisa dipenuhi seperti belanja pegawai maksimal

30%, Belanja fungsi pengawasan 1% diluar gaji dan belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal lainnya.

Realisasi belanja daerah menunjukkan keterkaitan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan dengan habisnya anggaran belanja yang telah direncanakan pada APBD, namun masih adanya sisa anggaran belanja juga bisa menunjukkan efisiensi anggaran belanja apabila disertai terlaksananya fisik program/kegiatan 100%. Realisasi belanja daerah Kota Payakumbuh dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Realisasi Kota Payakumbuh dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.90 berikut.

Tabel 2.90 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

N O	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Belanja operasi	561.638.767.3 18,00	567.600.948.4 66,00	577.363.467.9 01,00	649.290.098.5 16,00	668.220.386.8 47,00
	1. Belanja Pegawai	327.343.870.2 86,00	320.454.438.2 27,00	328.320.458.4 62,00	341.982.146.8 72,00	376.394.619.5 31,00
	2. Belanja Barang Jasa	223.584.002.5 96,00	241.510.699.9 23,00	235.849.841.4 67,00	274.100.551.1 70,00	261.363.190.9 82,00
	3. Belanja Hibah	6.803.494.436 ,00	5.635.810.316 ,00	11.869.567.97 2,00	28.555.400.47 4,00	27.373.461.33 4,00
	4. Belanja Bantuan Sosial	3.907.400.000 ,00	0,00	1.323.600.000 ,00	4.652.000.000 ,00	3.089.115.000 ,00
B	Belanja modal	119.993.262.1 39,00	110.125.661.6 71,00	118.552.496.2 74,00	83.816.101.80 3,00	73.985.819.64 8,00
	1. Belanja Modal Tanah	18.545.467.06 0,00	19.565.837.79 4,00	22.029.941.02 7,00	3.281.712.722 ,00	834.832.535.0 0
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.702.444.14 9,00	20.835.763.86 1,00	19.429.430.09 7,00	25.428.835.04 5,00	21.973.427.51 8,00
	3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.221.849.72 2,00	26.121.702.95 2,00	19.802.166.48 5,00	19.738.743.46 0,00	17.929.842.68 8,00
	4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.593.649.36 9	42.586.365.65 5,00	55.351.575.87 5,00	33.067.838.04 5,00	30.784.644.32 2,00
	5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	929.851.839,0 0	1.015.991.409 ,00	1.939.382.790 ,00	2.298.972.531 ,00	2.459.672.585 ,00
	6. Belanja Modal Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0	3.400.000,00
C	Belanja tak terduga	20.627.001.07 5,00	0	0	208.190.400,0 0	518.850.784,0 0
D	Belanja transfer	651.312.613,0 0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	702.910.343. 145,00	677.726.610. 137,00	695.915.964. 175,00	733.314.390. 719,00	742.725.057. 279,00

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Selama kurun waktu 5 tahun selalu memperlihatkan bahwa

belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan sehingga menyebabkan kondisi defisit dalam anggaran daerah Kota Payakumbuh. Kondisi surplus dan defisit yang terjadi dalam kurun tahun 2020-2024 berpengaruh terhadap pembiayaan daerah di Kota Payakumbuh yang juga mengalami kondisi fluktuatif selama lima tahun terakhir.

C). PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah Kota Payakumbuh merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dari tahun 2020-2024, penerimaan pembiayaan di Kota Payakumbuh berasal dari beberapa komponen, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah. Sedangkan komponen pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; dan Pemberian Pinjaman Daerah. Adapun realisasi pembiayaan daerah Kota Payakumbuh periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.91

Tabel 2.91 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	SELISIH
1	2	3	4 = 3/2*100	5 = 3 - 2
2020	42.047.582.714	59.945.152.495	142,57	17.897.569.781
2021	64.799.652.811	74.735.915.027	115,33	9.936.262.216
2022	61.878.416.384	74.306.238.303	120,08	12.427.821.919
2023	67.783.498.005	77.023.078.757	113,63	9.239.580.752
2024	68.181.212.325	77.618.589.941	113,84	9.437.377.616
RATA-RATA			121,09	

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2025

Perkembangan realisasi pembiayaan daerah dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi fluktuatif. Realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020-2021 realisasi pembiayaan daerah cenderung menunjukkan adanya penurunan. Kondisi serupa juga terjadi pada realisasi SiLPA Kota Payakumbuh dalam lima tahun terakhir. Fluktuatifnya angka SiLPA pada tahun 2020-2024 terjadi akibat dari alokasi anggaran pada program/kegiatan yang dapat terlaksana dan/atau alokasi anggaran yang dapat terserap. Fluktuasi realisasi pembiayaan daerah yang terjadi dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah selama periode 2020-2024 belum berjalan secara optimal.

Sementara, pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, Penyertaan Modal Daerah, Penyertaan Modal Daerah dan Pemberian

Pinjaman Daerah. Selama ini Kota Payakumbuh hanya mengalokasikan pengeluaran pembiayaan hanya untuk penyertaan modal kepada Bank Nagari dan Perumda Tirta Sago. Adapun realisasi pengeluaran pembiayaan daerah periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.92.

Tabel 2.92 Perkembangan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	SELISIH
1	2	3	4 = 3/2*100	5 = 3 - 2
2020	0	0		0
2021	0	0		0
2022	6.140.000.000	6.140.000.000	100	0
2023	0	0		0
2024	0	0		0
RATA-RATA			20,00	

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2025

Dari tabel terlihat, bahwa pemerintah Kota Payakumbuh hanya pada tahun 2022 melakukan penyertaan modal kepada Bank Nagari kurun waktu 5 tahun terakhir. Kemampuan keuangan menjadi alasan kebijakan tersebut diambil. Namun untuk tahun kedepan tentunya penyertaan modal ini tetap ditingkatkan sebagai upaya mempertahankan besaran persentase kepemilikan saham Kota Payakumbuh pada Bank Nagari.

2) NERACA DAERAH

Neraca daerah menggambarkan tentang perkembangan dari kondisi asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah yang tersedia. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan asset daerah penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah karena laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan Keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas pemerintah daerah merupakan bagian penting dari manajemen keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa aset pemerintah daerah diinvestasikan dengan bijak dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan ekuitas. Hal ini akan memberikan manfaat yang luas, mulai dari mengurangi defisit anggaran hingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dengan menggunakan ekuitas secara bijaksana, pemerintah

daerah akan dapat membangun kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik.

Ekuitas pemerintah daerah merupakan nilai yang dimiliki daerah yang dapat memberikan keuntungan bagi daerah. Ini penting untuk membantu pemerintah daerah mengatur pengeluaran dan pendapatan, memfasilitasi perencanaan jangka panjang, membantu mengelola resiko, dan memastikan kelangsungan operasi yang stabil. Ekuitas pemerintah daerah bergantung pada perencanaan dan pengelolaan aset dan pendapatan yang efektif.

Pertama, pengelolaan aset yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan ekuitas daerah. Hal ini penting karena aset daerah adalah sumber dana yang dapat digunakan untuk meningkatkan ekuitas. Aset daerah dapat berupa tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, inventaris, dan lainnya. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa aset-aset tersebut diperlakukan dengan baik dan diatur dengan baik.

Kedua, pendapatan daerah juga harus meningkat agar ekuitas daerah dapat meningkat. Pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber seperti pajak, bagi hasil, hibah, dan dana lainnya. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pendapatan daerah dapat dikumpulkan dengan efisien dan efektif. Ini penting untuk memastikan bahwa pendapatan daerah dapat digunakan untuk meningkatkan ekuitas daerah.

Ketiga, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik. Hal ini penting karena pengelolaan keuangan yang efektif akan memastikan bahwa aset daerah digunakan secara efektif dan pendapatan daerah disimpan dengan aman. Ini juga penting untuk memastikan bahwa ekuitas daerah dapat ditingkatkan.

Keempat, pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa perencanaan jangka panjang dilakukan dengan baik. Perencanaan jangka panjang akan memastikan bahwa pemerintah daerah dapat memaksimalkan pendapatan, meningkatkan aset, dan mengelola risiko dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ekuitas daerah dapat ditingkatkan.

Ekuitas pemerintah daerah sangat penting untuk memberikan keuntungan bagi daerah. Untuk memastikan bahwa ekuitas daerah dapat ditingkatkan, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengelolaan aset dan pendapatan yang efektif dilakukan. Ini penting untuk memastikan bahwa aset digunakan secara efektif, pendapatan dapat disimpan dengan aman, dan perencanaan jangka panjang dapat dilakukan dengan baik. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, maka pemerintah daerah dapat memastikan bahwa ekuitas daerah dapat ditingkatkan.

Komponen Neraca Daerah:

1. Aset, Mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik aset lancar (seperti kas, piutang, dan persediaan) maupun aset tetap (seperti tanah, bangunan, dan infrastruktur).

2. Kewajiban, Mencakup seluruh utang yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, kepada pihak lain.
3. Ekuitas Dana, Menunjukkan selisih antara total aset dengan total kewajiban, mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah.

Neraca daerah sangat penting karena memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah, yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi kinerja keuangan daerah.

Tabel 2.93 Neraca Daerah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
	a. Aset lancar	109.056.750.076	106.461.292.724	105.842.926.304	119.426.907.193	122.607.602.676
	b. Investasi jangka panjang	91.251.109.273	91.662.294.326	109.383.375.514	142.465.852.038	152.172.188.335
	c. Aset tetap	1.189.516.846.185	1.223.323.281.580	1.235.829.852.989	1.274.797.573.025	1.278.451.298.133
	d. Aset lainnya	11.825.004.269	13.083.865.256	31.836.234.472	13.864.496.776	10.774.589.613
	JUMLAH ASET	1.401.649.709.803	1.434.530.733.886	1.482.892.389.279	1.550.554.829.032	1.564.005.678.757
2	KEWAJIBAN					
	a. Kewajiban jangka pendek	10.440.552.100	9.508.805.857	23.299.063.737	13.629.077.459	32.570.763.338
	b. Kewajiban jangka panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	10.440.552.100	9.508.805.857	23.299.063.737	13.629.077.459	32.570.763.338
3	EKUITAS					
	Ekuitas	1.391.209.157.703	1.425.021.928.029	1.459.593.325.542	1.536.925.751.573	1.532.472.716.939
	JUMLAH EKUITAS	1.391.209.157.703	1.425.021.928.029	1.459.593.325.542	1.536.925.751.573	1.532.472.716.939
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.401.649.709.803	1.434.530.733.886	1.482.892.389.279	1.550.554.829.032	1.565.043.480.277

Sumber: BKD Kota Payakumbuh, 2025

Dari tabel 2.93 di atas nampak bahwa posisi neraca keuangan pemerintah Kota Payakumbuh dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menggambarkan nilai aset setiap tahun berfluktuasi dan cenderung meningkat walaupun belum signifikan. Perhitungan neraca dilakukan setiap tahun per 31 Desember, pasca pandemi covid-19 beberapa tahun yang lalu cukup mempengaruhi terhadap kondisi perekonomian daerah sehingga kondisi nilai aset pada neraca Kota Payakumbuh per 31 Desember 2020 berjumlah sebesar Rp.1.401.649.709.803,- hingga pada periode per 31 Desember 2024 nilai aset daerah Kota Payakumbuh berjumlah Rp.1.565.043.480.277,-(*unaudited*). Sementara total kewajiban sampai akhir tahun 2024 berjumlah sebesar Rp.32.570.763.338,-(*unaudited*) dan nilai ekuitas dari tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung meningkat sebesar Rp.163.393.709.803,- dari Rp.1.401.649.709.803,- menjadi Rp.1.565.043.480.277,-

B. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026-2030

1) PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi pendapatan daerah dilakukan dengan menggunakan data historis lima tahun terakhir. Adapun perhitungan proyeksi dilakukan pada masing-masing komponen pada Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer dengan menggunakan asumsi kondisi perekonomian Kota Payakumbuh. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan rata-rata realisasi Pendapatan Daerah 2020 – 2024 yang hanya mencapai 4,56%, Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan kebijakan proyeksi pertumbuhan Pendapatan Daerah 2025-2030 terbagi secara proporsional pada tiap komponen Pendapatan Daerah, yaitu PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah.

Secara umum peningkatan pendapatan daerah tersebut diasumsikan akan dapat tercapai seiring dengan asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi yang diperkirakan akan meningkat pesat pasca Pandemi Covid-19. Pembangunan infrastruktur strategis dari pemerintah pusat, Provinsi dan Kota Payakumbuh yang akan selesai dalam lima tahun ke depan diharapkan akan semakin meningkatkan potensi ekonomi di wilayah pengembangan. Pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh peningkatan konsumsi masyarakat yang dapat ditangkap menjadi peluang pengembangan basis pajak dan retribusi. Peningkatan pendapatan asli daerah diasumsikan akan dapat dicapai melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Peningkatan pendapatan transfer diasumsikan akan dapat dicapai dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan akan meningkatkan transfer ke daerah. apalagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, memberikan keleluasaan pada daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030 yang disusun berdasarkan kinerja keuangan tahun 2020-2024, kebijakan keuangan

terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis. Proyeksi keuangan ini seyogyanya bersumber dari perangkat daerah yang mampu pendapatan dan belanja keuangan daerah.

Tabel 2.94 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN						
	a. Pendapatan Asli Daerah	147.847.509.292	175.006.083.744	715.852.351.756	725.453.408.156	734.395.952.105	723.952.351.756
	Pajak Daerah	41.673.402.980	62.923.605.069	203.884.596.480	203.987.596.480	204.987.596.480	205.987.596.480
	Retribusi Daerah	87.572.567.148	89.568.081.585	191.951.195.505	192.951.195.505	193.951.195.505	194.951.195.505
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.381.453.735	12.752.897.348	133.000.526.422	133.500.526.422	134.000.526.422	134.500.526.422
	Lain-Lain PAD yang sah	6.220.085.429	9.761.499.742	187.016.033.349	195.014.089.749	201.456.633.698	188.513.033.349
	b. Pendapatan Transfer	608.030.979.480	522.925.767.425	628.030.979.480	628.030.979.480	628.030.979.480	628.030.979.480
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	583.551.636.133	498.446.424.078	583.551.636.133	583.551.636.133	583.551.636.133	583.551.636.133
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.479.343.347	24.479.343.347	44.479.343.347	44.479.343.347	44.479.343.347	44.479.343.347
	c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
	Pendapatan Hibah	0	0	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	755.878.488.772	697.931.851.169	1.443.883.331.236	1.453.484.387.636	1.462.426.931.585	1.451.983.331.236
2	BELANJA						
	a. Belanja operasi	749.026.189.911	647.877.589.577	858.320.998.741	861.933.429.875	869.936.558.423	860.317.081.295
	Belanja Pegawai	427.164.999.371	407.503.314.766	427.164.999.371	427.164.999.371	427.164.999.371	427.164.999.371
	Belanja Barang dan Jasa	298.453.977.377	237.376.626.648	404.237.473.399	404.239.848.133	406.400.432.732	410.442.831.213
	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
	Belanja Hibah	22.270.713.163	1.972.248.163	25.818.525.971	29.428.582.371	35.271.126.320	21.609.250.711
	Belanja Bantuan Sosial	1.136.500.000	1.025.400.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
	b. Belanja modal	78,847,034,707	49.763.852.327	574.562.332.495	590.059.957.761	580.990.373.162	589.666.249.941
	Belanja Modal Tanah	1.786.010.650	220.450.000	106.447.498.447	106.947.498.447	107.447.498.447	107.947.498.447
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.545.795.232	19.293.939.444	56.861.093.387	70.349.928.829	33.838.764.271	62.065.651.681
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.587.381.533	11.322.398.975	108.159.897.103	109.159.897.103	110.159.897.103	111.159.897.103

NO	URAIAN		BASELINE TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.352.034.002	13.796.192.048	249.706.931.087	249.715.720.911	252.597.412.517	253.606.290.239
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.519.013.290	130.871.860	53.281.068.706	53.781.068.706	54.281.068.706	54.781.068.706
		Belanja Modal Aset lainnya	56.800.000	5.000.000.000	105.843.765	105.843.765	22.665.732.118	105.843.765
	c.	Belanja tak terduga	788,556,513	290.409.265	1.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000
		Belanja Tidak Terduga	788,556,513	290.409.265	1.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000
	d.	Belanja transfer	0	0	0	0	0	0
		Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0
		Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0
		JUMLAH BELANJA	828.661.781.131	697.931.851.169	1.433.883.331.236	1.453.484.387.636	1.452.426.931.585	1,451,983,331,236
		SURPLUS/DEFISIT	(72,783,292,359)	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0
3		PEMBIAYAAN	72,783,292,359	0	(10,000,000,000)	0	(10,000,000,000)	0
	a.	Penerimaan pembiayaan	72,783,292,359	0	0	0	0	0
		Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	72,783,292,359	0	0	0	0	0
	b.	Pengeluaran pembiayaan	0	0	10,000,000,000	-	10,000,000,000	0
		Penyertaan Modal Daerah	0	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0
		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0
		PEMBIAYAAN NETTO	72,783,292,359	0	(10,000,000,000)	0	(10,000,000,000)	0
		silpa tahun berkenaan	0	0	0	0	0	0

Sumber: BKD Kota Payakumbuh, 2025

Dari tabel 2.94 terlihat upaya pemerintah Kota Payakumbuh untuk memenuhi belanja mandatory terutama untuk belanja pegawai maksimal 30% dan belanja infrastruktur publik minimal sebesar 40%. Komitmen ini tidak hanya untuk kedua jenis belanja itu saja tapi juga komitmen untuk memenuhi belanja yang diarahkan lainnya seperti belanja fungsi pendidikan 10%, fungsi pengawasan 1% diluar gaji serta pengembangan SDM 0,16% dari total belanja daerah di tahun 2027.

Sementara untuk antisipasi pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2029, pemerintah Kota Payakumbuh juga telah mengalokasikan belanja hibah kepada penyelenggara pelaksanaan pemilihan umum. Besaran hibah ini mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan Kota Payakumbuh siap menyelesaikan pelaksanaan agenda 5 tahunan tersebut.

2). ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Upaya untuk mencapai target proyeksi pendapatan dan penerimaan daerah tahun 2025 sampai dengan 2030 akan dilakukan upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Secara rinci upaya-upaya dan strategi daerah dalam mencapai target pendapatan daerah sebagai berikut:

A). PENDAPATAN ASLI DAERAH

a. Peningkatan basis data perpajakan

Pemerintah daerah dapat meningkatkan basis data pajak melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan ulang terhadap data wajib pajak dan objek pajak.
2. Profilling Wajib Pajak.
3. Meningkatkan koordinasi internal Pemda antara lain dengan bagian penerbitan izin.
4. Memanfaatkan data pihak ketiga (KPP Pratama, dan BPN untuk PBB).

b. Penyesuaian dasar Pengenaan Pajak

Cara ini dapat dilakukan melalui menilai ulang atas dasar pengenaan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.

c. Penilaian, Penetapan, Penagihan dan Pemeriksaan

Pemerintah daerah bisa meningkatkan PAD dengan solusi ini dengan cara:

1. Di bidang penilaian dan penagihan dapat dikerjasamakan dengan DJP dan DJKN.
2. Di bidang penetapan, menyiapkan tenaga pemeriksa yang bersertifikat keahlian.

3. Di bidang pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan kejaksaan, Polri, BPK dan BPKP.
 4. Di bidang penagihan, menyiapkan tenaga juru sita.
- d. Modernisasi
1. Penguatan dibidang Teknologi Informasi terkait pendataan, penagihan dan pengolahan data pajak daerah, melakukan sistem monitoring transaksi secara online dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaporkan, memutakhirkan data, melakukan pembayaran secara online dengan menggunakan system informasi terintegrasi.
 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan basis data (Integrated data bases).
 3. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan misalnya E-SPTPD dan E-Payment.
 4. Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi: Pengelolaan data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah.
 5. Menyusun SOP pelayanan.
 6. Peningkatan SDM
 - a) Menambah jumlah diklat untuk ahli penilaian, penagihan dan pemeriksaan.
 - b) Menambah jumlah diklat terkait dengan praktik pemungutan perpajakan yang baik.
 - c) Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.
- e. Dalam rangka meningkatkan penerimaan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Kota Payakumbuh akan mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- f. Penyesuaian pendapatan daerah memperhatikan realisasi pada Semester I Tahun 2025

Permasalahan yang sering ditemui pada saat pemungutan pajak dan retribusi daerah dan masih menjadi kendala kedepannya, antara lain :

- a. Belum optimalnya realisasi PAD terutama pada retribusi daerah karena untuk pengambilan keputusan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan organisasi perangkat daerah yang mengelola retribusi
- b. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.
- c. Penghindaran Pajak.

Dalam mengatasi kendala dan permasalahan diatas, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui beberapa kebijakannya akan:

- a. Meningkatkan koordinasi yang lebih intens dengan organisasi perangkat daerah pengelola PAD untuk satu komando dalam hal pencapaian realisasi PAD terutama retribusi daerah
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum vertikal dan horizontal untuk melakukan tindakan penagihan dan pemberian sanksi (*law enforcement*) kepada wajib pajak yang tidak patuh sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Menggunakan sistem teknologi informasi untuk mendeteksi pemenuhan kewajiban wajib pajak.
- d. Penerapan sistem pembayaran non-Tunai pada beberapa sumber pendapatan retribusi daerah
- e. Melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga
- f. Mengoptimalkan pendapatan BLUD

B). PENDAPATAN TRANSFER

Upaya yang dilakukan dalam kaitannya memperoleh Pendapatan Transfer terutama Transfer Pemerintah Pusat yaitu sebagai berikut:

- a. Sinergisitas program strategis nasional dengan program yang direncanakan oleh pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan kinerja atas penyerapan dana transfer dan kepatuhan dalam pelaporan penggunaan atas penyaluran dana dari pusat baik dalam substansi maupun waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

C). LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1. Mengupayakan berbagai usulan program pembangunan yang dapat didanai melalui hibah dari pemerintah;
2. Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi;
3. Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk meraih bantuan keuangan dari Provinsi.

Selanjutnya, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh juga terus melakukan pengembangan dan terobosan melalui penciptaan keuangan kreatif dalam mencari sumber pendanaan berupa inovasi dalam mengelola, merencanakan, dan menggunakan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu sehingga dapat memberikan kontribusi lebih dalam pembangunan daerah. Adapun inovasi yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

1. Peningkatan akurasi data potensi pajak,
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pendapatan daerah yang berbasis teknologi informasi,
3. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan dan akses informasi yang akurat kepada masyarakat,
4. Penggalakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat,
5. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah,
6. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah, atau
7. Mencari sumber pendanaan lain melalui pinjaman daerah.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah diarahkan kepada pengelolaan pendapatan daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi daerah seperti optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, memperhatikan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah. Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil, proposional berdasarkan potensi dan pemerataan, serta memberi dorongan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka beberapa arah kebijakan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Optimalisasi Pajak Daerah Kendaraan Bermotor, dengan:
 - 1) Meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang saat ini hanya sekitar 50-60%. Ini dapat dicapai dengan menggunakan sistem digital untuk mempermudah pembayaran dan pengawasan,
 - 2) Program edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat pembayaran pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah,
 - 3) Mengintegrasikan data kendaraan dengan sistem Samsat Online untuk mempermudah identifikasi kendaraan yang belum bayar pajak, serta meningkatkan efisiensi penagihan.
- b) Sumber Pendapatan Lain, Terutama Aset, melalui
 - 1) Memaksimalkan pengelolaan aset daerah yang belum optimal, seperti tanah dan bangunan milik daerah yang dapat disewakan atau dijadikan objek kerjasama dengan pihak ketiga,
 - 2) Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan,
 - 3) Mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk *public-private partnership* (PPP) untuk mengelola aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

- c) Kerjasama dengan Pihak Ketiga, melalui:
- 1) Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam pengelolaan proyek besar yang dapat menghasilkan pendapatan baru, baik dalam bentuk pembangunan bersama maupun kerjasama untuk pengelolaan layanan publik,
 - 2) Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki keahlian dalam pembiayaan pembangunan daerah atau program keberlanjutan
- d) Pengembangan Kredit Karbon sebagai Sumber Pendapatan Daerah, melalui:
- 1) Identifikasi Potensi Sumber Kredit Karbon: Kota Payakumbuh dapat mengeksplorasi berbagai sektor yang berpotensi menghasilkan kredit karbon, seperti sektor kehutanan, perkebunan, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah. Proyek-proyek pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat diintegrasikan dalam mekanisme perdagangan karbon internasional,
 - 2) Program Penanaman Pohon dan Reboisasi: Mengembangkan program reboisasi dan konservasi hutan untuk memperoleh sertifikat kredit karbon. Program ini tidak hanya akan berkontribusi pada pengurangan emisi CO₂, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan jangka panjang bagi daerah,
 - 3) Pengelolaan Sampah: Implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis *zero waste* dapat menghasilkan kredit karbon melalui pengurangan emisi dari landfill dan daur ulang sampah organik menjadi kompos atau bioenergy,
 - 4) Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Kredit Karbon: Menyusun peraturan daerah yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan proyek-proyek kredit karbon di Kota Payakumbuh, termasuk mekanisme verifikasi, pemantauan, dan pelaporan emisi yang terlibat,
 - 5) Sertifikasi dan Penjualan Kredit Karbon: Menjalin kerjasama dengan lembaga internasional yang menyediakan platform untuk sertifikasi dan perdagangan kredit karbon. Pemerintah daerah dapat menjual kredit karbon kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan offset emisi untuk memenuhi kewajiban lingkungan mereka,
 - 6) Kerjasama dengan Pihak Ketiga: Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki platform untuk perdagangan kredit karbon dan perusahaan yang tertarik untuk berkontribusi pada pengurangan emisi melalui proyek lokal.
- e) Digitalisasi Pendapatan Daerah *Real-Time*, melalui:
- 1) Sistem Digital Pembayaran Pajak dan Retribusi: Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem digital yang memungkinkan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara real-time. Sistem ini dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan memungkinkan pemantauan pendapatan secara langsung oleh

pemerintah daerah,

- 2) Integrasi Data Pendapatan: Memastikan bahwa seluruh data pendapatan dari pajak, retribusi, dan penggunaan aset dapat terintegrasi dalam satu platform digital. Ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah,
 - 3) Laporan Keuangan dan Pemantauan *Real-Time*: Implementasi dashboard digital untuk pemantauan dan pelaporan pendapatan daerah secara real-time. Ini akan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data, serta mempercepat respons terhadap fluktuasi pendapatan
- f) Target Pendapatan Perangkat Daerah dari Retribusi dan Penggunaan Aset:
- 1) Penyusunan Target Pendapatan Perangkat Daerah: Setiap Perangkat Daerah akan diberi target pendapatan berdasarkan potensi retribusi dan penggunaan aset yang dimiliki. Misalnya, Dinas Perhubungan dapat memiliki target dari retribusi parkir, sementara Dinas Pekerjaan Umum dapat memperoleh pendapatan dari penggunaan aset bangunan milik daerah.
 - 2) Penetapan KPI untuk Perangkat Daerah: Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) untuk setiap Perangkat Daerah dalam hal pencapaian target pendapatan dari sektor-sektor tersebut. Penilaian kinerja Perangkat Daerah akan lebih terfokus pada pencapaian target pendapatan yang berkelanjutan dan realistis.

3). PROYEKSI BELANJA DAERAH

Analisis proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kota Payakumbuh untuk lima tahun mendatang dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai belanja langsung atau belanja program RPJMD. Analisis proyeksi belanja juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan belanja tidak langsung daerah serta pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga. Sedangkan, belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai dan barang dan jasa.

Analisis hasil proyeksi belanja selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran yang juga berkaitan dengan kapasitas penerimaan pembiayaan daerah untuk lima tahun mendatang. Adapun beberapa kebijakan terkait penentuan belanja daerah yang harus dianggarkan, antara lain:

1. Mengutamakan belanja daerah yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah/Prioritas Walikota.
2. Menganggarkan belanja program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- 2 Mengutamakan dukungan Program Strategis Nasional,
- 3 Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
- 4 Memenuhi alokasi persentase belanja daerah yang sudah ditentukan besaran dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5 Mendorong peningkatan belanja modal tiap tahun.
- 6 Mengakomodir belanja operasional yang merupakan belanja wajib dan mengikat karena terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang merupakan belanja kebutuhan aparatur yang wajib dipenuhi.
- 7 Pemenuhan kebutuhan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2029 yang dialokasikan langsung pada program, kegiatan dan sub kegiatan OPD tanpa melalui pembentukan Dana Cadangan

Secara rinci proyeksi belanja daerah untuk tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.95 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026-2030

No.	URAIAN	BASELINE TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
2	BELANJA						
	a. Belanja operasi	749.026.189.911	647.877.589.577	858.320.998.741	861.933.429.875	869.936.558.423	860.317.081.295
	Belanja Pegawai	427.164.999.371	407.503.314.766	427.164.999.371	427.164.999.371	427.164.999.371	427.164.999.371
	Belanja Barang dan Jasa	298.453.977.377	237.376.626.648	404.237.473.399	404.230.848.133	406.400.432.732	410.442.831.213
	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
	Belanja Hibah	22.270.713.163	1.972.248.163	25.818.525.971	29.428.582.371	35.271.126.320	21.609.250.711
	Belanja Bantuan Sosial	1.136.500.000	1.025.400.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
	b. Belanja modal	78.847.034.707	49.763.852.327	574.562.332.495	590.059.957.761	580.990.373.162	589.666.249.941
	Belanja Modal Tanah	1.786.010.650	220.450.000	106.447.498.447	106.947.498.447	107.447.498.447	107.947.498.447
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.545.795.232	19.293.939.444	56.861.093.387	70.349.928.829	33.838.764.271	62.065.651.681
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.587.381.533	11.322.398.975	108.159.897.103	109.159.897.103	110.159.897.103	111.159.897.103
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.352.034.002	13.796.192.048	249.706.931.087	249.715.720.911	252.597.412.517	253.606.290.239
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.519.013.290	130.871.860	53.281.068.706	53.781.068.706	54.281.068.706	54.781.068.706
	Belanja Modal Aset lainnya	56.800.000	5.000.000.000	105.843.765	105.843.765	22.665.732.118	105.843.765
	c. Belanja tak terduga	788.556.513	290.409.265	1.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000
	Belanja Tidak Terduga	788.556.513	1.000.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000
	d. Belanja transfer	0	0	0	0	0	0
	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0
	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	828.661.781.131	697.931.851.169	1.433.883.331.236	1.453.484.387.636	1.452.426.931.585	1.451.983.331.236

Sumber: BKD Kota Payakumbuh, 2025

4). ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Strategi pendapatan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya akan dilaksanakan melalui belanja daerah. Untuk itu maka belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Untuk kebijakan belanja daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh akan terus konsisten untuk menjaga agar belanja daerah dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar target belanja dapat dicapai, beberapa solusi yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Payakumbuh diantaranya adalah:

1. Penyusunan Perubahan APBD tepat waktu
2. Meningkatkan peran dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan Unit Layanan Pengadaan dalam verifikasi rencana kerja dan anggaran (RKA), hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan paket pekerjaan dalam RKA perubahan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa, sehingga diharapkan dapat mengurangi keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa;
3. Melakukan pembinaan kepada SKPD dalam menyusun rencana kegiatan terutama untuk melaksanakan kegiatan pengadaan belanja modal agar dapat dilaksanakan sesuai jadwal;
4. Penjadwalan kegiatan secara seksama dan pengendalian yang ketat terhadap pelaksanaan rencana kegiatan, melalui optimalisasi tugas pengendalian oleh pimpinan OPD;
5. Melakukan penjadwalan ulang terhadap kegiatan yang tidak prioritas atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;
6. Melakukan kerjasama dengan Inspektorat untuk melaksanakan reviu terutama terhadap kegiatan bersumber dari dana transfer;

Selanjutnya, Arah Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh untuk RPJMD Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Peraturan pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan kinerja lebih fokus pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan

sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam Perangkat Daerah, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari Penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Payakumbuh tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah. Berdasarkan kepada kedua peraturan tersebut maka penganggaran daerah dikelola berdasarkan fungsi:

- a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Perlunya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk memastikan efektivitas pembangunan. Prinsip penyusunan APBD harus menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah, dalam teknis penyusunan pemerintah daerah diharuskan menggunakan sistem informasi pemerintah daerah agar proses keuangan lebih transparan dan akuntabel, dan berbasis kinerja dalam pengelolaan anggaran dapat membantu mengurangi pemborosan.

- a. Perhitungan *Fix Cost* dan Efisiensi *Variable Cost* Per Perangkat Daerah, dengan cara:
 1. *Fix Cost*: Melakukan perhitungan rinci terhadap biaya tetap yang harus dipenuhi oleh setiap Perangkat Daerah, seperti gaji pegawai, sewa, dan pengeluaran tetap lainnya. Menetapkan batasan maksimal *fix cost* untuk menjaga keseimbangan anggaran.
 2. *Variable Cost*: Memastikan bahwa biaya variabel dapat dioptimalkan dengan cara efisiensi, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Pendekatan berbasis kinerja dalam pengelolaan anggaran dapat membantu mengurangi pemborosan.
- b. Perubahan *Mindset* untuk Efisiensi, melalui:

1. Menanamkan *mindset* kepada seluruh pegawai pemerintah bahwa meskipun biaya minimal, output yang besar tetap dapat tercapai dengan cara bekerja lebih cerdas melalui inovasi dan penerapan teknologi dalam pengelolaan anggaran dan layanan.
 2. Program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam manajemen keuangan daerah dan efisiensi operasional.
- c. Melakukan kerjasama dengan pihak lain, seperti:
1. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sektor swasta untuk pengelolaan proyek-proyek besar yang dapat mendatangkan pendapatan tambahan dan meningkatkan kualitas layanan publik.
 2. Penyusunan kemitraan strategis dengan lembaga internasional untuk mendapatkan akses kepada pendanaan atau teknologi yang mendukung efisiensi belanja daerah.
- d. Melakukan sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan RPJMN, yakni:
1. Memastikan bahwa semua program dan anggaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Payakumbuh selaras dengan tujuan RPJMN, terutama target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3% pada 2029.
 2. Identifikasi proyek prioritas yang mendukung tujuan nasional dan mendorong sinergi antara kebijakan fiskal daerah dan program pemerintah pusat.

5). PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH

Analisis proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pembiayaan daerah Kota Payakumbuh untuk lima tahun mendatang. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025-2030 diproyeksikan berasal dari silpa tahun anggaran sebelumnya dan tidak tertutup kemungkinan bersumber dari Penerimaan Pinjaman Daerah yang direncanakan akan diperoleh dari Lembaga keuangan Bank dan NonBank. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan akan digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah. Untuk proyeksi pembiayaan daerah dalam periode tahun 2025-2030, dapat dilihat pada tabel 2.96 berikut.

Tabel 2.96 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2030

URAIAN	BASELINE TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
PEMBIAYAAN	72.783.292. 359	0	(10.000.000. 000)	0	(10.000.000. 000)	0
a. Penerimaan pembiayaan	72.783.292. 359	0	0	0	0	0
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	72.783.292. 359	0	0	0	0	0

URAIAN	BASELINE TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
b. Pengeluaran pembiayaan	0	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0
Penyertaan Modal Daerah	0	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	72.783.292.359	0	(10.000.000.000)	0	(10.000.000.000)	0
Silpa tahun berkenaan	0	0	0	0	0	0

Sumber: BKD Kota Payakumbuh, 2025

6). ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Selanjutnya, untuk Strategi pembiayaan daerah terkait dengan upaya pemerintah dalam mengelola defisit maupun surplus anggaran. Pembiayaan netto dalam keadaan surplus maka Pemerintah Kota Payakumbuh dapat memanfaatkannya untuk membiayai pembangunan sesuai prioritas daerah atau dialokasikan sebagai dana cadangan. Jika pembiayaan netto dalam keadaan defisit maka strategi untuk menutupi defisit tersebut antara lain :

1. Melakukan pinjaman daerah untuk mendanai pembangunan yang bersumber dari pinjaman pusat, pemerintah daerah lainnya atau lembaga keuangan Bank/bukan Bank
2. Menerbitkan obligasi daerah yang berasal dari masyarakat yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan menghasilkan penerimaan kepada APBD.
3. Optimalisasi Silpa untuk belanja daerah, dengan cara:
 - a. Jika terdapat Silpa yang telah ditentukan penggunaannya, Pemerintah Kota Payakumbuh wajib menganggarkan silpa tersebut sesuai dengan penggunaannya
 - b. Dalam hal Silpa daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, Silpa dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah

Dalam hal Silpa tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kota Payakumbuh akan mengarahkan penggunaan Silpa tersebut untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi kepada pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk 5 (lima) tahun kedepan, Kota Payakumbuh Rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah 5 tahun ke depan akan mengacu pada kebijakan umum APBN 2025 yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan belanja modal dan infrastruktur, efisiensi belanja nonprioritas, serta peningkatan kualitas belanja serta penyelarasan antara pusat dan daerah melalui implementasi UU HKPD (Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan

Daerah). Kemampuan fiskal daerah yang kuat akan mendukung pembiayaan pengeluaran untuk pembangunan daerah dalam jangka panjang, namun juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara pendapatan daerah, kewenangan belanja, dan pembiayaan yang ada tidak memberatkan keuangan daerah.

UU HKPD akan mengatur pembagian kewenangan pendapatan dan belanja antara pusat dan daerah, sehingga rencana 5 tahunan daerah harus selaras dengan kerangka kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemampuan fiskal daerah harus ditingkatkan agar dapat membiayai program-program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas nasional dan daerah. Peningkatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi, dan didorong untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur

Dengan mempertimbangkan UU HKPD dan kemampuan fiskal daerah, Kota Payakumbuh sudah merencanakan sumber pendapatan, penggunaan belanja, dan strategi pembiayaan yang realistis dan berkelanjutan untuk 5 tahun ke depan.

7). PROYEKSI BELANJA BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA DAN EARMARK

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah khususnya terkait dengan *mandatory spending* terhadap beberapa belanja yang harus dipenuhi pada tahun 2027 atau 5 tahun semenjak UU tersebut dikeluarkan. Untuk belanja yang bersifat mandatory, Pemerintah Kota Payakumbuh selalu berkomitmen untuk memenuhi persyaratan persentase anggaran yang diamanatkan. Dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk belanja yang bersifat *mandatory*, sampai TA 2025 ini Pemerintah Kota Payakumbuh memang belum semuanya dapat dipenuhi mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, namun pemerintah Kota Payakumbuh selalu berupaya untuk memenuhi belanja minimal yang persyaratkan sebagaimana yang diamanatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana Kabupaten/Kota sampai tahun 2027 sudah harus memenuhi semua belanja tersebut. Strategi dan kebijakan yang tepat harus bisa diambil Kota Payakumbuh untuk memenuhi amanat tersebut. Sebagai gambaran dalam APBD TA 2025, belanja mandatory Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.97 Belanja Mandatory Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN BELANJA	BESARAN DISYARATKAN	PERSENTASE
1	Belanja Fungsi Pendidikan	20%	23,21%
2	Belanja Fungsi Kesehatan	-	39,18%
3	Belanja Infrastruktur Publik	40%	32,50%
4	Belanja Pegawai	30%	46,55%
5	Belanja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum	Memadai	Memadai

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dalam APBD TA 2025, Kota Payakumbuh sudah bisa memenuhi belanja fungsi Pendidikan dan fungsi kesehatan dan ini akan tetap menjadi belanja wajib yang harus disediakan anggaran yang cukup untuk tiap tahunnya. Walaupun belanja kesehatan tidak lagi menjadi belanja wajib sesuai amanah UU Kesehatan, akan tetapi kualitas belanja kesehatan perlu untuk diperkuat. Hal ini bertujuan agar kebijakan kesehatan yang disusun selaras dengan arah kebijakan kesehatan nasional.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh akan meningkatkan besaran dan kualitas belanja yang bersifat diarahkan. untuk belanja fungsi pendidikan ini biar selaras dengan kebijakan nasional. Beberapa kebijakan yang diambil antara lain :

1. Mengarahkan kebijakan belanja wajib pendidikan untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas.
2. Memprioritaskan belanja wajib pendidikan untuk program kegiatan yang mendukung pencapaian SPM pendidikan sesuai peraturan perundangan,
3. Melakukan pemutakhiran budget tagging dan budget tracking untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib pendidikan

8) ARAH KEBIJAKAN BELANJA BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA DAN EARMARK

Arah kebijakan terkait belanja pegawai 30% di tahun 2027 merujuk pada aturan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang membatasi belanja pegawai daerah maksimal 30% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya adalah untuk mendorong daerah lebih produktif dengan mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk belanja modal dan program kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk belanja rutin pegawai. Jika belanja pegawai melebihi 30%, daerah mungkin akan mengalami pengurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) atau kendala dalam pencairan Dana Transfer Umum.

Belanja *mandatory* lain yang menjadi perhatian Kota Payakumbuh sampai tahun 2027 adalah pemenuhan belanja pegawai maksimal 30%. Sesuai dengan Arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 bahwa untuk pemenuhan belanja pegawai 30% ada beberapa kebijakan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Moratorium penerimaan CPNS dan PPPK
2. Moratorium mutasi masuk ASN ke Kota Payakumbuh
3. Tidak memperpanjang kontrak PPPK
4. Melakukan restrukturisasi dan perampingan organisasi perangkat daerah
5. Peningkatan kualitas SDM ASN
6. Penerapan penerimaan tunjangan ASN dengan sistem *single salary*
7. Menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS berdasarkan analisis jabatan dan atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (*minus growth*),

Untuk belanja pegawai sampai tahun 2025, Kota Payakumbuh mengalokasikan belanja pegawai sebesar 46,55% diluar TPG dan Tambahan Penghasilan Guru. Angka ini termasuk semua komponen belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Pegawai BLUD. Kalau kita merujuk kepada arah kebijakan fiskal tahun 2025 bahwa akan melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat serta tunjangan kinerja daerah, maka besaran belanja pegawai Kota Payakumbuh untuk tahun 2025 sebesar 40,76%. dari total belanja daerah diluar belanja TPG dan Tamsil Guru. Persentase ini juga masih jauh dari target minimal 30% sebagaimana diamanatkan Pasal 146 ayat (1) UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Walaupun terasa berat untuk memenuhi target tersebut karena untuk belanja gaji ASN saja tanpa tambahan penghasilan, belanja pegawai sudah mencapai 37,20% ditambah lagi kebijakan pengangkatan PPPK yang juga akan menambah besaran belanja pegawai dan tentunya ini akan menjadi perhatian untuk mengurangi belanja pegawai sampai tahun 2027.

Sementara Belanja Infrastruktur publik juga belum sesuai atau belum dapat dipenuhi. Namun secara berangsur sampai tahun 2027, harus dapat kita penuhi minimal 40% akan tetap kita upayakan. Untuk belanja infrastruktur publik, dalam kerangka makro Nasional tahun 2025 mengamanatkan bahwa Arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 untuk mendorong pemenuhan belanja infrastruktur sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan belanja infrastruktur.

2. Melakukan budget tracking untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja infrastruktur.
3. Mengarahkan kebijakan belanja infrastruktur untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan investasi melalui perbaikan konektivitas.
4. Mengevaluasi masa transisi belanja infrastruktur akan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan arah kebijakan fiskal dalam kerangka makro ekonomi nasional tahun 2025, Pemerintah Kota Payakumbuh dalam APBD Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan belanja infrastruktur publik sebesar 32,50% atau mencapai Rp.233.230.129.814. Persentase ini masih jauh dari target minimal yang ditetapkan undang-undang. Beberapa upaya percepatan pembangunan infrastruktur akan dilakukan sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi daerah, mendorong peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam APBD tahun 2025 dan seterusnya, pembangunan Infrastruktur diarahkan pada sektor-sektor strategis yang mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan terkait belanja infrastruktur sebesar 40% di tahun 2027 adalah kebijakan wajib yang mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja infrastruktur pelayanan publik. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah dan mendukung prioritas pembangunan nasional di bidang infrastruktur. Pemerintah daerah memiliki waktu hingga tahun 2027 untuk memenuhi target ini secara bertahap. Disamping itu, kebijakan mandatory lain yang harus dipenuhi setiap tahun dan selalu jadi komitmen daerah untuk dipenuhi adalah :

1. Belanja terkait dengan opsen PKB dan opsen BBNKB yang harus dialokasikan paling sedikit 10 % untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan kota serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
2. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana diamanatkan dalam ayat (2) Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) paling rendah 10% digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur serapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah

4. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional

9). PROYEKSI KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, dihitung berdasarkan total penerimaan daerah dikurangi belanja wajib mengikat, antara lain belanja pegawai dan operasional Perangkat Daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah besarnya anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kapasitas riil kemampuan keuangan tersebut akan digunakan untuk membiayai program prioritas I, II, dan III. Yang dimaksud Prioritas I, antara lain belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas II adalah dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah, sedangkan Prioritas III meliputi belanja alokasi lainnya, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 2.98 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh

N O	URAIAN	BASELINE TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan Daerah	755.878. 488.772	697.931. 851.169	1.443.883 .331.236	1.453.484 .387.636	1.462.426 .931.585	1.451.983 .331.236
2	Penerimaan pembiayaan	72.783.2 92.359	0	0	0	0	0
	Total Penerimaan	828.661. 781.131	697.931. 851.169	1.443.883 .331.236	1.453.484 .387.636	1.462.426 .931.585	1.451.983 .331.236
	Dikurangi belanja mengikat:						
1	Belanja Pegawai	427.164. 999.371	407.503. 314.766	427.164.9 99.371	427.164.9 99.371	427.164.9 99.371	427.164.9 99.371
2	Belanja Operasional OPD	298.453. 977.377	237.376. 626.648	404.237.4 73.399	404.230.8 48.133	406.400.4 32.732	410.442.8 31.213
	Total Belanja Wajib dan Mengikat	725.618. 976.748	644.879. 941.414	831.402.4 72.770	831.395.8 47.504	833.565.4 32.103	837.607.8 30.584
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	103.042. 804.383	53.051.9 09.755	612.480.8 58.466	622.088.5 40.132	628.861.4 99.482	614.375.5 00.652

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2025

3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan didasarkan pada analisis masa lalu dan masa yang akan datang. Analisis masa lalu digunakan untuk menggambarkan permasalahan pembangunan dan analisis masa datang untuk mendapatkan isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan daerah mencakup berbagai aspek yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah secara merata. Dimana permasalahan pembangunan daerah memberikan gambaran mengenai suatu kondisi atau keadaan yang memiliki perbedaan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diinginkan. Kondisi aktual dapat dilihat berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah tahun sebelumnya sehingga akan menghasilkan gap atau perbedaan antara kinerja yang dihasilkan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan dimasa datang. Hasil evaluasi terhadap kondisi daerah menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas, sasaran pembangunan dan isu strategis daerah yang harus diselesaikan dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam periode tahun 2025-2029. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh tahun 2025-2029 sebagai berikut:

A. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan Kota Payakumbuh mengacu kepada hasil analisis kondisi pembangunan daerah pada bab sebelumnya selama beberapa tahun terakhir, yang dapat dilihat dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pelayanan publik maupun lingkungan. Ada 3 (tiga) aspek permasalahan yang dikelompokkan dalam permasalahan pembangunan daerah yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

1). PERMASALAHAN BERDASARKAN ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Belum optimalnya Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh berada di bawah Kota Bukittinggi dan Kota Solok. Pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh tahun 2024 sebesar 4.53 persen.
2. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan. Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, Kota Payakumbuh menghadapi tantangan

dalam penanggulangan kemiskinan, meskipun telah ada upaya dan kebijakan yang dilaksanakan namun penurunannya tidak signifikan. Upaya penurunan kemiskinan Kota Payakumbuh belum optimal dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan di kota lainnya di Sumatera Barat. Selama 5 (lima) tahun terakhir Kota Payakumbuh berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0.46 persen dari 5.65 persen tahun 2020 ke 5.19 persen pada tahun 2024.

3. Belum optimalnya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka. Tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Payakumbuh masih berada pada angka 4.87 persen. Dalam lima tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Payakumbuh menunjukkan angka fluktuatif yang relatif kecil.
4. Belum optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia. Indeks Pembangunan Manusia Kota Payakumbuh selama rentang tahun 2020 sampai tahun 2024 terjadi peningkatan dari angka 79.33 pada tahun 2020 menjadi 80.76 pada tahun 2024. Hal tersebut mengindikasikan bahwa capaian pembangunan manusia di Kota Payakumbuh sangat tinggi, namun masih di bawah IPM Kota Bukittinggi, dan di atas IPM Kota Solok dan Padang Panjang.
5. Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. Dalam 5 (lima) tahun terakhir kualitas kesehatan masyarakat di Kota Payakumbuh masih dalam kategori rendah, ditandai dengan adanya beberapa indikator pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka prevalensi stunting Kota Payakumbuh tahun 2024 sebesar 16.4 persen. Hal ini menggambarkan masih lemahnya pemenuhan gizi anak usia dini dan kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak dan makanan bergizi.
6. Rata-rata Lama Sekolah yang belum optimal. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2024 berada pada angka 10.89 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kota Payakumbuh sudah cukup baik dan cenderung naik setiap tahunnya.
7. Tingginya ketimpangan pendapatan Kota Payakumbuh/Distribusi pendapatan yang belum merata. Indeks Gini Kota Payakumbuh tahun 2024 masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0.3 sampai dengan 0.5. Pada tahun 2024 Indeks Gini Kota Payakumbuh sebesar 0.313 mengalami sedikit penurunan dibanding dari tahun sebelumnya, tetapi lebih tinggi dari Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat yaitu 0.283. Pada tahun 2024 Kota Payakumbuh menjadi Kota dengan Indeks Gini tertinggi di Provinsi Sumatera Barat.

2). PERMASALAHAN BERDASARKAN ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Masih tingginya angka ketergantungan penduduk Kota Payakumbuh. Pada tahun 2024 angka ketergantungan total Kota Payakumbuh sebesar 47.94, artinya setiap 100 orang penduduk usia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 47.94 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 37.04 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 10.90. Perlu peningkatan dalam menunjang daya saing daerah melalui pendidikan, pelatihan dan kursus keterampilan sesuai dengan tuntutan pasar kerja, di samping pelatihan-pelatihan untuk menciptakan *entrepreneur* yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
2. Belum optimalnya partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2024, jumlah penduduk yang bekerja di Kota Payakumbuh mengalami penurunan dari 74.137 orang menjadi 74.085 orang. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya peluang kerja, pemutusan hubungan kerja, dan peningkatan jumlah usia produktif yang tidak terserap pasar kerja. Angka pengangguran juga naik dari 3.770 orang di tahun 2023 menjadi 3.791 orang pada 2024, mencerminkan ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan pasar. Selain itu, jumlah angkatan kerja juga menurun tipis dari 77.907 menjadi 77.876 orang.

3). PERMASALAHAN BERDASARKAN ASPEK PELAYANAN UMUM

Permasalahan yang terjadi di daerah dapat diklasifikasikan berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam regulasi ini, urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah dikelompokkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap permasalahan yang muncul di daerah dapat dianalisis dan disesuaikan dengan tingkat pemerintahan yang berwenang dalam menanganinya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi:

A). URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

(1). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan memegang peran strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan dalam pembangunan sektor pendidikan akan berkontribusi pada terbentuknya individu yang mandiri dan memiliki martabat, dengan landasan nilai-nilai spiritual serta semangat kebangsaan. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian terkait

dengan urusan pendidikan di Kota Payakumbuh antara lain:

- a. Masih rendahnya kualitas kompetensi guru/tenaga pendidik
- b. Adanya ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah yang berdampak pada efektifitas pembelajaran dan pemenuhan standar Rombongan Belajar (Rombel).
- c. Belum optimalnya capaian kompetensi minimum literasi dan numerasi pada satuan pendidikan.
- d. Terbatasnya ketersediaan dan kualitas lembaga pendidikan keterampilan/pendidikan vokasi.
- e. Belum optimalnya upaya penanganan dan reintegrasi Anak Tidak Sekolah (ATS)/Anak Putus Sekolah.
- f. Rendahnya penerapan transformasi digital dan pendekatan bilingual di satuan pendidikan.
- g. Belum optimalnya pengembangan dan implementasi kurikulum Muatan Lokal (Mulok) yang kontekstual dan berbasis potensi daerah.
- h. Belum optimalnya internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter di lingkungan satuan pendidikan.

(2). URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan elemen strategis dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan tingkat kesehatan seluruh lapisan masyarakat, mencakup setiap tahapan kehidupan mulai dari masa kehamilan hingga usia lanjut. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Payakumbuh masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan primer.
- b. Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan lanjutan.
- c. Masih belum optimalnya kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional.
- d. Belum optimalnya pelayanan kesehatan siklus hidup dan gizi masyarakat.
- e. Masih belum optimalnya ketahanan kesehatan dan pengendalian penyakit.
- f. Masih rendahnya cakupan imunisasi.
- g. Masih tingginya angka prevalensi stunting.

(3). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sebuah daerah karena berhubungan langsung dengan penyediaan infrastruktur dasar dan pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan untuk mendukung kehidupan masyarakat serta pertumbuhan

ekonomi nasional daerah. Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

- a. Belum optimalnya infrastruktur pelayanan dasar.
- b. Masih rendahnya kesesuaian standar dan fungsi infrastruktur jalan.
- c. Tingginya resiko banjir dan daya rusak sungai.
- d. Belum optimalnya kinerja pengelolaan irigasi.
- e. Belum tertatanya bangunan dan lingkungan kawasan strategis perkotaan.
- f. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan rencana tata ruang.
- g. Belum optimalnya pengelolaan sanitasi aman.
- h. Belum adanya infrastruktur pengolahan sampah yang representatif.

(4). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Perumahan dan kawasan pemukiman menjadi salah satu urusan yang strategis dalam menjamin hak dasar masyarakat atas tempat tinggal yang layak, aman dan terjangkau. Selain itu kawasan pemukiman yang tertata dengan baik akan mendukung pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

- a. Masih belum optimalnya pembangunan rumah layak huni.
- b. Belum optimalnya pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan pemukiman.
- c. Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah (*Backlog Rumah*) yang masih tinggi.

(5). URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Untuk mewujudkan kondisi wilayah yang lebih kondusif di Kota Payakumbuh, telah dilakukan berbagai langkah strategis, seperti peningkatan ketertiban umum dan pelaksanaan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Kendati demikian, sejumlah tantangan dan permasalahan masih memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut.

- a. Masih adanya kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Masih terdapat pelanggaran Perda dan Perkada.
- c. Belum optimalnya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana.

(6). URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL

Upaya pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari

strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, serta menciptakan kehidupan yang bermartabat dan layak. Pelaksanaannya mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kota Payakumbuh terus menjalankan program-program tersebut secara berkelanjutan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, antara lain:

- a. Belum optimalnya kualitas data kemiskinan yang komprehensif, valid dan terintegrasi.
- b. Belum optimalnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

B). URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

(1). URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA

Dalam menurunkan angka pengangguran berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh baik dari segi peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, namun secara umum belum mampu menghadapi tantangan kebutuhan pasar ekonomi global. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian kedepan antara lain:

- a. Rendahnya produktivitas tenaga kerja.
- b. Rendahnya daya saing pencari kerja.
- c. Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas.
- d. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja.

(2). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pembangunan sumber daya manusia yang berperspektif gender dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi dalam berbagai aspek kehidupan. Di samping itu, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dipandang strategis dalam memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga, melalui peran serta aktif mereka dalam proses pembangunan. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara serius oleh pemerintah diantaranya:

- a. Belum optimalnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
- b. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan difabel.
- c. Masih rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.

(3). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem komprehensif yang meliputi empat subsistem utama, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan, serta keamanan pangan. Dalam upaya pencapaian ketahanan pangan yang optimal, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan dan memerlukan penanganan, di antaranya:

- a. Masih rendahnya konsumsi kelompok pangan tertentu sesuai Angka Kecukupan Energi (AKE).
- b. Masih belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan.
- c. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan.
- d. Terbatasnya ketersediaan dan fluktuasi harga pangan pokok dan pangan lainnya

(4). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN

Dalam proses pembangunan, kepastian terhadap status dan pemanfaatan lahan menjadi hal yang sangat penting, khususnya dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi lahan pertanian, mendukung pembangunan infrastruktur strategis, serta melindungi aset tanah. Namun demikian, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai permasalahan di bidang pertanahan yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a. Belum optimalnya penatagunaan tanah pemerintah dan tanah konsolidasi.
- b. Masih rendahnya pemanfaatan tanah ulayat sebagai faktor pendorong dan menjadi modal ekonomi kota.
- c. Belum optimlanya pengelolaan tanah untuk program strategis kota.

(5). URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam pelaksanaanya, ditemukan beberapa permasalahan meliputi:

- a. Belum optimalnya pengelolaan persampahan kota.
- b. Belum optimalnya upaya pengelolaan lingkungan.
- c. Belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau publik.

(6). URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

Penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi secara nasional menjadi fondasi utama dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Data kependudukan memegang peranan strategis sebagai dasar penetapan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

daerah, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan di berbagai bidang. Namun demikian, sampai saat ini masih terdapat sejumlah permasalahan yaitu:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan.

(7). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pemberdayaan masyarakat menjadi elemen penting dalam mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan. Melalui pemberdayaan, masyarakat didorong untuk memiliki inisiatif dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan ekonomi maupun sosial, sebagai upaya memperbaiki kondisi kehidupannya secara mandiri dan berkelanjutan. Namun demikian, proses pemberdayaan dan pembangunan berbasis masyarakat ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- b. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan, pemerintahan dan swasta dalam pemberdayaan masyarakat.

(8). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pelaksanaan pengendalian penduduk dan program keluarga berencana merupakan langkah strategis dalam mengupayakan keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung sumber daya yang tersedia. Pertambahan jumlah penduduk perlu diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar guna menjamin kualitas hidup yang layak bagi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat berbagai isu yang memerlukan perhatian, seperti :

- a. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan keluarga.
- b. Masih rendahnya kemauan masyarakat dalam ber KB.
- c. Tingginya pertumbuhan penduduk.

(9). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN

Transportasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi serta mendukung pengembangan wilayah di Kota Payakumbuh. Meskipun demikian, sektor perhubungan masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. Belum tersedianya tempat parkir yang representatif.
- b. Belum optimalnya pengelolaan terminal penumpang dan angkutan barang.
- c. Belum adanya smart transportation di Kota Payakumbuh.

(10). URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan penggunaan website perlu terus ditingkatkan guna memperkuat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah kendala dan permasalahan yang perlu segera diatasi, antara lain:

- a. Keterbatasan Infrastruktur jaringan dan Konektivitas Antar Wilayah.
- b. Belum optimalnya penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan.

(11). URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Payakumbuh, sektor mikro merupakan salah satu tulang punggung ekonomi daerah, terutama dengan tingginya jumlah pelaku usaha mikro di bidang kuliner, kerajinan, dan perdagangan. Namun demikian, pengembangan sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi antara lain:

- a. Belum optimalnya pengembangan dan penguatan koperasi.
- b. Belum optimalnya pengembangan dan daya saing Usaha Mikro.

(12). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL

Investasi memegang peranan penting sebagai salah satu motor penggerak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kendati demikian, dalam upaya mendorong peningkatan realisasi investasi, masih dijumpai berbagai permasalahan yaitu:

- a. Masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam menaati aturan berusaha.
- b. Belum optimalnya pengelolaan potensi investasi daerah.
- c. Masih lemahnya kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat.

(13). URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam pembangunan masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya peran pemuda dalam Pembangunan.
- b. Belum optimalnya prestasi pemuda dan olah raga.

(14). URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK

Peningkatan kualitas penyediaan data dan informasi yang dapat dipercaya, mutakhir, dan sesuai dengan kebutuhan menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi daerah yang valid dan terintegrasi.
- b. Belum optimalnya sistem informasi satu data yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.

(15). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN

Penguatan sistem keamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi perlu terus dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi yang terus mengalami perubahan dan tantangan yang semakin kompleks. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Tingkat Kesadaran terhadap Cyber Security masih rendah.
- b. Belum optimalnya keamanan informasi pemerintah daerah.

(16). URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan kebudayaan antara lain:

- a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya.
- b. Belum optimalnya promosi budaya daerah.
- c. Belum optimalnya peran kelembagaan adat dan budaya dalam pelestarian budaya.

(17). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN

Urusan perpustakaan merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan budaya literasi masyarakat. Perpustakaan berperan sebagai pusat belajar yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Belum optimalnya pemanfaat teknologi informasi dalam pengelolaan layanan perpustakaan.
- b. Rendahnya minat baca/ literasi masyarakat yang berdampak pada kurang optimalnya layanan perpustakaan.

(18). URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan dukungan dari sistem penyelenggaraan kearsipan yang menyeluruh dan terintegrasi. Penyelenggaraan kearsipan harus mampu

menjamin ketersediaan, keutuhan, dan keamanan arsip yang autentik dan dapat dipercaya, sehingga berfungsi sebagai alat bukti pertanggungjawaban yang sah. Selain itu, arsip tersebut harus dapat diakses dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan urusan kearsipan masih ditemui beberapa permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip secara tertib sesuai dengan kaidah kearsipan.
- b. Masih rendahnya penelusuran dan penyelamatan arsip bernilai sejarah.

C). URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

(1). URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan bidang kelautan dan perikanan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun memiliki potensi besar, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan antara lain:

- a. Alih fungsi lahan budidaya perikanan.
- b. Masih rendahnya produktifitas sektor perikanan.

(2). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA

Sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Selain memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, sektor ini juga memiliki peran penting dalam memberdayakan perempuan dan generasi muda melalui pengembangan kreativitas, serta mendukung pengentasan kemiskinan melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun demikian, dalam proses pengembangannya, masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut, antara lain:

- a. Belum optimalnya pengembangan wisata daerah.
- b. Belum tersedianya wisata unggulan daerah.
- c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif daerah.

(3). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

- a. Belum optimalnya produktifitas hasil pertanian.
- b. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan lahan pertanian.
- c. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.

(4). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN

Pembangunan sektor perdagangan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, menciptakan lapangan usaha, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong terbentuknya harga yang wajar dan pemerataan pendapatan. Sektor ini juga sangat penting untuk terus dikembangkan karena memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor lain, seperti pertanian, industri, pertambangan, keuangan, transportasi, dan telekomunikasi. Meski demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan perdagangan, antara lain:

- a. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar serta pedagang kaki lima.
- b. Belum optimalnya pengelolaan asset pasar pertokoan.
- c. Masih lemahnya Perlindungan Konsumen.
- d. Masih rendahnya nilai ekspor produk dan komoditas perdagangan.

(5). URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN

Pembangunan sektor industri memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian karena nilai kapitalisasi modal yang besar, daya serap tenaga kerja yang tinggi, dan kemampuannya menciptakan nilai tambah dari bahan baku. Oleh karena itu, sektor ini dapat mendorong pembangunan sektor lain dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun masih ada beberapa permasalahan yang menjadi perhatian yaitu :

- a. Masih rendahnya nilai produksi industri.
- b. Masih rendahnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan.
- c. Masih rendahnya penguasaan teknologi industri.
- d. Belum optimalnya pengelolaan limbah industri.
- e. Masih rendahnya kualitas dan standarisasi produk industri.

D). UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

(1). UNSUR SEKRETARIAT DAERAH

- a. Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel.
- b. Belum optimalnya penataan organisasi dan tata laksana pemerintahan
- c. Belum optimalnya penguatan pembinaan lembaga keagamaan dan peningkatan kualitas mental masyarakat yang inklusif dan berkarakter

(2). UNSUR SEKRETARIAT DPRD

- a. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

- b. Belum optimalnya peran DPRD dalam penataan produk hukum.

E). UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

(1). UNSUR PERENCANAAN

Perencanaan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Kebutuhan terhadap perencanaan yang lebih partisipatif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin meningkat, seiring dengan perkembangan pembangunan yang semakin cepat, tidak dapat diprediksi. Seluruh dinamika ini harus diintegrasikan sebagai bagian dari masukan dalam penyusunan rencana pembangunan. Namun demikian, terdapat berbagai permasalahan dalam proses perencanaan yaitu:

- a. Belum optimalnya kualitas perencanaan.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi dalam perumusan perencanaan pembangunan.

(2). UNSUR KEUANGAN

Salah satu bentuk pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel yang akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain:

- a. Belum optimalnya pengelolaan asset daerah.
- b. Terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan daerah.
- c. Belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah.

(3). UNSUR KEPEGAWAIAN

Untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, dibutuhkan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tangguh, berintegritas, profesional, netral, serta terbebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, dalam upaya mewujudkan kondisi ideal tersebut, masih dijumpai sejumlah permasalahan yaitu:

- a. Belum optimalnya penerapan merit system.
- b. Belum optimalnya manajemen pengelolaan ASN.

(4). UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pengembangan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja baik pada tingkat individu maupun institusi merupakan bagian yang sangat krusial dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Kompetensi yang memadai akan memastikan setiap aparatur pemerintah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Beberapa permasalahan yang dihadapi sampai saat ini antara lain:

- a. Belum optimalnya pengembangan karir dan pelatihan yang terstruktur.
- b. Belum optimalnya pengembangan SDM ASN.

(5). UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kebutuhan akan hasil-hasil penelitian dan pengembangan (litbang) semakin meningkat sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yaitu :

- a. Kebijakan kelitbangan yang belum sepenuhnya mendukung inovasi dan riset terapan.
- b. Belum optimalnya peran perangkat daerah dalam pengembangan inovasi daerah.
- c. Belum terintegrasinya pelaksanaan kajian pembangunan antar perangkat daerah.

F). UNSUR PENGAWASAN

Pelaksanaan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan terkoordinasi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di tengah meningkatnya harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih responsif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. Belum optimalnya pengawasan APIP
- b. Belum optimalnya penerapan SPIP.
- c. Belum optimalnya penguatan kapasitas APIP.

G). UNSUR KEWILAYAHAN

- a. Belum optimalnya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan.
- b. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan peran aktif Lembaga Kemasyarakatan.
- c. Belum optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
- d. Belum lengkapnya sarana prasarana pelayanan.

H). UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas kehidupan demokrasi, ketertiban umum, pendidikan politik, menjaga kerukunan antar umat beragama, namun demikian masih ada permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. Belum optimal upaya penanganan potensi konflik sosial.
- b. Masih rendahnya pengawasan dan pendampingan organisasi masyarakat.
- c. Belum optimalnya peran serta ormas dalam Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.
- d. Rendahnya pengawasan terhadap izin tinggal WNA.

4). PERMASALAHAN TERKAIT KAJIAN LINGKUNGAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD adalah proses analisis sistematis yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS berfungsi sebagai alat bantu dalam perencanaan pembangunan daerah agar Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang disusun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Kota Payakumbuh dalam KLHS RPJMD 2025-2029 sebagai berikut:

Permasalahan berdasarkan hasil konsultasi Publik:

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah
2. Penurunan kualitas air
3. Peningkatan alih fungsi lahan
4. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi
5. Belum optimalnya kualitas pendidikan
6. Belum optimalnya potensi pariwisata dan budaya
7. Ancaman ketahanan pangan
8. Lemahnya penegakan hukum
9. Masih tingginya angka stunting dan penyakit tidak menular

Permasalahan berdasarkan analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB):

1. 43% luas Kota Payakumbuh mempunyai Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) air terlampaui.
2. 71% Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) air dalam kondisi kritis berat.
3. 1.537, 21 Ha berada pada resiko multi bahaya tinggi.
4. 29% luas wilayah Kota Payakumbuh mempunyai jasa lingkungan hidup kategori sangat rendah dan rendah.
5. Produksi padi Kota Payakumbuh turun 5,02% pada tahun 2023.
6. Empat nagari mempunyai kerentanan perubahan iklim kategori tinggi.
7. Belum adanya proklamasi yang berkelanjutan di Kota Payakumbuh.
8. Keanekaragaman hayati (flora dan fauna) di Kota Payakumbuh sudah banyak yang terdegradasi.

9. Turunnya persentase sampah yang terkelola.
10. Penurunan IKLH Tahun 2023.

Permasalahan berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kota Payakumbuh:

1. Pengelolaan persampahan
2. Penurunan kualitas dan kuantitas air
3. Alih fungsi lahan
4. Pengelolaan sampah.
5. Sumber air baku
6. Ruang Terbuka Hijau
7. Pengelolaan limbah cair
8. Kawasan rawan bencana

B. ISU STRATEGIS DAERAH

1). IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS

Identifikasi isu strategis lingkungan dalam RPJMD harus mempertimbangkan keterkaitan antara isu global, nasional, dan regional. Dengan memahami permasalahan lingkungan pada berbagai tingkatan, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebijakan nasional serta komitmen global terhadap pelestarian lingkungan. Isu-isu ini dapat memengaruhi pembangunan daerah secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu dianalisis secara komprehensif agar kebijakan yang disusun dalam RPJMD 2025-2029 mampu menjawab tantangan yang ada.

Dengan mengacu pada isu lingkungan dinamis pemerintah daerah dapat menyusun isu strategis lingkungan yang relevan, berbasis data, serta sesuai dengan perkembangan dinamika lingkungan global, nasional, dan regional. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD 2025-2029 lebih responsif, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebijakan yang lebih luas.

Tabel 2.99 Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
Angka Partisipasi Kasar - APK PAUD Tahun 2024: 44,17% - APK SD/MI/Paket A Tahun 2024: 102,23% - APK SMP/MTs/Paket B Tahun 2024: 106,94%	1. Masih rendahnya kualitas kompetensi guru/tenaga pendidik 2. Adanya ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah yang berdampak pada efektifitas pembelajaran dan pemenuhan standar rombongan belajar (rombel). 3. Belum optimalnya capaian kompetensi minimum literasi dan numerasi pada satuan pendidikan. 4. Terbatasnya ketersediaan dan kualitas lembaga pendidikan keterampilan/ pendidikan vokasi. 5. Belum optimalnya upaya penanganan dan reintegrasi Anak Tidak Sekolah (ATS)/ anak putus		Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Menekankan pentingnya memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara, memperkuat sistem demokrasi, serta menjunjung tinggi HAM. Langkah ini bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Tujuan ke-3 : Menjamin kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia Tujuan ke-4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Asta Cita ke-4 : Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Misi ke-1 Provinsi Sumbar : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	1. Masih belum meratanya kualitas pendidikan yang bermutu
Angka Partisipasi Murni - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Tahun 2024: 97,52% - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Tahun 2024: 80,01% - Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik Tahun 2024 :57,86% - Persentase satuan pendidikan (SD/SMP) yang terakreditasi A Tahun 2024: 76% - Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tahun 2024: 67%						
Angka Putus Sekolah						

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
- Angka Putus Sekolah SMP tahun 2024 : 6 orang Anak Tidak Sekolah (ATS) - Anak Tidak Sekolah Tahun 2024 jenjang pendidikan dasar sebanyak : 147 orang - Anak Tidak Sekolah Tahun 2024 jenjang pendidikan menengah sebanyak : 213 orang	sekolah. 6. Rendahnya penerapan transformasi digital dan pendekatan bilingual di satuan pendidikan. 7. Belum optimalnya pengembangan dan implementasi kurikulum muatan local (Mulok) yang kontekstual dan berbasis potensi daerah. 8. Belum optimalnya internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter di lingkungan satuan pendidikan.		Tujuan ke-5 : Mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan Perempuan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1. Indek Keluarga Sehat Tahun 2024 adalah 0.35% 2. Prevalensi stunting pada balita Tahun 2024 adalah 16,4% 3. Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan Tahun 2024 adalah 2,33% 4. Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi Tahun 2024 adalah 100%	1. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan primer. 2. Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan lanjutan. 3. Masih belum optimalnya kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia Tujuan ke-6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Asta Cita ke-4 : Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Misi ke-1 Provinsi Sumbar : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	1. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan prilaku hidup sehat

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
5. Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Tahun 2024 adalah 100% 6. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Tahun 2024 adalah 100% 7. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Tahun 2024 adalah 100% 8. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standard Tahun 2024 adalah 100% 9. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard Tahun 2024 adalah 100% 10. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard Tahun 2024 adalah 92,78% 11. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard Tahun 2024 adalah 100% 12. Persentase penderita hipertensi yang	4. Belum optimalnya pelayanan kesehatan siklus hidup dan gizi masyarakat. 5. Masih belum optimalnya ketahanan kesehatan dan pengendalian penyakit. 6. Masih rendahnya cakupan imunisasi. 7. Masih tingginya angka prevalensi stunting.					

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard Tahun 2024 adalah 100% 13. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard Tahun 2024 adalah 100% 14. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard Tahun 2024 adalah 100% 15. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standard Tahun 2024 adalah 100% 16. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard Tahun 2024 adalah 100%						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1. Persentase rumah yg terlayani air minum perpipaan Tahun 2024 adalah 91% 2. Persentase Pelayanan Air Minum Tahun 2024 adalah 100% 3. Persentase irigasi dengan berkinerja baik Tahun 2024 adalah 94,5%	1. Belum optimalnya infrastruktur pelayanan dasar 2. Masih rendahnya kesesuaian standar dan fungsi infrastruktur jalan. 3. Tingginya resiko banjir dan daya	1. Pengelolaan sampah 2. Penurunan kualitas dan kuantitas air 3. Alih fungsi lahan 4. Sumber air baku 5. Ruang terbuka hijau	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Asta Cita ke-2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Misi ke-5 Provinsi Sumbar : Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana	1. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan 2. Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan lingkungan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
4. Persentase Penataan sungai Tahun 2024 adalah 28,21% 5. Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap Tahun 2024 adalah 85,82% 6. Persentase jalan kota yang memiliki drainase Tahun 2024 adalah 68,97% 7. Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai dokumen tata ruang Tahun 2024 adalah 38,27% 8. Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan Tahun 2024 adalah 71,98% 9. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Tahun 2024 adalah 80,36% 10. Rasio kepatuhan IMB kab/kota Tahun 2024 adalah 100% 11. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota Tahun 2024 adalah 85,82% 12. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Tahun 2024 adalah 0,64 13. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Tahun 2024 adalah 100%	rusak sungai yang rusak 4. Belum optimalnya kinerja pengelolaan irigasi. 5. Belum tertatanya bangunan dan lingkungan kawasan strategis perkotaan. 6. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan rencana tata ruang. 7. Belum optimalnya pengelolaan sanitasi 8. Belum adanya infrastruktur pengolahan sampah yang representative	6. Pengelolaan limbah cair 7. Kawasan rawan bencana	Tujuan ke-9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi Tujuan ke-11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan			

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1. Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2024 adalah 97,30% 2. Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman Tahun 2024 adalah 22,87% 3. Persentase penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah 24,20% 4. Persentase Kawasan Pemukiman Kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani Tahun 2024 adalah 0% 5. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Tahun 2024 adalah 2.69% 6. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum) Tahun 2024 adalah 36.28%	1. Masih belum optimalnya pembangunan rumah layak huni. 2. Belum optimalnya pengelolaan prasarana sarana utilitas (PSU) perumahan dan kawasan pemukiman 3. Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah (<i>Backlog Rumah</i>) yang masih tinggi.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-1: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun Tujuan ke-6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Tujuan ke-11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.	Asta Cita ke-6 : Membanguna dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Misi ke-3 Provinsi Sumbar : Nagari/desa sebagai basis kemajuan	1. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
Penanggulangan Bencana: 1. Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yg siap menghadapi bencana Tahun 2024 adalah 100%	Belum optimalnya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana.	Kawasan rawan bencana	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) : Tujuan ke-9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan	Asta Cita ke-8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta	Misi ke-5 Provinsi Sumbar : Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana	Penanggulangan Bencana: 1. Masih adanya gangguan ketentraman dan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
2. Persentase kejadian bencana yg bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana Tahun 2024 adalah 100% 3. Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana Tahun 2024 adalah 100% 4. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2024 adalah 100% 5. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Tahun 2024 adalah 100% 6. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2024 adalah 100%			industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi Tujuan ke-11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan Tujuan ke-13: Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	peningkatan toleransi antarumat beragama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur		ketertiban ditengah masyarakat
Satpol PP dan Damkar 1. Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum, tahun 2024 adalah 100%. 2. Persentase penyelesaian gangguan Trantibum tahun 2024 adalah 100% 3. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan tahun 2024 100% 4. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tahun 2024 100%	1. Masih adanya kasus gangguan ketentraman dan ketrtiban masyarakat. 2. Masih terdapat pelanggaran Perda dan Perkada		Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-16 : Memperkuat masyarakat yang Inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untul semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Asta Cita ke-8 : Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur	Misi ke-6 Provinsi Sumbar : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	1. Masih adanya gangguan ketentraman, dan ketertiban umum di tengah masyarakat

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
1. Tingkat Kemiskinan tahun 2024 adalah 5.19 2. Persentase PPKS yang terlayani tahun 2024 adalah 100 persen 3. Persentase penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM tahun 2024 adalah 100 persen 4. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota tahun 2024 adalah 100 persen	1. Belum optimalnya kualitas data kemiskinan yang komprehensif, valid dan terintegrasi. 2. Belum optimalnya kemandirian PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).		Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-1 : Mengakhirl segala bentuk kemiskinan dimanapun Tujuan ke-2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan Tujuan ke -10 : Mengurangi kesenjangan Intra dan antarnegara.	Asta Cita ke-4 : Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran perempuan, Pemuda, Generasi Milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas Asta Cita ke-6 : Membanguna dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Misi ke-3 Provinsi Sumbar : Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan	1. Masih tingginya tingkat kemiskinan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA						
1. Tingkat Pengangguran tahun 2024 adalah 4.87% 2. Persentase serapan tenaga kerja tahun 2024 adalah 95.13% 3. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi tahun 2024 adalah 47.90%	1. Rendahnya produktivitas tenaga kerja. 2. Rendahnya daya saing pencari kerja. 3. Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas.	Berdasarkan Analisa capaian TPB: Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak (Analisa capaian TPB)	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-8 : Meningkatkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta	Asta Cita ke-4 : Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran	Misi ke-4 Provinsi Sumbar : Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera Bagian Barat	1. Masih tingginya kesenjangan pendapatan antar masyarakat

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
4. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB.LKS Bipartit. Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) tahun 2024 adalah 41.27% 5. Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota tahun 2024 adalah 51.58%		Berdasarkan karakteristik wilayah 1. Masih rendahnya jumlah pekerja industri pariwisata 2. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	pekerjaan yang layak untuk semua.	perempuan, Pemuda, Generasi Milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas		
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1. Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024 adalah 98.93 2. Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2022 adalah 71.21 3. Tingkat kategori capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2024 adalah Nindya 4. Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA) tahun 2024 adalah Madya 5. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan) tahun 2024 adalah 1,92	1. Belum optimalnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. 2. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan difabel. 3. Masih rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-5: Mencapai kesetaraan dan Memberdayaan Perempuan Tujuan ke-8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Tujuan ke-16: Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan	Asta Cita ke-4 : Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran perempuan, Pemuda, Generasi Milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Misi ke-6 Provinsi Sumbar : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
6. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota tahun 2024 adalah 100%			berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.			
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN						
1. Ketersediaan Pangan Utama tahun 2024 yaitu 19.780 ton 2. Skor PPH Konsumsi tahun 2024 yaitu 87,7 skor 3. Tingkat Keamanan Pangan tahun 2024 yaitu sedang 4. Stabilisasi harga Beras tahun 2024 yaitu 1,63% 5. Stabilisasi harga Cabe tahun 2024 yaitu 20,69% 6. Stabilisasi harga Bawang tahun 2024 yaitu 13,40% 7. Indeks Ketahanan Pangan tahun 2024 yaitu 89,33 indeks 8. Persentase Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2024 yaitu 145,66%	1. Masih rendahnya konsumsi kelompok pangan tertentu sesuai Angka Kecukupan Energi (AKE) 2. Masih belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan. 3. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan 4. Terbatasnya ketersediaan dan fluktuasi harga pangan pokok dan pangan lainnya	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai k Tujuan ke-12: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Asta Cita ke-2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Misi ke-2 Provinsi Sumbar : Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan	1. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal 2. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan perilaku hidup sehat
URUSAN PEMERINTAH PERTANAHAN						
1. Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko Tahun 2024 adalah 39,83%	1. Belum optimalnya penatagunaan tanah	Peningkatan alih fungsi lahan	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):	Asta Cita ke-3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan	Misi ke-5 Provinsi Sumbar :	1. Belum optimalnya pemerataan pembangunan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
2. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Tahun 2024 adalah 100% 3. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Tahun 2024 adalah 0/NA 4. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal Tahun 2024 adalah 99,94% 5. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi Tahun 2024 adalah 5%	pemerintah dan tanah konsolidasi 2. Masih rendahnya pemanfaatan tanah ulayat sebagai faktor pendorong dan menjadi modal ekonomi kota. 3. Belum optimalnya pengelolaan tanah untuk program strategis kota.		Tujuan ke-2: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan ke-10: Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara Tujuan ke-11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan Tujuan ke-17: Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memnbangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana	infrastruktur berkelanjutan
URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
1. Persentase RTH Publik Tahun 2024 adalah 14.87% 2. Indeks Kualitas Air Tahun 2024 adalah 45.26% 3. Indeks Kualitas udara Tahun 2024 adalah 87.59% 4. Indeks Kualitas lahan Tahun 2024 adalah 27.5%	1. Belum optimalnya pengelolaan persampahan kota. 2. Belum optimalnya upaya pengelolaan lingkungan 3. Belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau publik	1. Pengelolaan sampah 2. Penurunan kualitas dan kuantitas air 3. Alih fungsi lahan 4. Sumber air baku 5. Ruang terbuka hijau 6. Pengelolaan limbah cair	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua Tujuan ke-11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif,	Asta Cita ke-8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	Misi ke-5 Provinsi Sumbar : Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana	1. Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan lingkungan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
5. Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Tahun 2024 adalah 96.4 % 6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah 58.52 7. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota Tahun 2024 adalah 94,63% 8. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Tahun 2024 adalah 25,93% 9. Adanya laboratorium lingkungan yang sudah terakreditasi			aman, tangguh dan berkelanjutan. Tujuan ke-15: Melindungi, meretorasi dan meningkatkan pemanfaatan yang berkelanjutan ekoistem daratan mengelola hutan secara lestari menghentikan pengurusan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati			
URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1. Persentase penduduk yg memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2024 mencapai 99,5%. 2. Kepemilikan KTP Elektronik pada tahun 2024 mencapai 99,55%.	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang	Asta Cita ke-4 : Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran perempuan, Pemuda, Generasi Milenial dan	Misi ke-8 Provinsi Sumbar: Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	generasi Z), dan penyandang disabilitas		
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
	1. Belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 2. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan, pemerintah dan swasta dalam pemberdayaan masyarakat.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-9 : Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	Asta Cita ke-6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Misi ke-3 Provinsi Sumbar : Nagari/ Desa sebagai basis kemajuan	1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2023 adalah 65,23 2. Cakupan Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2024 adalah 85% 3. TFR (Angka Kelahiran Tortal) tahun 2024 adalah 0,24% 4. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) tahun 2024 adalah 63,63%	1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan keluarga. 2. Masih rendahnya kemauan masyarakat dalam ber KB. 3. Tingginya pertumbuhan penduduk.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-16 : Memperkuat pembangunan yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	Asta Cita ke-4 : Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran perempuan, Pemuda, Generasi Milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Misi ke-6 Provinsi Sumbar : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
5. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) tahun 2024 adalah 13,56%						
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN						
1. Indikator Nilai survey IKM Pelayanan transportasi Tahun 2024 adalah 90,66 2. Persentase Penurunan titik rawan kecelakaan Tahun 2024 adalah 77,49 % 3. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota ditahun 2024 sebesar 0,88% 4. Kinerja Lalu Lintas Kaupaten/ Kota Tahun 2024 adalah 0,86%%	1. Belum tersedianya tempat parkir yang representatif. 2. Belum optimalnya pengelolaan terminal penumpang dan angkutan barang. 3. Belum adanya smart transportation.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-11 : Membangun infrastruktur yaag tangguh, meningkatkan industri inllusif dan berkelanjutan, serta mendorong Inovasi dengan sasaran menyediakan akses terhadap system transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan oranq tua.	Asta Cita ke-3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Misi ke-5 Provinsi Sumbar : Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana	1. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Indeks SPBE) tahun 2024 adalah 3,75 2. Persentase Perangkat Daerah yang menyebarkan informasi melalui media tahun 2024 sebesar 81% 3. Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo Tahun 2024 sebesar 100% 4. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2024 sebesar 93,43% 5. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik. Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebesar 100%	1. Keterbatasan Infrastruktur jaringan dan Konektivitas Antar Wilayah 2. Belum optimalnya penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-11 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi dengan sasaran Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan menyediakan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Asta Cita ke-3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Misi ke-8 Provinsi Sumbar : Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	1. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan 2. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
1. Persentase koperasi yang berkualitas tahun 2024 adalah 36,36% 2. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha tahun 2024 adalah 62,74% 2. Total UMKM yang ada di kota Payakumbuh per	1. Belum optimalnya pengembangan dan penguatan koperasi. 2. Belum optimalnya pengembangan dan daya saing usaha mikro.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-9 : Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap	Asta Cita ke-3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Misi ke-4 Provinsi Sumbar : Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis sumatera bagian barat	1. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
desember 2024 adalah sebanyak 16.008 UMKM 3. Persentase Koperasi yang Berkualitas tahun 2024 adalah 36,35% 4. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha tahun 2024 adalah 62,74%			jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL						
1. Nilai Realisasi Investasi pada tahun tahun 2024 yaitu 658.63 Milyar 2. Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota pada tahun tahun 2024 yaitu 33.38 %	1. Masih Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam menaati aturan berusaha. 2. Belum optimalnya pengelolaan potensi investasi daerah. 3. Masih lemahnya kolaborasi pemerinta, swasta dan masyarakat.		Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-17 : Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk Pembangunan berkelanjutan.	Asta Cita ke-5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Misi ke-4 Provinsi Sumbar : Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	1. Belum optimalnya iklim investasi dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
1. Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional tahun 2024 adalah 51 orang 2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial tahun 2024 adalah 150 organisasi 3. Peningkatan prestasi olahraga (nasional. internasional) tahun 2024 adalah 67 medali	1. Belum optimalnya peran pemuda dalam Pembangunan. 2. Belum optimalnya prestasi pemuda dan olah raga.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia Tujuan ke-8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,	Asta Cita ke-4: Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran perempuan, Pemuda, Generasi Milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Misi ke-3 Provinsi Sumbar : Nagari/ desa sebagai basis kemajuan	1. Masih belum meratanya kualitas pendidikan yang bermutu

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
4. Tingkat partisipasi pemuda dalam dalam kegiatan ekonomi mandiri tahun 2024 adalah 13,73%			kesempatan kerja dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua			
URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK						
1. Persentase kepuasan pengguna data statistic Tahun 2024 sebesar 85% 2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 adalah 100% 3. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah tahun 2024 adalah 100%	4. Belum optimalnya pengelolaan satu data dan informasi daerah yang valid dan terintegrasi. 5. Belum optimalnya sistem informasi satu data yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	Asta Cita ke-7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Misi ke-8 Provinsi Sumbar : Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN						
1. Persentase penanganan cyber attack Tahun 2024 sebesar 85% 2. Tingkat keamanan informasi pemerintah Tahun 2024 sebesar 85%	1. Tingkat Kesadaran terhadap Cyber Security masih rendah . 2. Belum optimalnya keamanan informasi pemerintah daerah.		Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan 16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan	Asta Cita ke-7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Misi ke-8 Provinsi Sumbar : Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			inklusif di semua tingkatan.			
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN						
1. Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai-nilai budaya tahun 2024 adalah 100 % 2. Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan tahun 2024 sebanyak 4 % 3. Terlestarikan cagar Budaya tahun 2024 sebanyak 100%	1. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya. 2. Belum optimalnya promosi budaya daerah 3. Belum optimalnya peran kelembagaan adat dan budaya dalam pelestarian budaya.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Asta Cita ke-8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Misi ke 6 Provinsi Sumbar : Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas	1. Belum optimalnya implementasi nilai-nilai agama serta falsafah ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
1. Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat Tahun 2024 : 66,18% 2. Indeks pembangunan literasi Masyarakat Tahun 2024 : 72,15%	1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan layanan perpustakaan 2. Rendahnya minat baca dan literasi masyarakat yang berdampak pada kurang optimalnya layanan perpustakaan.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua Tujuan ke-9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Tujuan ke-16 :	Asta Cita ke-4 : Memperkuat Pembangunan sumber Daya Manusia (SDM) Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Misi ke-8 Provinsi Sumbar : Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif	1. Masih belum meratanya kualitas pendidikan yang bermutu

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai Untuk pembangunan berkelanjutan, menyedlakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
1. Indek Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 : 73,81% 2. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) Tahun 2024 : 70,04% 3. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Tahun 2024 : 100%	1. Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip secara tertib sesuai dengan kaidah kearsipan. 2. Masih rendahnya penelusuran dan penyelamatan arsip bernilai sejarah.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua Tujuan ke-16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai Untuk pembangunan berkelanjutan, menyedlakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Asta Cita ke-7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Misi ke-8 Provinsi Sumbar : Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1. Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi pada tahun 2024 sebanyak 576,85 ton 2. Produksi Ikan konsumsi tahun 2024 sebanyak 565,4 ton	1. Alih fungsi lahan budidaya perikanan. 2. Masih rendahnya produktifitas sektor perikanan.	-	Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) Tujuan ke-14 : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	Asta Cita ke-2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Misi ke-2 Provinsi Sumbar : Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan	1. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA						
1. Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan tahun 2024 sebanyak 4,14 % 2. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan tahun 2024 sebanyak 79,91% 3. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten / kota tahun 2024 sebanyak 4,14 % 4. Tingkat Hunian Akomodasi tahun 2024 sebanyak 11,55 % 5. Kontribusi tahun sektor pariwisata terhadap PAD sebanyak 0,56 %	1. Belum optimalnya pengembangan wisata daerah. 2. Belum tersedianya wisata unggulan daerah. 3. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif daerah.	-	Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) Tujuan ke-8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Asta Cita ke-3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Misi ke-7 Provinsi Sumbar : Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM	1. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal 2. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN						

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Produksi padi tahun 2024 sebanyak 41.669,46 ton 2. Populasi sapi sebanyak 2.951 ekor 3. Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Produktivitas padi) sebanyak 5,85 ton 4. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebanyak 62,5%	1. Belum optimalnya produktifitas hasil pertanian. 2. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan lahan pertanian. 3. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.		Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) Tujuan ke-2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Asta Cita ke-2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Misi ke-2 Provinsi Sumbar : Lumbung Pangan Nasional dan ekonomi berkelanjutan	1. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN						
1. Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB tahun 2024 adalah 25,13% 2. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) tahun 2024 adalah 51,72% 3. Persentase alat-alat ukur. takar. timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku tahun 2024 adalah 50,48%	1. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar serta pedagang kaki lima. 2. Belum optimalnya pengelolaan asset pasar pertokoan. 3. Masih lemahnya Perlindungan Konsumen. 4. Masih rendahnya nilai ekspor produk dan komoditas perdagangan.	-	Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) Tujuan ke-17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Asta Cita ke-5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Misi ke-4 Provinsi Sumbar : Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis sumatera bagian barat	1. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN						

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Persentase peningkatan nilai produksi tahun 2023/24 adalah 3,3% 2. Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota tahun 2024 adalah 1,87%	1. Belum optimalnya pengembangan sektor-sektor strategis berbasis potensi lokal. 2. Masih rendahnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Masih rendahnya penguasaan teknologi industri. 4. Belum optimalnya pengelolaan limbah industri.	-	Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) Tujuan ke-9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Asta Cita ke-5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Misi ke 4 Provinsi Sumbar: Sumatera barat pusat perdagangan dan bisnis sumatera bagian barat	1. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
UNSUR KESEKRETARIATAN DAERAH						
1. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif tahun 2024 adalah 89,24% 2. Nilai IKM tahun 2024 adalah 89,65% 3. Indeks Reformasi Hukum tahun 2024 adalah 91,58% 4. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2024 adalah 91,58%	1. Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel. 2. Belum optimalnya penataan organisasi dan tata laksana pemerintahan. 3. Belum optimalnya penguatan	-	Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) : Tujuan ke-16: Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	Asta Cita ke-7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Misi ke-8 Provinsi Sumbar : Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan 2. Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	pembinaan lembaga keagamaan dan peningkatan kualitas mental masyarakat yang inklusif dan berkarakter.					
UNSUR KESEKRETARIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						
1. Nilai IKM tahun 2024 adalah 84.85 2. Persentase Ranperda yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100%	1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 2. Belum optimalnya peran DPRD dalam penataan produk hukum.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	Asta Cita ke-7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Misi ke-8 Provinsi Sumbar : Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
UNSUR PERENCANAAN						
1. Indek Kualitas Perencanaan tahun 2024 adalah 90.5%	2. Belum optimalnya kualitas perencanaan. 3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi dalam perumusan perencanaan pembangunan	-	Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) Tujuan ke-16: Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang	Asta Cita ke-7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Misi ke-8 Provinsi Sumbar : Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	1. Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.			
UNSUR KEUANGAN						
1. Opini laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK tahun 2024 adalah WTP 2. Nilai IPKD tahun 2024 adalah 71,75 3. Rasio PAD (thdp PAD Non Migas) tahun 2024 adalah 18,41% 4. Manajemen Aset tahun 2024 ada 5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) tahun 2024 adalah 85,87% 6. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD tahun 2024 adalah 7,36% 7. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD tahun 2024 adalah 6,51% 8. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya tahun 2024 adalah 11,45%	1. Belum optimalnya pengelolaan asset daerah. 2. Terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan daerah. 3. Belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah.	-	Isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) : Tujuan ke 9 : Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan inklusif dan keberlanjutan serta mendorong inovasi. Tujuan ke 17: Memperkuat sarana dan merevitalisasi kemitraan global untuk Pembangunan berkelanjutan	Asta Cita ke-7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Misi ke-8 Provinsi Sumbar : Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	1. Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi 2. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah
UNSUR KEPEGAWAIAN						
1. Indeks merit sistem tahun 2024 adalah 0,84 2. Rasio pegawai pendidikan tinggi dan	1. Belum optimalnya penerapan merit system.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):	Asta Cita ke-7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta	Misi ke-8 Provinsi Sumbar :	1. Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
menengah/ dasarl (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tahun 2024 adalah 81,02 3. Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tahun 2024 adalah 29,29% 4. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tahun 2024 adalah 27,39 5. Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasarl (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tahun 2024 adalah 81,02% 6. Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tahun 2024 adalah 29,29 7. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tahun 2024 adalah 27,39%	2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan ASN.		Tujuan ke-16: Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	penyelenggaraan birokrasi
UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
1. Indeks Profesionalisme ANS tahun 2024 adalah 60,82%	2. Belum optimalnya pengembangan karir dan pelatihan yang terstruktur	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai	Asta Cita ke-7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan	Misi ke-8 Provinsi Sumbar : Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	1. Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	3. Belum optimalnya pengembangana SDM ASN		untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan		
UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1. Kategori tingkat inovasi daerah tahun 2024 adalah <i>inovatif</i>	2. Kebijakan kelitbangan yang belum sepenuhnya mendukung inovasi dan riset terapan. 3. Belum optimalnya peran perangkat daerah dalam pengembangan inovasi daerah. 4. Belum terintegrasinya pelaksanaan kajian pembangunan antar perangkat daerah.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) : Tujuan ke-16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	Asta Cita ke-7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Misi ke-8 Provinsi Sumbar : Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
UNSUR PENGAWASAN						
1. Persentase Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal tahun 2024 sebesar 100 2. Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tahun 2024 adalah 3	1. Belum optimalnya pengawasan APIP 2. Belum optimalnya penerapan SPIP. 3. Belum optimalnya penguatan kapasitas APIP.	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua,	Asta Cita ke-7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan	Misi ke-8 Propinsi Sumbar : Tata Kelola Pemerintahan bersih dan Pelayanan Publik yang efektif	1. Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
3. Maruritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2024 adalah 3 4. Nilai AKIP Kota Komponen Evaluasi internal tahun 2024 sebesar 18,18%			dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.			
UNSUR KEWILAYAHAN						
Persentase Lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK,RT/RW) yang aktif tahun 2024 adalah 100%	1. Belum optimalnya pelayanan public di kelurahan dan kecamatan 2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan peran aktif Lembaga kemasyarakatan 3. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan 4. Belum lengkapnya sarana prasarana pelayanan		Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-16: Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Tujuan ke-17: Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk Pembangunan berkelanjutan	Asta Cita ke-6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Misi ke-3 Provinsi Sumbar : Nagari/Desa sebagai basis kemajuan	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
1. Persentase penanganan konflik sosial yg terjadi di tengah masyarakat Tahun 2024 adalah 100%	1. Belum optimal upaya penanganan potensi konflik sosial 2. Masih rendahnya pengawasan dan	-	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-10: Mengurangi kesenjangan Intra dan antarnegara	Asta Cita ke-1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Azazi Manusia (HAM)	Misi ke-6 Provinsi Sumbar : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal melalui	1. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
2. Persentase parpol dan ormas yang aktif Tahun 2024 adalah 90.72%	pendampingan organisasi masyarakat. 3. Belum optimalnya peran serta ormas dalam Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat 4. Rendahnya pengawasan terhadap izin tinggal WNA		Tujuan ke-16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.		Dukungan Keluarga yang Berkualitas	

2). RUMUSAN ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal baik suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan, artinya bahwa jika suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan kota sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, sehingga dapat digambarkan beberapa isu-isu strategis yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Perumusan isu strategis RPJMD dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis dari berbagai sumber diantaranya yaitu permasalahan pembangunan Daerah, dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Daerah serta KLHS RPJMD. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh Perangkat Daerah sampai tahun 2029.

Selain memperhatikan lingkungan strategis, dalam penentuan isu strategis pembangunan daerah juga memperhatikan isu global, nasional, maupun regional yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.100 Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah

ISU GLOBAL (SDG'S)	ISU NASIONAL (RPJMN 2025-2029)	ISU DAERAH (RPJPD 2025-2045)
1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air Bersih 7. Energi 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan 11. Kota dan Pemukiman	1. Memperkokoh ideologi pancasila dan Hak Azazi Manusia (HAM) 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan	1. Pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial, 2. Produktifitas ekonomi dan pusat pusat pertumbuhan ekonomi, 3. Kelembagaan tepat fungsi, kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, implementasi SPBE, pemberdayaan

ISU GLOBAL (SDG'S)	ISU NASIONAL (RPJMN 2025-2029)	ISU DAERAH (RPJPD 2025-2045)
Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan Perubahan Iklim Sumberdaya Kelautan Ekosistem Daratan Masyarakat Inklusif dan Damai, Akses Keadilan dan Membangun Kelembagaan Kemitraan Global	meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi 4. Memperkuat pembangunan sumber daya (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z). dan penyandang disabilitas 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan 7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	masyarakat sipil, penataan aset dan pendanaan pembangunan, 4. Penegakan hukum, stabilitas keamanan dan ekonomi daerah, 5. Ketahanan agama, sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Pembangunan, 6. Pembangunan wilayah sesuai potensi dan kearifan lokal, 7. Infrastruktur layanan dasar berkelanjutan dan aksesibilitas yang terintegrasi, serta 8. Konsistensi RPJPN dan RPJPD.

Berdasarkan hasil telaahan permasalahan dan potensi berdasarkan kinerja existing dan memperhatikan capaian indikator SDG's untuk

pemenuhan target pada tujuan, maka dapat dirumuskan isu strategis RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Masih belum meratanya kualitas pendidikan yang bermutu (Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan).
2. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan perilaku hidup sehat (Peningkatan derajat kesehatan masyarakat).
3. Masih tingginya tingkat kemiskinan (Percepatan penanggulangan kemiskinan).
4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan (Peningkatan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak).
5. Masih tingginya kesenjangan pendapatan antar masyarakat (Peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat).
6. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal (Peningkatan pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal).
7. Belum optimalnya iklim investasi dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor (Peningkatan iklim investasi dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor).
8. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan (Peningkatan kualitas pelayanan publik).
9. Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi (Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi).
10. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah (Peningkatan pendapatan daerah).
11. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat (Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat).
12. Belum optimalnya implementasi nilai-nilai agama serta falsafah ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat (Peningkatan penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat).
13. Masih belum optimalnya pengelolaan persampahan dan lingkungan (Peningkatan kualitas lingkungan hidup).
14. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan (Peningkatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan).

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memperhatikan janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka isu strategis dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Masih belum meratanya kualitas pendidikan yang bermutu

Pemerataan Kualitas Pendidikan di Kota Payakumbuh, Pendidikan merupakan investasi masa depan terhadap masyarakat. Pendidikan yang baik dan berkualitas akan mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang dibutuhkan dunia kerja namun juga dapat menciptakan usaha atau lapangan kerja baru baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat lainnya. Peningkatan kualitas manusia tidak hanya menyangkut kualitas fisik atau intelektual saja. Kualitas psikologi atau spiritual dari manusia juga perlu ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Pembangunan sektor pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan Masyarakat. Pendidikan agama tidak terpisahkan dari pendidikan umum dalam menciptakan manusia yang berkualitas dan berkepribadian luhur/ berkarakter atau dapat diartikan pendidikan umum memberikan peningkatan kualitas intelektual dan kreatifitas dari manusia, sedangkan pendidikan keagamaan akan menciptakan etika atau adab serta kematangan psikologi manusia dalam mengambil keputusan, sehingga perwujudan investasi manusia dalam pendidikan diperlukan tidak hanya menyangkut kemampuan umum namun juga kemampuan spiritual/kepribadian yang dilakukan melalui pendidikan keagamaan dan penguatan karakter berbudi luhur, dimana pendidikan ini tidak hanya menjamin manusia yang berpengetahuan tinggi namun juga bermartabat. Selain itu, melihat kondisi lingkungan di Kota Payakumbuh saat ini dan kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka panjang, pengelolaan persampahan perlu juga dijadikan bagian dari pendidikan dari anak usia dini.

Hal ini sangat berarti dalam menanamkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dan akan membantu dalam mengatasi permasalahan persampahan kedepannya. Selain itu dengan menambahkan pendidikan dalam pengelolaan persampahan tersebut, juga akan merangsang pemikiran masyarakat semenjak dini untuk membuka alternatif baru dalam berusaha ke depannya, sehingga setiap pendidikan yang diberikan akan menghasilkan peningkatan kapasitas, kematangan psikologi serta peluang usaha baru sekaligus menjaga lingkungan. Oleh karenanya melihat kondisi dan dinamika dunia yang selalu dinamis, pemerintah perlu memikirkan konteks pendidikan masyarakat dalam skala formal, informal dan non formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang diterima masyarakat di lembaga sekolah, baik negeri, maupun swasta. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang diterima masyarakat di keluarga dan lingkungannya. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang diterima masyarakat melalui pelaksanaan pelatihan dan pemberdayaan. Bentuk pendidikan yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk pengembangan pendidikan vokasi/keterampilan yang dapat membantu masyarakat peluang kerja

dan lapangan usaha, sehingga pendidikan tidak hanya dijadikan beban, namun pada akhirnya akan menjadi investasi penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat baik Kota Payakumbuh khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terkait pendidikan formal perlu pembenahan manajemen dan tata kelola internal pendidikan, baik sekolah negeri, swasta, maupun sekolah yang tidak berada langsung di bawah Dinas Pendidikan, karena secara harfiah urusan pendidikan adalah salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan pemerintah daerah, dan ini berhak diterima seluruh masyarakat. Secara keseluruhan ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai ketentuan perundangan.

2. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan perilaku hidup sehat

Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan, hal ini terbukti dengan masuknya kesehatan sebagai komponen dalam penentuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data yang ada, komponen IPM bidang kesehatan Kota Payakumbuh masih berada dibawah angka rujukan nasional terutama pada AKI, AKB dan Gizi. Oleh karenanya upaya peningkatan kesehatan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah tanpa dukungan dan perubahan pola hidup sehat dari masyarakat. Pola hidup sehat ini merupakan suatu perilaku yang dapat diwujudkan melalui tindakan preventif dan promotif dengan mengalahkan program PHBS yang dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat melalui saling mengingatkan sesama masyarakat secara terus menerus.

Pemerintah selaku institusi yang memberikan layanan kepada masyarakat sembari melakukan perubahan pola hidup masyarakat ke hidup sehat, juga perlu memberikan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat baik itu melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, kapasitas dan karakter tenaga medis dan tenaga administrasi kesehatan serta regulasi yang mengatur pelayanan kesehatan yang juga tentunya disertai pengawasan yang terintegrasi terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang *excellence*.

Perkembangan teknologi dan masih adanya kebiasaan buruk masyarakat seperti merokok, sanitasi tidak sehat, LGBT, penyalahgunaan narkoba dan lainnya yang memungkinkan pengaruh buruk tersebut mudah diakses secara konstan oleh siapapun tanpa pandang usia dalam jangka panjang akan menjadi permasalahan kesehatan lebih besar jika tidak ditangani segera. Edukasi dan pembinaan yang melibatkan berbagai unsur di Kota Payakumbuh menyangkut kesehatan fisik dan psikologi masyarakat akan banyak

memberikan pengaruh dalam penciptaan kualitas kesehatan dan menganulir kebiasaan buruk tersebut.

6. Masih tingginya tingkat kemiskinan

Masih tingginya kemiskinan di Kota Payakumbuh mencerminkan bahwa banyak masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi dan belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi ini menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam pertumbuhan ekonomi, distribusi kesejahteraan, serta akses terhadap peluang kerja di sektor formal maupun informal. Keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya keterampilan tenaga kerja, serta kurangnya investasi di bidang industri menjadi faktor utama yang melemahkan kondisi ini. Selain itu, ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja juga menyebabkan banyak masyarakat tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dampak dari tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ini tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga memicu berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya angka pekerja informal, rendahnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya risiko kriminalitas.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan investasi, pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor UMKM untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja yang berkualitas. Meskipun angka kemiskinan di Kota Payakumbuh selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, tetapi secara angka absolut jumlah penduduk miskin di Kota Payakumbuh masih cukup tinggi. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi dan krusial yang harus ditangani oleh berbagai kebijakan sektoral yang saling bersinergi. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi yakni, perlindungan sosial yang komprehensif; penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar; dan penyediaan mata pencarian yang layak serta berkelanjutan. Pola permasalahan kemiskinan yang relatif sama yaitu dimana jumlah penduduk miskin dominan dipengaruhi pada dimensi infrastruktur dasar dan ketenagakerjaan, namun dimensi kesehatan dan pendidikan juga penting untuk diintervensi karena dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Pendampingan pelaksanaan program belum memadai, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun dari sisi dukungan pemerintah daerah.

Upaya peningkatan jaminan sosial masyarakat menjadi suatu hal yang mesti dilakukan Pemerintah Daerah agar kesejahteraan masyarakat tidak semakin buruk. Penjaminan sosial yang dilakukan pemerintah harus mulai difikirkan ke arah stimulan dan pemberdayaan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta

kebijakan yang akan memberikan angin segar bagi masyarakat dalam berusaha dan beraktifitas, sehingga dalam jangka panjang masyarakat itu sendiri dapat berdaya dan berdiri diatas kakinya sendiri. Pemberian jaminan sosial dalam rangka perlindungan masyarakat tersebut tentunya perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, seperti Jaminan kesehatan, Jaminan pendidikan, Jaminan keselamatan kerja dll dalam rangka mengurangi beban masyarakat.

7. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan.

Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan perlu ditingkatkan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Meskipun telah tersedia berbagai forum partisipatif seperti Musrenbang di tingkat kelurahan hingga kota, namun tingkat partisipasi aktif masyarakat belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan daerah serta keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat seperti LPM, Karang Taruna, dan kelompok swadaya lainnya.

Selain itu, tingkat kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal, termasuk potensi ekonomi berbasis UMKM, pertanian perkotaan, dan industri rumah tangga, masih belum optimal. Keterbatasan akses terhadap informasi, pelatihan, permodalan, dan pendampingan menjadi hambatan dalam mendorong tumbuhnya inisiatif lokal secara mandiri. Sebagai kota dengan dinamika sosial ekonomi yang cukup tinggi dan sumber daya manusia yang potensial, Payakumbuh memiliki peluang besar untuk memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dibutuhkan strategi yang lebih terfokus untuk memperkuat kapasitas masyarakat, memperluas akses terhadap sumber daya pembangunan, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Payakumbuh.

Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan dinamika sosial yang cukup tinggi terus menghadapi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap anak. Meskipun berbagai kebijakan dan program telah dijalankan, seperti pembentukan Forum Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga, serta kampanye stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun masih ditemukan berbagai permasalahan krusial. Partisipasi perempuan dalam sektor publik dan pengambilan keputusan, khususnya di bidang pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan, masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh masih adanya stereotip peran gender serta keterbatasan akses perempuan terhadap

pendidikan keterampilan, modal usaha, dan jaringan ekonomi. Selain itu, perlindungan anak juga menghadapi tantangan, ditandai dengan masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi, serta kurangnya pemenuhan hak anak atas pendidikan, pengasuhan yang layak, dan ruang tumbuh yang aman.

Keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan dan perlindungan juga menjadi faktor penghambat. Padahal, perempuan dan anak merupakan kelompok strategis dalam pembangunan jangka panjang. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih integratif dan partisipatif dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak di Kota Payakumbuh. Hal ini meliputi penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kapasitas ekonomi dan pendidikan perempuan, penyediaan layanan pengaduan dan pendampingan yang responsif, serta peningkatan edukasi masyarakat terkait hak-hak perempuan dan anak.

Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan perempuan dan anak dikarenakan mereka merupakan kelompok yang rentan terhadap kasus-kasus penganiayaan, pelecehan dan pengeksploitasian selain itu perempuan dan anak juga merupakan ujung tombak dalam menciptakan kualitas SDM yang handal dan menjamin masa depan yang lebih baik kedepannya. Hal ini dikarenakan pendidikan di rumah lebih banyak akan diakomodir oleh perempuan, dan anak-anak merupakan generasi penerus kemajuan atau kemunduran suatu wilayah kedepannya, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan pengaksesan informasi tidak hanya yang baik namun juga dapat mengubah perilaku masyarakat.

8. Masih tingginya kesenjangan pendapatan antar masyarakat akibat belum meratanya akses terhadap sumber daya ekonomi, lapangan kerja, serta kesempatan berusaha

Kota Payakumbuh sebagai kota dengan potensi sektor perdagangan, jasa, pertanian perkotaan, dan UMKM yang cukup berkembang, menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat secara berkeadilan. Meskipun angka kemiskinan relatif rendah dibandingkan rata-rata provinsi, namun kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah di dalam kota masih terlihat. Sebagian besar pelaku ekonomi di Payakumbuh masih bergerak di sektor informal, dengan produktivitas dan pendapatan yang belum stabil. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mengalami keterbatasan dalam mengakses peluang ekonomi, pendidikan vokasi, pembiayaan usaha, serta pendampingan bisnis. Hal ini didukung oleh ketimpangan penguasaan aset ekonomi dan

belum meratanya distribusi infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi seperti pasar rakyat, jalan produksi, dan akses digital.

Selain itu, program pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang ada belum sepenuhnya menyasar kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, pemuda putus sekolah, dan difabel. Akibatnya, sebagian kelompok masyarakat belum merasakan hasil pembangunan secara merata, dan potensi daerah belum dimanfaatkan secara maksimal.

Kota Payakumbuh perlu memperkuat strategi pembangunan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal. Upaya ini dapat dilakukan melalui perluasan akses masyarakat terhadap pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, dukungan permodalan, pembangunan infrastruktur ekonomi rakyat, serta peningkatan sinergi lintas sektor dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

9. Belum optimalnya pengembangan sektor strategis berbasis potensi lokal.

Kota Payakumbuh memiliki berbagai potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi sektor strategis unggulan, seperti industri olahan pangan, UMKM, pertanian perkotaan (urban farming), peternakan, serta sektor pariwisata berbasis budaya dan kuliner lokal. Keunggulan geografis sebagai kota penyangga jalur perdagangan antara provinsi serta identitas budaya Minangkabau yang kuat, menjadi modal besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Namun, hingga saat ini pengembangan sektor-sektor strategis tersebut belum optimal. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, teknologi produksi, sertifikasi produk, serta pemasaran yang masih bersifat konvensional. Begitu juga dengan sektor pertanian dan peternakan, yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan kota, namun terkendala oleh alih fungsi lahan, rendahnya regenerasi petani, dan kurangnya hilirisasi produk pertanian. Sementara itu, sektor pariwisata yang berpotensi tumbuh, terutama di bidang wisata kuliner dan budaya, belum terkelola secara terpadu dan belum dikemas menjadi produk wisata yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kurangnya promosi dan infrastruktur pendukung turut memperlambat perkembangan sektor ini.

Permasalahan lain adalah belum adanya sinergi kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas lokal dalam mengembangkan potensi-potensi tersebut secara berkelanjutan dan kompetitif.

Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan strategis dan kolaboratif untuk mendorong penguatan sektor strategis berbasis potensi lokal di Payakumbuh. Langkah tersebut dapat berupa fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku usaha, dukungan teknologi dan inovasi, pengembangan kawasan ekonomi lokal, serta promosi potensi unggulan secara digital dan berkelanjutan.

10. Belum optimalnya iklim investasi dalam mendukung kepastian berusaha bagi investor

Kota Payakumbuh memiliki potensi strategis untuk menarik investasi, terutama di sektor industri kecil menengah (IKM), pengolahan hasil pertanian, perdagangan, jasa, dan pariwisata berbasis budaya dan kuliner Minangkabau. Letak geografis yang strategis, berada pada jalur penghubung antar kabupaten/kota di Sumatera Barat, memberikan keunggulan dalam aksesibilitas dan distribusi barang dan jasa.

Namun demikian, iklim investasi di Kota Payakumbuh masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum optimalnya sistem pelayanan perizinan dan kepastian regulasi, meskipun telah diterapkan sistem OSS (Online Single Submission). Proses perizinan terkadang masih memerlukan pendampingan manual, dan koordinasi antar instansi teknis belum sepenuhnya terintegrasi secara efisien.

Selain itu, dukungan infrastruktur kawasan usaha seperti sentra industri, akses jalan produksi, dan utilitas dasar belum sepenuhnya mendukung kemudahan berusaha, terutama di wilayah pengembangan ekonomi baru. Minimnya promosi potensi daerah serta kurangnya informasi investasi yang terpublikasi secara digital dan terintegrasi juga menjadi penghambat dalam menarik minat investor dari luar daerah. Faktor lainnya adalah keterbatasan insentif dan fasilitasi investasi, seperti pembebasan lahan, insentif fiskal/non-fiskal, serta belum terbangunnya sistem satu pintu yang benar-benar efektif dalam mendampingi investor dari awal hingga pasca-penanaman modal.

11. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan

Kota Payakumbuh terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sejumlah inovasi pelayanan telah mulai dikembangkan oleh Perangkat Daerah (PD), termasuk melalui digitalisasi sistem administrasi dan penggunaan aplikasi layanan publik.

Namun, tantangan terhadap kualitas dan kemudahan pelayanan publik masih cukup nyata. Pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Masih ditemukan keluhan terkait waktu pelayanan yang lambat, prosedur yang belum seragam antar unit layanan, serta kurangnya saluran pengaduan masyarakat yang responsif.

Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), memang telah dilakukan digitalisasi pada beberapa sektor, seperti sistem perizinan melalui OSS, layanan administrasi kependudukan berbasis online, serta penyediaan informasi melalui website dan media sosial pemerintah. Akan tetapi, pemanfaatan TIK secara menyeluruh belum merata di seluruh PD, dan kapasitas SDM untuk mengelola sistem digital juga masih terbatas.

Selain itu, akses dan literasi digital masyarakat terutama di kalangan usia lanjut dan wilayah pinggiran kota juga menjadi tantangan dalam penerapan layanan publik berbasis digital. Hal ini berdampak pada efektivitas pemanfaatan layanan daring yang telah disediakan.

Untuk itu, perbaikan kualitas pelayanan publik di Kota Payakumbuh perlu diarahkan pada:

1. Penguatan standar pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat,
2. Pengembangan sistem layanan digital yang terintegrasi dan *user-friendly*,
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam pelayanan berbasis TIK,
4. Serta perluasan akses, literasi, dan pendampingan digital kepada masyarakat.

Langkah-langkah ini akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan inklusif, selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi digital di tingkat daerah. Selain itu perwujudan *Good Governance*, Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat global dengan berbagai kemudahan beraktivitas yang diberikan, mulai dari ilmu pengetahuan, kemudahan bertransaksi baik itu perbankan maupun non perbankan, pelacakan lokasi dan sebagainya. Dengan adanya kemudahan tersebut, peningkatan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan *good governance* berupa penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan *e government* dapat memanfaatkan teknologi informasi melalui optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana SPBE, regulasi penguatan SPBE, kuantitas dan kualitas SDM aparatur negara. Penerapan e-government akan memberikan data yang terstruktur dan

akurat sehingga menghasilkan informasi yang valid, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia memastikan data yang diproduksi oleh produsen data berkualitas (sesuai standar, metadata baku dari pembina data dan dapat dimanfaatkan bersama) dengan menggabungkan antara data statistik dan data geospasial.

12. Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel adalah sistem pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam pemerintahan mencakup aspek pengelolaan keuangan negara, pelayanan publik, serta kebijakan yang dibuat berdasarkan prinsip keadilan dan efisiensi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan tata kelola pemerintahan belum optimal.

Untuk menjalankan pemerintahan yang handal diperlukan penempatan SDM aparatur sesuai kompetensi/profesional yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sistem Negara (ASN) yang menempatkan sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa memandang latar belakang politik, warna kulit, ras, agama, jenis kelamin, asal daerah, usia, ataupun kecamatan sehingga melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit. ASN sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah harus memiliki karakter customer oriented (berorientasi dalam melayani masyarakat), dimana seorang ASN harus mengedepankan kepentingan masyarakat dengan memberikan berbagai kemudahan dalam pelayanan, berempati tinggi dan merespon dengan baik setiap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang dapat diterapkan melalui upskilling dan reskilling bagi ASN serta penetapannya melalui SOP yang harus diikuti dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain manajemen pegawai, penataan terhadap organisasi pemerintah daerah melalui restrukturisasi perangkat daerah sesuai urusan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Restrukturisasi tersebut bertujuan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah sekaligus efektivitas dan efisiensi sumber daya daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan good governance tidak hanya menyangkut pada pemerintahan, namun merupakan konsensus yang dicapai oleh pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan pada suatu wilayah. Untuk mewujudkan konsensus tersebut, disepakati koridor-koridor yang harus dipatuhi dan dijalankan yang telah terumus dalam aturan-aturan daerah dengan pemberlakuan bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Tujuan dari pembuatan aturan adalah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.

13. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah

Kota Payakumbuh memiliki beragam potensi daerah yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor UMKM dan industri rumah tangga, pariwisata berbasis budaya dan kuliner, serta jasa dan perdagangan. Keunggulan Payakumbuh dalam produk olahan pangan seperti rendang, keripik, dan aneka jajanan khas, memberikan peluang besar untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi daerah yang berdaya saing.

Namun demikian, hingga saat ini kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PAD masih tergolong rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal secara terstruktur dan berkelanjutan. Banyak potensi yang belum digarap secara maksimal karena keterbatasan data, kurangnya perencanaan sektoral yang berbasis potensi wilayah, serta minimnya dukungan kebijakan insentif. Selain itu, pengelolaan aset daerah dan retribusi daerah juga masih menghadapi tantangan, mulai dari pendataan aset yang belum lengkap dan akurat, pemanfaatan aset yang belum produktif, hingga lemahnya sistem pengawasan dan penagihan retribusi secara elektronik dan transparan.

Dalam aspek tata kelola pajak daerah, masih ditemukan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah serta terbatasnya inovasi dalam sistem pemungutan pajak daerah berbasis digital. Hal ini berdampak pada rendahnya optimalisasi PAD dari sektor pajak seperti pajak restoran, hotel, reklame, hiburan, dan PBB.

14. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat

Kota Payakumbuh sebagai kota yang berkembang dan beragam secara sosial, menghadapi tantangan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat (trantibmas) secara menyeluruh. Meskipun kondisi keamanan secara umum relatif kondusif, namun masih terdapat berbagai gangguan sosial yang muncul secara sporadis dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial masyarakat.

Beberapa permasalahan yang mencuat antara lain adalah penyalahgunaan narkoba, pelanggaran ketertiban umum, serta

potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Selain itu, pelanggaran terhadap peraturan daerah (Perda), seperti pelanggaran jam operasional usaha, kebersihan lingkungan, dan ketertiban di ruang publik juga masih sering terjadi yang menyebabkan terganggunya rasa aman dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta menurunnya kualitas kehidupan sosial di lingkungan perkotaan.

Permasalahan ini diperparah oleh masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya peran serta aktif tokoh masyarakat dan pemuda dalam menjaga ketertiban lingkungan, serta belum optimalnya upaya preventif dan represif dari aparat penegak Perda, dan instansi terkait lainnya. Kurangnya edukasi, sosialisasi hukum, dan forum komunikasi sosial juga turut memperlemah ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai.

15. Belum optimalnya implementasi nilai-nilai agama serta falsafah ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.

Mulai Pudarnya Nilai ABS SBK, Hasil penelitian bidang Litbang Bappeda tahun 2019 menunjukkan bahwa, generasi muda pada tingkat pendidikan dasar dan menengah di Kota Payakumbuh tidak lagi dipengaruhi oleh adat dan budaya Minang yang berlandaskan “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Ini terlihat dari tingkat kepatuhan mereka terhadap mamak kepala waris dan mamak dalam pasukuan. Kondisi ini harus diperbaiki dan direhabilitasi agar generasi muda kembali menyadari kondisi adat dan budaya yang melekat selama ini. Dimana secara budaya minangkabau telah dikenal “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Adat Bapaneh Syarak Balinduang”, dengan kondisi “syara’ balinduang”, maka penerapannya dalam kehidupan sehari-hari digunakan istilah “Syarak mangato, adat mamakai”. Ini diterapkan karena secara agama Islam, ada kitab suci Al-Qur’an dan Hadist yang tertulis dan berkekuatan hukum tetap sepanjang masa serta tidak bisa berubah. Sedangkan hukum adat hanya berupa hukum tidak tertulis yang disepakati oleh setiap nagari dan “barajo ka mufakaik”. Maka hukum agama dianggap lebih tegas dan pasti. Maka upaya dan himbauan “kembali ke musajik/surau” menjadi seruan lama yang perlu di wujutkan kembali. Disamping itu, persoalan masih minimnya dokumentasi daerah terhadap sejarah dan budaya daerah menyebabkan nilai – nilai dan kekayaan budaya menjadi luntur dan tidak terwariskan ke generasi selanjutnya. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar budaya dan sejarah daerah tidak hilang begitu saja.

16. Masih belum optimalnya pengelolaan persampahan dan lingkungan

Sampah merupakan hasil sisa produksi atau konsumsi. Kondisi sampah yang selalu bertambah dan tidak dilakukan pengolahan kembali kedepannya akan menjadi problematika yang dihadapi ditambah lagi Kota Payakumbuh memiliki TPA Regional yang menjadi tempat pembuangan akhir sampah yang sudah hampir penuh kapasitas daya tampungnya. Menghadapi kondisi diatas perlunya pengelolaan Persampahan yang benar-benar dapat mengatasi persoalan Persampahan dan dampak lingkungan yang mungkin nantinya dapat terjadi. Pengelolaan Persampahan dapat dilakukan melalui pemilahan sampah dari rumah tangga yang dapat dilakukan melalui sosialisasi secara terus menerus, penerapan aturan melalui penerapan efek jera sampai akhirnya masyarakat terbiasa, dan pengolahan sampah melalui daur ulang, pembudidayaan magot, dan penguatan bank sampah sebagai garda terdepan bagi pemerintah dalam pengelolaan sampah sehingga sampah tidak lagi menjadi permasalahan dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber keuangan bagi masyarakat kedepannya. Selain itu dari sisi Lingkungan hidup, berdasarkan hasil kajian KLHS RPJPD Kota Payakumbuh, Daya Dukung Daya Tampung dan IKLH di Kota Payakumbuh cenderung terus menurun. Kondisi ini jika terus dibiarkan, jangka panjang akan menjadi persoalan bagi berbagai sektor kehidupan yang ada di Kota Payakumbuh ditambah lagi dengan masih sedikitnya ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kota Payakumbuh.

17. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan

Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan, Ketersediaan infrastruktur berkelanjutan merupakan suatu wadah yang akan memberikan kemudahan, ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitasnya. Kota Payakumbuh memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur yang memadai untuk masyarakatnya terutama dalam fasilitas umum perkotaan. Berdasarkan hasil analisis KLHS, ada beberapa fasilitas umum perkotaan yang harus dipenuhi ataupun dioptimalisasi oleh pemerintah Kota Payakumbuh diantaranya infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, dan listrik), infrastruktur penunjang (jalan, irigasi, dan sungai), infrastruktur lainnya (pembangunan masjid agung, balai pertemuan), dan sebagainya.

BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bagian ini disajikan visi, misi, program kerja, tujuan dan sasaran untuk pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2025-2029, dan keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Visi, misi dan program kerja yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 merupakan visi, misi dan program kerja dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode tahun 2025-2029. Visi memberi gambaran masa depan yang ingin dicapai.

Tujuan merupakan langkah-langkah spesifik untuk mewujudkan visi tersebut dengan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dalam jangka waktu kepemimpinan Wali Kota bersama Wakil Wali Kota. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam jangka waktu berkala sehingga tujuan dapat diwujudkan. Sasaran adalah kondisi yang ingin dicapai dalam waktu lebih singkat dari waktu pencapaian tujuan dengan indikator kuantitatif dapat diukur sehingga dapat diukur dan dievaluasi. Sasaran ditetapkan agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian proses penyusunan tahapan kegiatan yang mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan, dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada. RPJMD Kota Payakumbuh 2025-2029 adalah penjabaran strategik dari rencana pelaksanaan periode I (2025-2029) dari RPJPD Kota Payakumbuh 2005-2025. Pada RPJPD Kota Payakumbuh periode I (2025-2029), penekanan pembangunan diarahkan untuk memperkuat pondasi pembangunan.

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi merupakan satu gambaran kondisi atau keadaan yang diinginkan. Visi merupakan gabungan antara keinginan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi saat ini, sekaligus keinginan yang diharapkan untuk lebih baik di masa depan. Visi bukan satu impian, tetapi rumusan keinginan yang rasional dan dapat dicapai, yang telah mempertimbangkan sumber daya dan kondisi-kondisi yang ada dan dimiliki. Oleh karenanya, rumusan Visi harus tajam dan jelas, dan dapat diterjemahkan dalam beberapa variabel dan indikator yang terukur. Visi dan Misi RPJMD ini juga merupakan penjabaran pelaksanaan Visi dan Misi RPJPD serta harus selaras dengan visi dan misi RPJMN dan RPJMD Provinsi. Berikut diuraikan kembali secara singkat visi dan misi dalam RPJPD, RPJMD dan RPJMD Provinsi.

A. VISI DAN MISI RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045

Sesuai dengan Perda nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045, maka visi, misi, sasaran, tujuan dan arah kebijakan Pembangunan untuk tahap pertama pelaksanaan RPJPD diuraikan sebagai berikut:

1). VISI DAN SASARAN VISI RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045

Visi Jangka Panjang Kota Payakumbuh periode tahun 2025-2045 adalah **PAYAKUMBUH BERMARTABAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PERWUJUDAN ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH**, dengan sasaran visi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap 1

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TAHAP I
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	64,25	156,62
		2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,95	5,55
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	3. Tingkat Kemiskinan (%)	3,98 – 4,51	3,28 – 3,84
		4. Indeks Gini	0,314	0,275
		5. Pertumbuhan ekonomi (%)	5,87	6,18
3	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,40	3,5
		7. Indeks Inovasi Daerah	48,74	56,05
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	8. Indeks Pembangunan Manusia	80,61	82,83
		9. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/Tenaga Kerja)	70	75
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,37	69,43

Sumber: RPJPD Payakumbuh 2025-2045, 2024

2). MISI RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045

Penjabaran misi RPJPD selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Misi RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap 1

VISI RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045
Payakumbuh Bermartabat, Maju Dan Berkelanjutan Sebagai Perwujudan Adat	1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing melalui transformasi sosial
	2. Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

VISI RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045	MISI RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045
Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif
	4. Memantapkan keamanan masyarakat daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah
	5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan sebagai perwujudan “ABS-SBK”;
	6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan
	7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
	8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah

Sumber: RPJPD Payakumbuh 2025-2045, 2024

3). **ARAH DAN SASARAN PEMBANGUNAN RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045**

Visi misi RPJPD ini selanjutnya dijabarkan dalam arah dan sasaran Pembangunan 5 tahunan pertama sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Arah dan Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap 1

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (17)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (45)	TARGET	
				BASELINE 2025	TAHAP I
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (tahun)	75,23	77,53
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	45	25
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	17,8	12,6
			Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) (%)	80	100
			Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) (%)	94	96
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	99,05	100
2	Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi	56,14 42,40	60,84 48,25
			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11,2	11,63
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,54	14,91
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	18,50	20,26

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (17)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (45)	TARGET	
				BASELINE 2025	TAHAP I
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	79,09	81,98
3	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	3,98 – 4,51	3,28 – 3,84
			Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	31,38	43,39
			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	29,17	34,17
4	Berkembangnya IPTEK dan inovasi dalam meningkatkan produktivitas ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4,95	5,55
			Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum (%)	3,6	3,98
			Jumlah Tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) (ribu orang)	0	2,3
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)	3,595	3,963
			Proporsi jumlah UKM non pertanian (%)	13,146	13,636
			Proporsi jumlah IKM (%)	3,43	3,82
			Rasio Kewirausahaan (%)	8,99	9,78
			Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	2,365	2,82
			ROA BUMD (%)	6,18	6,22
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,62	4,51
			Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	54,78	61,66
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	63,89	65,21
			Indeks Inovasi Daerah	48,74	56,05
5	Meningkatnya penerapan ekonomi hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,37	69,43
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta rupiah/orang)	35,27	36,03
6	Meningkatnya transformasi digital	Transformasi Digital	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	52	59
7	Menguatnya integrasi ekonomi domestik dan regional	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	Ketersediaan Pangan Utama (ton)	19.755	19.805
			Stabilisasi Harga Beras, Cabe dan Bawang (%)	0 - 10 0 - 25 0 - 25	0 - 10 0 - 25 0 - 25
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	25,1	24
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	17	20

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (17)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (45)	TARGET	
				BASELINE 2025	TAHAP I
8	Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Proporsi kontribusi PDRB Kota Payakumbuh terhadap PDRB Provinsi (%)	2,96	3,24
			Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	83,76	95,93
9	Terwujudnya regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	82,55	85,55
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,17	3,63
			Indeks Pelayanan Publik	4,45	4,47
			Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)	78,50	80,00
10	Meningkatnya keadilan hukum, keamanan dan demokrasi yang berkualitas	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	Persentase Penegakan Perda	100	100
			Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk)	3,84	3,80
			Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif	90,64	91
11	Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah	Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,35	0,4
			Tingkat inflasi		-
			Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	4,26	17,75
			Nilai Transaksi Saham Per Kapita (rupiah)	3.791.998	7.642.640
			Total Kredit/PDRB (%)	24,4	31,08
			Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan (%)	5,77	6,86
12	Meningkatnya kerja sama dan keamanan daerah	Penguatan Kerja Sama dan Keamanan Daerah	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan	100	100
			Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	5	5
13	Meningkatnya Penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai wujud masyarakat yang religius dan berketahanan budaya	Berkebudayaan maju sebagai perwujudan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah	Karya Budaya yang Ditetapkan	1	5
			IPK berbasis ABS SBK	72,10	75,71
			Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat	100	100
14	Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan inklusivitas masyarakat	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	63,57	64,70
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,29-0,28	0,26-0,24
			Indeks Perlindungan Khusus Anak	82,92	84,33
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Tutupan Lahan	52,73	53,1
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,37	69,43
			RT dengan Akses Sanitasi Aman (%)	18	30

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (17)	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (45)	TARGET	
				BASELINE 2025	TAHAP I
			Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	14,82	34,54
			Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	20	49,98
16	Meningkatnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita)	1.273	1.885
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	5,81	4,42
			Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	0,32	0,36
			Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	85	88,75
17	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	120,2	113,88 – 107,57
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,37	69,43

Sumber: RPJPD Payakumbuh 2025-2045, 2024

B. VISI DAN MISI RPJMN TAHUN 2025-2029

1). VISI MISI RPJMN TAHUN 2025-2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yang dituangkan ke dalam RPJMN yaitu “**BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045**”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita, sebagaimana terdapat pada diagram berikut.

Gambar 3.1 Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029, 2024

2). SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN TAHUN 2025-2029

RPJMN Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang berfokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, serta diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Gambar 3.2 Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, 2024

C. VISI DAN MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

1). VISI MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu: SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN. Upaya pencapaian visi ini diuraikan kedalam 8 misi sebagaimana terdapat pada diagram berikut.

Gambar 3.3 Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029



Sumber: RPJMD Prop. Sumbar Tahun 2025-2029

2). SASARAN PEMBANGUNAN RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

Sasaran Pembangunan Sumatera Barat 5 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

MISI/ TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2025	TARGE T 2030
1.PENDIDIKAN MERATA, KESEHATAN BERKUALITAS				
Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	77,19	81,1
		Indeks Modal Manusia	0,58	0,63
		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,91	10,59
		Harapan Lama Sekolah	14,39	14,79
	Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,26	75,66
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	130	85

MISI/ TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2025	TARGE T 2030
	untuk mendukung produktivitas	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,5	16,11
2.LUMBUNG PANGAN NASIONAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN				
Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		Indeks Ketahanan Pangan	84,01	87,98
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5,9
	Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, Perkebunan, kehutanan dan peternakan.	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	8,88	5,20
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau	68,69	72,79
		Indeks Ekonomi Biru	25,19	36,41
		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,613	0,622
		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	51,7	61,27
3. NAGARI/DESA BASIS KEMAJUAN				
Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing		Persentase Desa Mandiri (%)	7,83	11,83
		Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	39,22	40,12
	Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,24	1,79
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,37 - 5,76	4,43 - 5,28
		Tingkat Kemiskinan (%)	4,5- 5,1	3,39 - 3,96
	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	73,77
		Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	8,57	18,57
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	41,23	55,92
		Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	29	46,66
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11	30,83
4.SUMATERA BARAT PUSAT PERDAGANGAN DAN BISNIS SUMATERA BAGIAN BARAT				
Terwujudnya pertumbuhan		Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,94
		Tingkat Inflasi (%)	2,8 - 3,6	2,33

MISI/ TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2025	TARGE T 2030
ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,79	31,61
	Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	8,46 - 8,53	9,23 - 9,38
	Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	75,31	77,73
		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	38	46
	Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah	Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%)	86,72	89,87
5. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKEADILAN DAN SIAP TANGGAP BENCANA				
Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata , kesejahteraan Masyarakat dan mitigasi bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	79
		Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	52,62	62,27
	Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	170,51	157,87
		Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) (kumulatif)	18,08	22,54
		Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) (tahunan)	28,05	36,62
	Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan	Kapasitas Air Baku (m³/detik)	1,08	2,82
	Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, Kawasan pariwisata serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1	6,41
		Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi	2,95	2,50
6. MEMBANGUN KEHIDUPAN BERADAT DAN BERBUDAYA BERBASIS AGAMA, KEARIFAN LOKAL MELALUI DUKUNGAN KELUARGA YANG BERKUALITAS				
Terwujudnya masyarakat beradab dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas		Indeks Demokrasi Indonesia		
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53 - 69,54	70,78 - 70,8
	Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,58 - 60,65	62,98 - 63,18
	Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,23 - 72,31	73,84 - 74,12
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,405 - 0,390	0,35 - 0,33

MISI/ TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELIN E 2025	TARGE T 2030
	Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	57,76	62,11
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,15	66,65
7. TINGKAT DAYA SAING PARIWISATA DAN AKSELERASI EKONOMI KREATIF UNTUK UMKM				
Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,43	1,68
		Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)	43,08	59,24
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (orang)	21.104.516	30.899.122	
	Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)	1,11	1,13
		Rasio kewirausahaan Provinsi (%)	3,59	5,04
8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF				
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif yang efektif dan berbasis digital	Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Indeks Integritas Nasional	73,16	76,9
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,9	4,18
		Indeks Reformasi Hukum	70	77,65
	Meningkatnya kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah	Indeks Pelayanan Publik	3,84	4,13
	Meningkatnya pendapatan daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,17	1,3

Sumber: RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2025-2029

D. VISI DAN MISI RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

1). VISI RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

Gambaran kondisi yang diinginkan dalam 5 tahun ke depan adalah meningkatnya kualitas Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, yang didukung dengan kinerja aparatur sepenuh hati dan penuh integritas, sehingga Payakumbuh maju, sehat, dan sejahtera dapat diwujudkan. Merujuk kepada pengumuman Komisi Pemilihan Umum nomor 27/PL.02.2-Pu/1376/2024 tentang visi, misi dan program pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh tahun 2024 dan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih adalah sebagai berikut:

“PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN, DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF”

Visi ini selanjutnya akan menjadi visi kota Payakumbuh yang menjadi arah pandang semua komponen penyelenggara pemerintahan, Masyarakat dan seluruh stakeholders untuk menyatukan gerak dan langkah dalam Pembangunan kota Payakumbuh. Berdasarkan pendekatan perencanaan secara politis maka pada visi ini terdapat penekanan kebijakan daerah sehingga tanpa mengubah substansi politik. Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Payakumbuh meliputi wilayah Payakumbuh dengan kesatuan geografis, kesatuan demografis dan kesatuan budaya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu dan berkembang sejak Pemerintah Kotamadya Payakumbuh disahkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970.

Maju memiliki arti menjadi **terdepan dan unggul** hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai kualitas hidup yang relatif tinggi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan infrastruktur, sarana dan utilitas yang memperhatikan efek keberlanjutan lingkungan. Kota Maju merupakan sebuah kota yang dipahami maju dari kedua belah pihak: dari kota dan juga masyarakatnya. Kota yang maju tidak hanya terlihat pada ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, tetapi juga pada masyarakatnya yang seimbang baik dari segi kualitas dan juga distribusi kesejahteraannya. Kota yang maju juga ditandai dengan dukungan oleh infrastruktur yang memadai untuk memastikan kualitas hidup yang lebih tinggi dan kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi.

Bermartabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “bermartabat” yaitu memiliki harga diri, kesadaran, dan kebanggaan akan identitas dan jati diri. Kota yang bermartabat memberikan kepercayaan dari masyarakatnya bahwa Kota mereka memiliki karakteristik yang menjadikan mereka bangga akan kotanya. Harga diri menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluralitas budaya yang ada disekitar kita. Oleh karena itu untuk memunculkan sebuah kota yang bermartabat, kota tersebut harus mampu memberikan kualitas hidup yang tinggi, kemajuan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, pola pemerintahan yang efektif dan efisien serta keberlanjutan terhadap lingkungan perkotaan, kebudayaan dan identitas jati diri kota.

Pemberdayaan adalah proses membangun dan meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemandirian individu, kelompok, atau masyarakat untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan dilaksanakan pada berbagai bidang, tidak hanya pada kemampuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran dan

kemandirian dalam menghadapi masalah sosial ataupun berpartisipasi dalam proses politik dan memperjuangkan hak-hak mereka tetapi juga pemberdayaan lingkungan dalam mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Pemberdayaan selain meningkatkan kemampuan, dan kemandirian juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi individu atau kelompok dalam proses pembangunan sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup, dan tercapainya keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

Pengembangan Kualitas Pendidikan adalah proses meningkatkan atau memperbaiki kemampuan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Pengembangan diartikan adalah peningkatan yang sifatnya tematik, dan parsial tetapi berkelanjutan. Kualitas pendidikan yang baik dipengaruhi oleh kurikulum, metode pembelajaran, kualifikasi guru, infrastruktur, dan tata kelola pendidikan. Pengembangan yang diharapkan dilakukan per-individu melalui peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan individu, pengembangan organisasi melalui peningkatan kemampuan, efisiensi dan efektifitas dan pengembangan masyarakat melalui meningkatkan kualitas hidup, serta memiliki kemampuan bersaing dan berinovasi. Kualitas pendidikan yang baik dipengaruhi oleh kurikulum, metode pembelajaran, kualifikasi guru, infrastruktur, dan tata kelola pendidikan. Walaupun begitu tidak hanya faktor internal saja yang diperhatikan, tetapi juga faktor luar diantaranya Kondisi sosial ekonomi: Kemiskinan, malnutrisi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan yang berdampak negatif pada prestasi siswa. Pengembangan Kualitas pendidikan diharapkan mendorong budaya Pendidikan yang menghargai Pendidikan

Sentra UMKM yang Kompetitif adalah Sentra UMKM yang memiliki kemampuan atau keadaan di mana produk dapat bersaing dengan efektif dalam lingkungan yang sama. Secara literal Sentra UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah suatu lokasi atau kawasan yang dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Tetapi secara konsep pembentukan Sentra UMKM bertujuan untuk memudahkan pembinaan dan pengembangan kapasitas UMKM karena ter-konsentrasi pada satu wilayah, dan memudahkan dalam penyediaan fasilitas pendukung, baik infrastruktur maupun utilitas, serta memudahkan pengelolaan manajemen dan perluasan akses pasar. Sehingga nantinya UMKM tersebut akan meningkat kemampuan produksi, manajemen, pemasaran, dan pendapatan UMKM yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Jadi sentra UMKM yang kompetitif merupakan Sentra UMKM yang dalam konteks bisnis, memiliki kemampuan untuk meningkatkan pangsa pasar, pendapatan, pengembangan produk atau jasa yang inovatif, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu juga mampu meningkatkan keterampilan, prestasi dan pencapaiannya hingga siap bersaing dengan kabupaten/ Kota lainnya.

Dari uraian visi dapat dituangkan pokok-pokok visi adalah maju, sehat dan sejahtera: dari Kota yang maju, masyarakat yang sehat akan melahirkan Payakumbuh yang Sejahtera. walaupun diungkap dalam susunan kata dan kalimat yang berbeda, namun ketiga pokok visi tersebut memiliki isi, esensi,

pesan, dan makna yang saling mengait dan melanjut, antara yang awal dan yang kemudian, yang bertujuan untuk melahirkan arahan rinci program yang sesuai dengan konteks permasalahan dan bahasa perencanaan.

Dengan visi ini dapat diartikan bahwa pemerintah berkomitmen, konsisten dan berupaya dalam menyediakan sebuah kota, kota Payakumbuh yang maju dan bermartabat melalui pemberdayaan dan pengembangan warga dan kotanya dengan peningkatan kualitas dan kompetensi pada sektor pendidikan dan UMKM. Dengan harapan ***Kota Payakumbuh mampu bertransformasi dari kota persinggahan menjadi kota destinasi; destinasi pendidikan, destinasi kesehatan, destinasi kuliner, seni budaya dan olahraga.*** Untuk mencapai Payakumbuh maju dan bermartabat tersebut, dapat dilihat dari pencapaian sasaran visi sebagaimana tabel 3.5. Beberapa target sasaran visi ini mengacu pada target imperative sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 050-459-2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Tabel 3.5 Sasaran Visi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	64,21	72,02	82,14	92,57	103,84	116,29	129,51
		2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,82	4,95	5,06	5,17	5,31	5,43	5,55
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	3. Tingkat Kemiskinan (%)	5,19	4,54	4,32	4,17	3,99	3,84	3,63
		4. Rasio Gini (indeks)	0,313	0,311	0,310	0,309	0,308	0,306	0,305
		5. Pertumbuhan ekonomi (%)	4,53	5,02	5,79	7,12	7,36	7,65	6,22
3	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,0788	3,4000	3,4150	3,4400	3,4630	3,4824	3,5000
		7. Indeks Inovasi Daerah	54,62	54,85	55,15	55,25	55,50	55,95	56,05
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	8. Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	80,76	81,43	81,97	82,50	83,09	83,79	84,23
		9. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/Tenaga Kerja)	70,58	70,80	71,50	72,02	73,3	74,03	75
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,52	68,37	68,56	68,74	68,97	69,20	69,43

Sumber: RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

2). MISI RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi Pertama “Mewujudkan SDM yang berkualitas”. Mewujudkan SDM yang berkualitas dimaksudkan untuk melahirkan SDM yang memiliki kemampuan, pengetahuan, loyal, dan sikap yang dapat meningkatkan kinerja didukung dengan kesehatan yang baik. Karakteristik SDM yang berkualitas akan tercapai jika memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kepercayaan diri, watak yang dinamis, siap menghadapi perubahan, memiliki keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaan, memiliki sikap toleransi yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi, mampu bekerjasama dengan pihak lain, memahami bidangnya, mempunyai watak yang bermoral tinggi antara lain: jujur, menepati janji serta peka dengan hak dan kepentingan pihak lain. Sumber daya manusia yang berkualitas menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: *intelligence, creativity dan imagination*; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi otot, sehingga produktivitasnya meningkat dan mampu bersaing dengan SDM daerah lain. Intinya SDM yang berkualitas menyangkut aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik). Kondisi ini diharapkan melahirkan SDM yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya baik dalam kehidupan pribadi, maupun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Misi Kedua: “Mewujudkan iklim ekonomi yang kompetitif” Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, dan mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat, dan meningkatkan investasi di Kota Payakumbuh. Salah satu amanah pembangunan adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Payakumbuh diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran, mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri. Memastikan keterjangkauan dan kestabilan harga-harga kebutuhan pokok terutama bagi masyarakat tidak mampu. Menciptakan iklim ekonomi dan investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Payakumbuh. Lokomotif perekonomian Kota Payakumbuh merupakan sektor potensial yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat namun mengedepankan potensi lokal sebagai motor dan pilar utama perekonomian guna kemandirian ekonomi

lokal dan daya saing daerah. Sampai tahun 2024, tiga sektor penyumbang utama PDRB Kota Payakumbuh adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (25,02%), sektor konstruksi (13,64) serta sektor Transportasi dan Pergudangan (11,82%).

Misi Ketiga: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif” Pemerintah memegang peranan penting bagi perkembangan daerah melalui fungsi sebagai regulator serta fasilitator. Dukungan pemerintah dalam pembangunan daerah harus didukung oleh layanan publik yang prima. Untuk mencapai kondisi layanan prima tersebut perlu terwujud pemerintahan yang baik (**good government**) dan tata kelola yang baik (**good governance**). Layanan publik perlu didukung birokrasi yang bersih agar tidak menimbulkan biaya birokrasi tinggi. Pelayanan publik juga diharapkan mampu dinamis dan tangkas menjawab kebutuhan dan permasalahan yang terjadi dilapangan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin bervariasi kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien dengan melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi sehingga tata kelola pemerintah dapat berjalan efektif. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama dalam mendukung iklim investasi.

Misi Keempat: “Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat” Kebudayaan menjadi aset utama pembangunan. Kota Payakumbuh sebagai pusat perekonomian luak 50 tidak bisa mengesampingkan sejarah panjang Kota Payakumbuh yang mewariskan generasi saat ini dengan budaya, kesenian dan aspirasi kebudayaan lainnya untuk dikembangkan dengan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kebudayaan-kebudayaan lokal akan didorong untuk terus dikembangkan, tidak sekedar untuk melestarikan namun juga menjadi pemberi warna atas kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Payakumbuh. Kebudayaan juga tidak hanya dipandang sebagai kondisi statis, namun terus berkembang. Kreativitas masyarakat menjadi faktor penting dalam mengembangkan kebudayaan sekaligus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebudayaan tetap terus relevan dalam perkembangan zaman. Kota Payakumbuh sejatinya adalah rumah besar bagi semua orang di luak limopuluah. Nilai-nilai kekeluargaan menjadi pusat gravitasi semua aktivitas individunya. Nilai moral, kesusilaan, agama dan religius digerakkan di lingkup masyarakat terkecil atau keluarga. Keluarga yang harmonis dan sehat secara mental juga akan melahirkan masyarakat yang mampu menempatkan dirinya dalam dinamika zaman yang terus berubah.

Misi Kelima: “Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan” Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang tertib, dan inklusif dengan pemenuhan infrastruktur kota yang memadai dan aman bagi setiap penghuninya terutama rasa aman bagi perempuan dan anak. Keamanan tersebut tercipta melalui kuatnya kesadaran kolektif masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Peran serta masyarakat tersebut dibarengi dengan upaya perbaikan layanan Pemerintah, serta penggunaan teknologi yang mampu meningkatkan

pengawasan keamanan di tempat-tempat publik serta respons atas pengaduan korban kekerasan secara baik dan cepat. Misi ini juga dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan pengelolaan tata ruang dan wilayah, mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan menjadi kunci perbaikan kualitas lingkungan di Kota Payakumbuh.

Tabel 3.6 Keterkaitan Visi dengan Misi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

VISI	POKOK- POKOK VISI	MISI
Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif	Maju	Misi Pertama: Mewujudkan SDM yang berkualitas Misi Ketiga: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif. Misi Kelima: Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan.
	Sehat	Misi Pertama: Mewujudkan SDM yang berkualitas
	Sejahtera	Misi Kedua: Mewujudkan iklim ekonomi yang kompetitif Misi Keempat: Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Pokok-pokok visi dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:

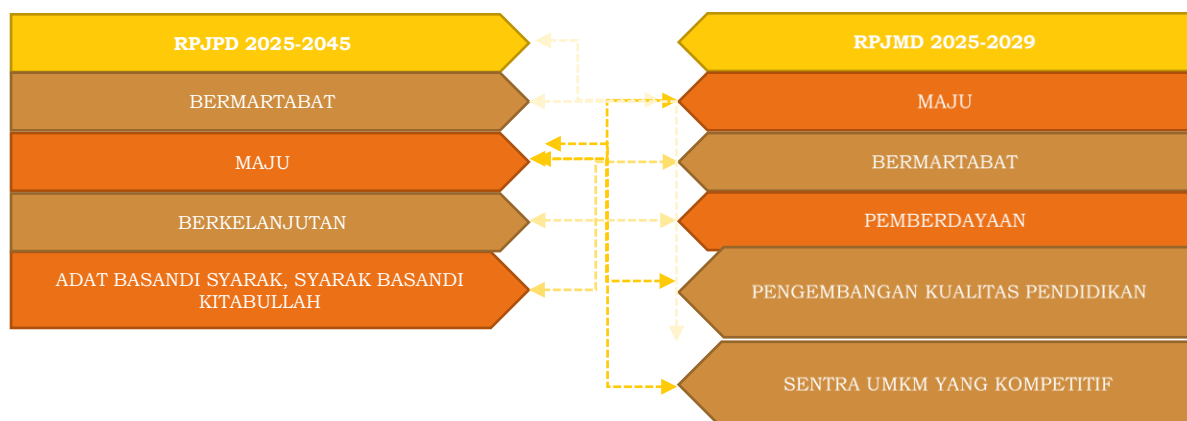
1. **Payakumbuh Maju:** Memiliki sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan, antara lain menghadirkan pusat perbelanjaan yang nyaman melalui Revitalisasi dan modernisasi Pasar Tradisional Ibuh tematik, tertata, rapi serta bersih. Selain itu juga pendidikan yang berkualitas dan menciptakan sumberdaya manusia yang kompetitif dan berdaya saing. Ditindaklanjuti melalui pemerataan pendidikan dasar dan mendukung sekolah rakyat serta memastikan kelanjutan pendidikan melalui insentif atau kerjasama dengan satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Disamping itu juga maju dari sisi pemerintahan yang menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan kondusif dengan aparatur yang jujur dan loyal.
2. **Payakumbuh Sehat:** Peningkatan pelayanan kesehatan yang **paripurna**. Bidang kesehatan membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, peningkatan fasilitas dan pelayanan RSUD di Kota Payakumbuh. Juga meliputi Gizi Balita, TBC, Kelembagaan layanan kesehatan, kesehatan lingkungan dan sanitasi.
3. **Payakumbuh Sejahtera :** Peningkatan ekonomi masyarakat yang mampu bersaing dengan daerah sekitarnya, lapangan kerja yang berkualitas dengan prioritas pada kemandirian Masyarakat secara sosial dan ekonomi dengan kawasan pilihan untuk produksi komoditas dari hulu ke hilir, termasuk peningkatan ekonomi berbasis masjid serta partisipasi masyarakat dan dukungan pihak terkait.

3). KESELARASAN VISI DAN MISI RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029 DENGAN VISI DAN MISI RPJPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2045

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Visi jangka panjang Kota Payakumbuh adalah **“Payakumbuh Bermartabat, Maju dan Berkelanjutan sebagai Perwujudan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**, diwujudkan melalui visi jangka menengah yaitu **“Payakumbuh Kota Maju yang Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif”**.

Pada RPJPD 2025-2045, dinyatakan bahwa Kota Payakumbuh yang akan dituju di masa depan adalah **“Payakumbuh Bermartabat, Maju dan berkelanjutan sebagai Perwujudan Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**. Visi ini kemudian diturunkan dan diperkuat di dalam RPJMD 2025-2029 dengan penambahan penekanan pada fokus di pemberdayaan dan pengembangan, kualitas pendidikan dan Sentra UMKM, atas dasar ketiga ide tersebut, maka visi RPJMD 2025-2029 dirangkum dalam susunan kata dan kalimat **“Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif”**, yang menyandang arti bahwa (1) **“Maju”** sehingga Kota Payakumbuh dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri, dan lebih baik lagi, untuk menuju pada masyarakat yang sejahtera. (2) **“Martabat”** sehingga dengan kemajuan yang diraih, Kota Payakumbuh dapat menjalankan kehidupan sosial budayanya dengan berkarakter yang mencerminkan harga diri, kesadaran, dan kebanggaan warga atas kotanya. (3) **“Pemberdayaan”** yang menjadi fokus dari pembangunan kota, bahwa tidak hanya menciptakan kota yang maju dan bermartabat tetapi pembangunan daerah tahun 2025-2029 bertujuan untuk membangun masyarakat Payakumbuh lebih berdaya dan lebih berkembang. (4) **“Pengembangan Kualitas Pendidikan”** Pendidikan yang berkualitas menjadi fokus pengembangan Kota, dengan menjadikan (5) **“Sentra UMKM yang Kompetitif”** sebagai motor penggerak perekonomian daerah.

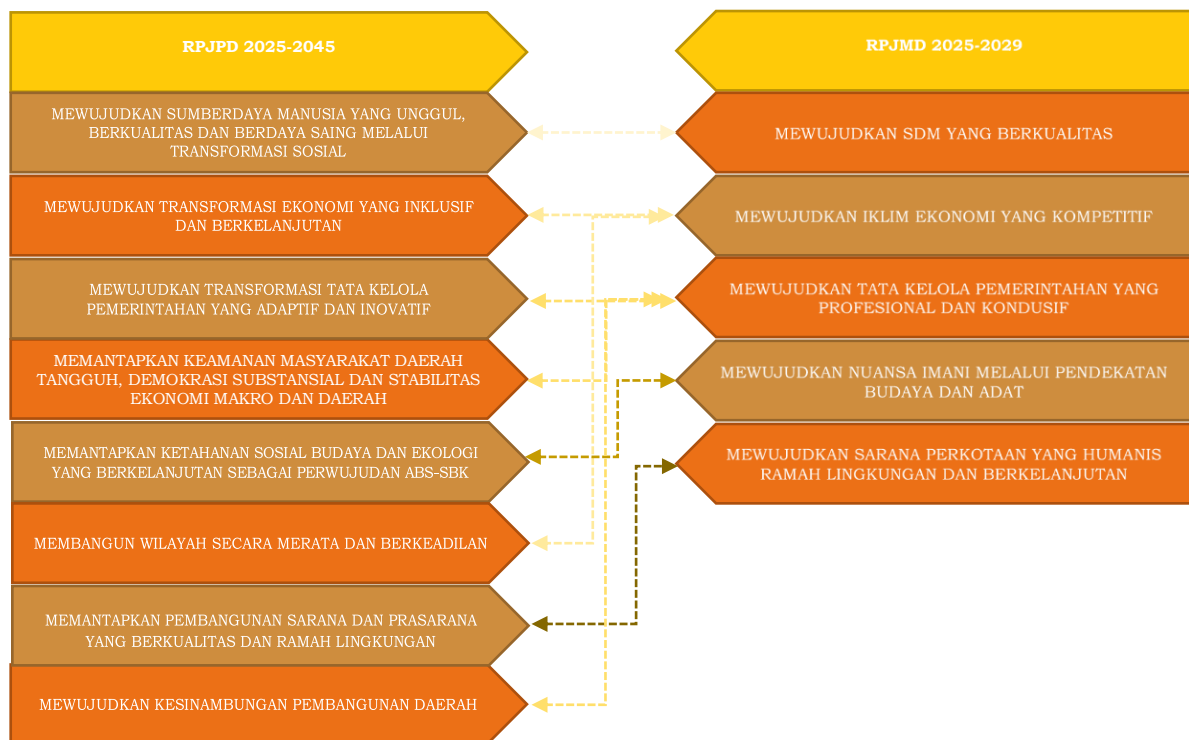
Diagram 3.1 Keterkaitan Visi RPJPD dengan Visi RPJMD



Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Dengan perkataan lain yang lebih singkat dapat disimpulkan, bahwa keterkaitan antara visi daerah pada RPJPD tahun 2025-2045 dan visi RPJMD 2025-2029 adalah pada penekanan pentingnya membangun manusia dan Kota Payakumbuh yang maju, sehat dan dan sejahtera. Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Dimana dapat dianalisis keselarasan kandungan antara Misi Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah.

Diagram 3.2 Keterkaitan Misi RPJPD dengan Misi RPJMD



Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Misi 1 jangka panjang **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing Melalui Transformasi Sosial”** diwujudkan melalui misi 1 jangka menengah **“Mewujudkan SDM yang Berkualitas”**.

Misi 2 jangka panjang **“Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** diwujudkan melalui misi 2 jangka menengah **“Mewujudkan Iklim Ekonomi yang Kompetitif”**.

Misi 3 jangka panjang **“Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Inovatif”** diwujudkan melalui misi 3 jangka menengah **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif”**.

Misi 4 jangka panjang **“Memantapkan Keamanan Masyarakat Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro dan Daerah”** diwujudkan melalui misi 3 jangka menengah **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif”**.

Misi 5 jangka panjang **“Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan sebagai Perwujudan ABS-SBK”** diwujudkan melalui misi 4 jangka menengah **“Mewujudkan Nuansa Imani Melalui Pendekatan Budaya dan Adat”**.

Misi 6 jangka panjang **“Membangun Wilayah secara Merata dan Berkeadilan”** diwujudkan melalui misi 2 jangka menengah **“Mewujudkan Iklim Ekonomi yang Kompetitif”**.

Misi 7 jangka panjang **“Memantapkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan”** diwujudkan melalui misi 5 jangka menengah **“Mewujudkan Sarana Perkotaan yang Humanis Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan”**.

Misi 8 jangka panjang **“Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah”** diwujudkan melalui misi 3 jangka menengah **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif”**.

4). KESELARASAN VISI DAN MISI RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029 DENGAN VISI, MISI RPJMN TAHUN 2025-2029, DAN VISI, MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2025-2029

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia adalah: **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Dokumen RPJMN ini telah ditetapkan pemerintah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita.

Adapun Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 adalah Sumatera Barat madani yang maju dan berkeadilan, dimana madani dimaknai sebagai Masyarakat Sumbar yang religius & berperadaban maju. Berbasis pada nilai-nilai, norma-norma, hukum dan moral Agama, dan ‘Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai. Masyarakat yang berlandaskan ukhuwah islamiyyah, menghormati perbedaan, bersikap demokratis, terbuka (inklusif), gotong royong dan kekeluargaan. Sedangkan “maju” adalah provinsi yang berkembang secara holistik, mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan warganya secara berkelanjutan. Dan berkeadilan diartikan sebagai Propinsi yang menerapkan makna keadilan dalam pembangunan berbagai aspeknya, yang tidak ada keberpihakan, proporsional dan profesional. Adil dalam arti kewilayahan dan seluruh dimensi sektor kehidupan.

Adapun Visi Pembangunan Kota Payakumbuh mendatang (2025-2029) yaitu **“Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan,**

Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif”.

Dengan visi ini dapat diartikan bahwa pemerintah berkomitmen, konsisten dan berupaya dalam menyediakan sebuah kota, Kota Payakumbuh yang maju dan bermartabat melalui pemberdayaan dan pengembangan warga dan kotanya dengan peningkatan kualitas dan kompetensi pada sektor pendidikan dan UMKM.

Diagram 3.3 Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Prov. Sumbar dengan RPJMD Kota Payakumbuh



Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

Lebih lanjut, uraian keterkaitan antara Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam Diagram diatas.

Diagram 3.4 Keterkaitan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumbar dengan RPJMD Kota Payakumbuh

MISI RPJMN 2025-2029 (ASTA CITA)

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2025-2029

1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas;
2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan;
3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan;
4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat;
5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana;
6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas;
7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM;
8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

MISI RPJMD KOTA PAYAKUMBUH 2025-2029

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas
2. Mewujudkan iklim ekonomi yang kompetitif
3. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Professional dan kondusif
4. Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat
5. Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

5). TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis tingkat tinggi yang nantinya menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Misi Pertama: **“Mewujudkan SDM yang Berkualitas”**. Dimaksudkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berpendidikan, kesehatan yang baik sehingga mampu bersaing.

Tujuan: Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing

Sasaran:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan
3. Menurunkan Tingkat Kemiskinan
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

Misi Kedua: **“Mewujudkan Iklim Ekonomi yang Kompetitif”**. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkelanjutan, dan inklusif.

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif

Sasaran:

1. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat
2. Meningkatnya Sektor Strategis Berbasis Potensi Lokal
3. Meningkatnya Iklim Investasi Daerah

Misi Ketiga: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif”**. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, serta mampu bersaing dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
3. Meningkatnya Pendapatan Daerah
4. Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Misi Keempat: **“Mewujudkan Nuansa Imani melalui Pendekatan Budaya dan Adat”**, dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, dengan tetap menghormati serta memanfaatkan kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat sebagai sarana dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Tujuan: Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK

Sasaran: Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Budaya dalam Kehidupan Bermasyarakat

Misi Kelima: **“Mewujudkan Sarana Perkotaan yang Humanis Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan”**, dimaksudkan untuk menciptakan infrastruktur dan fasilitas kota yang nyaman bagi masyarakat, selaras dengan alam, serta dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan.

Tujuan: Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan.

Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya Pembangunan infrastruktur yang berkualitas .

Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran serta indikator dan target indikator kinerja utama (IKU) dan indikator utama Pembangunan (IUP) dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut. Terkait beberapa target di tetapkan imperative sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 050-459-2025 tentang Evaluasi Rancangan Perda Kota Payakumbuh tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Tabel 3.7 Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VISI											
Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM Yang Kompetitif											
MISI-1: Mewujudkan SDM yang berkualitas											
	Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	80,76	81,43	81,97	82,50	83,09	83,72	84,23	IKU
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	75,08	75,31	75,57	75,83	76,10	76,36	76,62	IKU/IUP
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	16,40	13,70	12,45	11,20	9,95	8,70	7,45	IKU/IUP
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	8,17	5,81	5,45	5,09	4,73	4,01	3,65	IKU/IUP
			Jumlah Kematian Ibu (jiwa) *****	2	2	2	2	2	1	1	IUP
			Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)	70,14	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	IUP
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%)	88,90	94,00	94,00	95,00	95,00	96,00	96,00	IUP	
	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,57	14,62	14,75	14,91	15,02	15,16	15,29	IKU/IUP	
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Literasi (%)	87,50	87,50	87,90	88,20	88,80	89,25	89,50	IUP	
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Numerasi (%)	84,40	84,40	85,65	86,50	87,75	89,00	90,25	IUP	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,89	11,16	11,30	11,38	11,48	11,62	11,79	IUP
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	21,65	21,70	21,90	22,00	22,20	22,40	22,50	IUP
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	76,17	79,09	79,67	80,85	80,82	81,40	81,98	IUP
		Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,19	4,54	4,32	4,17	3,99	3,84	3,63	IKU/IUP
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IUP
			Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	19,96	31,38	33,78	36,18	38,58	40,98	43,39	IUP
			Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan (orang)*****	3	5	15	25	35	37	40	IUP
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (indeks)	65,6	66,8	68,0	69,10	70,10	71,10	72,10	IKU/IUP
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,175	0,151	0,127	0,103	0,079	0,055	0,031	IKU/IUP
			Indeks Perlindungan Khusus Anak	81,51	82,92	83,25	83,62	83,85	84,01	84,33	IUP
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	60,51	63,89	64,00	64,20	64,60	64,90	65,21	IUP
MISI-2 Mewujudkan Iklim	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,53	5,02	5,79	7,12	7,36	7,65	6,22	IKU/ Indikator sasaran visi RPJPD

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ekonomi yang kompetitif	Berkualitas dan inklusif		Indek Daya Saing Daerah (IDSD)	3,89	3,93	3,96	4,00	4,04	4,09	4,14	IKU
			Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap PDRB Provinsi (%)	2,84	2,89	2,97	3,00	3,04	3,07	3,10	IKU
			PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	64,21	72,02	82,14	92,57	103,84	116,29	129,51	IKU/Indikator sasaran visi RPJPD
		Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Rasio Gini (indeks)	0,313	0,311	0,310	0,309	0,308	0,306	0,305	IKU/ indikator sasaran Visi RPJPD
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,87	4,75	4,64	4,52	4,43	4,33	4,26	IKU/IUP
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/ tenaga kerja)	70,58	70,80	71,50	72,02	73,3	74,03	75	Indikator sasaran visi RPJPD
			Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	53,73	53,81	54,38	55,58	56,78	57,98	61,66	IUP
			Rasio Kewirausahaan (%)	7,52	9,30	9,34	9,38	9,41	9,45	9,78	IUP
		Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	33,33	33,34	33,35	33,36	33,37	33,38	33,39	IKU
			Proporsi jumlah UKM non pertanian (%)	1,88	4,69	4,71	4,73	4,75	4,77	13,636	IUP
			Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	1,59	2,365	2,407	2,449	2,491	2,533	2,820	IUP
			Proporsi jumlah IKM (%)	1,85	3,43	3,51	3,59	3,66	3,74	3,82	IUP
			Ketersediaan Pangan Utama (ton)	19.780	19.785	19.790	19.795	19.800	19.805	19.810	IUP
			Stabilisasi Harga Beras (%)	1.63	≤10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤10	IUP
			Stabilisasi Harga Cabe (%)	20,69	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	IUP
			Stabilisasi Harga Bawang (%)	13,40	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	IUP
			Tingkat Inflasi *	-	-	-	-	-	-	-	IUP
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	19,65	19,70	19,75	19,80	19,85	19,90	20,00	IUP

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	4,82	4,95	5,06	5,17	5,31	5,43	5,55	IUP
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (%)	3,49	3,60	3,62	3,64	3,66	3,68	3,98	IUP
			Jumlah Tamu wisatawan mancanegara (ribu orang)	0,01	0,02	0,025	0,03	0,035	0,04	2,30	IUP
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta rupiah/orang)	30,97	35,27	35,52	35,68	35,83	35,98	36,03	IUP
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)	1,938	3,595	3,585	3,575	3,555	3,545	3,963	IUP
			Return Of Asset (ROA) BUMD (%)	6,17	6,18	6,19	6,20	6,20	6,21	6,22	IUP
		Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rp)	658,63	660	665	670	675	680	685	IKU
			Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	5,98	6,00	6,95	9,65	12,35	15,05	17,75	IUP
			Nilai Transaksi Saham Per Kapita (rupiah)	3.800.000	3.891.998	4.562.126	5.332.255	5.332.254,8	6.102.383,2	7.642.640	IUP
			Total Kredit/PDRB (%)	nA	24,40	25,73	27,07	28,40	29,74	31,08	IUP
			Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan (%)	6,00	6,05	6,08	6,18	6,41	6,63	6,86	IUP
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	25,48	24,86	24,52	24,19	23,85	23,51	23,18	IUP
MISI-3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan kondusif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	83,28	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	IKU
			Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)	75,51	78,50	78,88	79,18	79,48	79,78	80,00	IUP
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	3,75	3,75	3,84	3,93	4,03	4,12	4,21	IKU/IUP
			Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	-	-	1,5	1,5	2	2	2,5	IKU

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Indeks Pelayanan Publik	4,50	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55	4,56	IKU/IUP
			Indeks Kepuasan Masyarakat	88,37	88,60	88,80	88,85	88,90	88,95	89,00	IKU
		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP	76,01	78,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	IKU
			Opini BPK atas laporan keuangan (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU
			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah	3,0788	3,4000	3,4150	3,4400	3,4630	3,4824	3,5000	Indikator Sasaran visi
			Indeks Masyarakat Digital Indonesia (indeks)	44,39	52	54	56	57	58	59	IUP
			Indeks Reformasi Hukum (nilai)	87,00	87,20	87,40	87,60	87,80	87,90	88,00	IUP
			Indeks Inovasi Daerah (indeks)	54,62	54,85	55,15	55,25	55,50	55,95	56,05	Indikator Sasaran visi
		Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	0,165	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	IKU
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,25	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	IUP
		Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum (%)	28,49	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	IKU/IUP
			Persentase penegakan Perda (%)	100	100	100	100	100	100	100	IUP

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk)	3,06	3,84	3,83	3,82	3,81	3,80	3,80	IUP
			Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif (%)	91,78	91,95	92,58	93,21	93,84	94,47	95,10	IUP
			Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	100	100	100	100	IUP
			Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	IUP
			Indeks Risiko Bencana (IRBI)	104,80	103,52	103,51	102,23	100,95	99,67	98,39	IUP
MISI-4: Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat	Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK		IPK berbasis ABS SBK (indeks)	72,09	72,40	73,00	73,80	74,86	75,05	75,71	IKU/IUP
		Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Karya Budaya yang Ditetapkan	2,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00	IKU
			Cakupan Penguatan idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan (%)	57,65	58,35	58,70	58,90	59,10	59,30	60,00	IKU
MISI-5: Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (indeks)	58,52	68,37	68,58	68,80	69,01	69,22	69,43	IKU/IUP
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15,90	19,68	23,54	27,42	30,90	34,79	38,48	IKU/IUP

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Indeks Kualitas Lahan (indeks) ****	27,50	52,73	52,80	52,87	52,94	53,01	53,10	IUP
			RT dengan Akses Sanitasi Aman (%)	19,48	20,48	22,31	24,19	25,08	26,16	30,00	IUP
			Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	nA	33,13	39,68	46,05	52,26	58,37	64,82	IUP
		Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	63,19	64,09	64,62	65,76	66,91	67,51	68,13	IKU
			Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%)	81,04	82,73	85,37	88,01	90,65	94,93	95,93	IUP
			Konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita)	1.138	1.273	1.407	1.513	1.652	1.749	1.885	IUP
			Kapasitas Air Baku (m3/detik)	5,21	5,21	5,46	6,60	6,61	6,62	6,62	IUP
			Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	89,97	90,41	90,61	90,81	91,52	92,23	92,94	IUP

Catatan:

IUP: Indikator Utama Pembangunan, merupakan indikator yang terdapat dalam RPJPD

IKU: Indikator Kinerja Utama

*Perhitungan inflasi tidak dilakukan untuk Kota Payakumbuh.

** Proyeksi menggunakan formula sesuai RPJPD

**** Indikator Indeks Kualitas Lahan merupakan indikator pengganti indeks tutupan lahan, sesuai dengan formula baru dalam penghitungan IKLH

***** Indikator Jumlah kematian Ibu merupakan indikator pengganti Angka kematian Ibu sesuai surat Kemenkes nomor PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029

***** "Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan " merupakan indikator proxy pengganti indikator IUP " Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal" sesuai surat Keputusan Gubernur Sumbar nomor 050-459-2025 tentang Evaluasi Ranperda Kota Payakumbuh tentang RPJMD 2025-2029.

2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DALAM MENCAIPAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029

1). STRATEGI

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, pentahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Dengan kata lain strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan yang bersifat operasional. Secara sederhana, perumusan strategi dapat memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah agar diperoleh strategi yang lebih terarah dalam pencapaian sasaran pembangunan.

RPJMN 2025-2029 secara khusus menekankan strategi pembangunan nasional sebagaimana terdapat pada gambar berikut:



Tabel 3.8 Strategi Pentahapan Pembangunan RPJMD

TAHAP 1 (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
Peningkatan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat melalui: 1. peningkatan produktivitas sektor sektor perekonomian dan UMKM; 2. melakukan perbaikan kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan tenaga kerja) dan upaya	Pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan sosial melalui: 1. keberlanjutan pembangunan sumberdaya pendidikan, Kesehatan dan peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat, 2. melanjutkan pembangunan infrastruktur	Sebagai <i>midle of term</i> dari rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah pemantapan pembangunan diberbagai bidang dengan memperhatikan capaian sasaran tahun-tahun sebelumnya sebagai fokus pembangunan dan akan mengedepankan	Dalam rangka menuju daya saing daerah, maka arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada pemantapan produktivitas semua sektor ekonomi dengan semakin meluasnya dunia usaha yang didukung dengan pengembangan infrastruktur yang	Diarahkan pada Pemenuhan target-target pembangunan pada sektor-sektor atau bidang yang masih tertinggal; pemenuhan layanan dasar yang berkualitas; Penyediaan infrastruktur dan tata Kelola yang mantap mencapai

TAHAP 1 (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
penanggulangan kemiskinan; 3. perbaikan kinerja birokrasi dan layanan publik di berbagai bidang dengan dukungan teknologi informasi diarahkan untuk meraih prestasi; 4. perbaikan dan pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan dan difokuskan pada pembangunan dan peningkatan jalan sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan/Kawasan strategis dan infrastruktur publik lainnya menuju masyarakat maju bermartabat dan sejahtera dalam tatanan kehidupan yang religi	daerah yang diharapkan telah berdampak nyata terhadap perkembangan ekonomi masyarakat khususnya sektor UMKM; 3. Pemantapan kinerja layanan birokrasi dan layanan publik sudah pada tahap pemenuhan SDM berkualitas dengan cakupan system layanan berbasis elektronik hingga tingkat Kelurahan; 4. upaya penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas program diharapkan telah berdampak pada penurunan angka kemiskinan.	sektor-sektor yang tertinggal. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik, pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung serta peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, akan terus ditata dan semakin disempurnakan. Pada tahap ini nilai-nilai pemberdayaan masyarakat diharapkan sudah mulai berkembang dengan baik dan bersinergi antar sektor pembangunan yang memang menjadi perhatian dan akan dikedepankan menuju masyarakat Kota Payakumbuh yang maju dan berdaya saing	semakin mantap, pengembangan sumberdaya manusia yang semakin berkualitas, masyarakat yang semakin sejahtera dan mandiri dalam tatanan masyarakat yang religi. Dukungan pengarusutamaan tata kelola juga telah baik dan semakin akuntabel dengan budaya melayani yang semakin cepat, tepat dan terjangkau.	masyarakat yang maju dan berdaya saing.

Sedangkan berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan yang kemudian dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas daerah Tahun 2025-2029 yang dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.9 Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

MISI/ SASARAN		STRATEGI	
A	Mewujudkan SDM yang berkualitas		
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
2	Meningkatnya pemerataan kualitas Pendidikan	2	Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan berkeadilan
		3	Meningkatkan literasi dan budaya baca masyarakat
		4	Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olah Raga
		5	Meningkatkan derajat Pendidikan masyarakat
3		6	Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial masyarakat

MISI/ SASARAN		STRATEGI	
	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	7	Meningkatkan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	8	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat
		9	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
		10	Meningkatkan Pengendalian penduduk Ketahanan Keluarga
B	Mewujudkan Iklim Ekonomi yang kompetitif		
5	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	11	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
		12	Meningkatkan kesempatan kerja
6	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	13	Meningkatkan kualitas Usaha mikro dan koperasi
		14	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan
		15	Meningkatkan pertumbuhan sektor industri
		16	Menumbuhkembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif
		17	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor jasa pendidikan dan jasa kesehatan
		18	Mengoptimalkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi
		19	Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing pertanian, peternakan, perikanan dan Ketahanan Pangan
		20	Meningkatkan penerapan ekonomi hijau dalam pembangunan
7	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	21	Meningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi
C	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan kondusif		
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	22	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
		23	Mengembangkan pemerintahan berbasis digital
9	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	24	Mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi
		25	Mewujudkan SDM aparatur yang berkualitas
		26	Meningkatkan transparansi dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
10	Meningkatnya Pendapatan daerah	27	Optimalisasi sumber pendapatan daerah
		28	Pengembangan BUMD
11	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	29	Meningkatkan ketertiban umum dan pelayanan perlindungan masyarakat
		30	Meningkatkan kualitas pelayanan Penanggulangan Bencana
D	Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat		
12	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	31	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan
		32	Meningkatkan pengembangan kebudayaan
E	Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan		
13		33	Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan

MISI/ SASARAN		STRATEGI	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	34	Meningkatkan pengelolaan sampah kota secara terpadu dan komprehensif
		35	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman
14	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	36	Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang inklusif dan ramah lingkungan
		37	Meningkatkan kualitas penataan kota

2). ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan disusun sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalisasikan pilihan strategi hingga memiliki fokus sesuai waktu pelaksanaannya. Sementara penekanan tema/fokus pembangunan setiap tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Arah kebijakan Kota Payakumbuh ditetapkan berdasarkan capaian sasaran pembangunan jangka menengah periode sebelumnya agar terdapat kesinambungan dalam pencapaian tujuan jangka panjang daerah.

Arah kebijakan Pembangunan jangka menengah Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Strategi, Arah Kebijakan dan Pentahapan RPJMD 2025-2029

VISI		PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF							
MISI	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2025	2026	2027	2028	2029	
MEWUJUDKAN SDM YANG BERKUALITAS	1	Meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat	Peningkatan dan pemerataan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan (Pemenuhan sarpras puskesmas)	√	√	√	√	√	
			Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat	√	√	√	√	√	
			Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan (Sekolahkan dokter umum yang ada menjadi spesialis dan tenaga kesehatan lainnya)	√	√	√	√	√	
			Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan	√	√	√	√	√	
			Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.	√	√	√	√	√	
			Pengoptimalan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui gaya hidup bersih dan sehat (Mengoptimalkan upaya deteksi dini, vaksin dll)	√	√	√	√	√	
			Pengoptimalan sistem pengawasan obat dan makanan	√	√	√	√	√	
			Penanggulangan permasalahan gizi mikro dan gizi makro dan penuntasan masalah stunting.	√	√	√	√	√	
			Pengembangan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah dan swasta dalam mendukung kampanye imunisasi.	√	√	√	√	√	
			Dukungan pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan anak Balita.	√	√	√	√	√	
			Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat	√	√	√	√	√	
	2	Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata dan berkeadilan	Pemerataan dan peningkatan akses dan sarana prasarana Pendidikan PAUD, dasar dan menengah (Pembangunan PAUD di setiap kelurahan)	√	√	√	√	√	
			Penguatan digitalisasi sekolah		√	√	√	√	
			Penyediaan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan		√	√	√	√	

VISI	PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF							
MISI	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2025	2026	2027	2028	2029
			rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi (Beasiswa utk anak masyarakat miskin dan anak berprestasi)					
			Peningkatan kualitas kurikulum yang adaptif serta asesmen kompetensi minimum (Menunjang mulok, Pendidikan karakter dan inovasi)		√	√	√	√
			Peningkatan Kompetensi guru dan pengembangan guru berkarakter (Pelatihan dan kunjungan ke daerah yang lebih maju)	√	√	√	√	√
			Penguatan Pendidikan inklusif yang responsif untuk anak-anak disabilitas atau berkebutuhan khusus	√	√	√	√	√
			Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik	√	√	√	√	√
			Menyiapkan kebijakan yang mengatur tentang pendidikan sekolah negeri dan swasta (Kolaborasi Lembaga swasta, negeri dan diknas dalam meningkatkan kualitas pendidikan)	√	√	√	√	√
			Meningkatkan kualitas dan perijinan sekolah non formal, sehingga siswa dari sekolah non formal berbasis agama/sekolah tahfiz/ <i>home schooling</i> yang belum memiliki izin dari Dinas Pendidikan, tetap mendapatkan fasilitasi pendampingan dan dukungan untuk peningkatan kualitas pendidikannya (Siswa sekolah non formal berbasis agama/sekolah tahfiz/ <i>home schooling</i> tidak tercatat di dapodik sehingga berpengaruh ke APK APM)		√	√	√	√
			Mengembangkan masing-masing sekolah dengan keunggulan (mata pelajaran) tertentu		√	√	√	√
			Meningkatkan pendidikan karakter, sehingga tercipta budaya yang berkarakter dan berakhlak (Melalui kearifan lokal)	√	√	√	√	√
			Pemberian insentif untuk Guru TPA, guru PAUD dan Guru Non ASN (Menaikkan insentif secara berkala)	√	√	√	√	√
			Penguatan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.			√	√	√
			Pemetaan kebutuhan satuan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Regrouping sekolah)	√	√	√	√	√

VISI		PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF						
MISI	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2025	2026	2027	2028	2029
	3	Meningkatkan literasi dan budaya baca masyarakat	Pembangunan sekolah Garuda				√	√
			Pengembangan budaya literasi berbasis masyarakat	√	√	√	√	√
			Mendorong layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT	√	√	√	√	√
	4	Meningkatkan kualitas pemuda dan olah raga	Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olahraga prestasi	√	√	√	√	√
			Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga	√	√	√	√	√
			Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	√	√	√	√	√
	5	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dan/atau bagi yang berprestasi.	√	√	√	√	√
	6	Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial masyarakat	Perluasan cakupan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi masyarakat miskin, kelompok marjinal dan rentan	√	√	√	√	√
			Meningkatkan kualitas dan tata kelola data kemiskinan yang komprehensif, valid dan terintegrasi sebagai dasar dalam rancangan program yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan	√	√	√	√	√
	7	Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi	Meningkatkan pengentasan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).	√	√	√	√	√
			Meningkatkan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis fakta	√	√	√	√	√
			Pemberian fasilitasi bantuan modal usaha dalam peningkatan pendapatan masyarakat miskin	√	√	√	√	√
			Percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan graduasi yang terintegrasi	√	√	√	√	√
			Pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemiskinan	√	√	√	√	√
			Pemberian insentif untuk tenaga relawan sosial	√	√	√	√	√
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	√	√	√	√	√

VISI		PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF						
MISI	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2025	2026	2027	2028	2029
			Peningkatan sarana dan prasarana penggulungan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√
			Pendirian sekolah rakyat untuk masyarakat miskin				√	√
	8.	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Pembentukan dan penataan kelembagaan LKK, dan Penyusunan pedoman pengelolaan administrasi tata kelola kelembagaan)	√	√	√	√	√
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan (Meningkatkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat)	√	√	√	√	√
			Mendorong peningkatan kapasitas masyarakat antara lain melalui pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan,		√	√	√	√
			Penguatan dukungan anggaran operasional dan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK: RT, RW, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu)	√	√	√	√	√
			Penyediaan insentif bagi petugas RT, RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya.	√	√	√	√	√
			Meningkatan kolaborasi dan kemitraan dengan LKK dalam mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam pembangunan		√	√	√	√
			Penguatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pendidikan keluarga dan kelompok masyarakat pada aspek sosial, ekonomi serta politik	√	√	√	√	√
	9	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak	√	√	√	√	√
			Meningkatkan peran keluarga dalam melindungi hak-hak anak.	√	√	√	√	√
			Meningkatkan peran serta perempuan dalam ketahanan keluarga	√	√	√	√	√

VISI	PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF							
MISI	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2025	2026	2027	2028	2029
			Meningkatkan peran serta Perempuan dan anak dalam pembangunan	√	√	√	√	√
	10	Meningkatkan Pengendalian penduduk dan Ketahanan Keluarga	Fasilitasi pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1.000 hari pertama kelahiran.	√	√	√	√	√
			Pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan.	√	√	√	√	√
			Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat & kesejahteraan keluarga	√	√	√	√	√
			Meningkatkan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat	√	√	√	√	√
			Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal	√	√	√	√	√
MEWUJUDKAN IKLIM EKONOMI YANG KOMPETITIF	11	Meningkatkan kualitas dan produktivitas Tenaga kerja	Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar	√	√	√	√	√
			Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi bagi masyarakat.	√	√	√	√	√
			Menyiapkan program magang, pelatihan industri dan sertifikat keahlian bagi tamatan sekolah kejuruan.		√	√	√	√
	12	Meningkatkan kesempatan kerja	Memperkuat kerjasama, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap dan/atau menciptakan lapangan kerja baru	√	√	√	√	√
			Mengembangkan kluster industri dan inkubasi bisnis dalam penciptaan pengusaha baru	√	√	√	√	√
			Meningkatkan kualitas SDM <i>entrepreneur</i> melalui pemberdayaan, pendampingan serta pendidikan formal dan informal	√	√	√	√	√
	13	Meningkatkan kualitas usaha mikro dan koperasi	Mendorong peningkatan skala usaha mikro melalui penguatan modal usaha mikro	√	√	√	√	√
			Penguatan proses bisnis dan kapasitas layanan Usaha mikro melalui perluasan peran ekosistem digital	√	√	√	√	√

VISI		PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF						
MISI	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2025	2026	2027	2028	2029
			Perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	√	√	√	√	√
			Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal.	√	√	√	√	√
			Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro.	√	√	√	√	√
			Penataan basis data dan penyederhanaan regulasi pemberdayaan usaha mikro, pengembangan kewirausahaan, dan koperasi	√	√	√	√	√
			Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar (baik dalam pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM))	√	√	√	√	√
			Penguatan kelembagaan koperasi (Pengawasan, pembinaan koperasi)	√	√	√	√	√
			Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi (mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, pendampingan kelompok untuk berkoperasi, pengembangan jangkauan dan cakupan usaha koperasi, serta pengembangan inovasi koperasi)	√	√	√	√	√
			Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembentukan koperasi merah putih	√	√	√	√	√
	14	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	Meningkatkan upaya pengendalian harga pangan strategis (inflasi daerah, terkait upaya pengendalian inflasi/ stabilitas harga.).	√	√	√	√	√
			Revitalisasi dan penataan pasar tradisional, pertokoan Payakumbuh dan Pedagang Kaki Lima	√	√	√	√	√
			Penerapan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga.	√	√	√	√	√
			Mendorong pertumbuhan dan menciptakan iklim yg kondusif serta perluasan pangsa pasar yang potensial.	√	√	√	√	√

VISI		PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF						
MISI	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2025	2026	2027	2028	2029
			Peningkatan kualitas, inovasi dan promosi perdagangan secara berkelanjutan.	√	√	√	√	√
			Pemanfaatan peluang terhadap Pembangunan Tol Trans Sumatera: Bukittinggi - Payakumbuh - Bangkinang - Pekanbaru		√	√	√	√
	15	Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	Mendorong tumbuhnya industri dari hulu ke hilir.	√	√	√	√	√
			Penguatan kelembagaan sentra-sentra industri	√	√	√	√	√
			Meningkatnya industri halal dan standarisasi produk sebagai bagian dari pengembangan ekonomi syariah	√	√	√	√	√
			Penguatan infrastruktur pendukung industri.	√	√	√	√	√
			Mendorong pengembangan layanan usaha, pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dan kemudahan akses pembiayaan usaha	√	√	√	√	√
			Peningkatan kualitas pendataan dan pengawasan industri	√	√	√	√	√
			Mendorong tumbuhnya industri manufaktur		√	√	√	√
	16.	Menumbuhkembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif	Inovasi pariwisata berkelanjutan (<i>Sustainability Tourism</i>) berbasis komunitas (<i>Community Based Tourism</i>), budaya dan kearifan lokal	√	√	√	√	√
			Peningkatan promosi pariwisata Kota Payakumbuh antara lain melalui pelaksanaan <i>event-event</i> pariwisata, budaya dan olah raga	√	√	√	√	√
			Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif.	√	√	√	√	√
			Diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	√	√	√	√	√
			Pengembangan Ekonomi Kreatif dan UMKM dengan Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan UMKM melalui penyediaan akses pelatihan, pembiayaan, serta pemasaran produk produk lokal, terutama yang dapat diekspor ke negara negara <i>Global South</i> serta memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berinovasi dalam produk dan	√	√	√	√	√

VISI	PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF							
MISI	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2025	2026	2027	2028	2029
			layanan yang mendukung keberlanjutan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing					
	17	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor jasa pendidikan dan jasa kesehatan	Meningkatkan dukungan terhadap pendidikan tinggi dan vokasi menjadi kampus dan sekolah unggulan	√	√	√	√	√
			Meningkatkan layanan spesifik/khusus rumah sakit.		√	√	√	√
	18	Mengoptimalkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan fungsi pelayanan perdagangan dan jasa di Kota Payakumbuh dengan menata kembali pusat-pusat kegiatan ekonomi	√	√	√	√	√
			Meningkatkan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang memadai (Baik oleh pemerintah maupun swasta)	√	√	√	√	√
			Meningkatkan ketersediaan ruang usaha bagi pengusaha informal, mikro dan kecil di Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√
	19	Meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing pertanian, peternakan, perikanan dan Ketahanan Pangan	Penerapan teknologi untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan.	√	√	√	√	√
			Penyediaan bantuan sarana dan prasarana Pertanian, peternakan dan perikanan (Termasuk pemberian subsidi sarana pertanian untuk menekan biaya produksi, serta Penyediaan bibit dan benih varietas unggul)	√	√	√	√	√
			Penguatan infrastruktur pertanian, peternakan dan perikanan	√	√	√	√	√
			Meningkatkan pengawasan penerapan LP2B dengan penerapan insentif dan disinsentif penggunaan lahan	√	√	√	√	√
			Fasilitasi pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani	√	√	√	√	√
			Peningkatan kualitas SDM petani, peternak dan pembudidaya ikan	√	√	√	√	√
			Pembinaan dan pengembangan komoditi pertanian (padi, jagung, cabe, bawang, jamur, florikultura, dll)	√	√	√	√	√
			Penguatan lumbung pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian	√	√	√	√	√

VISI		PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF						
MISI	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2025	2026	2027	2028	2029
	20	Meningkatkan Penerapan ekonomi hijau dalam pembangunan	Meningkatkan ketersediaan pangan	√	√	√	√	√
			Optimalisasi upaya sirkular ekonomi (pengelolaan sampah, produksi dan konsumsi berkelanjutan)	√	√	√	√	√
			Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi pekerjaan sektor energi terbarukan, pertanian organik, dan usaha/industri ramah lingkungan	√	√	√	√	√
			Pemanfaatan transportasi ramah lingkungan			√	√	√
			Penerapan insentif ekonomi hijau melalui <i>green procurement</i> .		√	√	√	√
			Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan akibat kegiatan ekonomi	√	√	√	√	√
			Penataan kota yang rendah emisi dan ramah lingkungan			√	√	√
			Mengoptimalkan potensi kredit karbon dan pengelolaan sampah dengan prinsip zero waste untuk menghasilkan pendapatan baru dan mengurangi biaya operasional daerah dalam pengelolaan lingkungan		√	√	√	√
			Menerapkan kebijakan ramah lingkungan di setiap proyek pembangunan dan memprioritaskan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam		√	√	√	√
	21	Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	Peningkatan data potensi dan peluang investasi	√	√	√	√	√
			Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	√	√	√	√	√
			Peningkatan upaya promosi investasi	√	√	√	√	√
			Meningkatkan kualitas layanan PTSP kepada masyarakat dan dunia usaha.	√	√	√	√	√
			Penataan regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha.		√	√	√	√
			Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.	√	√	√	√	√
	22		Pengoptimalan layanan publik masyarakat	√	√	√	√	√

VISI		PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF						
MISI	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2025	2026	2027	2028	2029
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN KONDUSIF		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah					
			Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama daerah	√	√	√	√	√
			Optimalisasi pengelolaan arsip daerah	√	√	√	√	√
	23	Mengembangkan pemerintahan berbasis digital	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	√	√	√	√	√
			Penguatan aspek pemerintahan digital melalui implementasi SPBE	√	√	√	√	√
			Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	√	√	√	√	√
			Meningkatkan penerapan <i>Smartcity</i>	√	√	√	√	√
			Peningkatan dan pengembangan Infrastruktur Digital untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien, termasuk penerapan sistem berbasis cloud untuk administrasi pemerintahan dan sistem pembayaran pajak online yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat.	√	√	√	√	√
	24	Mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi	Penataan organisasi dan kelembagaan yang tepat fungsi dan adaptif	√	√	√	√	√
			Penguatan kelembagaan berbasis kinerja	√	√	√	√	√
			Penguatan fungsi koordinasi dan sinergi antar lembaga	√	√	√	√	√
	25	Mewujudkan SDM Aparatur yang berkualitas	Peningkatan kualitas ASN yang professional dan bebas korupsi.	√	√	√	√	√
			Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .	√	√	√	√	√
			Peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	√	√	√	√	√
			Optimalisasi pemenuhan sumber daya aparatur berbasis kebutuhan	√	√	√	√	√
	26	Meningkatkan transparansi dalam	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah	√	√	√	√	√

VISI		PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF							
MISI	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2025	2026	2027	2028	2029	
		perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.	√	√	√	√	√	
			Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah dalam layanan publik	√	√	√	√	√	
			Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.	√	√	√	√	√	
			Optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	√	√	√	√	√	
			Optimalisasi pengelolaan asset- aset daerah, terutama aset sekolah, sarana kesehatan, aset pasar, perkantoran dan infrastruktur.	√	√	√	√	√	
			Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Lima Puluh Kota, terkait dengan pengelolaan aset	√	√	√	√	√	
			Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√	√	√	
			Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	√	√	√	√	√	
			Optimalisasi kualitas pengadaan barang dan jasa	√	√	√	√	√	
			Peningkatan fasilitasi dan koordinasi bidang hukum	√	√	√	√	√	
			Peningkatan kebijakan bidang perekonomian	√	√	√	√	√	
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum	√	√	√	√	√	
			27	Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah	Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).	√	√	√	√
			Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, pembayaran retribusi non tunai, dsb)		√	√	√	√	
		Transformasi sumber pendapatan, ekspansi objek pajak dan reribusi, monetisasi asset daerah, digitalisasi sistim penerimaan serta kontribusi fiskal dari investasi dan perdagangan karbon.		√	√	√	√		

VISI		PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF						
MISI	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2025	2026	2027	2028	2029
	28	Pengembangan BUMD	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD		√	√	√	√
			Peningkatan kualitas layanan BUMD	√	√	√	√	√
			Kerjasama BUMD dengan pihak lain	√	√	√	√	√
			Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMD	√	√	√	√	√
			Pembentukan BUMD potensial		√	√	√	√
	29	Meningkatkan ketertiban Umum dan pelayanan perlindungan masyarakat	Peningkatan fasilitas dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	√	√	√	√	√
			Peningkatan kemampuan personal pelayanan ketertiban dan penanganan situasi darurat	√	√	√	√	√
			Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan penegak hukum, masyarakat dan stake holders.	√	√	√	√	√
			Meningkatkan pengamalan Pancasila, demokrasi dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat	√	√	√	√	√
			Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	√	√	√	√	√
			Penguatan peran serta dan koordinasi dengan lembaga dan organisasi budaya	√	√	√	√	√
	30	Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana	Mengembangkan sistem informasi kebencanaan yang valid secara terbuka ke masyarakat	√	√	√	√	√
			Optimalisasi dan pengembangan infrastruktur pengendalian bencana		√	√	√	√
			Mengembangkan sistem deteksi dini kebencanaan		√	√	√	√
			Memperkuat masyarakat Tangguh bencana	√	√	√	√	√
			Meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	√	√	√	√	√
			Penguatan mitigasi bencana pada saat bencana dan pasca bencana.	√	√	√	√	√
MEWUJUDKAN NUANSA IMANI	31	Meningkatkan pemahaman dan	Meningkatkan penguatan pendidikan karakter berbasis agama kepada tenaga pendidik dan siswa	√	√	√	√	√

VISI		PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF						
MISI	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2025	2026	2027	2028	2029
MELALUI PENDEKATAN BUDAYA DAN ADAT		pengamalan ajaran agama dalam kehidupan	Pembangunan Mesjid Agung		√	√	√	√
			Pemberian insentif kepada guru TPA dan Garin masjid	√	√	√	√	√
			Pemberian bantuan operasional sarana ibadah di Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√
			Pengembangan kelurahan madani	√	√	√	√	√
			Mendorong munculnya kader ulama pembina umat dari mesjid				√	√
			Peningkatan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	√	√	√	√	√
	32	Meningkatkan pengembangan kebudayaan	Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga adat dalam mendukung kebudayaan	√	√	√	√	√
			Pelestarian adat dan budaya dengan pendekatan ABS SBK melalui edukasi dan digitalisasi	√	√	√	√	√
			Meningkatnya upaya penggalian dan penyelamatan literasi Sejarah, budaya dan cagar budaya	√	√	√	√	√
			Peningkatan dan penguatan peran dan potensi budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan melalui pengembangan kegiatan bernuansa kebudayaan.	√	√	√	√	√
MEWUJUDKAN SARANA PERKOTAAN YANG HUMANIS RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN	33	Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), taman kota dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).	√	√	√	√	√
			Meningkatnya pengelolaan limbah domestik dan non domestik	√	√	√	√	√
			Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan	√	√	√	√	√
			Meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	√	√	√	√	√
			Revitalisasi kearifan lokal dalam pengendalian alih fungsi lahan, dan perlindungan hutan dan lahan (Termasuk terkait pemberdayaan/ peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan/hutan)			√	√	√

VISI		PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF							
MISI	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2025	2026	2027	2028	2029	
	34	Meningkatkan pengelolaan persampahan secara terpadu dan komprehensif.	Intensifikasi Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah (Terkait Sumber daya manusia)	√	√	√	√	√	
			Meningkatkan kualitas sarana prasarana pengelolaan persampahan kota	√	√	√	√	√	
			Penyediaan infrastruktur TPA/TPST/TPS3R yang respresentatif.		√	√	√	√	
			Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan inovasi pengelolaan sampah kota, ditingkat sumber dan Kawasan (Terkait sarana prasarana)	√	√	√	√	√	
			Memperkuat kelembagaan dan regulasi pengelolaan persampahan kota, termasuk tingkat local dan non formal (Terkait kelembagaan dan regulasi)	√	√	√	√	√	
			Optimalisasi penyediaan anggaran pengelolaan sampah	√	√	√	√	√	
			Meningkatkan upaya desentralisasi pengelolaan sampah	√	√	√	√	√	
	35	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan pemenuhan prasarana, sarana, utilitas (PSU) permukiman.	√	√	√	√	√	
			Meningkatkan akses kepemilikan rumah dan hunian yang layak.	√	√	√	√	√	
			Bantuan sanitasi dan peningkatan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	√	√	√	√	√	
			Pencegahan dan revitalisasi kawasan kumuh	√	√	√	√	√	
			Ikut memsuksekkan program strategis nasional 3 juta rumah		√	√	√	√	
	36	Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang inklusif dan ramah lingkungan	Pengembangan kawasan strategis perkotaan (7 kawasan strategis)	√	√	√	√	√	
			Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pembangunan <i>Smart Transportation</i> (termasuk konektivitas dengan destinasi wisata luak nan bungsu, berupa jalan, jembatan, moda transpotasi, dan kerjasama dengan kab 50 kota/ daerah hinterland).	√	√	√	√	√	

VISI		PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF						
MISI	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2025	2026	2027	2028	2029
			Ketersediaan prasarana dan sarana perkantoran pemerintahan yang memadai	√	√	√	√	√
			Meningkatkan kualitas infrastruktur layanan dasar (PADM, Listrik, Drainase, Persampahan, limbah domestik/ sanitasi (PHBS dan STBM), dll)	√	√	√	√	√
			Penataan parkir yang representatif	√	√	√	√	√
			Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan (Sarana Perkotaan meliputi berbagai fasilitas publik yang langsung dimanfaatkan oleh masyarakat seperti taman rekreasi, pasar, pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan peribadatan) dll. Sedangkan prasarana perkotaan merupakan penunjang berfungsinya sarana perkotaan seperti jalan, air limbah, persampahan, drainase dll)	√	√	√	√	√
			Mengembangkan upaya untuk menjamin ketersediaan air minum dan memperluas jangkauannya					
	37	Meningkatkan kualitas penataan kota	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan penataan ruang	√	√	√	√	√
			Optimalisasi penataan kota dan pedestrian	√	√	√	√	√

**B. PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2025-2029**

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Pentahapan pembangunan dapat disajikan dengan tabel. Penyajian lokus pembangunan untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja (bukan cascading indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

Tabel 3.11 Rumusan Program Prioritas RPJMD

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
VISI Payakumbuh Maju Bermartbat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM Yang Kompetitif						
MISI-1: Mewujudkan SDM yang berkualitas						
	Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia		
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		1. Usia Harapan Hidup 2. Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita 3. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence Of Undernourishment) 4. Jumlah Kematian Ibu 5. Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) 6. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Prevalensi Stunting berdasarkan E-PPGBM 2. Jumlah Kematian Ibu	Program pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	PD Pengampu Urusan Kesehatan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			makanan dan minuman			
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	PD Pengampu Urusan Pangan
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	PD Pengampu Urusan Pangan
		Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan		1. Harapan Lama Sekolah 2. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi 3. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Numerasi 4. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi 6. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD 2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar 3. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13- 15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama	Program Pengelolaan Pendidikan	PD Pengampu Urusan Pendidikan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				4. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan		
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1. Indeks pemerataan guru 2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	PD Pengampu Urusan Pendidikan
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	PD pengampu Urusan perpustakaan
			Persentase pemuda yang berwirausaha	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	PD pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	PD pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Menurunkan Tingkat Kemiskinan		1. Tingkat Kemiskinan 2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 3. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 4. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan		
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan Jaminan Sosial	PD Pengampu Urusan Sosial
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial Yang Meningkat	Program Pemberdayaan Sosial	PD Pengampu Urusan Sosial

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Kompetensinya Dalam Pelayanan Sosial		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak		1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 3. Indeks Perlindungan Khusus Anak 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		
			Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembinaan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga 2. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) wanita 3. Indeks Lansia Berdaya 4. Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja 5. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	1. Nilai IKM 2. Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 2. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 3. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/ Kota	Program Perlindungan Khusus Anak	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG	1. Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			dan peran perempuan dalam pembangunan	2. Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		Perlindungan Anak
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	PD Pengampu Urusan Pangan
MISI-2: Mewujudkan Iklim Ekonomi yang kompetitif						
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif			1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 3. Proporsi kontribusi PDRB kota Payakumbuh terhadap PDRB Provinsi 4. PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)		
		Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat		1. Rasio Gini 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 4. Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal 5. Rasio Kewirausahaan		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Program Perekonomian Dan Pembangunan	PD Pengampu Fungsi Sekretariat Daerah
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	PD Pengampu Urusan Ketenagakerjaan
		Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal		1. Kontribusi UMKM terhadap PDRB		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2. Proporsi jumlah UKM non pertanian 3. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB 4. Proporsi jumlah IKM 5. Ketersediaan Pangan Utama (ton) 6. Stabilisasi Harga Beras 7. Stabilisasi Harga Cabe 8. Stabilisasi Harga Bawang 9. Tingkat Inflasi 10. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) 11. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 12. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum 13. Jumlah Tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) (ribu orang) 14. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta rupiah/orang) 15. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi 16. ROA BUMD		
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	PD Pengampu Urusan Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)	PD Pengampu Urusan Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	PD Pengampu Urusan Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	PD Pengampu Urusan Perdagangan
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	PD Pengampu Urusan Pangan
			Meningkatnya kualitas peijinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	PD Pengampu Urusan Perindustrian
			Jumlah Fasilitasi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PD Pengampu Urusan Pariwisata
			Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik, Jumlah pengembangan destinasi pariwisata, Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PD Pengampu Urusan Pariwisata
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	PD Pengampu Fungsi Keuangan
			Meningkatnya distribusi dan	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	PD Pengampu Urusan Pertanian

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			kualitas sarana pertanian	2. Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan 4. Produktivitas pertanian per hektar per tahun		
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	1. Produksi Perikanan Budidaya 2. Persentase Pembudidaya Yang Tergabung Dalam Kelompok Yang Menerapkan Anjuran KKP	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	PD Pengampu Urusan Pertanian
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan / atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Iklim Investasi Daerah		1. Nilai Realisasi Investasi 2. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB 3. Nilai Transaksi Saham Per Kapita (rupiah) 4. Total Kredit/PDRB 5. Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan 6. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Iklim Pengembangan Penanaman Modal	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	PD Pengampu Urusan Perindustrian
MISI-3:						

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan kondusif						
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel			1. Indeks RB 2. Survey penilaian integritas (SPI) KPK		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Indeks Pemerintahan Digital 3. Indeks Pelayanan Publik 4. Indeks Kepuasan Masyarakat		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PD Pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak 2. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Program Pendaftaran Penduduk	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PD Pengampu Semua Urusan/Fungsi
		Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel		1. Nilai Evaluasi AKIP 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan 3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				4. Indeks Masyarakat Digital Indonesia 5. Indeks Reformasi Hukum 6. Indeks Inovasi Daerah		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	PD Pengampu Fungsi Inspektorat
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat Daerah)	PD Pengampu Fungsi Sekretariat Daerah
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	PD Pengampu Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	PD Pengampu Fungsi Penelitian Dan Pengembangan
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PD Pengampu Fungsi Perencanaan
			Meningkatnya tata kelola anggaran, Meningkatkan tata kelola	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	PD Pengampu Fungsi Keuangan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			perbendaharaan, Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	2. Persentase Penurunan SILPA 3. Opini BPK Atas Laporan Keuangan		
		Meningkatnya Pendapatan Daerah		1. Rasio PAD terhadap APBD 2. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		
			Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah, Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 2. Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	PD Pengampu Fungsi Keuangan
		Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		1. Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum 2. Persentase penegakan Perda 3. Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk) 4. Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif 5. Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan 6. Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi di Tengah Masyarakat 7. Indeks Risiko Bencana (IRBI)		
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara, Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat,	1. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 2. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya 3. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat 4. Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PD Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS			
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	PD Pengampu Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatkan penanganan bencana pada saat tanggap darurat, Meningkatkan penanganan bencana pada saat pasca bencana	1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana 2. Persentase Penanganan Pasca Bencana 3. Persentase penanganan tanggap bencana darurat	Program Penanggulangan Bencana	PD Pengampu Urusan Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran 2. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	PD Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
MISI-4: Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat						
	Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat			IPK berbasis ABS SBK		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	yang berlandaskan ABS SBK					
		Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat		1. Karya Budaya yang Ditetapkan 2. Cakupan Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan		
			Persentase objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	PD Pengampu Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	PD Pengampu Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah 2. Indeks Reformasi Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	PD Pengampu Fungsi Sekretariat Daerah
MISI-5: Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan						
	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		1. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 2. Indeks Kualitas Lahan 3. RT dengan Akses Sanitasi Aman 4. Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah		
			Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Timbulan Sampah Yang Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan limbah	1. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman 2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1. Persentase Peningkatan RTLH Untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha 2. Persentase Rumah Layak Huni	Program Kawasan Permukiman	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya Rumah Layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas		1. Indeks Infrastruktur 2. Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau 3. Konsumsi listrik per kapita 4. Kapasitas Air Baku		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	Program Penyelenggaraan Jalan	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase sungai yang berfungsi baik 2. Persentase daerah irigasi berkinerja baik 3. Kapasitas Air Baku	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Yang Ramah Lingkungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	PD Pengampu Urusan Perhubungan
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Program Penataan Bangunan Gedung	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 3.12 Program Prioritas Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif sesuai Tujuan dan Sasaran

KOD E	MISI/TUJUAN/SARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	Misi : Mewujudkan SDM yang berkualitas													
1.1	Tujuan : Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing													
1.1.1	Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat													
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting berdasarkan E-PPBGM	2,12	2,08	32.853.583.250,00	2.04	36.230.290.768,00	2.00	37.496.916.438,00	1.94	38.783.674.979,00	1.90	39.903.204.744,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
		Jumlah Kematian Ibu (jiwa)	2	2		2		2		1		1		
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	93	94	104.999.550,00	95	79.600.000,00	96	82.475.000,00	97	85.493.750,00	98	87.285.313,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	85	85,1	50.988.475,00	85.15	410.000.000,00	85.2	450.000.000,00	85.25	381.077.141,00	85.3	410.000.000,00	PD Pengampu Urusan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	11,5	11	52.714.900,00	10.5	899.852.736,00	10	970.000.000,00	9.5	795.000.000,00	9	920.000.000,00	PD Pengampu Urusan Pangan

KOD E	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1.1.2	Sasaran : Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan													
	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warganegara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	98,00	98,00	24.297.773.465,00	98.30	131.805.561.660,00	98.90	135.695.080.825,00	99.00	135.452.590.579,00	99.30	135.332.561.482,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan
		Tingkat partisipasi warganegara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	100	100		100		100		100		100		
		Tingkat partisipasi warganegara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama(%)	100	100		100		100		100		100		
		Tingkat partisipasi warganegara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	74,55	75,55		76,55		77,55		78,55		79,55		

KOD E	MISI/TUJUAN/SA SARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Indeks pemerataan guru (%)	81,00	82,00	173.335.150,00	83,00	350.000.000,00	84,00	350.000.000,00	85,00	350.000.000,00	86,00	350.000.000,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	58,00	60,00		62,00		64,00		66,00		68,00		
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	66,20	66,30	230.140.650,00	66,40	2.964.401.228,00	66,80	2.800.425.000,00	67,20	2.437.628.000,00	67,50	2.704.400.600,00	PD pengampu urusan perpustakaa n
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	65	65	118.591.225,00	65	1.310.591.421,00	70	1.260.500.000,00	75	591.525.000,00	75	643.101.250,00	PD pengampu urusan Kepemudaa n dan Olahraga
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	14	15	4.287.752.896,00	16	9.825.000.000,00	17	9.458.750.000,00	18	9.151.687.530,00	19	10.454.271.875,00	PD pengampu urusan Kepemudaa n Dan Olahraga
1.1.3	Sasaran: Menurunkan Tingkat Kemiskinan													
	Program perlindungan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	85	90	890.977.750,00	95	4.190.977.750,00	100	4.190.977.750,00	100	4.190.977.750,00	100	4.190.977.750,00	PD Pengampu Urusan Sosial
	Program pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya	100	100	476.882.225,00	100	1.274.920.110,00	100	1.691.076.184,00	100	1.220.576.802,00	100	1.635.969.332,00	PD Pengampu Urusan Sosial

KOD E	MISI/TUJUAN/SA SARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
		dalam Pelayanan Sosial (%)												
1.1.4	Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak													
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	71	72	505.900.200,00	73	2.695.211.425,00	74	3.182.665.457,00	75	2.590.217.336,00	76	2.898.785.902,00	PD Pengampu Urusan Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana
		Median Usia Kawin Pertama (MUKP) wanita (Angka)	23,2	23,3		23,4		23,5		23,6		23,7		
		Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	59,3	60,0		60,8		61,5		62,2		62,8		
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	89,6	90,4		91,3		92,0		92,7		93,3		
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
	Program pemberdayaan kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD) (Persentase)	100	100	-	100	909.920.000,00	100	909.920.000,00	100	909.920.000,00	100	909.920.000,00	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat

KOD E	MISI/TUJUAN/SARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	82,92	83,25	2.000.000,00	83,62	842.708.234,00	83,85	866.518.638,00	84,01	814.122.341,00	84,33	898.133.814,00	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten/ Kota (%)	100	100		100		100		100		100		
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD (%)	3,82	4,09	3.000.300,00	6,5	362.733.811,00	7	372.982.718,00	7,5	350.429.350,00	8	386.591.097,00	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) (Kategori)	Utama	Utama		Utama		Utama		Mentor		Mentor		
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	85,3	87,9	364.645.445,00	88	2.930.000.000,00	88,1	3.205.000.000,00	88,2	2.995.000.000,00	88,3	3.170.000.000,00	PD Pengampu Urusan Pangan
2	Misi 2: Mewujudkan Iklim Ekonomi yang kompetitif													

KOD E	MISI/TUJUAN/SA SARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
2.1	Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas													
2.1.1	Sasaran : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat													
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Indeks)	91,58	91,58	336.965.200,00	91,58	1.198.181.700,00	91,58	1.198.181.700,00	91,58	1.198.181.700,00	91,58	1.198.181.700,00	PD Pengampu Fungsi Sekretariat Daerah
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	47,91	47,92	538.983.824,00	47,93	1.718.912.461,00	47,94	1.810.803.707,00	47,95	1.911.884.078,00	47,96	2.023.072.486,00	PD Pengampu Urusan Ketenagakerjaan
2.1.2	Sasaran 2.2: Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal													
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	8,33	11,54	19.999.850,00	13,79	455.000.000,00	15,15	500.500.000,00	15,79	550.550.000,00	15,91	550.550.000,00	PD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	1,84	1,99	99.347.000,00	2,07	250.000.000,00	2,15	275.000.000,00	2,24	302.500.000,00	2,32	302.500.000,00	PD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan	Persentase Usaha mikro yang Bertransformasi dari Informal ke	4,84	4,95	113.336.775,00	5,02	1.545.000.000,00	5,07	1.850.000.000,00	5,13	1.655.000.000,00	5,34	1.805.000.000,00	PD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha

KOD E	MISI/TUJUAN/SA SARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	Usaha Mikro (Umkm)	Formal (Persentase)												Kecil Dan Menengah
		Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	11,26	12,35		12,94		13,56		14,20		14,88		
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	90	90	2.737.327.100,00	90	9.979.454.661,00	90	9.979.454.661,00	90	9.173.929.328,00	90	9.599.748.376,00	PD Pengampu Urusan Perdagangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	11,5	11	52.714.900,00	10,5	899.852.736,00	10	970.000.000,00	9,5	795.000.000,00	9	920.000.000,00	PD Pengampu Urusan Pangan
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	72,32	72,57	60.657.325,00	72,77	117.313.670,00	73,02	148.610.510,00	73,27	96.911.635,00	73,52	108.479.510,00	PD Pengampu Urusan Perindustrian
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	1	30	175.000.000,00	50	1.325.000.000,00	60	941.000.000,00	70	950.000.000,00	80	1.100.000.000,00	PD Pengampu Urusan Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	45	50	498.600.130,00	50	1.477.539.031,00	50	1.420.539.031,00	55	1.470.539.031,00	55	1.470.539.031,00	PD Pengampu Urusan Pariwisata
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	2,00	3,00	915.159.650,00	4,00	1.046.611.640,00	5,00	1.046.611.640,00	6,00	1.046.611.640,00	7,00	1.050.000.000,00	PD Pengampu Fungsi Keuangan
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	0,06	0,73	1.601.019.686,00	0,73	2.520.233.356,00	0,16	2.557.966.367,00	1,29	1.713.763.004,00	0,71	1.885.139.304,00	PD Pengampu Urusan Pertanian

KOD E	MISI/TUJUAN/SARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
		Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	2	2		2		2		2		2		
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	2	2		2		2		2		2		
		Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	5,60	5,61		5,62		5,63		5,64		5,65		
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	560	565	575.504.050,00	570	1.080.937.983,00	575	639.031.781,00	580	702.934.959,00	585	773.228.455,00	PD Pengampu Urusan Pertanian
		Persentase Pembudidaya Yang Tergabung Dalam Kelompok Yang Menerapkan Anjuran KKP (%)	45	50		55		60		65		70		
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	75.00	76.00	14.848.750,00	77.00	100.000.000,00	78.00	100.000.000,00	79.00	100.000.000,00	80.00	100.000.000,00	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2.1.3	Sasaran : Meningkatkan Iklim Investasi Daerah													
	Program pengembangan	Realisasi Total terhadap	100	100	53.388.500,00	100	700.000.000,00	100	800.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	PD Pengampu

KOD E	MISI/TUJUAN/SARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	iklim penanaman modal	Target Investasi (Persentase)												Urusan Penanaman Modal
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	25	26	719.630.190,00	27	2.113.255.285,00	28	2.451.098.782,00	29	1.862.209.751,00	30	2.048.752.457,00	PD Pengampu Urusan Perindustrian
3	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan kondusif													
3.1	Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel													
3.1.1	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik													
	Program pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,75	3,84	3.626.127.600,00	3,93	9.545.000.000,00	4,03	6.140.000.000,00	4,12	5.743.670.033,00	4,21	5.545.000.000,00	PD Pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	62,50	64	139.285.250,00	66	400.000.000,00	68	400.000.000,00	70	400.000.000,00	70	400.000.000,00	PD Pengampu Urusan Administrasi
		Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	10	10		12		14		16		16		Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOD E	MISI/TUJUAN/SARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	160.166.030,00	100	1.500.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	800.000.000,00	100	800.000.000,00	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM (Indeks)	88.60	88.80	105.126.608.950,00	88.85	154.371.104.587,00	88.90	154.401.796.702,00	89.00	154.432.795.738,00	89.50	154.464.104.765,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan
			89	91	174.279.466.416,00	91	186.435.335.247,00	91	186.481.290.997,00	91	186.517.774.091,00	92	186.834.189.375,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			94,00	94,10	14.319.063.517,00	94,50	25.462.171.538,00	94,60	29.057.430.788,00	94,80	27.132.556.077,00	95,00	34.392.507.981,00	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			87	87	4.710.867.890,00	87	5.060.000.000,00	87	5.565.999.999,00	87	6.122.600.000,00	87	6.734.860.000,00	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukima n
			91	91	6.520.599.992,00	91	8.045.791.618,00	91	8.061.483.349,00	91	8.077.331.997,00	91	8.093.339.131,00	PD Pengampu Urusan Ketentrama n, Ketertiban Umum, dan Perlindunga n Masyarakat
			92	93	4.619.629.630,00	93	5.981.807.213,00	93	5.992.177.004,00	93	6.002.650.493,00	93	6.013.228.717,00	PD Pengampu Urusan Ketentrama

KOD E	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
														n, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
			93	93	3.793.914.419,00	93	5.818.756.158,00	93	5.033.664.167,00	93	5.033.664.167,00	93	5.033.664.167,00	PD Pengampu Urusan Sosial
			92,00	92,50	4.755.942.927,00	93,00	6.685.230.838,00	93,30	6.854.395.993,00	93,50	6.684.126.559,00	93,70	6.881.803.046,00	PD Pengampu Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Perindustrian
			82,00	82,50	5.532.433.599,00	81,25	6.787.831.158,00	85,25	6.802.228.678,00	87,25	6.816.770.174,00	89,00	6.831.457.085,00	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			86	86,5	2.688.902.606,00	87	4.634.923.427,00	87,5	4.651.134.786,00	88	4.667.508.258,00	88,5	4.684.045.465,00	PD Pengampu Urusan Pangan
			89,00	89,00	5.818.187.930,00	89,00	7.262.835.769,00	89,00	7.446.559.614,00	89,00	8.182.120.697,00	89,00	8.369.537.391,00	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
			94,10	94,10	4.232.570.332,00	94,20	6.878.135.612,00	94,30	6.421.314.022,00	94,40	6.078.517.851,00	94,50	6.303.936.247,00	PD Pengampu Urusan

KOD E	MISI/TUJUAN/SARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
														Adminidtras i Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			89	85	6.580.275.343,00	87	9.209.036.322,00	89	9.922.830.702,00	91	9.049.672.718,00	93	9.652.232.775,00	PD Pengampu Urusan Perhubungan
			86,3	87	4.975.798.846,00	87,5	5.760.522.388,00	88	6.380.104.963,00	88,5	5.480.721.438,00	89	5.257.669.416,00	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			87,1	87,6	7.506.696.314,00	88,1	8.539.522.402,00	88,6	8.567.132.552,00	89,1	8.595.018.804,00	89,6	8.623.183.918,00	PD Pengampu Urusan Koperasi, dan Usaha kecil dan Menengah dan Urusan Perdagangan
			3,74	3,74	4.384.451.086,00	3,80	7.169.434.306,00	3,85	6.780.518.581,00	3,90	7.427.876.413,00	3,95	7.943.328.425,00	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
			86,75	87,00	3.409.248.509,00	87,25	8.344.798.039,00	87,50	4.354.933.734,00	87,75	4.365.170.786,00	88,00	4.375.510.208,00	PD Pengampu Urusan perpustakaa n dan Urusan Kearsipan
			86	90	5.791.365.742,00	90	7.162.156.678,00	90	6.984.277.585,00	90	6.439.716.678,00	90	6.439.716.678,00	PD Pengampu Urusan Pariwisata dan Urusan Pemuda dan

KOD E	MISI/TUJUAN/SARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
														Olahraga
			88	89	14.026.603.66 9,00	89.5	14.617.276.14 1,00	90	16.079.003.74 2,00	90.5	15.737.821.12 5,00	91	15.942.023.99 1,00	PD Pengampu Urusan Pertanian
			85	85	17.457.799.27 6,00	85	19.593.931.08 4,00	86	19.593.931.08 4,00	86	19.593.931.08 4,00	86	19.286.364.48 4,00	PD Pengampu Fungsi Sekretariat DPRD
			91,50	91,70	7.000.537.499 ,00	92,00	18.120.066.53 4,00	92,50	12.956.251.66 5,00	92,70	11.694.099.46 1,00	93,00	12.400.136.79 5,00	PD Pengampu Fungsi Perencanaan
			85,00	85,00	12.787.171.34 4,00	86,00	14.365.451.10 4,00	87,00	14.369.090.65 4,00	88,00	14.369.090.65 4,00	89,00	14.369.090.65 4,00	PD Pengampu Fungsi Keuangan
			91,00	91,30	18.411.258.99 8,00	91,60	27.006.935.83 7,00	91,90	27.006.935.83 7,00	92,20	27.006.935.83 7,00	92,50	27.006.935.83 7,00	PD Pengampu Fungsi Kepegawaian
			89,00	89,00	9.445.241.772 ,00	89,25	14.076.283.04 9,00	89,50	14.076.283.04 9,00	89,75	14.076.283.04 9,00	90,00	14.076.283.04 9,00	PD Pengampu Fungsi Inspektorat
			91	91	13.855.281.86 5,00	92	12.986.929.23 4,00	92	12.986.929.23 4,00	92	12.986.929.23 4,00	92	12.986.929.23 4,00	PD Pengampu Urusan Kewilayahan
			91	91	9.330.016.133 ,00	91	8.663.712.228 ,00	91	8.663.712.228 ,00	91	8.663.712.228 ,00	91	8.663.712.228 ,00	PD Pengampu Urusan Kewilayahan
			91	91	9.098.759.554 ,00	91	11.266.867.50 2,00	91	11.170.867.50 2,00	91	11.170.867.50 2,00	91	11.170.867.50 2,00	PD Pengampu Urusan Kewilayahan

KOD E	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
			90	90	6.475.476.445,00	90	7.545.595.121,00	90	7.545.595.121,00	90	7.545.595.121,00	90	7.545.595.121,00	PD Pengampu Urusan Kewilayahana
			90	90	6.400.038.291,00	90	7.491.928.663,00	90	7.469.178.663,00	90	7.470.928.663,00	90	7.471.678.663,00	PD Pengampu Urusan Kewilayahana
			93	93	1.873.693.299,00	94	3.027.631.581,00	94	2.755.736.557,00	94	2.602.152.322,00	95	2.602.152.322,00	PD Pengampu Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik
3.1.2	Sasaran 3.2: Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel													
	Program penyelenggaraan pengawasan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3	3	955.566.300,00	3	3.015.566.300,00	3	3.191.975.807,00	3	3.182.458.703,00	4	3.178.466.300,00	PD Pengampu Fungsi Inspektorat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat Daerah)	Nilai IKM (Indeks)	88,60	88,80	26.922.122.285,00	88,85	32.552.733.836,00	88,90	32.958.474.191,00	88,95	31.290.513.544,00	89,00	34.669.363.852,00	PD Pengampu Fungsi Sekretariat Daerah
	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	12,00	12,00	15.081.550,00	12,00	2.294.213.330,00	12,00	2.325.575.020,00	12,00	2.323.883.091,00	12,00	2.323.173.330,00	PD Pengampu Fungsi Pendidikan Dan Pelatihan
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti	75	80	300.000.000,00	82	3.000.000.000,00	85	3.150.000.000,00	90	2.500.000.000,00	90	2.605.000.000,00	PD Pengampu Fungsi

KOD E	MISI/TUJUAN/SARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
		dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)												Penelitian Dan Pengemban gan
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	545.303.825,00	100	2.260.000.000,00	100	2.373.000.000,00	100	2.373.000.000,00	100	2.491.650.000,00	PD Pengampu Fungsi Perencanaa n
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai diLuar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	46,55	35,00	3.097.918.280,00	30,00	12.043.508.706,00	30,00	13.841.434.151,00	30,00	11.593.017.003,00	30,00	13.106.930.379,00	PD Pengampu Fungsi Keuangan
		Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	11,00	10,00		10,00		9,00		9,00		9,00		
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		
3.1.3	Sasaran 3.3: Meningkatnya Pendapatan Daerah													
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	19,00	20,00	1.126.970.000,00	21,00	1.460.764.600,00	22,00	1.460.764.600,00	23,00	1.460.764.600,00	23,00	1.460.764.600,00	PD Pengampu Fungsi Keuangan

KOD E	MISI/TUJUAN/SA SARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
		(Persentase)												
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3.1.4	Sasaran 3.4: Terciptanya ketentrman dan ketertiban masyarakat													
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	3.552.927.585,00	100	4.552.927.585,00	100	4.552.927.585,00	100	4.552.927.585,00	100	4.650.845.281,00	PD Pengampu Urusan Ketentrman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	80	80		80		80		80		80		
		Persentase Penyelenggara n Tibumtranmas (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan (Persentase)	100	100	429.014.000,00	100	986.917.480,00	100	448.362.675,00	100	350.652.230,00	100	448.362.675,00	PD Pengampu Fungsi Kesatuan

KOD E	MISI/TUJUAN/SARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial													Bangsa dan Politik
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	273.642.550,00	100	3.835.410.627,00	100	3.911.368.352,00	100	3.437.334.446,00	100	3.753.590.854,00	PD Pengampu Urusan Penanggula nган Bencana
		Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
		Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100		100		100		100		100		
	Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	50	60	3.627.736.875,00	70	9.674.485.839,00	80	5.619.407.742,00	90	4.897.370.913,00	90	4.984.668.992,00	PD Pengampu Urusan Ketentrama n, Ketertiban Umum, dan Perlindunga n Masyarakat
		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
4	Misi 4: Mewujudkan nuansa imani melalui pendekatan budaya dan adat													
4.1	Tujuan : Terwujudnya ketahanan sosial budaya													

KOD E	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	masyarakat yang berlandaskan ABS SBK													
4.1.1	Sasaran 4.1: Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat													
	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi MasyarakatTerhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	75	75	1.544.908.250,00	75	4.891.610.162,00	80	4.267.493.900,00	80	3.678.227.220,00	85	3.582.768.506,00	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	90	90	684.197.225,00	91	1.441.133.294,00	92	1.183.601.617,00	93	790.973.251,00	94	1.083.601.617,00	PD Pengampu Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaa n Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	103.024.850,00	100	1.058.045.582,00	100	713.912.248,00	100	633.995.623,00	100	713.912.248,00	PD Pengampu Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemerintahan dan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelengaraa	3,4	3,415	5.654.335.950,00	3,44	8.655.066.350,00	3,463	8.855.066.350,00	3,4824	8.855.066.350,00	3,5	8.855.066.350,00	PD Pengampu

KOD E	MISI/TUJUAN/SA SARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
	Kesejahteraan Rakyat	n Pemerintah daerah (Nilai)												Fungsi Sekretariat Daerah
		Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	87,2	87,4		87,6		87,8		87,9		88		
5	Misi 5 : Mewujudkan sarana perkotaan yang humanis ramah lingkungan dan berkelanjutan													
5.1	Tujuan : Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan													
5.1.1	Sasaran : Meningkatkan Resiliensi Bencana dan kualitas lingkungan hidup													
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Nilai)	66,95	67,15	1.021.173.190,00	67,35	1.300.000.000,00	67,55	1.300.000.000,00	67,75	1.300.000.000,00	67,95	1.300.000.000,00	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara (Nilai)	78,15	78,45		78,75		79,05		79,35		79,65		
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	19,68	23,54	10.311.756.455,00	27,42	12.500.000.000,00	30,90	12.500.000.000,00	34,79	12.000.000.000,00	38,48	12.000.000.000,00	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air	22,74	23,57	1.760.883.240,00	24,39	5.940.000.000,00	25,21	3.087.000.000,00	27,68	3.241.350.000,00	30,14	3.403.417.500,00	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan

KOD E	MISI/TUJUAN/SARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
		limbah akses aman (%)												Penataan Ruang
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	18,00	20,23	315.301,00	22,76	6.015.000.000,00	24,94	6.157.000.000,00	27,42	6.306.350.000,00	30,00	6.458.417.000,00	
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan RTLH Untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha (%)	100	100	2.551.114.800,00	100	945.000.000,00	100	992.250.000,00	100	1.041.862.500,00	100	1.093.955.625,00	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukima n
		Persentase Rumah Layak Huni (%)	97,61	97,80		97,99		98,19		98,38		98,57		
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni (%)	97,61	97,80	-	97,99	10.625.000.000,00	98,19	11.156.250.000,00	98,38	11.714.062.500,00	98,57	11.736.145.473,00	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukima n
5.1.2	Sasaran : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas													
	Program penyelenggaraan jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kot a (%)	82,00	82,80	5.728.409.238,00	83,60	116.527.148.000,00	84,40	104.739.047.000,00	85,20	100.667.135.000,00	86,00	103.216.954.000,00	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase sungai yang berfungsi baik (%)	77,97	77,98	6.716.049.100,00	77,99	77.541.361.326,00	78,00	78.936.587.691,00	78,01	86.059.003.029,00	78,02	110.834.325.497,00	PD Pengampu Urusan Pekerjaan

KOD E	MISI/TUJUAN/SARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2025)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKA T DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
														Umum dan Penataan Ruang
		Persentase daerah irigasi berkinerja baik (%)	75,29	75,33		75,48		75,55		75,70		75,99		
		Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)	5,21	5,46		6,60		6,61		6,62		6,62		
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan (%)	86	86	2.718.114.785,00	87	6.092.294.000,00	88	15.792.294.000,00	89	15.792.294.000,00	90	5.792.294.000,00	PD Pengampu Urusan Perhubungan
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	35,24	35,68	758.481.175,00	36,11	92.665.000.000,00	36,54	100.665.000.000,00	36,96	103.665.000.000,00	37,38	85.665.000.000,00	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	74,55	74,65	848.333.760,00	74,75	2.225.000.000,00	74,85	2.000.000.000,00	74,95	2.650.000.000,00	75,05	3.050.000.000,00	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C. ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP FOKUS PRIORITAS RPJMN TAHUN 2025-2029

1). PENURUNAN KEMISKINAN

Arah kebijakan pengentasan kemiskinan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, serta meningkatkan kualitas hidup individu dan kelompok rentan melalui berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Secara lebih luas, kebijakan ini juga bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif, serta menjamin hak-hak dasar Masyarakat.

Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa tiga masalah utama yang dihadapi terkait kemiskinan: diskriminasi terhadap kelompok rentan, keterbatasan dan ketimpangan akses, serta rendahnya kesadaran, kapasitas, dan produktivitas masyarakat miskin. Ini termasuk upaya untuk mengatasi diskriminasi finansial dan akses terhadap layanan dasar, serta meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Arah kebijakan Pembangunan Kota Payakumbuh terhadap fokus prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan melalui :

- a. Perluasan cakupan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi masyarakat miskin, kelompok marginal dan rentan
- b. Meningkatkan kualitas data kemiskinan yang komprehensif valid, dan terintegrasi
- c. Meningkatkan Tata kelola data kemiskinan yang lebih efektif sebagai dasar dalam rancangan program yang lebih efisien dalam mengurangi kemiskinan
- d. Meningkatkan pengentasan kemiskinan dengan satu sistem registrasi sosial ekonomi (regsosek) dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis fakta, serta penentuan target perlindungan sosial dalam mewujudkan integrasi program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara menyeluruh
- e. Meningkatkan integrasi program jaminan sosial yang mencakup asuransi kesehatan dan bantuan bagi keluarga yang membutuhkan
- f. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien
- g. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan sosial dan pelatihan kerja

- h. Percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan graduasi yang terintegrasi
- i. Pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemiskinan
- j. Pemberian fasilitasi bantuan modal usaha dalam peningkatan pendapatan masyarakat miskin
- k. Pemberian insentif untuk tenaga relawan social
- l. Peningkatan penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- m. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan
- n. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga
- o. Pendirian sekolah rakyat untuk masyarakat miskin

Program prioritas yang dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut antara lain :

- a. Program rehabilitasi sosial
- b. Program perlindungan jaminan sosial
- c. Program pemberdayaan sosial

2). PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan kualitas SDM juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan mencapai tujuan pembangunan jangka Panjang.

Arah kebijakan Pembangunan Kota Payakumbuh terhadap fokus prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah :

- a. Pemerataan dan peningkatan akses dan sarana prasarana Pendidikan PAUD, dasar dan menengah.
- b. Penguatan digitalisasi sekolah
- c. Penyediaan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
- d. Peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum
- e. Penguatan Pendidikan inklusif yang responsif untuk anak-anak disabilitas atau berkebutuhan khusus
- f. Peningkatan Kompetensi guru
- g. Meningkatkan Literasi dan numerasi peserta didik
- h. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pendidikan sekolah negeri dan swasta

- i. Diterapkannya kurikulum yang adaptif, tenaga pendidik yang berkualitas, sarana pendidikan yang representatif untuk peningkatan kualitas pendidikan sekolah negeri.
- j. Meningkatkan kualitas dan perijinan sekolah non formal, sehingga siswa dari sekolah non formal berbasis agama/sekolah tahfiz/*home schooling* yang belum memiliki izin dari Dinas Pendidikan, tetap mendapatkan fasilitasi pendampingan dan dukungan untuk peningkatan kualitas pendidikannya
- k. Mengembangkan masing-masing sekolah dengan keunggulan (mata pelajaran) tertentu
- l. Meningkatkan pendidikan karakter, sehingga tercipta budaya yang berkarakter dan berakhlak
- m. Pemberian insentif untuk Guru TPA
- n. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.
- o. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar yang adaptif berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah serta Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK
- p. Pemberian insentif untuk guru PAUD dan Guru Non ASN
- q. Pemetaan kebutuhan satuan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- r. Pembangunan sekolah Garuda
- s. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- t. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan.
- u. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
- v. Peningkatan standar layanan kesehatan masyarakat
- w. Penguatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan
- x. Pengoptimalan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui kampanye polah hidup sehat
- y. Pengoptimalan Sistem pengawasan obat dan makanan
- z. Penanggulangan permasalahan gizi mikro dan gizi makro, penuntasan masalah stunting (pemenuhan gizi anak dan balita untuk terciptanya SDM berkualitas di masa mendatang
- aa. Pemerataan akses layanan kesehatan melalui peningkatan layanan primer
- bb. Deteksi dini terhadap penyakit menular dan tidak menular
- cc. Pengembangan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah dan swasta dalam mendukung kampanye imunisasi.
- dd. Dukungan Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan anak Balita

Program prioritas yang dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut antara lain:

- a. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- b. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
- c. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- e. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- f. Program Pengelolaan Pendidikan
- g. Program pengembangan kurikulum
- h. Program pengendalian perizinan pendidikan
- i. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- j. Program Pembinaan Perpustakaan
- k. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- l. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- m. Program Perlindungan Khusus Anak
- n. Program pemenuhan hak anak
- o. Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- p. Program pengelolaan sistim data gender dan anak
- q. Program Penempatan Tenaga Kerja

3). PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Arah kebijakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan peningkatan pendapatan, tetapi juga menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Arah kebijakan Pembangunan Kota Payakumbuh terhadap fokus prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah :

- a. Perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif
- b. Mewujudkan penataan lokasi sektor informal
- c. Mendorong pertumbuhan dan menciptakan iklim yg kondusif dan meningkatkan pemasaran kawasan potensial
- d. Peningkatan kualitas dan inovasi produk dan Promosi secara berkelanjutan
- e. Pemanfaatan peluang terhadap Pembangunan Tol Trans Sumatera: Bukittinggi - Payakumbuh - Bangkinang – Pekanbaru
- f. Penerapan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga
- g. Revitalisasi dan penataan pasar tradisional, pertokoan Payakumbuh dan Pedagang Kaki Lima

- h. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal
- i. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku industri kecil
- j. Mendorong bertumbuhnya industri dari hulu ke hili
- k. Berkembangnya sentra-sentra industri melalui penguatan kelembagaan
- l. Meningkatnya industri halal sebagai bagian dari pengembangan ekonomi syariah
- m. Meningkatnya penguatan industri jasa
- n. Adanya penguatan infrastruktur pendukung industri
- o. Meningkatnya penerapan standarisasi produk (halal, kualitas, dll)
- p. Peningkatan profesionalisme petani
- q. Peningkatan produksi hasil pertanian strategis
- r. Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian sektor strategis
- s. Penyediaan bantuan sarana dan prasarana Pertanian untuk petani/kelompok tani
- t. Penguatan infrastruktur pertanian dalam rangka mencapai produktivitas pertanian 8 ton/ha
- u. Meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar
- v. Penyediaan bibit dan varietas unggul
- w. Mengembangkan insentif dan disinsentif untuk implementasi LP2B
- x. Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian Dengan Lumbung Pangan
- y. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism dan berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal
- z. Peningkatan promosi pariwisata Kota Payakumbuh
- aa. Peningkatan event-event pariwisata dan budaya
- bb. Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industry pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan
- cc. Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisata nusantara
- dd. Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM
- ee. Penumbuhan dan Peningkatan kualitas SDM entrepreneur
- ff. Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan entrepreneur
- gg. Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan Koperasi
- hh. Meningkatkan peran ekonomi berbasis elektronik
- ii. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital (Mengembangkan UMKM berbasis digitalisasi) disertai

- perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
- jj. Tersedianya penataan basis data dan penyederhanaan regulasi di bidang pemberdayaan UMKM pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi
 - kk. Terciptanya inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dan kemudahan akses pembiayaan usaha
 - ll. Tumbuh dan berkembangnya jiwa kewirausahaan masyarakat melalui pendidikan formal dan informal
 - mm. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, pendampingan kelompok untuk berkoperasi, pengembangan jangkauan dan cakupan usaha koperasi, serta pengembangan inovasi koperasi.
 - nn. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan
 - oo. Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar baik dalam pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
 - pp. Meningkatkan fungsi koperasi
 - qq. Pendirian koperasi merah putih di setiap kelurahan
 - rr. Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi
 - ss. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - tt. Peningkatan Upaya Promosi Investasi
 - uu. Meningkatnya peran PTSP sebagai percepatan pelayanan dan perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha, serta penataan regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha, sehingga iklim investasi semakin kondusif
 - vv. Pelaksanaan Kerjasama dalam dan luar negeri, kemitraan dan kolaborasi pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
 - ww. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja
 - xx. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar
 - yy. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja
 - zz. Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru
 - aaa. Menciptakan entrepreneur dari berbagai sektor
 - bbb. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial

- ccc. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak
- ddd. Perluasan kesempatan kerja
- eee. Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja

Program prioritas yang dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut antara lain:

- a. Program Perekonomian Dan Pembangunan
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- c. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
- d. Program Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)
- e. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- f. Program penanganan kerawanan pangan
- g. Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
- h. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- i. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
- j. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- k. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- l. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- m. Program Pengembangan Kebudayaan
- n. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- o. Program pendidikan dan latihan perkoperasian
- p. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- q. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- r. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- s. Program perekonomian dan pembangunan
- t. Program iklim pengembangan penanaman modal
- u. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- v. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- w. Program pelayanan Penanaman Modal
- x. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- y. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- z. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- aa. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- bb. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- cc. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

A. DAFTAR PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DALAM MENCAPAI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 menghasilkan untuk Kota Payakumbuh, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh dengan visi dan misi periode tahun 2025-2029. Visi dan misi tersebut perlu diterjemahkan dalam rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah pada masa pemerintahan yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan 5 tahun (RPJMD). Penyusunan program pada RPJMD Tahun 2025-2029 memuat daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dijabarkan berdasarkan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Program perangkat daerah yang sesuai dengan urusan dan kewenangannya pada Bab V dijabarkan dengan merujuk pada nomenklatur program pembangunan yang ada pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan beberapa kali melalui Keputusan Mendagri. Terakhir, Keputusan Kemendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Program dan indikator kinerja dikelompokkan ke dalam 6 urusan wajib pelayanan dasar, 16 urusan wajib non pelayanan dasar, 7 urusan penunjang, 2 urusan pendukung, 5 urusan pilihan dan 1 urusan kewilayahan.

Urusan wajib pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan rakyat, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Urusan Wajib non pelayanan dasar terdiri dari Urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pasar, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pemuda dan Olah Raga, Statistik, Kebudayaan, Perpustakaan dan Urusan Kearsipan. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan karakteristik daerah yang bersangkutan yaitu Urusan: Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Perdagangan, dan Perindustrian.

Urusan Penunjang adalah urusan pemerintahan yang berfungsi sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintahan dapat berjalan sebagaimana kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terdiri dari Urusan Inspektorat, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Penelitian dan Pengembangan, serta Kesatuan Bangsa dan Politik dan Urusan Penanggulangan Bencana. Berikutnya urusan pendukung merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan fungsi fasilitasi dan koordinasi operasional Pemerintahan Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif yang terdiri dari Urusan Kesekretariatan Daerah dan Urusan Kesekretariatan

DPRD.

Sedangkan Urusan kewilayahan menjadi urusan tersendiri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan. Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama Perangkat Daerah. Pada target kinerja diperkirakan *outcome* yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Selanjutnya program dan kinerja program tersebut menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang dijabarkan hingga level kegiatan. Pendanaan program dan kegiatan setiap tahunnya mengacu kepada pagu indikatif yang ditetapkan pada tahun berjalan, sedangkan pada penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan proyeksi pagu setiap tahunnya.

**B. INDIKATOR PROGRAM, TARGET DAN PAGU INDIKATIF
PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026-2030**

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					129.626.947.265		286.776.666.247		290.696.877.527		290.485.386.317		290.396.666.247	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					105.126.608.950		154.371.104.587		154.401.796.702		154.432.795.738		154.464.104.765	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	88,37	88,6	88,8	105.126.608.950	88,85	154.371.104.587	88,9	154.401.796.702	89	154.432.795.738	89,5	154.464.104.765	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					24.297.773.465		131.805.561.660		135.695.080.825		135.452.590.579		135.332.561.482	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	98	98	98	24.297.773.465	98,3	131.805.561.660	98,9	135.695.080.825	99	135.452.590.579	99,3	135.332.561.482	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	74,55	74,55	75,55		76,55		77,55		78,55		79,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					29.229.700		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	100	29.229.700	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					173.335.150		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks pemerataan guru (%)	81	81	82	173.335.150	83	350.000.000	84	350.000.000	85	350.000.000	86	350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	58	58	60		62		64		66		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					210.388.048.641		225.166.976.015		226.609.844.923		228.067.142.519		229.539.013.091	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					174.279.466.416		186.435.335.247		186.481.290.997		186.517.774.091		186.834.189.375	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	79	89	91	174.279.466.416	91	186.435.335.247	91	186.481.290.997	91	186.517.774.091	92	186.834.189.375	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai IKM (Indeks)	79	89	91		91		91		91		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai IKM (Indeks)	79	89	91		91		91		91		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai IKM (Indeks)	79	89	91		91		91		91		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai IKM (Indeks)	79	89	91		91		91		91		92		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
														Bidang Kesehatan				
	Nilai IKM (Indeks)	79	89	91				91				91			92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Nilai IKM (Indeks)	79	89	91				91				91			92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Nilai IKM (Indeks)	79	89	91				91				91			92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Nilai IKM (Indeks)	79	89	91				91				91			92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Nilai IKM (Indeks)	79	89	91				91				91			92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Nilai IKM (Indeks)	79	89	91				91				91			92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					32.853.583.250		36.230.290.768		37.496.916.438		38.783.674.979		39.903.204.744					
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting berdasarkan E-PPGBM (%)	2,16	2,12	2,08	32.853.583.250	2,04	36.230.290.768	2	37.496.916.438	1,94	38.783.674.979	1,9	39.903.204.744	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan				
	Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)	2	2	2				2				1			1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
	Prevalensi Stunting berdasarkan E-PPGBM (%)	2,16	2,12	2,08				2,04				2			1,94		1,9	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)	2	2	2				2				2			2		2	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					119.999.700		88.000.000		92.400.000		97.020.000		101.871.564					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya mutu dan distribusi dinas kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	30	32	35	119.999.700	37	88.000.000	39	92.400.000	41	97.020.000	45	101.871.564	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					104.999.550		79.600.000		82.475.000		85.493.750		87.285.313	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan makanan dan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	93	93	94	104.999.550	95	79.600.000	96	82.475.000	97	85.493.750	98	87.285.313	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.029.999.725		2.333.750.000		2.456.762.488		2.583.179.699		2.612.462.095	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	3.029.999.725	100	2.333.750.000	100	2.456.762.488	100	2.583.179.699	100	2.612.462.095	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					38.038.883.853		371.465.680.863		370.664.065.479		369.880.704.106		389.472.711.978	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.319.063.516,7		25.462.171.538		29.057.430.788		27.132.556.077		34.392.507.981	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	93,58	94	94,1	14.319.063.516,7	94,5	25.462.171.538	94,6	29.057.430.788	94,8	27.132.556.077	95	34.392.507.981	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Nilai IKM (Indeks)	93,58	94	94,1		94,5		94,6		94,8		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Nilai IKM (Indeks)	93,58	94	94,1		94,5		94,6		94,8		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					6.716.049.100		77.541.361.325		78.936.587.691		86.059.003.029		110.834.325.497	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase sungai yang berfungsi baik (%)	77,96	77,97	77,98	6.716.049.100	77,99	77.541.361.325	78	78.936.587.691	78,01	86.059.003.029	78,02	110.834.325.497	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase daerah irigasi berkinerja baik (%)	75	75,29	75,33		75,48		75,55		75,7		75,99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)	5,21	5,21	5,46		6,6		6,61		6,62		6,62		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					174.923.750		9.700.000.000		11.327.000.000		9.259.310.000		9.447.090.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Pelayanan Air Minum (%)	100	100	100	174.923.750	100	9.700.000.000	100	11.327.000.000	100	9.259.310.000	100	9.447.090.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					551.000.000		7.000.000.000		8.200.000.000		3.800.000.000		3.800.000.000	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase sampah yang dikelola TPA/TPST/TPS3R (%)	0	17,79	17,32	551.000.000	28,4	7.000.000.000	39,25	8.200.000.000	38,57	3.800.000.000	37,89	3.800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.761.198.540		11.955.000.000		9.244.000.000		9.547.700.000		9.861.834.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman (%)	21,92	22,74	23,57	1.760.883.240	24,39	5.940.000.000	25,21	3.087.000.000	27,68	3.241.350.000	30,14	3.403.417.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	19,48	20,48	22,31	315.300	24,19	6.015.000.000	25,08	6.157.000.000	26,16	6.306.350.000	30	6.458.417.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					4.816.169.748,3		27.520.000.000		25.620.000.000		26.220.000.000		28.320.000.000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase sistem drainase skala kota (%)	68,97	69,99	70,99	4.816.169.748,3	71,99	27.520.000.000	73,32	25.620.000.000	74,65	26.220.000.000	75,97	28.320.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					758.481.175		92.665.000.000		100.665.000.000		103.665.000.000		85.665.000.000	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	34,79	35,24	35,68	758.481.175	36,11	92.665.000.000	36,54	100.665.000.000	36,96	103.665.000.000	37,38	85.665.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					2.016.900.000		0		0		0		0	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	10	15	48,27	2.016.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					5.728.409.238		116.527.148.000		104.739.047.000		100.667.135.000		103.216.954.000	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	81,2	82	82,8	5.728.409.238	83,6	116.527.148.000	84,4	104.739.047.000	85,2	100.667.135.000	86	103.216.954.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					348.355.025		870.000.000		875.000.000		880.000.000		885.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Kualitas Pengelolaan Jasa Konstruksi (%)	97,5	94	94,1	348.355.025	94,2	870.000.000	94,3	875.000.000	94,4	880.000.000	94,5	885.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					848.333.760		2.225.000.000		2.000.000.000		2.650.000.000		3.050.000.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	74,45	74,55	74,65	848.333.760	74,75	2.225.000.000	74,85	2.000.000.000	74,95	2.650.000.000	75,05	3.050.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					7.857.420.775		21.212.038.946		34.290.896.299		34.364.902.225		24.433.721.410	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.710.867.890		5.060.000.000		5.565.999.999		6.122.600.000		6.734.860.000	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM (Indeks)	87	87	87	4.710.867.890	87	5.060.000.000	87	5.565.999.999	87	6.122.600.000	87	6.734.860.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					472.621.325		1.390.038.946		13.024.796.300		11.757.197.225		953.121.312	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kota (%)	100	100	100	472.621.325	100	1.390.038.946	100	13.024.796.300	100	11.757.197.225	100	953.121.312	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.551.114.800		945.000.000		992.250.000		1.041.862.500		1.093.955.625	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Peningkatan RTLH Untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan	100	100	100	2.551.114.800	100	945.000.000	100	992.250.000	100	1.041.862.500	100	1.093.955.625	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha (%)													
	Persentase Rumah Layak Huni (%)	97,41	97,61	97,8		97,99		98,19		98,38		98,57		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					0		10.625.000.000		11.156.250.000		11.714.062.500		11.736.145.473	
Meningkatnya Rumah Layak huni	Persentase Rumah Layak Huni (%)	97,41	97,94	98,04	0	98,48	10.625.000.000	98,91	11.156.250.000	99,34	11.714.062.500	99,76	11.736.145.473	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					122.816.760		3.192.000.000		3.351.600.000		3.519.180.000		3.695.139.000	
Meningkat penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Yang Dibangun Pengembang Yang Telah Dikelola Oleh Pemerintah Kota (%)	21,84	24,71	27,59	122.816.760	30,46	3.192.000.000	33,33	3.351.600.000	36,21	3.519.180.000	39,08	3.695.139.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					0		0		200.000.000		210.000.000		220.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasaran, Sarana dan Utilitas (PSU) tingkat kemampuan menengah	Persentase Pelayanan Sertifikasi Kualifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	-	-	-	0	-	0	2,87	200.000.000	5,74	210.000.000	8,62	220.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					18.594.536.632		32.090.422.882		28.137.364.032		26.967.615.434		27.495.672.975	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.140.229.622		14.027.598.831		14.053.660.353		14.079.982.490		14.106.567.848	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	90,43	91	91	6.520.599.992	91	8.045.791.618	91	8.061.483.349	91	8.077.331.997	91	8.093.339.131	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	92,13	92	93	4.619.629.630	93	5.981.807.213	93	5.992.177.004	93	6.002.650.493	93	6.013.228.717	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.552.927.585		4.552.927.585		4.552.927.585		4.552.927.585		4.650.845.281	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, Meningkatnya penanganan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	3.552.927.585	100	4.552.927.585	100	4.552.927.585	100	4.552.927.585	100	4.650.845.281	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, Meningkatnya kapasitas SDM PPNS														Perlindungan Masyarakat		
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	0	80	80				80				80			80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					273.642.550		3.835.410.627		3.911.368.352		3.437.334.446		3.753.590.854			
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat, Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	273.642.550	100	3.835.410.627	100	3.911.368.352	100	3.437.334.446	100	3.753.590.854	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					3.627.736.875		9.674.485.839		5.619.407.742		4.897.370.913		4.984.668.992	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	0	50	60	3.627.736.875	70	9.674.485.839	80	5.619.407.742	90	4.897.370.913	90	4.984.668.992	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.833.303.794		14.430.212.768		14.474.276.851		14.003.777.469		14.419.169.999	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.793.914.419		5.818.756.158		5.033.664.167		5.033.664.167		5.033.664.167	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	90	93	93	3.793.914.419	93	5.818.756.158	93	5.033.664.167	93	5.033.664.167	93	5.033.664.167	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					476.882.225		1.274.920.110		1.691.076.184		1.220.576.802		1.635.969.332	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100	476.882.225	100	1.274.920.110	100	1.691.076.184	100	1.220.576.802	100	1.635.969.332	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					507.688.425		2.319.685.700		2.732.685.700		2.732.685.700		2.732.685.700	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	80	90	100	507.688.425	100	2.319.685.700	100	2.732.685.700	100	2.732.685.700	100	2.732.685.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					890.977.750		4.190.977.750		4.190.977.750		4.190.977.750		4.190.977.750	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	80	85	90	890.977.750	95	4.190.977.750	100	4.190.977.750	100	4.190.977.750	100	4.190.977.750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					91.792.300		320.823.800		320.823.800		320.823.800		320.823.800	
Meningkatnya Penanganan Bencana	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100	91.792.300	100	320.823.800	100	320.823.800	100	320.823.800	100	320.823.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					72.048.675		505.049.250		505.049.250		505.049.250		505.049.250	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	72.048.675	100	505.049.250	100	505.049.250	100	505.049.250	100	505.049.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					5.933.963.446		10.010.347.529		10.283.835.273		10.135.180.155		10.482.206.002	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.755.942.927		6.685.230.838		6.854.395.993		6.684.126.559		6.881.803.046	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	88,25	92	92,5	4.755.942.927	93	6.685.230.838	93,3	6.854.395.993	93,5	6.684.126.559	93,7	6.881.803.046	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					100.000.000		160.000.000		140.066.920		25.000.000		25.000.000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang tersedia (%)	25	25	25	100.000.000	50	160.000.000	50	140.066.920	75	25.000.000	75	25.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					538.983.824		1.718.912.461		1.810.803.707		1.911.884.078		2.023.072.486	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	47,9	3,87	3,87	538.983.824	3,88	1.718.912.461	3,88	1.810.803.707	3,89	1.911.884.078	3,9	2.023.072.486	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					156.095.245		290.080.705		319.088.776		350.997.653		385.097.419	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	16,33	16,53	16,73	156.095.245	16,93	290.080.705	17,13	319.088.776	17,33	350.997.653	17,53	385.097.419	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					382.941.450		1.156.123.525		1.159.479.877		1.163.171.865		1.167.233.051	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	1.404	1.424	1.444	382.941.450	1.464	1.156.123.525	1.484	1.159.479.877	1.504	1.163.171.865	1.524	1.167.233.051	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.592.433.749		10.171.299.083		10.384.120.676		10.082.073.782		10.444.035.419	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.532.433.599		6.787.831.158		6.802.228.678		6.816.770.174		6.831.457.085	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	78,75	82	82,5	5.532.433.599	81,25	6.787.831.158	85,25	6.802.228.678	87,25	6.816.770.174	89	6.831.457.085	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
														Perlindungan Anak				
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					3.000.300		362.733.811		372.982.718		350.429.350		386.591.097					
Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD (%)	12,22	3,82	4,09	3.000.300	6,5	362.733.811	7	372.982.718	7,5	350.429.350	8	386.591.097	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) (Kategori)	Nindya	Utama	Utama				Utama				Utama		Mentor		Mentor	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					999.450		486.619.816		500.369.076		470.112.962		518.625.182					
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	999.450	100	486.619.816	100	500.369.076	100	470.112.962	100	518.625.182	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) (%)	0,02	0,019	0,016				0,014				0,012			0,011		0,011	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100				100				100			100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) (%)	0,02	0,019	0,016				0,014				0,012			0,011		0,011	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					51.000.400		1.469.340.732		1.613.681.861		1.416.106.403		1.572.557.498	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0	0	100	51.000.400	100	1.469.340.732	100	1.613.681.861	100	1.416.106.403	100	1.572.557.498	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Jumlah organisasi perempuan aktif (Organisasi)	21	21	21		21		21		21		21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					1.000.000		18.038.284		18.547.949		17.426.399		19.224.676	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	100	1.000.000	100	18.038.284	100	18.547.949	100	17.426.399	100	19.224.676	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Jumlah Perwako, himbauan, MoU terkait perlindungan anak (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					2.000.000		204.027.048		209.791.756		197.106.153		217.446.067	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	61,11	61,31	61,51	2.000.000	61,71	204.027.048	61,91	209.791.756	62,11	197.106.153	62,31	217.446.067	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) (Desa/ Kelurahan)	5	5	9		9		9		9		9		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Kategori Capaian Kota Layak Anak (KLA) (Kategori)	Madya	Madya	Madya		Madya		Madya		Nindya		Nindya		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					2.000.000		842.708.234		866.518.638		814.122.341		898.133.814	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	81,51	82,92	83,25	2.000.000	83,62	842.708.234	83,85	866.518.638	84,01	814.122.341	84,33	898.133.814	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten/ Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	81,51	82,92	83,25		83,62		83,85		84,01		84,33		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Komprehensif (Persentase)													
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten/ Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.157.251.426		9.196.776.163		9.636.087.139		9.108.537.752		9.480.164.042	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.688.902.606		4.634.923.427		4.651.134.786		4.667.508.258		4.684.045.465	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	85,6	86	86,5	2.688.902.606	87	4.634.923.427	87,5	4.651.134.786	88	4.667.508.258	88,5	4.684.045.465	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					0		322.000.000		359.952.353		269.952.353		296.118.577	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	89,61	90	91	0	92	322.000.000	93	359.952.353	94	269.952.353	95	296.118.577	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					364.645.445		2.930.000.000		3.205.000.000		2.995.000.000		3.170.000.000	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	87,7	85,3	87,9	364.645.445	88	2.930.000.000	88,1	3.205.000.000	88,2	2.995.000.000	88,3	3.170.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					52.714.900		899.852.736		970.000.000		795.000.000		920.000.000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	12	11,5	11	52.714.900	10,5	899.852.736	10	970.000.000	9,5	795.000.000	9	920.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					50.988.475		410.000.000		450.000.000		381.077.141		410.000.000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	78	85	85,1	50.988.475	85,15	410.000.000	85,2	450.000.000	85,25	381.077.141	85,3	410.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					136.788.000		550.000.000		600.000.000		450.000.000		450.000.000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Tanah Sengketa, Konflik Yang Difasilitasi (%)	0	0	0	0	77,78	50.000.000	81,48	50.000.000	85,19	50.000.000	88,89	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					0		150.000.000		150.000.000		0		0	
Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat Yang Dipetakan (%)	0	0	0	0	16,67	150.000.000	33,33	150.000.000	0	0	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					136.788.000		350.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)	100	100	100	136.788.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					19.986.211.470		24.712.835.769		24.896.559.614		25.082.120.697		25.269.537.391	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.818.187.930		7.262.835.769		7.446.559.614		8.182.120.697		8.369.537.391	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM (Indeks)	89	89	89	5.818.187.930	89	7.262.835.769	89	7.446.559.614	89	8.182.120.697	89	8.369.537.391	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					113.341.805		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang Di tindak Lanjuti (Dokumen)	5	5	5	113.341.805	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.021.173.190		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000	
Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Nilai)	45,26	66,95	67,15	1.021.173.190	67,35	1.300.000.000	67,55	1.300.000.000	67,75	1.300.000.000	67,95	1.300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Nilai)	87,59	78,15	78,45		78,75		79,05		79,35		79,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air (Nilai)	45,26	66,95	67,15		67,35		67,55		67,75		67,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Nilai)	87,59	78,15	78,45		78,75		79,05		79,35		79,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					1.862.944.530		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya pengelolaan keaneka ragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	14,87	14,9	14,91	1.862.944.530	14,93	2.000.000.000	14,95	2.000.000.000	14,97	2.000.000.000	15	2.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					12.646.300		50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan limbah beracun dan limbah beracun limbah (B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	50	50	50	12.646.300	50	50.000.000	50	50.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					14.848.750		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan / atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	74	75	76	14.848.750	77	100.000.000	78	100.000.000	79	100.000.000	80	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					779.755.260		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	20	20	20	779.755.260	23,4	1.000.000.000	25,53	1.000.000.000	27,66	1.000.000.000	31,91	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP					51.557.250		200.000.000		200.000.000		100.000.000		100.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
UNTUK MASYARAKAT														
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	-	-	95,54	51.557.250	95,76	200.000.000	96,25	200.000.000	96,35	100.000.000	95,5	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					10.311.756.455		12.500.000.000		12.500.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase timbunan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	15,9	19,68	23,54	10.311.756.455	27,42	12.500.000.000	30,9	12.500.000.000	34,79	12.000.000.000	38,48	12.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.617.745.532		8.123.135.612		7.701.314.022		7.368.517.851		7.603.936.247	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.232.570.332		6.878.135.612		6.421.314.022		6.078.517.851		6.303.936.247	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	94,08	94,1	94,1	4.232.570.332	94,2	6.878.135.612	94,3	6.421.314.022	94,4	6.078.517.851	94,5	6.303.936.247	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					139.285.250		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	62,34	62,5	64	139.285.250	66	400.000.000	68	400.000.000	70	400.000.000	70	400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan Identitas	8,16	10	10		12		14		16		16		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kependudukan Digital (IKD) (%)													Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					88.927.200		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	88.927.200	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100				100				100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100				100				100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100				100				100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					138.438.800		425.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan (Persentase)	90	91	92	138.438.800	93	425.000.000	94	450.000.000	95	450.000.000	95	450.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					18.523.950		70.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan (Laporan)	3	3	3	18.523.950	3	70.000.000	3	80.000.000	3	90.000.000	3	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					0		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					0		90.080.000		90.080.000		90.080.000		90.080.000	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	0	0	1	90.080.000	1	90.080.000	1	90.080.000	1	90.080.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					0		909.920.000		909.920.000		909.920.000		909.920.000	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100	100	0	100	909.920.000	100	909.920.000	100	909.920.000	100	909.920.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					793.330.700		6.662.378.984		7.776.051.152		6.405.852.053		7.159.762.566	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.000.000		513.668.890		528.182.411		496.244.492		547.453.295	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terkendalinya pertambahan penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	8,5	6,7	5,5	1.000.000	4,6	513.668.890	4	528.182.411	3,5	496.244.492	3,2	547.453.295	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,32	2,3	2,29		2,28		2,26		2,25		2,24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					286.430.500		3.453.498.669		4.065.203.284		3.319.390.225		3.713.523.369	
Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	63,5	63,7	63,8	286.430.500	63,9	3.453.498.669	64	4.065.203.284	64,1	3.319.390.225	64,15	3.713.523.369	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,4	11,3	11,2		11,15		11,1		11,05		11		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	16,1	15	14,1		13,3		12,6		11,9		11,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					505.900.200		2.695.211.425		3.182.665.457		2.590.217.336		2.898.785.902	
Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembinaan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	70	71	72	505.900.200	73	2.695.211.425	74	3.182.665.457	75	2.590.217.336	76	2.898.785.902	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) wanita (Angka)	23,1	23,2	23,3		23,4		23,5		23,6		23,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	58,5	59,3	60		60,8		61,5		62,2		62,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	88,6	89,6	90,4		91,3		92		92,7		93,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					9.298.390.128		15.301.330.322		25.715.124.702		24.841.966.718		15.444.526.775	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.580.275.343		9.209.036.322		9.922.830.702		9.049.672.718		9.652.232.775	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	87	89	85	6.580.275.343	87	9.209.036.322	89	9.922.830.702	91	9.049.672.718	93	9.652.232.775	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					2.718.114.785		6.092.294.000		15.792.294.000		15.792.294.000		5.792.294.000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan	84	86	86	2.718.114.785	87	6.092.294.000	88	15.792.294.000	89	15.792.294.000	90	5.792.294.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	yang ramah lingkungan (%)													
	Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan (%)	84	86	86		87		88		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan (%)	84	86	86		87		88		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan yang ramah lingkungan (%)	84	86	86		87		88		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					9.690.860.266		18.205.522.388		17.020.104.963		15.724.391.471		16.452.669.416	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.975.798.846		5.760.522.388		6.380.104.963		5.480.721.438		5.257.669.416	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	86,3	86,3	87	4.975.798.846	87,5	5.760.522.388	88	6.380.104.963	88,5	5.480.721.438	89	5.257.669.416	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.088.933.820		2.900.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		5.650.000.000	
Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	-	78	78	1.088.933.820	80	2.900.000.000	84	4.500.000.000	87	4.500.000.000	90	5.650.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3.626.127.600		9.545.000.000		6.140.000.000		5.743.670.033		5.545.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,75	3,75	3,84	3.626.127.600	3,93	9.545.000.000	4,03	6.140.000.000	4,12	5.743.670.033	4,21	5.545.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					7.904.377.539		11.339.522.402		11.787.632.552		11.584.568.804		11.925.733.918	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.506.696.314		8.539.522.402		8.567.132.552		8.595.018.804		8.623.183.918	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	87,1	87,1	87,6	7.506.696.314	88,1	8.539.522.402	88,6	8.567.132.552	89,1	8.595.018.804	89,6	8.623.183.918	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	12,74	13,11	13,31	0	13,57	50.000.000	13,79	50.000.000	13,93	50.000.000	14,07	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					19.999.150		100.000.000		110.000.000		121.000.000		121.000.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	38,46	34,21	36,84	19.999.150	39,47	100.000.000	42,11	110.000.000	44,74	121.000.000	47,37	121.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					14.999.250		100.000.000		105.000.000		110.500.000		110.500.000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	46,15	60	60,53	14.999.250	61,05	100.000.000	61,58	105.000.000	62,11	110.500.000	62,63	110.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					129.999.200		300.000.000		330.000.000		200.000.000		363.000.000	
Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	4,66	10,47	10,94	129.999.200	11,7	300.000.000	13,45	330.000.000	14,62	200.000.000	17,54	363.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					19.999.850		455.000.000		500.500.000		550.550.000		550.550.000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	4,35	8,33	11,54	19.999.850	13,79	455.000.000	15,15	500.500.000	15,79	550.550.000	15,91	550.550.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					113.336.775		1.545.000.000		1.850.000.000		1.655.000.000		1.805.000.000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	4,84	4,84	4,95	113.336.775	5,02	1.545.000.000	5,07	1.850.000.000	5,13	1.655.000.000	5,34	1.805.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	11,26	11,26	12,35		12,94		13,56		14,2		14,88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					99.347.000		250.000.000		275.000.000		302.500.000		302.500.000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalini Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	1,84	1,84	1,99	99.347.000	2,07	250.000.000	2,15	275.000.000	2,24	302.500.000	2,32	302.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.700.143.926		11.069.434.306		10.980.518.581		10.227.876.413		10.743.328.425	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.384.451.086		7.169.434.306		6.780.518.581		7.427.876.413		7.943.328.425	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	93,5	94	94,5	4.384.451.086	95	7.169.434.306	95,5	6.780.518.581	96	7.427.876.413	96,5	7.943.328.425	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					53.388.500		700.000.000		800.000.000		500.000.000		500.000.000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	292,72	100	100	53.388.500	100	700.000.000	100	800.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					40.707.810		700.000.000		800.000.000		500.000.000		500.000.000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0	10	10	40.707.810	10	700.000.000	10	800.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					160.166.030		1.500.000.000		1.400.000.000		800.000.000		800.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	160.166.030	100	1.500.000.000	100	1.400.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					21.430.600		800.000.000		900.000.000		600.000.000		600.000.000	
Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka	100	100	100	21.430.600	100	800.000.000	100	900.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Usaha (Persentase)													
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					39.999.900		200.000.000		300.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	39.999.900	100	200.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	Dinas /Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					4.848.809.221		12.113.091.421		11.725.625.000		10.579.906.280		11.965.901.563	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					118.591.225		1.310.591.421		1.260.500.000		591.525.000		643.101.250	
Persentase pemuda yang berwirausaha	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	65	65	65	118.591.225	65	1.310.591.421	70	1.260.500.000	75	591.525.000	75	643.101.250	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					4.287.752.896		9.825.000.000		9.458.750.000		9.151.687.530		10.454.271.875	
Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	0	14	15	4.287.752.896	16	9.825.000.000	17	9.458.750.000	18	9.151.687.530	19	10.454.271.875	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					442.465.100		977.500.000		1.006.375.000		836.693.750		868.528.438	
Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	65	65	65	442.465.100	70	977.500.000	70	1.006.375.000	75	836.693.750	75	868.528.438	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					100.654.050		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN					100.654.050		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
STATISTIK SEKTORAL														
Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik (Nilai)	2,69	2,7	2,71	100.654.050	2,72	100.000.000	2,73	100.000.000	2,74	100.000.000	2,75	100.000.000	Dinas /Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					418.957.980		670.000.000		620.000.000		315.000.000		650.000.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					418.957.980		670.000.000		620.000.000		315.000.000		650.000.000	
Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	46,2	46,2	50	418.957.980	53	670.000.000	58	620.000.000	60	315.000.000	62,5	650.000.000	Dinas /Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.794.897.250		6.124.672.920		5.483.404.860		4.752.406.930		4.765.630.404	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.544.908.250		4.891.610.162		4.267.493.900		3.678.227.220		3.582.768.506	
Persentase objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	75	75	75	1.544.908.250	75	4.891.610.162	80	4.267.493.900	80	3.678.227.220	85	3.582.768.506	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					103.249.800		541.499.790		529.999.800		379.999.800		479.999.800	
Persentase Komunitas /pelaku seni yang ditingkatkan kapasitasnya	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	5	5	5	103.249.800	5	541.499.790	5	529.999.800	5	379.999.800	5	479.999.800	Dinas /Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					0		157.500.000		165.375.000		173.643.750		182.325.938	
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap	0	0	0	0	50	157.500.000	7	165.375.000	7	173.643.750	10	182.325.938	Dinas /Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
dan dapat mengakses data dan informasi sejarah lokal	Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)													Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					21.542.750		81.857.168		80.340.160		80.340.160		80.340.160	
Persentasi cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	10	10	10	21.542.750	10	81.857.168	10	80.340.160	10	80.340.160	10	80.340.160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	10	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					125.196.450		452.205.800		440.196.000		440.196.000		440.196.000	
Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaa kegiatan museum	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	10	10	10	125.196.450	10	452.205.800	10	440.196.000	10	440.196.000	10	440.196.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapan (Persentase)	10	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.651.792.209		11.372.702.267		7.229.663.734		6.878.028.786		7.157.625.808	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.409.248.509		8.344.798.039		4.354.933.734		4.365.170.786		4.375.510.208	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	86,17	86,75	87	3.409.248.509	87,25	8.344.798.039	87,5	4.354.933.734	87,75	4.365.170.786	88	4.375.510.208	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					230.140.650		2.964.401.228		2.800.425.000		2.437.628.000		2.704.400.600	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	66,18	66,2	66,3	230.140.650	66,4	2.964.401.228	66,8	2.800.425.000	67,2	2.437.628.000	67,5	2.704.400.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Standar Nasional Perpustakaan														
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					12.403.050		63.503.000		74.305.000		75.230.000		77.715.000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	1,16	1,6	2,05	12.403.050	2,5	63.503.000	2,9	74.305.000	3,4	75.230.000	3,8	77.715.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					174.105.210		1.618.077.300		1.618.295.462		1.366.895.573		1.498.000.174	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					174.105.210		1.363.077.300		1.473.295.462		1.101.895.573		1.363.000.174	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	70,04	70,15	70,3	174.105.210	70,5	1.363.077.300	70,75	1.473.295.462	71,05	1.101.895.573	71,3	1.363.000.174	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					0		240.000.000		130.000.000		250.000.000		120.000.000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	-	-	-	0	30	240.000.000	35	130.000.000	40	250.000.000	45	120.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	-	-	-	0	30	15.000.000	32	15.000.000	34	15.000.000	36	15.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					751.577.730		1.217.478.901		789.226.791		868.149.469		954.964.417	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					575.504.050		1.080.937.983		639.031.781		702.934.959		773.228.455	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	565,4	560	565	575.504.050	570	1.080.937.983	575	639.031.781	580	702.934.959	585	773.228.455	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase Pembudidaya Yang Tergabung Dalam Kelompok Yang Menerapkan Anjuran KKP (%)	45	45	50		55		60		65		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	565,4	560	565		570		575		580		585		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					176.073.680		136.540.918		150.195.010		165.214.510		181.735.962	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	33,4	33,4	33,5	176.073.680	39,35	136.540.918	39,4	150.195.010	39,45	165.214.510	50	181.735.962	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	7,1	7,1	7,15		7,2		7,25		7,3		7,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					6.721.291.422		13.336.376.399		12.267.497.306		11.731.936.399		11.931.936.399	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.791.365.742		7.162.156.678		6.984.277.585		6.439.716.678		6.439.716.678	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	86	86	90	5.791.365.742	90	7.162.156.678	90	6.984.277.585	90	6.439.716.678	90	6.439.716.678	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					498.600.130		1.477.539.031		1.420.539.031		1.470.539.031		1.470.539.031	
Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik, Jumlah pengembangan destinasi pariwisata, Persentase promosi	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	45	45	50	498.600.130	50	1.477.539.031	50	1.420.539.031	55	1.470.539.031	55	1.470.539.031	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
kepariwisataan yang dilaksanakan														
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	45	50	50		50		50		55		55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					201.325.550		2.450.000.000		2.300.000.000		2.250.000.000		2.300.000.000	
Jumlah kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa pariwisata, Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota, Jumlah media/ informasi yang disediakan dan disebarluaskan, Jumlah event yang dilaksanakan, difasilitasi dan diikuti	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	6	6	7	201.325.550	7	2.450.000.000	7	2.300.000.000	7	2.250.000.000	7	2.300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					55.000.000		921.680.690		621.680.690		621.680.690		621.680.690	
Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	10	15	21	55.000.000	30	921.680.690	42	621.680.690	57	621.680.690	75	621.680.690	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					175.000.000		1.325.000.000		941.000.000		950.000.000		1.100.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Jumlah Fasilitas Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	1	1	30	175.000.000	50	1.325.000.000	60	941.000.000	70	950.000.000	80	1.100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					20.986.462.835		24.874.026.927		26.352.858.629		24.542.420.718		25.627.083.543	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.026.603.669		14.617.276.141		16.079.003.742		15.737.821.125		15.942.023.991	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	87	88	89	14.026.603.669	89,5	14.617.276.141	90	16.079.003.742	90,5	15.737.821.125	91	15.942.023.991	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Nilai IKM (Nilai)	88,37	88,6	88,8		88,85		88,9		88,95		89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.601.019.686		2.520.233.356		2.557.966.367		1.713.763.004		1.885.139.304	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	0,06	0,06	0,73	1.601.019.686	0,73	2.520.233.356	0,16	2.557.966.367	1,29	1.713.763.004	0,71	1.885.139.304	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	2	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	2	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	5,6	5,6	5,61		5,62		5,63		5,64		5,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	0,06	0,06	0,73		0,73		0,16		1,29		0,71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	2	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	5,6	5,6	5,61		5,62		5,63		5,64		5,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.550.394.100		4.767.005.312		5.027.669.610		4.683.795.788		5.152.175.367	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B (JUT) (%)	42,82	42,82	49,84	3.550.394.100	50,54	4.767.005.312	51,31	5.027.669.610	52,16	4.683.795.788	53,09	5.152.175.367	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Pemenuhan Prasarana Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B (RJIT) (%)	57,18	57,18	66,54		67,48		68,51		69,64		70,89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) dalam kondisi baik (%)	50	55	60		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.080.825.230		2.169.129.953		1.807.798.528		1.438.578.381		1.582.436.219	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	1	1	1	1.080.825.230	1	2.169.129.953	1	1.807.798.528	1	1.438.578.381	1	1.582.436.219	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	100	100	90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	9	9	9		9		9		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	100	100	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	9	9	9		9		9		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					154.000.000		169.400.000		186.340.000		204.974.000		225.471.400	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	60	60	60	154.000.000	100	169.400.000	100	186.340.000	100	204.974.000	100	225.471.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					69.000.000		75.900.000		83.490.000		91.839.000		101.022.900	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	69.000.000	100	75.900.000	100	83.490.000	100	91.839.000	100	101.022.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					504.620.150		555.082.165		610.590.382		671.649.420		738.814.362	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	90	504.620.150	90	555.082.165	90	610.590.382	90	671.649.420	95	738.814.362	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Luas Tanam Yang Menerapkan Teknologi Pertanian (%)	45	45	50		52		54		56		58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					3.176.501.150		12.179.454.661		12.706.805.248		11.719.229.915		12.201.719.637	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					19.679.200		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	19.679.200	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					2.737.327.100		9.979.454.661		9.979.454.661		9.173.929.328		9.599.748.376	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	91,47	90	90	2.737.327.100	90	9.979.454.661	90	9.979.454.661	90	9.173.929.328	90	9.599.748.376	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					113.898.350		470.000.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	19,23	19,23	19,23	113.898.350	21,15	470.000.000	21,15	470.000.000	23,08	470.000.000	23,08	470.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					0		600.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam upaya pelaksanaan ekspor (%)	0	0	0	0	0,02	600.000.000	0,02	800.000.000	0,03	800.000.000	0,04	800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					52.586.700		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	52.586.700	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					253.009.800		900.000.000		1.227.350.587		1.045.300.587		1.101.971.261	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	80	80	80	253.009.800	80	900.000.000	80	1.227.350.587	80	1.045.300.587	80	1.101.971.261	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	80	80	80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					797.227.815		2.280.759.855		2.654.900.192		2.004.121.386		2.203.231.967	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					719.630.190		2.113.255.285		2.451.098.782		1.862.209.751		2.048.752.457	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	25	25	26	719.630.190	27	2.113.255.285	28	2.451.098.782	29	1.862.209.751	30	2.048.752.457	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	25	26	26		27		28		29		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					60.657.325		117.313.670		148.610.510		96.911.635		108.479.510	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	72,07	72,32	72,57	60.657.325	72,77	117.313.670	73,02	148.610.510	73,27	96.911.635	73,52	108.479.510	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					16.940.300		50.190.900		55.190.900		45.000.000		46.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	0	60	61,67	16.940.300	66,67	50.190.900	71,67	55.190.900	72,33	45.000.000	73,33	46.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					32.913.423.435		42.405.981.886		43.011.722.241		41.343.761.594		44.722.611.902	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.922.122.285		32.552.733.836		32.958.474.191		31.290.513.544		34.669.363.852	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	89,01	89,02	89,04	26.922.122.285	89,06	32.552.733.836	89,08	32.958.474.191	90	31.290.513.544	90,02	34.669.363.852	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					5.654.335.950		8.655.066.350		8.855.066.350		8.855.066.350		8.855.066.350	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Nilai)	3,0788	3,4	3,415	5.654.335.950	3,44	8.655.066.350	3,463	8.855.066.350	3,4824	8.855.066.350	3,5	8.855.066.350	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	87	87,2	87,4		87,6		87,8		87,9		88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					336.965.200		1.198.181.700		1.198.181.700		1.198.181.700		1.198.181.700	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Indeks)	91,58	91,58	91,58	336.965.200	91,58	1.198.181.700	91,58	1.198.181.700	91,58	1.198.181.700	91,58	1.198.181.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					23.797.097.151		40.245.607.613		40.607.023.519		40.972.053.584		43.340.733.950	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.457.799.276		19.593.931.084		19.593.931.084		19.593.931.084		19.286.364.484	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	84	85	85	17.457.799.276	85	19.593.931.084	86	19.593.931.084	86	19.593.931.084	86	19.286.364.484	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					6.339.297.875		20.651.676.529		21.013.092.435		21.378.122.500		24.054.369.466	
Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Ranperda Yang Ditetapkan (%)	100	100	100	6.339.297.875	100	20.651.676.529	100	21.013.092.435	100	21.378.122.500	100	24.054.369.466	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					7.986.571.099		24.150.066.534		19.287.751.665		18.025.599.461		19.048.211.795	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.000.537.499		18.120.066.534		12.956.251.665		11.694.099.461		12.400.136.795	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	91	91,5	91,7	7.000.537.499	92	18.120.066.534	92,5	12.956.251.665	92,7	11.694.099.461	93	12.400.136.795	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					545.303.825		2.260.000.000		2.373.000.000		2.373.000.000		2.491.650.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100	545.303.825	100	2.260.000.000	100	2.373.000.000	100	2.373.000.000	100	2.491.650.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					440.729.775		3.770.000.000		3.958.500.000		3.958.500.000		4.156.425.000	
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	440.729.775	100	3.770.000.000	100	3.958.500.000	100	3.958.500.000	100	4.156.425.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					17.927.219.274		28.916.336.050		30.717.901.045		28.469.483.897		29.986.785.633	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.787.171.344		14.365.451.104		14.369.090.654		14.369.090.654		14.369.090.654	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	84,25	85	85	12.787.171.344	86	14.365.451.104	87	14.369.090.654	88	14.369.090.654	89	14.369.090.654	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai IKM (Indeks)	85	85	85		86		87		88		89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					3.097.918.280		12.043.508.706		13.841.434.151		11.593.017.003		13.106.930.379	
Meningkatnya tata kelola anggaran, Meningkatnya tata kelola perbendaharaan, Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	40,76	46,55	35	3.097.918.280	30	12.043.508.706	30	13.841.434.151	30	11.593.017.003	30	13.106.930.379	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	11,49	11	10		10		9		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					915.159.650		1.046.611.640		1.046.611.640		1.046.611.640		1.050.000.000	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	0,3	2	3	915.159.650	4	1.046.611.640	5	1.046.611.640	6	1.046.611.640	7	1.050.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.126.970.000		1.460.764.600		1.460.764.600		1.460.764.600		1.460.764.600	
Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah, Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	18,19	19	20	1.126.970.000	21	1.460.764.600	22	1.460.764.600	23	1.460.764.600	23	1.460.764.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	18,19	19	20		21		22		23		23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					18.679.947.398		31.233.943.986		32.427.859.904		30.878.094.168		31.908.994.614	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					18.411.258.998		27.006.935.837		27.006.935.837		27.006.935.837		27.006.935.837	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	91	91	91,3	18.411.258.998	91,6	27.006.935.837	91,9	27.006.935.837	92,2	27.006.935.837	92,5	27.006.935.837	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					268.688.400		4.227.008.149		5.420.924.067		3.871.158.331		4.902.058.777	
Meningkatnya peningkatan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	11,64	12	12	268.688.400	12	4.227.008.149	12	5.420.924.067	12	3.871.158.331	12	4.902.058.777	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					15.081.550		2.294.213.330		2.325.575.020		2.323.883.091		2.323.173.330	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					15.081.550		2.294.213.330		2.325.575.020		2.323.883.091		2.323.173.330	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	11,64	12	12	15.081.550	12	2.294.213.330	12	2.325.575.020	12	2.323.883.091	12	2.323.173.330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					399.999.500		3.700.000.000		3.885.000.000		2.630.000.000		2.735.000.000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					300.000.000		3.000.000.000		3.150.000.000		2.500.000.000		2.605.000.000	
Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	75	80	300.000.000	82	3.000.000.000	85	3.150.000.000	90	2.500.000.000	90	2.605.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					99.999.500		700.000.000		735.000.000		130.000.000		130.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	0	81	85	99.999.500	87,5	700.000.000	90	735.000.000	95	130.000.000	95	130.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					10.534.402.272		18.004.262.106		18.180.671.613		18.171.154.509		18.167.162.106	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.445.241.772		14.076.283.049		14.076.283.049		14.076.283.049		14.076.283.049	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	88,93	89	89	9.445.241.772	89,25	14.076.283.049	89,5	14.076.283.049	89,75	14.076.283.049	90	14.076.283.049	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					955.566.300		3.015.566.300		3.191.975.807		3.182.458.703		3.178.466.300	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3	3	3	955.566.300	3	3.015.566.300	3	3.191.975.807	3	3.182.458.703	4	3.178.466.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					133.594.200		912.412.757		912.412.757		912.412.757		912.412.757	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3	3	3	133.594.200	3	912.412.757	3	912.412.757	3	912.412.757	4	912.412.757	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					56.059.723.314		71.694.166.562		72.674.219.382		72.621.346.579		72.599.166.562	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					45.159.572.288		47.955.032.748		47.836.282.748		47.838.032.748		47.838.782.748	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91	13.855.281.865	92	12.986.929.234	92	12.986.929.234	92	12.986.929.234	92	12.986.929.234	Kecamatan Payakumbuh Barat
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	91	91	91	9.330.016.133	91	8.663.712.228	91	8.663.712.228	91	8.663.712.228	91	8.663.712.228	Kecamatan Payakumbuh Timur
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	91	91	91	9.098.759.554	91	11.266.867.502	91	11.170.867.502	91	11.170.867.502	91	11.170.867.502	Kecamatan Payakumbuh Utara
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90	6.475.476.445	90	7.545.595.121	90	7.545.595.121	90	7.545.595.121	90	7.545.595.121	Kecamatan Payakumbuh Selatan
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90	6.400.038.291	90	7.491.928.663	90	7.469.178.663	90	7.470.928.663	90	7.471.678.663	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					180.091.350		2.061.960.797		2.229.910.306		2.229.910.306		2.229.910.306	
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu (%)	85	85	85	40.102.150	85	896.010.564	85	896.010.564	85	896.010.564	85	896.010.564	Kecamatan Payakumbuh Barat
	Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah (%)	75	75	75		75		75		75		75		Kecamatan Payakumbuh Barat
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah (%)	70	70	70	53.702.250	70	787.000.000	70	887.000.000	70	887.000.000	70	887.000.000	Kecamatan Payakumbuh Timur
	Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu (%)	85	85	85		85		85		85		85		Kecamatan Payakumbuh Timur
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu (%)	85	85	85	31.677.800	85	238.999.798	85	293.999.798	85	293.999.798	85	293.999.798	Kecamatan Payakumbuh Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah (%)	75	75	75		75		75		75		75		Kecamatan Payakumbuh Utara
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu (%)	85	85	85	31.181.600	85	84.950.435	85	97.899.944	85	97.899.944	85	97.899.944	Kecamatan Payakumbuh Selatan
	Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah (%)	75	75	75		75		75		75		75		Kecamatan Payakumbuh Selatan
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah (%)	70	70	70	23.427.550	70	55.000.000	70	55.000.000	70	55.000.000	70	55.000.000	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
	Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu (%)	85	85	85		85		85		85		85		Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					10.276.104.151		18.431.850.909		19.198.117.469		19.145.244.666		19.123.064.649	
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91	3.704.195.535	92	6.311.968.308	92	6.892.021.128	92	6.839.148.325	92	6.816.968.308	Kecamatan Payakumbuh Barat
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Payakumbuh Barat
	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91		92		92		92		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91		92		92		92		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91		92		92		92		92		92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91		92		92		92		92		92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91		92		92		92		92		92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91		92		92		92		92		92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91		92		92		92		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91		92		92		92		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91		92		92		92		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91		92		92		92		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91		92		92		92		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91		92		92		92		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91				92				92			92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91				92				92			92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91				92				92			92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91				92				92			92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100				100				100			100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Nilai IKM (Indeks)	92	91	91		92		92		92		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100	2.002.338.550	100	4.700.000.000	100	4.700.000.000	100	4.700.000.000	100	4.700.000.000	Kecamatan Payakumbuh Timur
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		Kecamatan Payakumbuh Timur		
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100	1.969.011.223	100	3.264.135.450	100	3.320.135.450	100	3.320.135.450	100	3.320.135.450	Kecamatan Payakumbuh Utara
	Nilai IKM (Indeks)	91	91	91		91		91		91		Kecamatan Payakumbuh Utara		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Nilai IKM (Indeks)	91	91	91		91		91		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Nilai IKM (Indeks)	91	91	91		91		91		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Nilai IKM (Indeks)	91	91	91		91		91		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Nilai IKM (Indeks)	91	91	91		91		91		91		91	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	91	91	91		91		91		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Nilai IKM (Indeks)	91	91	91		91		91		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Nilai IKM (Indeks)	91	91	91		91		91		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Nilai IKM (Indeks)	91	91	91		91		91		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Nilai IKM (Indeks)	91	91	91		91		91		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	91	91	91		91		91		91				
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90	1.323.559.325	90	2.030.776.202	90	2.085.960.891	90	2.085.960.891	90	2.085.960.891	Kecamatan Payakumbuh Selatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		90		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		90		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		90		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		90		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90				
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90	1.276.999.518	90	2.124.970.949	90	2.200.000.000	90	2.200.000.000	90	2.200.000.000	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		90		90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		90		90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		90		90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai IKM (Indeks)	90	90	90		90		90		90		90		90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					54.940.175		1.009.274.912		1.034.274.912		1.034.274.912		1.034.274.912	
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	12.515.425	100	627.207.372	100	627.207.372	100	627.207.372	100	627.207.372	Kecamatan Payakumbuh Barat
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	24.519.300	100	220.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	Kecamatan Payakumbuh Timur
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	3.270.000	100	83.270.000	100	108.270.000	100	108.270.000	100	108.270.000	Kecamatan Payakumbuh Utara
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	4.619.700	100	28.797.540	100	28.797.540	100	28.797.540	100	28.797.540	Kecamatan Payakumbuh Selatan
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	10.015.750	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					389.015.350		2.236.047.196		2.375.633.947		2.373.883.947		2.373.133.947	
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	83.882.200	100	312.881.950	100	372.881.950	100	372.881.950	100	372.881.950	Kecamatan Payakumbuh Utara
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	106.963.600	100	1.164.813.756	100	1.164.813.756	100	1.164.813.756	100	1.164.813.756	Kecamatan Payakumbuh Barat
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	97.427.250	100	393.000.000	100	393.000.000	100	393.000.000	100	393.000.000	Kecamatan Payakumbuh Timur

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	62.517.950	100	170.351.490	100	202.217.292	100	202.217.292	100	202.217.292	Kecamatan Payakumbuh Selatan
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	38.224.350	100	195.000.000	100	242.720.949	100	240.970.949	100	240.220.949	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.045.472.162		7.867.532.239		6.163.712.240		26.352.845.480		5.882.541.531	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.873.693.299		3.027.631.581		2.755.736.557		2.602.152.322		2.602.152.322	
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	92,69	93	93	1.873.693.299	94	3.027.631.581	94	2.755.736.557	94	2.602.152.322	95	2.602.152.322	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					684.197.225		1.441.133.294		1.183.601.617		790.973.251		1.083.601.617	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	90.00	90.00	90.00	684.197.225	91.00	1.441.133.294	92.00	1.183.601.617	93.00	790.973.251	94.00	1.083.601.617	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					881.046.463		1.162.577.839		954.627.388		21.897.600.299		954.627.388	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai	100	100	100	881.046.463	100	1.162.577.839	100	954.627.388	100	21.897.600.299	100	954.627.388	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Politik (Persentase)													Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					74.496.325		191.226.463		107.471.755		77.471.755		79.885.281	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	92,19	93	93	74.496.325	93	191.226.463	93,5	107.471.755	93,5	77.471.755	94	79.885.281	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					103.024.850		1.058.045.582		713.912.248		633.995.623		713.912.248	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	103.024.850	100	1.058.045.582	100	713.912.248	100	633.995.623	100	713.912.248	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					429.014.000		986.917.480		448.362.675		350.652.230		448.362.675	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan (Persentase)	100	100	100	429.014.000	100	986.917.480	100	448.362.675	100	350.652.230	100	448.362.675	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					697.931.851.169		1.433.883.331.236		1.453.484.387.636		1.452.426.931.585		1.451.983.331.236	

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

C. KESELARASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1). KESELARASAN PROGRAM PRIORITAS RPJMN DENGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, dan menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029. Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan. Kegiatan prioritas utama ini disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, dan *stakeholders* lainnya. Diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN Tahun 2025–2029, terdapat 83 (delapan puluh tiga) program prioritas utama nasional, yang sesuai dengan arahan kemendagri untuk Kota Payakumbuh terdapat 10 (sepuluh) program yang perlu ditampung dan diselaraskan dengan program daerah.

Tabel 4.2 Keselarasan Program Prioritas RPJMN dengan Program Kerja RPJMD

NO.	PROGRAM PRIORITAS RPJMN	RPJMD KOTA PAYAKUMBUH										
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	PROJECT/ AKTIVITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir di daerah Payakumbuh Timur, Payakumbuh Selatan dan Payakumbuh Utara pada kawasan Rawan Banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
					Pemeliharaan Sungai pada 7 (tujuh) Ruas Sungai dalam bentuk pembuangan sedimen dan menjaga lebar sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
					Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dilakukan pada tebing sungai rawan lonsor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
2	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan Kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Kegiatan Peningkatan pelayanan BLUD	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Adnan WD	Belanja Modal, operasional dalam pemenuhan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Adnan WD yang lengkap berkualitas	Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Rehabilitasi dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√

NO.	PROGRAM PRIORITAS RPJMN	RPJMD KOTA PAYAKUMBUH										
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	PROJECT/ AKTIVITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Pengembangan Rumah Sakit Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Belanja Modal Alat Kesehatan dalam pemenuhan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Adnan WD yang lengkap berkualitas	Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik dalam pemenuhan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Adnan WD yang lengkap berkualitas	Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bimbingan teknis keahlian/profesi dalam Peningkatan Kompetensi	Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√	
				dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan								
		Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√	

NO.	PROGRAM PRIORITAS RPJMN	RPJMD KOTA PAYAKUMBUH										
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	PROJECT/ AKTIVITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
			dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kesehatan Sesuai Standar								
3	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Industri Olahan Kelapa	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh			√	√	√	√
4	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
5	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan	Dinas Pertanian	√	√	√	√	√	√
				Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan	Pelatihan / Sekolah Lapang Pembudidaya Ikan	Dinas Pertanian	√	√	√	√	√	√

NO.	PROGRAM PRIORITAS RPJMN	RPJMD KOTA PAYAKUMBUH										
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	PROJECT/ AKTIVITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pendidikan dan Pelatihan								
6	Pengembangan Pangan Hewani	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Higiene sanitasi (Fasilitilasi NKV)	Dinas Pertanian	√	√	√	√	√	√
				Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Sosialisasi NKV bagi Pelaku Usaha	Dinas Pertanian	√	√	√	√	√	√
				Pelatihan Olahan Hasil	Dinas Pertanian	√	√	√	√	√	√	
			Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Fasilitasi Pemotongan Hewan di RPH	Dinas Pertanian	√	√	√	√	√	√
					Fasilitasi Pasar Ternak	Dinas Pertanian	√	√	√	√	√	√
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS-RBA)	Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi IKM (Termasuk Komoditi Produk Pangan Hewani)	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√

NO.	PROGRAM PRIORITAS RPJMN	RPJMD KOTA PAYAKUMBUH										
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	PROJECT / AKTIVITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Hewani	Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
					Lomba Pengolahan Pangan Lokal	Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
7	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Program Pengembangan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pengembangan Padi, Jagung, dan Tanaman Hortikultura (Cabe, Bawang, Terung) dengan memberikan Bantuan Benih, Kompos, dan Benih Siap Tanam	Dinas Pertanian	√	√	√	√	√	√
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS-RBA)	Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi IKM (Termasuk Komoditi Produk Pangan Lokal dan Nabati)	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√

NO.	PROGRAM PRIORITAS RPJMN	RPJMD KOTA PAYAKUMBUH										
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	PROJECT/ AKTIVITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Nabati	Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
					Lomba Pengolahan Pangan Lokal	Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
					Bantuan Bahan dan Benih Tanaman Lokal	Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Pelatihan dan pemberian bantuan pengembangan usaha pangan keluarga	Dinas Ketahanan Pangan	√	√	√	√	√	√
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kab/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Rapat korodinasi persiapan penumbuhan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Dinas Ketahanan Pangan			√	√	√	√
				Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Penumbuhan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Dinas Ketahanan Pangan				√	√	√

NO.	PROGRAM PRIORITAS RPJMN	RPJMD KOTA PAYAKUMBUH										
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	PROJECT/ AKTIVITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh			√			
				Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Pembangunan <i>reservoir</i> sebagai penampungan air minum untuk kebutuhan domestik atau industri	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh		√	√	√	√	√
				Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan Sambungan Rumah (SR) untuk pelayanan air minum ke masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh				√		
9	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat	Pembangunan Tangki Septik Individu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
10	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrash yang berkualitas (PHTC)	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√

NO.	PROGRAM PRIORITAS RPJMN	RPJMD KOTA PAYAKUMBUH										
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	PROJECT/ AKTIVITAS	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non-Formal	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan NonFormal	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan NonFormal	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan NonFormal	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	√	√	√	√	√	√

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Target pembangunan daerah Kota Payakumbuh meliputi Target Indikator Makro dan target Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 bersifat imperative.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri atas capaian kinerja makro dan capaian kinerja dapat diukur dari beberapa indikator, yakni Indikator Makro, Indikator Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Selain indikator tersebut diatas, indikator sasaran visi juga dapat menggambarkan kondisi yang diinginkan dalam 5 tahun ke depan.

A. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR MAKRO

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Makro Tahun 2024-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	80.76	81.43	81.97	82.50	83.09	83.72	84.23
2	Tingkat Kemiskinan	%	5.19	4.54	4.32	4.17	3.99	3.84	3.63
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.87	4.75	4.64	4.52	4.43	4.33	4.26
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.53	5.02	5.79	7.12	7.36	7.65	6.22
5	PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rp Juta	64.21	72.02	82.14	92.57	103.84	116.29	129.51
6	PDRB Per-Kapita atas dasar Harga Konstan (ADHK) Perkapita	Rp Juta	35,64	36.96	38.62	40.87	43.37	46.16	48.49
7	Rasio Gini	Indeks	0.313	0.311	0.310	0.309	0.308	0.306	0.305
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	75.08	75.31	75.57	75.83	76.10	76.36	76.62
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.57	14.62	14.75	14.91	15.02	15.16	15.29
10	Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	10.89	11.16	11.30	11.38	11.48	11.62	11.79
11	Pengeluaran Perkapita	Rp. Ribu	20894.84	20900	20930	20950	20975	20980	21000
12	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	7615	6747	6500	6350	6140	5978	5725

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

B. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR SASARAN VISI

Visi merupakan satu gambaran kondisi atau keadaan yang diinginkan. Visi merupakan gabungan antara keinginan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi saat ini, sekaligus keinginan yang diharapkan untuk lebih baik di masa depan. Sasaran visi yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Indikator Sasaran Visi Tahun 2024-2030

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET					
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	64,21	72.02	82.14	92.57	103.84	116.29	129.51
		2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,82	4,95	5,06	5,17	5,31	5,43	5,55
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	3. Tingkat Kemiskinan (%)	5.19	4.54	4.32	4.17	3.99	3.84	3.63
		4. Rasio Gini (indeks)	0.313	0.311	0.310	0.309	0.308	0.306	0.305
		5. Pertumbuhan ekonomi (%)	4.53	5.02	5.79	7.12	7.36	7.65	6.22
3	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.0788	3.4000	3.4150	3.4400	3.4630	3.4824	3.5000
		7. Indeks Inovasi Daerah	54.62	54.85	55.15	55.25	55.50	55.95	56.05
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	8. Indeks Pembangunan Manusia	80.76	81.43	81.97	82.50	83.09	83.72	84.23
		9. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/Tenaga Kerja)	70.58	70.80	71.50	72.02	73.03	74.03	75.00
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	58.52	68.37	68.58	68.80	69.01	69.22	69.43

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

C. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang

terseleksi.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	80.76	81.43	81.97	82.50	83.09	83.72	84.23	
2	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	75.08	75.31	75.57	75.83	76.10	76.36	76.62	
3	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	16.40	13.70	12.45	11.20	9.95	8.70	7.45	
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	8.17	5.81	5.45	5.09	4.73	4.01	3.65	
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.57	14.62	14.75	14.91	15.02	15.16	15.29	
6	Tingkat Kemiskinan	%	5.19	4.54	4.32	4.17	3.99	3.84	3.63	
7	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65.6	66.8	68.0	69.10	70.10	71.10	72.10	
8	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.175	0.151	0.127	0.103	0.079	0.055	0.031	
9	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.53	5.02	5.79	7.12	7.36	7.65	6.22	
10	Indek Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3.89	3.93	3.96	4.00	4.04	4.09	4.14	
11	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap PDRB Provinsi	%	2.84	2.89	2.97	3.00	3.04	3.07	3.10	
12	PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rp Juta	64.21	72.02	82.14	92.57	103.84	116.29	129.51	
13	Rasio Gini	Indeks	0.313	0.311	0.310	0.309	0.308	0.306	0.305	
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.87	4.75	4.64	4.52	4.43	4.33	4.26	
15	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	33.33	33.34	33.35	33.36	33.37	33.38	33.39	
16	Nilai Realisasi Investasi	Milyar / Rp	658.63	660	665	670	675	680	685	
17	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	83.28	84.00	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00	
18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.75	3.75	3.84	3.93	4.03	4.12	4.21	
19	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	-	1.5	1.5	2	2	2.5	
20	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.50	4.51	4.52	4.53	4.54	4.55	4.56	
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88.37	88.60	88.80	88.85	88.90	88.95	89.00	
22	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	76.01	78.00	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00	
23	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
24	Rasio PAD terhadap APBD	Rasio	0.165	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	
25	Persentase Penurunan	%	28.49	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pelanggaran Trantibum									
26	IPK berbasis ABS SBK	Indeks	72.09	72.40	73.00	73.80	74.86	75.05	75.71	
27	Karya Budaya yang Ditetapkan	Unit	2.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00	
28	Cakupan Penguatan idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan *	%	57.65	58.35	58.70	58.90	59.10	59.30	60.00	
29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks	58.52	68.37	68.58	68.80	69.01	69.22	69.43	
30	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	15.90	19.68	23.54	27.42	30.90	34.79	38.48	
31	Indeks Infrastuktur	%	63.19	64.09	64.62	65.76	66.91	67.51	68.13	

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

D. TARGET PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (IKD)

Penentuan target penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode berikutnya.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah 2024-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	89.33	89.4	89.5	89.6	89.7	89.8	89.9	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	%	8.17	5.81	5.45	5.09	4.73	4.01	3.65	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/kapita	1138.5	1273	1407	1513	1652	1749	1885	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks	58.52	68.37	68.58	68.80	69.01	69.22	69.43	
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	19.48	20.48	22.31	24.19	25.08	26.16	30.00	
6	Rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman	%	21.92	24.74	23.57	24.39	25.21	27.68	30.14	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	15.90	19.68	23.54	27.42	30.90	34.79	38.48	
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	nA	33.13	39.68	46.05	52.26	58.37	64.82	
9	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	104.80	103.52	103.51	102.23	100.95	99.67	98.39	
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.37	1.35	1.38	1.40	1.41	1.42	1.43	
11	Rasio Penduduk	%	101.08	100.97	101.09	101.10	101.11	101.12	101.13	
12	Kepadatan Penduduk	Org/km²	1845	1848	1904	1933	1961	1989	2017	
13	Jumlah Penduduk	jiwa	146700	148597	150450	152270	154050	155830	157573	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.53	5.02	5.79	7.12	7.36	7.65	6.22	
2	Tingkat Kemiskinan	%	5.19	4.54	4.32	4.17	3.99	3.84	3.63	
3	PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB))	Rp Juta	64.21	72.02	82.14	92.57	103.84	116.29	129.51	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.87	4.75	4.64	4.52	4.43	4.33	4.26	
5	Rasio Gini	Indeks	0.313	0.311	0.310	0.309	0.308	0.306	0.305	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80.76	81.43	81.97	82.50	83.09	83.72	84.23	
7	Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75.08	75.31	75.57	75.83	76.10	76.36	76.62	
8	Indek Keluarga Sehat	Nilai	0.35	0.38	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	
9	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	16.40	13.70	12.45	11.20	9.95	8.70	7.45	
10	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.89	11.16	11.30	11.38	11.48	11.62	11.79	
11	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.57	14.62	14.75	14.91	15.02	15.16	15.29	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	72.15	72.20	72.25	72.29	72.33	72.38	72.43	
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	19.96	31.38	33.78	36.18	38.58	40.98	43.39	
14	IPK berbasis ABS SBK	Indeks	72.09	72.40	73.00	73.80	74.86	75.05	75.71	
15	Karya Budaya yang Ditetapkan	Unit	2.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00	
16	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	81.51	82.92	83.25	83.62	83.85	84.01	84.33	
17	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65.6	66.8	68.0	69.10	70.10	71.10	72.10	
18	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.175	0.151	0.127	0.103	0.079	0.055	0.031	
19	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	98.52	98.54	98.56	98.58	98.60	98.62	98.64	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka Ketergantungan	%	46	45	44	43	43	42	41	
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	4.82	4.95	5.06	5.17	5.31	5.43	5.55	
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3.47	3.6	3.62	3.64	3.66	3.68	3.98	
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi	%	1.938	3.595	3.585	3.575	3.555	3.545	3.963	
5	Rasio Kewirausahaan	%	7.52	9.3	9.34	9.38	9.41	9.45	9.78	
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	60.51	63.89	64.00	64.20	64.60	64.90	65.21	
7	Indeks Inovasi Daerah	Skor	54.62	54.85	55.15	55.25	55.50	55.95	56.05	
8	Ekspor Barang dan Jasa	(% PDRB)	19.65	19.70	19.75	19.80	19.85	19.90	20.00	
9	Indeks Infrastruktur	%	63.19	64.09	64.62	65.76	66.91	67.51	68.13	
10	Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	%	81.04	82.73	85.37	88.01	90.65	94.93	95.93	
11	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.25	0.35	0.37	0.39	0.41	0.43	0.45	
12	Tingkat Inflasi	%	-	-	-	-	-	-	-	
13	Pembentukan modal tetap bruto	% PDRB	25.48	24.86	24.52	24.19	23.85	23.51	23.18	
14	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	5.98	6.00	6.95	9.65	12.35	15.05	17.75	
15	Nilai Transaksi Saham Per kapita	Rupiah	3,800,000	3,891,998	4,562,126	5,332,255	5,332,254.8	6,102,383.2	7,642,640	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16	Total Kredit/PDRB	%	nA	24.40	25.73	27.07	28.40	29.74	31.08	
17	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	6.00	6.05	6.08	6.18	6.41	6.63	6.86	
18	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
I	Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar									
1	Urusan Pendidikan									
1.1	Rata – rata Lama Sekolah	Tahun	10.89	11.16	11.30	11.38	11.48	11.62	11.79	
1.2	Angka Partisipasi Kasar									
1.2.1	APK PAUD	%	61.09	69.00	71.00	72	73	74	75	
1.2.2	APK SD/MI/Paket A	%	107.82	108	109	110	111	112	113	
1.2.3	APK SMP/MTs/Paket B	%	97.12	98	100	100	100	100	100	
1.3	Angka Partisipasi Murni									
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A)	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80.44	82	84	86	88	90	92	
1.3.3	Cakupan Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	57.65	58.35	58.70	58.90	59.10	59.30	60.00	
1.3.4	Persentase satuan pendidikan (SD/SMP) yang terakreditasi A	%	76	76.24	76.5	77	77.5	78	78.5	
1.4	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi	%	87.50	87.50	87.90	88.20	88.80	89.25	89.50	
1.5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	%	84.4	84.4	85.65	86.5	87.75	89	90.25	
1.6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	21.65	21.70	21.90	22.00	22.20	22.40	22.50	
2	Urusan Kesehatan									
2.1	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	2	2	2	2	2	1	1	
2.2	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage))	%	70.14	80.00	84.00	88.00	92.00	96.00	100.00	
2.3	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	88.90	94.00	94.00	95.00	95.00	96.00	96.00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.5	Indek Keluarga Sehat	Nilai	0.35	0.38	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	
2.6	Prevalensi Stunting berdasarkan E-PPGBM	%	2.16	2.12	2.08	2.04	2.00	1.94	1.90	
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
3.1	Kapasitas Air Baku	(m3/detik	5.21	5.21	5.46	6.60	6.61	6.62	6.62	
3.2	Persentase Infrastruktur daerah yang dibangun sesuai dengan rencana tata ruang	%	79.55	79.61	80.12	80.77	81.19	81.60	81.88	
3.3	Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan tata ruang	Indeks	82.71	86.23	87.38	88.52	89.60	90.61	91.55	
3.4	Akses Rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan	%	89.97	90.41	90.61	90.81	91.52	92.23	92.94	
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman									
4.1	Persentase rumah layak huni	%	97.41	97.94	98.04	98.48	98.91	99.34	99.76	
4.2	Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	%	81.04	82.73	85.37	88.01	90.65	94.93	95.93	
4.3	Persentase PSU Perumahan yang dibangun pengembang yang telah dikelola oleh Pemerintah Kota	%	21.84	24.71	27.59	30.46	33.33	36.21	39.08	
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
5.1	Persentase penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.2	Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk)	%	3.06	3.84	3.83	3.82	3.81	3.80	3.80	
5.3	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	%	28.49	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
5.4	Pesentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Penanggulangan Bencana Daerah									
6.1	Persentase Warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Urusan Sosial									
7.1	Tingkat Kemiskinan	%	5.19	4.54	4.32	4.17	3.99	3.84	3.63	
7.2	Persentase PPKS yang terlayani	%	100	100	86	87	88	89	90	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7.3	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	-	-	86	87	88	89	90	
II	Layanan Urusan Wajib Terkait Non Pelayanan Dasar									
1	Urusan Ketenagakerjaan									
1.1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/ Tenaga Kerja	70.58	70.80	71.50	72.02	73.30	74.03	75.00	
1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70.53	71	71.02	71.04	71.06	71.08	71.1	
1.3	Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	53.73	53.81	54.38	55.58	56.78	57.98	61.66	
1.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	60.51	63.89	64.00	64.20	64.60	64.90	65.21	
1.5	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4.87	4.75	4.64	4.52	4.43	4.33	4.26	
1.6	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	95.13	95.25	95.36	95.48	95.57	95.67	95.74	
1.7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	76.17	79.09	79.67	80.85	80.82	81.40	81.98	
1.8	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	19.96	31.38	33.78	36.18	38.58	40.98	43.39	
1.9	Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau Dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	3	5	15	25	35	37	40	
1.10	Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di Tingkat Kab/Kota	Unit layanan	1	1	1	1	1	1	1	
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.175	0.151	0.127	0.103	0.079	0.055	0.031	
2.2	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	81.51	82.92	83.25	83.62	83.85	84.01	84.33	
2.3	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	66.67	65.02	65.206	65.392	65.578	65.764	65.95	
2.4	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Nilai	98.52	98.54	98.56	98.58	98.60	98.62	98.64	
2.5	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Nindya	Utama	Utama	Utama	Utama	Mentor	Mentor	
2.6	Tingkat Kategori Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	
2.7	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	6.69	6.72	6.84	6.86	7.25	7.50	7.75	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.8	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Urusan Pangan									
3.1	Ketersediaan pangan utama	Ton	19.780	19.785	19.790	19.795	19.800	19.805	19.810	
3.2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	8.17	5.81	5.45	5.09	4.73	4.01	3.65	
3.3	Skor PPH Konsumsi	skor	87.7	87.8	87.9	88.00	88.1	88.2	88.3	
3.4	Tingkat Keamanan Pangan	Level	sedang	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	
3.5	Stabilisasi harga									
	Beras	%	1.63	≤10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤10	
	Cabe	%	20.69	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	
	Bawang	%	13.40	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	
3.6	Indek Ketahanan Pangan	indeks	89.33	86.74	86.80	86.90	87.00	87.10	87.20	
4	Urusan Pertanahan									
4.1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	%	38.47	40.79	56.88	64.93	72.98	74.60	76.22	
5	Urusan Lingkungan Hidup									
5.1	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	15.90	19.68	23.54	27.42	30.90	34.79	38.48	
5.2	Persentase RTH	%	14.87	14.90	14.91	14.93	14.95	14.97	15.00	
5.3	Indeks Kualitas Air	Indeks	45.26	66.95	67.15	67.35	67.55	67.75	67.95	
5.4	Indeks Kualitas udara	Indeks	87.59	78.15	78.45	78.75	79.05	79.35	79.65	
5.5	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	27.50	52.73	52.80	52.87	52.94	53.01	53.10	
5.6	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	96.4	96.45	96.65	96.80	97.00	97.40	97.65	
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
6.1	Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	94.08	94.10	94.10	94.20	94.30	94.40	94.50	
6.2	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	74.05	75	78	81	84	88	90	
6.3	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	78	80	82	83	85	90	90	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.4	Persentase peningkatan penggunaan data kependudukan dalam pelayanan publik	%	90	91	92	93	94	95	95	
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat									
7.1	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
8.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65.6	66.8	68.0	69.10	70.10	71.10	72.10	
8.2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun)	Rata-rata anak per Wanita	2.32	2.30	2.29	2.28	2.26	2.25	2.24	
8.3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	76.6	81.8	85.0	86.9	88.1	88.9	89.3	
8.4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	84.5	86.1	87.5	88.8	89.9	91.0	91.9	
8.5	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	16.1	15.0	14.1	13.3	12.6	11.9	11.4	
8.6	Angka Kelahiran Rema Umur 15-19 tahun/Age Spesific Fertility Rate (ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	8.5	6.7	5.5	4.6	4.0	3.5	3.2	
8.7	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	58.5	59.3	60.0	60.8	61.5	62.2	62.8	
8.8	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	88.6	89.6	90.4	91.3	92.0	92.7	93.3	
8.9	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Perhubungan									
9.1	Nilai survey IKM Pelayanan transportasi	angka	87	89	90	91	92	93	94	
9.2	Persentase ketersediaan Infrastruktur Perhubungan yang ramah Lingkungan	%	84	86	86	87	88	89	90	
10	Urusan Komunikasi dan Informatika									
10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.75	3.75	3.84	3.93	4.03	4.12	4.21	
10.2	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	44.39	52	54	56	57	58	59	
10.3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	76.4	76.5	78	80	84	87	90	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10.4	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	-	1.5	1.5	2	2	2.5	
11	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah									
11.1	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	33.33	33.34	33.35	33.36	33.37	33.38	33.39	
11.2	Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian	%	1.88	4.69	4.71	4.73	4.75	4.77	13.636	
11.3	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	1.59	2.365	2.407	2.449	2.491	2.533	2.820	
11.4	Rasio Kewirausahaan	%	7.52	9.3	9.34	9.38	9.41	9.45	9.78	
12	Urusan Penanaman Modal									
12.1	Nilai Realisasi Investasi	Milyar/Ru piah	658.63	660	665	670	675	680	685	
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga									
13.1	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional	Org	51	51	70	70	70	70	70	
13.2	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	%	0	14	15	16	17	18	19	
14	Urusan Statistik									
14.1	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	2.69	2.70	2.71	2.72	2.73	2.74	2.75	
15	Urusan Persandian									
15.1	Indeks Keamanan Informasi	%	46.2	46.2	50	53	58	60	62.5	
16	Urusan Kebudayaan									
16.1	Karya Budaya yang Ditetapkan	unit	2.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00	
16.2	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	10	10	10	10	10	10	10	
16.3	Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai nilai budaya	%	100	50	100	100	100	100	100	
16.4	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	unit	4	4	4	4	4	4	4	
17	Urusan Perpustakaan									
17.1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	72.15	72.20	72.25	72.29	72.33	72.38	72.43	
17.2	Rasio Kunjungan Perpustakaan Perkapita	Rasio	0.066	0.0664	0.067	0.068	0.069	0.07	0.071	
18	Urusan Kearsipan									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
18.1	Indek Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	73.81	73.9	73.94	73.99	74.08	74.09	74.15	
18.2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan sesuai standar	%	32.25	35.5	41.25	45.55	51.2	54.75	59.4	
II	Layanan Urusan Pilihan									
1	Urusan Kelautan dan Perikanan									
1.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya)	Ton	576.81	560	565	570	575	580	585	
2	Urusan Pariwisata									
2.1	Jumlah Tamu wisatawan mancanegara	ribu orang	0.014	0.02	0.025	0.03	0.035	0.04	2.3	
2.2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	orang	0	3	3	4	5	6	7	
2.3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	10	15	21	30	42	57	75	
2.4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi	%	1.938	3.595	3.585	3.575	3.555	3.545	3.963	
2.5	Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan	%	4,14	5,00	5,20	5,25	5,30	5,35	5,40	
2.6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	%	3.49	3.6	3.62	3.64	3.66	3.68	3.98	
3	Urusan Pertanian									
3.1	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (ADHB)	%	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	
3.2	Produksi padi	Ton	41609.46	41250	39604	39896	39992	40479	40770	
3.3	Populasi sapi	Ekor	2951	3119	3154	3189	3259	3294	3329	
3.4	Indeks Pertanaman	Indeks	2.66	2,64	2.69	2.74	2.79	2.83	2.86	
3.5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Juta/Org	30.97	35.27	35.52	35.68	35.83	35.98	36.03	
4	Urusan Perdagangan									
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	25.02	25.02	25.03	25.04	25.05	25.06	25.07	
4.2	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	19.65	19.70	19.75	19.80	19.85	19.90	20.00	
4.3	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4.30	4.31	4.32	4.33	4.34	4.35	4.36	
5	Urusan Perindustrian									
5.1	Persentase peningkatan nilai produksi	%	5.99	6	6.1	6.3	6.5	6.7	6.9	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	4.82	4.95	5.06	5.17	5.31	5.43	5.55	
5.3	Proporsi jumlah IKM	%	1.85	3.43	3.51	3.59	3.66	3.74	3.82	
III	Fungsi Pendukung									
1	Kesekretariatan Daerah									
1.1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.50	4.51	4.52	4.53	4.54	4.55	4.56	
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83.28	84.00	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00	
1.3	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	87.00	87.20	87.40	87.60	87.80	87.90	88.00	
1.4	Indeks BerAKHLAK	Nilai	72.94	73.00	73.50	74.00	74.50	75.00	75.50	
1.5	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	5.23	5.26	5.27	5.28	5.29	5.31	5.31	
1.6	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	50.49	65	66	67	68	69	70	
1.7	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,32	0,39	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	
1.8	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3.0788	3.4000	3.4150	3.4400	3.4630	3.4824	3.5000	
1.9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88.37	88.60	88.80	88.85	88.90	88.95	89.00	
1.10	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	76.01	78.00	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00	
1.11	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.13	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	91.58	91.58	91.58	91.58	91.58	91.58	91.58	
1.14	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	39.09	39.09	40.03	40.05	40.07	40.09	41.01	
1.15	ROA BUMD	%	6.17	6.18	6.19	6.20	6.20	6.21	6.22	
2	Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah									
2.1	Nilai IKM DPRD	Nilai	84.26	85	85	85	86	86	86	
2.2	Persentase Ranperda Yang Ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
IV	Fungsi Penunjang									
1	Perencanaan									
1.1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	-	90.00	90.50	91.00	91.50	92.00	92.50	
1.2	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	25.50	26.00	26.01	26.02	26.03	26.04	26.05	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Keuangan									
2.1	IPKD	scor	71.75	72	72,75	73	73,5	74	74,5	
2.2	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.3	Persentase belanja pegawai terhadap belanja daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	40.76	46.55	35	30	30	30	30	
2.4	Persentase penurunan SILPA	%	11.49	11	10	10	9	9	9	
2.5	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.6	Persentase penambahan nilai aset tetap	%	0.30	2	3	4	5	6	7	
2.7	Persentase penerimaan PAD terhadap total penerimaan pendapatan	%	18.19	19	20	21	22	23	23	
2.8	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Kepegawaian									
3.1	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks	75.60	75.70	75.80	75.90	76.00	76.10	76.20	
3.2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78.22	79	80	80.50	81.00	81.50	82.00	
4	Pendidikan dan Pelatihan									
4.1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	26.58	27.00	28.00	29.00	30.00	31.00	32.00	
5	Penelitian dan Pengembangan									
5.1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	54.62	54.85	55.15	55.25	55.50	55.95	56.05	
5.2	Persentase kebijakan berbasis bukti	%	-	86	87	88	90	92	93	
6	Inspektorat									
6.1	Persentase Pemenuhan Indikator MSCP	%	-	80	82	84	86	88	90	
6.2	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	4	
6.3	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	Nilai	75.51	78.50	78.88	79.18	79.48	79.78	80.00	
6.4	Nilai Evaluasi Akuntabel Kinerja Internal	Nilai		18.20	18.22	18.25	18.27	18.30	18.32	
7	Kewilayahan									
7.1	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif (LPM, PKK, RT/RW, Posyandu, karang taruna) yg aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7.2	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.1	Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif	%	91.78	91.95	92.58	93.21	93.84	94.47	95.10	
8.2	Persentase penanganan konflik sosial yg terjadi di tengah masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.3	Indeks Harmoni Indonesia	indeks	0	6	6	6	7	7	8	

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025

E. TARGET PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci 2024-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar									
1	Pendidikan									
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	98.00	98.00	98.00	98.30	98.90	99.00	99.30	
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	74.55	74.55	75.55	76.55	77.55	78.55	79.55	
2	Kesehatan									
2.1	Rasio Daya tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	%	0.24	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.3	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	76.15	86	90	92	94	96	100	
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	94.50	75.29	75.33	75.48	75.55	75.70	75.99	
3.2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	89.97	90.41	90.61	90.81	91.52	92.23	92.94	
3.3	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	34.79	35.24	35.68	36.11	36.54	36.96	37.38	
3.4	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	85.82	82.00	82.80	83.60	84.40	85.20	86.00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.5	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0.64	0.73	0.78	0.82	0.87	0.92	0.95	
3.6	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	87.00	88.00	88.00	89.00	89.00	90.00	
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman									
4.1	Persediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.2	Persentase Kawasan pemukiman Kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani.	%	-	-	-	-	30	60	100	
4.3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni	%	2.58	2.38	2.19	2.05	1.81	1.62	1.43	
4.4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	15.90	15.98	16.06	16.14	16.23	16.31	16.39	
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
5.1	Persentase penyelesaian gangguanTrantibum	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.7	Waktu tanggap (response time) pananganan kebakaran	mnt	15	15	15	15	15	15	15	
6	Urusan Sosial									
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
II	Layanan Urusan Wajib Terkait Non Pelayanan Dasar									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Urusan Ketenagakerjaan									
1.1	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	3.87	3.87	3.87	3.88	3.88	3.89	3.90	
1.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/Tenaga Kerja	70.58	70.80	71.50	72.02	73.30	74.03	75.00	
1.4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	49.21	50.00	50.79	51.59	52.38	53.17	53.97	
1.5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	16.33	16.53	16.73	16.93	17.13	17.33	17.53	
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	6.69	6.72	6.84	6.86	7.25	7.50	7.75	
2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0.02	0.019	0.016	0.014	0.012	0.011	0.011	
3	Urusan Pangan									
3.1	Persentase Cadangan Pangan	%	145.66	145.66	145.66	145.66	145.66	145.66	145.66	
4	Urusan Pertanahan									
4.1	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.3	Tersedianya pembangunan lokasi dalam rangka penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0	0	100	100	100	100	100	
5	Urusan Lingkungan Hidup									
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten/Kota	Indeks	58.52	68.37	68.58	68.80	69.01	69.22	69.43	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	97.00	98.00	98,50	98.70	98,80	99,00	100	
5.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	74.00	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
6.1	Perekaman KTP elektronik	%	99.54	99.55	99.56	99.57	99.58	99.59	99.60	
6.2	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	62	63	64	65	66	67	68	
6.3	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	99.11	99.15	99.20	99.25	99.30	99.35	99.40	
6.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
7.1	TFR (Angka Kelahiran Tortal)	%	2.32	2.30	2.29	2.28	2.26	2.25	2.24	
7.2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	63.5	63.7	63.8	63.9	64.0	64.10	64.15	
7.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11.40	11.30	11.20	11.15	11.10	11.05	11.00	
8	Perhubungan									
8.1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	%	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.40	0.40	
8.2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Kota	%	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	
9	Urusan Komunikasi dan Informatika									
9.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	93.43	93.43	94	95	96	97	98	
9.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	85	86	87	88	89	90	
10	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah									
10.1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	36.36	25.66	30.09	34.51	38.94	43.36	47.79	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10.2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	62.74	63.10	65.20	67.25	68.30	69.25	70.30	
11	Urusan Penanaman Modal									
11.1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	%	33.37	33.5	34	34.5	35	35.5	36	
12	Urusan Kepemudaan dan Olahraga									
12.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	17.08	17.35	17.50	17.50	17.50	17.80	18	
12.2	peningkatan prestasi olahraga	%	69	69	69	69	69	69	69	
12.3	Tingkat partisipasi pemuda dalam dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.6	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	
13	Urusan Statistik									
13.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
13.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persandian									
14.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	85	46.2	50	53	58	60	62.5	
15	Urusan Kebudayaan									
15.1	Terlestarikannya cagar Budaya	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Urusan Perpustakaan									
16.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	66.18	66.20	66.30	66.40	66.80	67.20	67.50	
16.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	72.15	72.20	72.25	72.29	72.33	72.38	72.43	
17	Urusan Kearsipan									
17.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	%	70.04	70.15	70.30	70.50	70.75	71.05	71.30	
17.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	-	-	-	30.00	35.00	40.00	45.00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
III	Layanan Urusan Pilihan									
1	Urusan Kelautan dan Perikanan									
1.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya)	Ton	576.81	560	565	570	575	580	585	
2	Urusan Pariwisata									
2.1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	23.81	25	30	35	40	45	50	
2.2	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	%	4.14	5	5.5	6	6.5	7	7.5	
2.3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	78.91	80.00	80.25	80.50	80.75	81	81.25	
2.4	Tingkat hunian akomodasi	%	22.82	11	13	15	17	20	25	
2.5	Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD	%	0.56	0.80	1	1.5	2	2.5	3	
3	Urusan Pertanian									
3.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	5.60	5.60	5.61	5.62	5.63	5.64	5.65	
3.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	9	9	9	9	9	9	9	
4	Urusan Perdagangan									
4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	51.72	57.47	63.22	68.97	74.71	80	86	
4.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	55.82	55.85	55.90	55.95	56.00	56.05	56.10	
4.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan erlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	50.48	51.00	52.00	53.00	54.00	55.00	60.00	
5	Urusan Perindustrian									
5.1	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	%	1.87	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	
5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	67.67	69	70	71	72	73	74	
5.3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	12.99	13.5	13.7	13.9	14.5	15	15.5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.4	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	0	0	0	30	40	50	60	
5.5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat Dan Terkini	%	0	60.00	61.67	66.67	71.67	72.33	73.33	
	Fungsi Pendukung									
1	Kesekretariatan Daerah									
1.1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	89.24	89.30	89.40	89.50	89.60	89.70	89.80	
1.2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	17.31	17.35	17.40	17.45	17.50	17.55	17.60	
1.3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	-7.08	6	7	8	9	10	11	
	Fungsi Penunjang									
1	Keuangan									
1.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	28.23	31.58	30	30	30	30	30	
1.2	Rasio PAD (thdp PAD non migas)	%	18.40	12.50	12	12	12	12	12	
1.3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	85.87	82.92	80	80	80	80	80	
1.4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	7.36	-9.30	-9.00	-9.00	-9.00	-9.00	-9.00	
1.5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	6.51	669.76	600	600	600	600	600	
1.6	Manajemen Aset	Kategori	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
1.7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	11.49	10.63	10	10	10	10	10	
2	Kepegawaian									
2.1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	81.02	81.05	81.10	81.15	81.20	81.25	81.30	
2.2	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	29.29	29.35	29.40	29.45	29.50	30.00	30.25	
2.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	27.39	27.50	27.55	27.60	27.65	27.70	27.75	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Inspektorat									
3.1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3	4	
3.2	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	3	3	3	4	

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh, 2025



BAB V

PENUTUP



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang terhitung dari pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh. Dokumen ini memuat berbagai program dan isu strategis yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun, disertai dengan metode pencapaian dan strategi pelaksanaannya untuk memenuhi sasaran dengan terpadu dan searah dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Payakumbuh. Untuk menjamin pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, maka diperlukan penjabaran secara teknis dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Sedangkan untuk penjabaran tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan teknisnya pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) secara sinergi dan berkesinambungan.

1. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan krusial dalam proses pembangunan daerah. Pengendalian berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta target yang telah ditetapkan. Sementara itu, evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana program atau kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai keberhasilan atau mengalami hambatan, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di masa mendatang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sebagai perangkat daerah yang mampu urusan perencanaan pembangunan daerah. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dalam kapasitasnya, Bappeda berperan sebagai koordinator lintas perangkat daerah untuk menjamin keselarasan antara perencanaan strategis dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Mempedomani Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah. Disebutkan juga bahwa pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara efisien dan efektif.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah juga bertujuan untuk mewujudkan konsistensi untuk kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional, konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah, konsistensi antara RKPD dan RPJMD dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pada aspek pengendalian, Bappeda bertugas memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan oleh Perangkat daerah sesuai dengan target dan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin terhadap capaian target kinerja secara triwulanan, semesteran, maupun tahunan, serta melalui analisis realisasi fisik dan keuangan. Bappeda juga berperan dalam memberikan peringatan dini apabila ditemukan deviasi atau penyimpangan dari rencana awal, serta mengarahkan kebijakan agar tetap fokus pada prioritas pembangunan daerah.

Pada fungsi evaluasi, Bappeda menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan RPJMD berdasarkan indikator kinerja daerah, baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD). Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan. Selain itu, evaluasi juga menjadi acuan untuk penyesuaian kebijakan atau perubahan RPJMD, Perubahan RPJMD tidak hanya didasarkan atas hasil evaluasi namun dapat dilakukan perubahan apabila ada perubahan signifikan yang disebabkan bencana atau kebijakan nasional baru.

2. MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program/kegiatan prioritas yang dijalankan oleh lintas instansi dan antar jenjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat pelaksanaan program/kegiatan prioritas selalu bersifat lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program/kegiatan prioritas sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara kolaboratif, sistematis, dan terintegrasi.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif untuk mengarahkan dan mengendalikan kementerian/lembaga/daerah/badan usaha/badan lainnya sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional diwujudkan melalui pembentukan Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dan

penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Sistem Pengelolaan Risiko merupakan upaya untuk membangun budaya risiko yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan untuk memperkuat serta menunjang efektifitas penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah daerah.

Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis perangkat daerah dan tujuan yang melekat pada pelaksanaan kegiatannya. Tidak hanya mempersiapkan ketidakberhasilan pencapaian target, pengelolaan risiko juga diperuntukkan untuk pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan pembangunan. Pengelolaan risiko ini dilaksanakan melalui:

1. Pengembangan budaya sadar risiko;
2. Pembentukan struktur pengelolaan risiko;
3. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko; dan
4. Pengendalian risiko kecurangan.

Guna mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, maka Wali Kota membentuk komite pengelolaan risiko yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah. Proses pengelolaan risiko ini nantinya dikenal dengan Unit Pemilik Risiko (UPR) yang berjenjang dari UPR tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, Eselon III sampai dengan Eselon IV. Pengelolaan Risiko dalam prosesnya merupakan sesuatu yang strategis yang melekat pada proses perencanaan pembangunan daerah. Karena itu untuk Perencanaan Pembangunan daerah Strategis 5 tahunan, pada dokumen RPJMD disusun daftar risiko strategis di tingkat tujuan strategis yang nantinya akan didukung dengan dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 (lima) tahunan.

3. TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah merupakan upaya strategis untuk mewujudkan data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pemerintah maupun masyarakat. Di tingkat daerah, Satu Data Indonesia menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan berbasis data, perencanaan pembangunan, serta pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah dan walidata, memiliki tanggung jawab penting dalam menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

Secara hukum, implementasi Satu Data Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menghasilkan dan menyampaikan data sesuai dengan prinsip satu data, yakni: standar data, metadata, interoperabilitas

data, dan menggunakan kode referensi serta data induk yang terstandar. Dijelaskan juga bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan penyelenggaraan satu data tingkat kabupaten/ kota, Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembina Data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, walidata pendukung dan produsen data tingkat daerah dan Pembina Data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah serta Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Pembina Data bertugas memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan, pengumpulan data dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI di Kota Payakumbuh diampu oleh Badan Pusat Statistik (BPS), walidata bertugas memeriksa kesesuaian data dari produsen data, menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI, dan membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika). Walidata Pendukung bertugas membantu walidata yang berada di Perangkat Daerah (Produsen Data) serta merupakan salah satu unit kerja yang mengkoordinir data Perangkat Daerah (melekat pada subbag program dan perencanaan Perangkat Daerah) dan Produsen data bertugas untuk memberikan masukan kepada pembina data, menghasilkan data sesuai Prinsip SDI, menyampaikan data dan metadata kepada walidata tingkat Daerah (Perangkat Daerah /bidang-bidang di Perangkat Daerah).

Regulasi pendukung lainnya di samping Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, adalah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mengamanatkan pemanfaatan data dan informasi secara sistematis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. SIPD menjadi salah satu *platform* penguatan integrasi data antar sektor dan lintas perangkat daerah. Pemerintah daerah juga perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah atau Surat Keputusan sebagai payung hukum teknis untuk membentuk Forum Satu Data Daerah, menetapkan Walidata, dan menyusun rencana aksi implementasi SDI. Melalui tata kelola yang baik, Satu Data Indonesia di tingkat daerah mendorong terciptanya ekosistem data yang mendukung keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mempercepat transformasi digital pemerintahan. Oleh karena itu, komitmen kepala daerah, kesiapan kelembagaan, SDM, serta infrastruktur data sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan SDI secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Badan perencanaan pembangunan daerah membentuk Forum Data Indonesia Tingkat Kota Payakumbuh yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Payakumbuh. Dimana Bappeda sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat kota Payakumbuh yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan dan penerbitan regulasi Satu Data Indonesia tingkat daerah.

Konteks implementasi kebijakan SDI, data prioritas merupakan komponen penting yang harus dikelola secara konsisten, akurat, dan terpadu. Data prioritas adalah jenis data yang dianggap strategis dan krusial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dalam peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 144 disebutkan bahwa data dan informasi pembangunan terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Didalam data prioritas juga dijelaskan tentang indikator kinerja makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, indikator kinerja kunci dan indikator kinerja program yang digunakan untuk mengevaluasi capaian pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan.

Pemanfaatan sistem pengendalian yang terstruktur dan evaluasi yang berbasis kinerja membuat Pemerintah Kota Payakumbuh dapat secara berkala menilai konsistensi, efektivitas, serta efisiensi pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi yang komprehensif menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan tahunan dan perbaikan pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat.

Pengendalian dan evaluasi juga menjadi refleksi terhadap komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Melalui proses ini, arah pembangunan daerah diharapkan dapat senantiasa adaptif terhadap dinamika dan tantangan yang berkembang, sehingga visi pembangunan Kota Payakumbuh yang maju, sejahtera, dan berdaya saing dapat dicapai secara berkelanjutan.

Pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan membutuhkan peran aktif seluruh stakeholder dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan Kota Payakumbuh dalam membangun kota dan masyarakatnya akan tercermin pada SDM masyarakat yang berkualitas, iklim ekonomi kota yang kompetitif, tata kelola pemerintahan yang profesional, nuansa hidup yang beriman dan berbudaya yang terwujud dan sarana perkotaan yang humanis dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Payakumbuh sebagai bagian dari proses pencapaian visi daerah untuk “Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif”.

WALI KOTA PAYAKUMBUH

ZULMAETA

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 METADATA INDIKATOR KINERJA

I. METADATA INDIKATOR KINERJA MAKRO

A. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ Keterangan : $I_{kesehatan}$ =Indeks kesehatan $I_{pendidikan}$ =Indeks pendidikan $I_{pengeluaran}$ =Indeks pengeluaran dimana $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$ AHH = Angka Harapan Hidup $I_{pendidikan} = \left[\frac{\frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} + \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}}{2} \right]$ RLS = Rata-rata lama sekolah HLS = Harapan lama sekolah $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(PPP) - \ln(PPP_{min})}{\ln(PPP_{max}) - \ln(PPP_{min})}$ PPP = Paritas daya beli
Interpretasi	IPM dihitung menggunakan rata-rata ukur (geometrik) dalam melihat capaian pembangunan manusia di suatu wilayah, dimana IPM ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu : - Kelompok “sangat tinggi” $IPM \geq 80$ - Kelompok “tinggi” $70 \leq IPM < 80$ - Kelompok “sedang” $60 \leq IPM < 70$ - Kelompok “rendah” $IPM < 60$
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Setiap tahun

B. TINGKAT KEMISKINAN (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Keterangan : α = 0 z = Garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Maret dan September / tahun

C. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Ket : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi

	tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

D. PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa selama periode tertentu. Agar paling akurat, pengukuran tersebut harus menghilangkan pengaruh inflasi
Rumus Perhitungan	$G_t = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_t} \times 100\%$ Ket : G_t = Pertumbuhan ekonomi periode t $PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto periode t $PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto periode sebelumnya
Interpretasi	Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menjelaskan tentang kemajuan ekonomi, perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi serta perubahan fundamental perekonomian suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

E. PDRB PER KAPITA ADHB (Rp. Juta)

Nama Indikator	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)
Definisi	PDRB per Kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun
Rumus Perhitungan	$\text{PDRB per Kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{\text{populasi}}$ Keterangan : $PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Populasi = Jumlah penduduk regional t = Periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak

	mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang kesetaraan ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

F. PDRB PER KAPITA ADHK (Rp. Juta)

Nama Indikator	PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta)
Definisi	PDRB per Kapita ADHK menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar perhitungan yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh inflasi terhadap nilai PDRB. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun
Rumus Perhitungan	$\text{PDRB per Kapita} = \frac{\text{PDRB}_{ADHK}}{\text{populasi}}$ Keterangan : PDRB_{ADHK} = PDRB Atas Dasar Harga Konstan Populasi = Jumlah penduduk regional t = Periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk ditambah lagi dengan penetapan harga pada tahun tertentu akan menghilangkan pengaruh inflasi terhadap nilai PDRB. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang kesetaraan ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

G. RASIO GINI (INDEKS)

Nama Indikator	Rasio Gini (Indeks)
Definisi	Rasio Gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>lorenz</i> dan aspek matematis
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ dimana : p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran per kapita i

	n = Jumlah observasi
Interpretasi	Angka Rasio Gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari Rasio Gini adalah sebagai berikut: A. Nilai Rasio Gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang B. Nilai Rasio Gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang C. Nilai Rasio Gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, Rasio Gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio Gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>lorenz</i>. Semakin jauh jarak kurva <i>lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Maret dan September / tahun

H. USIA HARAPAN HIDUP (TAHUN)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau <i>Mortpack</i>
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/ pendekatan
Frekuensi	SP: 10 tahunan SUPAS: 10 tahunan

I. HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Perkiraan berapa lama seseorang akan bersekolah dalam satuan tahun, dihitung dari usia tertentu di masa depan
Rumus Perhitungan	$HLS = \Sigma (\text{Proporsi Siswa pada Usia } x) * (\text{Lama Waktu Belajar pada Jenjang } x)$
Interpretasi	Peningkatan HLS menunjukkan adanya peningkatan partisipasi sekolah dan potensi peningkatan kualitas pendidikan, karena lebih banyak anak yang memiliki harapan untuk menyelesaikan pendidikan lebih lama
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

J. RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk, biasanya usia 15 tahun ke atas, untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah mereka jalani.
Rumus Perhitungan	$RLS = (\Sigma xi) / n$ Dimana: RLS: adalah Rata-rata Lama Sekolah Σxi: adalah jumlah total tahun pendidikan yang ditempuh oleh semua individu dalam kelompok usia tertentu n: adalah jumlah total individu dalam kelompok usia tersebut
Interpretasi	Angka ini juga dapat menjadi indikator kualitas pendidikan secara umum. Peningkatan rata-rata lama sekolah dapat menunjukkan bahwa sistem pendidikan berhasil menarik dan mempertahankan siswa hingga jenjang yang lebih tinggi
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

K. PENGELUARAN PER KAPITA (Rp. RIBU)

Nama Indikator	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)
Definisi	Pendapatan per kapita merupakan indikator yang digunakan secara luas untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara

Rumus Perhitungan	Pendapatan Per Kapita = $\frac{\text{Pendapatan Nasional}}{\text{Jumlah Penduduk}}$
Interpretasi	Pendapatan per kapita juga disebut sebagai nilai perbandingan pendapatan rakyat dari besarnya pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi nilai pendapatan per kapita suatu negara, berarti masyarakat tersebut semakin makmur. Sebaliknya, jika nilai pendapatan per kapita rendah, maka penduduk di negara tersebut masih jauh dari kata sejahtera
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

L. JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)

Nama Indikator	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Definisi	Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$GK > y - GK$ Keterangan : GK = Garis kemiskinan y = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan Akumulasi jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan berada dibawah garis kemiskinan
Interpretasi	Penduduk miskin merupakan jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Maret dan September / tahun

II. METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN VISI

A. PDRB PER KAPITA ADHB (Rp Juta)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.E)

B. KONTRIBUSI PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN (KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB) (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi PDRB yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi} = \frac{\text{PDRB}_{\text{industri pengolahan}}}{\text{PDRB}_{\text{Kota}}} \times 100\%$

Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Kota, <i>ceteris paribus</i>
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

C. TINGKAT KEMISKINAN (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.B)

D. RASIO GINI (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.G)

E. PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.D)

F. NILAI EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai)
Definisi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan indikator dan kriteria yang ditetapkan dalam sistem evaluasi kinerja.
Rumus Perhitungan	Nilai Kinerja Pemerintahan Daerah = $\frac{\sum(\text{Skor Indikator} \times \text{Bobot})}{\text{Total Bobot}}$
Interpretasi	Skor tinggi berarti pelaksanaan pemerintahan berjalan baik sesuai aturan dan berdampak nyata bagi masyarakat
Sumber Data	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Frekuensi	Tahunan

G. INDEKS INOVASI DAERAH (INDEKS)

Nama Indikator	Indek Inovasi Daerah (Indeks)
Definisi	Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi ini didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya

Rumus Perhitungan	Indeks bersumber dari balitbang Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya
Interpretasi	Pengukuran indeks sendiri akan menggunakan 36 indikator. Setelah dilakukan pengukuran, maka akan menghasilkan ranking Indeks Inovasi Daerah di tiap klaster provinsi, kabupaten, kota, daerah tertinggal, daerah perbatasan, Papua dan Papua Barat
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

H. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.A)

I. TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (RP JUTA/ TENAGA KERJA)

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp Juta/Tenaga Kerja)
Definisi	Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi
Rumus Perhitungan	$PTK = \frac{PDRB}{JTkB}$ Dimana : PTK = Produktivitas Tenaga Kerja PDRB = PDRB ADHB tahun n JTkB = Jumlah penduduk bekerja tahun n
Interpretasi	Tingkat produktivitas tenaga kerja digunakan untuk mengukur kemampuan tenaga kerja dalam mengerjakan pekerjaannya dalam waktu kerja yang sudah ditentukan dengan metode penghitungan adalah nilai tambah dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang dibayar.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

J. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/ KOTA (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota (Indeks)
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Rumus Perhitungan	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKTL)$ Dimana : IKLH = Rasio kualitas lingkungan hidup IKA = Rasio kualitas air IKU = Rasio kualitas udara

	IKTL = Rasio kualitas tutupan lahan
Interpretasi	Kategori Rasio Lingkungan Hidup yaitu : a. sangat baik $90 \leq \text{IKLH} \leq 100$ b. baik $70 \leq \text{IKLH} \leq 90$ c. sedang $50 \leq \text{IKLH} \leq 70$ d. kurang $25 \leq \text{IKLH} \leq 50$ e. sangat kurang $0 \leq \text{IKLH} \leq 25$
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan Permen LHK Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun

III. METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA

1) INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.A)

2) USIA HARAPAN HIDUP (TAHUN)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.H)

3) PREVALENSI *STUNTING* (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA BALITA (%)

Nama Indikator	Prevalansi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)
Definisi	<i>Stunting</i> (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (<i>Z-score</i>) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: <i>Z-score</i> < -3,0 b. Pendek: <i>Z-score</i> $\geq -3,0$ s/d <i>Z-score</i> < -2,0
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P_{stunting} = \frac{JAB(5)P_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$

	Keterangan : $PAB(5)P_{stunting}$ = Prevalensi anak balita yang menderita pendek (<i>stunting</i>) $JAB(5)P_{stunting}$ = Jumlah anak balita pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu $JAB(5)$ = Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)SP_{stunting} = \frac{JAB(5)SP_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan: $PAB(5)SP_{stunting}$ = Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (<i>stunting</i>) $JAB(5)SP_{stunting}$ = Jumlah anak balita sangat pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu $JAB(5)$ = Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) <i>Prevalensi stunting</i> = $PAB(5) P + PAB(5) SP$
Interpretasi	<i>Prevalensi stunting</i> yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: Kekurangan Gizi : <i>Stunting</i> adalah indikator kekurangan gizi kronis. <i>Prevalensi stunting</i> yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Akses Pelayanan Kesehatan : <i>Prevalensi stunting</i> yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Kemiskinan : <i>Stunting</i> sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan <i>stunting</i>. Pendidikan : Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap <i>prevalensi stunting</i>. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor Lingkungan : Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap <i>prevalensi stunting</i>.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Rasio perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan

Frekuensi	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Rasio : 5 tahunan

4) PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (*PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT*) (%)

Nama Indikator	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)
Definisi	a. Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif b. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/ PoU</i>) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x < MDER} f(x)dx$ Keterangan : PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kka (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>) f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

E. JUMLAH KEMATIAN IBU (JIWA)

Nama Indikator	Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)
Definisi	Indikator ini menunjukkan jumlah kematian ibu selama kehamilan, persalinan atau dalam 42 hari setelah melahirkan
Rumus Perhitungan	$jki = kki_n$ dimana : jki = jumlah kematian ibu (jiwa) kki _n = kasus kematian ibu pada tahun berkenaan
Interpretasi	Jumlah kematian ibu menjadi indikator penting menilai kualitas layanan kesehatan ibu di suatu wilayah, yang berarti dengan layanan yang berkualitas kasus kematian ibu dapat ditekan atau tidak ada sama sekali
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

F. HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.I)

G. TINGKAT KEMISKINAN (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.B)

H. INDEKS KETAHANAN KELUARGA (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Keluarga (Indeks)
Definisi	Indikator ini digunakan sebagai ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.
Rumus Perhitungan	$ibangga = \frac{it + im + ib}{3}$ dimana : $it = \frac{stt - minst}{maxst - minst} \times 100$ $im = \frac{stm - minsm}{maxsm - minsm} \times 100$ $ib = \frac{stb - minsb}{maxsb - minsb} \times 100$ Ket : ibangga = Indeks ketahanan keluarga it = Indeks ketentraman im = Indeks kemandirian ib = Indeks kebahagiaan

	stt = Skor total ketentraman minst = Min skor ketentraman maxst = Maks skor ketentraman stm = Skor total kemandirian minsm = Min skor kemandirian maxsm = Maks skor kemandirian stb = Skor total kebahagiaan minsb = Min skor kebahagiaan maxsb = Maks skor kebahagiaan
Interpretasi	Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. B. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70. C. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70
Sumber Data	BKKBN
Frekuensi	Tahunan

I. INDEKS KETIMPANGAN GENDER – IKG (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender – IKG (Indeks)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPak perempuan
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: a. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ b. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik $HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ c. Menghitung indeks masing – masing dimensi

	$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20} + 1} \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$ d. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric $G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ e. Menghitung Indeks Kesenjangan Gender $Indeks Kesenjangan Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ f. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ Keterangan : G_p =Indeks Perempuan G_L =Indeks Laki-Laki MTF =Proporsi Perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MHPK20=Proporsi Perempuan usia 15-40 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p =Persentase Perempuan di legislatif PR_L =Persentase Laki-laki di legislatif SE_p =Persentase Perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L =Persentase Laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_p$ =Persentase angkatan kerja Perempuan terhadap penduduk Perempuan usia kerja $TPAK_L$ =Persentase angkatan kerja Laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_p, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dalam rata-rata harmonik IKR =Indeks dimensi Kesehatan reproduksi IP =Indeks dimensi pemberdayaan IPK =Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{p,L}$ =Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric IKG =Indeks ketimpangan gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 – 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.

Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

J. PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.D)

K. INDEKS DAYA SAING DAERAH – IDSD (INDEKS)

Nama Indikator	Indek Daya Saing Daerah (Indeks)
Definisi	Daya saing daerah merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu daerah dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, sehingga dapat dikatakan IDSD ini merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan pencapaian tujuan yang lebih baik pada suatu daerah.
Rumus Perhitungan	Angka Indeks merupakan agregat dari seluruh variabel yang digunakan, dikarenakan variabel mempunyai strata, maka perhitungannya sebagai berikut : 1. Dimensi, merupakan rata-rata dari indikator $Dimensi = \frac{\sum_{i=1}^n indikator_i}{n}$ 2. Pilar, merupakan rata-rata dari dimensi $Pilar = \frac{\sum_{i=1}^n dimensi_i}{n}$ 3. Aspek, merupakan rata-rata dari pilar $Aspek = \frac{\sum_{i=1}^n pilar_i}{n}$ 4. Indeks, merupakan rata-rata dari indikator $Indeks = \frac{\sum_{i=1}^n aspek_i}{n}$

Interpretasi	Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktivitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing dilihat dari beberapa indikator keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif. Komponen IDSD terdiri dari 4 aspek, 12 pilar dan 23 dimensi, 78 indikator, dimana komposisi ini dihasilkan berdasarkan berbagai studi literatur dan masukan dari para pakar. <table><tr><th>NO</th><th>ASPEK/ FAKTOR</th><th>PILAR</th><th>DIMENSI</th><th>INDIKATOR</th></tr><tr><td rowspan="6">1</td><td rowspan="6">Aspek/ Faktor Penguat Enabling Environment</td><td rowspan="2">Pilar Kelembagaan</td><td>Tata Kelola Pemerintahan</td><td>4</td></tr><tr><td>Keamanan Dan Ketertiban</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">Pilar Infrastruktur</td><td>Infrastruktur Transportasi</td><td>2</td></tr><tr><td>Infrastruktur Air Bersih Dan Kelistrikan</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="2">Pilar Perekonomian Daerah</td><td>Kuangan Daerah</td><td>5</td></tr><tr><td>Stabilitas Ekonomi</td><td>4</td></tr><tr><td>ii</td><td>Aspek Sumber Daya Manusia/ Human Capital</td><td>Pilar Kesehatan</td><td>Kesehatan</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Pilar Pendidikan Dan Keterampilan</td><td>Pendidikan</td><td>6</td></tr><tr><td>Keterampilan</td><td>3</td></tr><tr><td>Kopetensi Dalam Negeri</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="6">iii</td><td rowspan="6">Aspek Pasar/Market</td><td rowspan="2">Pilar Efisiensi Pasar Produk</td><td>Pajak Dan Resribusi</td><td>3</td></tr><tr><td>Stabilitas Pasar</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">Pilar Ketenagakerjaan</td><td>Ketenagakerjaan</td><td>2</td></tr><tr><td>Kapasitas Tenaga Kerja</td><td>3</td></tr><tr><td>Pilar Akses Keuangan</td><td>Akses Keuangan</td><td>6</td></tr><tr><td>Pilar Ukuran Pasar</td><td>Ukuran Pasar</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="6">iv</td><td rowspan="6">Aspek Ekosistem Inovasi</td><td rowspan="2">Pilar Dinamika Bisnis</td><td>Regulasi</td><td>4</td></tr><tr><td>Kewirausahaan</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="2">Pilar Kapasitas Inovasi</td><td>Interaksi Dan Keberagaman</td><td>6</td></tr><tr><td>Penelitian Dan Pengembangan (R & D)</td><td>9</td></tr><tr><td rowspan="3">Pilar Kesiapan Teknologi</td><td>Komersialisasi</td><td>3</td></tr><tr><td>Telematika</td><td>2</td></tr><tr><td>Teknologi</td><td>1</td></tr></table>	NO	ASPEK/ FAKTOR	PILAR	DIMENSI	INDIKATOR	1	Aspek/ Faktor Penguat Enabling Environment	Pilar Kelembagaan	Tata Kelola Pemerintahan	4	Keamanan Dan Ketertiban	1	Pilar Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi	2	Infrastruktur Air Bersih Dan Kelistrikan	2	Pilar Perekonomian Daerah	Kuangan Daerah	5	Stabilitas Ekonomi	4	ii	Aspek Sumber Daya Manusia/ Human Capital	Pilar Kesehatan	Kesehatan	1			Pilar Pendidikan Dan Keterampilan	Pendidikan	6	Keterampilan	3	Kopetensi Dalam Negeri	2	iii	Aspek Pasar/Market	Pilar Efisiensi Pasar Produk	Pajak Dan Resribusi	3	Stabilitas Pasar	1	Pilar Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	2	Kapasitas Tenaga Kerja	3	Pilar Akses Keuangan	Akses Keuangan	6	Pilar Ukuran Pasar	Ukuran Pasar	3	iv	Aspek Ekosistem Inovasi	Pilar Dinamika Bisnis	Regulasi	4	Kewirausahaan	5	Pilar Kapasitas Inovasi	Interaksi Dan Keberagaman	6	Penelitian Dan Pengembangan (R & D)	9	Pilar Kesiapan Teknologi	Komersialisasi	3	Telematika	2	Teknologi	1
NO	ASPEK/ FAKTOR	PILAR	DIMENSI	INDIKATOR																																																																						
1	Aspek/ Faktor Penguat Enabling Environment	Pilar Kelembagaan	Tata Kelola Pemerintahan	4																																																																						
			Keamanan Dan Ketertiban	1																																																																						
		Pilar Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi	2																																																																						
			Infrastruktur Air Bersih Dan Kelistrikan	2																																																																						
		Pilar Perekonomian Daerah	Kuangan Daerah	5																																																																						
			Stabilitas Ekonomi	4																																																																						
ii	Aspek Sumber Daya Manusia/ Human Capital	Pilar Kesehatan	Kesehatan	1																																																																						
		Pilar Pendidikan Dan Keterampilan	Pendidikan	6																																																																						
			Keterampilan	3																																																																						
			Kopetensi Dalam Negeri	2																																																																						
iii	Aspek Pasar/Market	Pilar Efisiensi Pasar Produk	Pajak Dan Resribusi	3																																																																						
			Stabilitas Pasar	1																																																																						
		Pilar Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	2																																																																						
			Kapasitas Tenaga Kerja	3																																																																						
		Pilar Akses Keuangan	Akses Keuangan	6																																																																						
		Pilar Ukuran Pasar	Ukuran Pasar	3																																																																						
iv	Aspek Ekosistem Inovasi	Pilar Dinamika Bisnis	Regulasi	4																																																																						
			Kewirausahaan	5																																																																						
		Pilar Kapasitas Inovasi	Interaksi Dan Keberagaman	6																																																																						
			Penelitian Dan Pengembangan (R & D)	9																																																																						
		Pilar Kesiapan Teknologi	Komersialisasi	3																																																																						
			Telematika	2																																																																						
Teknologi	1																																																																									
Sumber Data	Badan Riset dan Inovasi Nasional																																																																									
Frekuensi	Tahunan																																																																									

L. PROPORSI KONTRIBUSI PDRB KOTA TERHADAP PDRB PROVINSI (%)

Nama Indikator	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Terhadap PDRB Provinsi (%)
Definisi	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (<i>gross value added</i>) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara.
Rumus Perhitungan	$\%PDRB_k = \frac{\sum(PDRB\ ADHB\ Kota)}{\sum PDRB\ ADHB\ Provinsi} \times 100\%$ Ket : $\%PDRB_k$ = Proporsi Rasio PDRB Kota
Interpretasi	Mempertimbangkan delineasi wilayah kota yang dapat mencakup seluruh/ sebagian kecamatan dalam kota, maka perhitungan PDRB Kota yang dilakukan dengan menggunakan data kota yang berpeluang bernilai lebih tinggi (<i>overestimate</i>).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

M. PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.E)

N. RASIO GINI (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.G)

O. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.C)

P. KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PDRB (%)

Nama Indikator	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB (%)
Definisi	Kontribusi PDRB yang bersumber dari Sub sektor UMKM yang mencerminkan proporsi nilai tambah sub sektor UMKM terhadap PDRB Karena UMKM bukan merupakan sektor langsung yang terdapat dari 17 sektor pembentuk PDRB, maka untuk nilainya diambil dari sektor yang utamanya merupakan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu sektor: - Industri pengolahan - Pertanian, kehutanan dan perikanan - Industri pengolahan

Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi} = \frac{\text{PDRB}_{UMKM}}{\text{PDRB}_{Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi subsektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Kota, <i>ceteris paribus</i>
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

Q. NILAI REALISASI INVESTASI (Milyar/ Rp)

Nama Indikator	Realisasi Nilai Investasi (Milyar/ Rp)
Definisi	Nilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Cakupan: ▪ PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ▪ PMA (Penanaman Modal Asing) ▪ Semua sektor usaha (industri, jasa, pertanian, pertambangan, dll.) ▪ Jenis Investasi yang Dihitung: ▪ Investasi fisik: pembangunan gedung, fasilitas produksi, infrastruktur penunjang ▪ Pengadaan alat dan mesin ▪ Belanja modal lainnya yang tercatat dalam laporan realisasi
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai Realisasi Investasi} = \text{Nilai realisasi investasi PMA} + \text{Nilai realisasi investasi PMDN}$
Interpretasi	▪ Semakin tinggi nilai realisasi investasi, semakin baik karena mencerminkan keberhasilan menarik dan mempertahankan investor untuk merealisasikan komitmen investasinya. ▪ Kenaikan nilai dari waktu ke waktu menunjukkan iklim investasi yang membaik.
Sumber Data	OSS RBA
Frekuensi	Bulanan, Triwulan dan Tahunan

R. INDEKS RISIKO BENCANA – IRBI (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana – IRBI (Indeks)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan,

	dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan : <i>Hazard</i> (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. <i>Vulnerability</i> (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • Indeks <13 adalah Rendah • Indeks 13 – 144 adalah Sedang • Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BPBD
Frekuensi	Tahunan

S. INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK – SPBE (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik – SPBE (Indeks)
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain

	yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

T. INDEKS PEMERINTAHAN DIGITAL (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)
Definisi	Indeks pemerintah digital adalah ukuran kinerja atau kematangan transformasi digital di instansi pemerintah, seperti yang diukur dalam Indeks Pemdi di Rasio, yang mencakup penilaian terhadap tata kelola, layanan, dan infrastruktur digital untuk mendorong modernisasi dan penciptaan nilai publik melalui pemanfaatan teknologi dan data digital. Indeks ini membantu pemerintah mengevaluasi kesiapan mereka dalam transformasi digital secara menyeluruh dan menjadi dasar untuk menyusun program pengembangan SDM digital dan peningkatan pelayanan publik
Rumus Perhitungan	Total skor dari 9 aspek Pemdi berdasarkan evaluasi Kemen PAN RB, dengan bobot nilai masing-masing aspek sebagai berikut : 1. Strategi dan Rencana (bobot 5 %) 2. Tata Kelola dan Manajemen (bobot 5 %) 3. Teknologi Digital (bobot 20 %) 4. Audit Teknologi Digital (bobot 6 %) 5. Keamanan Siber (bobot 9 %) 6. Kapabilitas dan Budaya Digital (bobot 10 %) 7. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi (bobot 10 %) 8. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (bobot 15 %) Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (bobot 20 %)
Interpretasi	Indeks ini dirancang untuk mengukur kinerja transformasi digital di instansi pemerintah Rasio, sesuai dengan arahan RPJMN 2025-2029 dan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Indeks ini berfungsi

	Memberikan gambaran tentang tingkat kesiapan dan kualitas transformasi digital di instansi pemerintah. Skala indeks yang lebih tinggi menunjukkan kematangan transformasi digital yang lebih baik dalam penggunaan teknologi digital pemerintahan.
Sumber Data	Kementerian PANRB berdasarkan hasil evaluasi
Frekuensi	Tahunan

U. INDEKS PELAYANAN PUBLIK (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Rasio berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. a. Menentukan nilai untuk setiap indikator $\text{Nilai per indikator} = \left(\frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}$ b. Menentukan nilai setiap aspek $\text{Nilai per aspek} : \sum \text{nilai per indikator}$ c. Menentukan Indeks $\text{Nilai indeks} : \sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot}_n)$
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: - Keadilan (Fairness); - Partisipasi (Participation); - Akuntabilitas (Accountability); - Transparansi (transparency); - Berdayaguna (useful); - Aksesibilitas (accessibility)

	Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>RANGE NILAI</th><th>KATEGORI</th><th>MAKNA</th></tr><tr><td>0-1,00</td><td>F</td><td>GAGAL</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>SANGAT BURUK</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>BURUK</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C</td><td>CUKUP (DENGAN CATATAN)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>CUKUP</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>BAIK (DENGAN CATATAN)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>BAIK</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>SANGAT BAIK</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>PELAYANAN PRIMA</td></tr></table>	RANGE NILAI	KATEGORI	MAKNA	0-1,00	F	GAGAL	1,01 – 1,50	E	SANGAT BURUK	1,51 – 2,00	D	BURUK	2,01 – 2,50	C	CUKUP (DENGAN CATATAN)	2,51 – 3,00	C	CUKUP	3,01 – 3,50	B-	BAIK (DENGAN CATATAN)	3,51 – 4,00	B	BAIK	4,01 – 4,50	A-	SANGAT BAIK	4,51 – 5,00	A	PELAYANAN PRIMA
RANGE NILAI	KATEGORI	MAKNA																													
0-1,00	F	GAGAL																													
1,01 – 1,50	E	SANGAT BURUK																													
1,51 – 2,00	D	BURUK																													
2,01 – 2,50	C	CUKUP (DENGAN CATATAN)																													
2,51 – 3,00	C	CUKUP																													
3,01 – 3,50	B-	BAIK (DENGAN CATATAN)																													
3,51 – 4,00	B	BAIK																													
4,01 – 4,50	A-	SANGAT BAIK																													
4,51 – 5,00	A	PELAYANAN PRIMA																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

V. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (INDEKS)

Nama Indikator	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)																									
Definisi	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur dari pemberian layanan kepada masyarakat oleh suatu instansi																									
Rumus Perhitungan	a. Penentuan bobot$bobot = \frac{1}{jumlah\ parameter}$ b. SKM$SKM = \frac{total\ nilai\ persepsi\ responden\ per\ parameter}{total\ parameter\ yang\ terisi} \times bobot$ c. IKM$IKM = SKM \times 25$																									
Interpretasi	Semakin tinggi nilai dari IKM pada suatu instansi menandakan adanya tingginya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi tersebut dan sebaliknya yang dinotasikan dengan tabel berikut : <table><tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI</th><th>KATEGORI MUTU PELAYANAN</th><th>MUTU PELAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>88,31 - 100</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI MUTU PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,26 – 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI MUTU PELAYANAN	MUTU PELAYANAN																						
1	1,00 – 1,75	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																						
2	1,76 – 2,50	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																						
3	2,51 – 3,25	76,61 – 88,30	B	Baik																						
4	3,26 – 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik																						

Sumber Data	Survei kepuasan masyarakat
Frekuensi	Semesteran dan Tahunan

W. NILAI EVALUASI AKIP

Nama Indikator	Nilai Evaluasi AKIP (NILAI)				
Definisi	Nilai Evaluasi AKIP merupakan Nilai terhadap aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.				
Rumus Perhitungan	KOMPONEN	SUB KOMPONEN 1 KEBERADAAN 20%	SUB KOMPONEN 2 KUALITAS 30%	SUB KOMPONEN 3 PEMANFAATAN 50%	TOTAL BOBOT
	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
	Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100
Interpretasi	Semakin tinggi nilai evaluasi AKIP semakin tinggi pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah.				
Sumber Data	Kementerian PAN RB				
Frekuensi	Tahunan				

X. OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN (OPINI)

Nama Indikator	Opini BPK atas Laporan Keuangan (Opini)
Definisi	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah pernyataan profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria akuntansi yang berlaku umum di Rasio
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase WTP} = \left(\frac{\text{Jumlah Pemerintah Daerah dengan WTP}}{\text{Total Pemerintah Daerah}} \right) \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi kualitas opini (misal WTP), maka semakin baik pengelolaan keuangan daerah
Sumber Data	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD
Frekuensi	Tahunan (setelah LKPD selesai diaudit oleh BPK)

Y. RASIO PAD TERHADAP APBD (%)

Nama Indikator	Rasio PAD terhadap APBD (%)

Definisi	Indikator ini menggambarkan proporsi pendapatan asli daerah dalam pemenuhan belanja pada APBD
Rumus Perhitungan	$\%PAD = \frac{PAD}{APBD} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi rasio PAD terhadap APBD maka semakin meningkat kemandirian keuangan suatu daerah
Sumber Data	BKD
Frekuensi	Tahunan

Z. PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN TRANTIBUM (%)

Nama Indikator	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum (%)
Definisi	Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah, melakukan upaya mewujudkan kondisi Tertib dengan cara menyelesaikan setiap pelanggaran yang dilaporkan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran tahun } (n-1) - \text{Jumlah pelanggaran tahun } n}{\text{Jumlah pelanggaran tahun } (n-1)} \times 100$
Interpretasi	Jumlah pelanggaran tahun N-1 adalah jumlah pelanggaran pada tahun lalu (sebelumnya). Jumlah pelanggaran pada tahun N adalah jumlah pelanggaran pada tahun berjalan (tahun dimana indikatornya dihitung). Semakin tinggi persentase tingkat penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi Tertib di Kota Payakumbuh.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

AA. INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN - IPK - BERBASIS ABS SBK (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kebudayaan Berbasis ABS SBK (Indeks)
Definisi	IPK ABS-SBK adalah instrumen yang mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat daerah Kota Payakumbuh berdasarkan nilai-nilai Budaya Minang Kabau yang berlandaskan ABS- SBK
Rumus Perhitungan	$IPK_{ABSSBK} = \sum_{i=1}^8 (W_j \times \text{Indeks } D_j)$ dimana $IPK_{ABSSBK} = \text{Indeks Pembangunan Kebudayaan}$ $D_j = \text{Dimensi ke-}j$ $W_j = \text{Bobot Dimensi ke-}j$ $\text{Indeks } D_j = \frac{\sum_{i=1}^I s_{xj}}{n_j} \times 100$ dimana

	SX_j =Nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi n_j =Banyaknya indikator dimensi ke-j Indeks D_j =Indeks Dimensi ke-j																																								
Interpretasi	Indeks Pembangunan Kebudayaan ABS SBK berkisar antara 0 – 100 dengan menggunakan 8 (delapan) dimensi <table><tr><th>DIMENSI</th><th>INDIKATOR</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>Bakorong-Bakampuang,</td><td>3</td><td>9</td></tr><tr><td>Basuku-Banagari,</td><td>4</td><td>15</td></tr><tr><td>Basawah-Baladang,</td><td>3</td><td>15</td></tr><tr><td>Bahuma-Babendang,</td><td>3</td><td>15</td></tr><tr><td>Balabuah-Batapian,</td><td>2</td><td>9</td></tr><tr><td>Babalai Bamusajik,</td><td>2</td><td>20</td></tr><tr><td>Bahalaman-Bapamedanan</td><td>2</td><td>9</td></tr><tr><td>Bapandam-Bapakuburan</td><td>2</td><td>8</td></tr><tr><td>Total</td><td>21</td><td>100</td></tr></table> <table><tr><th>INTERVAL</th><th>KRITERIA</th></tr><tr><td>86-100</td><td>Unggul</td></tr><tr><td>76-85</td><td>Baik Sekali</td></tr><tr><td>66-75</td><td>Baik</td></tr><tr><td>≤ 65</td><td>Cukup Baik</td></tr></table>	DIMENSI	INDIKATOR	BOBOT	Bakorong-Bakampuang,	3	9	Basuku-Banagari,	4	15	Basawah-Baladang,	3	15	Bahuma-Babendang,	3	15	Balabuah-Batapian,	2	9	Babalai Bamusajik,	2	20	Bahalaman-Bapamedanan	2	9	Bapandam-Bapakuburan	2	8	Total	21	100	INTERVAL	KRITERIA	86-100	Unggul	76-85	Baik Sekali	66-75	Baik	≤ 65	Cukup Baik
DIMENSI	INDIKATOR	BOBOT																																							
Bakorong-Bakampuang,	3	9																																							
Basuku-Banagari,	4	15																																							
Basawah-Baladang,	3	15																																							
Bahuma-Babendang,	3	15																																							
Balabuah-Batapian,	2	9																																							
Babalai Bamusajik,	2	20																																							
Bahalaman-Bapamedanan	2	9																																							
Bapandam-Bapakuburan	2	8																																							
Total	21	100																																							
INTERVAL	KRITERIA																																								
86-100	Unggul																																								
76-85	Baik Sekali																																								
66-75	Baik																																								
≤ 65	Cukup Baik																																								
Sumber Data	Kuisisioner yang diolah, Kesra, Kebudayaan, Litbang Bappeda																																								
Frekuensi	Tahunan																																								

BB. KARYA BUDAYA YANG DITETAPKAN

Nama Indikator	Karya Budaya yang Ditetapkan
Definisi	Indikator ini digunakan untuk mengukur penetapan karya budaya melalui proses penetapan resmi sebagai cagar budaya atau warisan budaya oleh lembaga berwenang
Rumus Perhitungan	$kbd = kbd_{n-1} + kbd_n$ dimana : kbd = Karya Budaya yang ditetapkan
Interpretasi	Menunjukkan tingkat legalitas, perlindungan, dan pengakuan resmi terhadap kekayaan budaya daerah. Semakin tinggi nilai indikator, semakin banyak unsur budaya yang telah mendapatkan status hukum yang sah
Sumber Data	Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Frekuensi	Tahunan

CC. CAKUPAN PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (%)

Nama Indikator	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)
Definisi	Upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini mencakup pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi terbuka, serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pembentukan karakter, dan pengembangan wawasan kebangsaan
Rumus Perhitungan	Nilai Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dari Rapor Pendidikan
Interpretasi	1. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila: - Memahami dan menghayati makna dari lima sila Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). - Mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam pengambilan keputusan, interaksi sosial, dan perilaku sehari-hari. - Menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bertindak, dan bersikap. 2. Penguatan Karakter Kebangsaan: - Membentuk karakter individu yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, seperti religius, jujur, tanggung jawab, disiplin, toleran, adil, dan cinta tanah air. - Memperkuat rasa nasionalisme dan identitas bangsa, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. - Mencegah masuknya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, seperti radikalisme, intoleransi, dan individualisme. 3. Implementasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: - Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam sistem pemerintahan, hukum, ekonomi, dan pendidikan. - Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

	- Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan menjaga stabilitas negara. 4. Peran Generasi Muda: - Memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sejak dini melalui pendidikan formal dan informal. - Mengembangkan kreativitas dan inovasi generasi muda dalam melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. - Memberdayakan generasi muda sebagai agen perubahan dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. 5. Tantangan dan Ancaman: - Menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan zaman yang dapat mengikis nilai-nilai luhur Pancasila. - Memperkuat ketahanan ideologi bangsa dari berbagai ancaman, seperti radikalisme, intoleransi, dan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan budaya.
Sumber Data	Rapor Pendidikan (Kemendikbud)
Frekuensi	Tahunan

DD. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/ KOTA (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator Sasaran Visi (II.J)

EE. TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH (%)

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Definisi	Timbulan Sampah Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/ atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja,

	dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan: - Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/ atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. - Daur ulang materi (material recovery) merupakan Upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/ atau swasta. Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/ atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.
Rumus Perhitungan	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah: Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari)

	RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) RASIO : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT: Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut. $TS = 70\% \text{ dari rumah tangga} + 30\% \text{ dari non - rumah tangga}$ $TS = \frac{TSRT}{70\%}$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (ton/hari) TSRT : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah $\%SO = \frac{SO}{TS} \times 100\%$ Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah
Sumber Data	a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba) b. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c. SI INSAN Kementerian PUPR
Frekuensi	a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes : Tahunan

	b. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Tahunan c. SI INSAN Kementerian PUPR : Tahunan

FF. INDEKS INFRASTRUKTUR (NILAI)

Nama Indikator	Indeks Infrastruktur (Nilai)
Definisi	Indeks Infrastruktur adalah alat untuk menilai kualitas infrastruktur yang mencakup jalan, transportasi, air bersih dan drainase
Rumus Perhitungan	Indeks Infrastruktur = (18% x Kondisi Jalan mantap) + (7% x Penyediaan PJU) + (8% x Penyediaan Trotoar) + (12% x Kinerja Irigasi) + (10% x Fungsi Sungai) + (17% x Pemenuhan Drainase) + (5% x Pelayanan Air Minum) + (5% x Penataan bangunan Gedung) + (8% x Pengelolaan Jasa konstruksi) + (5% x Prasarana Sampah + 5% Pengelolaan Air limbah)
Interpretasi	Indeks ini diperoleh melalui pembobotan beberapa kriteria diatas, dan hasil dari indeks yang terus meningkat menandakan semakin berkualitasnya infrastruktur daerah (terutama untuk komponen yang digunakan) dan begitu juga sebaliknya
Sumber Data	Dinas PUPR Kota Payakumbuh (Dibantu data dari Dinas Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah)
Frekuensi	Tahunan

IV. METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH

A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

1) INDEKS KETAHANAN PANGAN (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)
Defenisi	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (provinsi/ kabupaten/ kota) berdasarkan tiga dimensi utama.
Rumus Perhitungan	$IKP = \frac{\sum (Skor Dimensi \times Bobot Dimensi)}{\sum Bobot}$ Atau jika bobot sama rata: $\frac{Skor Ketersediaan + Skor Akses + Skor Pemanfaatan}{3}$ Keterangan Rumus: Tiga Dimensi Utama IKP: - Ketersediaan Pangan - Indikator: Produksi pangan lokal, cadangan pangan, luas panen, distribusi pangan.

	○ Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, BPS. 2. Akses Pangan ○ Indikator: Persentase penduduk miskin, harga pangan, aksesibilitas geografis, infrastruktur distribusi. ○ Sumber: BPS, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan. 3. Pemanfaatan Pangan ○ Indikator: Angka gizi buruk, stunting, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pengetahuan gizi. ○ Sumber: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPS. Setiap dimensi memiliki skor 0–100 berdasarkan normalisasi indikator turunan.
Interpretasi	Nilai IKP semakin tinggi menunjukkan ketahanan pangan yang semakin baik
Sumber Data	Badan Pangan Nasional (Bapanas), BPS, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian
Frekuensi	Tahunan

2) PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT) (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.D)

3) KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA (KWH/KAPITA)

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Rumus Perhitungan	$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$ Keterangan : KLpk : Konsumsi Listrik per kapita KLpln : Total konsumsi Listrik yang disalurkan oleh RASIO PLN KLnonpln : Total konsumsi Listrik yang disalurkan non RASIO PLN P : Jumlah penduduk Catatan : a. Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik RASIO. PLN dan non RASIO. PLN yang disalurkan ke pelanggan;

	b. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha RASIO. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	Kementerian ESDM, RASIO PLN, dan BPS
Frekuensi	Tahunan

4) INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/ KOTA (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator Sasaran Visi (II.J)

5) RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN (%)

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat

Sumber Data	a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS b. Data Infrastruktur Kementerian PUPR c. Dinas Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

6) PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI PENGOLAHAN AIR LIMBAH AKSES AMAN (%)

Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman (%)
Definisi	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman (%)
Rumus Perhitungan	Meningkatnya persentase Masyarakat yang memiliki pengolahan air limbah akses aman di Kota Payakumbuh
Interpretasi	$\% = \frac{a}{b}$ a : Jumlah rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman b : Jumlah seluruh rumah di Kota Payakumbuh
Sumber Data	Semakin tinggi angka persentase, menunjukkan semakin banyak jumlah rumah tangga yang telah memiliki pengolahan air limbah akses aman
Frekuensi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

7) TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.EE)

8) PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN LAYANAN PENUH PENGUMPULAN SAMPAH (%)

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)
Definisi	Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang : - Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau

	- Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Catatan: Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan: Persentase Rumah tangga Cara Perhitungan : $PRTL P = \frac{JRTL A}{JRTS} \times 100\%$ PRTL A = Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTL A = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah
Sumber Data	a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS b. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS
Frekuensi	a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS : 3 tahunan

	b. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS : Tahunan

9) INDEKS RISIKO BENCANA – IRBI (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.R)

10) LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Definisi	Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$LP = \frac{(P_n - P_{n-1})}{P_n} \times 100\%$ Ket : LP = Pertumbuhan penduduk periode n P_n = Penduduk pada periode n P_{n-1} = Penduduk periode sebelumnya
Interpretasi	Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan bahwa jumlah populasi suatu wilayah semakin banyak dan laju pertumbuhan penduduk yang lambat menunjukkan jumlah populasi suatu wilayah sedikit
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

11) RASIO PENDUDUK (%)

Nama Indikator	Rasio Penduduk (%)
Definisi	Rasio Penduduk dalam hal ini lebih berfokus pada rasio jenis kelamin dimana rasio ini merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$RP = \frac{P_L}{P_P} \times 100$ Ket : RP = Rasio penduduk (<i>sex rasio</i>) P_L = Jumlah penduduk laki-laki P_P = Jumlah penduduk perempuan
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat rasio mengindikasikan peningkatan/ lebih banyaknya jenis kelamin tertentu dalam rumus diatas adalah perempuan, dan sebaliknya
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

12) KEPADATAN PENDUDUK (ORANG/ Km²)

Nama Indikator	Kepadatan Penduduk (Orang/ Km ²)
Definisi	Kepadatan Penduduk merupakan jumlah orang yang tinggal per satuan luas pada wilayah suatu daerah.
Rumus Perhitungan	$KP = \frac{P}{L}$ Ket : KP = Kepadatan penduduk P = Jumlah penduduk L = Luas wilayah
Interpretasi	Semakin besar angka kepadatan penduduk maka semakin padat kependudukan di suatu wilayah
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

13) JUMLAH PENDUDUK (JIWA)

Nama Indikator	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Definisi	Jumlah penduduk adalah banyaknya individu manusia yang menempati suatu wilayah atau negara pada kurun waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Perhitungannya melalui sensus penduduk untuk waktu 10 tahun dan Susenas ataupun proyeksi yang dikeluarkan oleh BPS dimana proyeksi menggunakan rumus : $P_n = P_0 (1 + r \cdot n) \Rightarrow \text{Rumus Aritmatika}$ $P_n = P_0 (1 + r)^n \Rightarrow \text{Rumus Geometrik}$ $P_n = P_0 \cdot e^{r \cdot n} \Rightarrow \text{Rumus Eksponensial}$ dimana : P_n = jumlah penduduk setelah n tahun ke depan P_0 = jumlah penduduk pada awal tahun r = angka pertumbuhan penduduk n = jangka waktu dalam tahun e = bilangan eksponensial = 2,7182818
Interpretasi	Keakurasian Jumlah penduduk akan membantu dalam memetakan pembangunan pada suatu wilayah
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**1) PERTUMBUHAN EKONOMI (%)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.D)

2) TINGKAT KEMISKINAN (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.B)

3) PDRB Per-kapita ADHB (Rp. Juta)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.E)

4) TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.C)

6) RASIO GINI (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.G)

6) INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.A)

7) USIA HARAPAN HIDUP – AHH (TAHUN)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.H)

8) INDEKS KELUARGA SEHAT (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Keluarga Sehat (Indeks)
Definisi	Alat yang komprehensif untuk menilai kualitas hidup keluarga dengan mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang memberikan gambaran holistik mengenai kesejahteraan keluarga
Rumus Perhitungan	Jumlah indikator
Interpretasi	Hasil perhitungan IKS tersebut, selanjutnya dapat ditentukan kategori kesehatan masing-masing keluarga dengan mengacu pada ketentuan berikut: 1) Nilai indeks > 0,800 : keluarga sehat 2) Nilai indeks 0,500 – 0,800 : pra-sehat 3) Nilai indeks < 0,500 : tidak sehat
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

9) PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA BALITA (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.C)

10) RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.J)

11) HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.I)

12) INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)
Definisi	Merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan, ketersediaan, pemanfaatan, dan budaya literasi di suatu wilayah atau kelompok masyarakat. IPLM umumnya disusun oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk menilai seberapa baik masyarakat mengakses, memanfaatkan, dan mengembangkan kemampuan literasinya, baik literasi baca-tulis, numerasi, maupun literasi digital.
Rumus Perhitungan	Adapun beberapa kaidah utama yang digunakan dalam perhitungan indeks antara lain: - Indeks terdiri dari 7 (tujuh) unsur pembentuk indeks yang dinamakan unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang terdiri dari: - UPLM 1 yaitu pemerataan layanan perpustakaan. - UPLM 2 yaitu ketercukupan koleksi perpustakaan. - UPLM 3 yaitu ketercukupan tenaga perpustakaan. - UPLM 4 yaitu tingkat kunjungan masyarakat. - UPLM 5 yaitu perpustakaan yang dibina sesuai SNP. - UPLM 6 yaitu keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan. - UPLM 7 yaitu anggota perpustakaan. - Aspek Masyarakat (AM) yang digunakan untuk setiap Unsur Pembangun Literasi Masyarakat yaitu: - AM untuk UPLM 1 adalah jumlah kelembagaan yang ada di masyarakat. - AM untuk UPLM 2 adalah jumlah populasi penduduk. UPLM Kota : $UPLM_i = \frac{\frac{Kota+Kec+Kel+SDMI+SMPMTs+SMAMA+PT+Khusus}{AM_i}}{k_i}$ IPLM Kota : $IPLM\ Kota = \frac{\sum_{i=1}^7 (UPLM)_i}{7} \times 100$ Dimana : UPLM_i = Unsur Pembangun Literasi Masyarakat AM_i = Aspek Masyarakat Kota sesuai UPLM yang dihitung k_i = Standarisasi sesuai dengan UPLM yang dihitung IPLM Kota = Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota
Interpretasi	IPLM biasanya disajikan dalam skala 0 – 100, di mana semakin tinggi nilainya, semakin baik kondisi literasi masyarakat. Interpretasinya umumnya dibagi menjadi kategori berikut (mengacu pada panduan Perpustakaan Nasional RI):

	0 – 20 (Sangat Rendah) = Akses dan budaya literasi hampir tidak ada, fasilitas minim dan partisipasi rendah 21 – 40 (Rendah) = Fasilitas terbatas, partisipasi literasi rendah, budaya membaca belum terbentuk 41 – 60 (Sedang) = Ketersediaan sumber literasi mulai memadai, tetapi pemanfaatannya belum optimal 61 – 80 (Tinggi) = Akses baik, masyarakat aktif memanfaatkan fasilitas, budaya membaca mulai kuat 91–100 (Sangat Tinggi) = Akses merata, pemanfaatan optimal, budaya literasi mengakar di semua lapisan Poin penting interpretasi: 1. Nilai tinggi menunjukkan ketersediaan fasilitas, partisipasi, dan kebiasaan literasi masyarakat sudah baik. 2. Nilai rendah mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan, peningkatan sarana, dan penguatan budaya literasi. 3. Perubahan nilai dari tahun ke tahun menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan program literasi
Sumber Data	- Survei fasilitas perpustakaan (jumlah, luas, koleksi, layanan). - Survei partisipasi masyarakat (kunjungan, keanggotaan, kegiatan literasi). - Observasi kondisi sarana dan prasarana literasi di lapangan. - Wawancara dengan pengelola perpustakaan, komunitas literasi, atau tokoh masyarakat
Frekuensi	Tahunan

13) CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (%)

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Rasio. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja
Rumus Perhitungan	$CJN = \frac{JPK}{P} \times 100\%$ Keterangan: CJN = Cakupan Jamsos Naker JPK = Jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan

	P = Jumlah semesta penduduk bekerja Dimana <i>peserta</i> merupakan pekerja penerima upah (PPU), jasa konstruksi dan pekerja bukan penerima upah. Sedangkan <i>semesta penduduk bekerja</i> merupakan penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas.
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Rasio dan September setiap tahunnya

14) INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (IPK) BERBASIS ABS SBK (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.AA)

15) KARYA BUDAYA YANG DITETAPKAN

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.BB)

16) INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak (Indeks)
Definisi	Indeks Perlindungan Khusus Anak merupakan alat untuk mengukur tingkat perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Perlindungan khusus anak mencakup kebijakan, regulasi, dan praktik yang dirancang untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi, serta untuk mempromosikan hak-hak anak secara luas. Indeks ini memberikan gambaran holistik tentang upaya perlindungan khusus yang dilakukan untuk anak-anak di suatu wilayah, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan atau kekurangan dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak.
Rumus Perhitungan	Indeks dihitung berdasarkan penilaian terhadap kebijakan perlindungan anak, implementasi regulasi, akses terhadap layanan sosial dan kesehatan anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kondisi perlindungan anak. Rumus perhitungan : $IPKA = \sum_{i=1}^n w_i x S_i$

	di mana: • <i>IPKA</i> adalah indeks perlindungan khusus anak. • <i>wi</i> adalah bobot atau weight yang diberikan untuk indikator ke-i. • <i>Si</i> adalah skor atau nilai yang dihasilkan dari indikator ke-i setelah normalisasi. Formula ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik data yang ada. Bobot dapat diberikan secara subjektif berdasarkan konsultasi dengan para ahli atau berdasarkan analisis statistik yang lebih mendalam.
Interpretasi	Indeks Perlindungan Khusus Anak adalah alat pengukuran yang menyediakan gambaran tentang seberapa baik suatu negara atau wilayah melindungi anak-anak dari berbagai risiko dan ancaman terhadap kesejahteraan mereka. Indeks ini mencakup beberapa aspek penting seperti kebijakan perlindungan anak, implementasi regulasi, ketersediaan layanan kesehatan dan sosial, upaya untuk menghapus kekerasan terhadap anak, dan promosi hak-hak anak secara umum. Interpretasi dari indeks ini dapat membantu dalam beberapa cara: Pemantauan Kemajuan: Menilai apakah upaya untuk meningkatkan perlindungan anak telah berhasil atau tidak dari tahun ke tahun. Perbandingan Antar Negara/Wilayah: Membandingkan tingkat perlindungan anak antara negara atau wilayah yang berbeda, membantu identifikasi praktik terbaik dan area yang memerlukan perbaikan. Pengidentifikasian Kebutuhan Prioritas: Menyoroti area di mana perlindungan anak paling rentan atau kebijakan yang perlu diperkuat untuk meningkatkan perlindungan anak. Advokasi dan Kebijakan: Memberikan dasar data untuk advokasi publik dan pengembangan kebijakan yang berfokus pada perlindungan anak, memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan lebih baik. Indeks ini penting karena anak-anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran, sehingga perlindungan mereka menjadi prioritas penting dalam agenda kesejahteraan dan hak asasi manusia secara global.
Sumber Data	Kementerian PP dan PA
Frekuensi	Tahunan

17) INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA – iBangga (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.G)

18) INDEKS KETIMPANGAN GENDER – IKG (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.H)

19) INDEKS PEMBANGUNAN GENDER – IPG (ANGKA)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Gender – IPG (ANGKA)
Definisi	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek dasar pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Rumus Perhitungan	$IPG = \left(\frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \right) \times 100$ Atau Jika menggunakan Skala Desimal $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}}$ Keterangan Rumus: • IPM Perempuan Indeks Pembangunan Manusia untuk penduduk perempuan, dihitung dari: ◦ Angka harapan hidup perempuan ◦ Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah perempuan ◦ Pengeluaran riil per kapita perempuan • IPM Laki-laki Sama seperti IPM perempuan, namun untuk penduduk laki-laki.
Interpretasi	Semakin mendekati 100 atau 1.000, semakin kecil kesenjangan pembangunan gender
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan

C. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1) ANGKA KETERGANTUNGAN (%)

Nama Indikator	Angka Ketergantungan (%)
Definisi	Angka ketergantungan atau dependency ratio adalah ukuran yang menjelaskan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk memenuhi kebutuhan penduduk non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas)
Rumus Perhitungan	$AK = \frac{(pddblmproduktif + pddtdkproduktif)}{jmlpddusiaproduktif} \times 100$ AK = Angka ketergantungan

Interpretasi	Semakin rendah angka ketergantungan, semakin baik kondisi ekonomi suatu negara karena beban tanggungan penduduk non-produktif lebih rendah
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

2) KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja sasaran visi (II.B)

3) RASIO PDRB PENYEDIAAN AKOMODASI MAKAN DAN MINUM (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum (%)
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Rumus Perhitungan	$Rasio\ PDB_{AMM} = \frac{\Delta\ AMM}{PDRB} \times 100\%$ Dimana : Rasio PDB_{AMM} merupakan rasio PDRB sektor akomodasi, makan dan minum dan $\Delta\ AMM$ = nilai tambah sektor akomodasi, makan dan minum
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

4) PROPORSI PDRB EKONOMI KREATIF TERHADAP PDRB EKONOMI KREATIF PROVINSI (%)

Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: a. Fesyen b. Kuliner c. Kriya d. Film, Animasi dan Video

	e. Pengembang Permainan f. Aplikasi g. Musik h. Seni Pertunjukan i. Fotografi j. Desain Komunikasi Visual k. Televisi dan Radio l. Seni Rupa m. Desain Produk n. Periklanan o. Penerbitan p. Arsitektur q. Desain Interior
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDB}_{EK} = \frac{\sum \text{PDRB 17 Sek EK}}{\text{PDRB}_{prov}} \times 100\%$ Dimana : Rasio PDB_{EK} merupakan rasio PDRB sektor Ekonomi Kreatif dan $\sum \text{PDRB 17 Sek EK}$ merupakan Akumulasi 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif Regional
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB Provinsi, <i>ceteris paribus</i> . Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

5) RASIO KEWIRAUSAHAAN (%)

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan (%)
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Rumus Perhitungan	$RK = \frac{\text{berusaha dibantu buruh tetap daerah}}{\text{total angkatan kerja daerah}} \times 100\%$ Dimana RK = Rasio kewirausahaan
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

6) TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+p)}} \times 100\%$ Ket : TPAK_p =Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%) PAK_p =Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) P_(15+p) =Jumlah penduduk Perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (<i>labor supply</i>) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

7) INDEKS INOVASI DAERAH (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja sasaran visi (II.G)

8) EKSPOR BARANG DAN JASA (% PDRB)

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah

	negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeaan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi
Rumus Perhitungan	$\%Ebj = \frac{Ebj}{PDRB ADHK} \times 100\%$ Ket : %Ebj = Persentase Ekport Barang dan Jasa Ebj = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

9) INDEKS INFRASTRUKTUR

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.FF)

10) PERSENTASE RT YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN LAYAK DAN TERJANGKAU (%)

Nama Indikator	Persentase RT yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%)
Definisi	Untuk menentukan "hunian layak dan terjangkau" menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sebuah rumah tangga harus memenuhi empat kriteria utama:

	<i>Kecukupan Luas Tempat Tinggal</i> : Minimal 7,2 meter persegi luas lahan per kapita. <i>Akses Air Minum Layak</i> : Memiliki akses ke sumber air minum yang memenuhi standar. <i>Akses Sanitasi Layak</i> : Memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memadai. <i>Ketahanan Bangunan</i> : Memiliki atap, dinding, dan lantai yang terbuat dari material yang kokoh dan tahan lama (misalnya, beton, genteng, tembok, keramik, dll.)
Rumus Perhitungan	$\%RThunianlayakterjangkau = \frac{jmlRThunianlayakterjangkau}{jmlRT} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar angka persentase menunjukkan semakin besar RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau .
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

11) RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	a. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. b. PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. c. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$RPDRB_t = \frac{tax_t}{PDRB_t} \times 100\%$ Keterangan : RPDRB_t = Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t tax_t = Penerimaan Pajak Daerah pada tahun t PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak

	daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah
Sumber Data	BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan Data Triwulanan sesuai dengan rilis PDRB

12) TINGKAT INFLASI (%)

Nama Indikator	Tingkat Inflasi (%)
Definisi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.
Rumus Perhitungan	$TI = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan <i>the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP)</i> 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK
Interpretasi	Perubahan IHK menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi menjadi tiga: - Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember). - Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. - Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi <i>year-on-year</i> September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (catatan : Hingga saat ini BPS tidak me-release data inflasi tingkat Provinsi, melainkan inflasi tingkat Kabupaten/ Kota IHK. Sehingga perlu mendorong BPS untuk dapat mempublikasi tingkat inflasi di tingkat Provinsi
Frekuensi	Bulanan

13) PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (% PDRB)

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi
Rumus Perhitungan	$\%PMTB = \frac{PMTB}{PDRB\ ADHK} \times 100\%$ Ket : %PMTB = Pembentukan PMTB PMTB = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (<i>financial leasing</i>), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (<i>financial leasing</i>). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulan dan Tahunan

14) TOTAL DANA PIHAK KETIGA / PDRB (%)

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPRBPRS) di suatu daerah provinsi.

	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\%DPK = \frac{DPK}{PDRB} \times 100$ Keterangan : %DPK = Rasio Dana Pihak Ketiga DPK = Total Dana Pihak Ketiga Bank Umum+Total Dana Pihak Ketiga BPRS-BPRS (di suatu Kota) PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Atas Dasar Harga Berlaku)
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Total Dana Pihak Ketiga diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan PDRB diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Total Dana Pihak Ketiga : Bulanan PDRB : Triwulan

15) NILAI TRANSAKSI SAHAM PER KAPITA (Rp)

Nama Indikator	Nilai Transaksi Saham per Kapita (rupiah)
Definisi	Nilai transaksi saham per kapita menunjukkan nilai transaksi saham per kepala atau persatu orang penduduk di suatu wilayah. Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.
Rumus Perhitungan	$ntr = \frac{nts}{12 * populasi}$ Keterangan : ntr = Nilai transaksi saham berupa nilai rata – rata tahunan nts = Nilai transaksi investor saham per provinsi selama setahun populasi= Jumlah penduduk suatu wilayah
Interpretasi	Untuk mengukur size dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur

	tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham, pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan.
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan
Frekuensi	Tahunan

16) TOTAL KREDIT/PDRB (%)

Nama Indikator	Total Kredit/PDRB (%)
Definisi	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di suatu wilayah. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/ wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Total Kredit/ PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu wilayah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) wilayah tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$rtk = \frac{tk}{PDRB} 100$ Keterangan : rtk = Rasio Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS terhadap PDRB tk = Rasio Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Atas Dasar Harga Berlaku)
Interpretasi	Total Kredit/ PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di wilayah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit/ PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian wilayah tersebut.
Sumber Data	Total Kredit diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dan PDRB diperoleh dari Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Total Kredit : Bulanan

	PDRB : Triwulan

17) RASIO PDRB SEKTOR JASA KEUANGAN (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)
Definisi	Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Jasa Keuangan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor Jasa Keuangan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan} = \frac{\text{Nilai Tambah Jasa Keuangan}}{\text{Nilai PDRB Kota Payakumbuh}} \times 100$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait jasa keuangan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan

18) RASIO PDRB SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Definisi	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah persen bagian PDB regional yang berkontribusi oleh aktivitas terkait pertanian, kehutanan dan perikanan.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDB}_{PKP} = \frac{\Delta PKP}{PDRB} \times 100\%$ Dimana : Rasio PDB_{PKP} merupakan rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan ΔPKP = nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pertanian, kehutanan dan perikanan maka semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

D. ASPEK PELAYANAN UMUM

1. LAYANAN URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR

a) URUSAN PENDIDIKAN

1) RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.J)

2) ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – APK PAUD (%)

Nama Indikator	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini – APK PAUD (%)
Definisi	Indikator yang mengukur tingkat partisipasi anak dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) tanpa memandang usia mereka
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah Siswa PAUD} / \text{Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun}) \times 100\%$
Interpretasi	APK tinggi (mendekati 100%): Menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam pendidikan PAUD, tetapi bisa juga berarti ada banyak anak yang tidak sesuai usia yang masuk PAUD. APK rendah: Menunjukkan bahwa masih banyak anak usia PAUD yang belum mendapatkan akses pendidikan di jenjang ini. Nilai ideal: Nilai ideal untuk APK PAUD adalah 100%, yang berarti semua anak usia sekolah (3-6 tahun) terdaftar di PAUD
Sumber Data	Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

3) ANGKA PARTISIPASI KASAR SEKOLAH DASAR DAN SEDERAJAT - APK SD/MI/Paket A (%)

Nama Indikator	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar dan Sederajat - APK SD/MI/PAKET A (%)
Definisi	Mengukur proporsi seluruh siswa yang terdaftar di SD/MI/Paket A, tanpa memandang usia mereka, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah dasar (umumnya 7-12 tahun)
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah murid SD/MI/Paket A} / \text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}) \times 100\%$
Interpretasi	APK = 100%: Semua penduduk usia 7-12 tahun terdaftar di SD/MI/Paket A. Ini adalah kondisi ideal. APK > 100%: Ada siswa yang usianya di luar 7-12 tahun yang juga bersekolah di SD/MI/Paket A. Ini bisa karena berbagai faktor seperti keterlambatan masuk sekolah atau melanjutkan pendidikan setelah putus sekolah. APK < 100%: Ada sebagian penduduk usia 7-12 tahun yang belum terdaftar di SD/MI/Paket A. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam akses pendidikan. Perlu dicatat bahwa APK adalah indikator kasar dan tidak memberikan informasi mengenai kualitas pendidikan atau alasan ketidakterlibatan siswa. Untuk mendapatkan

	gambaran yang lebih lengkap, perlu juga mempertimbangkan indikator lain.
Sumber Data	Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

4) ANGKA PARTISIPASI KASAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEDERAJAT - APK SMP/MTs/Paket B (%)

Nama Indikator	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat - APK SMP/MTs/PAKET B (%)
Definisi	Rasio jumlah siswa, tanpa memandang usia mereka, yang bersekolah di tingkat SMP/MTs/Paket B, dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah pada umumnya untuk tingkat tersebut (biasanya usia 13-15 tahun)
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{(Jumlah siswa pada tingkat SMP/MTs/Paket B)}}{\text{(Jumlah penduduk usia 13-15 tahun)}} \times 100\%$
Interpretasi	APK tinggi: Menunjukkan bahwa banyak anak usia sekolah (13-15 tahun) yang bersekolah di SMP/MTs/Paket B, bahkan mungkin ada siswa yang berusia di luar rentang usia tersebut. APK rendah: Menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah yang belum atau tidak bersekolah di SMP/MTs/Paket B
Sumber Data	Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

5) ANGKA PARTISIPASI MURNI SEKOLAH DASAR DAN SEDERAJAT - APM SD/MI/Paket A (%)

Nama Indikator	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar dan Sederajat - APK SD/MI/PAKET A (%)
Definisi	Mengukur tingkat partisipasi murni, yaitu berapa banyak anak usia sekolah yang benar-benar bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{(Jumlah siswa usia 7-12 tahun di SD/MI/Paket A)}}{\text{(Jumlah penduduk usia 7-12 tahun)}} \times 100\%$
Interpretasi	- APM 100% menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah telah bersekolah di tingkat dasar pada usia yang seharusnya. - APM di bawah 100% menunjukkan adanya anak usia sekolah yang belum bersekolah, atau bersekolah di luar usia yang seharusnya (misalnya, anak usia SD/MI/Paket A yang masih bersekolah di PAUD, atau anak usia 13 tahun ke atas yang masih bersekolah di SD/MI/Paket A). APM yang rendah dapat menjadi indikasi adanya kendala aksesibilitas atau faktor lain yang menyebabkan anak-anak tidak bersekolah pada usia yang tepat
Sumber Data	Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

Frekuensi	Tahunan

6) ANGKA PARTISIPASI MURNI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEDERAJAT - APM SMP/MTs/Paket B (%)

Nama Indikator	Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat - APK SMP/MTs/PAKET B (%)
Definisi	Persentase murid usia 13-15 tahun yang sedang menempuh pendidikan di tingkat SMP/MTs/Paket B (setara SMP) dari total penduduk usia 13-15 tahun
Rumus Perhitungan	$\left(\frac{\text{Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	☐ APM membantu pemerintah dan lembaga pendidikan dalam memantau dan mengevaluasi tingkat partisipasi pendidikan di tingkat SMP/MTs. ☐ Data APM dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan partisipasi dan merencanakan program pendidikan yang lebih efektif. ☐ APM juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat partisipasi pendidikan antar wilayah atau antar kelompok sosial
Sumber Data	Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

7) CAKUPAN PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.CC)

8) PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN (SD/SMP) YANG TERAKREDITASI A (%)

Nama Indikator	Persentase Satuan Pendidikan (SD/SMP) yang Terakreditasi (%)
Definisi	Ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah mendapatkan peringkat akreditasi "A" (Unggul/Amat Baik) dibandingkan dengan total keseluruhan jumlah SD/SMP di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Peringkat akreditasi A menandakan bahwa sekolah tersebut telah mencapai standar kualitas yang sangat baik, biasanya dengan rentang nilai yang tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rumus Perhitungan	$\left(\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan SD/SMP Terakreditasi A}}{\text{Jumlah Total Satuan Pendidikan SD/SMP}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	• Satuan Pendidikan: Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang tertentu, baik jalur formal, nonformal, maupun informal. Dalam konteks SD/SMP,

	ini merujuk pada sekolah formal yang melaksanakan pendidikan pada jenjang dasar. • Terakreditasi A: Merupakan hasil Penilaian tertinggi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang menunjukkan bahwa satuan pendidikan telah mencapai standar kualitas yang sangat baik berdasarkan 8 (delapan) standar Nasional Pendidikan. • 8 Standar Pendidikan: Kriteria penilaian akreditasi mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, serta standar penilaian. Secara sederhana, SD/SMP Terakreditasi A memiliki kualitas yang sangat baik dalam menjalankan proses pendidikan dan telah mencapai standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah
Sumber Data	Badan Akreditasi Sekolah
Frekuensi	Tahunan

9) PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI MINIMUM PADA ASESMEN TINGKAT NASIONAL UNTUK LITERASI (%)

Nama Indikator	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Literasi (%)
Definisi	Proporsi dari seluruh satuan pendidikan yang hasil asesmen literasi memenuhi atau melampaui tingkat minimum yang telah ditetapkan
Rumus Perhitungan	Nilai AN Literasi dari Rapor Pendidikan
Interpretasi	- Tinggi: Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di satuan pendidikan tersebut memiliki kemampuan literasi membaca yang memadai, sesuai dengan standar yang ditetapkan. - Rendah: Persentase yang rendah menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum mencapai tingkat kemampuan minimum dalam literasi membaca. - Analisis: Data persentase ini dapat digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan literasi membaca di berbagai satuan pendidikan, serta sebagai dasar untuk perbaikan pembelajaran
Sumber Data	Rapor Pendidikan (Kemendikbud)
Frekuensi	Tahunan

10) PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI MINIMUM PADA ASESMEN TINGKAT NASIONAL UNTUK: NUMERASI (%)

Nama Indikator	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Numerasi (%)
Definisi	Ukuran yang menunjukkan proporsi sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria minimum dalam kemampuan numerasi, yang diukur melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)
Rumus Perhitungan	Nilai AN Numerasi dari Rapor Pendidikan
Interpretasi	- Tinggi (di atas 75%): Sebagian besar satuan pendidikan mencapai SKM, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di sekolah-sekolah tersebut memiliki kemampuan numerasi yang baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ini adalah hasil yang positif dan menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan dalam bidang numerasi telah efektif. - Sedang (50% - 75%): Cukup banyak satuan pendidikan yang mencapai SKM, tetapi masih ada sebagian yang belum. Ini menunjukkan bahwa ada variasi dalam pencapaian kompetensi numerasi di berbagai sekolah. Peningkatan perlu dilakukan di sekolah-sekolah yang masih di bawah standar. Rendah (di bawah 50%) : Sebagian besar satuan pendidikan belum mencapai SKM, menandakan bahwa sebagian besar siswa di sekolah-sekolah tersebut belum memiliki kemampuan numerasi yang memadai. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dan membutuhkan intervensi yang lebih intensif untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa di sekolah-sekolah tersebut
Sumber Data	Rapor Pendidikan (Kemendikbud)
Frekuensi	Tahunan

11) PROPORSI PENDUDUK BERUSIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BERKUALIFIKASI PENDIDIKAN TINGGI (%)

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
Definisi	Proporsi ini merupakan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan sampai pada pendidikan tinggi.
Rumus Perhitungan	$PT = \frac{P(15+)_{PT}}{P(15+)} \times 100\%$ Dimana : PT = % Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi $P(15+)_{PT}$ = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan tinggi

	PT(15+) = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas
Interpretasi	Semakin besar persentasenya menandakan semakin baiknya akses masyarakat suatu wilayah dalam menempuh pendidikan tinggi
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

b) URUSAN KESEHATAN

1) JUMLAH KEMATIAN IBU (JIWA)

Nama Indikator	Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)
Definisi	Indikator ini menunjukkan jumlah kematian ibu selama kehamilan, persalinan atau dalam 42 hari setelah melahirkan
Rumus Perhitungan	$jki = kki_n$ dimana : jki = jumlah kematian ibu (jiwa) kki _n = kasus kematian ibu pada tahun berkenaan
Interpretasi	Jumlah kematian ibu menjadi indikator penting menilai kualitas layanan kesehatan ibu di suatu wilayah, yang berarti dengan layanan yang berkualitas kasus kematian ibu dapat ditekan atau tidak ada sama sekali
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

2) CAKUPAN PENEMUAN DAN PENGobatan KASUS TUBERKULOSIS (TREATMENT COVERAGE) (%)

Nama Indikator	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) (%)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting : a. Penemuan Kasus merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.

	b. Pengobatan Kasus merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Data Program Kementerian
Frekuensi	Tahunan

3) ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS (*TREATMENT SUCCESS RATE*) (%)

Nama Indikator	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) (%)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibagi dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

4) CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (%)

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. $\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{jumlah peserta JKN}}{\text{jumlah penduduk Indonesia}} \times 100\%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: a. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. b. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

	c. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. d. Pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS DJSN
Frekuensi	Tahunan

5) INDEKS KELUARGA SEHAT

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.B.8)

6) PREVALENSI STUNTING BERDASARKAN E-PPGBM (%)

Nama Indikator	Prevalensi Stunting berdasarkan E-PPGBM (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Z-score < -3,0 b. Pendek: Z-score ≥ -3,0 s/d Z-score < -2,0
Rumus Perhitungan	(1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P_{stuntin} = \frac{JAB(5)P_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan : $PAB(5)P_{stuntin}$ = Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting) $JAB(5)P_{stuntin}$ = Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu $JAB(5)$ = Jumlah anak balita pada waktu yang sama
Interpretasi	Kategori ambang batas status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) dan Tinggi Badan menurut Umur (TB/U): Sangat pendek : <-3 SD Pendek : -3 SD sampai <-2 SD Normal : -2 SD sampai 2 SD Tinggi : >2 SD

Sumber Data	Data E-PPGBM Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

c) URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1) KAPASITAS AIR BAKU (M³/DETIK)

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)
Definisi	Air baku adalah jenis air yang menjadi sumber pokok untuk diolah menjadi air minum
Rumus Perhitungan	$Q = C I A \text{ m}^3/\text{detik}$ Keterangan : Q : besarnya kapasitas debit air baku C : koefisien pengaliran I : intensitas hujan mm/hari A : luas DAS m ²
Interpretasi	Air baku merupakan tahapan awal dalam siklus penyediaan air bersih kepada masyarakat yang dapat bersumber dari air permukaan maupun air tanah. Kualitas air baku sangat penting karena akan berdampak langsung pada kualitas air minum yang dihasilkan.
Sumber Data	Dinas PUPR Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

2) PERSENTASE INFRASTRUKTUR DAERAH YANG DIBANGUN SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG (%)

Nama Indikator	Persentase Infrastruktur Daerah yang Dibangun sesuai dengan Rencana Tata Ruang (%)
Definisi	Mengukur proporsi pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang
Rumus Perhitungan	Perbandingan antara jumlah/ panjang infrastruktur yang telah dibangun kewenangan Dinas PUPR (Jalan, drainase, irigasi, trotoar, SPAM, prasarana sampah dan sanitasi) dibandingkan dengan rencana sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Interpretasi	Mengindikasikan seberapa baik pembangunan infrastruktur di suatu daerah mengikuti rencana telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW)
Sumber Data	Dinas PUPR Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

3) INDEKS PENGATURAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN TATA RUANG (%)

Nama Indikator	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Tata Ruang (%)

Definisi	indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penataan ruang
Rumus Perhitungan	<i>20% capaian aspek pengaturan + 15% capaian aspek pembinaan + 25% capaian aspek perencanaan + 20% capaian aspek pemanfaatan + 20% capaian aspek pengendalian.</i>
Interpretasi	Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan tata ruang digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam memantau dan mengevaluasi sejauh mana aturan, bimbingan, dan implementasi tata ruang telah berjalan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku.
Sumber Data	Dinas PUPR Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

4) AKSES RUMAH TANGGA TERHADAP SUMBER AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN (%)

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)
Definisi	Jumlah RT yang terlayani jaringan perpipaan dibandingkan dengan jumlah RT kota Payakumbuh secara keseluruhan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah RT yang terlayani jaringan aman perpipaan}}{\text{Jumlah RT keseluruhan}} \times 100\%$
Interpretasi	Menunjukkan proporsi rumah tangga yang mendapatkan air minum langsung dari sistem jaringan perpipaan, yang disediakan oleh PDAM atau sistem penyediaan air perpipaan lainnya
Sumber Data	Dinas PUPR, BPS
Frekuensi	Tahunan

d) URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1) PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI (%)

Nama Indikator	Persentase Rumah Layak Huni (%)
Definisi	Terlaksananya peningkatan kualitas RTLH
Rumus Perhitungan	Persentase Rumah Layak Huni = Jumlah Rumah Layak Huni dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah
Interpretasi	Semakin tinggi persentase rumah layak huni semakin kecil masyarakat yang memiliki rumah dengan kualitas rusak sedang dan berat
Sumber Data	Pelaksanaan kegiatan
Frekuensi	Tahunan

2) PERSENTASE RT YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN LAYAK DAN TERJANGKAU (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.C.10)

3) PERSENTASE PSU PERUMAHAN YANG DIBANGUN PENGEMBANG YANG TELAH DIKELOLA OLEH PEMERINTAH KOTA (%)

Nama Indikator	Persentase PSU Perumahan yang Dibangun Pengembang yang telah Dikelola oleh Pemerintah Kota (%)
Definisi	Terlaksananya pengelolaan oleh pemerintah daerah terhadap PSU perumahan yang dibangun pengembang baik dalam bentuk serah terima maupun intervensi peningkatan dari PSU perumahan tersebut
Rumus Perhitungan	$\% = \frac{a}{b}$ a : PSU perumahan yang telah dikelola oleh pemerintah daerah baik yang telah difasilitasi serah terima PSU maupun yang telah dilakukan intervensi peningkatan dan Pembangunan b : Jumlah perumahan yang ada di Kota Payakumbuh
Interpretasi	Semakin besar angka persentase menunjukkan semakin besar PSU perumahan yang telah diserahterimakan dan atau yang telah dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah.
Sumber Data	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

e) URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1) PERSENTASE PENEGAKAN PERDA (%)

Nama Indikator	Persentase Penegakan Perda (%)
Definisi	Persentase jumlah Perda dan Perkada yang telah ditegakkan oleh Satpol PP dibandingkan dengan total jumlah Perda dan Perkada yang menjadi target penegakan pada tahun berjalan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Pengaduan yang Masuk}} \times 100\%$ Keterangan : Jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk bisa melalui social media, telepon, dan pengaduan langsung.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin efektif penegakan Perda dan Perkada di daerah tersebut.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

2) ANGKA KRIMINALITAS (PER 1000 PENDUDUK) (%)

Nama Indikator	Angka Kriminalitas (per 1000 Penduduk) (%)
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah kejahatan yang dilaporkan dalam suatu wilayah dalam satu tahun, dinyatakan sebagai jumlah kejahatan per 1000 penduduk. Ini

	memberikan gambaran tentang tingkat kejahatan relatif dalam populasi yang diberikan untuk menilai tingkat keamanan daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk)} = \frac{\text{Jumlah Kejahatan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi angka kriminalitas, maka semakin tidak aman suatu daerah. Sebaliknya semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin aman suatu daerah. Tujuannya adalah memantau dan menganalisis tren kriminalitas untuk keperluan kebijakan keamanan dan pencegahan kejahatan.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

3) PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN TRANTIBUM (%)

Nama Indikator	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum (%)
Definisi	Mengukur efektivitas kegiatan pengawasan dan penegakan Perda oleh Satpol PP dalam menurunkan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibandingkan periode sebelumnya.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Pelanggaran Tahun } (n - 1) - \text{Pelanggaran Tahun } n}{\text{Pelanggaran Tahun } n - 1} \times 100\%$ Keterangan: • Pelanggaran tahun n-1 merupakan jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahun sebelumnya • Pelanggaran tahun n merupakan jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahun ini (tahun perhitungan).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif pengawasan Perda dan Perkada yang dilakukan di Kota Payakumbuh
Sumber Data	Satpol PP dan Damkar
Frekuensi	Tahunan

4) PESENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN (%)

Nama Indikator	Pesentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (%)
Definisi	Persentase jumlah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhasil ditangani dan diselesaikan oleh Satpol PP dalam kurun waktu tertentu.

Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Pengaduan yang Masuk}} \times 100\%$ Keterangan : Jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk bisa melalui sosial media, telepon, dan pengaduan langsung.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase penyelesaian pengaduan, semakin bagus kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sumber Data	Laporan Bulanan Bidang Tibum Tranmas dan Bidang Penegakan Peraturan Daerah
Frekuensi	Tahunan

f) URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1) PERSENTASE WARGA KOTA PAYAKUMBUH YANG MENERIMA PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA (%)

Nama Indikator	Persentase Warga Kota Payakumbuh yang Menerima Pelayanan Penanggulangan Bencana (%)
Definisi	Persentase warga kota Payakumbuh yang menerima serangkaian pelayanan dan Tindakan untuk mencegah, mengurangi risiko, merespons, dan memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang bersifat alam, non-alam, maupun sosial yang berhasil ditangani dan diselesaikan oleh BPBD dalam kurun waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana} + \text{Persentase penanganan tanggap bencana darurat} + \text{Persentase Penanganan Pasca Bencana}}{3}$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase pelayanan yang diberikan, semakin bagus kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi	Tahunan

g) URUSAN SOSIAL

1) TINGKAT KEMISKINAN (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.B)

2) PERSENTASE PPKS YANG TERLAYANI (%)

Nama Indikator	Persentase PPKS yang terlayani (%)
Definisi	Indikator ini mengukur persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi layanan sosial oleh pemerintah dan/atau lembaga kesejahteraan sosial.

Rumus Perhitungan	$\%PPK\text{Sterlayani} = \frac{jPPK\text{Sterlayani}}{JtotPPKS} \times 100$ Keterangan: • %PPKSterlayani = Persentase PPKS terlayani • jPPKSterlayani = Jumlah PPKS terlayani • JtotPPKS = Jumlah seluruh PPKS
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau kelompok rentan melalui layanan sosial
Sumber Data	Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

3) PERSENTASE PENERIMA MANFAAT YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA (%)

Nama Indikator	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)
Definisi	Indikator ini mengukur persentase penerima manfaat yang telah terpenuhi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, air bersih, sanitasi, perumahan, pendidikan dan layanan kesehatan.
Rumus Perhitungan	$\%PM\text{terpenuhi} = \frac{jPM\text{terpenuhi}}{JtotPM} \times 100$ Keterangan: • %Pmterpenuhi =Persentase Penerima Manfaat terpenuhi kebutuhan dasarnya • jPMterpenuhi =Jumlah Penerima Manfaat terpenuhi kebutuhan dasarnya • JtotPM =Jumlah seluruh Penerima Manfaat
Interpretasi	tingkat pencapaian yang tinggi menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memberikan manfaat yang signifikan bagi penerimanya
Sumber Data	Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

2. LAYANAN URUSAN WAJIB TERKAIT NON PELAYANAN DASAR

a) URUSAN KETENAGAKERJAAN

1) TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (Rp. JUTA/ TENAGA KERJA)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja sasaran visi (II.I)

2) TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk

	usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas
Rumus Perhitungan	$TPAK = \frac{PAK}{P} \times 100\%$ dimana : TPAK = Tingkat partisipasi angkatan kerja PAK = Jumlah angkatan kerja P = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

3) PROPORSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA FORMAL (%)

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Definisi	Indikator
Rumus Perhitungan	$P_f = \frac{jlkf}{tplk} \times 100$ dimana : P_f = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal jlkf = Jumlah lapangan kerja formal tplk = Total penciptaan lapangan kerja
Interpretasi	Semakin tinggi proporsinya lapangan kerja formal semakin terjaminnya kondisi pekerja di suatu wilayah
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

4) TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (III.C.6)

5) TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja makro (I.C)

6) PERSENTASE PENYERAPAN TENAGA KERJA (%)

Nama Indikator	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)
Definisi	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja adalah ukuran yang menunjukkan berapa besar bagian dari Angkatan kerja

	yang berhasil mendapatkan pekerjaan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	$PPTK = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase penyerapan tenaga kerja menunjukkan jumlah Angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja, sisanya menunjukkan jumlah pengangguran
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (diolah)
Frekuensi	Tahunan

7) PERSENTASE PEKERJA LULUSAN PENDIDIKAN MENENGAH TINGGI BEKERJA DI BIDANG KEAHLIAN MENENGAH TINGGI (%)

Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
Definisi	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja adalah ukuran yang menunjukkan berapa besar bagian dari Angkatan kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Persentase ini merupakan persentase dari penduduk dengan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja pada bidang keahlian menengah tinggi
Rumus Perhitungan	$\%LMT = LMT \text{ PMT} \times 100\%$ dimana : $\%LMT$ = % Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi LMT = Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi PMT = Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi
Interpretasi	Semakin besar persentasenya menandakan baiknya kondisi ekonomi pada suatu wilayah dimana telah dapat menampung pekerja sesuai pendidikannya
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

8) CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN/ CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.B.13)

9) JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS YANG MENDAPATKAN FASILITASI DARI UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN/ATAU DARI DINAS YANG MENANGANI BIDANG KETENAGAKERJAAN (%)

Nama Indikator	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/ atau dari Dinas yang Menangani Bidang Ketenagakerjaan (%)
Definisi	Keberadaan Angkatan kerja penyandang disabilitas harus mendapat perhatian khusus pemerintah daerah. Keterbatasan yang mereka miliki seharusnya tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karena keterbatasannya, Penyandang disabilitas memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih rendah dibandingkan non-penyandang disabilitas. Hal ini juga menyebabkan Sebagian besar dari Angkatan kerja penyandang disabilitas ini berada di level 40 % ekonomi terendah. Sesuai dengan undangn – undang dan pelaksanaan Pembangunan ekonomi yang inklusif maka fasilitas terhadap Angkatan kerja penyandang disabilitas ini menjadi suatu keharusan bagi pemerintah.
Rumus Perhitungan	<i>Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau Dari Dinas yang menangani bidang ketengakerjaan = Jumlah Angkatan kerja penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas ketenagakerjaan dari unit layanan ketenagakerjaan pemerintah daerah</i>
Interpretasi	Semakin tinggi Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau Dari Dinas yang menangani bidang ketengakerjaan, menunjukkan semakin besar perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas tersebut, yang menunjukkan berjalannya inklusifitas Pembangunan (Pembangunan untuk semua)
Sumber Data	Dinas yang mengampu urusan ketenagakerjaan
Frekuensi	Semesteran, Tahunan

10) JUMLAH UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN DI TINGKAT KAB/KOTA (UNIT LAYANAN)

Nama Indikator	Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di Tingkat Kab/Kota (unit layanan)
Definisi	Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang ketenagakerjaan adalah fasilitas layanan yang dirancang untuk membantu penyandang disabilitas mendapatkan hak dan layanan secara inklusif dan adil khususnya terkait ketenagakerjaan.

	ULD Ketenagakerjaan berfungsi sebagai jembatan antara penyandang disabilitas dan dunia kerja untuk menciptakan ketenagakerjaan yang inklusif, adil, dan setara, baik dari sisi pelatihan, penempatan, hingga adaptasi kerja. Berdasarkan Permenaker No. 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan ULD Ketenagakerjaan, berikut adalah fungsi-fungsi ULD secara rinci: - Fasilitasi Akses Kerja untuk Penyandang Disabilitas - Pemberian Konseling Karir dan Bimbingan - Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan - Pemberdayaan dan Penempatan Kerja - Fasilitasi kepada Pemberi Kerja - Penyuluhan dan Advokasi - Koordinasi dan Kemitraan
Rumus Perhitungan	<i>Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di Tingkat Kab/Kota</i>
Interpretasi	Ada tidaknya unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan menunjukkan perhatian dan keseriusan pemerintah dalam pelayanan untuk semua, khususnya penyandang disabilitas.
Sumber Data	Dinas yang mengampu urusan ketenagakerjaan
Frekuensi	Semesteran, Tahunan

b) URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1) INDEKS KETIMPANGAN GENDER – IKG (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.H)

2) INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.C.16)

3) INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Anak (Indeks)
Definisi	Angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus
Rumus Perhitungan	$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times \text{Indeks } K_j)$ Formula ini digunakan untuk menghitung Indeks Perlindungan Anak (IPA), yaitu indikator komposit yang

	mengukur tingkat perlindungan anak di suatu wilayah (misalnya kota, kabupaten, atau provinsi). Berikut penjelasan setiap komponennya: • IPA = Nilai akhir Indeks Perlindungan Anak. • Σ = Simbol penjumlahan (sigma) yang menunjukkan bahwa perhitungan dilakukan untuk semua komponen. • j = 1 sampai 5 = Menandakan bahwa ada 5 dimensi atau klaster yang dinilai dalam perlindungan anak. • W_j = Bobot untuk dimensi ke-j. Setiap dimensi memiliki bobot yang mencerminkan tingkat kepentingannya. • Indeks K_j = Nilai indeks untuk dimensi ke-j, yang diperoleh dari pengukuran indikator-indikator spesifik di bidang tersebut. Secara sederhana, formula ini menunjukkan bahwa nilai IPA adalah penjumlahan dari hasil perkalian bobot tiap dimensi (W_j) dengan skor indeks dimensi tersebut (Indeks K_j). Contoh Dimensi Perlindungan Anak (K_j): 1. Hak Sipil dan Kebebasan Anak 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya 5. Perlindungan Khusus
Interpretasi	Nilai IPA tinggi, semakin baik upaya pemerintah dalam perlindungan anak
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

4) INDEKS PEMBANGUNAN GENDER – IPG (ANGKA)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.B.19)

5) TINGKAT KATEGORI CAPAIAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA – APE (KATEGORI)

Nama Indikator	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya – APE (Kategori)
Definisi	Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kepada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen dan prestasi dalam penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mewujudkan kesetaraan gender. Ada empat kategori capaian dalam APE, yang mencerminkan tingkat kematangan pelaksanaan PUG: • Pratama (Pemula) • Madya (Pengembang)

	• Utama (Peletakan dasar & keberlanjutan) Mentor (Pembina/pemimpin)
Rumus Perhitungan	Penilaian APE berdasarkan tujuh komponen/prasyarat utama PUG , yaitu: 1. Komitmen (misalnya peraturan daerah/perbup PUG), 2. Kebijakan (RPJMD, Renstra OPD, surat keputusan terkait PUG), 3. Kelembagaan (Pokja PUG, analisis teknis, focal point), 4. Sumber daya (anggaran, SDM), 5. Sistem informasi dan data terpilah gender, 6. Alat analisis gender, 7. Partisipasi masyarakat Belum dipublikasikan rumus matematis publik yang menjelaskan pengolahan atau pemeringkatan. Penilaian dilakukan melalui penginputan di Aplikasi KPPPA, untuk diverifikasi oleh tim independen.
Interpretasi	Skala kategori APE mencerminkan tingkat kematangan dan komitmen daerah dalam PUG , dari tahap pemula hingga mentor/pembina.
Sumber Data	Kementerian PPPA
Frekuensi	Setiap dua tahun sekali (biennial)

6) TINGKAT KATEGORI CAPAIAN KOTA LAYAK ANAK – KLA (KATEGORI)

Nama Indikator	Tingkat Kategori Capaian Kota Layak Anak – KLA (Kategori)
Definisi	Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang menerapkan sistem pembangunan berbasis hak anak . Sistem ini mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan guna menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak di wilayah tersebut
Rumus Perhitungan	Penilaian KLA berbasis skor komposit yang dihitung dari berbagai indikator kelembagaan dan klaster. Berdasarkan Permen PPPA No. 12 Tahun 2011, indikator KLA terdiri dari: 1. Penguatan Kelembagaan (3 indikator), misalnya adanya peraturan daerah, gugus tugas, dan data Profil Anak setiap tahun. 2. Lima Klaster Hak Anak (total 24 indikator), meliputi: - o Hak Sipil dan Kebebasan - o Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif - o Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan - o Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya Perlindungan Khusus
Interpretasi	Hasil penilaian ini kemudian menghasilkan peringkat capaian KLA , biasanya berupa kategori (misalnya Pratama, Madya, Utama, Mentor), meski struktur kategorial ini lebih umum

	ditemukan di APE. Semakin banyak indikator yang terpenuhi , semakin tinggi skor dan kategori capaian KLA.
Sumber Data	Permen PPPA, laporan pemda, verifikasi tim evaluasi
Frekuensi	Tahunan

7) PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD (%)

Nama Indikator	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)
Definisi	Presentasi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang memiliki dampak positif langsung terhadap pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketimpangan gender.
Rumus Perhitungan	$ARG = \left(\frac{\text{Anggaran Responsif Gender}}{\text{Total Anggaran Pemerintah}} \right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Anggaran Responsif Gender Merupakan total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang memiliki tujuan atau hasil yang jelas terkait dengan pemberdayaan perempuan dan pengurangan kesenjangan gender. Ini bisa mencakup: - o Program pendidikan untuk perempuan - o Layanan kesehatan yang ramah gender - o Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan - o Infrastruktur yang mendukung kesetaraan gender - o Proyek pengurangan kemiskinan berbasis gender Total Anggaran Pemerintah Adalah total anggaran yang disetujui untuk setiap tahun oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup seluruh sektor tanpa memperhitungkan dimensi gender.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan responsif gender
Sumber Data	Dokumen Anggaran Pemerintah (APBN/APBD), Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

8) PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI INSTANSI TERKAIT KABUPATEN/KOTA (%)

Nama Indikator	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota (%)
Definisi	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/ Kota merupakan persentase anak korban kekerasan (fisik, seksual, psikis) yang memperoleh akses penuh terhadap layanan yang komprehensif dari lembaga pemerintah dan mitra terkait
Rumus Perhitungan	$\% \text{anak terlayani} = \frac{\text{jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait}}{\text{total anak korban kekerasan}} \times 100\%$

	Dimana : %anakterlynifas =Persentase anak korban kekerasan yang dilayani instansi terkait janakkrbnterlynifas =Jumlah anak korban kekerasan yang dilayani instansi terkait jtotanakkrbn =Jumlah anak korban kekerasan
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik ketersediaan layanan bagi anak korban kekerasan
Sumber Data	DP3AP2KB
Frekuensi	Tahunan

c) URUSAN PANGAN

1) KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA

Nama Indikator	Ketersediaan Pangan Utama
Definisi	Penyediaan pangan yang di ukur menggunakan salah satu instrumen yang ada pada Prognosa Neraca Pangan yaitu pengadaan/ penyediaan pangan (Food Supply)
Rumus Perhitungan	penyediaan pangan (Food Supply) $FD = O - (\Delta St) + M - X - (F + S + I + W + Rou)$ dimana : FD : Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk O : Produksi (input / output) ΔSt : Stok akhir - Stok awal M : Impor X : Ekspor F : Pakan S : Bibit I : Industri W : Tercecer Rou : Penggunaan lain
Interpretasi	Ketersediaan pangan utama adalah komoditi beras untuk dikonsumsi
Sumber Data	Prognosa Neraca Pangan
Frekuensi	Bulanan

2) PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.D)

3) SKOR PPH KONSUMSI

Nama Indikator	Skor PPH Konsumsi
Definisi	Nilai kualitas keragaman konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.
Rumus Perhitungan	Mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok pangan (Padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/ biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, aneka bumbu dan bahan minuman). 2. Mengkonversi ke dalam bentuk, jenis, dan satuan yang sama. 3. Menghitung kandungan energi setiap komoditas pangan yang dikonsumsi dengan bantuan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM). Kolom energi dalam DKBM menunjukkan kandungan energi (kkal)per 100 gram bagian yang dapat dimakan. Selanjutnya besaran energi setiap jenis pangan dijumlahkan menurut kelompok pangannya. 4. Menjumlahkan total energi dari masing-masing kelompok pangan sehingga akan diketahui total energi dari seluruh kelompok pangan. 5. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual. 6. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap Angka kecukupan Energi ideal. 7. Menghitung skor aktual berdasarkan kontribusi aktual dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan. 8. Menghitung skor AKE setiap kelompok pangan dengan bobotnya masing-masing. 9. Menghitung skor PPH setiap kelompok pangan. 10. Menghitung Total Skor PPH.
Interpretasi	Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan bergizi seimbang konsumsi pangan penduduk.
Sumber Data	SUSENAS
Frekuensi	Tahunan

4) TINGKAT KEAMANAN PANGAN

Nama Indikator	Tingkat Keamanan Pangan
Definisi	Perbandingan keamanan pangan yang beredar di masyarakat yaitu jumlah sampel bahan pangan aman dikonsumsi hasil pengujian terhadap jumlah total sampel yang di uji.
Rumus Perhitungan	Jml sampel bahan pangan yg aman dikonsumsi apabila dibawah BMR (Batas Minimal Residu) dan tidak tercemar bahan yang dilarang $\frac{\text{Jumlah total sampel yang diambil}}{\text{Jumlah total sampel}} \times 100\%$
Interpretasi	Pangan aman merupakan pangan yang harus layak dikonsumsi yaitu pangan yang tidak busuk, tidak menjijikkan, dan bermutu baik, serta bebas dari tiga

	cemaran yaitu cemaran biologi, kimia dan cemaran fisik. Bahan pangan yang dikategorikan aman apabila $\geq 80\%$ sample yang diuji aman.
Sumber Data	Hasil uji sampel dari Laboratorium
Frekuensi	Tahunan

5) STABILISASI HARGA BERAS, CABE, DAN BAWANG (%)

Nama Indikator	Stabilitas Harga Beras, Cabe dan Bawang (%)
Definisi	Coefisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV) adalah indikator yang menggambarkan tingkat disparitas harga bahan pangan pokok dan strategis dipasar dimana Harga beras dinyatakan stabil jika gejolak harga beras di suatu wilayah kurang dari 10% dari kondisi normal, Harga cabe dinyatakan stabil jika gejolak harga cabe di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal, dan Harga bawang dinyatakan stabil jika gejolak harga bawang di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal
Rumus Perhitungan	$CV = (\text{Standar Deviasi} / \text{Rata rata harga tingkat konsumen}) \times 100\%$
Interpretasi	Koefisien Keragaman adalah simpangan baku dibagi dengan rata-rata. Digunakan untuk menunjukkan fluktuasi harga dalam satu periode. Koefisien keragaman yang semakin besar, maka data stabilitas harga akan semakin fluktuasi. Perhitungan ini sama untuk semua kebutuhan pokok
Sumber Data	Survei harga yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan
Frekuensi	Bulanan

6) INDEK KETAHANAN PANGAN

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.A.1)

d) URUSAN PERTANAHAN

1) INDEKS TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN (%)

Nama Indikator	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (%)
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana administrasi pertanahan berjalan tertib dan teratur sesuai dengan aturan yang berlaku.
Rumus Perhitungan	Indeks dengan pembobotan dari : $(65\% \text{ persentase capaian sertifikasi tanah pemkot} + 35\% \text{ capaian pemenuhan kebutuhan pertanahan}) \times 100$.
Interpretasi	Indeks ini mencerminkan kualitas dan efektivitas pengelolaan administrasi pertanahan, termasuk pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, dan pelayanan publik di bidang pertanahan. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan mencakup aspek tertib hukum, tertib

	administrasi, tertib penggunaan dan tertib pemeliharaan & lingkungan hidup
Sumber Data	Dinas PUPR Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

e) **URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

1) PERSENTASE TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.EE)

2) PERSENTASE RTH PUBLIK (%)

Nama Indikator	Persentase RTH Publik (%)
Definisi	Indikator yang mengukur proporsi luas ruang terbuka hijau (seperti taman, hutan kota, kebun, dan area vegetasi lainnya) terhadap total luas area yang tersedia dalam suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase RTH} = \left(\frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Wilayah}} \right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Luas RTH: Merupakan luas total ruang terbuka hijau yang ada dalam wilayah yang dihitung (biasanya dalam satuan meter persegi atau hektar). • Luas Wilayah: Merupakan luas total area atau wilayah yang dihitung (biasanya dalam satuan meter persegi atau hektar). • Hasil dari perhitungan ini kemudian dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase RTH, semakin baik kualitas lingkungan dan ketersediaan ruang untuk aktivitas rekreasi serta fungsi ekologis lainnya.
Sumber Data	Dinas Tata Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

3) INDEKS KUALITAS AIR (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Kualitas Air (Indeks)
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Rumus Perhitungan	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ii})_{2m} + (C_i/L_{ii})_{2R}}{2}}$ Dimana

	L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) C_i : Konsentrasi sampel Parameter kualitas air (i) IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j) IP_j : $(C_i/L_{ij}, C^2/L^2_j, \dots)$ $(C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}$: Nilai Maksimum dari C_i/L_{ij} $(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}}$: Nilai rata-rata dari C_{ij}/L_{ij}
Interpretasi	Kategori Index Lingkungan Hidup yaitu : a. sangat baik $90 \leq IKLH \leq 100$ b. baik $70 \leq IKLH \leq 90$ c. sedang $50 \leq IKLH \leq 70$ d. kurang $25 \leq IKLH \leq 50$ e. sangat kurang $0 \leq IKLH \leq 25$
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup
Frekuensi	Satu tahun

4) INDEKS KUALITAS UDARA (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Kualitas Udara (Indeks)
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Rumus Perhitungan	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{eu} - 0,1) \right)$
Interpretasi	Kategori Index Lingkungan Hidup yaitu : a. sangat baik $90 \leq IKLH \leq 100$ b. baik $70 \leq IKLH \leq 90$ c. sedang $50 \leq IKLH \leq 70$ d. kurang $25 \leq IKLH \leq 50$ e. sangat kurang $0 \leq IKLH \leq 25$
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup
Frekuensi	Satu tahun

5) INDEKS KUALITAS LAHAN (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)
Definisi	Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
Rumus Perhitungan	$IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$
Interpretasi	Kategori Index Lingkungan Hidup yaitu : a. sangat baik $90 \leq IKLH \leq 100$ b. baik $70 \leq IKLH \leq 90$

	c. sedang $50 \leq \text{IKLH} \leq 70$ d. kurang $25 \leq \text{IKLH} \leq 50$ e. sangat kurang $0 \leq \text{IKLH} \leq 25$
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup Aplikasi SITALA (sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
Frekuensi	Tahunan

6) PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KAB/ KOTA (%)

Nama Indikator	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota (%)
Definisi	Persentase jumlah sampah yang terkelola mencakup pengurangan sampah dan penanganan sampah
Rumus Perhitungan	$\text{Pengelolaan sampah} = (\text{jumlah pengurangan sampah} + \text{jumlah penanganan sampah}) / \text{total timbulan sampah} \times 100\%$
Interpretasi	Jumlah sampah terkelola: jumlah sampah yang dilakukan pembatasan, penggunaan kembali, pendaur ulangan serta jumlah sampah yang dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses akhir di TPST/TPA Kabupaten/Kota.
Sumber Data	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)
Frekuensi	2x per tahun

f) URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1) NILAI IKM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (NILAI)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.V)

2) PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK (%)

Nama Indikator	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (%)
Definisi	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan adalah Persentase Kepemilikan KIA ditambah Persentase Aktivasi IKD
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Persentase Kepemilikan KIA} + \text{Persentase aktivasi IKD}}{2} \times 100\%$
Interpretasi	- Semakin tinggi persentase, semakin baik kinerja administrasi kependudukan dan semakin besar akses masyarakat terhadap layanan dasar. - Angka rendah menunjukkan masih terdapat penduduk yang belum terlayani dalam kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga berpotensi mengalami keterbatasan dalam mengakses pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan lainnya).
Sumber Data	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri

Frekuensi	Tahunan

3) PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL (%)

Nama Indikator	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%)
Definisi	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil adalah Persentase kepemilikan Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan, Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan, Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan, Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Persentase Akta kematian} + \text{Akta Kelahiran} + \text{akta perkawinan} + \text{akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melapor}}{4} \times 100\%$
Interpretasi	- Semakin tinggi persentase, semakin baik pencatatan dan perlindungan hukum terhadap peristiwa penting penduduk. - Persentase rendah menunjukkan masih ada penduduk yang belum tercatat secara hukum, sehingga berpotensi mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil dan layanan publik.
Sumber Data	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri
Frekuensi	Tahunan

4) PERSENTASE PENINGKATAN PENGGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK (%)

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Penggunaan Data Kependudukan dalam Pelayanan Publik (%)
Definisi	Angka yang menunjukkan Persentase Peningkatan Penggunaan Data Kependudukan dalam Pelayanan Publik
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Laporan Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan} + \text{Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan} + \text{Laporan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan} + \text{Laporan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan}}{100} \times 4$
Interpretasi	- Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah lembaga/instansi yang menggunakan data kependudukan dalam pelayanan publik. - Nilai nol berarti tidak ada peningkatan (stagnan). - Nilai negatif menunjukkan penurunan penggunaan data kependudukan, yang dapat mengindikasikan kurangnya integrasi, kendala teknis, atau kebijakan yang tidak berkelanjutan.

Sumber Data	Laporan Kegiatan
Frekuensi	Tahunan

g) URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1) PERSENTASE FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (%)

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)
Definisi	Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah atau pihak terkait telah memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti PKK, Karang Taruna, LPM, RT/RW, dan Posyandu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Fasilitasi Pemberdayaan LKD} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan LKD yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}} \right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: - Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan LKD yang Dilaksanakan: Merupakan jumlah aktual kegiatan (seperti pelatihan, pembinaan teknis, bantuan operasional, dsb.) yang ditujukan untuk LKD dan benar-benar terlaksana. - Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Total kegiatan fasilitasi pemberdayaan LKD yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan atau RKPD/RENJA OPD. - 100%: Untuk menghasilkan nilai dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Nilai persentase menunjukkan sejauh mana LKD didukung dalam peningkatan kapasitas dan fungsinya. Semakin tinggi, semakin optimal fasilitasi yang diberikan.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), laporan fasilitasi atau pembinaan LKD
Frekuensi	Tahunan

h) URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1) INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA – IBANGGA (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.H)

2) ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WANITA USIA SUBUR (15-49 TAHUN) (RATA-RATA ANAK PER WANITA)

Nama Indikator	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun) (Rata-Rata Anak per Wanita)
Definisi	Indeks Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) adalah perkiraan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang usia reproduksinya (biasanya didefinisikan antara usia 15-49 tahun), dengan asumsi bahwa ia akan mengalami tingkat

	kesuburan spesifik menurut usia (Age-Specific Fertility Rates/ASFR) yang berlaku pada tahun tertentu
Rumus Perhitungan	Angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (15-49 t Metode penghitungan TFR sama dengan metode penghitungan ASFR yaitu menggunakan metode tidak langsung dengan metode anak kandung/own children method (OCM). TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan Wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya, dengan formula sebagai berikut: $TFR = \frac{1}{1000} \times [5 \sum_{i=1}^7 ASFR i]$ dengan: $ASFR_i = \frac{B_i}{P_i} \times 100$: jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur ; : jumlah wanita kelompok umur ; dan : kelompok umur terdiri dari 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, dan 45-49 tahun.ahun)
Interpretasi	TFR sekitar 2.1 anak per wanita sering dianggap sebagai tingkat penggantian (replacement level), di mana populasi secara alami akan stabil dalam jangka panjang (dengan asumsi tidak ada migrasi).
Sumber Data	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
Frekuensi	Biasanya dilakukan setiap 5 tahun.

3) INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN – IPBK (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan – IPBK (Indeks)
Definisi	Indeks komposit yang merepresentasikan pembangunan dengan pendekatan kependudukan, terdiri dari lima dimensi utama: • Partisipasi • Keberlanjutan • Inklusivitas atau pemihakan (keseimbangan) • Holistik integratif (integrasi) • Kesetaraan
Rumus Perhitungan	$IPBK = (\text{Dimensi Partisipasi} + \text{Dimensi Keberlanjutan} + \text{Dimensi Pemihakan} + \text{Dimensi Integrasi} + \text{Dimensi Kesetaraan}) / 5$

Interpretasi	Indeks ini diukur pada skala 0–100 , dengan makna positif: semakin tinggi nilai IPBK, semakin baik kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di wilayah tersebut
Sumber Data	BKKBN
Frekuensi	Tahunan

4) PROPORSI KEBUTUHAN KB YANG TERPENUHI MENURUT ALAT/CARA KB MODERN (%)

Nama Indikator	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (%)
Definisi	Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern. Komponen dalam perhitungan indikator ini adalah prevalensi penggunaan kontrasepsi (suatu cara dan cara modern) dan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need KB)
Rumus Perhitungan	Tahap Pertama: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi, baik metode kontrasepsi modern maupun tradisional (Prevalensi Kontrasepsi atau CPR). Tahap Kedua: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi modern (Prevalensi Kontrasepsi Modern atau mCPR). Tahap Ketiga: Menghitung PUS yang kebutuhan ber-Kbnya tidak terpenuhi (unmet need KB) Tahap Keempat: Berdasarkan tiga tahap di atas, selanjutnya dapat dihitung proporsi kebutuhan KB menurut metode kontrasepsi modern yang terpenuhi dengan formula sebagai berikut: Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB Modern adalah proporsi kebutuhan KB PUS yang telah terpenuhi penggunaan alat/obat kontrasepsi Modern meliputi IUD, Implant, MOW, MOP, Pil, Suntik, Kondom dan MAL.
Interpretasi	Semakin tinggi proporsinya (mendekati 100%), artinya semakin baik / semakin banyak perempuan/pasangan yang membutuhkan KB sudah terpenuhi kebutuhannya. Semakin rendah proporsinya, berarti masih banyak orang yang membutuhkan KB tetapi belum terlayani, atau belum menggunakan metode kontrasepsi modern. Kalau proporsinya 85%, itu berarti dari semua perempuan yang ingin mencegah kehamilan, 85% sudah menggunakan KB, dan 15% belum
Sumber Data	BKKBN
Frekuensi	Tahunan

5) PERSENTASE KEHAMILAN TIDAK DIRENCANAKAN – KTD (%)

Nama Indikator	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan – KTD (%)										
Definisi	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) adalah kondisi kehamilan yang terjadi di luar rencana atau tidak diinginkan oleh perempuan atau pasangan pada saat kehamilan terjadi. KTD dapat meliputi: • Kehamilan tidak diinginkan (unwanted pregnancy): kehamilan yang tidak diharapkan sama sekali. • Kehamilan tidak direncanakan (mistimed pregnancy): kehamilan yang terjadi lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang diinginkan. Indikator ini mengukur persentase perempuan usia reproduktif (15–49 tahun) yang mengalami kehamilan tidak direncanakan dalam periode tertentu, biasanya dalam 12 bulan terakhir.										
Rumus Perhitungan	$KTD = \frac{\text{Jumlah perempuan usia 15 – 49 tahun yang mengalami kehamilan}}{\text{Jumlah kehamilan yang terjadi pada perempuan usia 15 – 49 tahun}} \times 100\%$										
Interpretasi	Semakin tinggi persentase KTD, semakin menunjukkan kurangnya efektivitas program keluarga berencana (KB), minimnya akses informasi dan kontrasepsi, atau rendahnya kesadaran perencanaan kehamilan. <table border="1"> <thead> <tr> <th>PERSENTASE</th><th>INTERPRESTASI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 10%</td><td>Sangat rendah – menunjukkan keberhasilan program KB dan edukasi reproduksi.</td></tr> <tr> <td>10–20%</td><td>Rendah – masih ada kebutuhan akan layanan KB atau edukasi.</td></tr> <tr> <td>21–40%</td><td>Sedang – menunjukkan masalah pada akses, kualitas, atau kesadaran penggunaan kontrasepsi.</td></tr> <tr> <td>> 40%</td><td>Tinggi – menunjukkan kegagalan sistem pelayanan KB dan rendahnya kesadaran perencanaan kehamilan.</td></tr> </tbody> </table>	PERSENTASE	INTERPRESTASI	< 10%	Sangat rendah – menunjukkan keberhasilan program KB dan edukasi reproduksi.	10–20%	Rendah – masih ada kebutuhan akan layanan KB atau edukasi.	21–40%	Sedang – menunjukkan masalah pada akses, kualitas, atau kesadaran penggunaan kontrasepsi.	> 40%	Tinggi – menunjukkan kegagalan sistem pelayanan KB dan rendahnya kesadaran perencanaan kehamilan.
PERSENTASE	INTERPRESTASI										
< 10%	Sangat rendah – menunjukkan keberhasilan program KB dan edukasi reproduksi.										
10–20%	Rendah – masih ada kebutuhan akan layanan KB atau edukasi.										
21–40%	Sedang – menunjukkan masalah pada akses, kualitas, atau kesadaran penggunaan kontrasepsi.										
> 40%	Tinggi – menunjukkan kegagalan sistem pelayanan KB dan rendahnya kesadaran perencanaan kehamilan.										
Sumber Data	Tahunan										
Frekuensi	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)										

6) Angka Kelahiran Rema Umur 15-19 tahun/ Age Spesific Fertility Rate – ASFR 15-19 (Kelahiran per 1000 WUS 15 – 19 tahun)

Nama Indikator	Angka Kelahiran Rema Umur 15-19 tahun/ <i>Age Spesific Fertility Rate</i> – ASFR 15-19 (Kelahiran per 1000 WUS 15 – 19 tahun)
Definisi	Indeks Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) adalah jumlah kelahiran hidup per 1.000 wanita berusia 15-19 tahun dalam satu tahun tertentu di suatu wilayah. Indikator ini secara spesifik mengukur tingkat kesuburan pada kelompok usia remaja akhir
Rumus Perhitungan	$ASFR_{(15-19)} = \frac{\text{Jumlah Kelahiran Hidup dari Wanita Berusia 15 – 19 Tahun}}{\text{Jumlah Rata – rata Wanita Berusia 15 – 19 Tahun pada Tahun yang Sama}} \times 1000$ Keterangan :

	• ASFR 15-19 memberikan gambaran tentang tingkat kesuburan di kalangan remaja akhir. • Nilai yang tinggi menunjukkan tingginya proporsi remaja yang melahirkan pada usia tersebut
Interpretasi	Indikator ini penting untuk memahami tren kesehatan reproduksi remaja, implikasi sosial dan ekonomi, serta kebutuhan akan layanan kesehatan dan pendidikan seksual.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Setiap 10 tahun

7) INDEKS LANSIA BERDAYA (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)
Definisi	Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan
Rumus Perhitungan	Indeks Lansia Berdaya dihitung berdasarkan 7 Dimensi Lansia Tangguh dengan variabel sebagai berikut. - Dimensi Spiritual: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut; - Dimensi Fisik: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari; - Dimensi Emosional: a. Tanpa tegur sapa (selama 3 hari berturut-turut); b. Pisah ranjang antara suami dan istri (selama 7 hari berturut-turut); c. Pergi dari rumah/minggat (selama 2 hari berturut-turut); d. Kekerasan dalam rumah tangga - Dimensi Sosial Kemasyarakatan: Keluarga yang memiliki lansia dan atau lansia (umur ≥ 60 tahun) ikut kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL); - Dimensi Intelektual: Minimal paling sedikit ada 1 (satu) lansia dengan pendidikan minimal SLTP; - Dimensi Vokasional: Minimal paling sedikit ada 1 (satu) lansia dengan status pekerjaan adalah bekerja; - Dimensi Lingkungan: Selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT. Rumus : Di : dimensi ke- i, dan w_i : bobot ke- i; dimana $i = 1, 2, \dots, 7$. Adapun bobot untuk masing-masing dimensi adalah w_1

	= 0,1; w2 = 0,1; w3 = 0,2; w4 = 0,1; w5 = 0,25; w6 = 0,15; dan w7 = 0,1. D1 : dimensi spiritual (Sp), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang setiap anggota keluarga usia 10 tahun ke atas menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut. D2 : dimensi intelektual (In), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia dimana terdapat paling sedikit 1 (satu) lansia yang pendidikan terakhir minimal SLTP. D3 : dimensi fisik (Fs), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang setiap anggota keluarganya makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari. D4 : dimensi emosional (Es), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang tidak terdapat konflik diantara anggota keluarga (tanpa tegur sapa, pisah ranjang antara suami dan istri, pergi dari rumah/minggat, serta kekerasan dalam rumah tangga). D5 : dimensi sosial kemasyarakatan (SK), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang memiliki lansia dan atau lansia, adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang memiliki lansia dan atau lansia (umur ≥ 60 tahun) ikut kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) D6 : dimensi vokasional (PV), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia dimana terdapat paling sedikit 1 (satu) lansia yang bekerja. D7 : dimensi lingkungan (Lk), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT. Indeks Lansia Tangguh dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, dimana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang berbeda. Indeks Lansia Tangguh bernilai 0-100, dengan arti semakin tinggi nilainya berarti semakin baik/tangguh lansianya.
Interpretasi	Indeks Lansia Berdaya menunjukkan tingkat ketangguhan/ keberdayaan lansia, dimana semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin tangguh/ berdaya lansia tersebut. Contoh: Hasil perhitungan Indeks Lansia Tangguh/ Berdaya di Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 56,99, artinya sejumlah 56,99% lansia Indonesia tergolong tangguh/ berdaya
Sumber Data	BKKBN
Frekuensi	Tahunan

8) INDEKS PENGASUHAN KELUARGA YANG MEMILIKI REMAJA (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja (Indeks)
Definisi	Indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orang tua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja
Rumus Perhitungan	Indeks pengasuhan remaja dihitung dengan pendekatan agregat indikator, di mana setiap indikator dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh indikator dan masing-masing indikator memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut: dengan : indikator ke- ; dan : bobot ke- ; di mana . Adapun bobot untuk masing-masing indikator adalah , dengan = banyaknya indikator. V1 : memiliki legalitas diri, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki akta lahir. V2 : akses terhadap pendidikan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah. V3 : terbebas dari pekerjaan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-14 tahun) tidak/belum bekerja. V4 : memiliki jaminan kesehatan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki asuransi kesehatan (pemerintah/swasta). V5: memiliki jaminan masa depan, adalah persentase keluarga punya remaja yang memiliki aset: tabungan (uang kontan/rekening aktif), emas/perhiasan (minimal 10 gram), dan atau hewan ternak yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan. V6 : kecukupan gizi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari. V7 : kondisi sehat, adalah persentase keluarga punya remaja di mana tidak ada anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis dan atau disabilitas. V8 : akses terhadap sumber informasi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet).
Interpretasi	Indeks pengasuhan remaja bernilai 0-100, dengan arti semakin tinggi nilainya berarti semakin baik keluarga dalam pengasuhan remajanya. Contoh:

	Hasil perhitungan indeks pengasuhan remaja di Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 84,30, artinya tingkat pengasuhan remaja di Indonesia dapat dikatakan baik.
Sumber Data	BKKBN
Frekuensi	Tahunan

9) PERSENTASE KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS MANDIRI (%)

Nama Indikator	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)
Definisi	Kampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat
Rumus Perhitungan	$KKM = \frac{jkelkm}{jkel} \times 100\%$ Ket ; - KKM = Kampung keluarga berkualitas mandiri - jkelkm = Jumlah kelurahan memiliki kampung keluarga berkualitas mandiri - jkel = Jumlah kelurahan seluruhnya
Interpretasi	Semakin besar nilainya, maka semakin banyak jumlah Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri di wilayah tersebut
Sumber Data	Website Kampung Keluarga Berkualitas
Frekuensi	BKKBN

i) URUSAN PERHUBUNGAN

1) NILAI SURVEY IKM PELAYANAN TRANSPORTASI (ANGKA)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.V)

2) PERSENTASE KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN YANG RAMAH LINGKUNGAN (%)

Nama Indikator	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan yang Ramah Lingkungan (%)
Definisi	Meningkatnya keselamatan, kelancaran, ketertiban dan kenyamanan lalu lintas
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya semakin tersedia dengan baik infrastruktur perhubungan
Sumber Data	Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

j) **URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

1) **INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - SPBE (INDEKS)**

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.S)

2) **INDEKS MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA (INDEKS)**

Nama Indikator	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)
Definisi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaan
Rumus Perhitungan	Indeks bersumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika setiap tahunnya
Interpretasi	Pengukuran Indeks Masyarakat Digital digunakan untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya yang terdiri dari empat pilar penyusunan yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

3) **NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (NILAI)**

Nama Indikator	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)
Definisi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan ukuran tingkat keterbukaan informasi oleh badan publik di Indonesia, diukur oleh Komisi Informasi Provinsi berdasarkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Rumus Perhitungan	Perhitungan nilai keterbukaan informasi publik adalah hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi untuk menilai sejauh mana badan publik memenuhi kewajiban menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses masyarakat. Penilaian ini menggunakan metode seperti Self-Assessment Questionnaire (SAQ) dan penilaian kualitas layanan, dengan bobot penilaian yang berubah seiring waktu, untuk mengklasifikasikan badan publik ke dalam kategori Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif.
Interpretasi	Interpretasi perhitungan nilai keterbukaan informasi publik menunjukkan sejauh mana sebuah badan publik berhasil dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, dengan sistem penilaian berdasarkan kategori seperti "Informatif" (nilai 90-100) hingga "Tidak Informatif" (< 39.9), diukur melalui berbagai indikator seperti pengembangan website, pelayanan informasi, dan

	kepatuhan terhadap undang-undang. Skor ini memberikan gambaran objektif tentang akuntabilitas dan transparansi badan publik, yang penting untuk partisipasi masyarakat dan pencegahan korupsi.
Sumber Data	Sumber data perhitungan nilai keterbukaan informasi publik berasal dari Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang disusun oleh Komisi Informasi (KI) .
Frekuensi	Tahunan

4) INDEKS PEMERINTAHAN DIGITAL (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)
Definisi	Indeks pemerintah digital adalah ukuran kinerja atau kematangan transformasi digital di instansi pemerintah, seperti yang diukur dalam Indeks Pemdi di Indonesia, yang mencakup penilaian terhadap tata kelola, layanan, dan infrastruktur digital untuk mendorong modernisasi dan penciptaan nilai publik melalui pemanfaatan teknologi dan data digital. Indeks ini membantu pemerintah mengevaluasi kesiapan mereka dalam transformasi digital secara menyeluruh dan menjadi dasar untuk menyusun program pengembangan SDM digital dan peningkatan pelayanan publik
Rumus Perhitungan	Total skor dari 9 aspek Pemdi berdasarkan evaluasi Kemen PAN RB, dengan bobot nilai masing-masing aspek sebagai berikut : 1. Strategi dan Rencana (bobot 5 %) 2. Tata Kelola dan Manajemen (bobot 5 %) 3. Teknologi Digital (bobot 20 %) 4. Audit Teknologi Digital (bobot 6 %) 5. Keamanan Siber (bobot 9 %) 6. Kapabilitas dan Budaya Digital (bobot 10 %) 7. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi (bobot 10 %) 8. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (bobot 15 %) 9. Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (bobot 20 %)
Interpretasi	Indeks ini dirancang untuk mengukur kinerja transformasi digital di instansi pemerintah Indonesia, sesuai dengan arahan RPJMN 2025-2029 dan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Indeks ini berfungsi Memberikan gambaran tentang tingkat kesiapan dan kualitas transformasi digital di instansi pemerintah. Skala indeks yang lebih tinggi menunjukkan kematangan transformasi digital yang lebih baik dalam penggunaan teknologi digital pemerintahan.
Sumber Data	Kementerian PANRB berdasarkan hasil evaluasi
Frekuensi	Tahunan

k) URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**1) KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PDRB (%)**

Nama Indikator	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB (%)
Definisi	Kontribusi PDRB yang bersumber dari Sub sektor UMKM yang mencerminkan proporsi nilai tambah sub sektor UMKM terhadap PDRB Karena UMKM bukan merupakan sektor langsung yang terdapat dari 17 sektor pembentuk PDRB, maka untuk nilainya diambil dari sektor yang utamanya merupakan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu sektor: - Industri pengolahan - Pertanian, kehutanan dan perikanan - Industri pengolahan
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi} = \frac{\text{PDRB}_{UMKM}}{\text{PDRB}_{Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi subsektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Kota, <i>ceteris paribus</i>
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

2) PROPORSI JUMLAH UKM NON PERTANIAN (%)

Nama Indikator	Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian (%)
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi UKM Non Pertanian} = \frac{\text{Jml UKM Non Tani}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha}} \times 100\%$
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	a. Sensus Ekonomi (10 tahun sekali) b. Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM (masih dalam tahap pengumpulan dan pengembangan) c. Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah
Frekuensi	Tahunan

3) Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Rumus Perhitungan	$RvK = \frac{\text{volume usaha koperasi daerah}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$ Dimana RvK = Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah
Sumber Data	a. Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi.Kementerian Koperasi dan UKM. b. PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Tahunan

4) RASIO KEWIRAUSAHAAN (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.C.5)

1) URUSAN PENANAMAN MODAL

1) NILAI REALISASI INVESTASI (Rp)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.Q)

m) URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1) JUMLAH ATLET BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL (ORANG)

Nama Indikator	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional (Orang)
Definisi	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional merupakan atlet-atlet yang memiliki prestasi pada even-even bidng olahraga berskala nasional pada tahun tersebut
Rumus Perhitungan	$Jatletnasional = \sum atlet\ nasional_n$
Interpretasi	Semakin besar jumlah atlet yang berprestasi tingkat nasional menandakan tingginya kualitas SDM pada bidang keolahragaan

Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

2) PERSENTASE ATLET YANG MASUK PELATNAS (%)

Nama Indikator	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (%)
Definisi	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas adalah indikator yang mengukur proporsi atlet daerah atau nasional yang terpilih dan mengikuti program Pelatihan Nasional (Pelatnas) untuk persiapan mengikuti kejuaraan nasional maupun internasional. Indeks ini mencerminkan kapasitas pembinaan prestasi olahraga di daerah maupun nasional serta efektivitas sistem talent scouting dan pembinaan atlet.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Atlet Pelatnas} = \frac{\text{Jumlah Atlet yang Masuk Pelatnas}}{\text{Total Jumlah Atlet Potensial atau Terdaftar}} \times 100\%$ Keterangan : - Jumlah Atlet yang Masuk Pelatnas: Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak atlet yang terpilih dan mengikuti program Pemusatan Latihan Nasional untuk cabang olahraga tertentu atau untuk persiapan event olahraga tertentu (misalnya, SEA Games, Asian Games, Olimpiade). - Total Jumlah Atlet Potensial atau Terdaftar: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan jumlah atlet yang dianggap memiliki potensi untuk masuk Pelatnas atau jumlah total atlet yang terdaftar dalam suatu organisasi atau federasi olahraga pada tingkat tertentu (misalnya, tingkat provinsi atau nasional). Pemilihan basis total atlet ini akan memengaruhi interpretasi persentase. - 100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Persentase ini menunjukkan seberapa banyak atlet dari suatu wilayah atau cabang olahraga yang lolos ke jenjang pelatnas. Indikator ini dapat digunakan untuk Mengukur efektivitas pembinaan olahraga prestasi di tingkat daerah. Mengevaluasi distribusi talenta dari daerah ke tingkat nasional. Menyusun strategi peningkatan kualitas pelatih, fasilitas, dan scouting
Sumber Data	Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), PB/PP Cabang Olahraga
Frekuensi	Tahunan

n) URUSAN STATISTIK

1) INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (NILAI)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik (Nilai)
Definisi	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan statistik pada Unit Pengelola Statistik (UPS) di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya. Indeks ini menilai aspek kelembagaan, sumber daya manusia, proses bisnis statistik, serta ketersediaan dan kualitas data statistik yang dikelola oleh UPS.
Rumus Perhitungan	$IPS\ UPS = \frac{\sum (Skor\ Komponen \times Bobot\ Komponen)}{\sum Bobot}$ Keterangan : □ Kelembagaan Statistik (Bobot 25%) • Ketersediaan Unit Pengelola Data • Penetapan SDM statistik • SOP Pengelolaan Data □ Proses Bisnis Statistik (Bobot 25%) • Perencanaan dan Pengumpulan Data • Pengolahan dan Penyajian - Diseminasi dan Pemanfaatan Data
Interpretasi	IPS dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau gap statistik dalam organisasi. Menyusun roadmap pembangunan statistik sektoral. Meningkatkan koordinasi dan integrasi sistem statistik nasional
Sumber Data	Dokumen pembentukan UPS, regulasi internal, SK penunjukan UPS
Frekuensi	Tahunan

O) URUSAN PERSANDIAN

1) Indeks Keamanan Informasi (%)

Nama Indikator	Indeks Keamanan Informasi (%)
Definisi	Indeks keamanan informasi atau Indeks SPBE (Aspek Keamanan) adalah ukuran capaian tingkat kematangan keamanan informasi dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada instansi pemerintah. Indeks ini mencerminkan kemampuan instansi dalam melindungi aset informasi dari ancaman, gangguan, maupun risiko keamanan melalui kebijakan, infrastruktur, prosedur, dan pelaksanaan teknis keamanan siber
Rumus Perhitungan	$IKI = \frac{\sum (S_i \times B_i)}{\sum B_i}$ Keterangan : - IKI = Indeks keamanan informasi

	- S_i =Skor indikator ke-i pada aspek keamanan SPBE (rentang 0–5 atau 0–100, tergantung panduan evaluasi) - B_i =Bobot indikator ke-i (menunjukkan tingkat pentingnya setiap indikator) - $\sum (S_i \times B_i)$ =Jumlah dari semua nilai bobot yang dikalikan dengan skor - $\sum B_i$ =Total bobot seluruh indikator keamanan
Interpretasi	Indeks ini sangat penting untuk Menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pemerintah . Menjadi dasar penguatan infrastruktur siber pemerintah. Mendukung layanan publik digital yang aman dan andal
Sumber Data	Dokumen internal instansi (Peraturan, Pedoman, SK Penanggung Jawab, SOP)
Frekuensi	Tahunan

p) URUSAN KEBUDAYAAN

1) KARYA BUDAYA YANG DITETAPKAN (UNIT)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.BB)

2) PERSENTASE WARISAN BUDAYA YANG DILESTARIKAN (%)

Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)
Definisi	Indeks Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan adalah indikator kuantitatif yang mengukur proporsi elemen warisan budaya (baik benda maupun takbenda) yang telah dilakukan upaya pelestarian terhadap total keseluruhan warisan budaya yang telah teridentifikasi dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (\%)} = \frac{\text{Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Total Warisan Budaya yang Terdaftar}} \times 100$ Keterangan : □ Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan = Jumlah warisan budaya (baik benda maupun tak benda) yang masih dilestarikan, dijaga, dan dikembangkan melalui kegiatan budaya seperti pelatihan, pameran, festival, atau pengakuan resmi (seperti yang terdaftar sebagai warisan budaya tak benda atau benda oleh pemerintah). □ Jumlah Total Warisan Budaya yang Terdaftar = Semua jenis warisan budaya (baik yang dilestarikan maupun yang tidak dilestarikan) yang terdaftar di suatu wilayah berdasarkan data resmi atau hasil inventarisasi warisan budaya. □ Hasil dihitung dalam persentase (%), yang menunjukkan seberapa banyak warisan budaya yang terjaga dan dilestarikan dari keseluruhan warisan yang ada.

Interpretasi	Menunjukkan tingkat komitmen dan efektivitas dalam pelestarian budaya. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak elemen budaya yang terjaga keberlanjutannya.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan, Kemendikbudristek, komunitas budaya, registrasi nasional warisan budaya, hasil inventarisasi daerah.masyarakat.
Frekuensi	Tahunan (1 kali per tahun), atau per dua tahun jika inventarisasi memerlukan waktu lebih panjang

3) PERSENTASE LEMBAGA ADAT YANG AKTIF DALAM MELESTARIKAN NILAI NILAI BUDAYA (%)

Nama Indikator	Persentase Lembaga Adat yang Aktif dalam Melestarikan Nilai Nilai Budaya (%)
Definisi	Jumlah lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya berjumlah 22 lembaga adat dan aktif sebanyak 100%
Rumus Perhitungan	$\text{Lembaga adat yang aktif (\%)} = \frac{\text{Jumlah lembaga adat yang aktif}}{\text{Jumlah lembaga adat yang berpartisipasi}} \times 100$
Interpretasi	Menunjukkan tingkat presentasi lembaga adat yang aktif dapat ditafsirkan sebagai bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam melestarikan nilai budaya ditengah arus modernisasi
Sumber Data	Dokumentasi kegiatan, Observasi lapangan, Wawancara langsung
Frekuensi	Tahunan (1 kali per tahun)

4) JUMLAH OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN YANG DILESTARIKAN (UNIT)

Nama Indikator	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan (Unit)
Definisi	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan berjumlah 10 objek
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah objek pemajuan kebudayaan}}{\text{Jumlah objek kebudayaan keseluruhan}} \times 100\%$ = $\frac{\text{jumlah objek kebudayaan yang dilestarikan}}{\text{jumlah objek kebudayaan yang dilestarikan}} \times 100\%$
Interpretasi	Menunjukkan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dapat ditafsirkan sebagai bentuk nyata dalam melestarikan objek kebudayaan yang ada
Sumber Data	Dokumentasi kegiatan, Observasi lapangan, Wawancara langsung
Frekuensi	Tahunan

q) **URUSAN PERPUSTAKAAN**

1) INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)
Definisi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan literasi di masyarakat berdasarkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan fasilitas layanan perpustakaan serta aktivitas literasi di suatu daerah. IPLM dikembangkan untuk menilai kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi melalui aktivitas membaca, belajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan literasi yang difasilitasi oleh perpustakaan dan lembaga sejenis
Rumus Perhitungan	$\text{IPLM} = \frac{\sum_{i=1}^n (w_i \times I_i)}{\sum_{i=1}^n w_i}$ Keterangan : - I_i = Skor indikator ke-i pada dimensi pembangunan literasi masyarakat - w_i = Bobot indikator ke-i - n = Jumlah indikator yang digunakan dalam penghitungan - IPLM= memiliki rentang nilai dari 0 sampai 100, di mana makin tinggi nilai IPLM, makin baik tingkat pembangunan literasi masyarakat di wilayah tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi skor IPLM, semakin baik pembangunan dan pencapaian literasi masyarakat di wilayah tersebut
Sumber Data	Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi/Kabupaten/Kota, BPS, data survei literasi daerah
Frekuensi	Tahunan (1 kali per tahun, disesuaikan dengan pelaporan nasional)

2) RASIO KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN PERKAPITA (RASIO)

Nama Indikator	Rasio Kunjungan Perpustakaan Perkapita (Rasio)
Definisi	Merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat dengan menghitung perbandingan antara jumlah total kunjungan ke perpustakaan dalam periode tertentu dengan jumlah penduduk di wilayah yang sama.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio kunjungan per Kapita} = \frac{\text{Jml kunjungan perpustakaan dalam 1 tahun}}{\text{Jml penduduk}}$
Interpretasi	1. Jumlah kunjungan mencakup semua kunjungan fisik dan/atau kunjungan virtual (jika dihitung dalam indikator) ke perpustakaan umum, sekolah, keliling, atau digital yang berada di wilayah tersebut.

	2. Jumlah penduduk biasanya menggunakan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun berjalan yang jika dicontohkan nilai rasio 0,4 berarti rata-rata setiap penduduk mengunjungi perpustakaan 0,5 kali per tahun (atau 1 kali untuk setiap orang per tahun)
Sumber Data	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Frekuensi	Tahunan

r) URUSAN KEARSIPAN

1) INDEKS HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH (NILAI)

Nama Indikator	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)
Definisi	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan tingkat kepatuhan, kualitas, dan efektivitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan daerah (provinsi/kabupaten/kota), berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Nasional (ANRI) atau Lembaga Kearsipan Daerah
Rumus Perhitungan	<i>Indeks</i> = $(\text{Skor Total Hasil Pengawasan Kearsipan} / \text{Skor Maksimal}) \times 100$ Keterangan : • Skor Total Hasil Pengawasan: Penjumlahan dari seluruh poin nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek-aspek pengelolaan arsip (seperti: kebijakan kearsipan, SDM, sarana prasarana, pengelolaan arsip aktif-inaktif, pengawasan internal, dll.) • Skor Maksimal: Nilai maksimum yang bisa dicapai (biasanya = 100 poin). • Output: Nilai indeks dalam skala 0–100
Interpretasi	Semakin tinggi skor, menunjukkan tata kelola kearsipan semakin baik dan sesuai standar nasional kearsipan
Sumber Data	• Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI atau LKD • Formulir Penilaian Mandiri Kearsipan (AMANI/IKM) • Berita Acara Hasil Pengawasan Kearsipan • Dokumentasi Audit Arsip Internal • Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan dalam siklus audit/pengawasan kearsipan per tahun anggaran)

2) PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN SISTEM KEARSIPAN SESUAI STANDAR (%)

Nama Indikator	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Sistem Kearsipan sesuai Standar (%)
Definisi	Persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan sesuai standar adalah semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan penyelenggara pemerintahan daerah, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah yang menerapkan sistem arsip sesuai standar kearsipan. Penerapan standar kearsipan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan arsip yang baik, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Rumus Perhitungan	$\%standar = \frac{JPDsistarsipstandar}{JPD} \times 100$ Keterangan : • %standar = Persentase Perangkat Daerah menerapkan sistem kearsipan sesuai standar • JPDsistarsipstandar = Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan sesuai standar • JPD = Jumlah Perangkat Daerah
Interpretasi	Indikator ini menunjukkan semakin tinggi persentase semakin tinggi norma, aturan, atau persyaratan yang dijadikan sebagai acuan dalam sistem kearsipan, yang biasanya berupa dokumen formal agar ada keseragaman dalam pelaksanaannya.
Sumber Data	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Frekuensi	Tahunan

3. LAYANAN URUSAN PILIHAN

a) URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1) JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN - TANGKAP DAN BUDIDAYA (TON)

Nama Indikator	Jumlah Total Produksi Perikanan - tangkap dan budidaya (Ton)
Definisi	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap adalah total volume hasil tangkapan ikan dan biota air lainnya yang ditangkap oleh nelayan dari perairan laut dan perairan umum daratan (PUD) dalam satu periode waktu tertentu, baik oleh nelayan kecil, nelayan kapal besar, atau unit penangkapan lainnya, yang dinyatakan dalam satuan ton. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya adalah total volume hasil panen komoditas perikanan (seperti ikan, udang, kepiting, rumput laut, kerang, dll.) yang dibudidayakan oleh pembudidaya ikan dalam satu periode tertentu, yang dinyatakan dalam satuan ton (untuk ikan, udang, kepiting) atau ton basah/kering (untuk rumput laut).
Rumus Perhitungan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap $= \sum (\text{Volume Hasil Tangkapan per Jenis Ikan})$ Keterangan :

	• Volume hasil tangkapan dapat diambil dari data rekapitulasi: ➢ Laporan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) ➢ Pencatatan nelayan per alat tangkap ➢ Laporan harian/monitoring petugas pelabuhan perikanan • Biasanya dibagi menurut: ➢ Lokasi tangkap (laut/pud) ➢ Jenis kapal dan alat tangkap ➢ Jenis komoditas (ikan pelagis, demersal, udang, cumi, dll.) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya $= \sum (\text{Volume Panen Komoditas Budidaya per Jenis dan Lokasi})$ Keterangan : • Data produksi dihitung dari laporan hasil panen yang dilaporkan oleh pembudidaya atau kelompok. • Perhitungan dapat dikelompokkan berdasarkan: ◦ Sistem budidaya: air tawar, air payau, laut ◦ Jenis komoditas: ikan nila, lele, patin, udang, bandeng, rumput laut, kerapu, dll. Metode budidaya: kolam tanah, terpal, KJA, tambak, dll. sehingga $Jmltotproduksi\text{perikanan} = jmlprod\text{perikanan}\text{tangkap} + jmlprod\text{perikanan}\text{budidaya}$
Interpretasi	Semakin tinggi produksi perikanan menunjukkan pertumbuhan sektor tangkap dan budidaya dan ketahanan pangan daerah meningkat
Sumber Data	• Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota • Data Laporan Produksi Pembudidaya Ikan • Sistem Informasi Statistik Perikanan Budidaya (SISDATIK), KKP • BPS – Statistik Perikanan Budidaya Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan UPTD Perikanan
Frekuensi	Bulanan dan Tahunan (Biasanya dikompilasi secara tahunan dalam laporan kinerja atau publikasi statistik perikanan)

b) URUSAN PARIWISATA

1) JUMLAH TAMU WISATAWAN MANCANEGERA (RIBU ORANG)

Nama Indikator	Jumlah Tamu wisatawan mancanegara (ribu orang)
Definisi	Jumlah tamu asing (wisatawan) mancanegara yang menginap di daerah tertentu
Rumus Perhitungan	<i>Data Jumlah Tamu Asing (Wisatawan) Mancanegara di setiap hotel/ penginapan di daerah tertentu</i>

Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu (wisatawan) asing yang menginap di hotel/ penginapan di daerah tertentu, maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional
Sumber Data	BPS, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

2) JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA (ORANG)

Nama Indikator	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang)
Definisi	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara merupakan perhitungan terhadap kunjungan wisatawan domestik pada daerah tertentu
Rumus Perhitungan	<i>Data Jumlah kunjungan wisatawan domestik di daerah tertentu</i>
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah kunjungan wisatawan domestik di daerah tertentu, maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional
Sumber Data	BPS, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

3) Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)

Nama Indikator	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)
Definisi	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual adalah proporsi pelaku usaha atau individu dalam sektor ekonomi kreatif yang telah memiliki perlindungan hukum melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta, merek dagang, desain industri, paten, atau indikasi geografis terhadap total pelaku ekonomi kreatif dalam suatu periode tertentu
Rumus Perhitungan	$\%ekrafpunyaKI = \frac{jekrafpunyaKI}{Tote kraf} \times 100$ dimana : %ekrafpunyaKI = Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual JekrafpunyaKI = Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual Tote kraf = Jumlah semua pelaku ekraf
Interpretasi	Nilai tinggi berarti tingkat legalitas dan perlindungan karya ekraf meningkat
Sumber Data	Laporan komunitas ekonomi kreatif / UMKM
Frekuensi	Tahunan

4) PROPORSI PDRB EKONOMI KREATIF TERHADAP PDRB EKONOMI KREATIF PROVINSI (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.C.4)

5) PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN (%)

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)
Definisi	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan adalah tingkat peningkatan atau penurunan jumlah kunjungan wisatawan (baik wisatawan nusantara maupun mancanegara) ke suatu daerah dari satu periode ke periode berikutnya, yang dinyatakan dalam persentase (%).
Rumus Perhitungan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan wisatawan (%) = $\frac{[(\text{Jumlah wisatawan Tahun N} - \text{Tahun N-1}) / \text{Jumlah wisatawan Tahun N-1}] \times 100\%}{100\%}$ Keterangan : ➤ Jumlah Wisatawan Tahun N: Total wisatawan yang berkunjung pada tahun berjalan (misalnya 2024) ➤ Jumlah Wisatawan Tahun N-1: Total wisatawan pada tahun sebelumnya (misalnya 2023) ➤ Data bisa dihitung untuk: • Total keseluruhan wisatawan • Wisatawan nusantara (domestik) • Wisatawan mancanegara (internasional)
Interpretasi	Nilai positif menandakan pertumbuhan, negatif menandakan penurunan
Sumber Data	• Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota • Badan Pusat Statistik (BPS) – Statistik Pariwisata • Data pintu masuk destinasi (bandara, pelabuhan, terminal, gerbang kawasan wisata) • Laporan pengelola destinasi wisata, hotel, event pariwisata
Frekuensi	Tahunan (umumnya digunakan untuk pelaporan indikator pembangunan)

6) RASIO PDRB PENYEDIAAN AKOMODASI MAKAN MINUM (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.C.3)

c) URUSAN PERTANIAN

1) PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN (ADHB) (%)

Nama Indikator	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (ADHB) (%)
Definisi	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (ADHB) merupakan tingkat pertumbuhan dari sektor pertanian, kehutanan,

	perikanan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota.
Rumus Perhitungan	$pertmbPDRB_{PKP} = \frac{(PDRB_{PKP(n)} - PDRB_{PKP(n-1)})}{PDRB_{n-1}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat pertumbuhan semakin besar kontribusi dan berkembangnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada suatu daerah
Sumber Data	Dinas Pertanian
Frekuensi	Tahunan

2) PRODUKSI PADI (TON)

Nama Indikator	Produksi Padi (Ton)
Definisi	ukuran jumlah total Gabah Kering Panen (GKP) yang dihasilkan dari kegiatan bercocok tanam padi dalam satu periode waktu dan wilayah tertentu, diukur dalam satuan ton
Rumus Perhitungan	Produksi Padi (Ton) = Luas Panen (Ha) x Produktivitas (Ton/Ha)
Interpretasi	Angka yang lebih tinggi menunjukkan hasil panen yang lebih baik dan potensi ketersediaan pangan yang lebih besar, sementara angka yang lebih rendah mengindikasikan penurunan produksi
Sumber Data	Dinas Pertanian
Frekuensi	Tahunan

3) POPULASI SAPI (EKOR)

Nama Indikator	Populasi Sapi (Ekor)
Definisi	Jumlah total sapi yang hidup dan dipelihara di suatu wilayah geografis tertentu pada periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	Populasi Akhir = Populasi Awal + (Jumlah Kelahiran + Jumlah Pemasukan) - (Jumlah Kematian + Jumlah Pengeluaran) Penjelasan Komponen Rumus • Populasi Awal (ekor): Jumlah total sapi pada awal periode waktu yang dianalisis. • Jumlah Kelahiran (Bi) (ekor): Jumlah anak sapi yang lahir dalam periode tersebut. • Jumlah Pemasukan (E) (ekor): Jumlah sapi yang didatangkan ke wilayah tersebut dari luar. • Jumlah Kematian (Di) (ekor): Jumlah sapi yang mati dalam periode tersebut. • Jumlah Pengeluaran (G) (ekor): Jumlah sapi yang dijual atau dikeluarkan dari wilayah tersebut

Interpretasi	jumlah total sapi yang hidup dan terhitung di suatu wilayah atau waktu tertentu
Sumber Data	Dinas Pertanian
Frekuensi	Tahunan

4) INDEKS PERTANAMAN (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Pertanaman (Indeks)
Definisi	Indeks pertanaman adalah ukuran kepadatan tanaman pada suatu lahan pertanian
Rumus Perhitungan	Ada 3 Metode Perhitungan diantaranya : 1. Metode <i>sampling</i> dengan cara : - Menentukan titik <i>sampling</i> yang representatif - Mengukur jumlah tanaman pada titik <i>sampling</i> tersebut - Menghitung rata-rata jumlah tanaman pada seluruh titik <i>sampling</i> 2. Metode <i>Counting Grid</i> $IP = \left(\frac{jt}{ljaring} \right) \times \left(\frac{jjaring}{llp} \right)$ dimana IP = Indeks Pertanaman jt = Jumlah tanaman ljaring = Luas jaring-jaring perhitungan jjaring = Jumlah jaring-jaring perhitungan llp = Luas lahan pertanian 3. Metode Visual dengan cara : - Melakukan pengamatan visual pada seluruh lahan pertanian - Memperkirakan jumlah tanaman yang tumbuh pada seluruh lahan pertanian berdasarkan pengalaman dan pengetahuan petani
Interpretasi	Indeks pertanaman memiliki nilai yang bervariasi tergantung pada jenis tanaman, umur tanaman, dan kondisi lahan pertanian. Dengan mengetahui indeks pertanaman, petani dapat menilai keadaan tanaman dan melakukan evaluasi terhadap hasil panen yang telah dicapai
Sumber Data	Dinas Pertanian
Frekuensi	Tahunan

5) TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA LAPANGAN USAHA SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN (JUTA/ORANG)

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (juta rupiah/orang)

Definisi	Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Rumus Perhitungan	$PTK = \frac{O_p}{JTkp}$ - Dimana : PTK = Produktivitas Tenaga Kerja; O_p = Produk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang dihasilkan; JTkp = Jumlah tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang dibayar
Interpretasi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan digunakan untuk mengukur kemampuan tenaga kerja dalam mengerjakan pekerjaan dalam waktu kerja yang sudah ditentukan dengan metode penghitungan adalah nilai tambah dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang dibayar
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur)
Frekuensi	Setiap tahun

d) URUSAN PERDAGANGAN

1) KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB (%)

Nama Indikator	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
Definisi	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB adalah persentase nilai tambah bruto (gross value added) yang dihasilkan oleh sektor perdagangan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Sektor perdagangan meliputi kegiatan perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor.
Rumus Perhitungan	<i>Kontribusi Sektor Perdagangan (%) = $\left(\frac{PDRB \text{ Sektor Perdagangan}}{Total \text{ PDRB}}\right) \times 100$</i> Keterangan : • PDRB Sektor Perdagangan: Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (atau konstan) yang berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran. • Total PDRB: Jumlah seluruh nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi dalam wilayah tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin besar peran sektor perdagangan dalam membentuk PDRB
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS): Tabel PDRB Menurut Lapangan Usaha
Frekuensi	Tahunan

2) EKSPOR BARANG DAN JASA (% PDRB)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.C.8)

3) PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERDAGANGAN (%)

Nama Indikator	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan (%)
Definisi	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan merupakan tingkat pertumbuhan dari aktivitas pada sektor perdagangan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	$pertmbPDRB_D = \frac{(PDRB_{D(n)} - PDRB_{D(n-1)})}{PDRB_{n-1}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat pertumbuhan semakin besar kontribusi dan berkembangnya sektor perdagangan pada suatu daerah
Sumber Data	Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

e) URUSAN PERINDUSTRIAN

1) PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUKSI (%)

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Nilai Produksi (%)
Definisi	Persentase Peningkatan Nilai Produksi digunakan untuk mengukur jumlah peningkatan nilai produksi dibandingkan dengan kondisi di tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	$\%pennilprod = \frac{nilprod_n - nilprod_{n-1}}{nilprod_{n-1}} \times 100\%$ dimana %pennilprod = Persentase peningkatan nilai produksi nilprod_n = Nilai produksi tahun berjalan nilprod_{n-1} = Nilai produksi tahun sebelumnya
Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatannya berarti mengindikasikan terjadi peningkatan produktifitas di sektor industri
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

2) Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator sasaran visi (II.B)

3) PROPORSI JUMLAH IKM (%)

Nama Indikator	Proporsi Jumlah IKM (%)
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama
Rumus Perhitungan	$Proporsi\ IKM = \frac{Jml\ Unit\ IKM}{Total\ Jml\ Unit\ Industri}$

Interpretasi	Industri kecil dan menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	a. Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik b. Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

4. FUNGSI PENDUKUNG

a) KESEKRETARIATAN DAERAH

1) INDEKS PELAYANAN PUBLIK (INDEKS)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator sasaran visi (II.S)

2) INDEKS REFORMASI BIROKRASI (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)																						
Definisi	Indeks RB adalah gambaran tingkat kemajuan di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas																						
Rumus Perhitungan	a. Terdapat 3 variabel yaitu (i) komponen (ii) sub komponen dan (iii) indikator, dimana komponen dan sub komponen dialokasikan nilai sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th><th>KOMPONEN</th><th>BOBOT</th><th>SUB KOMPONEN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pengungkit</td><td>60%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Aspek Pemenuhan</td><td>20%</td><td> 1) Manajemen Perubahan (2%) 2) Deregulasi Kebijakan (2%) 3) Penataan Organisasi (3%) 4) Peantaaan Tatalaksana (2,5%) 5) Penataan Manajemen Sdm (3%) 6) Penguatan Akuntabilitas (2,5%) 7) Penguatan Pengawasan (2,5%) 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%) </td></tr> <tr> <td></td><td>Aspek Hasil Antara</td><td>10%</td><td> 1) Kualitas Pengelolaan Arsip (1%) 2) Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%) 3) Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%) 4) Kualitas Pengelolaan Aset (1%) 5) <i>Merit System</i> (1%) 6) Asn Profesional (1%) 7) Kualitas Perencanaan (1%) 8) Maturitas Spip (1%) 9) Kapabilitas Apip (1%) 10) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%) </td></tr> <tr> <td></td><td>Aspek Reform</td><td>30%</td><td>1) Manajemen Perubahan (3%)</td></tr> </tbody> </table>			NO.	KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Pengungkit	60%			Aspek Pemenuhan	20%	1) Manajemen Perubahan (2%) 2) Deregulasi Kebijakan (2%) 3) Penataan Organisasi (3%) 4) Peantaaan Tatalaksana (2,5%) 5) Penataan Manajemen Sdm (3%) 6) Penguatan Akuntabilitas (2,5%) 7) Penguatan Pengawasan (2,5%) 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)		Aspek Hasil Antara	10%	1) Kualitas Pengelolaan Arsip (1%) 2) Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%) 3) Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%) 4) Kualitas Pengelolaan Aset (1%) 5) <i>Merit System</i> (1%) 6) Asn Profesional (1%) 7) Kualitas Perencanaan (1%) 8) Maturitas Spip (1%) 9) Kapabilitas Apip (1%) 10) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)		Aspek Reform	30%	1) Manajemen Perubahan (3%)
NO.	KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN																				
1	Pengungkit	60%																					
	Aspek Pemenuhan	20%	1) Manajemen Perubahan (2%) 2) Deregulasi Kebijakan (2%) 3) Penataan Organisasi (3%) 4) Peantaaan Tatalaksana (2,5%) 5) Penataan Manajemen Sdm (3%) 6) Penguatan Akuntabilitas (2,5%) 7) Penguatan Pengawasan (2,5%) 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)																				
	Aspek Hasil Antara	10%	1) Kualitas Pengelolaan Arsip (1%) 2) Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%) 3) Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%) 4) Kualitas Pengelolaan Aset (1%) 5) <i>Merit System</i> (1%) 6) Asn Profesional (1%) 7) Kualitas Perencanaan (1%) 8) Maturitas Spip (1%) 9) Kapabilitas Apip (1%) 10) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)																				
	Aspek Reform	30%	1) Manajemen Perubahan (3%)																				

			2) Deregulasi Kebijakan (3) 3) Penataan Organisasi (4,5%) 4) Penataan Tatalaksana (3,75%) 5) Penataan Manajemen Sdm (4,5%) 6) Penguatan Akuntabilitas (3,75%) 7) Penguatan Pengawasan (3,75%) 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)
2	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	10%	1) Opini Bpk (3%) 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja (7)
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Kkn	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	1) Capaian Kinerja (5%) 2) Kinerja Lainnya (2%) 3) Survey Internal Organisasi (3%)

b. Setiap sub komponen pada komponen pengungkit akan dibagi ke dalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub komponen tersebut. Setiap pertanyaan/ pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e atau numerik. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal, jawaban numerik diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang dapat dihitung langsung ketercapaiannya.

c. Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “Tidak” maka akan diberikan nilai 0.

d. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, asesor harus menggunakan professional judgementnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap indikator, dan didukung dengan suatu kertas kerja penilaian mandiri.

e. Setiap sub-komponen pada komponen hasil akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/ pernyataan akan dijawab dengan angka nominal.

f. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: (i) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen, sehingga ditemukan suatu angka tertentu, misal: sub-komponen Pengendalian Gratifikasi mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki

	10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab “Ya” ada 3 (tiga) pertanyaan, maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $(3/10) \times 10 = 3$; (ii) Untuk indikator yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub indikator, penyimpulan tentang indikator dilakukan melalui nilai rata-rata; (iii) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 100. g. Pertanyaan atau pernyataan dikategorikan ke dalam 2 level, yaitu pertanyaan atau pernyataan level instansi/pusat dan level unit kerja. Pemetaan beberapa pertanyaan atau pernyataan tersebut sebagai berikut : (i) Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level instansi/pusat; (ii) Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level unit kerja; dan (iii) Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level instansi/pusat dan level unit kerja.
Interpretasi	Indeks RB berfungsi juga memastikan pemerintahan terbebas atau bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Inilah yang membuat saat sebuah instansi pemerintah memiliki Indeks RB yang tinggi, maka tujuan-tujuan dari Indeks RB yang telah dipaparkan sebelumnya semakin bisa terwujud.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

3) INDEKS REFORMASI HUKUM (NILAI)

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.
Rumus Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%, b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%,

	c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reuiu, dengan bobot 35%, d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH: a. AA >90 – 100 Istimewa b. A >80 – 90 Sangat Baik c. BB >70 – 80 Baik d. B >60 – 70 Cukup Baik e. CC >50 – 60 Cukup f. C >30 – 50 Buruk g. D 0 – 30 Sangat Buruk Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assesment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM
Frekuensi	Tahunan

4) INDEKS BerAKHLAK (NILAI)

Nama Indikator	Indeks Ber-Akhlak (Nilai)								
Definisi	Indeks BerAKHLAK adalah alat untuk mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi mengenai implementasi Core Values BerAKHLAK, keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi.								
Rumus Perhitungan	Perhitungan Indeks BerAKHLAK berdasarkan : 1. Hasil Survei BerAKHLAK (Bobot 80%) 2. Hasil Evaluasi Organisasi (Bobot 20%)* *) Catatan : Perhitungan Indeks BerAKHLAK menggunakan Hasil Evaluasi Organisasi (Bobot 20%) hanya pada tahun 2024, pada tahun sebelumnya hanya berdasarkan hasil Survei BerAKHLAK								
Interpretasi	Survei Indeks BerAKHLAK dilaksanakan terhadap ASN dengan jumlah responden minimal ditentukan oleh Kementerian PANRB. Kategori Indeks BerAKHLAK yaitu : <table><tr><th>PREDIKAT</th><th>KATEGORI</th><th>RANGE INDEKS</th><th>DESKRIPSI</th></tr><tr><td>A</td><td>Sehat</td><td>75%-100%</td><td>Nilai Berakhlak Sudah Sangat Erat Menjadi Bagian Dari Perilaku Kerja Sehari-Hari Dan Menjadi Ciri Khas</td></tr></table>	PREDIKAT	KATEGORI	RANGE INDEKS	DESKRIPSI	A	Sehat	75%-100%	Nilai Berakhlak Sudah Sangat Erat Menjadi Bagian Dari Perilaku Kerja Sehari-Hari Dan Menjadi Ciri Khas
PREDIKAT	KATEGORI	RANGE INDEKS	DESKRIPSI						
A	Sehat	75%-100%	Nilai Berakhlak Sudah Sangat Erat Menjadi Bagian Dari Perilaku Kerja Sehari-Hari Dan Menjadi Ciri Khas						

				Yang Mewakili Individu Di Dalam Organisasi Tersebut
	B	Cukup Sehat	50%-74,9%	Pegawai Sudah Mengimplementasikan Nilai-Nilai Berakhlak Dalam Perilaku Kerja Sehari-Hari Dengan Baik
	C	Tidak Sehat	25%-49,9%	Pegawai Memiliki Tingkat Implementasi Nilai Berakhlak Yang Rendah Ke Dalam Perilaku Kerja Sehari-Hari
	D	Sangat Tidak Sehat	0%-24,9%	Pegawai Memiliki Tingkat Implementasi Nilai Berakhlak Yang Sangat Rendah Ke Dalam Perilaku Kerja Sehari-Hari
Sumber Data		Kementerian PAN DAN RB		
Frekuensi		Tahunan		

5) INDEKS AKSES KEUANGAN DAERAH (IKAD)

Nama Indikator	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Definisi	Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data <i>supply</i> dan <i>demand</i> . Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 0-10
Rumus Perhitungan	$IKAD_m = \left(\sum_{l=1}^{14} a_l Z_{lm} \right) \times 10$ Dimana a_l merupakan bobot dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan menjadi skala
Interpretasi	Menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

6) INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Nama Indikator	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
Definisi	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (<i>evidence-based</i>)

Rumus Perhitungan	Perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan berdasarkan pembobotan Instrumen IKK yang terdiri dari : 1. Profil (Bobot 10%) : Pelibatan pejabat fungsional Analis Kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan. 2. Perencanaan Kebijakan (Bobot 20%) : 1) penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid; 2) keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan; dan 3) pelaksanaan analisis dampak sebelum kebijakan diimplementasikan 3. Implementasi Kebijakan (Bobot 25%) : 1) kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan; 2) efektifitas pelaksanaan kebijakan di lapangan; dan 3) adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. 4. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan (Bobot 30%) : 1) adanya evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan; adanya dampak yang terukur bagi masyarakat; dan 2) adanya keselarasan kebijakan dengan kebijakan lain yang relevan. 5. Transparansi dan Partisipasi Publik (Bobot 15%) : 1) tersedianya akses informasi kebijakan bagi publik; dan 2) adanya mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan.
Interpretasi	Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap tahun dengan objek kebijakan yaitu kebijakan pembangunan strategis dari Instansi Pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian; Kebijakan pembangunan strategis dimaksud harus memenuhi kriteria : a. mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas dan b. telah ditetapkan dan diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran. Pengukuran IKK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Registrasi melalui Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan 2. Pengukuran mandiri (<i>self asesment</i>) 3. Verifikasi hasil pengukuran mandiri 4. Penyampaian umpan balik (<i>feedback</i>)

	5. Perbaikan pengukuran berdasarkan umpan balik (<i>feedback</i>) 6. Pembahasan hasil pengukuran 7. Penetapan hasil pengukuran kualitas kebijakan Instansi Pemerintah Kualifikasi nilai kualitas kebijakan dalam Indeks Kuatiras Kebijakan yaitu : <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI</th><th>KUALIFIKASI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91,00 - 100</td><td>Unggul</td></tr> <tr> <td>80,00 - 90,99</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>65,00 - 79,99</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>50,00 - 64,99</td><td>Cukup</td></tr> <tr> <td>< 50,00</td><td>Kurang</td></tr> </tbody> </table>	NILAI	KUALIFIKASI	91,00 - 100	Unggul	80,00 - 90,99	Sangat Baik	65,00 - 79,99	Baik	50,00 - 64,99	Cukup	< 50,00	Kurang
NILAI	KUALIFIKASI												
91,00 - 100	Unggul												
80,00 - 90,99	Sangat Baik												
65,00 - 79,99	Baik												
50,00 - 64,99	Cukup												
< 50,00	Kurang												
Sumber Data	LAN RI												
Frekuensi	Tahunan												

7) INDEKS ZAKAT NASIONAL (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Zakat Nasional (Indeks)
Definisi	Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data <i>supply</i> dan <i>demand</i> . Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 0-10
Rumus Perhitungan	$IKAD_m = \left(\sum_{l=1}^{14} a_l Z_{lm} \right) \times 10$ Dimana a_l merupakan bobot dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan menjadi skala
Interpretasi	Menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

8) NILAI EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (NILAI)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator sasaran visi (II.F)

9) NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (NILAI)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.V)

10) NILAI EVALUASI AKIP (NILAI)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.W)

11) PERSENTASE KERJASAMA WAJIB YANG DILAKSANAKAN (%)

Nama Indikator	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan (%)
Definisi	Persentase dari total kerja sama wajib antara pemerintah daerah (kabupaten/kota) dengan pemerintah provinsi atau nasional atau dengan kabupaten/kota lainnya yang telah dilaksanakan atau dipenuhi dalam suatu periode waktu tertentu. Kerja sama wajib biasanya merujuk pada peraturan atau keputusan yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan atau menyediakan sumber daya tertentu sebagai bagian dari kesepakatan atau perjanjian dengan pihak lainnya, seperti pemerintah provinsi atau nasional.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan} = \frac{\text{Jumlah Kerjasama Wajib yang telah Dilaksanakan atau Dipenuhi}}{\text{Total Kerjasama Wajib yang Diharuskan atau Diperintahkan}} \times 100$
Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah (kabupaten/kota) telah memenuhi kewajiban atau kesepakatan yang diatur dalam peraturan atau keputusan untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi atau nasional atau kabupaten/kota lain. Kerja sama ini dapat berupa pengalokasian sumber daya, pelaksanaan program atau proyek bersama, atau kewajiban lainnya yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau aturan hukum. Dalam konteks ini, persentase kerja sama wajib yang dilaksanakan menggambarkan efektivitas pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Semakin tinggi persentase ini, semakin baik pula implementasi kerja sama wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Indikator ini penting untuk mengukur ketaatan dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi komitmen serta menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kerja sama dengan tingkat yang telah ditetapkan dalam regulasi atau perjanjian yang berlaku. Evaluasi terhadap indikator ini dapat memberikan gambaran tentang efisiensi administrasi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
Sumber Data	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

12) INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Indeks)
Definisi	Indikator ini atau juga dikenal dengan Tingkat Kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) adalah ukuran capaian tingkat pengembangan kelembagaan UKPBJ di suatu daerah berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mencakup aspek kelembagaan, SDM, proses bisnis, sistem informasi, dan peran strategis UKPBJ.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Kematangan UKPBJ (\%)} = \left(\frac{\text{Nilai Skor Kematangan Saat Ini}}{\text{Nilai Skor Maksimum}} \right) \times 100$ Keterangan : • Nilai Skor Kematangan Saat Ini: Total nilai penilaian dari LKPP berdasarkan indikator penilaian (biasanya menggunakan kuesioner atau instrumen penilaian mandiri/evaluasi eksternal). • Nilai Skor Maksimum: Nilai maksimal yang dapat dicapai sesuai indikator LKPP (biasanya 100 poin atau sesuai bobot terkini).
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin matang dan strategis peran UKPBJ dalam mendukung belanja daerah
Sumber Data	Laporan Evaluasi Kematangan UKPBJ oleh LKPP
Frekuensi	Tahunan (sesuai jadwal evaluasi LKPP)

13) INDEKS KEMATANGAN ORGANISASI (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)
Definisi	Indeks Kematangan Organisasi (IKO) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan suatu organisasi pemerintah dalam hal penerapan sistem, tata kelola, proses, sumber daya manusia, budaya kerja, serta kemampuan beradaptasi dan berinovasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Kematangan Organisasi (IKO)} = \frac{\sum(\text{Nilai Aspek} \times \text{Bobot})}{\text{Total Bobot}}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin matang dan efektif organisasi menjalankan fungsinya
Sumber Data	Laporan Evaluasi Kelembagaan
Frekuensi	Tahunan

14) ROA BUMD (%)

Nama Indikator	Return on Asset (ROA) BUMD (%)
Definisi	Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan

	membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Rumus Perhitungan	$ROA = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}} \times 100\%$
Interpretasi	<i>Return On Asset (ROA)</i> merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD. (*) *menyesuaikan ketersediaan data di daerah dan akan dikonfirmasi lebih lanjut”
Frekuensi	Tahunan

b) KESEKRETARIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1) NILAI IKM DPRD (NILAI)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.V)

2) PERSENTASE RANPERDA YANG DITETAPKAN (%)

Nama Indikator	Persentase Ranperda yang Ditetapkan (%)
Definisi	Mengukur tingkat capaian penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam satu periode tertentu (biasanya satu tahun), dibandingkan jumlah Ranperda yang telah direncanakan atau diajukan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\% \text{Ranperda yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda}} \times 100\%$ Nilai 100% berarti semua Ranperda yang direncanakan berhasil ditetapkan menjadi Perda Nilai dibawah 100% menunjukkan ada Ranperda yang belum selesai proses pembahasannya atau tidak dilanjutkan.
Interpretasi	- Semakin tinggi persentase (mendekati atau sama dengan 100%), semakin baik kinerja DPRD dan Pemerintah daerah dalam menuntaskan pembahasan Ranperda sesuai jadwal dan prioritas yang telah ditetapkan dalam Propemperda - Persentase rendah menunjukkan bahwa terdapat hambatan atau keterlambatan dalam proses

	pembahasan, seperti perbendaan pandangan, perubahan prioritas atau kendala teknis/administratif.
Sumber Data	Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD
Frekuensi	Tahunan

5. FUNGSI PENUNJANG

a) PERENCANAAN

1) INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (ANGKA)

Nama Indikator	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Angka)
Definisi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah} = \frac{\sum_i^n = 1 (\text{Skori} \times \text{Boboti})}{\sum_i^n = 1 \text{ Boboti}}$ Keterangan : • Skor i = Nilai dari setiap aspek penilaian (0–100) • Bobot i = Bobot pentingnya aspek tersebut terhadap kualitas perencanaan • Aspek penilaian meliputi, misalnya: ➢ Kelengkapan dokumen ➢ Konsistensi antar dokumen (RPJMD–RKPD–Renja) ➢ Keterpaduan dengan prioritas nasional ➢ Tingkat partisipasi masyarakat ➢ Penggunaan sistem informasi (SIPD) ➢ Ketepatan waktu penyusunan
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas tata kelola perencanaan (Perumusan saat ini menggunakan metode perumusan baru)
Sumber Data	Bappeda (dokumen RPJMD, RKPD, Renja, Renstra)
Frekuensi	Tahunan

2) NILAI EVALUASI AKIP KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA (NILAI)

Nama Indikator	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja (Nilai)
Definisi	Nilai evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) komponen perencanaan kinerja merupakan ukuran sejauh mana perencanaan kinerja instansi pemerintah telah memenuhi standar yang ditetapkan. Evaluasi ini menilai kualitas dan keselarasan perencanaan kinerja, termasuk perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, dan rencana aksi, dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Rumus Perhitungan	Nilai evaluasi AKIP komponen Perencanaan Kinerja pada dasarnya tidak memiliki rumus tunggal yang baku. Penilaian AKIP, termasuk komponen Perencanaan Kinerja, dilakukan dengan menggunakan pendekatan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penilaian berfokus pada pemenuhan kriteria dan bobot yang ditentukan untuk setiap aspek perencanaan kinerja
Interpretasi	Interpretasi nilai evaluasi AKIP komponen Perencanaan Kinerja merujuk pada penilaian atas kualitas dan efektivitas perencanaan kinerja yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah dalam konteks AKIP. Penilaian ini mencakup berbagai aspek seperti keselarasan perencanaan, keterukuran target, dan kelengkapan dokumen perencanaan
Sumber Data	Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra), Dokumen Perjanjian Kinerja, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Rencana Aksi, Laporan Kinerja, Hasil Evaluasi AKIP sebelumnya, Laporan Kinerja Instansi, Dokumen pendukung lainnya
Frekuensi	Tahunan

b) KEUANGAN

1) IPKD (SKOR)

Nama Indikator	IPKD (Skor)
Definisi	Melihat nilai dari kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah
Rumus Perhitungan	1. Bobot Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran = 15 2. Bobot Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD = 20 3. Bobot Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah = 15 4. Bobot Dimensi Penyerapan Anggaran = 20 5. Bobot Dimensi Kondisi Keuangan Daerah = 15 6. Bobot Dimensi Opini BPK atas LKPD = 15
Interpretasi	Merupakan jumlah bobot dari keenam komponen kinerja atau kriteria dimaksud
Sumber Data	BKD/SK Mendagri Hasil Pengukuran IPKD
Frekuensi	Tahunan

2) OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DARI BPK (OPINI)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja utama (III.X)

3) PERSENTASE BELANJA PEGAWAI TERHADAP BELANJA DAERAH DILUAR TUNJANGAN GURU YANG DIALOKASIKAN MELALUI TKD (%)

Nama Indikator	Persentase Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)
Definisi	Indikator ini merupakan indikator untuk mengukur rasio belanja pegawai di luar guru
Rumus Perhitungan	$\%blnjpgwiexguru = \frac{\text{jumlah belanja pegawai di luar guru}}{\text{jumlah APBD}} \times 100\%$
Interpretasi	1. Pembilang Jumlah belanja pegawai diluar guru adalah jumlah realisasi seluruh komponen belanja pegawai antara lain gaji, tunjangan yang melekat pada gaji dan tunjangan kinerja, tidak termasuk belanja pegawai guru 2. Penyebut Jumlah APBD adalah jumlah realisasi seluruh belanja daerah
Sumber Data	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD
Frekuensi	Tahunan

4) PERSENTASE PENURUNAN SILPA (%)

Nama Indikator	Persentase penurunan SILPA (%)
Definisi	Persentase Penurunan Silpa merupakan suatu indikator untuk mengukur Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya
Rumus Perhitungan	$\%penurunansilpa = \frac{\text{nilai realisasi SILPA}}{\text{tot belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Interpretasi	1. Pembilang Nilai realisasi SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) dalam APBD pada tahun pelaporan 2. Penyebut Total belanja anggaran dalam APBD yang ditetapkan pada tahun sebelumnya (APBD sebelum perubahan/murni)
Sumber Data	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD
Frekuensi	Tahunan

5) PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU (%)

Nama Indikator	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)
Definisi	Persentase laporan keuangan tepat waktu merupakan indikator untuk melihat perkembangan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah dan kualitas dari tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	$\%lapkeuontime = \frac{\text{tglpenyampaian yang ditentukan}}{\text{tgl penyampaian yang dilaksanakan}} \times 100\%$
Interpretasi	1. Pembilang

	Tanggal penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK RI Perwakilan Sumbar pada tahun berjalan yang telah ditentukan (pada akhir maret setiap tahunnya) 2. Penyebut Tanggal penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK RI Perwakilan Sumbar pada tahun berjalan yang dilaksanakan oleh BKD dan Pemerintah Kota Payakumbuh ke Kantor BPK RI
Sumber Data	BPK RI/Dokumentasi/Surat Penyampaian oleh BKD
Frekuensi	Tahunan

6) PERSENTASE PENAMBAHAN NILAI ASET TETAP (%)

Nama Indikator	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)
Definisi	Persentase penambahan nilai aset tetap merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rasio nilai aset tetap
Rumus Perhitungan	$\%tmbhnilasettp = \frac{total\ aset\ tetap_n}{total\ aset\ tetap_{n-1}} \times 100\%$
Interpretasi	1. Pembilang Dokumen daftar aset tetap atau hasil inventarisasi aset tahunan atau nilai aset tetap yang tercantum dalam laporan anggaran yang merupakan laporan tahun berjalan 2. Penyebut Dokumen daftar aset tetap atau hasil inventarisasi aset tahunan atau nilai aset tetap yang tercantum dalam laporan keuangan yang merupakan laporan tahun n-1 atau tahun sebelumnya
Sumber Data	BKD/Neraca
Frekuensi	Tahunan

7) PERSENTASE PENERIMAAN PAD TERHADAP TOTAL PENERIMAAN PENDAPATAN (%)

Nama Indikator	Persentase Penerimaan PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan (%)
Definisi	Indikator ini merupakan indikator untuk mengukur <i>Tax Rasio</i> atau Kemampuan Daerah dalam mengumpulkan Pajak dari Potensi Pajak Daerah
Rumus Perhitungan	$\%taxrasio = \frac{jml\ PAD}{jml\ pendapatan\ pada\ APBD} \times 100\%$
Interpretasi	1. Pembilang Jumlah realisasi seluruh pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah

	2. Penyebut Jumlah realisasi seluruh pendapatan daerah yang meliputi PAD, pendapatan transfer, dan lain lain pendapatan daerah yang sah
Sumber Data	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD
Frekuensi	Tahunan

8) PERSENTASE PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN BERBASIS DIGITAL (%)

Nama Indikator	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)
Definisi	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital merupakan indikator untuk melihat kemampuan Pemerintah Daerah dalam menerapkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang berbasis digital
Rumus Perhitungan	$\%SIK = \frac{jml \text{ sapras digitalisasi yang dibutuhkan}}{jml \text{ sapras digitalisasi yang tersedia}} \times 100\%$
Interpretasi	1. Pembilang Jumlah sarana prasarana dimaksud adalah jumlah sarana prasarana baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang dibutuhkan yang terdapat pada laporan RKBMD dan RKBMD Perubahan serta Laporan Data Base Pajak dan Retribusi Daerah 2. Penyebut Jumlah sarana prasarana dimaksud adalah jumlah sarana prasarana baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang tersedia yang terdapat pada laporan RKBMD dan RKBMD Perubahan serta Laporan Data Base Pajak dan Retribusi Daerah
Sumber Data	BKD
Frekuensi	Tahunan

c) KEPEGAWAIAN

1) INDEKS IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN (Indeks)
Definisi	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah.
Rumus Perhitungan	Formulasi penghitungan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN berdasarkan rumus pengolahan hasil yang terdapat pada sistem aplikasi indeks. Implementasi NSPK Manajemen ASN yang di kembangkan oleh BKN sebagai berikut :

	a. Nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat Unggul; b. Nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat Baik; c. Nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat Cukup; d. Nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat Kurang; dan e. Nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat Buruk.
Interpretasi	Semakin tinggi Nilai Indeks NSPK Instansi Pemerintah, semakin tinggi kualitas manajemen ASN
Sumber Data	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Frekuensi	Tahunan

2) Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)

Nama Indikator	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)
Definisi	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan
Rumus Perhitungan	Jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme Ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi Ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi Ke-K * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-K $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi Ke-1 * Rating Jawaban indikator Kualifikasi Ke-1 $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi Ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi Ke-m

	Kategori Penilaian : a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91–100; b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90; c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80; d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; dan e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 kebawah.
Interpretasi	Semakin tinggi indeks Profesionalitas ASN, maka semakin profesional ASN.
Sumber Data	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Frekuensi	Tahunan

d) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1) INDEKS PROFESIONALITAS ASN DIMENSI KOMPETENSI (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (Indeks)
Definisi	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kompetensi pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan
Rumus Perhitungan	Jumlah hasil perkalian dari bobot indikator kompetensi dikalikan nilai jawaban indikator kompetensi. Kriteria penilaian dimensi kompetensi : 1. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. 2. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas : a. Diklat Kepemimpinan; b. Diklat Fungsional; c. Diklat Teknis; dan d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.
Interpretasi	Semakin tinggi Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi, semakin kompeten ASN dalam menjalankan tugas jabatan.
Sumber Data	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Frekuensi	Tahunan

e) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1) INDEKS INOVASI DAERAH (NILAI)

Metadata dapat dilihat pada indikator kinerja sasaran visi (II.G)

2) PERSENTASE KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI (INDEKS)

Nama Indikator	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Indeks)
Definisi	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti adalah proporsi dokumen kebijakan (peraturan, program, atau kegiatan) yang disusun berdasarkan hasil kajian, data, analisis, atau riset yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, terhadap total jumlah kebijakan yang disusun dalam satu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.
Rumus Perhitungan	$\%kebijakabasebukti = \frac{jkebijkanberbasisbukti}{tkebijakan} \times 100$ Keterangan : - Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti: Dokumen kebijakan (misalnya: RPJMD, RKPD, Renja, Perkada, Perda, Program, atau kegiatan) yang dilengkapi dengan justifikasi berbasis data, kajian akademik, riset, statistik, survei, atau analisis kebijakan. - Total Jumlah Kebijakan: Keseluruhan dokumen kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pada periode tertentu (misalnya dalam satu tahun anggaran).
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin kuatnya penerapan prinsip evidence-based policy
Sumber Data	Bappeda (Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)
Frekuensi	Tahunan

6. PENGAWASAN

a) INSPEKTORAT

1) PERSENTASE PEMENUHAN INDIKATOR MSCP (%)

Nama Indikator	Persentase Pemenuhan Indikator MSCP (%)
Definisi	Persentase pemenuhan indikator MSCP merupakan indikator yang memperlihatkan pemenuhan dari komitmen dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan yang mencakup delapan area intervensi utama.
Rumus Perhitungan	Indikator MSCP yang dipenuhi dibagi Total Indikator MSCP dikali 100%
Interpretasi	Semakin tinggi pemenuhan dari indikator MSCP maka akan semakin baik tata kelola pemerintahan
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan

2) KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH – APIP (LEVEL)

Nama Indikator	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah – APIP (Level)

Definisi	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah merupakan suatu penilaian terhadap tingkat kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif																																							
Rumus Perhitungan	Bobot Komponen, Matriks Elemen, dan Topik Penilaian Kapabilitas APIP <table><tr><td></td><th colspan="5">Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) 60%</th><th>Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) 40%</th></tr><tr><th>ELEMEN</th><th>PENGELOLAAN SDM (30%)</th><th>PRAKTIK PROFESIONAL (30%)</th><th>AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)</th><th>BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)</th><th>STRUKTUR TATA KELOLA (20%)</th><th>PERAN DAN LAYANAN APIP</th></tr><tr><th rowspan="4">TOPIK</th><td>Perencanaan SDM APIP</td><td>Perencanaan Pengawasan</td><td>Rencana Kerja dan Anggaran APIP</td><td>Pengelolaan Komunikasi Intern APIP</td><td>Mekanisme Pendanaan</td><td>Audit Ketaatan (Compliance Auditing)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Pelaksanaan Anggaran</td><td>Hubungan APIP dengan Manajemen</td><td>Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM</td><td>Audit Kinerja (Performance Auditing)</td></tr><tr><td>Pengembangan SDM Profesional APIP</td><td>Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas</td><td>Sistem Pengukuran Kinerja APIP</td><td>Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan</td><td>Hubungan Pelaporan</td><td>Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/ GRC)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D</td><td></td><td></td><td>Jasa Konsultansi (Advisory Services)</td></tr></table>		Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) 60%					Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) 40%	ELEMEN	PENGELOLAAN SDM (30%)	PRAKTIK PROFESIONAL (30%)	AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)	BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)	STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	PERAN DAN LAYANAN APIP	TOPIK	Perencanaan SDM APIP	Perencanaan Pengawasan	Rencana Kerja dan Anggaran APIP	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Mekanisme Pendanaan	Audit Ketaatan (Compliance Auditing)			Pelaksanaan Anggaran	Hubungan APIP dengan Manajemen	Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM	Audit Kinerja (Performance Auditing)	Pengembangan SDM Profesional APIP	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Hubungan Pelaporan	Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/ GRC)			Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D			Jasa Konsultansi (Advisory Services)
	Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) 60%					Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) 40%																																		
ELEMEN	PENGELOLAAN SDM (30%)	PRAKTIK PROFESIONAL (30%)	AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)	BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)	STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	PERAN DAN LAYANAN APIP																																		
TOPIK	Perencanaan SDM APIP	Perencanaan Pengawasan	Rencana Kerja dan Anggaran APIP	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Mekanisme Pendanaan	Audit Ketaatan (Compliance Auditing)																																		
			Pelaksanaan Anggaran	Hubungan APIP dengan Manajemen	Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM	Audit Kinerja (Performance Auditing)																																		
	Pengembangan SDM Profesional APIP	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Hubungan Pelaporan	Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/ GRC)																																		
			Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D			Jasa Konsultansi (Advisory Services)																																		
Interpretasi	Level Kapabilitas APIP - <i>Initial</i> (Level 1) ⇒ Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan - <i>Structured</i> (Level 2) ⇒ APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai - <i>Delivered</i> (Level 3) ⇒ APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D - <i>Institutionalized</i> (Level 4) ⇒ APIP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi organisasi K/L/D hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas pengawasan secara terus-menerus untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi K/L/D - <i>Optimized</i> (Level 5) ⇒ APIP telah mampu memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi K/L/D dalam bentuk pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan																																							
Sumber Data	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)																																							
Frekuensi	Tahunan dengan Penilaian Mandiri pada Triwulan I dan Triwulan II dan Penetapan Level bulan Juli – Agustus Tahun Berjalan																																							

3) SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS - SPI KPK (NILAI)

Nama Indikator	Survei Penilaian Integritas - SPI KPK (Nilai)
Definisi	Survei Penilaian Integritas merupakan suatu alat mengukur tingkat integritas serta potensi risiko korupsi di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	Survei dilakukan KPK melalui link https://spi.kpk.go.id/ yang meliputi responden internal, responden eksternal, dan responden ahli . Kemudian dari hasil survei tersebut diperoleh hasil penilaian
Interpretasi	Kategori Indeks Integritas : - 00.00 – 72.99 ⇒ Rentan - 73.00 – 77.99 ⇒ Waspada - 78.00 – 100.00 ⇒ Terjaga
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan

7. KEWILAYAHAN

a) KECAMATAN

1) PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN (LPM, PKK, RT/RW) YANG AKTIF (%)

Nama Indikator	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang Aktif (%)
Definisi	Indikator ini digunakan untuk mengukur keaktifan dari lembaga kemasyarakatan yang ada, tercatat dan tumbuh di masyarakat sebagai salah satu wadah pemberdayaan masyarakat
Rumus Perhitungan	$\% \text{lembagakemasyaktif} = \frac{\text{lembagakemasyaktif}}{\text{totallembagakemasy}} \times 100\%$
Interpretasi	Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu wadah pemberdayaan masyarakat, dengan semakin tingginya persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, mengindikasikan semakin berfungsinya kelembagaan pemberdayaan di masyarakat
Sumber Data	Masing-masing kecamatan
Frekuensi	Tahunan

2) PERSENTASE PENGADUAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI (%)

Nama Indikator	Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)
Definisi	Indikator ini digunakan untuk mengetahui respon/tanggapan dari instansi terkait pengaduan pelayanan masyarakat yang diterima

Rumus Perhitungan	$\% \text{responaduan} = \frac{\text{responaduan}}{\text{aduan}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengaduan pelayanan masyarakat merupakan keluhan yang dirasakan masyarakat, dan semakin tinggi persentasenya yang berarti adanya penanganan yang cepat dan responsif terhadap aduan pelayanan masyarakat yang diterima
Sumber Data	Masing-masing Kecamatan
Frekuensi	Tahunan

8. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1) PERSENTASE PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF (%)

Nama Indikator	Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang Aktif (%)
Definisi	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jumlah partai politik dan organisasi masyarakat yang masih aktif melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART, memiliki kepengurusan aktif, serta memenuhi kewajiban administratif (seperti pelaporan tahunan), terhadap total jumlah partai politik dan organisasi masyarakat yang terdaftar di suatu wilayah
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah parpol dan ormas yang aktif}}{\text{Jumlah parpol dan ormas yang terdaftar}} \times 100\%$ Keterangan : - Parpol dan Ormas Aktif adalah organisasi yang: - Memiliki kepengurusan yang masih berjalan - Melaporkan kegiatan minimal 1x/tahun - Tidak dinyatakan tidak aktif/dibekukan - Total Parpol dan Ormas Terdaftar adalah seluruh parpol dan ormas yang masih terdata secara administratif di wilayah tersebut (baik aktif maupun tidak aktif). - Hasil dalam bentuk persentase (%)
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin tinggi partisipasi aktif partai politik dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi
Sumber Data	- Database Parpol dan Ormas dari Kantor Kesbangpol - Laporan Tahunan Parpol dan Ormas - Hasil Monitoring & Evaluasi Kesbangpol - Dokumentasi Kegiatan Parpol dan Ormas (laporan kegiatan, undangan, berita acara, dll.)
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan di akhir tahun oleh Kantor Kesbangpol)

2) PERSENTASE PENANGANAN KONFLIK SOSIAL YG TERJADI DI TENGAH MASYARAKAT (%)

Nama Indikator	Persentase Penanganan Konflik Sosial Yang Terjadi di Tengah Masyarakat (%)
Definisi	Ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah kasus konflik sosial yang berhasil diselesaikan secara damai dan tuntas oleh pemerintah daerah (melalui mediasi, fasilitasi, atau penyelesaian hukum), dibandingkan dengan jumlah total konflik sosial yang terjadi dalam satu periode tertentu di wilayah tersebut
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Terjadi}} \times 100\%$ Keterangan : - Konflik Sosial yang Diselesaikan: Konflik yang telah melalui proses penyelesaian formal (mediasi, fasilitasi, penyelesaian hukum) dan berakhir damai atau tidak berlanjut. - Total Konflik Sosial yang Terjadi: Seluruh konflik sosial yang terdeteksi, dilaporkan, dan tercatat secara resmi pada periode tersebut. - Hasil Akhir: Dalam bentuk persentase
Interpretasi	Semakin tinggi angka, semakin efektif upaya deteksi dan resolusi konflik oleh pemerintah
Sumber Data	- Laporan Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kota Payakumbuh - Laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilaporkan dalam laporan akhir tahun seksi Hubungan Antar Lembaga)

3) INDEKS HARMONI INDONESIA – IHaI (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Harmoni Indonesia – IHaI (Indeks)
Definisi	Sebuah sistem pengukuran yang dirancang untuk menentukan tingkat harmoni dan kerukunan dalam masyarakat Indonesia khususnya pada tingkat kabupaten/kota, mencakup berbagai aspek yaitu ekonomi, sosial, budaya dan keberagaman
Rumus Perhitungan	Penghitungan IHaI dilakukan melalui Survei Online dengan target responden 1250. Hasil survei diolah berdasarkan Pendekatan Wellbeing Methodology (WM), yaitu: 1). Aspek harmoni Ekonomi; 2). Aspek Harmoni Sosial; 3) Harmoni Budaya; 4) Harmoni Keberagamaan. IHaI kemudian diuraikan menjadi 8 variabel, yaitu : - Variabel X1: Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan, bobot 15% - Variabel X2: Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan, Bobot 15%

	3) Variabel X3: Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis, 11,5% 4) Variabel X4: Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Komunitas Marginal, 11,5% 5) Variabel X5: Pelestarian dan Penguatan Nilai Budaya Lokal, 11% 6) Variabel X6: Penguatan Akulturasi dan Keberagaman Budaya, 11% 7) Variabel X7: Moderasi Beragama dan Toleransi Antarumat Beragama, 12,5% 8) Variabel X8: Penguatan Nilai-Nilai Keberagamaan dalam Kehidupan Sehari-Hari, 12,5%
Interpretasi	Basis Skala 9 > 7 = Sangat bagus 6,5-7 = Bagus 5,5-6,5 = moderat < 5,5 = Kurang baik
Sumber Data	Survei Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan di awal tahun oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum)

V. METADATA INDIKATOR KINERJA KUNCI

A. LAYANAN URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR

1. PENDIDIKAN

a) TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PAUD (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)
Definisi	Persentase anak usia 5-6 tahun yang mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibandingkan dengan total jumlah anak usia 5-6 tahun
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang atau telah belajar di PAUD} / \text{Jumlah seluruh anak usia 5-6 tahun}) \times 100\%$
Interpretasi	- Tingkat partisipasi tinggi: Jika tingkat partisipasi tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak usia 5-6 tahun di suatu wilayah mendapatkan pendidikan PAUD. Hal ini positif karena pendidikan PAUD dapat memberikan dasar yang kuat untuk perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. - Tingkat partisipasi rendah:

	Jika tingkat partisipasi rendah, ini mengindikasikan bahwa masih banyak anak usia 5-6 tahun yang belum mendapatkan akses atau belum memanfaatkan layanan PAUD. Hal ini perlu menjadi perhatian karena dapat menghambat potensi perkembangan anak. - Perbandingan antar wilayah: Tingkat partisipasi juga dapat dibandingkan antar wilayah untuk melihat kesenjangan dalam akses pendidikan PAUD. Misalnya, perbandingan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, atau antar kecamatan dalam satu kabupaten. - Faktor-faktor yang mempengaruhi: Tingkat partisipasi PAUD dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: • Ketersediaan PAUD: Jumlah dan lokasi PAUD yang tersedia di suatu wilayah. • Biaya: Biaya pendidikan PAUD dan kemampuan ekonomi keluarga. • Kesadaran orang tua: Pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan PAUD. Kualitas PAUD: Fasilitas, tenaga pendidik, dan kurikulum PAUD
Sumber Data	Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

2) TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-12 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN DASAR (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)
Definisi	Proporsi anak-anak usia tersebut yang sedang atau telah menyelesaikan pendidikan dasar (sekolah dasar)
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang atau telah menyelesaikan pendidikan dasar} / \text{Jumlah seluruh anak usia 7-12 tahun}) * 100\%$
Interpretasi	- Tingkat Partisipasi Kasar: Menunjukkan persentase total anak usia 7-12 tahun yang terdaftar di sekolah dasar, tanpa memandang apakah mereka sudah menyelesaikan jenjang tersebut atau belum. - Tingkat Partisipasi Murni: Menunjukkan persentase anak usia 7-12 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. - Tingkat Partisipasi Berkelanjutan: Menunjukkan persentase anak usia 7-12 tahun yang masih bersekolah di sekolah dasar dan terus melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. - Perbandingan: Data ini juga dapat dibandingkan antar wilayah (misalnya, antar kabupaten/kota, antar provinsi) atau

	antar kelompok demografis (misalnya, laki-laki vs perempuan, kelompok pendapatan berbeda) untuk mengidentifikasi kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dasar. Data ini, yang tersedia dalam format terbuka, dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti: - Evaluasi Program: Untuk melihat efektivitas program-program pendidikan dasar yang ada dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. - Perencanaan: Untuk membantu pemerintah dan lembaga pendidikan dalam merencanakan kebijakan dan alokasi sumber daya yang lebih baik untuk pendidikan dasar. - Monitoring: Untuk melacak kemajuan dalam mencapai target universalisasi pendidikan dasar dan mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul.
Sumber Data	Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

3) TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 13-15 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13- 15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama
Rumus Perhitungan	Persentase dari populasi usia 13-15 tahun yang saat ini terdaftar dan sedang mengikuti pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat
Interpretasi	(Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang atau telah menyelesaikan pendidikan menengah pertama / Jumlah total penduduk usia 13-15 tahun) x 100%
Sumber Data	- Tingkat Partisipasi Tinggi: Jika tingkat partisipasi mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia 13-15 tahun di wilayah tersebut mendapatkan akses dan mengikuti pendidikan di SMP. Ini adalah indikator positif dari kualitas pendidikan dan upaya pemerintah dalam memastikan pendidikan dasar terpenuhi. - Tingkat Partisipasi Rendah: Jika tingkat partisipasi rendah, ini bisa menjadi tanda adanya masalah dalam akses pendidikan, seperti faktor ekonomi, sosial, atau geografis yang menghalangi anak-anak untuk bersekolah. Perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan semua anak usia SMP mendapatkan haknya untuk belajar. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi:

	- Ketersediaan Sekolah: Jumlah dan lokasi sekolah SMP yang memadai di suatu wilayah sangat berpengaruh. - Biaya Pendidikan: Biaya pendidikan, termasuk biaya pendaftaran, seragam, buku, dan lain-lain, bisa menjadi penghalang bagi keluarga yang kurang mampu. - Faktor Sosial dan Budaya: Norma sosial dan budaya tertentu dalam masyarakat bisa mempengaruhi pandangan orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak perempuan atau anak-anak dari keluarga kurang mampu. - Kualitas Pendidikan: Jika kualitas pendidikan di SMP tidak memadai, orang tua mungkin enggan mengirimkan anaknya ke sana. - Kondisi Geografis: Jarak tempuh ke sekolah, terutama di daerah terpencil, bisa menjadi masalah. - Faktor Ekonomi: Kemiskinan dan kurangnya mata pencaharian bisa mendorong anak-anak untuk bekerja daripada bersekolah.
Frekuensi	Tahunan

4) TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-18 TAHUN YANG BELUM MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN KESETARAAN (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (%)
Definisi	Persentase anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, namun mengikuti pendidikan kesetaraan (non formal), dibandingkan dengan total jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah
Rumus Perhitungan	<i>(Jumlah anak usia 7-18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan / Jumlah total anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah) x 100%</i>
Interpretasi	- Tingkat Partisipasi: Angka ini menunjukkan seberapa banyak anak dan remaja yang putus sekolah dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak anak putus sekolah yang terjangkau oleh program pendidikan kesetaraan yang dirancang untuk memberikan pendidikan setara dengan pendidikan formal - Kelompok Usia 7-18 Tahun:

	Fokus pada kelompok usia ini karena merupakan usia wajib belajar pendidikan dasar dan menengah di banyak negara. - Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah: Menunjukkan bahwa target partisipasi adalah anak-anak dan remaja yang belum memiliki ijazah pendidikan dasar atau menengah. Pendidikan Kesetaraan: - Proporsi: Angka persentase ini adalah proporsi dari total anak putus sekolah yang mengikuti program kesetaraan, bukan angka absolut. Ini penting untuk membandingkan tingkat partisipasi di berbagai wilayah atau kelompok
Sumber Data	Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

2. KESEHATAN

a) RASIO DAYA TAMPUNG RUMAH SAKIT RUJUKAN (%)

Nama Indikator	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (%)
Definisi	Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan dibagi Jumlah penduduk di Kab/Kota
Interpretasi	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan Alat kesehatan sesuai standar
Sumber Data	Dinkes
Frekuensi	Tahunan

b) PERSENTASE RS RUJUKAN TINGKAT KAB/KOTA YANG TERAKREDITASI (%)

Nama Indikator	Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang Terakreditasi (%)
Definisi	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki akreditasi
Rumus Perhitungan	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi dibagi Jumlah RS di Kab/Kota dikali 100%
Interpretasi	Pengakuan terhadap mutu pelayanan RS setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi standar akreditasi minimal madya
Sumber Data	Dinkes
Frekuensi	Tahunan

c) PERSENTASE IBU HAMIL MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL (%)

Nama Indikator	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)
Definisi	Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Rumus Perhitungan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi Jumlah ibu hamil di kab/kota dikali 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya semakin membaik layanan kesehatannya
Sumber Data	Dinkes
Frekuensi	Tahunan

d) PERSENTASE IBU BERSALIN MENDAPATKAN PELAYANAN PERSALINAN (%)

Nama Indikator	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan (%)
Definisi	Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
Rumus Perhitungan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi Jumlah ibu bersalin di kab/kota dikali 100%
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya semakin membaik layanan kesehatannya
Sumber Data	Dinkes
Frekuensi	Tahunan

e) PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR (%)

Nama Indikator	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)
Definisi	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Rumus Perhitungan	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah bayi baru lahir di kab/kota dikali 100%
Interpretasi	Semakin tinggi semakin bagus pelayanan
Sumber Data	Dinkes
Frekuensi	Tahunan

f) CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA SESUAI STANDAR (%)

Nama Indikator	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar (%)
Definisi	Mengukur persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita
Rumus Perhitungan	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah balita di kab/kota dikali 100%
Interpretasi	Semakin tinggi semakin bagus pelayanan
Sumber Data	Dinkes
Frekuensi	Tahunan

g) PERSENTASE ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR (%)

Nama Indikator	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)
Definisi	Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Rumus Perhitungan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah anak usia pendidikan dasar di kab/kota dikali 100%
Interpretasi	Mendapatkan skrining kesehatan dan tindak lanjut skrining kesehatan
Sumber Data	Dinkes
Frekuensi	Tahunan

h) PERSENTASE ORANG USIA 15-59 TAHUN MENDAPATKAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (%)

Nama Indikator	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%)
Definisi	Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Rumus Perhitungan	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota dikali 100%
Interpretasi	Skrining kesehatan dan perilaku beresiko
Sumber Data	Dinkes
Frekuensi	Tahunan

i) PERSENTASE WARGA NEGARA USIA 60 TAHUN KE ATAS MENDAPATKAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR (%)

Nama Indikator	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%)
Definisi	Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Rumus Perhitungan	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kab/kota dikali 100%
Interpretasi	Skrining kesehatan dan Tingkat kemandirian usia lanjut serta perilaku beresiko
Sumber Data	Dinkes
Frekuensi	Tahunan

j) PERSENTASE PENDERITA HIPERTENSI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR (%)

Nama Indikator	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%)
Definisi	Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Rumus Perhitungan	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita hipertensi di kab/kota dikali 100%
Interpretasi	Pengukuran TD, edukasi perubahan gaya hidup dan kepatuhan minum obat
Sumber Data	Dinkes
Frekuensi	Tahunan

k) PERSENTASE PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR (%)

Nama Indikator	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar (%)
Definisi	Mengukur persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Rumus Perhitungan	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita DM di kab/kota dikali 100%
Interpretasi	Pengukuran gula darah, edukasi dan terapi farmakologi
Sumber Data	Dinkes
Frekuensi	Tahunan

l) PERSENTASE ODGJ BERAT YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA SESUAI STANDAR (%)

Nama Indikator	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar (%)
Definisi	Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Rumus Perhitungan	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita ODGJ di kab/kota dikali 100%
Interpretasi	Pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi kepatuhan minum obat
Sumber Data	Dinkes
Frekuensi	Tahunan

m) PERSENTASE ORANG TERDUGA TBC MENDAPATKAN PELAYANAN TBC SESUAI STANDAR (%)

Nama Indikator	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar (%)
Definisi	Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
Rumus Perhitungan	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita TBC di kab/kota dikali 100%
Interpretasi	Orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Dinkes
Frekuensi	Tahunan

n) PERSENTASE ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV MENDAPATKAN PELAYANAN DETEKSI DINI HIV SESUAI STANDAR (%)

Nama Indikator	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Definisi	Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar
Rumus Perhitungan	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kab/kota dikali 100%
Interpretasi	Skrining dengan Tes Cepat HIV orang pada kelompok beresiko (ibu hamil, pasien TBC, pasien infeksi menular seksual, penaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, transgender/waria, pengguna napza suntik dan warga binaan masyarakatan)
Sumber Data	Dinkes
Frekuensi	Tahunan

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1) RASIO LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI (%)

Nama Indikator	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi (%)
Definisi	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kab./kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun existing}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Kemampuan dari jaringan irigasi yang tersedia untuk melayani kebutuhan irigasi di wilayah kewenangan kabupaten/kota
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

2) PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES TERHADAP AIR MINUM MELALUI SPAM JARINGAN PERPIPAAN DAN BUKAN JARINGAN PERPIPAAN TERLINDUNGI TERHADAP RUMAH TANGGA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA (%)

Nama Indikator	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota (%)
Definisi	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota bersangkutan}} \times 100\%$
Interpretasi	cakupan layanan air minum yang aman dan layak di suatu wilayah
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

3) PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (%)

Nama Indikator	Persentase Jumlah Rumah Tangga Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (%)
Definisi	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT} + \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	menggambarkan tingkat akses rumah tangga terhadap sistem pengelolaan air limbah yang aman dan terlayani secara teknis
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

4) RASIO KEPATUHAN IMB KAB/KOTA (%)

Nama Indikator	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota (%)
Definisi	Mengukur rasio kepatuhan IMB Kab/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku}} \times 100\%$
Interpretasi	mengukur seberapa banyak bangunan di suatu wilayah kabupaten/kota yang telah dibangun dengan izin resmi
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

5) RASIO TENAGA OPERATOR/TEKNISI/ANALISIS YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI (%)

Nama Indikator	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)
Definisi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat dibandingkan dengan jumlah total tenaga kerja konstruksi di Kota Payakumbuh
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat}}{\text{Jumlah total tenaga kerja konstruksi di Kota Payakumbuh}} \times 100\%$
Interpretasi	Perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh instansi resmi dengan total jumlah tenaga kerja di bidang tersebut.
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

6) RASIO PROYEK YANG MENJADI KEWENANGAN PENGAWASANNYA TANPA KECELAKAAN KONSTRUKSI (%)

Nama Indikator	Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasan Tanpa Kecelakaan Konstruksi (%)
Definisi	Jumlah proyek yang diawasi tanpa kecelakaan kerja dibandingkan dengan jumlah seluruh proyek yang diawasi di kota Payakumbuh

Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah proyek yang di awasi tanpa kecelakaan kerja}}{\text{Jumlah seluruh proyek yang di awasi}} \times 100\%$
Interpretasi	Menunjukkan persentase proyek konstruksi yang berada di bawah kewenangan pengawasan Dinas PUPR, yang berjalan tanpa mengalami kecelakaan konstruksi selama periode tertentu
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

4. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a) PERSENTASE KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH DIBAWAH 10 HA DI KAB/ KOTA YANG DITANGANI (%)

Nama Indikator	Persentase Kawasan Pemukiman Kumuh Dibawah 10 Ha DI Kab/ Kota yang Ditangani
Defenisi	Luasan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kab/kota yang ditangani setiap tahunnya dibandingkan dengan luas kawasan permukiman kumuh yang ada dan ditetapkan
Rumus Perhitungan	$\% = \frac{a}{b} \times 100\%$ a : Luas kawasan permukiman kumuh yang dilakukan intervensi peningkatan/ditangani b : Luas Kawasan permukiman kumuh yang ada dan ditetapkan
Interpretasi	Semakin tinggi angka persentase menunjukan penanganan/intervensi terhadap kawasan permukiman kumuh semakin besar sehingga luasan kawasan permukiman kumuh yang ada semakin berkurang.
Sumber Data	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

b) BERKURANGNYA JUMLAH UNIT RTLH - RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (%)

Nama Indikator	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni (%))
Defenisi	Kondisi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah rumah kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\% = \frac{a}{b} \times 100\%$ a : Kondisi jumlah RTLH tahun n b : Jumlah rumah kabupaten/kota
Interpretasi	Semakin kecil angka persentase, menunjukkan penanganan terhadap RTLH baik itu peningkatan kualitas maupun pembangunan baru semakin baik, dengan artian jumlah RTLH semakin berkurang.

Sumber Data	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

c) JUMLAH PERUMAHAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU - PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (%)

Nama Indikator	Jumlah Perumahan yang sudah Dilengkapi PSU - Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (%)
Defenisi	Jumlah rumah pada perumahan yang telah dilakukan serah terima PSU kepada pemerintah daerah dibandingkan dengan jumlah rumah pada perumahan yang ada.
Rumus Perhitungan	$\% = \frac{a}{b} \times 100\%$ a : Jumlah rumah pada perumahan yang telah serah terima PSU. b : Jumlah rumah pada seluruh perumahan yang ada
Interpretasi	Semakin besar persentase, menunjukkan jumlah rumah yang telah dilengkapi PSU dan kesinambungan pengelolaan PSU semakin besar.
Sumber Data	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a) PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN (%)

Nama Indikator	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (%)
Defenisi	Persentase jumlah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhasil ditangani dan diselesaikan oleh Satpol PP dalam kurun waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Pengaduan yang Masuk}} \times 100\%$ Keterangan : Jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk bisa melalui sosial media, telepon, dan pengaduan langsung.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase penyelesaian pengaduan, semakin bagus kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sumber Data	Laporan Bulanan Bidang Tibum Tranmas dan Bidang Penegakan Peraturan Daerah
Frekuensi	Tahunan

b) PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN (%)

Nama Indikator	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%)
Defenisi	Persentase jumlah Perda dan Perkada yang telah ditegakkan oleh Satpol PP dibandingkan dengan total jumlah Perda dan Perkada yang menjadi target penegakan pada tahun berjalan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Pengaduan yang Masuk}} \times 100\%$ Keterangan : Jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk bisa melalui social media, telepon, dan pengaduan langsung.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin efektif penegakan Perda dan Perkada di daerah tersebut.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

c) JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA (%)

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%)
Defenisi	Jumlah warga negara yang memperoleh Pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis Kajian Risiko Bencana dan layanan kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana terkait informasi mengenai potensi, ancaman, atau kejadian bencana di suatu wilayah
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin baik pelayanan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diberikan oleh BPBD menyangkut informasi rawan bencana
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi	Tahunan

d) JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA (%)

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)
Defenisi	Jumlah warga negara yang memperoleh serangkaian layanan atau dukungan yang disediakan oleh BPBD, lembaga kemanusiaan, maupun masyarakat untuk membantu mengurangi risiko bencana dan meningkatkan

	kesiapan masyarakat dalam menghadapinya dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana , agar dapat merespons dengan cepat dan tepat saat bencana terjadi.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada dikawasan rawan bencana}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin baik pelayanan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diberikan oleh BPBD menyangkut pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi	Tahunan

e) JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA (%)

Nama Indikator	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)
Defenisi	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan tanggap darurat dalam penanggulangan bencana. Layanan ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi cedera, dan memindahkan korban dari daerah bahaya ke tempat yang aman dengan cepat dan terkoordinasi
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}}$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin baik pelayanan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diberikan oleh BPBD menyangkut penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi	Tahunan

f) PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN (%)

Nama Indikator	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)
Defenisi	Rasio antara jumlah kejadian kebakaran yang disertai dengan layanan penyelamatan dan evakuasi korban terhadap total kejadian kebakaran dalam periode tertentu, yang menggambarkan efektivitas pelayanan penyelamatan oleh petugas.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran dengan Evakuasi dan Penyelamatan Korban}}{\text{Jumlah Total Kejadian Kebakaran}} \times 100\%$

	Keterangan: Jumlah evakuasi korban kebakaran termasuk dengan kejadian yang ditangani oleh relawan pemadam kebakaran yang telah dibentuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas dan responsivitas layanan penyelamatan korban dalam kejadian kebakaran.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

g) WAKTU TANGGAP (*RESPONSE TIME*) PANANGANAN KEBAKARAN (MENIT)

Nama Indikator	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran (Menit)
Definisi	Waktu yang dibutuhkan sejak laporan kejadian kebakaran diterima hingga unit pemadam pertama tiba di lokasi kejadian.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Keseluruhan Waktu Response Time}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kejadian}}$ Keterangan: Waktu Response Time merupakan waktu kedatangan di lokasi dikurangi waktu laporan diterima.
Interpretasi	Semakin cepat waktu tanggap (semakin kecil nilai menit), semakin baik respons dan kesiapsiagaan pelayanan penanganan kebakaran.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

6. URUSAN SOSIAL

a) PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI (%)

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)
Definisi	mengukur sejauh mana pelayanan sosial dasar berhasil memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) bagi kelompok rentan tersebut di luar lembaga panti
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Total Populasi sasaran}} \times 100\%$

Interpretasi	menunjukkan tingkat keberhasilan dalam menyediakan layanan dasar bagi kelompok rentan ini di luar lembaga (non-institusional)
Sumber Data	Dinas Sosial
Frekuensi	Tahunan

b) PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN / KOTA (%)

Nama Indikator	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten / Kota (%)
Definisi	untuk menilai efektivitas respons bencana dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah total korban bencana pada tahun N}} \times 100\%$
Interpretasi	untuk menilai efektivitas respons bencana dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat
Sumber Data	Dinas Sosial
Frekuensi	Tahunan

B. LAYANAN URUSAN WAJIB TERKAIT NON PELAYANAN DASAR

1. URUSAN KETENAGAKERJAAN

a) PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA (%)

Nama Indikator	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (%)
Definisi	Rasio antara jumlah kegiatan ketenagakerjaan yang direalisasikan dan mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), terhadap total kegiatan yang direncanakan dalam RTKD
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Kegiatan yang dilaksanakan mengacu RTKD}}{\text{Kegiatan yang ada di RTKD}} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio antara jumlah kegiatan ketenagakerjaan yang direalisasikan dan mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), terhadap total kegiatan yang direncanakan dalam RTKD
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

b) PERSENTASE TENAGA KERJA BERSETIFIKAT KOMPETENSI (%)

Nama Indikator	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)
DefInisi	Sertifikat kompetensi menunjukkan pengakuan terhadap kemampuan kerja seseorang sesuai dengan standar kompetensi kerja tertentu yang dibutuhkan di dunia kerja
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Tenaga kerja yang bersertifikat}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang bekerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi angka ini, mencerminkan kualitas dan daya saing tenaga kerja yang lebih baik dan siap bersaing di pasar kerja
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

c) TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (Rp. JUTA/ TENAGA KERJA)

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp Juta/Tenaga Kerja)
DefInisi	Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi
Rumus Perhitungan	$PTK = \frac{PDRB}{JTkB}$ Dimana : PTK = Produktivitas Tenaga Kerja PDRB = PDRB ADHB tahun n JTkB = Jumlah Penduduk Bekerja tahun n
Interpretasi	Tingkat produktivitas tenaga kerja digunakan untuk mengukur kemampuan tenaga kerja dalam mengerjakan pekerjaannya dalam waktu kerja yang sudah ditentukan dengan metode penghitungan adalah nilai tambah dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang dibayar
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

d) PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN) (%)

Nama Indikator	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)
DefInisi	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak adalah yang memiliki sekurangnya salah satu dari: Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan

	Perusahaan (PP), LKS Bipartit aktif, Struktur dan Skala Upah, dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{jumlah perusahaan yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi angka ini, semakin menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perlindungan tenaga kerja
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

e) PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA (%)

Nama Indikator	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
DefInisi	Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada lapangan kerja oleh instansi pemerintah, lembaga pelatihan kerja, atau lembaga penempatan tenaga kerja (publik maupun swasta), dibandingkan dengan total pencari kerja yang terdaftar
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif sistem penempatan kerja domestik
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a) PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD (%)

Metadata dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.D.2.b.7)

b) PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI INSTANSI TERKAIT KABUPATEN/KOTA (%)

Metadata dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.D.2.b.8)

c) RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)

Nama Indikator	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)
DefInisi	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO merupakan perbandingan jumlah kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah perempuan yang ada pada suatu wilayah yang menunjukkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan dan perdagangan orang

Rumus Perhitungan	$rasiokptppo = \frac{jkptppo}{jpp} \times 100.000$ Dimana : rasiokptppo = Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) jkptppo = Jumlah kekerasan terhadap perempuan jpp = Populasi penduduk perempuan
Interpretasi	Semakin kecil atau semakin mendekati 0 rasionya maka menandakan wilayah tersebut aman dan nyaman bagi perempuan
Sumber Data	DP3AP2KB
Frekuensi	Tahunan

3. URUSAN PANGAN

a) PERSENTASE CADANGAN PANGAN (%)

Nama Indikator	Persentase Cadangan Pangan (%)
Definisi	Persentase cadangan pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kota
Rumus Perhitungan	$\%CP = \frac{jcp}{jtcp} \times 100\%$ Dimana : %CP = Persentase Cadangan Pangan jcp = Jumlah Cadangan Pangan yang dimiliki Pemerintah Kota jtcp = Jumlah Target Cadangan Pangan Pemerintah Kota yang ditetapkan
Interpretasi	Cadangan pangan yang dimaksud disini adalah cadangan ketersediaan beras pemerintah, sehingga setiap tahunnya persentasenya disesuaikan dengan target cadangan pangan
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan
Frekuensi	Tahunan

4. URUSAN PERTANAHAN

a) PERSENTASE PEMANFAATAN TANAH YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKKAN TANAHNYA DI ATAS IZIN LOKASI DIBANDINGKAN DENGAN LUAS IZIN LOKASI YANG DITERBITKAN (%)

Nama Indikator	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Definisi	Mengukur Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}} \times 100\%$
Interpretasi	Menilai efektivitas dan ketaatan dalam pemanfaatan lahan, yaitu seberapa besar tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana peruntukannya
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

b) PERSENTASE PENETAPAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM (%)

Nama Indikator	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)
Definisi	Jumlah tanah yang ditetapkan untuk pembangunan fasilitas umum dibandingkan dengan jumlah tanah yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah tanah yang ditetapkan untuk pembanguna fasilitas umum}}{\text{Jumlah tanah yang digunakan untuk pembanguna fasilitas umum}} \times 100\%$
Interpretasi	Mengukur seberapa besar luas tanah yang telah resmi ditetapkan atau dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum (seperti jalan, taman, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur public lainnya) dari total kebutuhan atau rencana yang telah ditetapkan. Penetapan ini penting untuk memastikan tersedianya ruang yang cukup dan legal untuk fasilitas yang melayani masyarakat
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

c) TERSEDIAINYA LOKASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL (%)

Nama Indikator	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal (%)
Definisi	Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang}}{\text{Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Menilai kesiapan suatu daerah (kabupaten/kota) dalam menyediakan lahan atau kawasan yang telah ditetapkan, direncanakan, dan siap digunakan untuk kegiatan investasi atau penanaman modal
Sumber Data	Dinas PUPR, DPMPTSP

Frekuensi	Tahunan

d) PENANGANAN SENGKETA TANAH GARAPAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIASI (%)

Nama Indikator	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi (%)
Definisi	Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah Garapan}} \times 100\%$
Interpretasi	upaya penyelesaian konflik atau sengketa tanah garapan (tanah yang dikuasai dan/atau digarap oleh pihak tertentu) yang diselesaikan melalui proses mediasi
Sumber Data	Dinas PUPR, BPN, Bagian Hukum
Frekuensi	Tahunan

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1) INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (KLH) KABUPATEN/KOTA (NILAI)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator Sasaran Visi (II.J)

2) TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KAB/KOTA (%)

Nama Indikator	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota (%)
Definisi	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Volume Sampah Kota Payakumbuh}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi % Indeks kinerja pengelolaan sampah maka semakin bagus kinerja pengelolaan sampah
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

3) KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA (%)

Nama Indikator	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
Definisi	Kepatuhan Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan dalam melaksanakan kewajiban terhadap Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan perundang-undangan

Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota}}{\text{Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$
Interpretasi	Jika Tingkat Ketaatan melebihi target yang dipersyaratkan, berarti Kepatuhan usaha/kegiatan terhadap PPLH sudah baik
Sumber Data	Hasil Pelaksanaan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan
Frekuensi	Tahunan

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1) PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK (%)

Nama Indikator	Perekaman KTP Elektronik (%)
Definisi	Angka yang menunjukkan persentase Perekaman KTP Elektronik
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun ke atas yang Memiliki KTP}}{\text{Jumlah Penduduk 17 Tahun ke atas}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi angka persentasenya, semakin banyak penduduk yang sudah memiliki KTP elektronik yang valid, sehingga menunjukkan keberhasilan program dan tingkat kepemilikan identitas resmi penduduk, yang pada gilirannya mendukung akurasi data kependudukan untuk pembangunan dan layanan publik.
Sumber Data	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri
Frekuensi	Tahunan

2) PERSENTASE ANAK USIA 0 – 17 TAHUN KURANG 1 (SATU) HARI YANG MEMILIKI KIA (%)

Nama Indikator	Persentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
Definisi	Angka yang menunjukkan persentase Kepemilikan Kartu identitas Anak
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Anak Usia 0 – 17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah Anak Usia 0 – 17 Tahun}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik cakupan kepemilikan KIA di kalangan anak-anak, yang menunjukkan keberhasilan program pencatatan identitas anak
Sumber Data	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri
Frekuensi	Tahunan

3) KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN (%)

Nama Indikator	Kepemilikan Akta kelahiran (%)
DefInisi	Angka yang menunjukkan persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Anak Usia 0 – 18 Tahun yang sudah Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Anak Usia 0 – 18 Tahun}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai indikator yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan semakin baiknya kesadaran masyarakat dan akses terhadap layanan administrasi kependudukan. • Nilai yang rendah menandakan masih adanya hambatan, baik dari sisi layanan pemerintah (akses, ketersediaan sarana prasarana, kecepatan pelayanan) maupun dari sisi masyarakat (kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan mengurus dokumen). Peningkatan indikator ini berhubungan langsung dengan pemenuhan hak dasar anak serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek identitas hukum dan inklusivitas layanan publik.
Sumber Data	Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri
Frekuensi	Tahunan

4) JUMLAH OPD YANG TELAH MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SAMA (%)

Nama Indikator	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%)
DefInisi	Angka yang menunjukkan persentase Jumlah OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Kota yang telah Memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	• Nilai indikator yang tinggi menunjukkan semakin banyak OPD yang mengintegrasikan data kependudukan ke dalam sistem perencanaan, pelayanan, maupun pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas tata kelola data, sinkronisasi antar-OPD, serta pemanfaatan data yang lebih akurat, mutakhir, dan terpadu. • Nilai yang rendah dapat mengindikasikan bahwa pemanfaatan data kependudukan belum optimal, masih terbatasnya koordinasi antar-OPD, atau adanya kendala teknis maupun regulasi dalam proses pemanfaatan data. Peningkatan jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan PKS juga mencerminkan kemajuan dalam penerapan Satu Data Indonesia, penguatan e-government, serta upaya peningkatan pelayanan publik berbasis data yang valid.

Sumber Data	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan
Frekuensi	Tahunan

7. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a) TFR (ANGKA KELAHIRAN TARTAL) (%)

Metadata dapat dilihat pada metadata indikator kinerja daerah (IV.D.2.h.2)

b) PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/mCPR) (%)

Nama Indikator	Angka Pravelansi Kontrasepsi Modern / <i>Modern Contraceptive</i> – mCPR (%)
DefInisi	Angka Pravelansi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) adalah persentase wanita usia reproduksi (biasanya 15-49 tahun) yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi modern dari total wanita usia reproduksi (termasuk yang pasangannya menggunakan metode kontrasepsi modern).
Rumus Perhitungan	$mCPR = \frac{\text{Jumlah Wanita Usia Reproduksi (15 – 49 Tahun) yang Saat Ini Menggunakan Metode Kontrasepsi Modern}}{\text{Jumlah Wanita Usia Reproduksi (15 – 49 Tahun)}} \times 100$ Keterangan: Persentase wanita usia reproduksi (15-49 tahun) yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi modern. Ini juga mencakup wanita yang pasangannya menggunakan metode kontrasepsi modern (misalnya vasektomi).
Interpretasi	mCPR menunjukkan proporsi wanita usia reproduksi yang menggunakan metode kontrasepsi yang efektif. Peningkatan mCPR sering dikaitkan dengan penurunan angka kelahiran dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. mCPR merupakan indikator penting dalam pemantauan dan evaluasi program Keluarga Berencana (KB).
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dilakukan dua kali setahun (semesteran) atau tahunan dengan cakupan yang lebih detail pada tahun-tahun tertentu.

c) PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI - UNMETNEED (%)

Nama Indikator	Persentase Kebutuhan Ber-KB ang tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)
DefInisi	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need for Family Planning) adalah proporsi wanita usia reproduksi (15-49 tahun) yang:

	1. Ingin menunda kehamilan berikutnya atau tidak ingin memiliki anak sama sekali (mengindikasikan kebutuhan untuk ber-KB), tetapi 2. Tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun.
Rumus Perhitungan	$\text{Unmet Need (\%)} = \frac{\text{Jumlah Wanita Usia Subur dengan Unmet Need}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$ Keterangan : Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need for Family Planning) Definisi: Proporsi wanita usia reproduksi (15-49 tahun) yang ingin menunda kehamilan atau tidak ingin memiliki anak lagi, tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi.
Interpretasi	Unmet Need merupakan indikator penting untuk mengidentifikasi kelompok wanita yang rentan terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Nilai Unmet Need yang tinggi menunjukkan adanya kesenjangan antara keinginan wanita untuk mengatur kesuburan dan akses atau penggunaan layanan KB. Penurunan Unmet Need merupakan salah satu tujuan utama program Keluarga Berencana.
Sumber Data	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
Frekuensi	Biasanya dilakukan setiap 5 tahun.

8. URUSAN PERHUBUNGAN

a) RASIO KONEKTIVITAS KABUPATEN/KOTA (%)

Nama Indikator	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (%)
Definisi	Persentase kabupaten/kota yang telah terhubung oleh layanan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjangkau, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Indikator ini mencerminkan pemerataan akses transportasi antar wilayah sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur nasional.
Rumus Perhitungan	Rasio konektivitas Kota Payakumbuh = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$
Interpretasi	➤ 100% berarti seluruh kabupaten/kota telah memiliki akses ke sistem transportasi publik yang layak. ➤ Semakin tinggi nilainya, semakin merata akses transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa. Nilai rendah menunjukkan adanya kesenjangan wilayah dalam hal aksesibilitas transportasi, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sumber Data	1. Dinas Perhubungan 2. Data survei lalu lintas

Frekuensi	Tahunan

b) KINERJA LALU LINTAS KABUPATEN/ KOTA (%)

Nama Indikator	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (%)
DefInisi	Persentase tingkat kinerja sistem lalu lintas di wilayah kabupaten/kota yang mencerminkan keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Indikator ini menunjukkan efektivitas manajemen transportasi dan infrastruktur dalam mendukung mobilitas yang aman dan tertib.
Rumus Perhitungan	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota
Interpretasi	➤ > 85%: Sangat baik – lalu lintas aman, lancar, tertib dan nyaman ➤ 70–85%: Cukup baik – ada beberapa masalah minor yang masih bisa ditangani ➤ < 70%: Perlu perhatian – masalah signifikan dalam kelancaran dan keselamatan < 50%: Buruk – perlu intervensi kebijakan dan infrastruktur secara serius
Sumber Data	1. Dinas Perhubungan 2. Data survei Lalu lintas
Frekuensi	Tahunan

9. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a) PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (PD) YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO (%)

Nama Indikator	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
DefInisi	Ukuran pencapaian tingkat konektivitas perangkat daerah terhadap infrastruktur internet yang dibangun dan dikelola oleh Dinas Kominfo. Ini menunjukkan seberapa efektif dinas kominfo dalam menyediakan dan mendistribusikan layanan internet ke instansi-instansi pemerintah daerahnya.
Rumus Perhitungan	$\%PDkonekinternetkominfo = \frac{jmlPDinteretkominfo}{jmlPD} \times 100\%$
Interpretasi	Tinggi : Persentase yang tinggi (mendekati 100%) berarti mayoritas atau semua perangkat daerah sudah terhubung internet dari dinas kominfo, menunjukkan efektivitas program dan penyediaan infrastruktur. Rendah: Persentase yang rendah mengindikasikan masih ada banyak perangkat daerah yang belum terhubung,

	sehingga perlu peningkatan dalam strategi, anggaran, atau infrastruktur oleh dinas kominfo
Sumber Data	Diskominfo
Frekuensi	Tahunan

b) PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI (%)

Nama Indikator	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi (%)
Definisi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah ukuran jumlah atau proporsi layanan publik yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat melalui platform digital dan terhubung satu sama lain, yang juga mencakup kegiatan, perangkat daerah, dan pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah yang memanfaatkan domain instansi sesuai peraturan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$
Interpretasi	Angka yang menunjukkan jumlah layanan yang telah digital dan terintegrasi dibandingkan dengan total jumlah layanan publik yang seharusnya tersedia. Angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kemajuan yang lebih baik dalam transformasi digital pelayanan publik
Sumber Data	Diskominfo
Frekuensi	Tahunan

c) PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (%)

Nama Indikator	Persentase masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)
Definisi	Ukuran persentase masyarakat di suatu wilayah kabupaten/kota yang berhasil dijangkau oleh informasi mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah, serta memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap informasi tersebut.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah Daerah lainnya}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
Interpretasi	Ukuran seberapa efektif pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program unggulan mereka kepada publik, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan masyarakat lebih banyak

	yang terjangkau dan memahami program prioritas pemerintah daerah
Sumber Data	Sumber data persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan pemerintah daerah adalah portal data Open Data pemerintah daerah di situs web pemerintah kota setempat, serta melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
Frekuensi	Tahunan

10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

a) MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS (%)

Nama Indikator	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)
Definisi	Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas
Rumus Perhitungan	<i>Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT,</i> $\text{Meningkatnya Koperasi yang berkualitas} = \frac{\text{volume usaha dan asset}}{\text{jumlah seluruh koperasi}} * 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase koperasi yang berkualitas menandakan semakin akuntabel dan handalnya koperasi yang ada pada suatu wilayah
Sumber Data	Dinas Koperasi dan UKM
Frekuensi	Tahunan

b) MENINGKATNYA USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRAUSAHA (%)

Nama Indikator	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha (%)
Definisi	Indikator yang digunakan untuk mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha
Rumus Perhitungan	$\text{Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha} = \frac{\text{jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} * 100\%$
Interpretasi	Semakin tingginya persentase pada indikator semakin meningkat kewirausahaan pengusaha di Payakumbuh
Sumber Data	Dinas Koperasi dan UKM
Frekuensi	Tahunan

11. URUSAN PENANAMAN MODAL

a) PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN/KOTA (%)

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota (%)
Definisi	Persentase Peningkatan Investasi adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan atau kenaikan nilai investasi yang terealisasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Investasi yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis, seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik dalam bentuk modal tetap bruto (pembangunan fisik) maupun investasi finansial. Indeks ini mencerminkan daya tarik investasi suatu wilayah dan pertumbuhan aktivitas ekonomi.
Rumus Perhitungan	<i>Persentase Peningkatan Inventasi =</i> $\frac{(\text{Nilai Investasi Akhir} - \text{Nilai Inventasi Awal})}{\text{Nilai Inventasi Awal}} \times 100\%$ Keterangan : 1. Nilai Investasi Akhir: Ini adalah nilai investasi pada periode waktu setelah terjadi peningkatan. 2. Nilai Investasi Awal: Ini adalah nilai investasi pada periode waktu sebelumnya atau nilai investasi mula-mula. 3. (Nilai Investasi Akhir-Nilai Investasi Awal): Selisih ini menunjukkan besarnya peningkatan nilai investasi. 4. Nilai Investasi Awal(Nilai Investasi Akhir-Nilai Investasi Awal): Hasil pembagian ini memberikan rasio peningkatan investasi terhadap nilai investasi awal. 5. 100%: Faktor pengali untuk mengubah rasio menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Nilai indeks positif menunjukkan peningkatan nilai investasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai indeks negatif menunjukkan penurunan nilai investasi. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan.
Sumber Data	DPMPSTP
Frekuensi	Tahunan

12. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

a) TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)
Definisi	Indikator ini dapat diartikan sebagai suatu jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang

	didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila
Rumus Perhitungan	$tk \text{ partisipasi pemuda ormas dan muda} = \frac{jml \text{ pemuda aktif ormas dan muda}(16 - 30 \text{ th})}{jumlah \text{ pemuda } (16 - 30 \text{ th})} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini merupakan indikator yang dinotasikan dengan persentase yang melihat perbandingan pemuda aktif organisasi di suatu daerah dengan jumlah keseluruhan pemuda di daerah tersebut. Jika adanya peningkatan persentase dari indikator ini berarti semakin tingginya peran serta aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

b) PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA (MENDALI)

Nama Indikator	Peningkatan Prestasi Olahraga (Mendali)
DefInisi	Peningkatan prestasi olahraga dapat diartikan sebagai segala bentuk pencapaian atau hasil yang diperoleh oleh seseorang atau tim dalam bidang olahraga. Dalam hal ini pengukuran peningkatan prestasi olahraga didasarkan pada perolehan mendali bidang olahraga pada even nasional dan internasional
Rumus Perhitungan	$\frac{jumlah \text{ perolehan mendali pada even olahraga nasional maupun internasional}}{}$
Interpretasi	Peningkatan prestasi olahraga dilihat dari semakin bertambahnya jumlah mendali yang diperoleh pada setiap even baik nasional maupun internasional yang menggambarkan adanya peningkatan kualitas SDM bidang olahraga
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

c) TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)
DefInisi	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat dan mengetahui partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri atau berwirausaha
Rumus Perhitungan	$tk \text{ partisipasi pemuda ekonomi mandiri} = \frac{jml \text{ pemuda berwirausaha } (16 - 30 \text{ th})}{jumlah \text{ pemuda } (16 - 30 \text{ th})} \times 100\%$

Interpretasi	Pengukuran pemuda yang berwirausaha ini dibuktikan dengan terdapatnya pada usahanya di pemerintah daerah ataupun lembaga perizinan usaha yang dibuktikan dengan dokumen pendukung
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

13. URUSAN STATISTIK

a) PERSENTASE OPD YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (%)

Nama Indikator	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (%)
Definisi	Persentase ini menunjukkan seberapa besar tingkat pemanfaatan data statistik (data valid, terukur, dan sesuai kaidah BPS/instansi terkait) oleh OPD dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (misalnya: Renstra, Renja, RKPD, RPJMD). Semakin tinggi persentase, semakin evidence-based atau berbasis data rencana pembangunan yang disusun.
Rumus Perhitungan	$\% = \frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik}}{\text{jumlah OPD}} \times 100\%$ Contoh: Jika dari 40 OPD, ada 30 OPD yang menyusun program berbasis data statistik: $30/40 \times 100 \% = 75 \%$
Interpretasi	• 0 – 25% (Rendah): Sebagian besar OPD belum menggunakan data statistik, perencanaan masih berbasis asumsi/kebijakan subjektif. • 26 – 50% (Sedang): Ada upaya pemanfaatan data, tapi belum konsisten dan belum menyeluruh. • 51 – 75% (Baik): Mayoritas OPD sudah berbasis data, perencanaan lebih terukur. • 76 – 100% (Sangat Baik): Hampir semua OPD menjadikan data statistik sebagai dasar utama, sejalan dengan prinsip perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning).
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Frekuensi	Tahunan

b) PERSENTASE OPD YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MELAKUKAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (%)

Nama Indikator	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)
DefInisi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah adalah proporsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam proses evaluasi pelaksanaan pembangunan (misalnya evaluasi program, kegiatan, dan capaian kinerja) menggunakan data statistik yang sah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar analisis dan penilaian.
Rumus Perhitungan	$\% = \frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan}}{\text{total OPD}} \times 100\%$ Contoh: Jika dari 40 OPD, ada 30 OPD melakukan evaluasi menggunakan data statistik : $30/40 \times 100 \% = 75 \%$
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan evaluasi pembangunan daerah sudah berbasis data yang valid, objektif, dan akuntabel; nilai rendah menunjukkan evaluasi masih lemah dan berpotensi tidak akurat.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Frekuensi	Tahunan

14. URUSAN PERSANDIAN

a) TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH (%)

Nama Indikator	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)
DefInisi	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah mampu melindungi informasi yang mereka kelola dari berbagai ancaman dan risiko. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan dan prosedur keamanan hingga infrastruktur teknologi dan kesadaran pengguna.
Rumus Perhitungan	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah dapat diukur menggunakan berbagai indikator, seperti: Indeks KAMI (Keamanan Informasi): Digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Evaluasi Pengamanan Informasi (Evalpaminfo): Digunakan untuk menilai efektivitas penerapan pengamanan informasi. Cyber Security Maturity (CSM): Digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber.
Interpretasi	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah mengacu pada sejauh mana suatu daerah telah menerapkan langkah-langkah untuk melindungi informasi

	yang mereka miliki dari berbagai ancaman. Ini mencakup aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Penilaian kesiapan ini biasanya menggunakan berbagai metode dan alat ukur, termasuk Indeks KAMI, untuk mengevaluasi penerapan kontrol keamanan dan kematangan penerapan pengamanan
Sumber Data	Dinas Kominfo / Unit Keamanan Informasi / Laporan BSSN
Frekuensi	Tahunan

15. URUSAN KEBUDAYAAN

1) TERLESTARIKAN CAGAR BUDAYA (%)

Nama Indikator	Terlestarikan Cagar Budaya (%)
Definisi	Terlestarikan cagar budaya merupakan pelestarian kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Rumus Perhitungan	$\text{Terlestarikan cagar budaya} = \frac{\text{jcagarbudayadilestarikan}}{\text{jcagarbudayaditetapkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi pelestarian cagar budaya semakin pedulinya pemahaman dan pengembangan budaya di suatu daerah
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

16. URUSAN PERPUSTAKAAN

a) NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT (NILAI)

Nama Indikator	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)
Definisi	Ukuran Yang Menunjukkan Seberapa Besar Minat Dan Kebiasaan Masyarakat Dalam Memperoleh Pengetahuan Dan Informasi Melalui Berbagai Media, Termasuk Membaca Buku, Mengakses Internet, Dan Lain-Lain.
Rumus Perhitungan	Rumus Perhitungan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Tgm) Adalah: $Tgm = (0.3 * Fm + 0.3 * Dm + 0.3 * Jb) + (0.05 * Fai + 0.05 * Dai)$. Rumus Ini Mengukur Tingkat Kegemaran Membaca Berdasarkan Frekuensi Membaca (Fm), Durasi Membaca (Dm), Jumlah Bahan Bacaan (Jb), Frekuensi Akses Internet (Fai), Dan Durasi Akses Internet (Dai).

	Dimensi Indikator Frekuensi Membaca (FM) Jumlah kegiatan membaca per minggu Durasi Membaca (DM) Jumlah waktu membaca per hari Jumlah Buku Dibaca (JB) Jumlah buku yang ditamatkan dalam 3 bulan Frekuensi Akses Internet (FAI) Frekuensi penggunaan internet per minggu Durasi Akses Internet (DAI) Lama waktu akses internet per hari Tingkat Kegemaran Membaca Pelaksanaan pengukuran tingkat kegemaran membaca melalui kuisioner yang responden sudah di tentukan jumlah nya oleh Perpustakaan Nasional RI.																		
Interpretasi	Merupakan proses memahami arti dari skor atau nilai TKM yang diperoleh dari hasil pengukuran, sehingga dapat digunakan untuk menilai kondisi literasi membaca masyarakat dan menentukan langkah perbaikan. <table><tr><th>NILAI</th><th>KATEGORI</th><th>MAKNA/INTERPRETASI</th></tr><tr><td>0 – 20</td><td>Sangat Rendah</td><td>Hampir Tidak Ada Kebiasaan Membaca, Minat Rendah.</td></tr><tr><td>21 – 40</td><td>Rendah</td><td>Minat Membaca Ada, Tapi Frekuensi Dan Durasi Rendah.</td></tr><tr><td>41 – 60</td><td>Sedang</td><td>Kebiasaan Membaca Mulai Terbentuk, Namun Belum Konsisten.</td></tr><tr><td>61 – 80</td><td>Tinggi</td><td>Kebiasaan Membaca Baik Dan Rutin.</td></tr><tr><td>81 – 100</td><td>Sangat Tinggi</td><td>Membaca Menjadi Bagian Dari Budaya Dan Gaya Hidup.</td></tr></table>	NILAI	KATEGORI	MAKNA/INTERPRETASI	0 – 20	Sangat Rendah	Hampir Tidak Ada Kebiasaan Membaca, Minat Rendah.	21 – 40	Rendah	Minat Membaca Ada, Tapi Frekuensi Dan Durasi Rendah.	41 – 60	Sedang	Kebiasaan Membaca Mulai Terbentuk, Namun Belum Konsisten.	61 – 80	Tinggi	Kebiasaan Membaca Baik Dan Rutin.	81 – 100	Sangat Tinggi	Membaca Menjadi Bagian Dari Budaya Dan Gaya Hidup.
NILAI	KATEGORI	MAKNA/INTERPRETASI																	
0 – 20	Sangat Rendah	Hampir Tidak Ada Kebiasaan Membaca, Minat Rendah.																	
21 – 40	Rendah	Minat Membaca Ada, Tapi Frekuensi Dan Durasi Rendah.																	
41 – 60	Sedang	Kebiasaan Membaca Mulai Terbentuk, Namun Belum Konsisten.																	
61 – 80	Tinggi	Kebiasaan Membaca Baik Dan Rutin.																	
81 – 100	Sangat Tinggi	Membaca Menjadi Bagian Dari Budaya Dan Gaya Hidup.																	
Sumber Data	Laporan Survey TGM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
Frekuensi	Tahunan																		

b) INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (NILAI)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)
Definisi	Merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan, ketersediaan, pemanfaatan, dan budaya literasi di suatu wilayah atau kelompok masyarakat. IPLM umumnya disusun oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk menilai seberapa baik masyarakat mengakses, memanfaatkan, dan mengembangkan kemampuan literasinya—baik literasi baca-tulis, numerasi, maupun literasi digital.

Rumus Perhitungan	Adapun beberapa kaidah utama yang digunakan dalam perhitungan indeks antara lain: 1. Indeks terdiri dari 7 (tujuh) unsur pembentuk indeks yang dinamakan unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang terdiri dari: 2. UPLM 1 yaitu pemerataan layanan perpustakaan. 3. UPLM 2 yaitu ketercukupan koleksi perpustakaan. 4. UPLM 3 yaitu ketercukupan tenaga perpustakaan. 5. UPLM 4 yaitu tingkat kunjungan masyarakat. 6. UPLM 5 yaitu perpustakaan yang dibina sesuai SNP. 7. UPLM 6 yaitu keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan. 8. UPLM 7 yaitu anggota perpustakaan. 9. Aspek Masyarakat (AM) yang digunakan untuk setiap Unsur Pembangun Literasi Masyarakat yaitu: 10. AM untuk UPLM 1 adalah jumlah kelembagaan yang ada di masyarakat. 11. AM untuk UPLM 2 adalah jumlah populasi penduduk. a. UPLM Kabupaten/Kota: $UPLM_i = \frac{(Kabkota + Kec + \frac{Desa}{Kel} + \frac{SD}{MI} + \frac{SMP}{MTS} + \frac{SMA}{MA} + Perguruan Tinggi + Khusus)}{K_i}$ Keterangan: UPLM_i : Unsur Pembangun Literasi Masyarakat AM_i : Aspek Masyarakat Kab/Kota sesuai dengan UPLM yang dihitung K_i : Standarisasi sesuai dengan UPLM yang dihitung b. IPLM Kabupaten/Kota: $IPLM \frac{Kab}{Kota} = \frac{\sum_{i=1}^7 (UPLM)_i}{7} \times 100$ Keterangan: IPLM Kab/Kota : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota UPLMI : Unsur Pembangun Literasi Masyarakat
Interpretasi	IPLM biasanya disajikan dalam skala 0 – 100, di mana semakin tinggi nilainya, semakin baik kondisi literasi masyarakat.

	Interpretasinya umumnya dibagi menjadi kategori berikut (mengacu pada panduan Perpustakaan Nasional RI):		
	NILAI	KATEGORI	MAKNA/INTERPRETASI
	0 – 20	Sangat Rendah	Akses Dan Budaya Literasi Hampir Tidak Ada; Fasilitas Minim Dan Partisipasi Rendah.
	21 – 40	Rendah	Fasilitas Terbatas, Partisipasi Literasi Rendah, Budaya Membaca Belum Terbentuk.
	41 – 60	Sedang	Ketersediaan Sumber Literasi Mulai Memadai, Tetapi Pemanfaatannya Belum Optimal.
	61 – 80	Tinggi	Akses Baik, Masyarakat Aktif Memanfaatkan Fasilitas, Budaya Membaca Mulai Kuat.
	81 – 100	Sangat Tinggi	Akses Merata, Pemanfaatan Optimal, Budaya Literasi Mengakar Di Semua Lapisan.
	Poin penting interpretasi: 1. Nilai tinggi menunjukkan ketersediaan fasilitas, partisipasi, dan kebiasaan literasi masyarakat sudah baik. 2. Nilai rendah mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan, peningkatan sarana, dan penguatan budaya literasi. 3. Perubahan nilai dari tahun ke tahun menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan program literasi.		
Sumber Data	• Survei fasilitas perpustakaan (jumlah, luas, koleksi, layanan). • Survei partisipasi masyarakat (kunjungan, keanggotaan, kegiatan literasi). • Observasi kondisi sarana dan prasarana literasi di lapangan. • Wawancara dengan pengelola perpustakaan, komunitas literasi, atau tokoh masyarakat.		
Frekuensi	Tahunan		

17. URUSAN KEARSIPAN

a) **TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL (PASAL 40 DAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN) (%)**

Nama Indikator	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)
Definisi	Mengukur pada kemudahan akses dan ketersediaan arsip (rekaman kegiatan atau informasi) untuk digunakan sesuai kebutuhan, baik oleh pencipta arsip maupun pihak lain yang berhak. Ketersediaan ini mencakup akses fisik, akses informasi, dan akses terhadap isi arsip.

Rumus Perhitungan	$T = (a+i+s+j)/4$ T = Tingkat Ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan i = Persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan
Interpretasi	Semakin Tingkat ketersediaan arsip maka semakin baik daftar arsip aktif, arsip in aktif, arsip statis dan jumlah arsip yang dimasukkan ke dalam daftar arsip.
Sumber Data	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Frekuensi	Tahunan

b) TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (%)

Nama Indikator	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)
Definisi	Untuk mengukur tingkat arsip yang tersedia . seberapa mudah arsip dapat diakses dan ditemukan kembali ketika dibutuhkan
Rumus Perhitungan	$T = (m+b+g+a+c+i)/6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin
Interpretasi	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip mengacu pada ketersediaan dan kelengkapan arsip sebagai bukti dan bahan pertanggungjawaban dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. Ini mencakup seberapa baik arsip-arsip tersebut ada (keberadaan) dan seberapa lengkap serta utuh arsip tersebut (keutuhan).
Sumber Data	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Frekuensi	Tahunan

C. LAYANAN URUSAN PILIHAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

a) JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA) DARI SELURUH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI (TON)

Nama Indikator	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari Seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Ton)
Definisi	ukuran kumulatif dari total seluruh hasil perikanan (baik yang ditangkap langsung dari alam maupun yang dibudidayakan) yang diperoleh dari semua kabupaten/kota yang berada dalam satu wilayah provinsi, yang dinyatakan dalam satuan ton
Rumus Perhitungan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari Seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi
Interpretasi	seberapa banyak total ikan yang berhasil ditangkap dari alam dan dibudidayakan oleh seluruh wilayah kabupaten/kota
Sumber Data	Dinas Pertanian
Frekuensi	Tahunan

2. URUSAN PARIWISATA

a) PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN (%)

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)
Definisi	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan adalah tingkat peningkatan atau penurunan jumlah kunjungan wisatawan (baik wisatawan nusantara maupun mancanegara) ke suatu daerah dari satu periode ke periode berikutnya, yang dinyatakan dalam persentase (%).
Rumus Perhitungan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan wisatawan (%) $[(\text{Jumlah Wisatawan Tahun N} - \text{Tahun N-1}) / \text{Jumlah Wisatawan Tahun N-1}] \times 100\%$ Keterangan : ➤ Jumlah Wisatawan Tahun N: Total wisatawan yang berkunjung pada tahun berjalan (misalnya 2025) ➤ Jumlah Wisatawan Tahun N-1: Total wisatawan pada tahun sebelumnya (misalnya 2024) ➤ Data bisa dihitung untuk: • Total keseluruhan wisatawan • Wisatawan nusantara (domestik) • Wisatawan mancanegara (internasional)
Interpretasi	Nilai positif menandakan pertumbuhan, negatif menandakan penurunan
Sumber Data	Laporan pengelola wisata, hotel, event pariwisata
Frekuensi	Tahunan (umumnya digunakan untuk pelaporan indikator pembangunan)

b) PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PER KEBANGSAAN (%)

Nama Indikator	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan (%)
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menghitung perubahan jumlah kunjungan wisatawan asing ke suatu destinasi wisata berdasarkan kebangsaan.
Rumus Perhitungan	$\%growthwisan = \frac{(jwisan_n - jwisan_{n-1})}{jwisan_{n-1}} \times 100\%$ dimana : ➤ $jwisan_n$: Total wisatawan yang berkunjung pada tahun berjalan (misalnya 2025) ➤ $jwisan_{n-1}$: Total wisatawan pada tahun sebelumnya (misalnya 2024) ➤ Data bisa dihitung untuk: • Total keseluruhan wisatawan • Wisatawan nusantara (domestik) • Wisatawan mancanegara (internasional) ➤ 100%: faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Dengan semakin besarnya persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan dapat dilihat negara mana yang lebih tertarik berkunjung ke Payakumbuh dan sekitarnya.
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan (umumnya digunakan untuk pelaporan indikator pembangunan)

c) PERSENTASE PENINGKATAN PERJALANAN WISATAWAN NUSANTARA YANG DATANG KE KABUPATEN / KOTA (%)

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menghitung perubahan jumlah kunjungan wisatawan domestik (dari dalam negeri) ke suatu kabupaten atau kota tertentu dalam periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\%growthdomestik = \frac{(jdomestik_n - jdomestik_{n-1})}{jdomestik_{n-1}} \times 100\%$ dimana ➤ $jdomestik_n$: Total wisatawan yang berkunjung pada tahun berjalan (misalnya 2025) ➤ $jdomestik_{n-1}$: Total wisatawan pada tahun sebelumnya (misalnya 2024) ➤ Data bisa dihitung untuk:

	• Total keseluruhan wisatawan • Wisatawan nusantara (domestik) • Wisatawan mancanegara (internasional) ➤ 100% : faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Dengan meningkatnya persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang memperlihatkan bahwa wisatawan nusantara masih memiliki minat yang tinggi untuk mengunjungi pariwisata di kabupaten/kota.
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan (umumnya digunakan untuk pelaporan indikator pembangunan)

d) TINGKAT HUNIAN AKOMODASI (%)

Nama Indikator	Tingkat Hunian Akomodasi (%)
Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menghitung persentase jumlah kamar hotel atau akomodasi lain yang dihuni oleh tamu dibandingkan dengan total jumlah kamar yang tersedia.
Rumus Perhitungan	$tkhunianakomodasi = \frac{jkmrterjual}{jkmrtersedia} \times 100\%$ dimana : • jkmrterjual : Total kamar yang terisi disebuah hunian (hotel/homestay) • jkmrtersedia : Total kamar yang ada pada sebuah hotel/homestay • 100% : faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Dengan meningkatnya persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang memperlihatkan bahwa wisatawan nusantara masih memiliki minat yang tinggi untuk mengunjungi pariwisata di kabupaten/kota.
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

e) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)

Nama Indikator	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
Definisi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD merupakan besaran porsi dari sektor pariwisata terhadap penambahan pendapatan asli daerah
Rumus Perhitungan	$kontribusipariwisata = \frac{pendapatan\ pariwisata}{PAD} \times 100\%$

Interpretasi	Dengan meningkatnya kontribusi sektor pariwisata akan meningkatkan pendapatan daerah, mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, BPS
Frekuensi	Tahunan

3. URUSAN PERTANIAN

a) PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN (PRODUKTIVITAS PADI) (TON/ HA)

Nama Indikator	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (Produktivitas padi) (Ton/ Ha)
Definisi	Ukuran jumlah ton padi yang dihasilkan dari setiap hektar lahan dalam satu tahun, yang menunjukkan efisiensi penggunaan lahan dalam pertanian.
Rumus Perhitungan	$produktivitas = \frac{produksi}{luas\ lahan}$
Interpretasi	Tingkat efisiensi serta hasil yang dicapai petani atau suatu wilayah dalam menghasilkan padi, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan produktivitas yang lebih baik.
Sumber Data	Dinas Pertanian
Frekuensi	Tahunan

b) PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR (%)

Nama Indikator	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)
Definisi	mengukur seberapa besar penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular yang terjadi dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menunjukkan efektivitas upaya pencegahan dan pengendalian penyakit pada hewan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - Jumlah Kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t-1)}}{\text{Jumlah Kejadian/Kasus Penyakit Hewan menular Tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$
Interpretasi	persentase yang menunjukkan penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular.
Sumber Data	Dinas Pertanian
Frekuensi	Tahunan

4. URUSAN PERDAGANGAN

a) PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (IUPP/SIUP PUSAT PERBELANJAAN DAN IUTM/IUTS/SIUP TOKO SWALAYAN) (%)

Nama Indikator	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan Iupp/Siup Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan
Definisi	Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Keseluruhan jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki izin IUPP/SIUP/NIB Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP/NIB Toko Swalayan) yang masih berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Keseluruhan jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/Kota. Semakin tinggi persentasenya semakin baik ketaatan pelaku usaha dalam pengurusan izin sesuai ketentuan yang berlaku
Sumber Data	Dinas Koperasi dan UKM (Perdagangan)
Frekuensi	Tahunan

b) PERSENTASE KINERJA REALISASI PUPUK (%)

Nama Indikator	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk (%)
Definisi	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$
Interpretasi	Keseluruhan jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada kelompok tani/ perorangan petani. Rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik. Semakin tinggi nilainya, menunjukkan lancr dan terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi
Sumber Data	Dinas Koperasi dan UKM (Perdagangan)
Frekuensi	Tahunan

c) PERSENTASE ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH YANG BERLAKU (%)

Nama Indikator	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku (%)
Definisi	Mengukur persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib sitera dan ditera ulang di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Keseluruhan jumlah alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sudah ditandai dengan tanda tera sah atau tanda tera yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Keseluruhan jumlah alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota. Semakin tinggi nilainya, menunjukkan tingginya pelaku usaha yang tertib niaga
Sumber Data	Dinas Koperasi dan UKM (Perdagangan)
Frekuensi	Tahunan

5. URUSAN PERINDUSTRIAN

a) PERTAMBAHAN JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN/ KOTA (%)

Nama Indikator	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota (%)
Definisi	Mengukur tingkat pertambahan IKM di Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah IKM Th. N} - \text{Jumlah IKM Th. N} - 1}{\text{Jumlah IKM Th. N} - 1} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase pertambahan jumlah IKM memberikan dukungan positif terhadap pembangunan Industri
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

b) PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIK (%)

Nama Indikator	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK (%)
Definisi	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan

	industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK
Rumus Perhitungan	<i>Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing – masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$. Untuk masing – masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$ Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut</i>
Interpretasi	Semakin tinggi persentase pencapaian menunjukkan Pembangunan Industri berjalan dengan baik
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

c) PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT (%)

Nama Indikator	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait (%)
Definisi	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan IUI Kecil dan Menengah dengan jumlah IUI Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang dipantau atau diawasi}}{\text{jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, maka mengindikasikan bahwa aktivitas usaha industri semakin terkendali
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

d) PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI) KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT (%)

Nama Indikator	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait (%)
Definisi	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan IPUI Kecil dan Menengah dengan jumlah IPUI Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, maka mengindikasikan bahwa aktivitas usaha industri semakin terkendali dan pembangunan industri terus berkembang
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

e) PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) YANG LOKASINYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA (%)

Nama Indikator	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota
Definisi	Seluruh jumlah izin penambahan luas lahan kawasan industri dari luas lahan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan, kawasan industri, informasi ketersediaan lahan, kepatuhan terhadap standar kawasan industri dan penyampaian data kawasan industri dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan/atau kunjungan lapangan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi menunjukkan semakin patuhnya pelaku industri di lapangan
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

f) TERSEDIAANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI (%)

Nama Indikator	Tersedianya Informasi Industri Secara lengkap Dan Terkini (%)
Definisi	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat, dan Terkini adalah kondisi di mana data dan informasi terkait sektor industri yang tersedia mencakup semua elemen penting (lengkap), sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (akurat), dan diperbarui secara berkala (terkini)
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Nilai lengkap} + \text{Nilai Akurat} + \text{Nilai terkini}}{3}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin berkualitas informasi industri yang dapat diakses dan digunakan

Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

D. FUNGSI PENDUKUNG

1. KESEKRETARIATAN DAERAH

a) INDEK KUALITAS KEBIJAKAN (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)
Definisi	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (<i>evidence-based</i>)
Rumus Perhitungan	Perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan berdasarkan pembobotan Instrumen IKK yang terdiri dari : 6. Profil (Bobot 10%) : Pelibatan pejabat fungsional Analis Kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan. 7. Perencanaan Kebijakan (Bobot 20%) : 4) penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid; 5) keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan; dan 6) pelaksanaan analisis dampak sebelum kebijakan diimplementasikan 8. Implementasi Kebijakan (Bobot 25%) : 4) kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan; 5) efektifitas pelaksanaan kebijakan di lapangan; dan 6) adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. 9. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan (Bobot 30%) : 3) adanya evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan; adanya dampak yang terukur bagi masyarakat; dan 4) adanya keselarasan kebijakan dengan kebijakan lain yang relevan. 10. Transparansi dan Partisipasi Publik (Bobot 15%) : 3) tersedianya akses informasi kebijakan bagi publik; dan adanya mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan.
Interpretasi	Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap tahun dengan objek kebijakan yaitu kebijakan pembangunan strategis dari Instansi Pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian;

	Kebijakan pembangunan strategis dimaksud harus memenuhi kriteria : c. mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas dan d. telah ditetapkan dan diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran. Pengukuran IKK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 8. Registrasi melalui Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan 9. Pengukuran mandiri (<i>self asesment</i>) 10. Verifikasi hasil pengukuran mandiri 11. Penyampaian umpan balik (<i>feedback</i>) 12. Perbaikan pengukuran berdasarkan umpan balik (<i>feedback</i>) 13. Pembahasan hasil pengukuran 14. Penetapan hasil pengukuran kualitas kebijakan Instansi Pemerintah Kualifikasi nilai kualitas kebijakan dalam Indeks Kuatiras Kebijakan yaitu : <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI</th><th>KUALIFIKASI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91,00 – 100</td><td>UNGGUL</td></tr> <tr> <td>80,00 – 90,99</td><td>SANGAT BAIK</td></tr> <tr> <td>65,00 – 79,99</td><td>BAIK</td></tr> <tr> <td>50,00 – 64,99</td><td>CUKUP</td></tr> <tr> <td>< 50,00</td><td>KURANG</td></tr> </tbody> </table>	NILAI	KUALIFIKASI	91,00 – 100	UNGGUL	80,00 – 90,99	SANGAT BAIK	65,00 – 79,99	BAIK	50,00 – 64,99	CUKUP	< 50,00	KURANG
NILAI	KUALIFIKASI												
91,00 – 100	UNGGUL												
80,00 – 90,99	SANGAT BAIK												
65,00 – 79,99	BAIK												
50,00 – 64,99	CUKUP												
< 50,00	KURANG												
Sumber Data	LAN RI												
Frekuensi	Tahunan												

b) INDEK PELAYANAN PUBLIK (INDEKS)

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek,

	menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. a. Menentukan nilai untuk setiap indikator <i>Nilai per indikator</i> $= \left(\frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}$ b. Menentukan nilai setiap aspek <i>Nilai per aspek : $\sum$ nilai per indikator</i> c. Menentukan Indeks <i>Nilai indeks : $\sum$ (nilai aspek_n x bobot_n)</i>																														
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: a. Keadilan (Fairness); a. Partisipasi (Participation); b. Akuntabilitas (Accountability); c. Transparansi (transparency); d. Berdayaguna (useful); e. Aksesibilitas (accessibility) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>RANGE NILAI</th><th>KATEGORI</th><th>MAKNA</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>GAGAL</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>SANGAT BURUK</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>BURUK</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>CUKUP(DENGAN CATATAN)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>CUKUP</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>BAIK (DENGAN CATATAN)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>BAIK</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>SANGAT BAIK</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>PELAYANAN PRIMA</td></tr></table>	RANGE NILAI	KATEGORI	MAKNA	0 – 1,00	F	GAGAL	1,01 – 1,50	E	SANGAT BURUK	1,51 – 2,00	D	BURUK	2,01 – 2,50	C-	CUKUP(DENGAN CATATAN)	2,51 – 3,00	C	CUKUP	3,01 – 3,50	B-	BAIK (DENGAN CATATAN)	3,51 – 4,00	B	BAIK	4,01 – 4,50	A-	SANGAT BAIK	4,51 – 5,00	A	PELAYANAN PRIMA
RANGE NILAI	KATEGORI	MAKNA																													
0 – 1,00	F	GAGAL																													
1,01 – 1,50	E	SANGAT BURUK																													
1,51 – 2,00	D	BURUK																													
2,01 – 2,50	C-	CUKUP(DENGAN CATATAN)																													
2,51 – 3,00	C	CUKUP																													
3,01 – 3,50	B-	BAIK (DENGAN CATATAN)																													
3,51 – 4,00	B	BAIK																													
4,01 – 4,50	A-	SANGAT BAIK																													
4,51 – 5,00	A	PELAYANAN PRIMA																													

Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

c) PERSENTASE JUMLAH PENGADAAN YANG DILAKUKAN SECARA KOMPETITIF (%)

Nama Indikator	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan secara Kompetitif (%)
Definisi	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah seluruh pengadaan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase pengadaan yang dilaksanakan dengan metode kompetitif, maka semakin baik kinerja Instansi Pemerintah dalam pemanfaatan dan ketaatan terhadap peraturan terkait proses pengadaan barang dan jasa
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

d) RASIO NILAI BELANJA YANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN (%)

Nama Indikator	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan melalui Pengadaan (%)
Definisi	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja operasi dan modal}} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio ini memberikan gambaran tentang bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan untuk mencapai tujuan pengadaan
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

e) PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH (%)

Nama Indikator	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (%)
Definisi	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n)} - \text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha kecil dan Koperasi Tahun (n - 1)}}{\text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n - 1)}}$
Interpretasi	Dengan adanya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah akan berpengaruh terhadap hal-hal sebagai berikut: 1. Dorongan pertumbuhan ekonomi 2. Pemberdayaan UKKM 3. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 4. Peningkatan kualitas dan daya saing 5. Peranan LKPP dalam mendukung percepatan penggunaan PDN dalam e-Katalog, dan penyempurnaan peraturan
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

E. FUNGSI PENUNJANG

1. KEUANGAN

a) RASIO BELANJA PEGAWAI DI LUAR GURU DAN TENAGA KESEHATAN (%)

Nama Indikator	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan (%)
Definisi	Mengukur Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100 \%$
Interpretasi	1. Pembilang Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan adalah jumlah realisasi seluruh komponen belanja pegawai antara lain gaji, tunjangan yang melekat pada gaji dan tunjangan kinerja, tidak termasuk belanja pegawai guru dan tenaga kesehatan 2. Penyebut Jumlah APBD adalah jumlah realisasi seluruh belanja daerah
Sumber Data	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD
Frekuensi	Tahunan

b) RASIO PAD (TERHADAP PAD NON MIGAS) (%)

Nama Indikator	Rasio PAD (Terhadap PAD Non Migas/%)
Definisi	Mengukur Tax Ratio atau Kemampuan Daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah

Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah pendapatan pada APBD}} \times 100\%$
Interpretasi	1. Pembilang Jumlah realisasi seluruh pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah 2. Penyebut Jumlah realisasi seluruh pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain lain pendapatan daerah yang sah
Sumber Data	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD
Frekuensi	Tahunan

c) RASIO BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (DIKURANGI TRANSFER EXPENDITURES) (%)

Nama Indikator	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditure</i>) (%)
Definisi	Mengukur efisiensi belanja langsung diluar transfer expenditure atau rasio belanja langsung dalam APBD diluar transfer expenditures
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{jumlah belanja urusan pemerintahan} - \text{transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$
Interpretasi	1. Pembilang Jumlah belanja urusan pemerintahan dikurangi transfer expenditures adalah jumlah belanja urusan pemerintahan yang meliputi seluruh belanja daerah diluar belanja modal dikurangi transfer expenditures yang meliputi hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Atau bisa juga penjumlahan dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa 2. Penyebut Jumlah belanja APBD adalah jumlah realisasi seluruh belanja daerah
Sumber Data	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD
Frekuensi	Tahunan

d) DEVIASI REALISASI BELANJA TERHADAP BELANJA TOTAL DALAM APBD (%)

Nama Indikator	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD (%)
Definisi	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} \times 100\%$

Interpretasi	1. Pembilang Nilai realisasi belanja daerah dalam APBD tahun pelaporan yang merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Nilai absolut dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus 2. Penyebut Total anggaran belanja APBD tahun pelaporan sebelum perubahan
Sumber Data	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD
Frekuensi	Tahunan

e) MANAJEMEN ASET (%)

Nama Indikator	Manajemen Aset (%)
Definisi	Melihat Manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada
Rumus Perhitungan	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)
Interpretasi	Manajemen aset adalah menjawab pertanyaan pada rumus diatas dengan format Ya/Tidak. Apabila seluruh terjawab ya, Pemerintah Daerah mencapai realisasi 100 persen
Sumber Data	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD
Frekuensi	Tahunan

f) RASIO ANGGARAN SISA TERHADAP TOTAL BELANJA DALAM APBD TAHUN SEBELUMNYA (%)

Nama Indikator	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya (%)
Definisi	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Nilai Realisasi SILPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Interpretasi	1. Pembilang Nilai realisasi SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) dalam APBD pada tahun pelaporan 2. Penyebut Total belanja anggaran dalam APBD yang ditetapkan pada tahun sebelumnya (APBD sebelum perubahan/murni)

Sumber Data	Sistem Informasi Pemerintah Daerah/LRA/BKD
Frekuensi	Tahunan

2. KEPEGAWAIAN

a) RASIO PEGAWAI PENDIDIKAN TINGGI DAN MENENGAH/DASAR (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN) (%)

Nama Indikator	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Definisi	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai}} \times 100\%$
Interpretasi	Melihat perbandingan tingkat pendidikan ASN diluar guru dan tenaga kesehatan
Sumber Data	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

b) RASIO PEGAWAI FUNGSIONAL (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN) (%)

Nama Indikator	Rasio pegawai Fungsional (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Definisi	Mengukur rasio pegawai fungsional ASN di luar guru dan tenaga kesehatan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah pegawai pemerintah (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Interpretasi	Melihat perbandingan jumlah pegawai fungsional ASN diluar guru dan tenaga kesehatan
Sumber Data	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

c) RASIO JABATAN FUNGSIONAL BERSERTIFIKAT KOMPETENSI (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN) (%)

Nama Indikator	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (pnsTidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (%)
Definisi	Mengukur rasio pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, diluar tenaga guru dan kesehatan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Interpretasi	

Sumber Data	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh
Frekuensi	Tahunan

3. INSPEKTORAT

1) LEVEL KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) (LEVEL)

Nama Indikator	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) (Level)
Definisi	Suatu sistem penilaian yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengukur dan meningkatkan kualitas serta efektivitas kinerja pengawasan internalnya
Rumus Perhitungan	Tingkat kualitas APIP (belum dinilai ())/level 1/level 2/level 3) berdasarkan laporan hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
Interpretasi	Semakin tinggi tingkatnya, semakin baik kemampuan APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan, mencakup aspek kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM
Sumber Data	BPKP
Frekuensi	Tahunan

2) MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTRN PEMERINTAH (APIP) (INDEKS)

Nama Indikator	Maruritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) (Indeks)
Definisi	tingkat kematangan dan kesempurnaan penyelenggaraan SPIP di suatu instansi pemerintah, yang dinilai menggunakan kerangka enam tingkatan (Level 0-5) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Rumus Perhitungan	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/level 3 berdasarkan laporan hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
Interpretasi	Semakin tinggi tingkatnya, semakin baik kemampuan pengendalian internnya untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk efektivitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan pada peraturan
Sumber Data	BPKP
Frekuensi	Tahunan

LAMPIRAN 2

MANAJEMEN RISIKO

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. MANAJEMEN RISIKO TUJUAN DAN SASARAN MISI 1

Tabel L2.1 Penetapan Konteks Risiko Strategis Misi 1 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS		
MISI 1 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS		
Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
Periode yang dinilai	:	Tahun 2025 - 2029
Visi	:	Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, Dan Sentra Umkm Yang Kompetitif
Tujuan Strategis RPJMD	:	Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing
Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	:	Indeks Pembangunan Manusia
Sasaran Strategis RPJMD	:	1.1.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	:	1.1.2 Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan
	:	1.1.3 Menurunkan Tingkat Kemiskinan
	:	1.1.4 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	:	1.1.1.a Usia Harapan Hidup (tahun)
	:	1.1.1.b Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)
	:	1.1.1.c Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)
	:	1.1.2.a Harapan Lama Sekolah (tahun)
	:	1.1.3.a Tingkat Kemiskinan
	:	1.1.4.a Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
	:	1.1.4.b Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Urusan Pemerintah Daerah	:	1. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar: Kesehatan 2. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan 3. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar: Sosial 4. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

		5. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Pangan 6. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembangunan	:	1.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 1.4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 2.1 Program Pengelolaan Pendidikan 2.2 Program Pengembangan Kurikulum 2.3 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.1 Program Pemberdayaan Sosial 3.2 Program Rehabilitasi Sosial 3.3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 3.4 Program Penanganan Bencana 3.5 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 4.1 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 4.2 Program Perlindungan Perempuan 4.3 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4.4 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 4.5 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 4.6 Program Perlindungan Khusus Anak 5.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 5.2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 5.3 Program Penanganan Kerawanan Pangan 5.4 Program Pengawasan Keamanan Pangan 6.1 Program Penataan Desa 6.2 Program Kerja Sama Desa 6.3 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Perangkat Daerah Terkait	:	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS	
	3. Dinas Sosial 4. Dinas Ketahanan Pangan 5. Sekretariat Daerah 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel L2.2 Identifikasi Risiko Strategis Misi 1 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
Tujuan 1.1 Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia								
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	Menurunnya derajat kesehatan masyarakat Kota Payakumbuh	RPP: 1.1.1.1	Kepala Daerah	Kurangnya tenaga medis	Internal	C	Pelayanan kesehatan tidak optimal	PD, Masyarakat
					Aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan masih rendah	Internal	C	Tingginya angka kematian	Masyarakat
					Pemyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat belum optimal	Internal	C	Meningkatnya penyebaran penyakit pada masyarakat	PD, Masyarakat
					Masih rendah kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat	Eksternal	C	Tingginya jumlah masyarakat yang sakit	Masyarakat
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat	Menurunnya Kualitas Sumber daya Manusia	RPP: 1.1.1.2	Kepala Daerah	Sanitasi dan Air Bersih yang tidak layak	Internal	C	Lingkungan yang tidak higienis meningkatkan risiko infeksi yang menghambat penyerapan nutrisi.	Masyarakat

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
	Pendek) pada Balita (%)				Perencanaan Keluarga yang tidak tepat	Eksternal	C	Kehamilan terlalu muda atau terlalu dekat antar anak, ditambah banyak anak dalam satu keluarga membuat perhatian dan asupan nutrisi terbagi.	Masyarakat
					Faktor Gizi dan kesehatan Ibu dan Anak yang buruk	Eksternal	C	Gizi buruk pada ibu hamil	PD, Masyarakat
								Pemberian ASI dan MP-ASI yang tidak optimal	PD, Masyarakat
								Pola makan anak yang buruk	PD, Masyarakat
								Pendidikan dan Pengetahuan ibu yang rendah tentang gizi seimbang, ASI eksklusif dan sanitasi	PD, Masyarakat
					Faktor ekonomi dan kemiskinan	Eksternal	UC	Penghasilan rendah berkorelasi langsung dengan kerentanan stunting, sehingga Keluarga tidak mampu membeli makanan bergizi atau mengakses layanan kesehatan.	Masyarakat

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					Masalah Tata Kelola dan Program Pemerintah	Internal	C	Kurangnya data yang akurat untuk pemantauan dan evaluasi, sehingga Program intervensi gizi tidak menjangkau daerah terpencil atau miskin atau tidak tepat	PD
	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Penduduk tidak memperoleh cukup pangan secara kuantitatif	RPP: 1.1.1.3	Kepala Daerah	Menurunnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Internal	C	Peningkatan Risiko Stunting dan Wasting	Masyarakat
					Produktivitas Ekonomi Menurun	Eksternal	UC	Menurunkan daya saing daerah dalam sektor industri, pertanian, maupun jasa.	Kota Payakumbuh
					Kurangnya Edukasi Gizi dan Pola Konsumsi Tidak Sehat	Internal	C	Konsumsi pangan tak seimbang, Masyarakat tidak tahu pentingnya asupan kalori yang memadai yang Mengandalkan makanan murah tapi rendah nilai gizi	PD, Masyarakat
					Distribusi pangan yang tidak efisien	Internal	C	Daerah tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan dari produksi lokal	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Ketergantungan pada pasokan luar daerah atau impor membuat pasokan tidak stabil	Masyarakat
								Sistem distribusi yang tidak efisien	PD, Masyarakat
					Kemiskinan dan Daya Beli Rendah	Eksternal	UC	Memburuknya ketimpangan sosial dapat memicu konflik horizontal, kejahatan, dan instabilitas sosial.	Masyarakat
Sasaran 1.1.2 Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rendahnya akses atau mutu pendidikan	RPP: 1.1.2.1	Kepala Daerah	Kemiskinan dan Ketidakmampuan Ekonomi Keluarga	Internal	UC	Banyak anak terpaksa berhenti sekolah lebih awal untuk membantu orang tua bekerja	Masyarakat
					Akses terhadap Sekolah yang Terbatas	Internal	C	Kurangnya fasilitas pendidikan menyebabkan banyak anak hanya menyelesaikan pendidikan dasar	PD
					Kualitas Pendidikan yang Rendah	Internal	C	Guru kurang berkualitas atau jumlahnya tidak memadai	PD
								Fasilitas sekolah rusak, tidak lengkap, atau tidak nyaman	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Proses belajar mengajar tidak menarik atau tidak relevan, sehingga anak kehilangan motivasi untuk melanjutkan sekolah	PD
					Budaya dan Nilai Sosial yang Tidak Mendukung Pendidikan	Internal	UC	Kurangnya Kesadaran Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan	Masyarakat
								Pernikahan dini dan tekanan sosial membuat anak-anak keluar dari sekolah lebih fokus pada kebutuhan jangka pendek seperti membantu ekonomi keluarga	Masyarakat
Sasaran 1.1.3 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Tidak tercapainya tujuan Pembangunan men-sejahterakan masyarakat	RPP: 1.1.3.1	Kepala Daerah	Minimnya kesempatan, dan Ketimpangan akses	Internal	C	Keterbatasan Lapangan Kerja yang Layak	PD
								Tingkat Pendidikan Rendah	Masyarakat
								Pengelolaan Sumber Daya yang Tidak Adil	Kota Payakumbuh
								Minimnya Akses terhadap Modal dan Kredit	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					Rendahnya kualitas layanan dasar	Internal	C	Akses terhadap Layanan Dasar yang Buruk	PD
					lemahnya pemberdayaan masyarakat	Internal	C	Kurangnya Peran Pemerintah Daerah yang Efektif	PD
Sasaran 1.1.4 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Terbatasnya partisipasi, kemandirian, kapasitas, dan daya kontrol masyarakat terhadap proses pembangunan	RPP: 1.1.4.1	Kepala Daerah	Kurangnya Akses terhadap Informasi dan Teknologi	Internal	C	masyarakat tidak tahu bagaimana cara menyampaikan aspirasi atau melakukan pengawasan	Masyarakat
								Minimnya akses terhadap: Informasi kebijakan publik, Teknologi komunikasi (internet, media sosial), dan Data pembangunan	Masyarakat
					Tingkat Pendidikan dan Literasi Masyarakat yang Rendah	Internal	C	Ketergantungan pada bantuan pemerintah atau pihak luar mengurangi motivasi untuk berinisiatif dan mandiri	Masyarakat
								Ketika masyarakat hidup dalam kemiskinan, fokus utama mereka adalah	Masyarakat

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								bertahan hidup, bukan berpartisipasi	
					Belum optimalnya pola pemerintah yang transparan dan responsif	Internal	C	Musyawarah pembangunan hanya formalitas, tidak benar-benar melibatkan warga	PD
								Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan sangat terbatas	Masyarakat
								Minimnya Pelatihan dan Fasilitasi Pemberdayaan	PD
					Institusi masyarakat yang belum kuat dan responsif	Eksternal	C	tidak ada saluran kolektif yang kuat untuk menyuarakan kepentingan masyarakat	Masyarakat
								Lemahnya atau tidak aktifnya Lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Karang Taruna, PKK, dan kelompok komunitas lokal lainnya	Masyarakat
		Perempuan dan laki-laki tidak memiliki	RPP: 1.1.5.1	Kepala Daerah	Budaya patriarki	Eksternal	UC	Budaya Patriarkal yang Mengakar, yang menempatkan laki-laki	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
		kesempatan yang setara dalam pembangunan yang dapat menghambat langsung terhadap pembangunan masyarakat.						lebih tinggi daripada perempuan dan dibatasi ruang gerakanya	
								Kebijakan Publik yang Tidak Sensitif Gender	Kota Payakumbuh
								Kurangnya Data dan Monitoring Gender	PD
					Rendahnya pendidikan dan ekonomi perempuan	Eksternal	C	Rendahnya Akses Perempuan terhadap Pendidikan	PD
								Keterbatasan Perempuan dalam Dunia Kerja	Kota Payakumbuh
								Minimnya Representasi Perempuan dalam Politik dan Kepemimpinan	Kota Payakumbuh
					Minimnya perlindungan hukum dan kesehatan	Internal	C	Kurangnya Perlindungan terhadap Kekerasan Berbasis Gender	PD
								Tingginya Angka Pernikahan Anak dan Kehamilan Remaja	PD

Tabel L2.3 Analisis Risiko Strategis pada Tujuan 1 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat			
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029			
Tujuan Strategis RPJMD	:	Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing			
NO.	RISIKO TERIDENTIFIKASI	KODE RISIKO	ANALISIS RISIKO		
			SKALA DAMPAK	SKALA KEMUNGKINAN	SKALA RISIKO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)x(5)
1.	Menurunnya derajat kesehatan masyarakat Kota Payakumbuh	RPP: 1.1.1.1	5	4	20
2.	Menurunnya Kualitas Sumber daya Manusia	RPP: 1.1.1.2	5	5	25
3.	Penduduk tidak memperoleh cukup pangan secara kuantitatif	RPP: 1.1.1.3	4	2	8
4.	Rendahnya akses atau mutu pendidikan	RPP: 1.1.2.1	5	3	15
5.	Tidak tercapainya tujuan Pembangunan mensejahterakan masyarakat	RPP: 1.1.3.1	4	4	16
6.	Terbatasnya partisipasi, kemandirian, kapasitas, dan daya kontrol masyarakat terhadap proses pembangunan	RPP: 1.1.4.1	4	2	8
7.	Perempuan dan laki-laki tidak memiliki kesempatan yang setara dalam pembangunan yang dapat menghambat langsung terhadap pembangunan masyarakat.	RPP: 1.1.5.1	3	3	9

Tabel L2.4 Matriks Hasil Analisis Risiko pada Tujuan 1 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

MATRIKS ANALISIS RISIKO			DAMPAK/KONSEKUENSI				
			TIDAK SIGNIFIKAN	KECIL	SEDANG	BESAR	SIGNIFIKAN
			1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO	HAMPIR PASTI	5					RPP: 1.1.1.2
	KEMUNGKINAN BESAR	4				RPP: 1.1.3.1	RPP: 1.1.1.1
	MUNGKIN	3			RPP: 1.1.5.1		RPP: 1.1.2.1
	KEMUNGKINAN KECIL	2				RPP: 1.1.1.3 RPP: 1.1.4.1	
	SANGAT JARANG	1					
KETERANGAN			SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG/ MEDIUM	TINGGI	SANGAT TINGGI

Tabel L2.5 Daftar Risiko Prioritas pada Tujuan 1 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda		:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat			
Tahun Penilaian		:	Tahun 2025 - 2029			
NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	SKALA RISIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Menurunnya Kualitas Sumber daya Manusia	RPP: 1.1.1.2	25	Kepala Daerah	1. Sanitasi dan Air Bersih yang tidak layak 2. Perencanaan Keluarga yang tidak tepat 3. Faktor Gizi dan kesehatan Ibu dan Anak yang buruk 4. Faktor ekonomi dan kemiskinan 5. Masalah Tata Kelola dan Program Pemerintah	1. Lingkungan yang tidak higienis meningkatkan risiko infeksi yang menghambat penyerapan nutrisi. 2. Kehamilan terlalu muda atau terlalu dekat antar anak, ditambah banyak anak dalam satu keluarga membuat perhatian dan asupan nutrisi terbagi. 3. Gizi buruk pada ibu hamil 4. Pemberian ASI dan MP-ASI yang tidak optimal 5. Pola makan anak yang buruk 6. Pendidikan dan Pengetahuan ibu yang rendah tentang gizi seimbang, ASI eksklusif dan sanitasi 7. Penghasilan rendah berkorelasi langsung dengan kerentanan stunting, sehingga Keluarga tidak mampu membeli makanan bergizi atau mengakses layanan kesehatan. 8. Kurangnya data yang akurat untuk pemantauan dan evaluasi, sehingga Program intervensi gizi tidak menjangkau daerah terpencil atau miskin atau tidak tepat
2.	Menurunnya derajat kesehatan masyarakat Kota Payakumbuh	RPP: 1.1.1.1	20	Kepala Daerah	1. Kurangnya tenaga medis 2. Aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan masih rendah 3. Pemyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat belum optimal 4. Masih rendah kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat	1. Pelayanan kesehatan tidak optimal 2. Tingginya angka kematian 3. Meningkatnya penyebaran penyakit pada masyarakat 4. Tingginya jumlah masyarakat yang sakit

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	SKALA RISIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK
3.	Tidak tercapainya tujuan Pembangunan men-sejahterakan masyarakat	RPP: 1.1.3.1	16	Kepala Daerah	1. Minimnya kesempatan, dan Ketimpangan akses 2. Rendahnya kualitas layanan dasar 3. lemahnya pemberdayaan masyarakat	1. Keterbatasan Lapangan Kerja yang Layak 2. Tingkat Pendidikan Rendah 3. Pengelolaan Sumber Daya yang Tidak Adil 4. Minimnya Akses terhadap Modal dan Kredit 5. Akses terhadap Layanan Dasar yang Buruk 6. Kurangnya Peran Pemerintah Daerah yang Efektif
4.	Rendahnya akses atau mutu pendidikan	RPP: 1.1.2.1	15	Kepala Daerah	1. Kemiskinan dan Ketidakmampuan Ekonomi Keluarga 2. Akses terhadap Sekolah yang Terbatas 3. Kualitas Pendidikan yang Rendah 4. Budaya dan Nilai Sosial yang Tidak Mendukung Pendidikan	1. Banyak anak terpaksa berhenti sekolah lebih awal untuk membantu orang tua bekerja 2. Kurangnya fasilitas pendidikan menyebabkan banyak anak hanya menyelesaikan pendidikan dasar 3. Guru kurang berkualitas atau jumlahnya tidak memadai 4. Fasilitas sekolah rusak, tidak lengkap, atau tidak nyaman 5. Proses belajar mengajar tidak menarik atau tidak relevan, sehingga anak kehilangan motivasi untuk melanjutkan sekolah 6. Kurangnya Kesadaran Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan 7. Pernikahan dini dan tekanan sosial membuat anak-anak keluar dari sekolah lebih fokus pada kebutuhan jangka pendek seperti membantu ekonomi keluarga

Tabel L2.6 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih Dibutuhkan pada Tujuan 1 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat					
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029					
NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1.	Menurunnya Kualitas Sumber daya Manusia	RPP: 1.1.1.2	1. Pemberian Bantuan Tangki Septik Individu Berstandar Teknis Untuk Rumah Tangga MBR	Pelaksanaan bantuan kurang optimal	Peningkatan Kapasitas dan Integritas Pelaksana	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2025-2027
			1. Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Stunting dan Beresiko Stunting yang belum Terlayani Air Minum Layak	Data yang tersedia belum akurat dan belum termutakhirkan	Pembentukan tim Kerja yang terstruktur	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2025-2029
			1. Memberikan Bantuan Pangan Kepada Keluarga Miskin Melalui Dana Insentif Fiskal 2. Edukasi Konsumsi Pangan Lokal, Bantuan Bahan dan Benih Tanaman 3. Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan Bantuan Alat Pengolahan Pangan Lokal 4. Melaksanakan Kegiatan Gelar Pangan Lokal Untuk Anak Sekolah	Pemberian Bantuan tidak tepat sasaran	Proses Verifikasi dan Validasi data dilakukan secara rutin dan berkala	Sekretaris Daerah	2025-2026
			1. Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Memenuhi Kebutuhan Gizi Keluarga Beresiko Stunting 2. Lomba Pangan Lokal Berbahan Ubi Dan Jagung	-	-	-	-

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			3. Melaksanakan Lomba Ketua Kelompok Dasa Wisma Berprestasi Tingkat Kota Payakumbuh				
			1. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PAUD) 2. Diklat Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Untuk Guru PAUD Kota Payakumbuh	Penganggaran berdasarkan Dana BOP masing-masing sekolah	Dilakukan Kombinasi Kebijakan antara MBG dan PMTAS	Sekretaris Daerah	2025-2029
			1. Pemantauan Pertumbuhan dan Deteksi Penyimpangan Pertumbuhan Balita 2. Pembentukan Pos Gizi 3. Memberikan Edukasi Tentang Pola Asuh Di 171 Posyandu 4. Sosialisasi Pemanfaatan Buku KIA Bayi Kecil Bagi Tenaga Puskesmas Dengan Kategori BB Bayi Kurang Dari 2500 Rg, Panjang Bayi Kurang Dari 48 Cm, Masa Kehamilan Kurang Dari 37 Minggu 5. Melakukan Penerapan Integrasi Layanan Primer Di Posyandu 6. Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu ILP Di Setiap Kecamatan 7. Sosialisasi Posyandu Dengan Konsep 6 SPM	Kurangnya koordinasi di wilayah kerja	1. Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja 2. Evaluasi kinerja Pembina wilayah dilaksanakan secara rutin dan berkala.	Kepala Dinas Kesehatan	2025-2026

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			1. Memberikan Bantuan Bahan Makanan Bagi Keluarga Beresiko Stunting 2. Pemberian Bantuan Bapak Asuh Anak Stunting 3. Pendampingan Terhadap Keluarga Sasaran Melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dari Data Elsimil Dan Disandingkan Dengan Data Rekap Manual 4. Pelaksanaan Kegiatan Lokakarya Mini Lapangan , Dengan Sasaran Mengawal Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Pendampingan Keluarga Oleh TPK di 5 Kecamatan	Pelaksanaan program kerja kurang optimal	1. Pemanfaatan segala jenis media promosi dan sosialisasi program kerja 2. Pembuatan SK Wali Kota untuk Bapak Asuh Anak Stunting	Sekretaris Daerah	2025-2026
			1. Pemberian Bantuan Sarana Dan Prasarana Budi Daya Ikan dalam Ember untuk Keluarga Stunting 2. Sosialisasi Budi Daya Ikan dalam Ember Bagi Penerima Bantuan Budikdamber Untuk KK Stunting Di Tujuh Kelurahan 3. Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	SDM pengelola kurang terampil	Melaksanakan Pelatihan dan Sosialisasi Budi Daya Ikan dalam Ember	Kepala Dinas Pertanian	2025-2027
			1. Memberikan Edukasi Kepada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	Pemberian Bantuan tidak tepat sasaran	Penetapan dan Pemutakhiran SK Penerima Manfaat	Kepala Daerah	2025-2026

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			2. Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Beresiko Stunting 3. Pemberian Bantuan Sosial Bagi PUS (Penerima PKH) 4. Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Bagi Keluarga Miskin 5. Pengusulan Keluarga Stunting Dan Keluarga Beresiko Stunting Sebagai Penerima Manfaat Yang Belum Terdata Pada DTKS				
2.	Menurunnya derajat kesehatan masyarakat Kota Payakumbuh	RPP: 1.1.1.1	1. Transformasi Layanan Primer Dengan Melakukan Persiapan Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Di Seluruh Puskesmas. 2. Tranformasi Layanan Rujukan dengan Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) 3. Pelaksanaan Intervensi Serentak Penanganan Stunting 4. Meningkatkan Pencapaian Kepesertaan JKN Dalam Rangka Mempertahankan Universal Helath Coverage (UHC) 5. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pokjanal Posyandu Melalui Pelatihan	Pengelolaan kesehatan masyarakat belum optimal	1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan 2. Peningkatan Status RSUD dari Tipe C ke Tipe B	Kepala Daerah	2025-2028

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Integrasi Layana Primer Di Posyandu Bagi Tenaga Kesehatan. 6. Mengawal Pelaksanaan Gerakan PHBS (Pola Hidup Bersih Dan Sehat) Baik Di Sekolah-Sekolah Dan Rumah Tangga. 7. Melaksanakan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Melalui Aktifitas Fisik, Budaya Makan Buah dan Sayur, Tidak Merokok, 8. Melaksanakan Pemeriksaan Rutin Kesehatan, dan Menjaga Kebersihan Lingkungan. 9. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Rujukan 10. Melaksanakan Tes Kebugaran dan Screening Penyakit tidak Menular Bagi ASN 11. Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Sediaan Farmasi Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
			1. Sosialisasi Dan Simulasi Mitigasi Bencana 2. Penanganan Bencana Banjir	Rendahnya kesadaran masyarakat	Penyusunan Perwako Penanggulangan bencana	Sekretaris Daerah	2025-2026

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			3. Siaga Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan 4. Aksi Pengelolaan Risiko Bencana Berupa Penebangan Pohon Yang Sudah Tua Dan Lapuk	terhadap Bencana			
3.	Tidak tercapainya tujuan Pembangunan mensejahterakan masyarakat	RPP: 1.1.3.1	1. Telah Tersedianya SK Kepala DPMPTSP No. 540-14/KEP/DPMPTSP/2022 Tentang Standar Pelayanan Publik Dan SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada DPMPTSP Kota Payakumbuh 2. Telah Tersedianya SK Kepala DPMPTSP No. 540-14/KEP/DPMPTSP/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Secara OSS (Online Single Submissions) Dan Non-OSS Pada DPMPTSP Kota Payakumbuh 3. Telah Tersedianya SK Kepala Disdukcapil Kota Payakumbuh No: 400.12.4.2/037/DKPS/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh No 477/16/SK-	Pelaksanaan layanan masih manual dan semi digital	Penyusunan Perwako tentang Transisi Transformasi SPBE menuju Pemdi	Sekretaris Daerah	2025-2026

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			DKPS/2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh 4. Telah Tersedianya SK Kepala Dinas Sosial No. 460/17.1/DINSOS/PYK-2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh 5. Telah Tersedianya SK Direktur RSUD Adnaan WD Payakumbuh No. 189/464/SK/RSUD/2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh 6. Telah Tersedianya Sesuai Keputusan Kepala Puskesmas Masing-Masing 7. Digitalisasi Layanan Di MPP 8. Digitalisasi Layanan Kesehatan, dengan Aplikasi Silakeh Smart Dan Sipaduko 9. Digitalisasi Layanan Data Kependudukan (SIK Terpusat, Lawan Pandemi) 10. Melaksanakan Sosialisasi Terhadap Standar Pelayanan Dan Meningkatkan Penanganan Pengelolaan				

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N Lapor! dan Kanal Digital Lainnya 11. Melakukan Sosialisasi Terkait Pelayanan (Via TV, Radio, Sosial Media Dsb)				
			1. Meningkatkan Pendidikan Dan Pelatihan Angkatan Kerja : Melaksanakan Pelatihan Bengkel, Melakukan Pelatihan Kerajinan Tangan Untuk KK Miskin, Melakukan Pelatihan Keterampilan Teknis Olahan Makanan Untuk KK Miskin, Melakukan Pelatihan Keterampilan Teknis Pertanian Untuk KK Miskin, Diklat Pembuatan Hiasan Busana Dengan Alat Jahit Tangan, Pelatihan Menjahit Bad Cover, Pelatihan Barbershop, Pelatihan Rajut Dan Pelatihan Diversifikasi Produk Sulam/Bordir 2. Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif Sektor Fashion Pada Event Skala Nasional 3. Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri	Jenis Pelatihan belum sesuai Kebutuhan dan tuntutan Kekinian	Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian	2025-2029
4.	Rendahnya akses atau mutu pendidikan	RPP: 1.1.2.1	1. Penyerahan Beasiswa Kepada Siswa SD,SMP Dan Kesetaraan	Kurang tergalinya potensi Pendidikan di	Menetapkan Branding Kota Payakumbuh sebagai Kota	Kepala Daerah	2025-2026

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			2. Pameran Digital Peserta Didik SD Dan SMP (Panen Kaya Siswa 1.022 Peserta Program Coding) 3. Pelaksanaan Asesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Jenjang SD, SMP Dan Kesetaraan 4. Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Jenjang PAUD, SD Dan SMP 5. Lokakarya Pendampingan Penguatan Komunitas Belajar 6. Pengukuhan Guru Penggerak	Kota Payakumbuh	Tujuan Pendidikan		

Tabel L2.7 Rencana Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 1 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat				
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029				
NO.	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1.	Peningkatan Kapasitas dan Integritas Pelaksana	Surat Permintaan/ Nota Dinas Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BKPSDM	Triwulan I – Tahun 2026	
2.	Pembentukan tim Kerja Stunting yang terstruktur	Pembentukan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah tentang Tim Kerja Pendataan oleh	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait	Triwulan I – Tahun 2026	Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029
3.	Proses Verifikasi dan Validasi data dilakukan secara rutin dan berkala	Pembentukan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Payakumbuh tentang Tim Kerja Lintas Sektoral Verifikasi dan Validasi Data	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Sosial	Triwulan I – Tahun 2026	
4.	Dilakukan Kombinasi Kebijakan antara MBG dan PMTAS	Rapat Koordinasi	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Pendidikan	Triwulan I – Tahun 2026	Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029
5.	Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja Stunting	Dokumen SOP	Kepala Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan terkait	Triwulan I – Tahun 2026	
6.	Evaluasi kinerja Pembina wilayah dilaksanakan secara rutin dan berkala.	Rapat Koordinasi	Kepala Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan terkait	Triwulan I – IV Tahun 2026	Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029

NO.	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	KET.
7.	Pemanfaatan segala jenis media promosi dan sosialisasi program kerja Stunting	Infografis / Poster	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan I – Tahun 2026	
8.	Pembuatan SK Kepala Dinas P3AP2KB untuk Bapak Asuh Anak Stunting	Pembentukan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas P3AP2KB untuk Bapak Asuh Anak Stunting	Kepala Dinas P3AP2KB	Staf Dinas P3AP2KB terkait	Triwulan I – Tahun 2026	Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029
9.	Melaksanakan Pelatihan dan Sosialisasi Budi Daya Ikan dalam Ember	Surat Pelatihan Budi Daya Ikan dalam Ember	Kepala Dinas Pertanian	Staf Dinas Pertanian terkait	Triwulan I – Tahun 2026	Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2027
10.	Penetapan dan Pemutakhiran SK Penerima Manfaat	Pembentukan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Payakumbuh tentang Penerima Manfaat	Kepala Daerah	Kepala Dinas Sosial	Triwulan I – Tahun 2026	Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029
11.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Dokumen Kajian	Kepala Dinas Kesehatan	Kepala RSUD	Triwulan I – Tahun 2026	Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2028
12.	Peningkatan Status RSUD dari Tipe C ke Tipe B	Dokumen Kajian	Kepala Daerah	Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan I – Tahun 2026	Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2028
13.	Penyusunan Perwako tentang Transisi Transformasi SPBE menuju Pemdi	Peraturan Walikota tentang Transisi Transformasi SPBE menuju Pemdi	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Triwulan I – Tahun 2026	
14.	Menetapkan Branding Kota Payakumbuh sebagai Kota Tujuan Pendidikan	Dokumen Kajian	Kepala Daerah	Kepala Bappeda Kepala Dinas Pendidikan	Triwulan I – Tahun 2026	

Tabel L2.8 Rencana Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 1 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat			
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029			
NO.	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN	PENANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN	RENCANA WAKTU PEMANTAUAN	KET.
1.	Peningkatan Kapasitas dan Integritas Pelaksana	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
2.	Pembentukan tim Kerja Stunting yang terstruktur	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
3.	Proses Verifikasi dan Validasi data dilakukan secara rutin dan berkala	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Sekretaris Daerah	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
4.	Dilakukan Kombinasi Kebijakan antara MBG dan PMTAS	Evaluasi Berkala	Sekretaris Daerah	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
5.	Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja Stunting	Evaluasi Berkala	Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
6.	Evaluasi kinerja Pembina wilayah dilaksanakan secara rutin dan berkala.	Evaluasi Berkala	Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan II – IV Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
7.	Pemanfaatan segala jenis media promosi dan sosialisasi program kerja Stunting	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Sekretaris Daerah	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
8.	Pembuatan SK Kepala Dinas P3AP2KB untuk Bapak Asuh Anak Stunting	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Kepala Dinas P3AP2KB	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
9.	Melaksanakan Pelatihan dan Sosialisasi Budi Daya Ikan dalam Ember	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Kepala Dinas Pertanian	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
10.	Penetapan dan Pemutakhiran SK Penerima Manfaat	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Sekretaris Daerah	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
11.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Evaluasi Berkala	Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan

NO.	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN	PENANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN	RENCANA WAKTU PEMANTAUAN	KET.
12.	Peningkatan Status RSUD dari Tipe C ke Tipe B	Evaluasi Berkala	Sekretaris Daerah	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
13.	Penyusunan Perwako tentang Transisi Transformasi SPBE menuju Pemdi	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Sekretaris Daerah	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
14.	Menetapkan Branding Kota Payakumbuh sebagai Kota Tujuan Pendidikan	Evaluasi Berkala	Sekretaris Daerah	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan

2. MANAJEMEN RISIKO TUJUAN DAN SASARAN MISI 2

Tabel L2.9 Penetapan Konteks Risiko Strategis Misi 2 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS			
MISI 2 MEWUJUDKAN IKLIM EKONOMI YANG KOMPETITIF			
Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	
Periode yang dinilai	:	Tahun 2025 - 2029	
Visi	:	Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, Dan Sentra Umkm Yang Kompetitif	
Tujuan Strategis RPJMD	:	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	
Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	:	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Indek Daya Saing Daerah (IDSD) 3. Proporsi kontribusi PDRB Kota Payakumbuh 4. PDRB Per-kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	
Sasaran Strategis RPJMD	:	2.1.1	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat
	:	2.1.2	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal
	:	2.1.3	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	:	2.1.1.a	Tingkat Pengangguran Terbuka
	:	2.1.1.b	Indeks Gini
	:	2.1.2.a	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)
	:	2.1.3.a	Nilai Realisasi Investasi (Rp)
Urusan Pemerintah Daerah	:	1. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Tenaga Kerja 2. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Pangan 3. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Koperasi dan UKM 4. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Penanaman Modal 5. Urusan Pemerintah Pilihan: Kelautan dan Perikanan 6. Urusan Pemerintah Pilihan: Pariwisata 7. Urusan Pemerintah Pilihan: Pertanian 8. Urusan Pemerintah Pilihan: Perdagangan	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

		9. Urusan Pemerintah Pilihan: Perindustrian
		10. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Keuangan
Program Pembangunan	:	1.1 Program Perencanaan Tenaga Kerja 1.2 Program Pelatihan Keja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.3 Program Penempatan Tenaga Kerja 1.4 Program Hubungan Industrial 2.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 2.2 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2.3 Program Penanganan Kerawanan Pangan 2.4 Program Pengawasan Keamanan Pangan 3.1 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 3.2 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 3.3 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3.4 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 3.5 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 3.6 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 3.7 Program Pengembangan UMKM 4.1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 4.2 Program Promosi Penanaman Modal 4.3 Program Pelayanan Penanaman Modal 4.4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 4.5 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 5.1 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 5.2 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 6.1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 6.2 Program Pemasaran Pariwisata 6.3 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 6.4 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 7.1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 7.2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 7.3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 7.4 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 7.5 Program Perizinan Usaha Pertanian 7.6 Program Penyuluhan Pertanian

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS		
		8.1 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 8.2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 8.3 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 8.4 Program Pengembangan Ekspor 8.5 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 8.6 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 9.1 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 9.2 Program Pengendalian Izin Usaha Industri 9.3 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 10.1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 10.2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 10.3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Perangkat Daerah Terkait	:	1. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu 5. Dinas Pertanian 6. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 7. Badan Keuangan Daerah

Tabel L2.10 Identifikasi Risiko Strategis Misi 2 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
Tujuan 2.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	1. Laju Pertumbu- han Ekonomi 2. Indek Daya Saing Daerah (IDSD) 3. Proporsi kontribusi PDRB Kota Payakum- buh								
Sasaran 2.1.1 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	1. PDRB Per- kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta) 2. Tingkat Pengangu- ran Terbuka 3. Indeks Gini	Terjadinya ketimpangan kesejahteraan ekonomi masyarakat	RPP: 2.1.1.1	Kepala Daerah	Ketergantungan pada Sektor Ekonomi Tertentu	Internal	UC	Suatu wilayah terlalu bergantung pada satu sektor	Kota Payakumbuh
					Kurangnya Inovasi dan Daya Saing	Internal	C	Ekonomi yang tidak bertransformasi (dari primer ke sekunder/tersier) cenderung stagnan karena tidak bisa mengikuti dinamika global.	Kota Payakumbuh
					Infrastruktur yang Buruk	Internal	C	Wilayah yang terisolasi sulit berkembang karena akses ke pasar,	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								bahan baku, dan tenaga kerja terbatas	
								Biaya logistik tinggi, investor bisa menghambat aktivitas ekonomi dan enggan masuk, produktivitas rendah	
					Kualitas SDM yang Rendah	Internal	C	Sektor formal sulit berkembang, dominasi sektor informal	Kota Payakumbuh
								produktivitas rendah dan sulit bersaing	Kota Payakumbuh
					Kebijakan Pemerintah yang Tidak Efektif	Internal	C	Pertumbuhan kota yang tidak direncanakan menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan lapangan kerja	Kota Payakumbuh
								Regulasi yang rumit, birokrasi lamban, dan korupsi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan	Kota Payakumbuh
								Pengangguran meningkat	Masyarakat

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								konsumsi tidak seimbang dengan produksi	Kota Payakumbuh
					Minimnya Investasi	Eksternal	C	Kurangnya proyek baru, lapangan kerja terbatas	Masyarakat
								Rendahnya kepercayaan investor terhadap keamanan, stabilitas politik, atau prospek ekonomi daerah	Kota Payakumbuh
					Krisis Eksternal	Eksternal	UC	Faktor global seperti krisis ekonomi dunia, pandemi, atau perang dapat berdampak langsung pada ekonomi lokal	Kota Payakumbuh
								Permintaan ekspor turun, harga komoditas anjlok	Kota Payakumbuh
Sasaran 2.1.2 Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	Potensi Daerah Tidak Termanfaatkan Secara Optimal, dan kemandirian	RPP: 2.1.2.1	Kepala Daerah	Kurangnya data dan pemetaan potensi daerah	Internal	C	Pertumbuhan ekonomi daerah lambat, karena Pemerintah daerah tidak memiliki data akurat tentang potensi alam, budaya, atau ekonomi lokal	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
		daerah gagal terbangun						Krisis identitas daerah, Ketiadaan produk unggulan atau ciri khas menyebabkan daerah tidak dikenal dan tidak kompetitif	Kota Payakumbuh
					Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas	Internal	C	Lapangan kerja terbatas	Kota Payakumbuh
								SDA dikelola investor besar, masyarakat lokal tidak terlibat	Kota Payakumbuh
								Masyarakat hanya jadi objek pembangunan, bukan subjek yang berperan aktif.	Kota Payakumbuh
					Infrastruktur tidak memadai	Internal	C	Daerah yang gagal mandiri tertinggal dari daerah lain yang sukses mengelola potensi.	Kota Payakumbuh
					Minimnya inovasi dan teknologi	Internal	C	Potensi alam atau budaya tidak dikembangkan secara modern atau kreatif.	Kota Payakumbuh
								Potensi lokal diambil alih pihak luar (eksternal)	Kota Payakumbuh
					Investasi terbatas	Internal	C	Komoditas lokal tidak bernilai tambah	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Internal	C	Daerah tidak bisa menghasilkan pendapatan cukup dari potensi ekonominya sendiri	PD
					Kebijakan tidak berpihak pada potensi lokal	Internal	C	Pembangunan tidak berkelanjutan, Program-program hanya sesaat, tidak berdampak jangka panjang	Masyarakat
								Pembangunan lebih berorientasi pada program pusat daripada menggali potensi daerah	Kota Payakumbuh
Sasaran 2.1.3 Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Rp)	Pertumbuhan ekonomi daerah cenderung stagnan atau terjadi penurunan	RPP: 2.1.3.1	Kepala Daerah	Iklim Usaha Tidak Kondusif	Internal	C	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rendah	Kota Payakumbuh
								Karena anggaran terbatas, pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi memburuk	Masyarakat
								Kurangnya sektor produktif menyebabkan minimnya lapangan kerja formal	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Ekonomi tidak berkembang, masyarakat tetap bergantung pada sektor informal atau bantuan pemerintah	Kota Payakumbuh
					Kurangnya Kepastian Hukum	Internal	C	prosedur yang tidak efisien membuat investor enggan masuk	Sektor Swasta
					Kualitas Infrastruktur Rendah	Internal	C	Jalan, listrik, air, pelabuhan, dan jaringan internet yang buruk menghambat kegiatan bisnis.	
					Promosi Daerah yang Lemah	Internal	C	Potensi dan keunggulan daerah tidak diketahui publik atau investor luar	

Tabel L2.11 Analisis Risiko Strategis Tujuan 2 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat			
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029			
Tujuan Strategis RPJMD	:	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas			
NO.	RISIKO TERIDENTIFIKASI	KODE RISIKO	ANALISIS RISIKO		
			SKALA DAMPAK	SKALA KEMUNGKINAN	SKALA RISIKO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)x(5)
1.	Terjadinya ketimpangan kesejahteraan ekonomi masyarakat	RPP: 2.1.1.1	4	4	20
2.	Potensi Daerah Tidak Termanfaatkan Secara Optimal, dan kemandirian daerah gagal terbangun	RPP: 2.1.2.1	5	5	25
3.	Pertumbuhan ekonomi daerah cenderung stagnan atau terjadi penurunan	RPP: 2.1.3.1	4	4	16

Tabel L2.12 Matriks Hasil Analisis Risiko pada Tujuan 2 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

MATRIKS ANALISIS RISIKO			DAMPAK/KONSEKUENSI				
			TIDAK SIGNIFIKAN	KECIL	SEDANG	BESAR	SIGNIFIKAN
			1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO	HAMPIR PASTI	5					RPP: 2.1.2.1
	KEMUNGKINAN BESAR	4				RPP: 2.1.1.1 RPP: 2.1.3.1	
	MUNGKIN	3					
	KEMUNGKINAN KECIL	2					
	SANGAT JARANG	1					
KETERANGAN			SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG/ MEDIUM	TINGGI	SANGAT TINGGI

Tabel L2.13 Daftar Risiko Prioritas pada Tujuan 2 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat				
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029				
NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	SKALA RISIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Potensi Daerah Tidak Termanfaatkan Secara Optimal, dan kemandirian daerah gagal terbangun	RPP: 2.1.2.1	25	Kepala Daerah	1. Kurangnya data dan pemetaan potensi daerah 2. Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas 3. Infrastruktur tidak memadai 4. Minimnya inovasi dan teknologi 5. Investasi terbatas 6. Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7. Kebijakan tidak berpihak pada potensi lokal	1. Pertumbuhan ekonomi daerah lambat, karena Pemerintah daerah tidak memiliki data akurat tentang potensi alam, budaya, atau ekonomi lokal 2. Krisis identitas daerah, Ketiadaan produk unggulan atau ciri khas menyebabkan daerah tidak dikenal dan tidak kompetitif 3. Lapangan kerja terbatas 4. SDA dikelola investor besar, masyarakat lokal tidak terlibat 5. Masyarakat hanya jadi objek pembangunan, bukan subjek yang berperan aktif. 6. Daerah yang gagal mandiri tertinggal dari daerah lain yang sukses mengelola potensi. 7. Potensi alam atau budaya tidak dikembangkan secara modern atau kreatif. 8. Potensi lokal diambil alih pihak luar (eksternal) 9. Komoditas lokal tidak bernilai tambah 10. Daerah tidak bisa menghasilkan pendapatan cukup dari potensi ekonominya sendiri 11. Pembangunan tidak berkelanjutan, Program-program hanya sesaat, tidak berdampak jangka panjang 12. Pembangunan lebih berorientasi pada program pusat daripada menggali potensi daerah
2.	Terjadinya ketimpangan kesejahteraan ekonomi masyarakat	RPP: 2.1.1.1	16	Kepala Daerah	1. Ketergantungan pada Sektor Ekonomi Tertentu 2. Kurangnya Inovasi dan Daya Saing 3. Infrastruktur yang Buruk	1. Suatu wilayah terlalu bergantung pada satu sektor 2. Ekonomi yang tidak bertransformasi (dari primer ke sekunder/tersier) cenderung stagnan karena tidak bisa mengikuti dinamika global. 3. Wilayah yang terisolasi sulit berkembang karena akses ke pasar, bahan baku, dan tenaga kerja terbatas

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	SKALA RISIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK
					4. Kualitas SDM yang Rendah 5. Kebijakan Pemerintah yang Tidak Efektif 6. Minimnya Investasi 7. Krisis Eksternal	4. Biaya logistik tinggi, investor bisa menghambat aktivitas ekonomi dan enggan masuk, produktivitas rendah 5. Sektor formal sulit berkembang, dominasi sektor informal 6. produktivitas rendah dan sulit bersaing 7. Pertumbuhan kota yang tidak direncanakan menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan lapangan kerja 8. Regulasi yang rumit, birokrasi lamban, dan korupsi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan 9. Pengangguran meningkat 10. konsumsi tidak seimbang dengan produksi 11. Kurangnya proyek baru, lapangan kerja terbatas 12. Rendahnya kepercayaan investor terhadap keamanan, stabilitas politik, atau prospek ekonomi daerah 13. Faktor global seperti krisis ekonomi dunia, pandemi, atau perang dapat berdampak langsung pada ekonomi lokal 14. Permintaan ekspor turun, harga komoditas anjlok
3.	Pertumbuhan ekonomi daerah cenderung stagnan atau terjadi penurunan	RPP: 2.1.3.1	16	Kepala Daerah	1. Iklim Usaha Tidak Kondusif 2. Kurangnya Kepastian Hukum 3. Kualitas Infrastruktur Rendah 4. Promosi Daerah yang Lemah	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rendah 2. Karena anggaran terbatas, pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi memburuk 3. Kurangnya sektor produktif menyebabkan minimnya lapangan kerja formal 4. Ekonomi tidak berkembang, masyarakat tetap bergantung pada sektor informal atau bantuan pemerintah 5. prosedur yang tidak efisien membuat investor enggan masuk 6. Jalan, listrik, air, pelabuhan, dan jaringan internet yang buruk menghambat kegiatan bisnis. 7. Potensi dan keunggulan daerah tidak diketahui publik atau investor luar

Tabel L2.14 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih Dibutuhkan pada Tujuan 2 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1.	Potensi Daerah Tidak Termanfaatkan Secara Optimal, dan kemandirian daerah gagal terbangun	RPP: 2.1.2.1	1. Melakukan Pengawasan/ Monitoring Stok Dan HET Pupuk Bersubsidi	Penyaluran/ Distribusi Pupuk tidak Tepat Sasaran	1. Peningkatan Pengawasan 2. Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja	Kepala Daerah	2025-2029
			1. Pemberian Bantuan Alsintan 2. Gerakan Percepatan Tanam Dan Tanam Serentak Padi 3. Pelaksanaan Sekolah Lapangan Komoditas Jagung, Tiram, Padi Dan Bawang Merah	Konflik dalam Pengadaan dan Pendistribusian	Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja, dari Pengadaan sampai dengan Pendistribusian	Kepala Dinas Pertanian	2025-2026
			1. Pemberian Bantuan Sedian Tambahan Cabe dan Padi 2. Bantuan Bibit Cabe, Bamer, Pupuk, Polybag Serta Pelatihan Peningkatan Ketahanan Pangan	-	-	-	-
2.	Terjadinya ketimpangan kesejahteraan ekonomi masyarakat	RPP: 2.1.1.1	1. Penyaluran Bantuan Permakanan Tahap III Bantuan Permakanan Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta	Pemberian Bantuan tidak tepat sasaran	Proses Verifikasi dan Validasi data dilakukan secara rutin dan berkala	Sekretaris Daerah	2025-2026

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Payakumbuh 2. Penyaluran Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas 3. Menyalurkan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana, Seperti Bencana Angin Putting Beliung, Banjir Dan Bencana Kebakaran 4. Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling Bagi Warga Kota Payakumbuh 5. Memberikan Bantuan Pangan Kepada Keluarga Miskin Melalui Dana Insentif Fiskal 6. Penyaluran Bantuan Pangan Dari Bapanas Tahap III				
			1. Meningkatkan Pendidikan Dan Pelatihan Angkatan Kerja : Melaksanakan Pelatihan Bengkel, Melakukan Pelatihan Kerajinan Tangan Untuk KK Miskin, Melakukan Pelatihan Keterampilan Teknis Olahan Makanan Untuk KK Miskin, Melakukan Pelatihan Keterampilan Teknis Pertanian Untuk KK Miskin, Diklat Pembuatan Hiasan Busana Dengan Alat Jahit Tangan, Pelatihan Menjahit Bad Cover, Pelatihan Barbershop, Pelatihan Rajut Dan Pelatihan	Jenis Pelatihan belum sesuai kebutuhan dan tuntutan Kekinian	Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian	2025-2029

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Diversifikasi Produk Sulam/Bordir 2. Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif Sektor Fashion Pada Event Skala Nasional 3. Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri				
3.	Pertumbuhan ekonomi daerah cenderung stagnan atau terjadi penurunan	RPP: 2.1.3.1	1. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan KKPR Berbasis Online (E-KKPR) Dalam Rangka 4 5 Aplikasi Sitarang Pemberian Kemudahan Pelayanan Non Berusaha 2. RDTR Dijadikan Dasar Penerbitan KKPR (RDTR Terintegrasi OSS RBA)	-	-	-	-
			1. Perda Tentang Penanaman Modal Tahun 2024 2. Perwako Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan	Pelaksanaan program kerja kurang optimal (Nilai Investasi tidak meningkat)	Penyusunan Perwako tentang Belum ada insentif dan disinsentif bagi investor	Kepala Daerah	2025-2026
			1. Melakukan Pemantauan Pasokan Dan Stok Pangan Strategis Dan Informasi Harga Terupdate	Pelaksanaan program kerja kurang optimal	Pemanfaatan media publik untuk publikasi harga pangan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	2025-2026
			1. Mengawasi Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Ditingkat Distributor	Pelaksanaan distribusi dan monitoring kurang optimal	Meningkatkan Pengawasan harga	Kepala Dinas Koperasi, UKM	2025-2029

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			2. Monitoring Harian Terhadap Harga Bahan Pokok (Bapok) Di Pusat Pasar Tradisional Payakumbuh 3. Pasar Murah				

Tabel L2.15 Rencana Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 2 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat				
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029				
NO.	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1.	Peningkatan Pengawasan	Laporan Pengawasan	Kepala Daerah	Kepala Dinas Pertanian	Triwulan I – Tahun 2026	Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029
2.	Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja	Dokumen SOP	Kepala Dinas Pertanian	Staf Dinas Pertanian terkait	Triwulan I – Tahun 2026	Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029
3.	Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja, dari Pengadaan sampai dengan Pendistribusian	Dokumen SOP	Kepala Dinas Pertanian	Staf Dinas Pertanian terkait	Triwulan I – Tahun 2026	
4.	Proses Verifikasi dan Validasi data dilakukan secara rutin dan berkala	Pembentukan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah tentang Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Payakumbuh	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Sosial	Triwulan I – Tahun 2026	Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029
5.	Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja	Surat Usulan Pelatihan	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian	Staf Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian terkait	Triwulan I – Tahun 2026	
6.	Penyusunan Perwako tentang Belum ada insentif dan disinsentif bagi investor	Peraturan Walikota tentang insentif dan	Kepala Daerah	Sekretaris Daerah	Triwulan I – Tahun 2026	Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029

NO.	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	KET.
		disinsentif bagi investor				
7.	Pemanfaatan media publik untuk publikasi harga pangan	Infografis/ Poster	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Staf Dinas Ketahanan Pangan terkait	Triwulan I – Tahun 2026	
8.	Meningkatkan Pengawasan harga	Laporan Pengawasan	Kepala Dinas Koperasi, UKM	Staf Kepala Dinas Koperasi, UKM terkait	Triwulan I – Tahun 2026	Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029

Tabel L2.16 Rencana Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 2 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat			
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029			
NO.	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN	PENANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN	RENCANA WAKTU PEMANTAUAN	KET.
1.	Peningkatan Pengawasan	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Sekretaris Daerah	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
2.	Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Kepala Dinas Pertanian	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
3.	Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Program kerja, dari Pengadaan sampai dengan Pendistribusian	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Kepala Dinas Pertanian	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
4.	Proses Verifikasi dan Validasi data dilakukan secara rutin dan berkala	Evaluasi Berkala	Sekretaris Daerah	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
5.	Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja	Evaluasi Berkala	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
6.	Penyusunan Perwako tentang Belum ada insentif dan disinsentif bagi investor	Evaluasi Berkala	Sekretaris Daerah	Triwulan II – IV Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
7.	Pemanfaatan media publik untuk publikasi harga pangan	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
8.	Meningkatkan Pengawasan harga	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Kepala Dinas Koperasi, UKM	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan

3. MANAJEMEN RISIKO TUJUAN DAN SASARAN MISI 3

Tabel L2.17 Penetapan Konteks Risiko Strategis Misi 3 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS		
MISI 3 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN KONDUSIF		
Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
Periode yang dinilai	:	Tahun 2025 - 2029
Visi	:	Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, Dan Sentra Umkm Yang Kompetitif
Tujuan Strategis RPJMD	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	:	1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 2. Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK
Sasaran Strategis RPJMD	:	3.1.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
	:	3.1.2 Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel
	:	3.1.3 Meningkatkan Pendapatan Daerah
	:	3.1.4 Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	:	3.1.1.a Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE/ Pemdi)
	:	3.1.1.b Indeks Pelayanan Publik
	:	3.1.1.c Indeks Kepuasan Masyarakat
	:	3.1.2.a Nilai Evaluasi AKIP
	:	3.1.2.b Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
	:	3.1.2.c Indeks Pengelolaan Aset Daerah
	:	3.1.3.a Rasio PAD terhadap APBD
	:	3.1.4.a Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum
Urusan Pemerintah Daerah	:	1. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar: Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Pertanahan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

		3. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 4. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Penanaman Modal 5. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Komunikasi dan Informatika 6. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Statistik 7. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Persandian 8. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Kearsipan 9. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat Daerah 10. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat DPRD 11. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Perencanaan 12. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Keuangan 13. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Kepegawaian 14. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Pendidikan dan Pelatihan 15. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Penelitian dan Pengembangan 16. Unsur Pengawas: Inspektorat 17. Unsur Kewilayahan: Kec. Payakumbuh Barat 18. Unsur Kewilayahan: Kec. Payakumbuh Timur 19. Unsur Kewilayahan: Kec. Payakumbuh Utara 20. Unsur Kewilayahan: Kec. Payakumbuh Selatan 21. Unsur Kewilayahan: Kec. Lamposi Tigo Nagori 22. Unsur Pemerintahan Umum: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembangunan	:	1.1 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 1.2 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 1.3 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 1.4 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya 1.5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 2.1 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 2.2 Program Penetapan Tanah Ulayat 2.3 Program Penatagunaan Tanah 3.1 Program Pendaftaran Penduduk 3.2 Program Pencatatan Sipil 3.3 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3.4 Program Pengelolaan Profil Kependudukan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

	4.1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	4.2 Program Promosi Penanaman Modal
	4.3 Program Pelayanan Penanaman Modal
	4.4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	4.5 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	5.1 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
	5.2 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	6.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
	7.1 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	8.1 Program Pengelolaan Arsip
	8.2 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
	8.3 Program Perizinan Penggunaan Arsip
	9.1 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	9.2 Program Perekonomian Dan Pembangunan
	10.1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
	11.1 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	11.2 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	12.1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	12.2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	12.3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	13.1 Program Kepegawaian Daerah
	14.1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	15.1 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	15.2 Program Riset Dan Inovasi Daerah
	16.1 Program Penyelenggaraan Pengawasan
	16.2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	17.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kec. Payakumbuh Barat
	17.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kec. Payakumbuh Barat
	17.3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Payakumbuh Barat
	17.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kec. Payakumbuh Barat
	18.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kec. Payakumbuh Timur
	18.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kec. Payakumbuh Timur
	18.3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Payakumbuh Timur
	18.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kec. Payakumbuh Timur

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

		19.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kec. Payakumbuh Utara 19.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kec. Payakumbuh Utara 19.3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Payakumbuh Utara 19.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kec. Payakumbuh Utara 20.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kec. Payakumbuh Selatan 20.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kec. Payakumbuh Selatan 20.3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Payakumbuh Selatan 20.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kec. Payakumbuh Selatan 21.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kec. Lamposi Tigo Nagori 21.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kec. Lamposi Tigo Nagori 21.3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Lamposi Tigo Nagori 21.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kec. Lamposi Tigo Nagori 22.1 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 22.2 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 22.3 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 22.4 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya 22.5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Perangkat Daerah Terkait	:	1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Dinas Komunikasi dan Informatika 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7. Sekretariat Daerah 8. Sekretariat DPRD 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10. Badan Keuangan Daerah 11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12. Inspektorat 13. Kecamatan Payakumbuh Barat 14. Kecamatan Payakumbuh Timur 15. Kecamatan Payakumbuh Utara

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS	
	16. Kecamatan Payakumbuh Selatan 17. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori 18. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel L2.18 Identifikasi Risiko Strategis Misi 3 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
Tujuan 3.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 2. Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK								
Sasaran 3.1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE/ Pemdi) 2. Indeks Pelayanan Publik 3. Indeks Kepuasan Masyarakat	Tidak terlayannya publik dengan optimal	RPP: 3.1.1.1	Kepala Daerah	Kualitas SDM Aparatur yang Rendah	Internal	C	Pelayanan Publik Buruk dan Tidak Profesional	Masyarakat
								Lemahnya Inovasi dan Adaptasi Teknologi	PD
								Rendahnya Akuntabilitas dan Transparansi	PD
								Kurangnya Kepuasan dan Kepercayaan Publik	PD
					Sistem Birokrasi yang Rumit dan Lambat	Internal	C	Terhambatnya Akses terhadap Hak Dasar Warga Negara, Seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, bantuan sosial, dan layanan perizinan	Masyarakat

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					Kurangnya Sarana dan Prasarana Layanan	Internal	C	Pelayanan Publik Tidak Efisien	Masyarakat
								Turunnya Kualitas Pelayanan	Masyarakat
								Tingginya Ketidakpuasan Masyarakat	Masyarakat
								Menurunnya Citra dan Kepercayaan terhadap Pemerintah	PD
					Minimnya Penggunaan Teknologi Informasi	Internal	C	Terhambatnya Transformasi Digital dan Inovasi Pelayanan	Masyarakat
								Warga harus menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya ekstra hanya untuk mendapatkan layanan dasar.	Masyarakat
					Tidak Adanya Standar Pelayanan yang Jelas	Internal	C	Pelayanan Tidak Konsisten	Masyarakat
								Rendahnya Akuntabilitas dan Transparansi	PD
								Pelayanan Publik Tidak Profesional	Masyarakat
								Masyarakat Tidak Tahu Hak dan Prosedur	Masyarakat

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Sulit Melakukan Pengawasan dan Evaluasi	PD
								Tingginya Ketidakpuasan dan Keluhan Publik	Masyarakat
					Pengawasan dan Evaluasi yang Lemah	Internal	C	Kinerja Aparatur Tidak Terkontrol	PD
								Rendahnya Akuntabilitas Publik	PD
								Pelayanan Publik Tidak Berkualitas dan Tidak Merata	Masyarakat
								Meningkatnya Praktik Korupsi, Pungli, dan Penyalahgunaan Wewenang	Masyarakat
								Program dan Kegiatan Pemerintah Tidak Efektif, dan Keputusan dan Kebijakan Tidak Tepat Sasaran	Masyarakat
								Tertutupnya Ruang Perbaikan dan Inovasi	PD
					Adanya penyimpangan menyebabkan proses layanan	Internal	C	Meningkatnya Ketidakpuasan dan Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					menjadi diskriminatif dan tidak adil			Terciptanya Ketidaksetaraan Akses Pelayanan	Masyarakat
								Menurunnya Partisipasi Masyarakat	PD
								Melemahnya Rule of Law (Kepatuhan terhadap Hukum)	PD
								Hambatan bagi Pembangunan Inklusif dan Berkeadilan	Masyarakat
Sasaran 3.1.2 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai Evaluasi AKIP 2. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) 3. Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Rendahnya nilai evaluasi AKIP	RPP: 3.1.2.1	Kepala Daerah	Perencanaan Kinerja yang Lemah	Internal	C	Program/Kegiatan Tidak Tepat Sasaran	PD
								Kinerja Instansi Tidak Terukur	PD
								Inefisiensi Penggunaan Anggaran	PD
								Rendahnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	PD
								Tidak Tercapainya Sasaran Pembangunan	PD
								Lemahnya Koordinasi Antarpihak	PD
								Turunnya Kepercayaan Publik	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Keterlambatan Pengambilan Keputusan	PD
					Ketidak-sinambungan Antara Perencanaan dan Penganggaran	Internal	C	Program/Kegiatan Tidak Sesuai Prioritas Pembangunan	PD
								Pemborosan dan Inefisiensi Anggaran	PD
								Target Kinerja Tidak Tercapai	PD
								Rendahnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	PD
								Tumpang Tindih atau Kekosongan Kegiatan	PD
								Terhambatnya Pembangunan Daerah	PD
								Kinerja OPD Sulit Dievaluasi	PD
								Turunnya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah	PD
					Pelaporan Kinerja Tidak Akurat dan Lengkap	Internal	C	Evaluasi Kinerja Tidak Objektif	PD
								Kesalahan dalam Pengambilan Keputusan	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Rendahnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	PD
								Gagalnya Perbaikan Layanan Publik	PD
								Tingginya Risiko Temuan Audit (BPK/Inspektorat)	PD
								Menurunnya Kepercayaan Masyarakat	PD
								Rendahnya Integritas dan Profesionalisme Aparatur	PD
								Penggunaan Anggaran Tidak Efektif	PD
					Monitoring dan Evaluasi Internal Tidak Berjalan Efektif	Internal	C	Kinerja Program Tidak Diketahui Secara Nyata	PD
								Kesalahan Berulang Tidak Terkoreksi	PD
								Anggaran Digunakan Tidak Efisien	PD
								Rendahnya Akuntabilitas Instansi	PD
								Tidak Ada Data Pendukung untuk Perbaikan atau Inovasi	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Kesulitan Menentukan Prioritas Program Selanjutnya	PD
								Tidak Terdeteksinya Penyimpangan dan Pelanggaran	PD
								Menurunnya Kepercayaan dari Pimpinan, Stakeholder, dan Publik	PD
					Rendahnya Kapasitas SDM dalam Penyusunan LAKIP	Internal	C	Laporan Tidak Sesuai Standar Penilaian	PD
								Indikator Kinerja Tidak Relevan atau Tidak Terukur	PD
								Kesalahan Analisis Data Kinerja	PD
								Tidak Tercapainya Tujuan Akuntabilitas Publik	PD
								Turunnya Nilai Akuntabilitas Instansi (SAKIP)	PD
								Perencanaan Tahun Berikutnya Tidak Berkualitas	PD
								Lemahnya Evaluasi Internal dan	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Pengambilan Keputusan	
								Kegiatan Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Tidak Dilakukan	PD
					Minimnya Komitmen Pimpinan Instansi	Internal	C	Arah Kebijakan Tidak Jelas dan Tidak Fokus	PD
								Rendahnya Budaya Kinerja di Lingkungan Instansi	PD
								Pelaksanaan SAKIP dan LAKIP Sekadar Formalitas	PD
								Tidak Ada Dorongan untuk Perbaikan dan Inovasi	PD
								Program Strategis Tidak Terimplementasi Secara Optimal	PD
								Koordinasi Antarunit Lemah	PD
								Menurunnya Citra dan Kredibilitas Instansi	PD
								Rendahnya Nilai Evaluasi Instansi	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					Kurangnya Inovasi dan Penggunaan Sistem Informasi Kinerja	Internal	C	Kinerja Tidak Terdokumentasi Secara Baik	PD
								Sulit Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Secara Real-Time	PD
								Pengambilan Keputusan Tidak Berbasis Data	PD
								Lemahnya Akuntabilitas dan Transparansi	PD
								Rendahnya Efisiensi dan Produktivitas Aparatur	PD
								Minimnya Inovasi Pelayanan Publik	PD
								Potensi Manipulasi atau Ketidaksesuaian Data	PD
								Tidak Terdeteksinya Permasalahan Sejak Dini	PD
					Kinerja Program Tidak Berdampak Nyata bagi Masyarakat	Internal	C	Pemborosan Anggaran	PD
								Ketidakpuasan dan Kekecewaan Masyarakat	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Menurunnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah	PD
								Tujuan Pembangunan Daerah Tidak Tercapai	PD
								Nilai Evaluasi Kinerja Rendah	PD
								Tidak Ada Keberlanjutan Program	PD
								Kesulitan dalam Mengukur Keberhasilan	PD
								Potensi Konflik Sosial	PD
Sasaran 3.1.3 Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	Pendapatan Daerah tidak berpengaruh signifikan pada ekonomi daerah	RPP: 3.1.3.1	Kepala Daerah	Pendapatan tidak dikelola secara efektif	Internal	C	Tidak Terjadinya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PD
								Pemborosan dan Ketidakefisienan Anggaran	PD
								Pembangunan Tidak Merata	PD
								Rendahnya Daya Saing Daerah	PD
								Rendahnya Nilai Evaluasi Kinerja Keuangan dan Pembangunan	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Menurunnya Kepercayaan Publik	PD
								Terhambatnya Pertumbuhan Ekonomi Lokal	PD
								Risiko Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran	PD
					Pendapatan Daerah Tidak diinvestasikan atau dibelanjakan pada sektor produktif	Internal	C	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lambat	Kota Payakumbuh
								Kesempatan Kerja Tidak Tumbuh	Kota Payakumbuh
								Kemandirian Ekonomi Daerah Tidak Terbangun	Kota Payakumbuh
								Tidak Terjadi Multiplikasi Ekonomi (Multiplayer Effect)	Kota Payakumbuh
								Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulit Meningkatkan	Kota Payakumbuh
								Terhambatnya Inovasi dan Modernisasi Ekonomi Lokal	Kota Payakumbuh
								Tingginya Ketimpangan Sosial-Ekonomi	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					Tidak mendukung penciptaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat	Internal	C	Dana Daerah Tidak Memberikan Manfaat Jangka Panjang	Kota Payakumbuh
								Tingginya Angka Pengangguran dan Setengah Pengangguran	Kota Payakumbuh
								Kemiskinan Tetap Tinggi atau Meningkat	Kota Payakumbuh
								Lesunya Ekonomi Lokal	Kota Payakumbuh
								Ketimpangan Sosial- Ekonomi Meningkat	Kota Payakumbuh
								Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Payakumbuh
								Tingginya Ketergantungan pada Bantuan Sosial	Kota Payakumbuh
								Risiko Sosial dan Politik	Kota Payakumbuh
								Bonus Demografi Menjadi Beban Demografi	Kota Payakumbuh
Sasaran 3.1.4 Terciptanya ketentraman	Persentase Penurunan	Meningkatnya pelanggaran Trantibum	RPP: 3.1.4.1	Kepala Daerah	Lemahnya Penegakan Peraturan Daerah	Internal	C	Meningkatnya Pelanggaran Ketertiban Umum (Trantibum)	Masyarakat

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
dan ketertiban masyarakat	Pelanggaran Trantibum							Menurunnya Wibawa Pemerintah Daerah	PD
								Ketidakpastian Hukum dan Ketidakadilan	Masyarakat
								Kegagalan Mencapai Tujuan Pembangunan Daerah	PD
								Turunnya Kepatuhan dan Disiplin Sosial	PD
								Kerugian Keuangan Daerah	PD
								Tingginya Konflik Sosial dan Gesekan Antarwarga	PD
								Terganggunya Tata Ruang dan Lingkungan	PD
					Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat	Internal	C	Tingginya Tingkat Pelanggaran karena Ketidaktahuan	PD
								Minimnya Kesadaran Hukum di Tingkat Akar Rumput	PD
								Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Aturan	PD
								Stigma atau Salah Persepsi terhadap	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Aparat Penegak Hukum	
								Tidak Efektifnya Implementasi Perda dan Kebijakan Publik	PD
								Tertutupnya Akses Hukum bagi Kelompok Rentan	PD
								Meningkatnya Potensi Konflik Sosial	PD
								Terhambatnya Program Pembangunan Berbasis Aturan	PD
					Tingginya Kepadatan Penduduk dan Urbanisasi	Internal	C	Kemacetan dan Kepadatan Lalu Lintas	PD
								Meningkatnya Permukiman Kumuh	PD
								Tingginya Tekanan terhadap Layanan Publik	PD
								Peningkatan Pengangguran dan Persaingan Kerja	PD
								Tingginya Biaya Hidup dan Ketimpangan Sosial	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Meningkatnya Kriminalitas dan Konflik Sosial	PD
								Menurunnya Kualitas Lingkungan	PD
								Terjadinya Ketegangan Antarwilayah dan Antarwarga	PD
								Beban Fiskal Daerah Meningkat	PD
					Ketimpangan Sosial dan Ekonomi	Internal	UC	Meningkatnya Kemiskinan Struktural	PD
								Tingginya Potensi Konflik Sosial	PD
								Menurunnya Kohesi Sosial dan Solidaritas	PD
								Rendahnya Mobilitas Sosial	PD
								Terganggunya Stabilitas Politik dan Pemerintahan	PD
								Kinerja Ekonomi Daerah atau Negara Tidak Optimal	PD
								Munculnya Permukiman Kumuh dan Urban Sprawl	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Tingginya Angka Kriminalitas	PD
								Ketergantungan terhadap Bantuan Sosial	PD
					Koordinasi Lintas Sektor Lemah	Internal	C	Program dan Kegiatan Tidak Sinkron	PD
								Inefisiensi Penggunaan Anggaran	PD
								Kinerja Pembangunan Tidak Optimal	PD
								Pelayanan Publik Menjadi Lambat dan Tumpang Tindih	PD
								Minimnya Akuntabilitas	PD
								Data dan Informasi Tidak Terpadu	PD
								Menghambat Respons Cepat terhadap Krisis	PD
								Menyulitkan Monitoring dan Evaluasi Program	PD
								Meningkatkan Biaya Koordinasi Sosial dan Politik	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					Kurangnya Jumlah dan Kapasitas Aparat Trantib	Internal	C	Peningkatan Pelanggaran Ketertiban Umum	PD
								Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Tidak Efektif	PD
								Turunnya Wibawa Pemerintah Daerah	PD
								Meningkatnya Konflik Sosial saat Penertiban	PD
								Ketimpangan Penanganan antara Wilayah	PD
								Terhambatnya Respons terhadap Aduan Masyarakat	PD
								Tidak Maksimalnya Pelaksanaan Tugas Preventif dan Edukatif	PD
								Lemahnya Dokumentasi, Pelaporan, dan Evaluasi Penindakan	PD
								Beban Kerja Aparat Melebihi Kapasitas	PD
					Perubahan Nilai Sosial dan Gaya Hidup	Eksternal	UC	Menurunnya Kepedulian Sosial dan Solidaritas Komunitas	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Meningkatnya Konsumerisme dan Gaya Hidup Hedonis	Kota Payakumbuh
								Tergerusnya Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	Kota Payakumbuh
								Meningkatnya Tindakan Pelanggaran Norma Sosial	Kota Payakumbuh
								Terjadinya Konflik Antar Generasi	Kota Payakumbuh
								Tumbuhnya Gaya Hidup Instan dan Kurang Produktif	Kota Payakumbuh
								Melemahnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Kota Payakumbuh
								Tingkat Ketertiban dan Keamanan Menurun	Kota Payakumbuh
								Meningkatnya Kesenjangan Sosial	Kota Payakumbuh
					Lingkungan Fisik yang Tidak Tertata	Internal	C	Meningkatnya Risiko Bencana	Kota Payakumbuh
								Kemacetan dan Kesemrawutan Lalu Lintas	Kota Payakumbuh
								Pertumbuhan Permukiman Kumuh	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Menurunnya Kualitas Hidup Masyarakat	Kota Payakumbuh
								Peningkatan Kriminalitas dan Ketidakamanan	Kota Payakumbuh
								Penurunan Nilai Ekonomi dan Investasi	Kota Payakumbuh
								Kerusakan Ekologis dan Lingkungan Hidup	Kota Payakumbuh
								Tingginya Beban Biaya Pemeliharaan	Kota Payakumbuh
								Konflik Tata Guna Lahan	Kota Payakumbuh

Tabel L2.19 Analisis Risiko Strategis Tujuan 3 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat			
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029			
Tujuan Strategis RPJMD	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel			
NO.	RISIKO TERIDENTIFIKASI	KODE RISIKO	ANALISIS RISIKO		
			SKALA DAMPAK	SKALA KEMUNGKINAN	SKALA RISIKO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)x(5)
1.	Tidak terlayannya publik dengan optimal	RPP: 3.1.1.1	5	2	10
2.	Rendahnya nilai evaluasi AKIP	RPP: 3.1.2.1	4	3	12
3.	Pendapatan Daerah tidak berpengaruh signifikan pada ekonomi daerah	RPP: 3.1.3.1	5	5	25
4.	Meningkatnya pelanggaran Trantibum	RPP: 3.1.4.1	5	5	25

Tabel L2.20 Matriks Hasil Analisis Risiko Tujuan 3 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

MATRIKS ANALISIS RISIKO			DAMPAK/KONSEKUENSI				
			TIDAK SIGNIFIKAN	KECIL	SEDANG	BESAR	SIGNIFIKAN
			1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO	HAMPIR PASTI	5					RPP: 3.1.3.1 RPP: 3.1.4.1
	KEMUNGKINAN BESAR	4					
	MUNGKIN	3				RPP: 3.1.2.1	
	KEMUNGKINAN KECIL	2					RPP: 3.1.1.1
	SANGAT JARANG	1					
KETERANGAN			SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG/ MEDIUM	TINGGI	SANGAT TINGGI

Tabel L2.21 Daftar Risiko Prioritas Tujuan 3 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat				
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029				
NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	SKALA RISIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Pendapatan Daerah tidak berpengaruh signifikan pada ekonomi daerah	RPP: 3.1.3.1	25	Kepala Daerah	1. Pendapatan tidak dikelola secara efektif 2. Pendapatan Daerah Tidak diinvestasikan atau dibelanjakan pada sektor produktif 3. Tidak mendukung penciptaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat	1. Tidak Terjadinya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 2. Pemborosan dan Ketidakefisienan Anggaran 3. Pembangunan Tidak Merata 4. Rendahnya Daya Saing Daerah 5. Rendahnya Nilai Evaluasi Kinerja Keuangan dan Pembangunan 6. Menurunnya Kepercayaan Publik 7. Terhambatnya Pertumbuhan Ekonomi Lokal 8. Risiko Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran 9. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lambat 10. Kesempatan Kerja Tidak Tumbuh 11. Kemandirian Ekonomi Daerah Tidak Terbangun 12. Tidak Terjadi Multiplikasi Ekonomi (Multiplayer Effect) 13. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulit Meningkatkan 14. Terhambatnya Inovasi dan Modernisasi Ekonomi Lokal 15. Tingginya Ketimpangan Sosial-Ekonomi 16. Dana Daerah Tidak Memberikan Manfaat Jangka Panjang 17. Tingginya Angka Pengangguran dan Setengah Pengangguran 18. Kemiskinan Tetap Tinggi atau Meningkatkan 19. Lesunya Ekonomi Lokal 20. Ketimpangan Sosial-Ekonomi Meningkatkan 21. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 22. Tingginya Ketergantungan pada Bantuan Sosial 23. Risiko Sosial dan Politik 24. Bonus Demografi Menjadi Beban Demografi
2.	Meningkatnya pelanggaran Trantibum	RPP: 3.1.4.1	25	Kepala Daerah	1. Lemahnya Penegakan Peraturan Daerah	1. Meningkatnya Pelanggaran Ketertiban Umum (Trantibum) 2. Menurunnya Wibawa Pemerintah Daerah 3. Ketidakpastian Hukum dan Ketidakadilan 4. Kegagalan Mencapai Tujuan Pembangunan Daerah

					2. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat 3. Tingginya Kepadatan Penduduk dan Urbanisasi 4. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi 5. Koordinasi Lintas Sektor Lemah 6. Kurangnya Jumlah dan Kapasitas Aparat Trantib 7. Perubahan Nilai Sosial dan Gaya Hidup 8. Lingkungan Fisik yang Tidak Tertata	5. Turunnya Kepatuhan dan Disiplin Sosial 6. Kerugian Keuangan Daerah 7. Tingginya Konflik Sosial dan Gesekan Antarwarga 8. Terganggunya Tata Ruang dan Lingkungan 9. Tingginya Tingkat Pelanggaran karena Ketidaktahuan 10. Minimnya Kesadaran Hukum di Tingkat Akar Rumput 11. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Aturan 12. Stigma atau Salah Persepsi terhadap Aparat Penegak Hukum 13. Tidak Efektifnya Implementasi Perda dan Kebijakan Publik 14. Tertutupnya Akses Hukum bagi Kelompok Rentan 15. Meningkatnya Potensi Konflik Sosial 16. Terhambatnya Program Pembangunan Berbasis Aturan 17. Kemacetan dan Kepadatan Lalu Lintas 18. Meningkatnya Permukiman Kumuh 19. Tingginya Tekanan terhadap Layanan Publik 20. Peningkatan Pengangguran dan Persaingan Kerja 21. Tingginya Biaya Hidup dan Ketimpangan Sosial 22. Meningkatnya Kriminalitas dan Konflik Sosial 23. Menurunnya Kualitas Lingkungan 24. Terjadinya Ketegangan Antarwilayah dan Antarwarga 25. Beban Fiskal Daerah Meningkat 26. Meningkatnya Kemiskinan Struktural 27. Tingginya Potensi Konflik Sosial 28. Menurunnya Kohesi Sosial dan Solidaritas 29. Rendahnya Mobilitas Sosial 30. Terganggunya Stabilitas Politik dan Pemerintahan 31. Kinerja Ekonomi Daerah atau Negara Tidak Optimal 32. Munculnya Permukiman Kumuh dan Urban Sprawl 33. Tingginya Angka Kriminalitas 34. Ketergantungan terhadap Bantuan Sosial 35. Program dan Kegiatan Tidak Sinkron 36. Inefisiensi Penggunaan Anggaran 37. Kinerja Pembangunan Tidak Optimal 38. Pelayanan Publik Menjadi Lambat dan Tumpang Tindih 39. Minimnya Akuntabilitas

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	SKALA RISIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK
						40. Data dan Informasi Tidak Terpadu 41. Menghambat Respons Cepat terhadap Krisis 42. Menyulitkan Monitoring dan Evaluasi Program 43. Meningkatkan Biaya Koordinasi Sosial dan Politik 44. Peningkatan Pelanggaran Ketertiban Umum 45. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Tidak Efektif 46. Turunnya Wibawa Pemerintah Daerah 47. Meningkatnya Konflik Sosial saat Penertiban 48. Ketimpangan Penanganan antara Wilayah 49. Terhambatnya Respons terhadap Aduan Masyarakat 50. Tidak Maksimalnya Pelaksanaan Tugas Preventif dan Edukatif 51. Lemahnya Dokumentasi, Pelaporan, dan Evaluasi Penindakan 52. Beban Kerja Aparat Melebihi Kapasitas 53. Menurunnya Kepedulian Sosial dan Solidaritas Komunitas 54. Meningkatnya Konsumerisme dan Gaya Hidup Hedonis 55. Tergerusnya Nilai Budaya dan Kearifan Lokal 56. Meningkatnya Tindakan Pelanggaran Norma Sosial 57. Terjadinya Konflik Antar Generasi 58. Tumbuhnya Gaya Hidup Instan dan Kurang Produktif 59. Melemahnya Ketahanan Sosial Masyarakat 60. Tingkat Ketertiban dan Keamanan Menurun 61. Meningkatnya Kesenjangan Sosial 62. Meningkatnya Risiko Bencana 63. Kemacetan dan Kesemrawutan Lalu Lintas 64. Pertumbuhan Permukiman Kumuh 65. Menurunnya Kualitas Hidup Masyarakat 66. Peningkatan Kriminalitas dan Ketidakamanan 67. Penurunan Nilai Ekonomi dan Investasi 68. Kerusakan Ekologis dan Lingkungan Hidup 69. Tingginya Beban Biaya Pemeliharaan 70. Konflik Tata Guna Lahan

Tabel L2.22 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih Dibutuhkan Tujuan 3 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1.	Pendapatan Daerah tidak berpengaruh signifikan pada ekonomi daerah	RPP: 3.1.3.1	1. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Perluasan Kanal Pembayaran Qris Dinamis, Penggunaan Aplikasi E-Sptpd Untuk Pelaporan & Pembayaran Pajak Daerah, Dan Pemberitahuan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Daerah Melalui Aplikasi Sms Blast 2. Perluasan Kanal Pembayaran Retribusi 3. Penguatan Kapabilitas dan Kompetensi ASN 4. Penghapusan Denda Administrasi Pembayaran PBB-P2 5. Peningkatan kerjasama dengan mitra kerja: Kerjasama Dengan Dirjen Pajak dan DJPK, Kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional, dan Kerjasama antara Badan Keuangan Daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 6. Intensifikasi pajak daerah: penagihan pajak daerah dan	Tidak optimal pendataan dan pemungutan WPWR daerah	Pemutakhiran data WPWR	Kepala Daerah	2025-2027

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			pengawasan pajak daerah melalui KSWP 7. Ektensifikasi pajak daerah: pendataan dan pendaftaran OP baru, penyesuaian tarif pajak barang jasa tertentu (PBJT) dan sosialisasi peraturan daerah terkait PDRD				
2.	Meningkatnya pelanggaran Trantibum	RPP: 3.1.4.1	1. Penertiban PKL 2. Menindaklanjuti Laporan Masyarakat Adanya Tindak Asusila, Anak Punk Yang Meresahkan Dan Mengganggu Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Adanya Orang Terlantar, Ada ODGJ Yang Meresahkan Dan Mengganggu Trantibum Dan Adanya Pengemis Di Bawah Umur 3. Penertiban Baliho Yang Memakai Fasilitas Umum Dan Melanggar Perda No. 01 Tahun 2022 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 4. Patroli Cipta Kondisi Antisipasi Pelanggaran Perda 01 Tahun 2022 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5. Pelaksanaan Pemadam Kebakaran 6. Bersama TNI, Polri, PolPP dan Dinas PUPR Melaksanakan	Penyelesaian pelanggaran Trantibum tidak tuntas	Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan	Sekretaris Daerah	2025-2029

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Penyevelan Bangunan yang tidak Memiliki Izin 7. Penertiban Baliho Iklan Rokok Di Kota Payakumbuh yang Melanggar Perda				

Tabel L2.23 Rencana Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 3 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat				
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029				
NO.	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1.	Pemutakhiran data WPWR	Surat Keputusan (SK) tentang Wajib Pajak Wajib Retribusi	Kepala Daerah	Kepala Badan Keuangan Daerah	Triwulan I – Tahun 2026	Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029
2.	Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Pemungutan	Dokumen SOP	Sekretaris Daerah	Kepala SatpolPP dan Pemadam Kebakaran	Triwulan I – Tahun 2026	

Tabel L2.24 Rencana Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 3 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat			
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029			
NO.	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN	PENANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN	RENCANA WAKTU PEMANTAUAN	KET.
1.	Pemutakhiran data WPWR	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Kepala Daerah	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
2.	Penyusunan SOP pada setiap tahapan Pelaksanaan Pemungutan	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Sekretaris Daerah	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan

4. MANAJEMEN RISIKO TUJUAN DAN SASARAN MISI 4

Tabel L2.25 Penetapan Konteks Risiko Strategis Misi 4 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS		
MISI 4 MEWUJUDKAN NUANSA IMANI MELALUI PENDEKATAN BUDAYA DAN ADAT		
Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
Periode yang dinilai	:	Tahun 2025 - 2029
Visi	:	Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, Dan Sentra Umkm Yang Kompetitif
Tujuan Strategis RPJMD	:	Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK
Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	:	IPK berbasis ABS SBK
Sasaran Strategis RPJMD	:	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	:	1. Karya Budaya yang Ditetapkan 2. Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Pendidikan Karakter
Urusan Pemerintah Daerah	:	1. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Kebudayaan 2. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat Daerah
Program Pembangunan	:	1.1 Program Pengembangan Kebudayaan 1.2 Program Pengembangan Kesenian Tradisional 1.3 Program Pembinaan Sejarah 1.4 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 1.5 Program Pengelolaan Permuseuman 2.1 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2.2 Program Perekonomian Dan Pembangunan
Perangkat Daerah Terkait	:	1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2. Sekretariat Daerah

Tabel L2.26 Identifikasi Risiko Strategis Misi 4 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
Tujuan 4.1 Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	IPK berbasis ABS SBK								
Sasaran 4.1.1 Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Karya Budaya yang Ditetapkan	Tidak diterapkannya nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat secara optimal	RPP: 4.1.1.1	Kepala Daerah	Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi	Eksternal	UC	Perubahan Nilai dan Gaya Hidup	Kota Payakumbuh
								Tergerusnya Identitas Budaya Lokal	Kota Payakumbuh
								Meningkatnya Kesenjangan Sosial dan Ekonomi	Kota Payakumbuh
								Ketergantungan terhadap Produk dan Teknologi Asing	Kota Payakumbuh
								Perubahan Pola Pikir Generasi Muda	Kota Payakumbuh
								Peningkatan Akses Informasi dan Pendidikan	Kota Payakumbuh
								Perubahan Struktur Ekonomi Lokal	Kota Payakumbuh
								Disrupsi Dunia Kerja	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Kehidupan Sosial yang Lebih Individual	Kota Payakumbuh
								Pemudaran Kearifan Lokal dalam Pengambilan Keputusan	Kota Payakumbuh
					Kurangnya Pendidikan Karakter Sejak Dini	Internal	C	Rendahnya Moral dan Etika di Kalangan Anak dan Remaja	Kota Payakumbuh
								Menurunnya Disiplin dan Tanggung Jawab	Kota Payakumbuh
								Meningkatnya Perilaku Menyimpang	Kota Payakumbuh
								Kurangnya Kepedulian Sosial dan Empati	Kota Payakumbuh
								Menurunnya Semangat Kebangsaan dan Nasionalisme	Kota Payakumbuh
								Ketidakmampuan Menghadapi Tantangan dan Tekanan Hidup	Kota Payakumbuh
								Rendahnya Integritas dan Kepemimpinan di Masa Depan	Kota Payakumbuh
								Pendidikan Formal Tidak Berdampak Komprehensif	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					Minimnya Peran Keluarga dan Tokoh Masyarakat	Eksternal	C	Lingkungan Sosial Sekolah dan Masyarakat Menjadi Tidak Sehat	Kota Payakumbuh
								Pendidikan Moral Anak Menjadi Lemah	Kota Payakumbuh
								Meningkatnya Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja	Kota Payakumbuh
								Menurunnya Kontrol Sosial dalam Komunitas	Kota Payakumbuh
								Rendahnya Kepedulian terhadap Lingkungan Sosial	Kota Payakumbuh
								Hilangnya Warisan Nilai Budaya Lokal	Kota Payakumbuh
								Lemahnya Ketahanan Keluarga	Kota Payakumbuh
								Turunnya Keteladanan Sosial	Kota Payakumbuh
								Konflik Sosial Semakin Sulit Diredam	Kota Payakumbuh
								Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Kota Payakumbuh
						Internal	C	Kebijakan Tidak Relevan dengan	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					Lemahnya Integrasi Nilai dalam Kebijakan Publik			Kondisi Sosial Budaya Masyarakat	
								Turunnya Legitimasi dan Kepercayaan terhadap Pemerintah	Kota Payakumbuh
								Peningkatan Ketimpangan Sosial	Kota Payakumbuh
								Pudarnya Nilai Etika dalam Pelayanan Publik	Kota Payakumbuh
								Munculnya Konflik Sosial dan Penolakan Kebijakan	Kota Payakumbuh
								Kebijakan Menjadi Kaku dan Kurang Humanis	Kota Payakumbuh
								Peluang Korupsi dan Penyimpangan Meningkat	Kota Payakumbuh
								Kegagalan Pembangunan Karakter Bangsa	Kota Payakumbuh
								Terjadinya Fragmentasi Sosial	Kota Payakumbuh
					Keterbatasan Ruang Ekspresi Budaya Lokal	Eksternal	C	Keterbatasan Ruang Ekspresi Budaya Lokal	Kota Payakumbuh
								Punahnya Tradisi dan Warisan Budaya	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Menurunnya Rasa Bangga terhadap Budaya Sendiri	Kota Payakumbuh
								Terhambatnya Potensi Ekonomi Kreatif Daerah	Kota Payakumbuh
								Kesempatan Anak Muda Berkarya secara Lokal Menyempit	Kota Payakumbuh
								Kesenjangan Budaya antara Kota dan Desa	Kota Payakumbuh
								Tergerusnya Modal Sosial dan Nilai Kolektif	Kota Payakumbuh
								Menurunnya Inovasi Budaya Lokal	Kota Payakumbuh
								Penguasaan Budaya Lokal oleh Pihak Eksternal	Kota Payakumbuh
					Rendahnya Kesadaran Kolektif	Eksternal	UC	Kurangnya Kepedulian terhadap Masalah Bersama	Kota Payakumbuh
								Gotong Royong dan Partisipasi Sosial Menurun	Kota Payakumbuh
								Mudah Terjadi Konflik Sosial	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Lemahnya Dukungan terhadap Program Pemerintah	Kota Payakumbuh
								Pembangunan Daerah Tidak Berkelanjutan	Kota Payakumbuh
								Rendahnya Resiliensi Komunitas terhadap Krisis	Kota Payakumbuh
								Kesulitan Membangun Nilai Karakter Bangsa	Kota Payakumbuh
								Lingkungan Sosial Menjadi Cuek dan Renggang	Kota Payakumbuh
								Tingkat Pelanggaran Hukum dan Norma Sosial Meningkat	Kota Payakumbuh
					Kurangnya Keteladanan dari Pemimpin dan Aparatur	Internal	C	Menurunnya Kepercayaan Publik	Kota Payakumbuh
								Terbentuknya Budaya Negatif di Lingkungan Kerja dan Masyarakat	Kota Payakumbuh
								Rendahnya Disiplin dan Moral Aparatur	Kota Payakumbuh
								Erosi Nilai-Nilai Etika dalam Pelayanan Publik	Kota Payakumbuh
								Pendidikan Karakter Gagal Terbentuk	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Terhambatnya Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan Bersih	Kota Payakumbuh
								Masyarakat Kehilangan Panutan	Kota Payakumbuh
								Meningkatnya Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum	Kota Payakumbuh
								Kualitas Kepemimpinan Regeneratif Menurun	Kota Payakumbuh
					Minimnya Kolaborasi Lintas Lembaga	Eksternal	C	Program dan Kebijakan Menjadi Terfragmentasi	PD
								Pencapaian Tujuan Pembangunan Tidak Maksimal	PD
								Inefisiensi Anggaran dan Sumber Daya	PD
								Data dan Informasi Tidak Terintegrasi	PD
								Lambatnya Respon terhadap Isu atau Krisis	PD
								Turunnya Inovasi dan Solusi Kreatif	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Pelayanan Publik Menjadi Tidak Terpadu	PD
								Gagalnya Implementasi Kebijakan Berskala Luas	PD
								Lemahnya Dukungan Sosial dan Politik terhadap Program	PD
					Lingkungan Sosial yang Tidak Mendukung	Eksternal	C	Terhambatnya Perkembangan Karakter Anak dan Remaja	Kota Payakumbuh
								Rendahnya Motivasi Belajar dan Berkarya	Kota Payakumbuh
								Meningkatnya Perilaku Menyimpang dan Kriminalitas	Kota Payakumbuh
								Sulitnya Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Sosial	Kota Payakumbuh
								Minimnya Dukungan terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan	Kota Payakumbuh
								Menurunnya Solidaritas dan Rasa Kebersamaan	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Tingginya Stres Sosial dan Kesehatan Mental yang Terganggu	Kota Payakumbuh
								Kualitas Hidup Masyarakat Menurun	Kota Payakumbuh
								Tertutupnya Ruang untuk Partisipasi dan Aspirasi Publik	Kota Payakumbuh

Tabel L2.27 Analisis Risiko Strategis Tujuan 4 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat			
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029			
Tujuan Strategis RPJMD	:	Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK			
NO.	RISIKO TERIDENTIFIKASI	KODE RISIKO	ANALISIS RISIKO		
			SKALA DAMPAK	SKALA KEMUNGKINAN	SKALA RISIKO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)x(5)
1.	Tidak diterapkannya nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat secara optimal	RPP: 4.1.1.1	5	5	25

Tabel L2.28 Matriks Hasil Analisis Risiko Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

MATRIKS ANALISIS RISIKO			DAMPAK/KONSEKUENSI				
			TIDAK SIGNIFIKAN	KECIL	SEDANG	BESAR	SIGNIFIKAN
			1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO	HAMPIR PASTI	5					RPP: 4.1.1.1
	KEMUNGKINAN BESAR	4					
	MUNGKIN	3					
	KEMUNGKINAN KECIL	2					
	SANGAT JARANG	1					
KETERANGAN			SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG/ MEDIUM	TINGGI	SANGAT TINGGI

Tabel L2.29 Daftar Risiko Prioritas Tujuan 4 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	SKALA RISIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Tidak diterapkannya nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat secara optimal	RPP: 4.1.1.1	25	Kepala Daerah	1. Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi 2. Kurangnya Pendidikan Karakter Sejak Dini 3. Minimnya Peran Keluarga dan Tokoh Masyarakat 4. Lemahnya Integrasi Nilai dalam Kebijakan Publik 5. Keterbatasan Ruang Ekspresi Budaya Lokal 6. Rendahnya Kesadaran Kolektif 7. Kurangnya Keteladanan dari Pemimpin dan Aparatur 8. Minimnya Kolaborasi Lintas Lembaga 9. Lingkungan Sosial yang Tidak Mendukung	1. Perubahan Nilai dan Gaya Hidup 2. Tergerusnya Identitas Budaya Lokal 3. Meningkatnya Kesenjangan Sosial dan Ekonomi 4. Ketergantungan terhadap Produk dan Teknologi Asing 5. Perubahan Pola Pikir Generasi Muda 6. Peningkatan Akses Informasi dan Pendidikan 7. Perubahan Struktur Ekonomi Lokal 8. Disrupsi Dunia Kerja 9. Kehidupan Sosial yang Lebih Individual 10. Pemudaran Kearifan Lokal dalam Pengambilan Keputusan 11. Rendahnya Moral dan Etika di Kalangan Anak dan Remaja 12. Menurunnya Disiplin dan Tanggung Jawab 13. Meningkatnya Perilaku Menyimpang 14. Kurangnya Kepedulian Sosial dan Empati 15. Menurunnya Semangat Kebangsaan dan Nasionalisme 16. Ketidakmampuan Menghadapi Tantangan dan Tekanan Hidup 17. Rendahnya Integritas dan Kepemimpinan di Masa Depan 18. Pendidikan Formal Tidak Berdampak Komprehensif 19. Lingkungan Sosial Sekolah dan Masyarakat Menjadi Tidak Sehat 20. Pendidikan Moral Anak Menjadi Lemah 21. Meningkatnya Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja 22. Menurunnya Kontrol Sosial dalam Komunitas 23. Rendahnya Kepedulian terhadap Lingkungan Sosial 24. Hilangnya Warisan Nilai Budaya Lokal 25. Lemahnya Ketahanan Keluarga 26. Turunnya Keteladanan Sosial

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	SKALA RISIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK
						27. Konflik Sosial Semakin Sulit Diredam 28. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 29. Kebijakan Tidak Relevan dengan Kondisi Sosial Budaya Masyarakat 30. Turunnya Legitimasi dan Kepercayaan terhadap Pemerintah 31. Peningkatan Ketimpangan Sosial 32. Pudarnya Nilai Etika dalam Pelayanan Publik 33. Munculnya Konflik Sosial dan Penolakan Kebijakan 34. Kebijakan Menjadi Kaku dan Kurang Humanis 35. Peluang Korupsi dan Penyimpangan Meningkat 36. Kegagalan Pembangunan Karakter Bangsa 37. Terjadinya Fragmentasi Sosial 38. Keterbatasan Ruang Ekspresi Budaya Lokal 39. Punahnya Tradisi dan Warisan Budaya 40. Menurunnya Rasa Bangga terhadap Budaya Sendiri 41. Terhambatnya Potensi Ekonomi Kreatif Daerah 42. Kesempatan Anak Muda Berkarya secara Lokal Menyempit 43. Kesenjangan Budaya antara Kota dan Desa 44. Tergerusnya Modal Sosial dan Nilai Kolektif 45. Menurunnya Inovasi Budaya Lokal 46. Penguasaan Budaya Lokal oleh Pihak Eksternal 47. Kurangnya Kepedulian terhadap Masalah Bersama 48. Gotong Royong dan Partisipasi Sosial Menurun 49. Mudah Terjadi Konflik Sosial 50. Lemahnya Dukungan terhadap Program Pemerintah 51. Pembangunan Daerah Tidak Berkelanjutan 52. Rendahnya Resiliensi Komunitas terhadap Krisis 53. Kesulitan Membangun Nilai Karakter Bangsa 54. Lingkungan Sosial Menjadi Cuek dan Renggang 55. Tingkat Pelanggaran Hukum dan Norma Sosial Meningkat 56. Menurunnya Kepercayaan Publik

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	SKALA RISIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK
						57. Terbentuknya Budaya Negatif di Lingkungan Kerja dan Masyarakat 58. Rendahnya Disiplin dan Moral Aparatur 59. Erosi Nilai-Nilai Etika dalam Pelayanan Publik 60. Pendidikan Karakter Gagal Terbentuk 61. Terhambatnya Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan Bersih 62. Masyarakat Kehilangan Panutan 63. Meningkatnya Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum 64. Kualitas Kepemimpinan Regeneratif Menurun 65. Program dan Kebijakan Menjadi Terfragmentasi 66. Pencapaian Tujuan Pembangunan Tidak Maksimal 67. Inefisiensi Anggaran dan Sumber Daya 68. Data dan Informasi Tidak Terintegrasi 69. Lambatnya Respon terhadap Isu atau Krisis 70. Turunnya Inovasi dan Solusi Kreatif 71. Pelayanan Publik Menjadi Tidak Terpadu 72. Gagalnya Implementasi Kebijakan Berskala Luas 73. Lemahnya Dukungan Sosial dan Politik terhadap Program 74. Terhambatnya Perkembangan Karakter Anak dan Remaja 75. Rendahnya Motivasi Belajar dan Berkarya 76. Meningkatnya Perilaku Menyimpang dan Kriminalitas 77. Sulitnya Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Sosial 78. Minimnya Dukungan terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan 79. Menurunnya Solidaritas dan Rasa Kebersamaan 80. Tingginya Stres Sosial dan Kesehatan Mental yang Terganggu 81. Kualitas Hidup Masyarakat Menurun 82. Tertutupnya Ruang untuk Partisipasi dan Aspirasi Publik

Tabel L2.30 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih Dibutuhkan Tujuan 4 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1.	Tidak diterapkannya nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat secara optimal	RPP: 4.1.1.1	1. Adanya Perwako Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal 2. Pencanaan Pembiasaan Sehari Berbudaya Minang Kabau Di Sekolah 3. Bimtek Pendidikan Inklusi Bagi Guru SD dan SMP	Pelaksanaan belum optimal	Penyusunan Perwako Rencana Aksi Daerah	Sekretaris Daerah	2025-2026

Tabel L2.31 Rencana Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 4 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat				
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029				
NO.	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1.	Penyusunan Perwako Rencana Aksi Daerah Integrasi nilai-nilai agama dan budaya	Dokumen Kajian	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas Pendidikan	Triwulan I – Tahun 2026	

Tabel L2.32 Rencana Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 4 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat			
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029			
NO.	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN	PENANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN	RENCANA WAKTU PEMANTAUAN	KET.
1.	Penyusunan Perwako Rencana Aksi Daerah Integrasi nilai-nilai agama dan budaya	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Sekretaris Daerah	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan

5. MANAJEMEN RISIKO TUJUAN DAN SASARAN MISI 5

Tabel L2.33 Penetapan Konteks Risiko Strategis Misi 5 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS		
MISI 5 MEWUJUDKAN SARANA PERKOTAAN YANG HUMANIS RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN		
Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
Periode yang dinilai	:	Tahun 2025 - 2029
Visi	:	Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, Dan Sentra Umkm Yang Kompetitif
Tujuan Strategis RPJMD	:	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan
Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis RPJMD	:	5.1.1 Meningkatkan Resiliensi Bencana dan kualitas lingkungan hidup
	:	5.1.2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	:	5.1.1.a Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
	:	5.1.2.a Indeks Infrastruktur
Urusan Pemerintah Daerah	:	1. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar: Perumahan dan Pemukiman 3. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar: Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 4. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Lingkungan Hidup 5. Urusan Pemerintah Wajib Non-Pelayanan Dasar: Perhubungan
Program Pembangunan	:	1.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 1.2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1.3 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 1.4 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1.5 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 1.6 Program Penataan Bangunan Gedung 1.7 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 1.8 Program Penyelenggaraan Jalan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

		1.9 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 1.10 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2.1 Program Pengembangan Perumahan 2.2 Program Kawasan Permukiman 2.3 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 2.4 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) 2.5 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 3.1 Program Penanggulangan Bencana 4.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 4.2 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4.4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 4.5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 4.6 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 4.7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 4.8 Program Pengelolaan Persampahan 5.1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
Perangkat Daerah Terkait	:	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Perhubungan

Tabel L2.34 Identifikasi Risiko Strategis Misi 5 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
Tujuan 5.1 Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup								
Sasaran 5.1.1 Meningkatnya Resiliensi Bencana dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Risiko Bencana (IRBI) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Menurunnya Resiliensi Bencana dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup	RPP: 5.1.1.1	Kepala Daerah	Alih Fungsi Lahan yang Tidak Terkendali	Internal	C	Meningkatkan Risiko Banjir dan Longsor	Kota Payakumbuh
								Memperluas Dampak Kekeringan dan Krisis Air	Kota Payakumbuh
								Meningkatkan Paparan Risiko Bencana di Wilayah Terbangun	Kota Payakumbuh
								Degradasi Ekosistem dan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Kota Payakumbuh
								Penurunan Kualitas Udara dan Suhu Mikroklimat Meningkat	Kota Payakumbuh
								Pencemaran Air dan Tanah	Kota Payakumbuh
								Berubahnya Fungsi Lahan secara Irreversibel	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Berkurangnya Ruang untuk Pengelolaan Sampah	Kota Payakumbuh
								Penumpukan Sampah di Wilayah Perkotaan	Kota Payakumbuh
								Pencemaran dari Sampah yang Tidak Terkelola	Kota Payakumbuh
								Meningkatkan Risiko Kesehatan Masyarakat	Kota Payakumbuh
					Minimnya Edukasi dan Kesadaran Lingkungan	Internal	C	Kerusakan Lingkungan Semakin Parah	Kota Payakumbuh
								Meningkatnya Risiko Bencana Alam	Kota Payakumbuh
								Ancaman terhadap Kesehatan Masyarakat	Kota Payakumbuh
								Menurunnya Kualitas Hidup di Perkotaan dan Pedesaan	Kota Payakumbuh
								Gagalnya Program Pelestarian Lingkungan	Kota Payakumbuh
								Generasi Muda Tidak Peduli terhadap Lingkungan	Kota Payakumbuh
								Pembangunan Berkelanjutan Terhambat	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Kontribusi terhadap Perubahan Iklim	Kota Payakumbuh
								Terbentuknya Kawasan Kumuh dan Tidak Tertata	Kota Payakumbuh
					Pola Pembangunan yang Tidak Berwawasan Lingkungan	Internal	C	Meningkatnya Risiko dan Frekuensi Bencana Alam	Kota Payakumbuh
								Berkurangnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Kota Payakumbuh
								Hilangnya Keanekaragaman Hayati	Kota Payakumbuh
								Kualitas Hidup dan Kesehatan Masyarakat Menurun	Kota Payakumbuh
								Kontribusi terhadap Perubahan Iklim	Kota Payakumbuh
								Terbentuknya Kawasan Permukiman Kumuh dan Tidak Layak Huni	Kota Payakumbuh
								Masalah Persampahan dan Limbah Meningkat	Kota Payakumbuh
								Biaya Pemulihan dan Rehabilitasi Lingkungan Tinggi	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Ketimpangan Sosial dan Konflik Agraria	Kota Payakumbuh
								Gagalnya Pembangunan Berkelanjutan	Kota Payakumbuh
					Kurangnya Investasi dalam Sistem Mitigasi Bencana	Internal	C	Meningkatnya Jumlah Korban Jiwa dan Kerugian Harta	Masyarakat
								Kerusakan Infrastruktur Publik dan Aset Ekonomi	Masyarakat
								Keterlambatan dan Ketidaksiapan dalam Tanggap Darurat	Masyarakat
								Biaya Penanganan Pascabencana Lebih Besar	Masyarakat
								Rendahnya Kapasitas dan Kesiapsiagaan Masyarakat	Masyarakat
								Pembangunan Tidak Berkelanjutan	Masyarakat
								Iklim Investasi Daerah Melemah	Masyarakat
								Turunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah	Masyarakat

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Kelompok Rentan Terdampak Lebih Parah	Masyarakat
								Ketahanan Wilayah terhadap Perubahan Iklim Melemah	Masyarakat
					Perubahan Iklim Global	Eksternal	UC	Peningkatan Suhu Bumi (Pemanasan Global)	Kota Payakumbuh
								Meningkatnya Frekuensi dan Intensitas Bencana Alam	Kota Payakumbuh
								Penurunan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kota Payakumbuh
								Krisis Air Bersih	Kota Payakumbuh
								Meningkatnya Risiko Kesehatan Masyarakat	Kota Payakumbuh
								Hilangnya Keanekaragaman Hayati	Kota Payakumbuh
								Migrasi dan Konflik Sosial	Kota Payakumbuh
								Kerugian Ekonomi yang Signifikan	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Peningkatan Beban Pemerintah dan Penurunan Ketahanan Daerah	Kota Payakumbuh
					Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan	Internal	C	Kerusakan Lingkungan Semakin Meluas	Kota Payakumbuh
								Peningkatan Pencemaran	Kota Payakumbuh
								Meningkatnya Risiko Bencana Lingkungan	Kota Payakumbuh
								Kesenjangan Sosial dan Ketidakadilan Lingkungan	Kota Payakumbuh
								Merusak Iklim Investasi Berkelanjutan	Kota Payakumbuh
								Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Aparat dan Pemerintah	PD
								Hilangnya Keanekaragaman Hayati	Kota Payakumbuh
								Gagalnya Target-target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Terjadinya Siklus Kerusakan dan Impunitas	Kota Payakumbuh
								Melemahkan Efektivitas Kebijakan dan Program Lingkungan	Kota Payakumbuh
					Kuranginya Kolaborasi Antar-Lembaga	Eksternal	C	Koordinasi tanggap darurat lambat dan tidak terorganisir	PD
								Data dan informasi risiko bencana tidak terintegrasi	PD
								Simulasi dan edukasi kebencanaan tidak merata	PD
								Simulasi dan edukasi kebencanaan tidak merata	PD
								Penegakan hukum lingkungan lemah	PD
								Pengawasan kawasan lindung atau rawan bencana ekologis tidak berjalan efektif	PD
								Sistem pengelolaan sampah tidak terpadu dari hulu ke hilir	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Infrastruktur pengolahan sampah mandek	PD
								Partisipasi masyarakat rendah	PD
					Keterbatasan Anggaran dan Kapasitas Daerah	Internal	C	Tidak tersedianya sistem peringatan dini (early warning system)	PD
								Kurangnya infrastruktur mitigasi bencana	PD
								Minimnya edukasi dan simulasi kebencanaan	PD
								Respon darurat yang lambat dan tidak terkoordinasi	PD
								Gagalnya program konservasi dan rehabilitasi lingkungan	PD
								Tidak efektifnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan	PD
								Tidak optimalnya integrasi isu lingkungan dalam perencanaan pembangunan	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Minim inovasi dan teknologi hijau	PD
								Terbatasnya armada dan fasilitas pengangkut sampah	PD
								TPA penuh dan tidak memenuhi standar sanitasi	PD
								Tidak tersedianya program pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, recycle)	PD
								Rendahnya edukasi dan partisipasi masyarakat	PD
Sasaran 5.1.2 Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak efektif dan tidak memenuhi standar	RPP: 5.1.2.1	Kepala Daerah	Perencanaan yang Lemah dan Tidak Berbasis Data	Internal	C	Pembangunan Tidak Tepat Sasaran	PD
								Rendahnya Efektivitas dan Efisiensi Anggaran	PD
								Program Mudah Gagal atau Mangkrak	PD
								Tidak Tercapainya Target Kinerja Daerah (Renstra/RPJMD)	PD
								Gagal Mengantisipasi Risiko Bencana dan Lingkungan	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Timbulnya Ketimpangan Antarwilayah	PD
								Rendahnya Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat	PD
								Program Sulit Diintegrasikan Antar-Sektor	PD
								Infrastruktur Cepat Rusak dan Tidak Tahan Lama	PD
								Tidak Berkelanjutan dan Tidak Ramah Lingkungan	PD
					Ketimpangan Alokasi Anggaran	Internal	C	Pembangunan Tidak Merata antar Wilayah	PD
								Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Semakin Melebar	PD
								Infrastruktur Dasar Tidak Tersedia atau Tidak Layak	PD
								Layanan Publik Berkualitas Rendah	PD
								Menurunnya Kinerja Daerah Tertentu	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Meningkatnya Potensi Konflik Sosial	PD
								Isu Lingkungan dan Bencana Diabaikan	PD
								Minimnya Program Pemberdayaan Masyarakat	PD
								Program Pusat Tidak Relevan di Daerah	PD
								Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah	PD
					Rendahnya Kapasitas SDM Teknis dan Perencana Daerah	Internal	C	Perencanaan Pembangunan Tidak Akurat dan Tidak Berbasis Data	PD
								Infrastruktur Dibangun Tanpa Standar Teknis yang Memadai	PD
								Rendahnya Efisiensi dan Efektivitas Anggaran	PD
								Sering Terjadi Keterlambatan atau Kegagalan Proyek	PD
								Gagal Menyusun Dokumen Perencanaan	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Berkualitas (RKPD, Renstra, RPJMD)	
								Minimnya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi	PD
								Lemahnya Monitoring dan Evaluasi Program	PD
								Tidak Mampu Menyusun Proposal Pendanaan Eksternal (DAK, Hibah, CSR)	PD
								Meningkatnya Ketergantungan kepada Konsultan Eksternal	PD
								Koordinasi Antar-Instansi Lemah	PD
					Minimnya Pengawasan dan Evaluasi Proyek	Internal	C	Kualitas Proyek Rendah dan Tidak Sesuai Spesifikasi	PD
								Proyek Sering Terlambat atau Tidak Selesai Tepat Waktu	PD
								Potensi Pemborosan dan Penyimpangan Anggaran Tinggi	PD
								Gagal Mencapai Tujuan dan Manfaat Proyek	PD

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Tingginya Risiko Penyimpangan dan Korupsi	PD
								Tidak Ada Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement)	PD
								Rendahnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	PD
								Inefisiensi Anggaran	PD
								Tidak Terjaminnya Keamanan dan Keselamatan Publik	PD
								Tumpang Tindih Program dan Duplikasi Proyek	PD
								Tidak Tersedianya Data dan Bukti untuk Pengambilan Keputusan	PD
					Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Eksternal	C	Infrastruktur Dibangun Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis	Kota Payakumbuh
								Penunjukan Kontraktor karena Nepotisme, Bukan Kompetensi	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Pembangunan Tidak Merata karena Motif Politik dan Koneksi	Kota Payakumbuh
								Proyek Mangkrak karena Dana Bocor di Tengah Jalan	Kota Payakumbuh
								Tidak Ada Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan	Kota Payakumbuh
								Prioritas Pembangunan Ditentukan oleh Kepentingan Pribadi/Politik	Kota Payakumbuh
								Menurunnya Efisiensi dan Daya Guna Infrastruktur	Kota Payakumbuh
								Tidak Ada Pemeliharaan Berkelanjutan	Kota Payakumbuh
								Citra Pemerintah Daerah Tercoreng	Kota Payakumbuh
								Target Pembangunan Nasional dan Daerah Tidak Tercapai	Kota Payakumbuh
					Kurangnya Partisipasi	Eksternal	C	Infrastruktur Tidak Sesuai Kebutuhan Nyata	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					Masyarakat dan Stakeholder			Rendahnya Kualitas dan Keberlanjutan Proyek	Kota Payakumbuh
								Ketimpangan dan Ketidakadilan Pembangunan Antarwilayah	Kota Payakumbuh
								Minimnya Rasa Kepemilikan (Sense of Belonging)	Kota Payakumbuh
								Tingginya Potensi Penolakan Proyek	Kota Payakumbuh
								Tidak Adanya Masukan untuk Perbaikan atau Inovasi	Kota Payakumbuh
								Pemerintah Daerah Kehilangan Legitimasi	Kota Payakumbuh
								Lemahnya Kolaborasi dan Dukungan Antar-Pihak	Kota Payakumbuh
								Evaluasi dan Pengawasan Kurang Akurat	Kota Payakumbuh
								Infrastruktur Tidak Memenuhi Standar Sosial dan Budaya Lokal	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					Ketergantungan Tinggi pada Pemerintah Pusat	Internal	UC	Pembangunan Tidak Merata antar Daerah	Masyarakat
								Terhambatnya Inisiatif dan Inovasi Daerah	Masyarakat
								Tidak Sesuai dengan Proyek dengan Kebutuhan Lokal	Masyarakat
								Rendahnya Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Daerah	Masyarakat
								Lemahnya Kapasitas dan Kemandirian Pemerintah Daerah	Masyarakat
								Proses Perencanaan Terpusat dan Kurang Partisipatif	Masyarakat
								Lambatnya Respons terhadap Kebutuhan Mendesak	Masyarakat
								Banyak Proyek Infrastruktur Tidak Terpelihara	Masyarakat
								Evaluasi dan Pengawasan Terbagi, Kurang Efektif	Masyarakat
								Melemahkan Semangat Otonomi Daerah	Masyarakat

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					Tidak Tersedianya Standar Pelayanan Infrastruktur yang Jelas	Internal	C	Kualitas Infrastruktur Tidak Konsisten	Masyarakat
								Tidak Efektif dalam Menjawab Kebutuhan Masyarakat	Masyarakat
								Inefisiensi Penggunaan Anggaran	Masyarakat
								Ketimpangan Pelayanan Antarwilayah	Masyarakat
								Banyak Infrastruktur Cepat Rusak dan Tidak Tahan Lama	Masyarakat
								Sulitnya Pengawasan dan Evaluasi	Masyarakat
								Rendahnya Akuntabilitas Pelaksana Proyek	Masyarakat
								Masyarakat Bingung dan Tidak Dapat Mengontrol	Masyarakat
								Pembangunan Infrastruktur Bersifat Asal Jadi	Masyarakat
								Sulitnya Replikasi dan Perbaikan	Masyarakat

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
					Pola Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan	Internal	C	Infrastruktur Cepat Rusak dan Tidak Tahan Lama	Kota Payakumbuh
								Efektivitas Penggunaan Anggaran Rendah	Kota Payakumbuh
								Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah	Kota Payakumbuh
								Infrastruktur Tidak Sesuai Kebutuhan Masa Depan	Kota Payakumbuh
								Merusak Lingkungan dan Ekosistem	Kota Payakumbuh
								Proyek Gagal atau Tidak Digunakan Masyarakat	Kota Payakumbuh
								Tidak Adanya Standarisasi dan Perencanaan Jangka Panjang	Kota Payakumbuh
								Menambah Risiko Bencana dan Kerentanan Sosial	Kota Payakumbuh
								Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Tinggi	Kota Payakumbuh
								Gagal Mendukung Pencapaian Tujuan	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Pembangunan Jangka Panjang	
					Konflik Kepentingan dan Politik Anggaran	Eksternal	UC	Pembangunan Tidak Berdasarkan Kebutuhan Nyata	Kota Payakumbuh
								Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah	Kota Payakumbuh
								Pemborosan dan Duplikasi Proyek	Kota Payakumbuh
								Kualitas Infrastruktur Rendah	Kota Payakumbuh
								Proses Penganggaran Lambat dan Tidak Fokus	Kota Payakumbuh
								Infrastruktur Mangkrak atau Tidak Tuntas	Kota Payakumbuh
								Fragmentasi Program dan Lemahnya Integrasi Pembangunan	Kota Payakumbuh
								Sulit Dievaluasi Secara Objektif	Kota Payakumbuh
								Meningkatkan Risiko KKN	Kota Payakumbuh

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RISIKO			SEBAB		C/U C	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RISIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
								Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah	Kota Payakumbuh

Tabel L2.35 Analisis Risiko Strategis Tujuan 5 Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat			
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029			
Tujuan Strategis RPJMD	:	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan			
NO.	RISIKO TERIDENTIFIKASI	KODE RISIKO	ANALISIS RISIKO		
			SKALA DAMPAK	SKALA KEMUNGKINAN	SKALA RISIKO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)x(5)
1.	Menurunnya Resiliensi Bencana dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup	RPP: 5.1.1.1	5	4	20
2	Pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak efektif dan tidak memenuhi standar	RPP: 5.1.2.1	5	4	20

Tabel L2.36 Matriks Hasil Analisis Risiko Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

MATRIKS ANALISIS RISIKO			DAMPAK/KONSEKUENSI				
			TIDAK SIGNIFIKAN	KECIL	SEDANG	BESAR	SIGNIFIKAN
			1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO	HAMPIR PASTI	5					
	KEMUNGKINAN BESAR	4					RPP: 5.1.1.1 RPP: 5.1.2.1
	MUNGKIN	3					
	KEMUNGKINAN KECIL	2					
	SANGAT JARANG	1					
KETERANGAN			SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG/ MEDIUM	TINGGI	SANGAT TINGGI

Tabel L2.37 Daftar Risiko Prioritas Tujuan 5 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	SKALA RISIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK
1.	Menurunnya Resiliensi Bencana dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup	RPP: 5.1.1.1	20	Kepala Daerah	1. Alih Fungsi Lahan yang Tidak Terkendali 2. Minimnya Edukasi dan Kesadaran Lingkungan 3. Pola Pembangunan yang Tidak Berwawasan Lingkungan 4. Kurangnya Investasi dalam Sistem Mitigasi Bencana 5. Perubahan Iklim Global 6. Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan 7. Kurangnya Kolaborasi Antar-Lembaga 8. Keterbatasan Anggaran dan Kapasitas Daerah	1. Meningkatkan Risiko Banjir dan Longsor 2. Memperluas Dampak Kekeringan dan Krisis Air 3. Meningkatkan Paparan Risiko Bencana di Wilayah Terbangun 4. Degradasi Ekosistem dan Kehilangan Keanekaragaman Hayati 5. Penurunan Kualitas Udara dan Suhu Mikroklimat Meningkat 6. Pencemaran Air dan Tanah 7. Berubahnya Fungsi Lahan secara Irreversibel 8. Berkurangnya Ruang untuk Pengelolaan Sampah 9. Penumpukan Sampah di Wilayah Perkotaan 10. Pencemaran dari Sampah yang Tidak Terkelola 11. Meningkatkan Risiko Kesehatan Masyarakat 12. Kerusakan Lingkungan Semakin Parah 13. Meningkatnya Risiko Bencana Alam 14. Ancaman terhadap Kesehatan Masyarakat 15. Menurunnya Kualitas Hidup di Perkotaan dan Pedesaan 16. Gagalnya Program Pelestarian Lingkungan 17. Generasi Muda Tidak Peduli terhadap Lingkungan 18. Pembangunan Berkelanjutan Terhambat 19. Kontribusi terhadap Perubahan Iklim 20. Terbentuknya Kawasan Kumuh dan Tidak Tertata 21. Meningkatnya Risiko dan Frekuensi Bencana Alam 22. Berkurangnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 23. Hilangnya Keanekaragaman Hayati

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	SKALA RISIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK
						24. Kualitas Hidup dan Kesehatan Masyarakat Menurun 25. Kontribusi terhadap Perubahan Iklim 26. Terbentuknya Kawasan Permukiman Kumuh dan Tidak Layak Huni 27. Masalah Persampahan dan Limbah Meningkat 28. Biaya Pemulihan dan Rehabilitasi Lingkungan Tinggi 29. Ketimpangan Sosial dan Konflik Agraria 30. Gagalnya Pembangunan Berkelanjutan 31. Meningkatnya Jumlah Korban Jiwa dan Kerugian Harta 32. Kerusakan Infrastruktur Publik dan Aset Ekonomi 33. Keterlambatan dan Ketidaksiapan dalam Tanggap Darurat 34. Biaya Penanganan Pascabencana Lebih Besar 35. Rendahnya Kapasitas dan Kesiapsiagaan Masyarakat 36. Pembangunan Tidak Berkelanjutan 37. Iklim Investasi Daerah Melemah 38. Turunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah 39. Kelompok Rentan Terdampak Lebih Parah 40. Ketahanan Wilayah terhadap Perubahan Iklim Melemah 41. Peningkatan Suhu Bumi (Pemanasan Global) 42. Meningkatnya Frekuensi dan Intensitas Bencana Alam 43. Penurunan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan 44. Krisis Air Bersih 45. Meningkatnya Risiko Kesehatan Masyarakat 46. Hilangnya Keanekaragaman Hayati 47. Migrasi dan Konflik Sosial 48. Kerugian Ekonomi yang Signifikan 49. Peningkatan Beban Pemerintah dan Penurunan Ketahanan Daerah 50. Kerusakan Lingkungan Semakin Meluas 51. Peningkatan Pencemaran

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	SKALA RISIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK
						52. Meningkatnya Risiko Bencana Lingkungan 53. Kesenjangan Sosial dan Ketidakadilan Lingkungan 54. Merusak Iklim Investasi Berkelanjutan 55. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Aparat dan Pemerintah 56. Hilangnya Keanekaragaman Hayati 57. Gagalnya Target-target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 58. Terjadinya Siklus Kerusakan dan Impunitas 59. Melemahkan Efektivitas Kebijakan dan Program Lingkungan 60. Koordinasi tanggap darurat lambat dan tidak terorganisir 61. Data dan informasi risiko bencana tidak terintegrasi 62. Simulasi dan edukasi kebencanaan tidak merata 63. Simulasi dan edukasi kebencanaan tidak merata 64. Penegakan hukum lingkungan lemah 65. Pengawasan kawasan lindung atau rawan bencana ekologis tidak berjalan efektif 66. Sistem pengelolaan sampah tidak terpadu dari hulu ke hilir 67. Infrastruktur pengolahan sampah mandek 68. Partisipasi masyarakat rendah 69. Tidak tersedianya sistem peringatan dini (early warning system) 70. Kurangnya infrastruktur mitigasi bencana 71. Minimnya edukasi dan simulasi kebencanaan 72. Respon darurat yang lambat dan tidak terkoordinasi 73. Gagalnya program konservasi dan rehabilitasi lingkungan 74. Tidak efektifnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan 75. Tidak optimalnya integrasi isu lingkungan dalam perencanaan pembangunan 76. Minim inovasi dan teknologi hijau

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	SKALA RISIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK
						77. Terbatasnya armada dan fasilitas pengangkut sampah 78. TPA penuh dan tidak memenuhi standar sanitasi 79. Tidak tersedianya program pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, recycle) 80. Rendahnya edukasi dan partisipasi masyarakat
2.	Pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak efektif dan tidak memenuhi standar	RPP: 5.1.2.1	20	Kepala Daerah	1. Perencanaan yang Lemah dan Tidak Berbasis Data 2. Ketimpangan Alokasi Anggaran 3. Rendahnya Kapasitas SDM Teknis dan Perencana Daerah 4. Minimnya Pengawasan dan Evaluasi Proyek 5. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 6. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder 7. Ketergantungan Tinggi pada Pemerintah Pusat 8. Tidak Tersedianya Standar Pelayanan Infrastruktur yang Jelas 9. Pola Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan 10. Konflik Kepentingan dan Politik Anggaran	1. Pembangunan Tidak Tepat Sasaran 2. Rendahnya Efektivitas dan Efisiensi Anggaran 3. Program Mudah Gagal atau Mangkrak 4. Tidak Tercapainya Target Kinerja Daerah (Renstra/RPJMD) 5. Gagal Mengantisipasi Risiko Bencana dan Lingkungan 6. Timbulnya Ketimpangan Antarwilayah 7. Rendahnya Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat 8. Program Sulit Diintegrasikan Antar-Sektor 9. Infrastruktur Cepat Rusak dan Tidak Tahan Lama 10. Tidak Berkelanjutan dan Tidak Ramah Lingkungan 11. Pembangunan Tidak Merata antar Wilayah 12. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Semakin Melebar 13. Infrastruktur Dasar Tidak Tersedia atau Tidak Layak 14. Layanan Publik Berkualitas Rendah 15. Menurunnya Kinerja Daerah Tertentu 16. Meningkatnya Potensi Konflik Sosial 17. Isu Lingkungan dan Bencana Diabaikan 18. Minimnya Program Pemberdayaan Masyarakat 19. Program Pusat Tidak Relevan di Daerah 20. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah 21. Perencanaan Pembangunan Tidak Akurat dan Tidak Berbasis Data 22. Infrastruktur Dibangun Tanpa Standar Teknis yang Memadai 23. Rendahnya Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 24. Sering Terjadi Keterlambatan atau Kegagalan Proyek

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	SKALA RISIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK
						25. Gagal Menyusun Dokumen Perencanaan Berkualitas (RKPD, Renstra, RPJMD) 26. Minimnya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi 27. Lemahnya Monitoring dan Evaluasi Program 28. Tidak Mampu Menyusun Proposal Pendanaan Eksternal (DAK, Hibah, CSR) 29. Meningkatnya Ketergantungan kepada Konsultan Eksternal 30. Koordinasi Antar-Instansi Lemah 31. Kualitas Proyek Rendah dan Tidak Sesuai Spesifikasi 32. Proyek Sering Terlambat atau Tidak Selesai Tepat Waktu 33. Potensi Pemborosan dan Penyimpangan Anggaran Tinggi 34. Gagal Mencapai Tujuan dan Manfaat Proyek 35. Tingginya Risiko Penyimpangan dan Korupsi 36. Tidak Ada Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement) 37. Rendahnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah 38. Inefisiensi Anggaran 39. Tidak Terjaminnya Keamanan dan Keselamatan Publik 40. Tumpang Tindih Program dan Duplikasi Proyek 41. Tidak Tersedianya Data dan Bukti untuk Pengambilan Keputusan 42. Infrastruktur Dibangun Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis 43. Penunjukan Kontraktor karena Nepotisme, Bukan Kompetensi 44. Pembangunan Tidak Merata karena Motif Politik dan Koneksi 45. Proyek Mangkrak karena Dana Bocor di Tengah Jalan 46. Tidak Ada Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan 47. Prioritas Pembangunan Ditentukan oleh Kepentingan Pribadi/Politik 48. Menurunnya Efisiensi dan Daya Guna Infrastruktur 49. Tidak Ada Pemeliharaan Berkelanjutan

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	SKALA RISIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK
						50. Citra Pemerintah Daerah Tercoreng 51. Target Pembangunan Nasional dan Daerah Tidak Tercapai 52. Infrastruktur Tidak Sesuai Kebutuhan Nyata 53. Rendahnya Kualitas dan Keberlanjutan Proyek 54. Ketimpangan dan Ketidakadilan Pembangunan Antarwilayah 55. Minimnya Rasa Kepemilikan (Sense of Belonging) 56. Tingginya Potensi Penolakan Proyek 57. Tidak Adanya Masukan untuk Perbaikan atau Inovasi 58. Pemerintah Daerah Kehilangan Legitimasi 59. Lemahnya Kolaborasi dan Dukungan Antar-Pihak 60. Evaluasi dan Pengawasan Kurang Akurat 61. Infrastruktur Tidak Memenuhi Standar Sosial dan Budaya Lokal 62. Pembangunan Tidak Merata antar Daerah 63. Terhambatnya Inisiatif dan Inovasi Daerah 64. Tidak Sesuainya Proyek dengan Kebutuhan Lokal 65. Rendahnya Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Daerah 66. Lemahnya Kapasitas dan Kemandirian Pemerintah Daerah 67. Proses Perencanaan Terpusat dan Kurang Partisipatif 68. Lambatnya Respons terhadap Kebutuhan Mendesak 69. Banyak Proyek Infrastruktur Tidak Terpelihara 70. Evaluasi dan Pengawasan Terbagi, Kurang Efektif 71. Melemahkan Semangat Otonomi Daerah 72. Kualitas Infrastruktur Tidak Konsisten 73. Tidak Efektif dalam Menjawab Kebutuhan Masyarakat 74. Inefisiensi Penggunaan Anggaran 75. Ketimpangan Pelayanan Antarwilayah 76. Banyak Infrastruktur Cepat Rusak dan Tidak Tahan Lama

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	SKALA RISIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB	DAMPAK
						77. Sulitnya Pengawasan dan Evaluasi 78. Rendahnya Akuntabilitas Pelaksana Proyek 79. Masyarakat Bingung dan Tidak Dapat Mengontrol 80. Pembangunan Infrastruktur Bersifat Asal Jadi 81. Sulitnya Replikasi dan Perbaikan 82. Infrastruktur Cepat Rusak dan Tidak Tahan Lama 83. Efektivitas Penggunaan Anggaran Rendah 84. Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah 85. Infrastruktur Tidak Sesuai Kebutuhan Masa Depan 86. Merusak Lingkungan dan Ekosistem 87. Proyek Gagal atau Tidak Digunakan Masyarakat 88. Tidak Adanya Standarisasi dan Perencanaan Jangka Panjang 89. Menambah Risiko Bencana dan Kerentanan Sosial 90. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Tinggi 91. Gagal Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Jangka Panjang 92. Pembangunan Tidak Berdasarkan Kebutuhan Nyata 93. Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah 94. Pemborosan dan Duplikasi Proyek 95. Kualitas Infrastruktur Rendah 96. Proses Penganggaran Lambat dan Tidak Fokus 97. Infrastruktur Mangkrak atau Tidak Tuntas 98. Fragmentasi Program dan Lemahnya Integrasi Pembangunan 99. Sulit Dievaluasi Secara Objektif 100. Meningkatkan Risiko KKN 101. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Tabel L2.38 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih Dibutuhkan Tujuan 5 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat					
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029					

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1.	Menurunnya Resiliensi Bencana dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup	RPP: 5.1.1.1	1. Pembinaan Ke Sekolah Dalam Pengelolaan Sampah 2. Peningkatan Kapasitas Pengolahan Sampah Di TPS3R Koto Tangah Dan Mancang Labu 3. Peningkatan Kapasitas Rumah Magot	Belum Optimalnya pengelolaan Sampah	Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah secara komperhensif	Kepala Daerah	2025-2026

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			4. Proses Renovasi Bangunan Untuk Hangar TPST Dan Pengadaan Peralatan, Serta Penataan Kawasan TPST 5. Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Di TPS3R Koto Tengah 6. Kerjasama Dengan PT. Semen Padang Melalui Program Nabuang Sarok				
			5. Sosialisasi Dan Simulasi Mitigasi Bencana 6. Penanganan Bencana Banjir 7. Siaga Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan 8. Aksi Pengelolaan Risiko Bencana Berupa Penebangan Pohon Yang Sudah Tua Dan Lapuk	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Bencana	Penyusunan Perwako Penanggulangan bencana	Sekretaris Daerah	2025-2026
2.	Pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak efektif dan tidak memenuhi standar	RPP: 5.1.2.1	1. Kebijakan pengelolaan jalan: Ruas Jalan Dapat Dilewati Sepanjang Tahun, Dan Zero Pothole (Jalan Bebas Lubang). 2. Kebijakan pengembangan jalan: Sudah Terhubung Semua Pusat-Pusat Kegiatan Dan Pemenuhan Jalan Kota Yang Sesuai Standar Konstruksi. 3. Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Dan Peningkatan	Keterbatasan anggaran untuk infrastruktur	Meningkatan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dengan pusat, dan provinsi	Kepala Daerah	2025-2029

NO.	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	URAIAN PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	CELAH PENGENDALIAN	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			Kapasitas Jalan Dilakukan Dengan Sumber Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit 4. Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya 5. Peningkatan Kontinuitas Pelayanan Infrastruktur 24 Jam Per-Hari 6. Optimalisasi Sumber Air Baku				

Tabel L2.39 Rencana Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 5 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat				
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029				
NO.	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1.	Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah secara komperhensif	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah secara Komprehensif	Kepala Daerah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan I – Tahun 2026	
2.	Penyusunan Perwako Penanggulangan bencana	Pembentuk Surat Keputusan (SK) Wali Kota Payakumbuh tentang Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Sekretaris Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Triwulan I – Tahun 2026	
3.	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dengan pusat, dan provinsi	Proposal dan Kerja Sama Daerah	Kepala Daerah	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Triwulan I – Tahun 2026	Pemutakhiran dilanjutkan sampai 2029

Tabel L2.40 Rencana Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Tujuan 5 Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

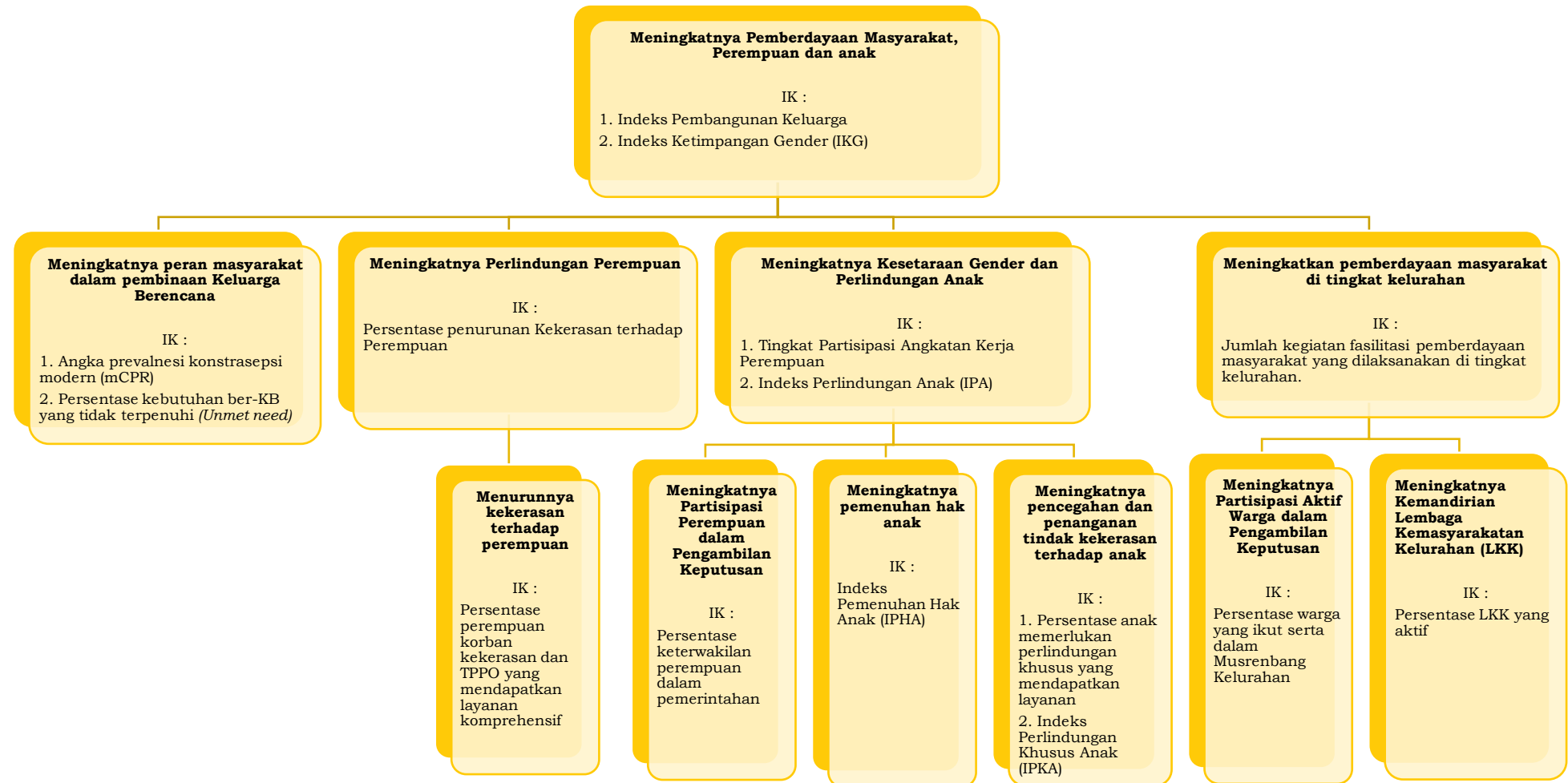
Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat			
Tahun Penilaian	:	Tahun 2025 - 2029			
NO.	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN	PENANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN	RENCANA WAKTU PEMANTAUAN	KET.
1.	Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah secara komperhensif	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Kepala Daerah	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
2.	Penyusunan Perwako Penanggulangan bencana	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Sekretaris Daerah	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
3.	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dengan pusat, dan provinsi	Risk Control Self-Assessment (RCSA)	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Triwulan II – Tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Tahunan

LAMPIRAN 3
POHON KINERJA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

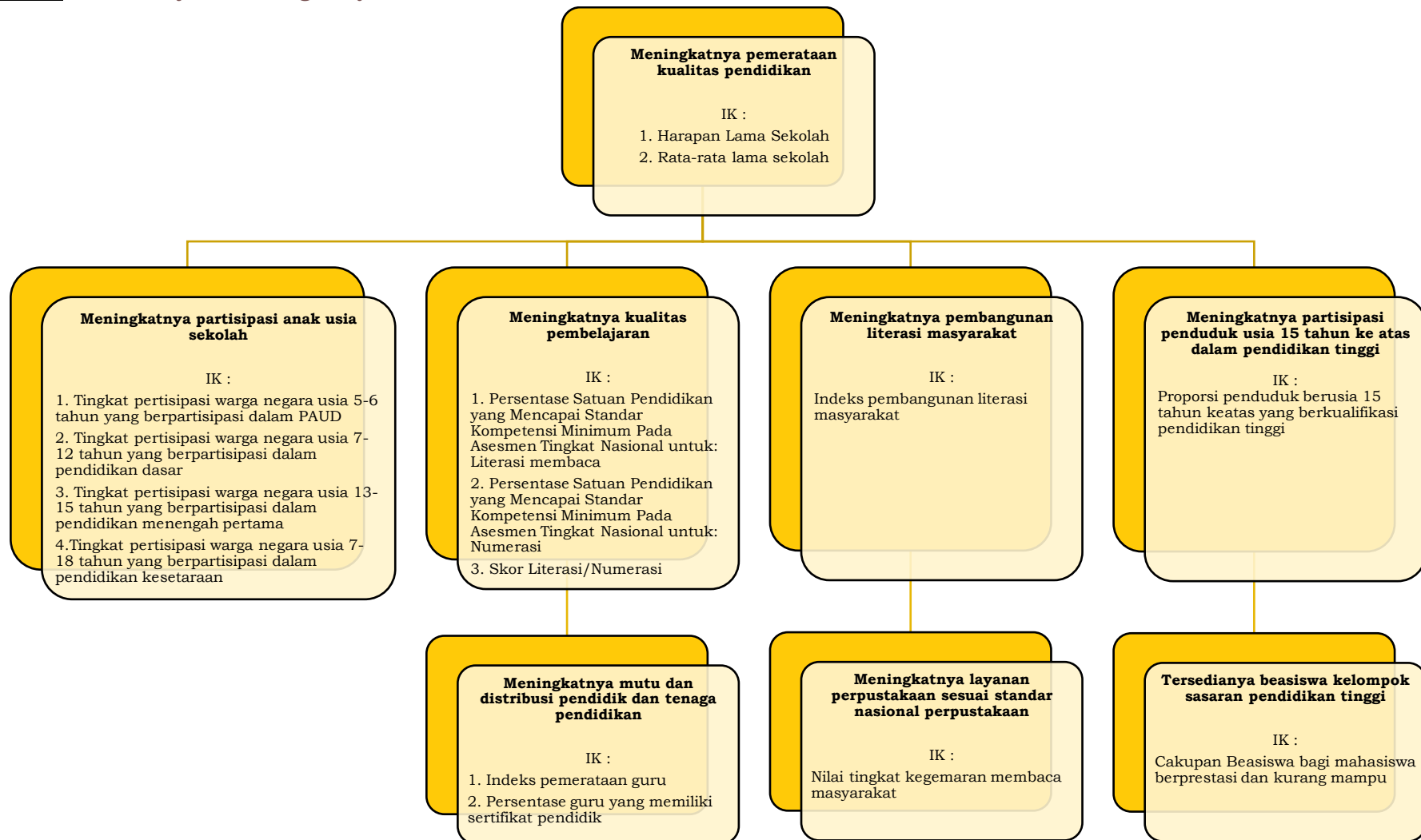
Bagan L3.1 Pohon Kinerja 1 **Menurunkan Tingkat Kemiskinan**



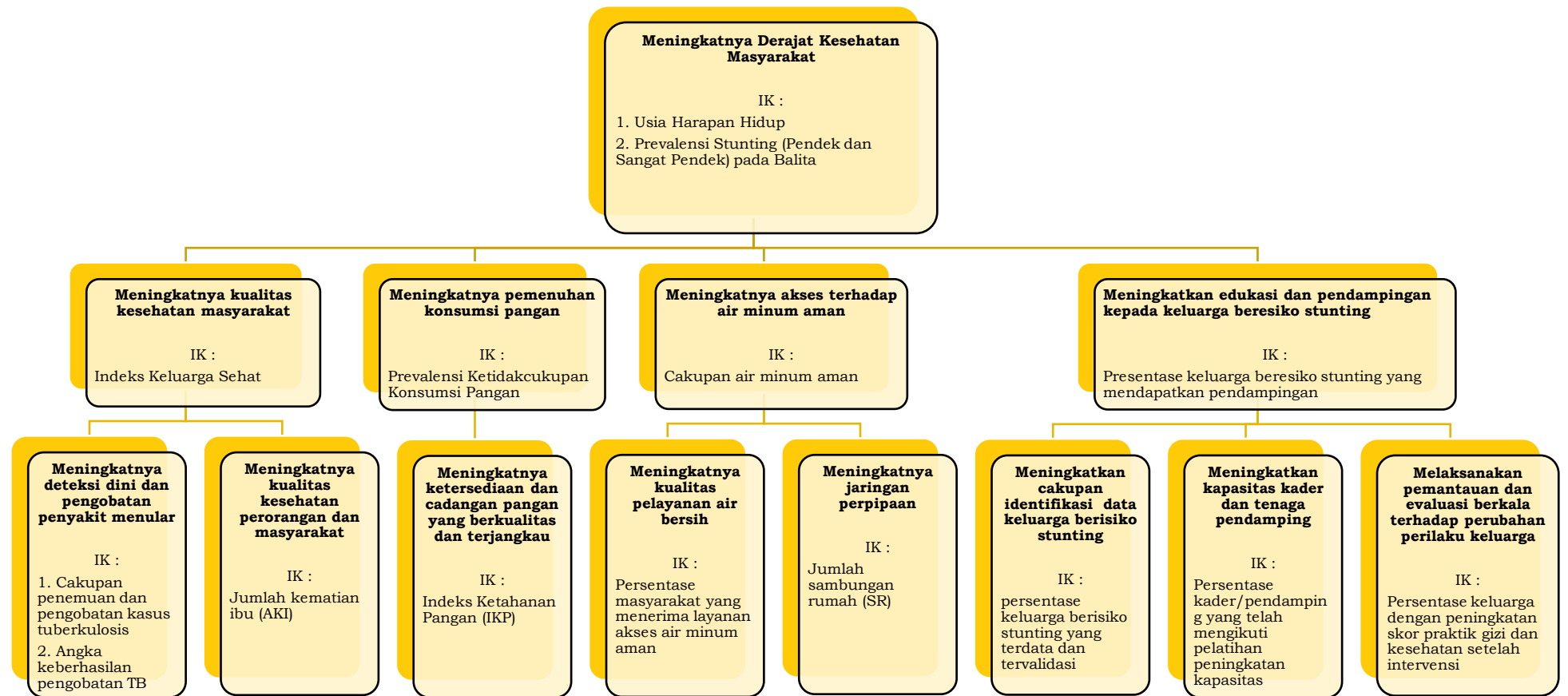
Bagan L3.2 Pohon Kinerja 1.1 **Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan anak**



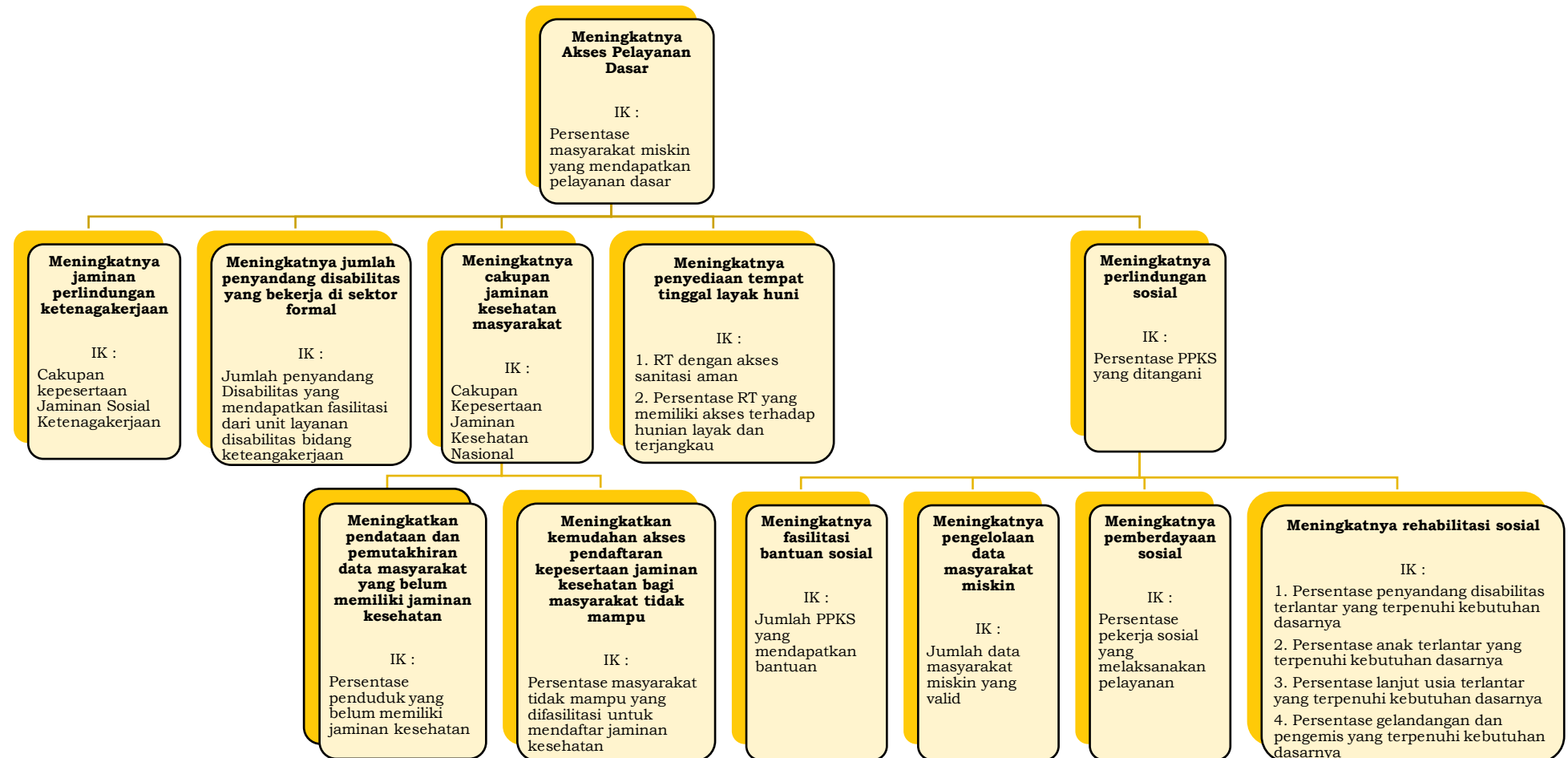
Bagan L3.3 Pohon Kinerja 1.2 **Meningkatnya Pemerataan Kualitas Pendidikan**



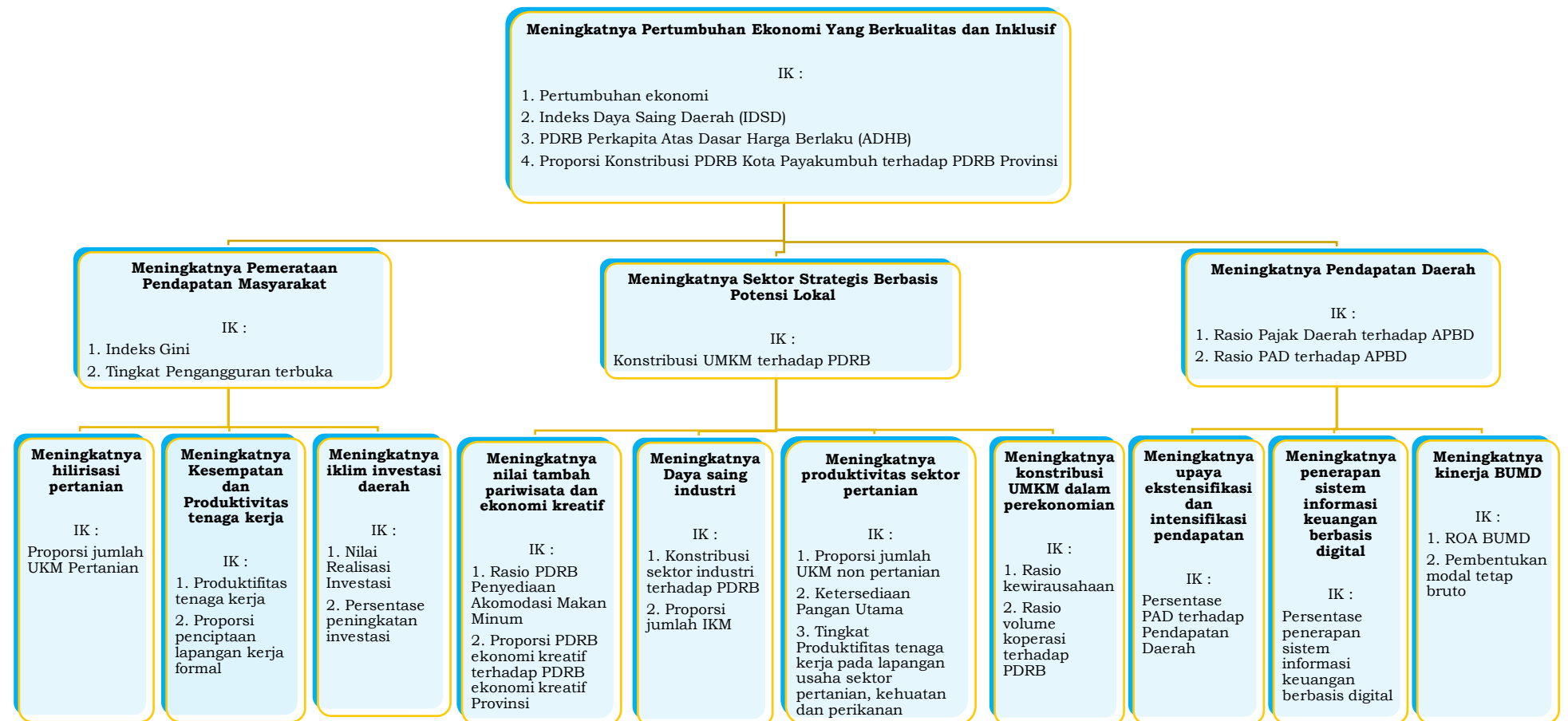
Bagan L3.4 Pohon Kinerja 1.3 **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**



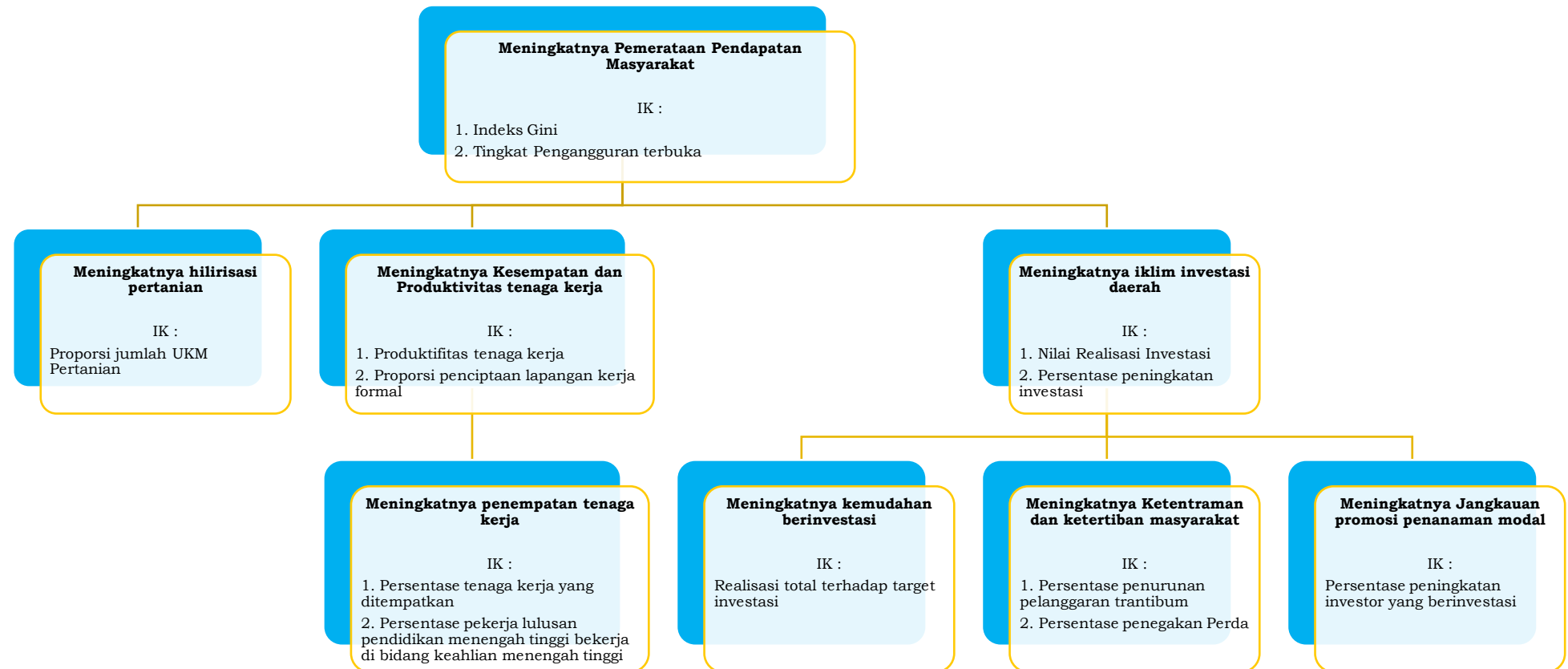
Bagan L3.5 Pohon Kinerja 1.4 **Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar**



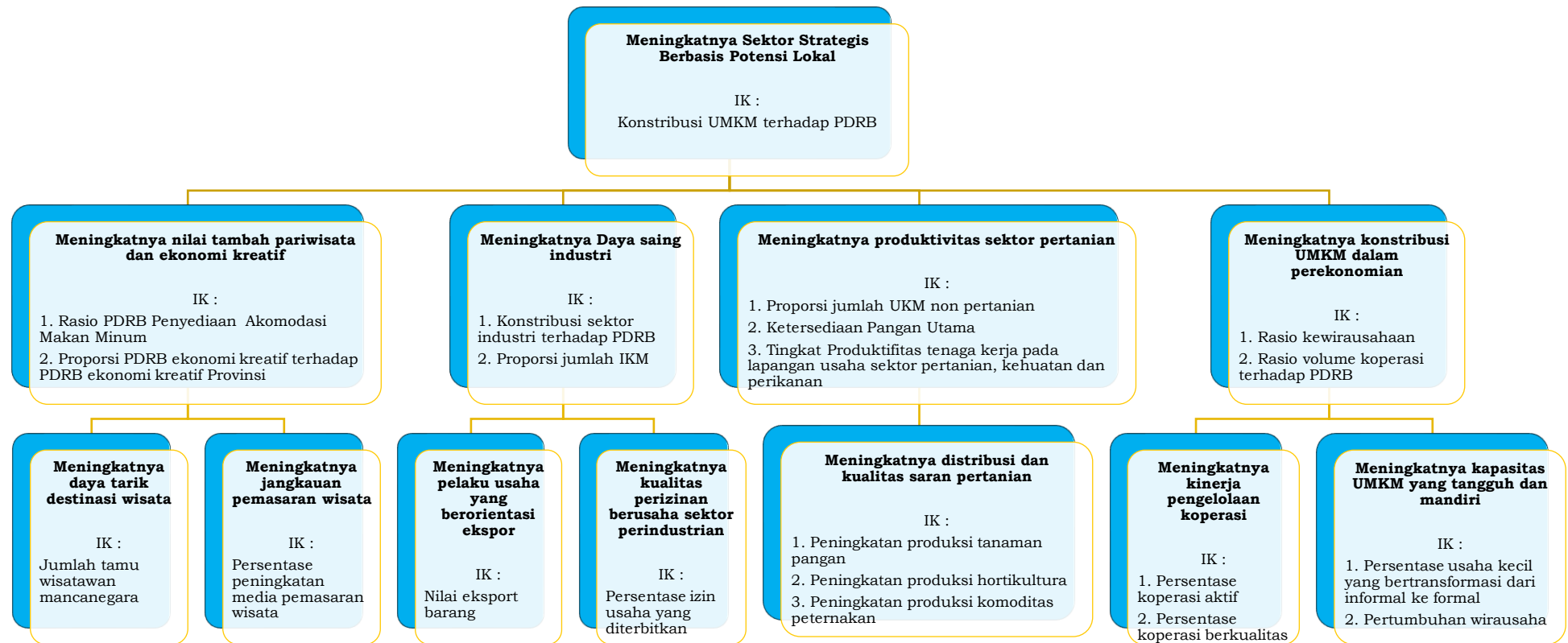
Bagan L3.6 Pohon Kinerja 2 **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif**



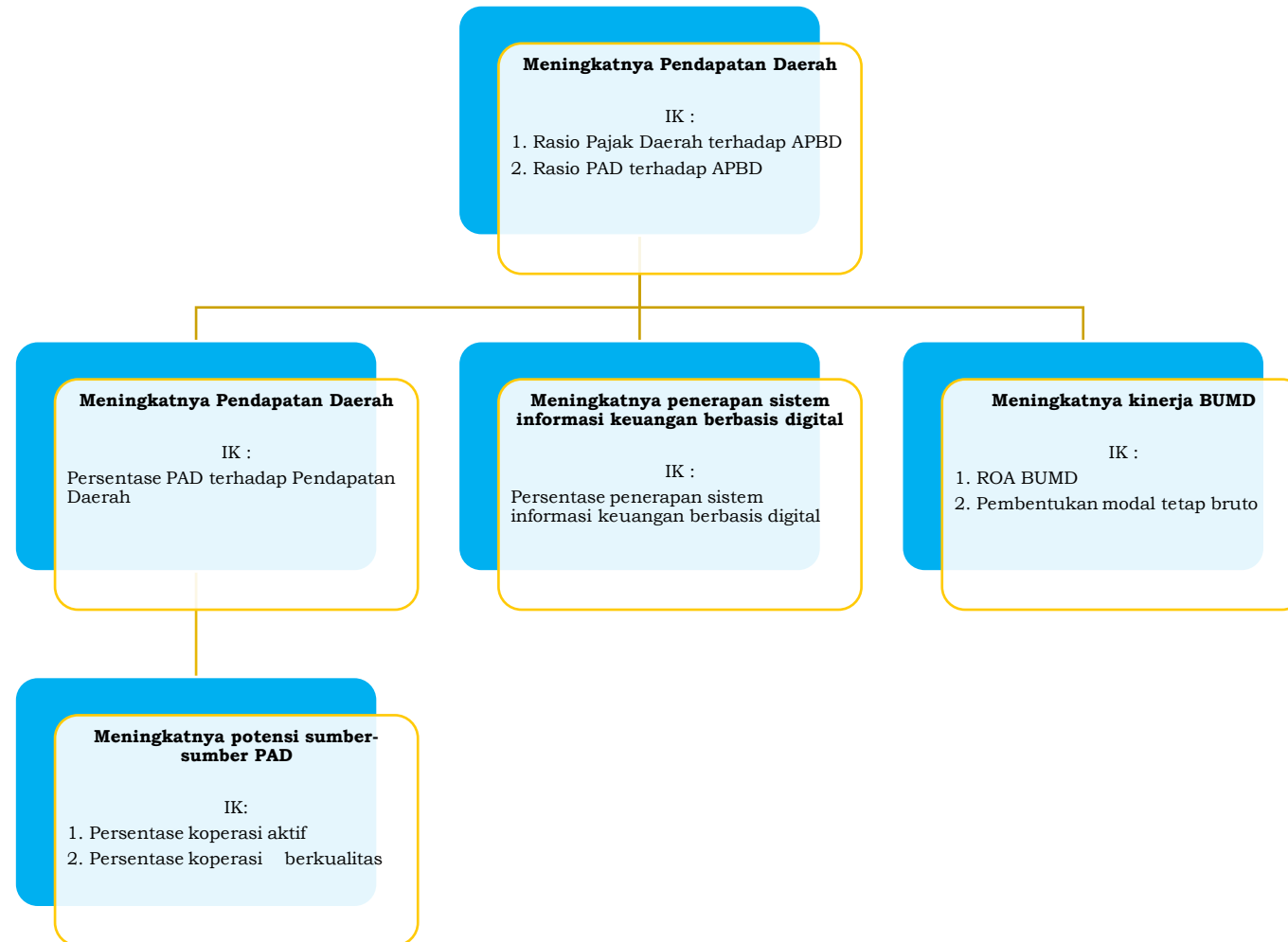
Bagan L3.7 Pohon Kinerja 2.1 **Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat**



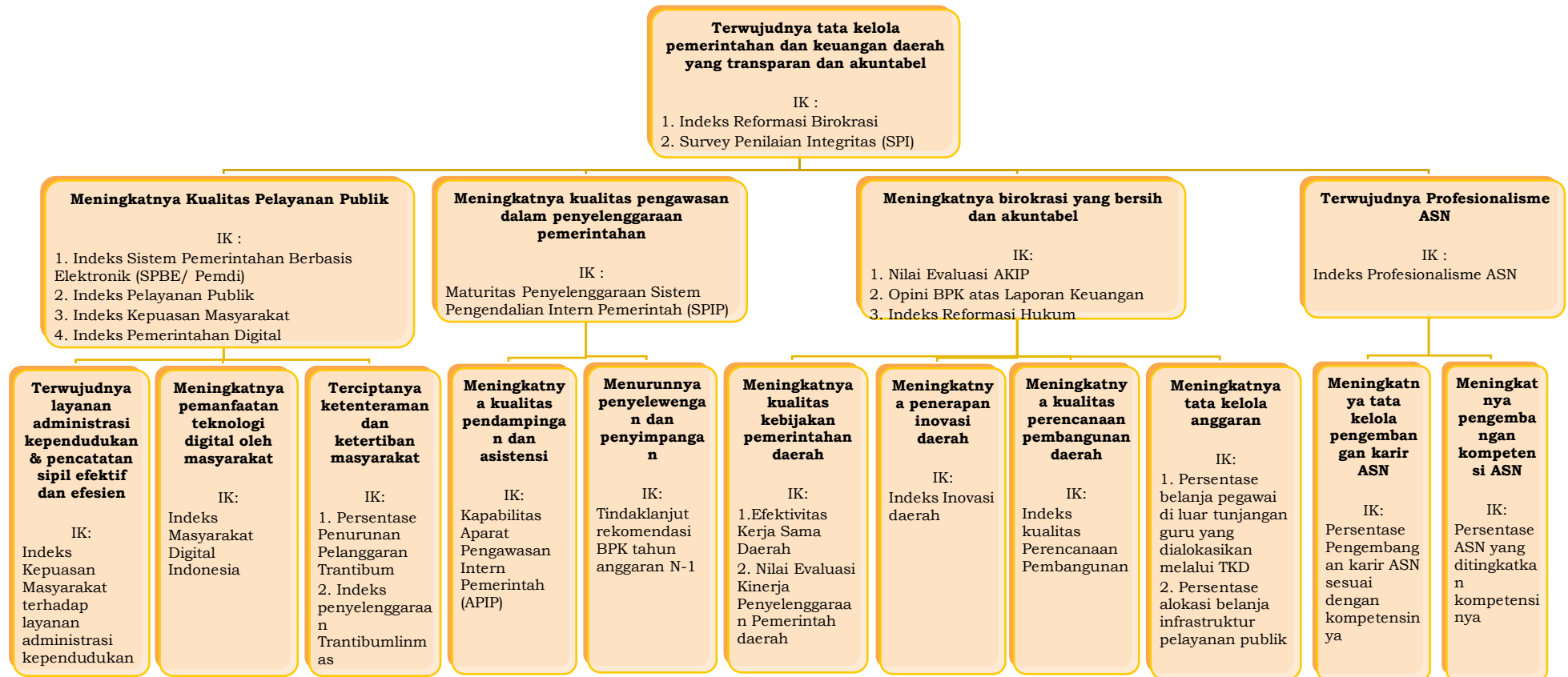
Bagan L3.8 Pohon Kinerja 2.2 **Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Sektor Strategis Berbasis Potensi Lokal**



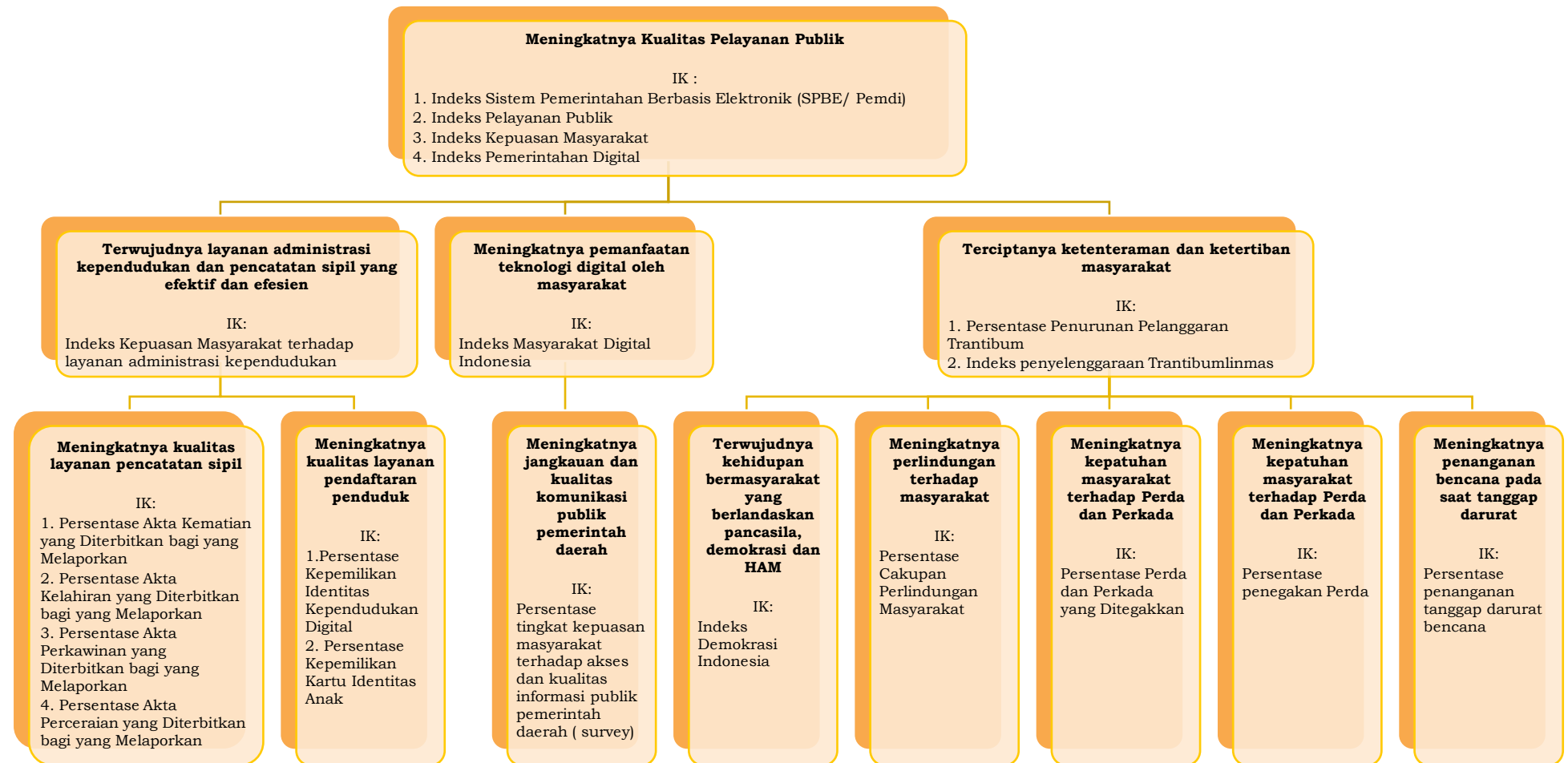
Bagan L3.9 Pohon Kinerja 2.3 **Meningkatnya Pendapatan Daerah**



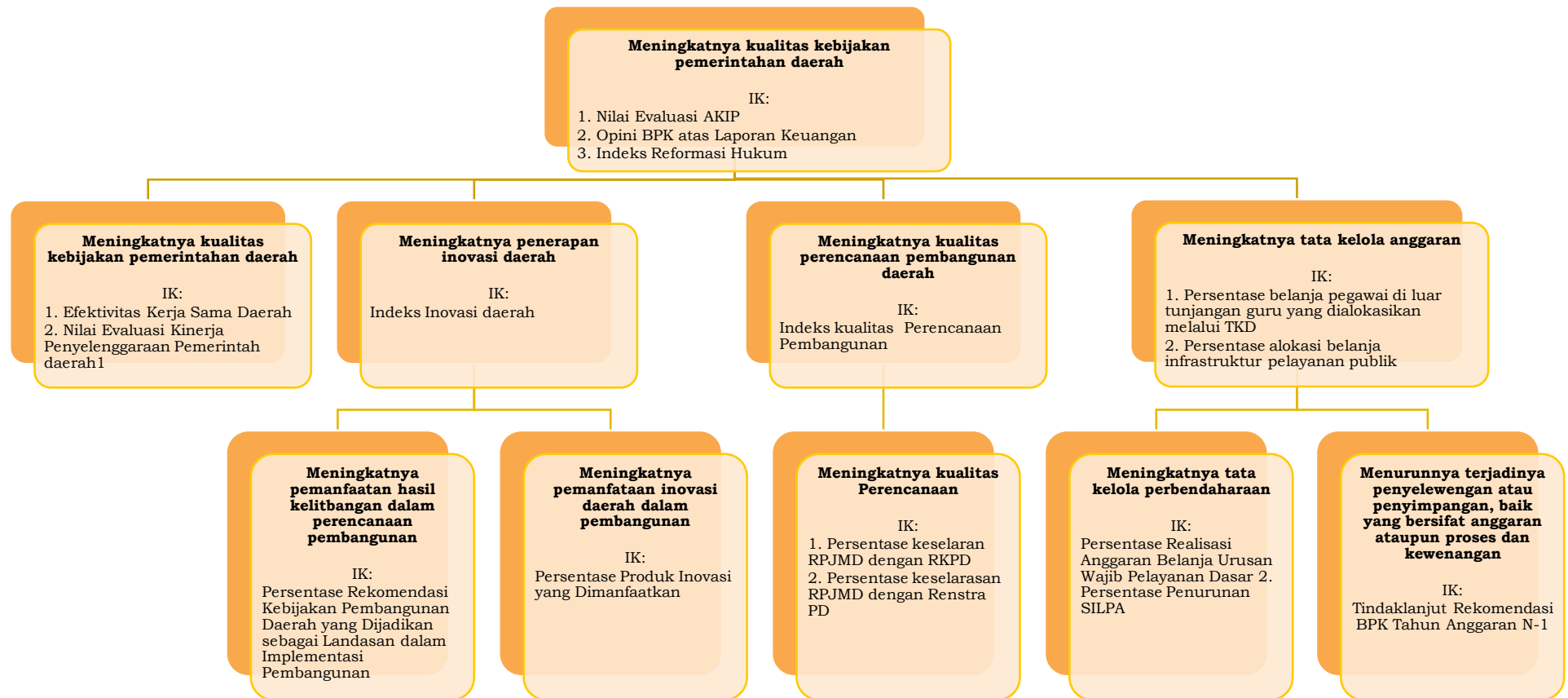
Bagan L3.10 Pohon Kinerja 3 **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel**



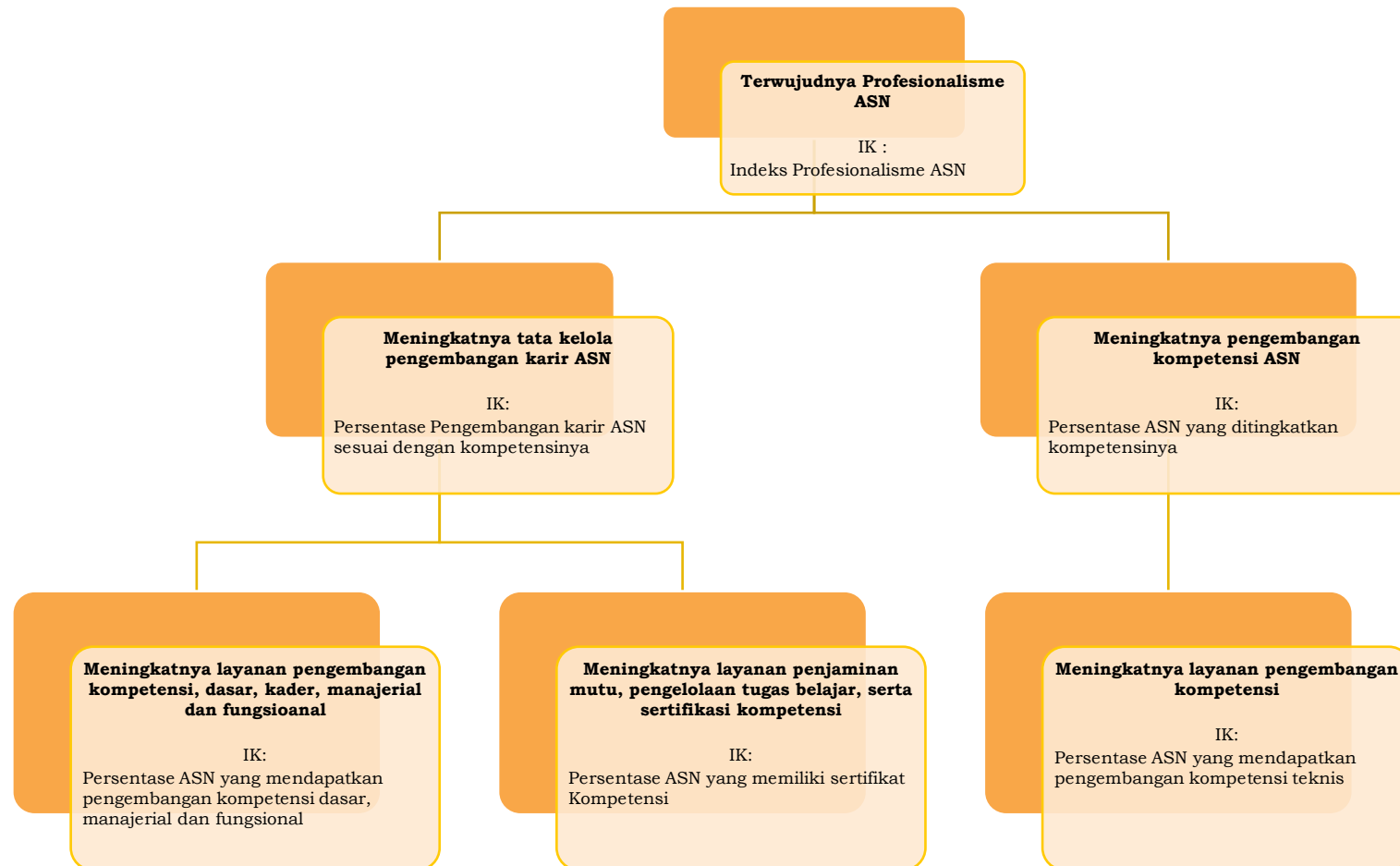
Bagan L3.11 Pohon Kinerja 3.1 **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**



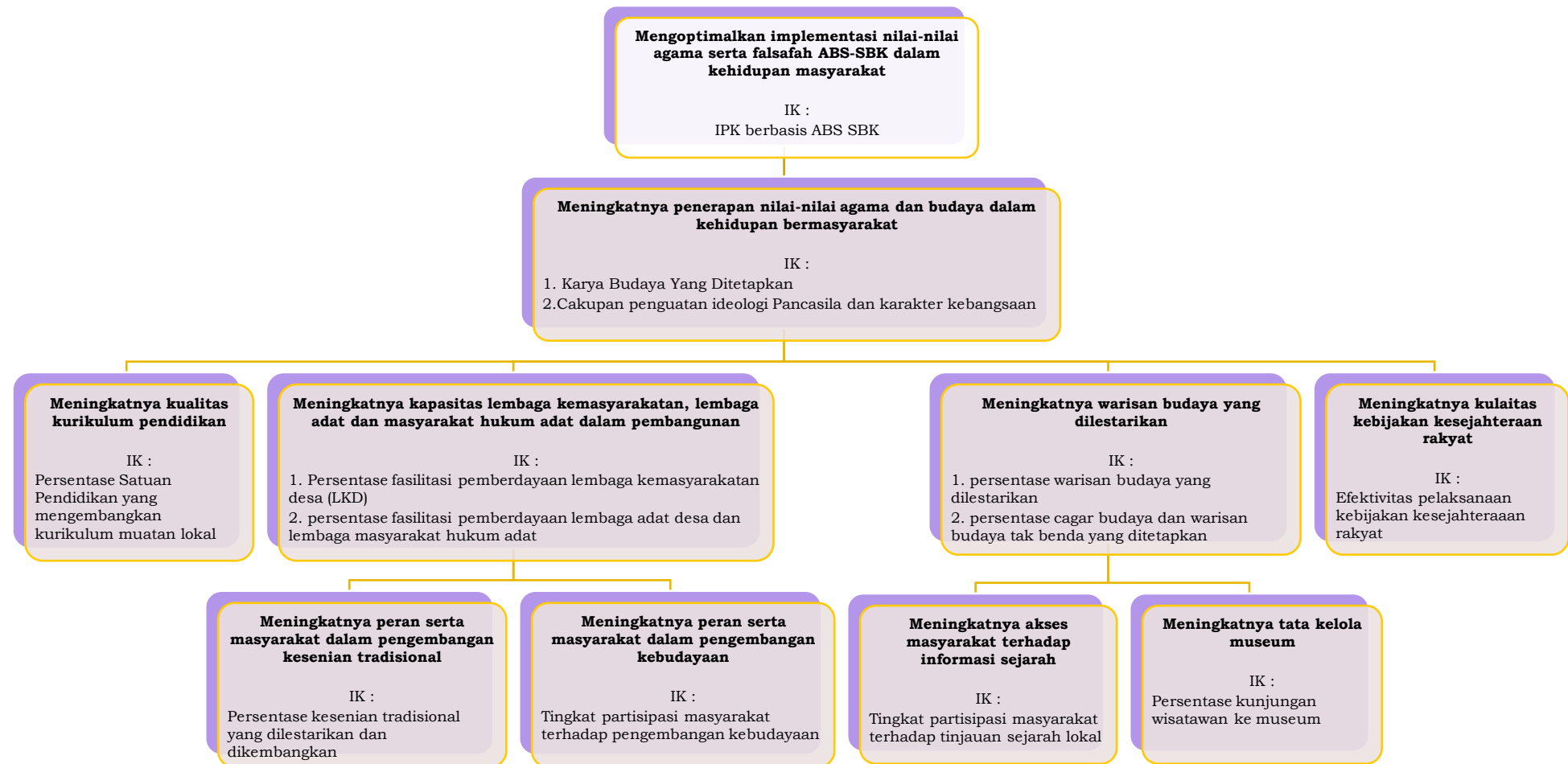
Bagan L3.12 Pohon Kinerja 3.3 **Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**



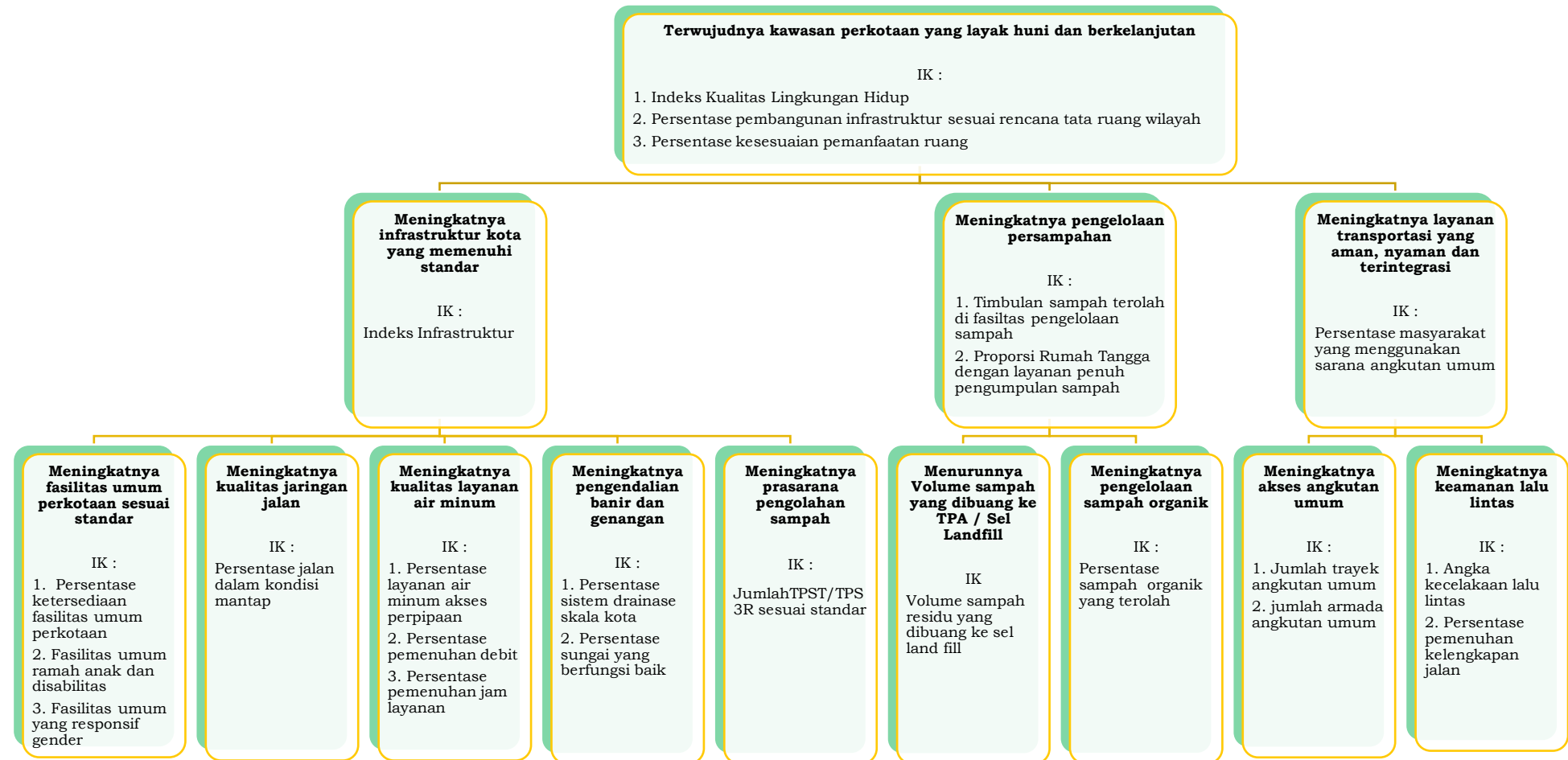
Bagan L3.13 Pohon Kinerja 3.4 **Terwujudnya Profesionalisme ASN**



Bagan L3.14 Pohon Kinerja 4 **Mengoptimalkan Implementasi Nilai-Nilai Agama serta Falsafah ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat**



Bagan L3.15 Pohon Kinerja 5 **Terwujudnya Kawasan Perkotaan yang Layak Huni dan Berkelanjutan**





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025**